



RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN TAPANULI UTARA
2025-2029

**BERSAMA MEWUJUDKAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
YANG MAJU, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

2025



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6942);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037 (Lembar Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
dan
BUPATI TAPANULI UTARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara-
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan berpedoman pada RPJP Nasional.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen Perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berpedoman pada RPJP Nasional.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
11. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode 1 (satu) tahunan.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang Kabupaten Tapanuli Utara yang mengatur struktur dan pola tata ruang daerah.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
19. Arah Kebijakan adalah penjabaran strategi dan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan yang dilaksanakan secara bertahap.
20. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
21. Kinerja adalah capaian dampak, hasil, dan keluaran dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
22. Kerangka Pendanaan adalah pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana, dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati serta target pembangunan nasional.
23. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
24. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
25. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menetapkan dokumen RPJM Daerah sebagai dokumen perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

(2) Peraturan daerah ini bertujuan untuk:

- a. menetapkan Visi, Misi dan Program pembangunan jangka menengah Daerah;
- b. menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran; dan
- c. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Sumatera Utara dan dengan kabupaten/kota yang berbatasan.

BAB III

PENDEKATAN RPJM Daerah

Pasal 3

- (1) RPJMD disusun menggunakan pendekatan perencanaan berorientasi proses, meliputi:
 - a. pendekatan teknokratik;
 - b. pendekatan partisipatif;
 - c. pendekatan politis; dan
 - d. pendekatan atas-bawah dan bawah-atas.
- (2) RPJMD disusun menggunakan pendekatan perencanaan berorientasi hasil, meliputi:
 - a. pendekatan holistik-tematik;
 - b. pendekatan integratif; dan pendekatan spasial.

BAB IV

KEDUDUKAN RPJM Daerah

Pasal 4

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah.
- (3) RPJM Daerah berpedoman pada RPJP Daerah, RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

SISTEMATIKA RPJM Daerah

Pasal 5

- (1) sistematika RPJM Daerah, meliputi:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
 - c. BAB III : VISI, MISI, TUJUAN, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
 - e. BAB V : PENUTUP.

- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian dari sistematika RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil RPJM Daerah ;
 - b. sinkronisasi antara RPJM Daerah dengan RPJP Daerah, RTRW, dan RPJM Nasional; dan
 - c. kesesuaian antara capaian RPJM Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - b. pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
 - c. hasil Rencana Pembangunan Daerah.
- (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJM Daerah

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJM Daerah dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.

- (2) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJM Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 8

Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung

pada tanggal 19 - 08 - 2025

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

diundangkan di Tarutung

pada tanggal 19 - 08 - 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

DAVID PARULIAN SIPAHUTAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 (1-62/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK

Pembina (IV/a)

NIP. 19770910 200604 2 004

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga dokumen *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025–2029* dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Rancangan Akhir RPJMD ini merupakan hasil proses panjang perencanaan yang diawali dari penyusunan rancangan teknokratik, konsultasi publik, penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Penyusunan dokumen ini juga melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah, serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang).

RPJMD ini mengusung visi: **“Bersama Mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara yang Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan”**, yang dijabarkan ke dalam misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan lima tahun ke depan. RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, penganggaran tahunan (RKPD, KUA-PPAS, dan APBD), serta alat evaluasi kinerja pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak, termasuk DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, tokoh masyarakat, serta seluruh warga masyarakat yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Semoga dokumen RPJMD ini dapat menjadi landasan yang kokoh bagi perwujudan pembangunan daerah yang lebih maju, merata, dan berkeadilan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.

Tarutung, 19 Agustus 2025,

BUPATI TAPANULI UTARA,



IONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	viii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-9
1.5. Sistematika Penulisan	I-10

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-1

2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II- 1
2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah	II-1
2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam.....	II-7
2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-12
2.1.4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	II-16
2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas	II-21
2.1.6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	II-23
2.1.7. Demografi	II-26
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-31
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi	II-31
2.2.2. Kesehatan untuk Semua	II-38
2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata	II-40
2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif	II-44
2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II-45
2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	II-46
2.3. Aspek Daya Saing Daerah	II-50
2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	II-50

2.3.2.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi ...	II-52
2.3.3.	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru.....	II-59
2.3.4.	Transformasi Digital	II-60
2.3.5.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global.	II-63
2.3.6.	Perkotaan dan Perdesaaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II-63
2.3.7.	Stabilitas Ekonomi Makro	II-65
2.4.	Aspek Pelayanan Umum	II-68
2.4.1.	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif.....	II-68
2.4.2.	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	II-69
2.4.3.	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	II-70
2.4.4.	Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar.....	II-71
2.4.5.	Urusan Pemerintahan Non Layanan Dasar.....	II-83
2.4.6.	Urusan Pilihan.....	II-101
2.4.7.	Penunjang Urusan.....	II-109
2.5.	Gambaran Keuangan Daerah	II-113
2.5.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	II-115
2.5.2.	Analisis Pendapatan Daerah.....	II-116
2.5.3.	Analisis Belanja Daerah	II-128
2.5.4.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Tapanuli Utara	II-140
2.5.5.	Kebijakan Pendapatan Daerah.....	II-141
2.5.6.	Kebijakan Belanja Daerah	II-142
2.5.7.	Kebijakan Pembangunan Daerah.....	II-144
2.5.8.	Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	II-144
2.5.9.	Proyeksi Pendapatan Daerah.....	II-146
2.5.10.	Proyeksi Belanja Daerah	II-153
2.5.11.	Proyeksi Pembiayaan Daerah	II-157
2.5.12.	Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	II-159
2.6.	Permasalahan dan Isu Strategis	II-160
2.6.1.	Permasalahan	II-160
2.6.2.	Isu Strategis	II-167

BAB III	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS.....	III-1
3.1.	Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran	III-1
3.2.	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-28
3.2.1.	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara	III-29
3.2.2.	Program Prioritas Daerah.....	III-37
3.3.	Program Unggulan dan Pengembangan Kewilayahan	III-84
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV-1
4.1.	Program Perangkat Daerah	IV-1
4.2.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-183
BAB V	PENUTUP.....	V-1
5.1.	Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.1.1.	Konsistensi Perencanaan dengan Pendanaan.....	V- 1
5.1.2.	Kerangka Pengendalian.....	V-2
5.1.3.	Mekanisme Perubahan	V-2
5.1.4.	Transisi Pemerintahan.....	V-3
5.2.	Mitigasi Risiko Pembangunan.....	V-3
5.3.	Kesimpulan.....	V-4
	DAFTAR PUSTAKA.....	xi
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

2.1.	Nama Dan Luas Wilayah Desa/Kelurahan Di Kabupaten Tapanuli Utara.....	II-2
2.2.	Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Tapanuli Utara.....	II-4
2.3.	Rencana Pola Ruang Kabupaten Tapanuli Utara 2017-2037	II-8
2.4.	Rencana Pengembangan Kawasan di Kabupaten Tapanuli Utara	II-9
2.5.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Tapanuli Utara	II-12
2.6.	Status Daya Dukung Air per Kecamatan.....	II-13
2.7.	Status Daya Dukung Pangan Per Kecamatan	II-15
2.8.	Indikator Pengelolaan Sampah	II-22
2.9.	Rekapitulasi Bahaya di Kabupaten Tapanuli Utara	II-24
2.10.	Kelas Kerentanan Bencana di Kabupaten Tapanuli Utara ...	II-24
2.11.	Kelas Kapasitas Bencana di Kabupaten Tapanuli Utara	II-25
2.12.	Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara menurut Jenis Kelamin	II-26
2.13.	Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara menurut Kecamatan	II-26
2.14.	Proyeksi Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara menurut Jenis Kelamin (Jiwa)	II-28
2.15.	Proyeksi Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara menurut Kelompok Usia (Jiwa).....	II-29
2.16.	Proyeksi Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan (Jiwa/km ²)	II-29
2.17.	Proyeksi Sex Ratio dan Dependency Ratio	II-30
2.18.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Menurut Sektor Perekonomian (%)	II-32
2.19.	Kontribusi PDRB Menurut Sektor Perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara (%)	II-33
2.20.	Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Pengeluaran (Rp Miliar)	II-34
2.21.	Capaian Indeks Kerukunan Beragama	II-45
2.22.	Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan	II-45
2.23.	Indikator Perbankan dan Pasar Modal	II-56
2.24.	Angkatan Kerja menurut Jenjang Pendidikan.....	II-57
2.25.	Angkatan Kerja menurut Jenjang Pendidikan.....	II-61
2.26.	Capaian Indikator Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	II-63
2.27.	Capaian Persentase Desa Mandiri.....	II-65
2.28.	Inflasi Menurut Jenis Pengeluaran Kota Padang Sidimpuan Tahun 2020-2024	II-67

2.29. Indikator Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	II-68
2.30. Indikator Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	II-70
2.31. Capaian Kinerja Pendidikan	II-73
2.32. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara.....	II-76
2.33. Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara	II-76
2.34. Capaian Kinerja Kesehatan	II-77
2.35. Capaian indikator kinerja urusan kesehatan pada RSUD Tarutung.....	II-78
2.36. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-79
2.37. Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-80
2.38. Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	II-81
2.39. Capaian Kinerja Urusan Sosial	II-82
2.40. Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja	II-83
2.41. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-84
2.42. Capaian Kinerja Urusan Pangan	II-86
2.43. Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup.....	II-87
2.44. Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-88
2.45. Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-89
2.46. Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-90
2.47. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan	II-91
2.48. Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika.....	II-92
2.49. Capaian Kinerja Urusan Pertanahan	II-93
2.50. Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	II-93
2.51. Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal	II-95
2.52. Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga	II-96
2.53. Capaian Kinerja Urusan Statistik	II-97
2.54. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan	II-98
2.55. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan	II-99
2.56. Capaian Indikator Urusan Kearsipan	II-100
2.57. Perkembangan Produksi Ikan	II-101

2.58. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata	II-102
2.59. Capaian Kinerja Pertanian.....	II-103
2.60. Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi dan Palawija.....	II-103
2.61. Produksi dan Produktivitas Perkebunan	II-104
2.62. Produksi dan Produktivitas Hortikultura	II-105
2.63. Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	II-106
2.64. Populasi dan Produksi Peternakan	II-107
2.65. Capaian Kinerja Perdagangan.....	II-108
2.66. Capaian Kinerja Perindustrian.....	II-109
2.67. Capaian Kinerja Transmigrasi	II-109
2.68. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan	II-110
2.69. Capaian Kinerja Urusan Keuangan.....	II-110
2.70. Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	II-111
2.71. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengawasan.....	II-112
2.72. Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah	II-113
2.73. Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Rp Miliar)	II-118
2.74. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024 (Rp)	II-130
2.75. Keseluruhan Struktur Biaya Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 - 2024	II-132
2.76. Surplus (Defisit) Riil Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 (Rp Miliar).....	II-138
2.77. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2026-2030 (Rp).....	II-148
2.78. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2026-2030(Rp).....	II-155
2.79. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2026-2030 (Rp)	II-158
2.80. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara....	II-160
2.81. Permasalahan Pembangunan berdasarkan Urusan Pemerintahan	II-163
2.82. Capaian TPB Kabupaten Tapanuli Utara	II-184
2.83. Proyeksi Target Capaian TPB	II-186
2.84. Capaian TPB Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024	II-193
2.85. Permasalahan dan Isu Strategis Global-Nasional -Regional-Kabupaten Tapanuli Utara	II-194

3.1.	Misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029	III-2
3.2.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029	III-8
3.3.	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Sasaran Pokok.....	III-14
3.4.	Penyelarasan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Dengan RPJMN Dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara	III-27
3.5.	Tabel Penahapan Pembangunan RPJMD Tapanuli Utara 2025-2029	III-35
3.6.	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029	III-38
3.7.	Keterkaitan TPB/SDGs dengan Program Prioritas Daerah .	III-57
3.8.	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029	III-76
3.9.	Indikator Kinerja Urusan Kesehatan pada RSUD Tarutung Tahun 2020-2024.....	III-101
3.10.	Tabel Indikator Kunjungan Pasien	III-102
4.1.	Program Perangkat Daerah.....	IV-2
4.2.	Dukungan Program Daerah terhadap Kegiatan Utama dalam RPJMN 2025 – 2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029	IV-42
4.3.	Dukungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Terhadap PHTC Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029	IV-44
4.4.	Dukungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terhadap Program Prioritas/Proyek Strategis Daerah (PSD) RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 .	IV-184
4.5.	Penyelarasan Indikator Makro Sasaran Utama Pembangunan RPJMN ,RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029	IV-186
4.6.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2030	IV-186
4.7.	Indikator Kinerja Daerah (IKD).....	IV-198
4.8.	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2030	IV-200

DAFTAR GAMBAR

1.1.	Hubungan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.....	I-7
2.1.	Peta Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara	II-3
2.2.	Klimatologi Kabupaten Tapanuli Utara	II-5
2.3.	Wilayah Ekoregion di Kabupaten Tapanuli Utara	II-7
2.4.	Peta Pola Ruang Kabupaten Tapanuli Utara	II-9
2.5.	Peta Status Daya Dukung Air di Kabupaten Tapanuli Utara	II-14
2.6.	Peta Status Daya Dukung Pangan di Kabupaten Tapanuli Utara	II-15
2.7.	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara	II-16
2.8.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	II-17
2.9.	Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh/Kapita)	II-18
2.10.	Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	II-19
2.11.	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (%)	II-19
2.12.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	II-20
2.13.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%).....	II-21
2.14.	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tapanuli Utara	II-22
2.15.	Distribusi Penduduk menurut Kelompok Usia.....	II-24
2.16.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara ...	II-25
2.17.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (%)	II-28
2.18.	Persentase Kemiskinan Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Maret) (%).....	II-32
2.19.	Gini Ratio Kabupaten Tapanuli Utara , Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Maret).....	II-32
2.20.	TPT Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Agustus) (%)	II-33
2.21.	IPM Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional.....	II-34
2.22.	Usia Harapan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional	II-35
2.23.	Prevalensi Stunting Kabupaten Tapanuli Utara (%)	II-36

2.24.	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Tahun).....	II-37
2.25.	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Tahun)	II-38
2.26.	Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%).....	II-40
2.27.	Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	II-42
2.28.	Indeks Perlindungan Anak (Poin)	II-43
2.29.	Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)	II-43
2.30.	Indeks Pembangunan Gender (Poin).....	II-44
2.31.	Indeks Pemberdayaan Gender (Poin)	II-45
2.32.	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tapanuli Utara	II-46
2.33.	Rasio Ketergantungan Penduduk (Per 100 Penduduk)	II-47
2.34.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp Juta/Kapita)	II-48
2.35.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)...	II-48
2.36.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	II-49
2.37.	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	II-50
2.38.	Rasio Kewirausahaan (%).....	II-52
2.39.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%).....	II-53
2.40.	Proporsi Angkatan Kerja Perguruan Tinggi (%)	II-53
2.41.	Indeks Inovasi Daerah	II-58
2.42.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau (%)	II-59
2.43.	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%).....	II-60
2.44.	Inflasi Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional	II-64
2.45.	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 dan 2024	II-65
2.46.	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tapanuli Utara	II-66
2.47.	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Tapanuli Utara.....	II-106
2.48.	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 (Rp Miliar)	II-107
2.49.	Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 (%).....	II-109
2.50.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024(Rp Miliar).....	II-111
2.51.	Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024.....	II-112

2.52.	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 (Rp Miliar)	II-113
2.53.	Realisasi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024	II-114
2.54.	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024.....	II-115
2.55.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 (Rp Miliar)	II-116
2.56.	Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 (Rp Miliar)	II-116
2.57.	Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Transfer Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024	II-117
2.58.	Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 (Rp Miliar)	II-119
2.59.	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024	II-121
2.60.	Struktur Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 (%)	II-125
2.61.	Pergerakan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 (Rp Miliar) ...	II-126
2.62.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 (Rp Miliar)	II-127
2.63.	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 (Rp Miliar)	II-129
2.64.	Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 (%).....	II-157
2.65.	Isu Strategis Global Jangka Menengah	II-160
2.66.	Isu Strategis Global Jangka Menengah	II-168
2.67.	Isu Strategis Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 ..	II-174
2.68.	Persentase status ketercapaian TPB Kabupaten Tapanuli Utara.....	II-177
2.69.	Capaian TPB Kabupaten Tapanuli Utara Berdasarkan Pilar	II-177
2.70.	Status Capaian Indikator di Kabupaten Tapanuli Utara	II-203
2.71.	Capaian TPB Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024	II-177
2.72.	Persentase Status Ketercapaian TPB Kabupaten Tapanuli Utara terhadap target.....	II-177
3.1.	Pohon Kinerja Misi 1 Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	III-22

3.2.	Pohon Kinerja Misi 2 Memajukan Ekonomi Melalui Pertanian yang Maju dan berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi	III-23
3.3.	Pohon Kinerja Misi 3 Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata. Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan	III-23
3.4.	Pohon Kinerja Misi 4 Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kelestarian Lingkungan dan Tanggap Risiko Bencana	III-24
3.5.	Pohon Kinerja Misi 5 Penerapan Kajian Budaya dan Kearifan Lokal Mulai dari Pendidikan Dasar untuk Memperkuat Karakter Terbaik Masyarakat sehingga Mampu Meminimalisir Efek Negatif Arus Cepat Informasi dan Media Sosial	III-24
3.6.	Pohon Kinerja Misi 6 Pengembangan Kebudayaan Berdasarkan Kekayaan Budaya dan Kearifan Lokal.....	III-25
3.7.	Pohon Kinerja Misi 7 Memperkuat Reformasi Birokrasi. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan	III-25
3.8.	Menjadikan Desa Mandiri yang Mampu Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Tersedia	III-26
3.9.	Meningkatkan Pelestarian Lingkungan serta Peningkatan Upaya Penanggulangan Mitigasi dan Bencana	III-26
3.10.	Misionaris Dr. Ingwer Ludwig Nommensen dan Destinasi Wisata Salib Kasih	III-101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan haruslah diartikan sebagai suatu proses multi dimensi yang tidak dapat dipisahkan dengan proses perencanaan. Oleh karenanya, pemerintah daerah harus menyusun perencanaan pembangunan dengan memperhatikan kedudukan daerah sebagai daerah otonom dan posisi daerah sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kaitan ini, rencana pembangunan daerah tidak hanya dilihat sebagai rencana pembangunan untuk kepentingan daerah saja, akan tetapi memiliki arti yang lebih luas, yaitu untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Salah satu bentuk perencanaan pembangunan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Ketentuan mengenai penyusunan RPJMD tersebut, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk menjamin sinergitas perencanaan, RPJMD disusun berdasarkan



pendekatan partisipatif, teknokratif, politis, serta top-down dan bottom-up, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selanjutnya, dokumen RPJMD dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025–2029 merupakan salah satu amanat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. RPJMD berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun, yang menjadi pedoman sekaligus arah kebijakan pembangunan bagi seluruh perangkat daerah. Dokumen ini tidak hanya memuat visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Pada tahun 2025, Kabupaten Tapanuli Utara memasuki babak baru kepemimpinan seiring dengan pelantikan Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara periode 2025–2030. Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15P dan 24P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025–2030, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025–2030. Dengan demikian, pasangan kepala daerah yang baru memiliki legitimasi penuh untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kabupaten Tapanuli Utara.

Sebagai tindak lanjut dari proses pelantikan tersebut, penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 menjadi langkah strategis yang harus segera dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar visi, misi, dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan pembangunan daerah yang jelas, terarah, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. RPJMD ini juga menjadi sarana untuk mengintegrasikan arah pembangunan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025–2029, sehingga tercipta sinergi antara pembangunan nasional, provinsi, dan daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025–2029 didorong oleh berbagai tantangan dan dinamika pembangunan. Kabupaten Tapanuli Utara dihadapkan pada isu-isu strategis, antara lain peningkatan kualitas pendidikan dan



kesehatan, pemerataan pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan daerah, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Selain itu, perkembangan global dan regional juga menuntut adanya adaptasi kebijakan yang mampu menjawab perubahan iklim, transformasi digital, serta tuntutan keberlanjutan lingkungan.

Oleh karena itu, RPJMD Tahun 2025–2029 tidak hanya disusun sebagai dokumen formal perencanaan, tetapi juga sebagai kontrak sosial antara pemerintah daerah dengan masyarakat Tapanuli Utara. Melalui RPJMD ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan secara partisipatif, inklusif, dan berkeadilan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Lebih jauh, RPJMD akan menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Dengan adanya RPJMD yang visioner, realistis, dan berbasis data, diharapkan pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara dalam lima tahun ke depan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu membawa masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dengan latar belakang tersebut, penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025–2029 merupakan langkah fundamental untuk mewujudkan visi pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si. dan Wakil Bupati Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., sekaligus menjadi pondasi strategis dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara menuju lima tahun ke depan.

Dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah dan mendukung pencapaian pembangunan nasional, maka keberadaan dokumen RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 perlu dilakukan penyelarasan dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini dimaksudkan bahwa RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita serta 17 (Tujuh belas) Program Prioritas dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Selain itu, RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran tahapan periode pertama RPJPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045. RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 juga disusun dengan memperhatikan RTRW Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037 untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana



struktur ruang, rencana pola ruang, arahan kawasan strategis, serta indikasi program pemanfaatan ruang.

RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 juga mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara untuk menjamin bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD tahun 2026 hingga tahun 2029 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah. Dokumen RPJMD juga menjadi acuan dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah. Dokumen RPJMD juga akan menjadi acuan bagi DPRD dan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 berpedoman pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan yuridis dan praktis. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 26. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
 27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum



Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77);
37. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 929);
38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
39. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara



Tahun 2023 Nomor 16);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Nomor 152 Tahun 2017);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 Nomor 3).
42. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 Nomor 4).

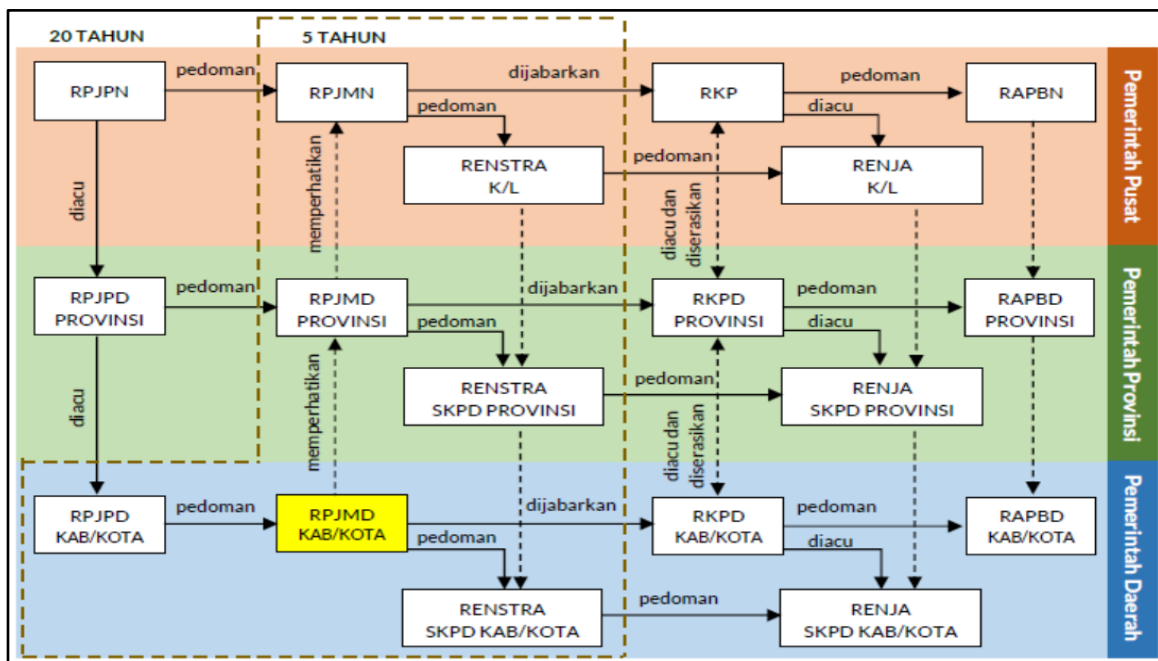
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, di samping berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037, serta hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019–2024. Selain dokumen-dokumen perencanaan di atas, perlu juga memperhatikan dokumen rencana pembangunan yang relevan, seperti agenda pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025–2029 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Adapun keterkaitan antara RPJMD dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut.





Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 1.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah dan menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 agar terarah, terpadu dan berkesinambungan, sedangkan tujuan dari disusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah, melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara untuk 5 (lima) tahun ke depan dan selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

4. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara selama periode 2025-2029.
5. Menjadi tolok ukur dan instrumen bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
6. Menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 yang sekaligus memuat keterkaitan antar bab mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang terdiri atas 5 (lima) BAB, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Gambaran umum daerah menjelaskan beberapa aspek, diantaranya adalah: (1) Aspek geografi dan demografi, (2) Aspek kesejahteraan masyarakat, (3) Aspek daya saing daerah, serta (4) Aspek pelayanan umum. Selain itu, menjelaskan gambaran keuangan daerah dan berbagai permasalahan pembangunan serta isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 disertai dengan tujuan dan sasaran RPJMD. Selain itu, menjelaskan berbagai strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.



Di samping itu, bab ini juga menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terkait target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan secara substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian serta evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Kabupaten Tapanuli Utara sebagai salah satu daerah otonomi di Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi sumber daya yang cukup besar yang harus dikembangkan untuk mewujudkan tujuan utama dalam peningkatan kesejahteraan Masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah secara keseluruhan dengan memanfaatkan posisi geografis dan potensi demografi (sumber daya manusia) serta mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan factor-faktor lingkungan strategis lainnya. Berdasarkan beberapa aspek dapat diuraikan secara ringkas gambaran umum Kabupaten Tapanuli Utara.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi Kabupaten Tapanuli Utara meliputi gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Gambaran kondisi aspek demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi, dan populasi penduduk. Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Tapanuli Utara menggambarkan mengenai luas dan batas wilayah Administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan serta potensi penggunaan lahan.

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Tapanuli Utara terletak di wilayah dataran tinggi Sumatera Utara pada ketinggian antara 150-1.700 meter di atas permukaan laut. Secara geografis letak Kabupaten Tapanuli Utara diapit atau berbatas langsung dengan lima kabupaten yaitu, di sebelah Utara berbatasan dengan Labuhan

Batu Utara, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Humbang Hasudutan dan Tapanuli Tengah.

Secara astronomis Kabupaten Tapanuli Utara berada pada posisi 1°20'-2°41' Lintang Utara dan 98°05'-99°16' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Tapanuli Utara adalah 3.800,31 Km² yang terdiri dari luas daratan 3.793,71 km² dan perairan Danau Toba seluas 6,60 Km². Perhitungan luasan ini didasarkan pada amanat undang-undang Nomor 9 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasudutan, yang mengamanatkan bahwa Kabupaten Tapanuli Utara di mekarkan menjadi Kabupaten



Tapanuli Utara dan Humbang Hasudutan.

Perkembangan wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Utara mengikuti dinamika kehidupan sosial ekonomi dan perpolitikan di Indonesia. Secara administratif pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 241 desa sebagaimana pada tabel 2.1.

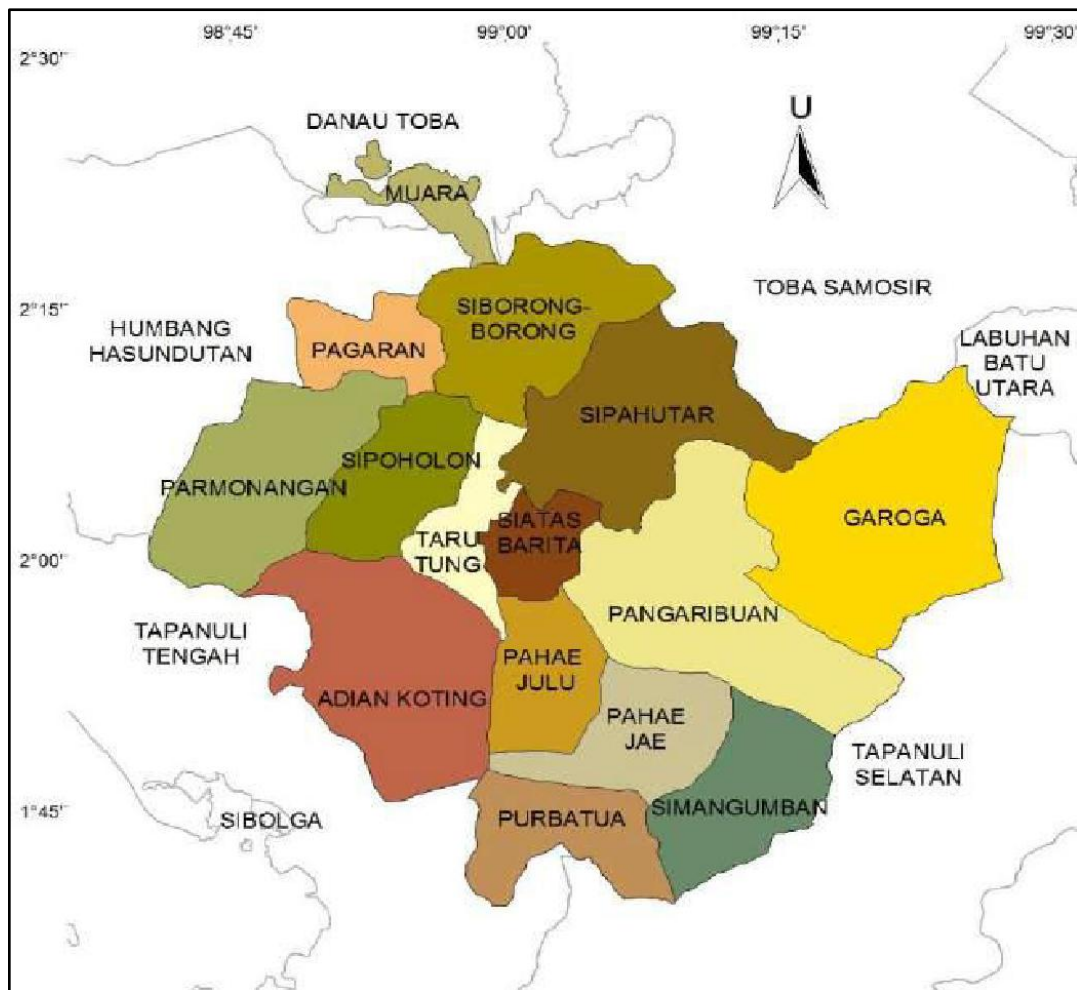
Tabel 2.1. Nama Dan Luas Wilayah Desa/Kelurahan Di Kabupaten Tapanuli Utara

No	Kecamatan	Ibu Kota	Desa	Kelurahan	Luas Wilayah (Km)	% Total Luas
1	Parmonangan	Parmonangan	14	-	257,35	6,78
2	Adiankoting	Adiankoting	16	-	502,9	13,26
3	Sipoholon	Sipoholon	13	1	189,2	4,99
4	Tarutung	Tarutung	24	7	107,68	2,84
5	Siatas Berita	Siatas Berita	12	-	92,92	2,45
6	Pahea Julu	Onan Hasana	18	1	165,9	4,37
7	Pahea Jae	Sarulla	12	1	203,2	5,36
8	Purbatua	Parsaoran Janji Angkola	11	-	191,8	5,06
9	Simangumban	Simangumban	8	-	150,00	3,95
10	Pangaribuan	Pangaribuan	26	-	459,25	12,10
11	Garoga	Garoga	13	-	567,58	14,96
12	Sipahutar	Sipahutar	25	-	408,22	10,76
13	Siborongborong	Siborongborong	20	1	279,91	7,38
14	Pagaran	Sipultak	14	-	138,05	3,64
15	Muara	Muara	15	-	79,75	2,10
Jumlah			241	11	3,793.71	100

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Kecamatan Garoga menjadi kecamatan terluas dari 15 kecamatan yang ada yaitu sekitar 567,58 Km² atau 14,96 persen dari luas Kabupaten dan Kecamatan yang terkecil luasnya adalah Kecamatan Muara sekitar 79,75 Km² atau 2,10 persen. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki bentang alam dengan struktur alam yang melintasi pegunungan Bukit Barisan, memanjang dari Utara ke Selatan Provinsi Sumatera Utara. Gambar peta wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada gambar berikut.





Gambar 2.1. Peta Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara
Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Tapanuli Utara

Topografi

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki topografi berbukit dan berlembang dengan suhu antara 12°C -28 °C. kondisi geografis yang berada pada ketinggian 150-1.700 meter di atas permukaan laut menjadikan wilayah ini sebagai kawasan pertanian dan agrobisnis dengan potensi pengembangan yang cukup besar. Secara keseluruhan beberapa wilayah kecamatan berada pada ketinggian dengan kisaran < 1.500 mdpl (Kecamatan Muara, Pangaribuan, Sipahutar, Siatas Baria, Pagaragan dan Siborongborong).

Sementara itu kecamatan yang bersebelahan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Memiliki ketinggian yang lebih rendah, yaitu kecamatan Parmonangan, Adiankoting, Purbatua, Pahae Jae dan sebagian besar Simangumban. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam, yaitu daerah datar sebesar 3,16 persen, daerah landai sebesar 26,86 persen dan daerah miring sebesar 3,16 persen dan daerah terjal 44,35 persen.

Pemanfaatan curah hujan untuk mengairi lahan pertanian di kabupaten Tapanuli Utara melalui irigasi di dukung oleh keberadaan beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada di wilayah ini.

Tabel 2.2. Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Tapanuli Utara

No	Kecamatan	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (Km ²)
1	Sipoholon	Batang Toru, Kolang	18.920
2	Pangaribuan	Bilah, Batang Toru	45.925
3	Adiankotting	Batang Toru, Kolang	50.290
4	Sipahutar	DTA Danau Toba, Batang Toru	40.822
5	Garoga	Bilah, Batang Toru	56.758
6	Tarutung	Batang Toru	10.768
7	Simangumban	Batang Toru	15.000
8	Purbatua	Batang Toru	19.180
9	Pahae Jae	Batang Toru	20.320
10	Pahae Julu	Batang Toru	16.590
11	Siborongborong	DTA Danau Toba, Batang Toru	27.991
12	Siatas Barita	Batang Toru	9.292
13	Parmonangan	Batang Toru, sibundong, Kolang	25.735
14	Pagaran	Batang Toru, Sibundong	13.805
15	Muara	DTA. Danau Toba	7.975

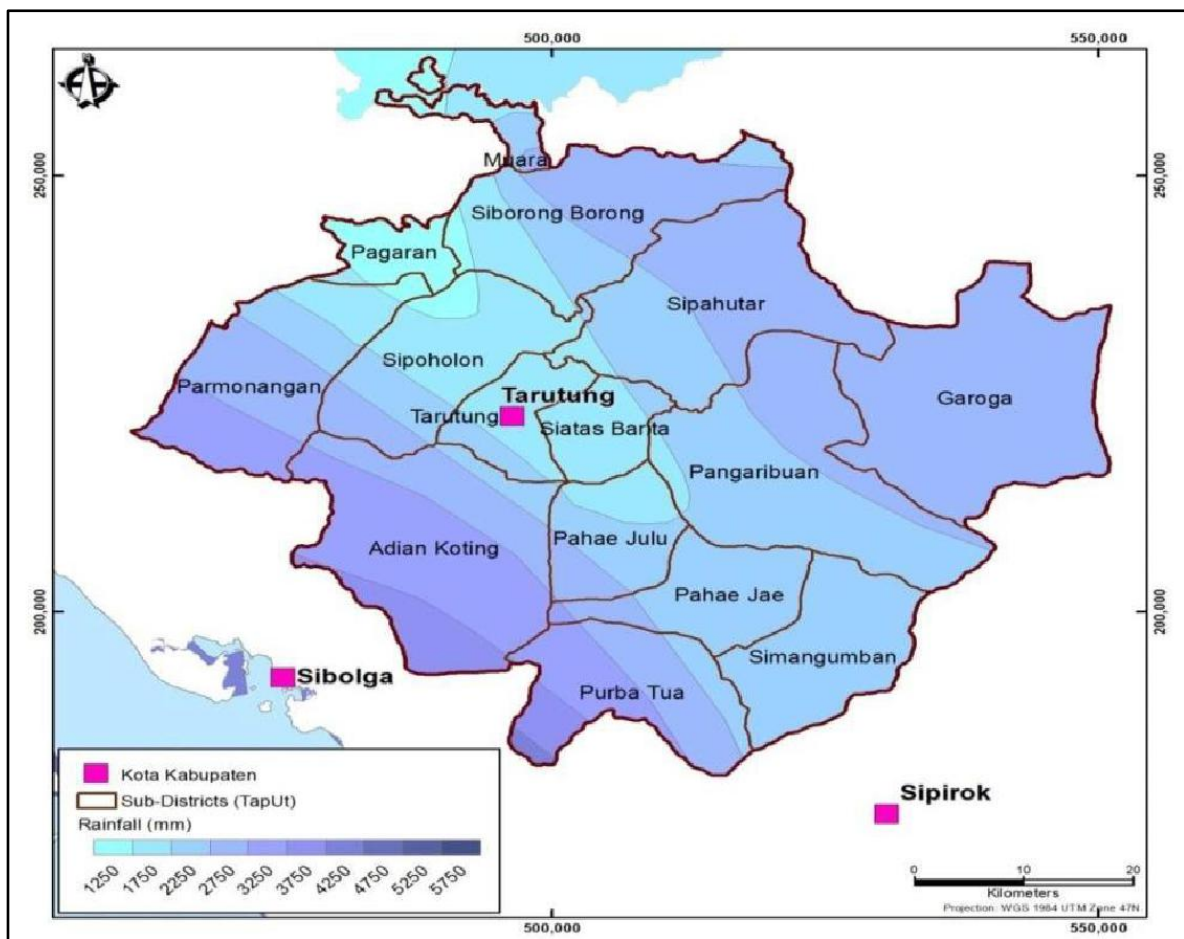
Sumber: Buku Putih Sanitasi Kab. Tapanuli Utara

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki nilai yang sangat strategis karena terletak di wilayah hulu yang merupakan sumber air untuk kabupaten/kota di sekitarnya. Terdapat enam daerah aliran sungai utama di Kabupaten Tapanuli Utara. DAS kecil di Toba bagian utara mengalir ke Danau Toba, tiga daerah aliran sungai di sebelah barat (Sorkam, Aek Raisan dan Sipansihaporos) mengalir ke Samudera Hindia melalui Kabupaten Tapanuli Tengah, sedangkan DAS Bila di sebelah Timur mengalir ke Selat Malaka. DAS terbesar di Kabupaten Tapanuli Utara (Batang Toru) meliputi dua pertiga dari wilayah kabupaten dan mengalir ke Kabupaten Tapanuli Selatan.

Uraian tentang klimatologi bermanfaat untuk mengenali tingkat pengaruh iklim terhadap fungsi ruang yang akan ditetapkan. Guna melakukan analisis daya dukung lahan, klimatologi dijadikan kriteria penilaian tingkat kesesuaian unit lahan. Beberapa variabel yang mempengaruhi kondisi klimatologi suatu daerah di antaranya

adalah besaran curah hujan, kondisi atau tingkat suhu udara rata-rata, tingkat kelembaban udara dan intensitas penyinaran matahari. Secara umum iklim tergolong ke dalam daerah beriklim tropis (karena berada dekat garis khatulistiwa) yang mempunyai musim kemarau dan musim penghujan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara, sebagian besar daerah atau kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara memiliki curah hujan rata-rata sekitar 100-200 mm/tahun. Hanya sebagian kecil yang mengalami curah hujan dengan rentang antara 200-300 mm/tahun. Suhu udara kisaran maksimum 29°C, minimum 17°C serta kelembaban udara rata-rata 85,04 %. Kondisi iklim di Tapanuli Utara sangat dipengaruhi oleh posisinya yang dekat dengan pegunungan Bukit Barisan di sebelah Barat.



Gambar 2.2. Klimatologi Kabupaten Tapanuli Utara
Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Tapanuli Utara

Geologi

Secara umum kondisi geologi Kabupaten Tapanuli Utara didominasi oleh jenis batuan sedimen aluvium muda dan alluvium tua. Berdasarkan hasil analisis peta geologi yang dikeluarkan pusat penelitian dan pengembangan Geologi, Kabupaten Tapanuli Utara dan sekitarnya tergolong ke dalam tipe formasi pematang yang terdiri

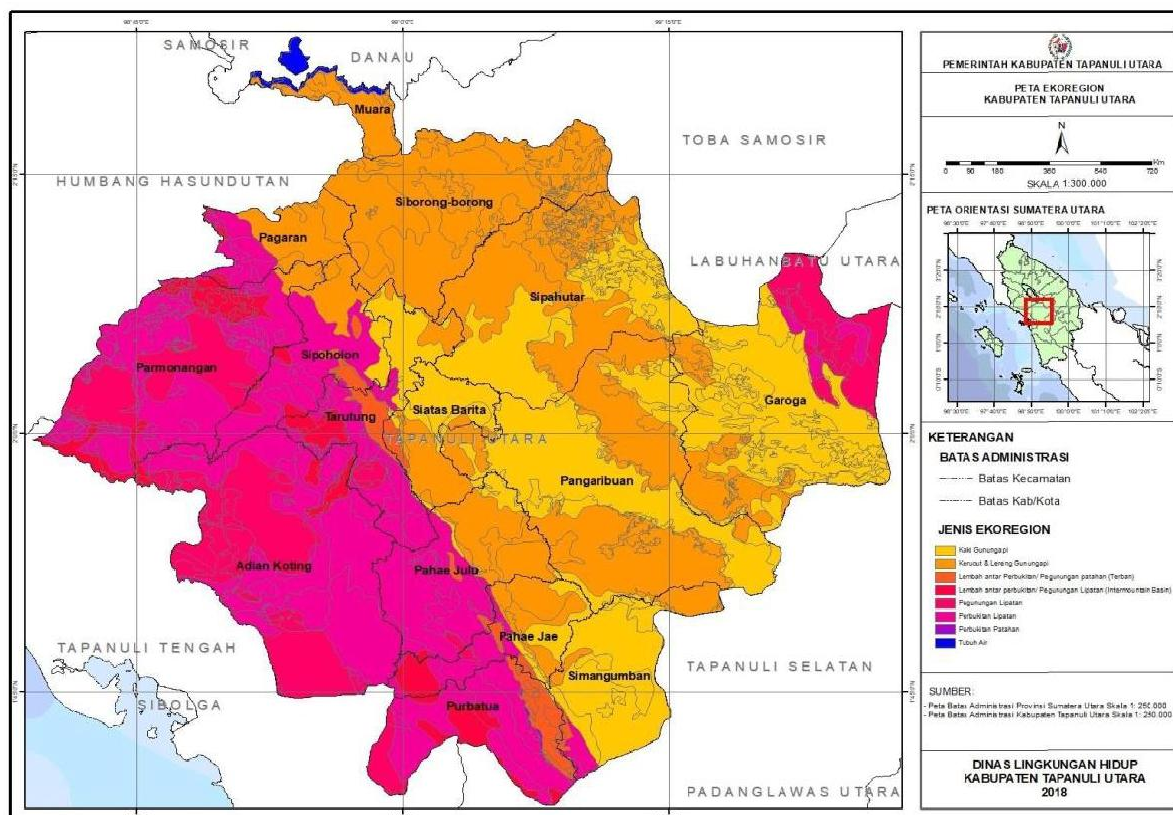
dari komposisi serpih merah dan serpih berkarbon, batu bara, batu lanau pesisir dan konglomerat breksi.

Hasil penelitian beberapa ahli menunjukkan bahwa formasi geologi kabupaten Tapanuli Utara adalah perairan antara masa tertier dan masa kwartier yaitu pada letusan Gunung Toba, dimana letusan gunung ini menghasilkan batuan yang didominasi oleh *liparitsche effusifa* yang menghasilkan tanah dengan jenis podsolik yang sangat peka terhadap erosi. Keadaan batuan yang bervariasi di Kabupaten Tapanuli Utara merupakan potensi yang cukup baik sebagai salah satu bahan pembentuk batuan sumber daya mineral.

Selain itu, Kabupaten Tapanuli Utara berada di situs geologi yang terdapat di kawasan Geopark Kaldera Toba terdiri dari 16 situs geologi utama yang dapat menceritakan tema Geopark Kaldera Toba sebagai Supervolcano. Penyebaran situs geologi utama yang ada di Kawasan Geopark Kaldera Toba tersebut berada di 7 Kabupaten yang memiliki lintas geopark yang terhubung satu dengan yang lainnya, yaitu di situs HUT Hutaginjang-Muara Rentetan dinding Kaldera Supervolcano Toba juga dikenal sebagai Kaldera Sibandang yang menghasilkan Tuf Toba termuda dan situs MUS Muara Sibandang, *Post-Calderic Volcanism* kubah-kubang tertutup dikestrusi di bagian Selatan-Barat Danau Toba melalui beberapa sesar yang berada di Kecamatan Muara.

Ekoregion

Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integrasi system alam dan lingkungan hidup. Secara umum, ecoregion Tapanuli Utara di dominasi oleh jenis ekoregion kerucut dan lerengan gunung api yang hamper mencapai luasan sebesar 121.613,21 Ha atau sekitar 31,99 % dari keseluruhan luas Kabupaten Tapanuli Utara. Ekologion kerucut dan lereng gunung api sebagai besar terdapat di Kecamatan Siborongborong (32.375,27 Ha), Kecamatan Pangaribuan (26.125,91 Ha), dan Kecamatan Sipahutar (21.152,16 Ha).



Gambar 2.3. Wilayah Ekoregion di Kabupaten Tapanuli Utara

Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Tapanuli Utara

Pola ruang meliputi Kawasan lindung dan kawasan budidaya pada RTRW Kabupaten Tapanuli Utara menyisihkan sekitar 37,1 % wilayahnya sebagai kawasan lindung dan sisanya diperuntukkan sebagai Kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi hutan lindung, hutan suaka alam, dan Kawasan lindung setempat. Kawasan budidaya meliputi hutan produksi, hutan produksi terbatas, lahan kering, lahan basa, perkebunan, hortikultura dan permukiman.

2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Pola ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya pada RTRW Kabupaten Tapanuli Utara menyisihkan sekitar 37,1 persen wilayahnya sebagai kawasan lindung dan sisanya diperuntukkan sebagai kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi hutan lindung, hutan suaka alam dan kawasan lindung setempat. Kawasan budidaya meliputi hutan produksi, hutan produksi terbatas, lahan kering, lahan basa, perkebunan, hortikultura dan permukiman. Rencana pola ruang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Rencana Pola Ruang Kabupaten Tapanuli Utara 2017-2037

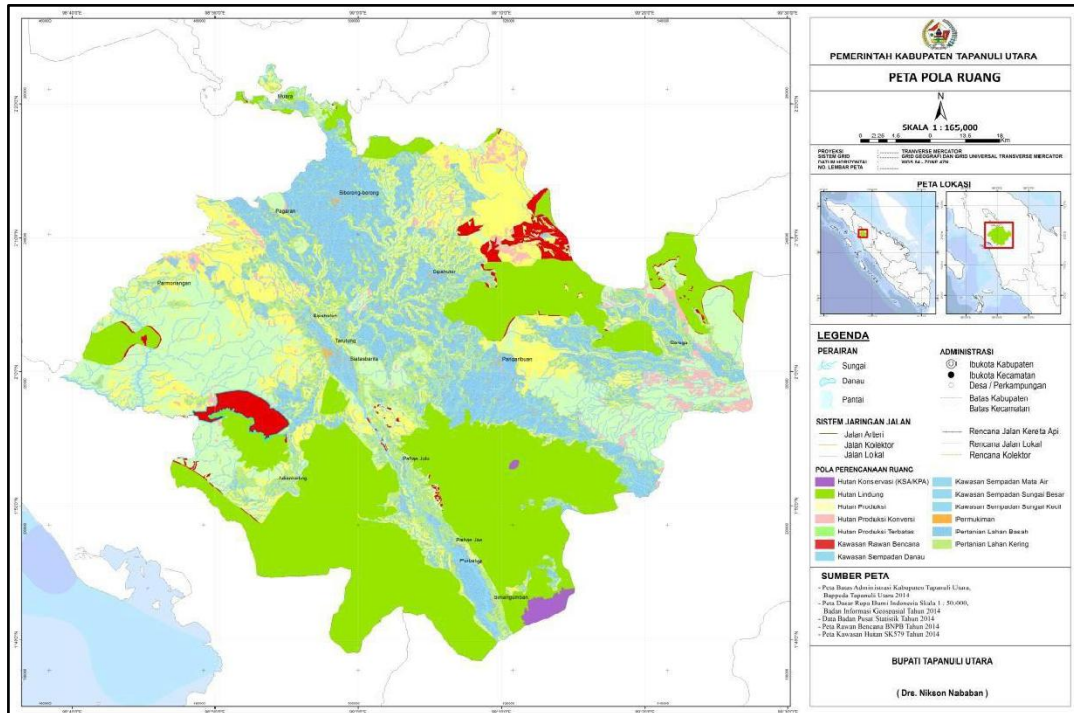
Pola	Rencana Tata Guna Lahan	Luas (ha)
Lindung	Hutan Lindung	127.994,23
Lindung	Hutan Suaka Alam	2.208,28
Lindung	Setempat	10.575,14
Sub Total		140.777,65
Budidaya	Hutan Produksi	22.449,78
Budidaya	Hutan Produksi Terbatas	59.338,05
Budidaya	Lahan Kering	67.370,74
Budidaya	Lahan Basah	13.924,41
Budidaya	Perkebunan	30.583,82
Budidaya	Hortikultura	36.255,28
Budidaya	Pemukiman	8.671,28
Sub Total		238.593,36
TOTAL		379.371,01

Sumber: RTRW Kabupaten Tapanuli Utara.

Potensi pengembangan wilayah dilihat dari potensi geografis, penduduk, ekonomi wilayah, sektor andalan, sektor penduduk, sektor investasi, keuangan dan pembiayaan serta sektor transportasi dengan pendekatan kebijakan per wilayah.

Kebijakan perwilayahan didasarkan atas efektivitas pembangunan di seluruh daerah ini dan untuk menyelaraskan pembangunan berbagai sektor andalan yang akan dikembangkan di wilayah Kecamatan agar pengembangannya tidak tumpang tindih satu sama lain, sehingga potensi yang dimiliki masing-masing kecamatan dapat dikembangkan secara optimal dan terintegrasi. Pengembangan potensi secara spesial dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapanuli Utara, dimana kebijakan penataan ruang wilayah secara kewilayahan diarahkan menjadi lima pusat pelayanan, yaitu:

1. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP), mencakup kawasan perkotaan tarutung.
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), mencakup perkotaan Siborongborong
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), mencakup kawasan perkotaan Pangaribuan dan Pahae Jae.
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), mencakup pusat permukiman Kecamatan Pahae Julu, Purbatua, Simangumban, Garoga, Sipahutar, muara, Pagaran, Sipoholon, Siatas Barita, Adiankoting, dan Parmonangan.
5. Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN), meliputi Kawasan Danau toba dan sekitarnya.



Gambar 2.4. Peta Pola Ruang Kabupaten Tapanuli Utara
Sumber: RTRW Kabupaten Tapanuli Utara 2017-2037

Selain pusat pelayanan tersebut, di daerah ini dikembangkan pola pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan untuk kawasan lindung dan kesesuaian lahan yang diarahkan untuk budidaya (kegiatan perkotaan dan pertanian) serta pengembangan kawasan strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah.

Tabel 2.4. Rencana Pengembangan Kawasan di Kabupaten Tapanuli Utara

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
I KAWASAN LINDUNG		
1.	Kawasan Hutan Lindung	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan ini mencakup Kawasan Hutan Lindung Batang Toru.
2.	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan yang berfungsi untuk menjaga fungsi utama sungai, waduk dan mata air. Kawasan ini mencakup daerah di sekitar Danau Toba, Kecamatan Muara.
3.	Kawasan suaka Alm, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	Kawasan yang berfungsi menjaga keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa yang tipe ekosistemnya masih alami (belum diganggu manusia). Kawasan ini mencakup Kawasan Suaka Alam Dolok Saut Kecamatan Pangaribuan dan Sijaba Huta Ginjang Kecamatan Muara serta Kawasan Konservasi Simangumban.
4.	Kawasan	Kawasan yang memiliki gejala geologi yang meliputi kawasan rawan bencana

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
	Lindung Geologi	alam geologi. Kawasan Lindung Geologi tersebar di Kecamatan Sipahutar, Pagaran, Parmonangan, Sipoholon, Tarutung, Siatas Barita, Adiankoting, Pahae Julu, Pahae Jae, Purbatua, Simangumban, Pangaribuan dan Garoga serta kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
II KAWASAN BUDIDAYA		
1.	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	Kawasan yang berfungsi sebagai hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kawasan ini mencakup hutan produksi dan hutan produksi terbatas yang terdapat di kabupaten Tapanuli Utara seluas 95.690 Ha.
2.	Kawasan Peruntukan pertanian	Kawasan yang berfungsi untuk kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah untuk pengembangan tanaman pangan seluas 36.839,193 Ha, kawasan pertanian lahan kering seluas 44.500,01 Ha, kawasan tanaman tahunan/perkebunan seluas 16.159,001 Ha, kawasan pengembangan budidaya perikanan di Kecamatan Tarutung, Sipoholon, Siatas Barita, Pahae Jae, Siborongborong, Purbatua dan Muara seluas + 4.570 Ha dan kawasan pengembangan peternakan ternak kecil di 15 kecamatan dan pengembangan ternak besar di Kecamatan Siborongborong, Parmonangan, Pagaran, Sipoholon, Garoga, Pangaribuan, Sipahutar dan Tarutung.
3.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	Kawasan yang berfungsi untuk kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan melakukan kegiatan pertambangan untuk bahan galian golongan A, B dan C. Kawasan ini meliputi: 1. Kecamatan Parmonangan dan Pahae Julu berupa Kaolion. 2. Kecamatan Pangaribuan, Adiankoting dan Pahae Julu berupa Feldspar. 3. Kecamatan Simangumban dan Pahae Jae berupa Zeolit. 4. Kecamatan Pagaran, Simangumban, Pahae Julu, Sipoholon, Tarutung, Adiankoting berupa Batu Gamping. 5. Kecamatan Pahae Jae dan Parmonangan berupa Batu Apung. 6. Kecamatan Tarutung dan Pahae Julu berupa Belerang. 7. Kecamatan Siborongborong berupa gambut. 8. Kecamatan Pangaribuan berupa mika. 9. Kecamatan Tarutung, Sipoholon, Sipahutar dan Pangaribuan berupa tras. 10. Kecamatan Adiankoting berupa granit. 11. Kecamatan Pahae Julu berupa batu setengah mulia dan sabak. 12. Kecamatan Parmonangan dan Pangaribuan berupa silica. 13. Kecamatan Pahae Julu dan Simangumban berupa lempung. 14. Kecamatan Pahae Julu, Pahae Jae, Sipoholon, Tarutung, Sipahutar, Siatas Barita, Siborongborong, Pagaran, Purbatua, Adiankoting berupa pertambangan panas bumi. 15. Kecamatan Tarutung, Siatas Barita, Pahae Julu, Adiankoting, Pahae Jae, Simangumban, Purbatua, Siborongborong, Sipahutar, Sipoholon, Pangaribuan, Parmonangan dan Garoga berupa bahan tambang mineral logam.
4.	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan yang berfungsi untuk kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan pemerintah kabupaten yang meliputi industri kecil menengah yang diarahkan di 15 kecamatan serta industri besar yang diarahkan ke Kecamatan Siborongborong dan Tarutung.
5.	Kawasan	Kawasan yang berfungsi untuk segala kegiatan yang

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
	Peruntukan Pariwisata	berhubungan dengan bidang kepariwisataan, yang terdiri dari: (1) Kawasan peruntukan pariwisata alam/rekreasi yang meliputi Panaroma Alam Hutaginjang dan Pantai Muara di Kecamatan Muara, Air Soda di Parbubu, Air Panas Hutabarat, Ugan dan Saitnihuta serta Gua Natumandi di Kecamatan Tarutung; Air Panas Sipoholon di Kecamatan Sipoholon dan Pacuan Kuda di Kecamatan Siborongborong; (2) Kawasan peruntukan pariwisata budidaya/sejarah yang meliputi Sopo Partungkoan dan Pohon Durian di Kecamatan Tarutung serta Situs Hindu Hopong di Kecamatan Simangumban; (3) Kawasan peruntukan wisata rohani meliputi Salib Kasih di Kecamatan Siatas Barita; Makam Musnson & Lyman - Lobu Pining di Kecamatan Adiankoting; Kantor Pusat HKBP Pea Raja, Tugu Nomensen- Saitnihuta, Gereja Dame-Saitnihuta, Makam Pendeta Johansen - Pansur Napitu di Kecamatan Tarutung, Seminarium HKBP di Kecamatan Sipoholon dan Makam Pendeta Johannes Siregar di Kecamatan Muara.
6.	Kawasan Peruntukan Permukiman	Kawasan yang berfungsi untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghimpunan. Kawasan ini terdiri dari: (1) Kawasan permukiman berkepadatan tinggi di Kecamatan Tarutung, Siborongborong, Pangaribuan, Sipoholon dan Sipahutar; (2) Kawasan permukiman berkepadatan sedang di Kecamatan Pagaran, Garoga, Adiankoting, Muara dan Parmonangan; (3) Kawasan permukiman berkepadatan rendah di Kecamatan Siatas Barita, Pahae Julu, Pahae Jae, Purbatua dan Pangaribuan.
III KAWASAN STRATEGIS		
1.	Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan aglomerasi dari berbagai kegiatan ekonomi yang meliputi Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan di Kabupaten Tapanuli Utara, Kawasan Minapolitan dan Kawasan Bandara Silangit.
2.	Kawasan Starategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut ekonomi yang berpengaruh terhadap fungsi dan daya dukung lingkungan yang meliputi Kawasan Suaka Margasatwa Dolok Saut, Kawasan Alam Sijaba Huta Ginjang dan Kawasan Hutan Lindung Batang Toru.
3.	Kawasan Strategis dari sudut kepentingan social Budaya	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yang mencakup Kawasan Wisata Rohani dengan penekanan sosial budaya.
4.	Kawasan Strategi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya Alam dan/atau teknologi Tinggi	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yang mencakup Kawasan Sebaran Potensi Bahan Tambang dengan penekanan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; Kawasan Sebaran Potensi Bahan Tambang dan Kawasan Sebaran Potensi Tenaga Air dengan penekanan sumberdaya alam.

Sumber: RTRW Kabupaten Tapanuli Utara 2017-2037



Dari total wilayah daratan seluas 3.793,74 Km², luas hutan lindung mencapai 32,6 persen, hutan produksi terbatas 12,9 persen dan hutan produksi seluas 12,3 persen. Sedangkan untuk permukiman adalah 1,7 persen dari seluruh luas daratan. Penggunaan lahan untuk pertanian adalah sebesar 38 persen. Penggolongan lahan ini dalam bentuk penggunaan lahan utama dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2.5. Penggunaan Lahan di Kabupaten Tapanuli Utara

No	Jenis Guna Lahan	Luas (km ²)	Persen (%)
1	Hutan Lindung	1.236,7	32,6
2	Hutan Produksi	0,4660	12,3
3	Hutan Produksi Terbatas	0,4909	12,9
4	Hutan Suaka Alam	0,0182	0,48
5	Hutan Rakyat	0,2475	6,5
6	Kawasan Sempadan Danau	0,0017	0,05
7	Kawasan Sempadan Mata Air	0,0009	0,02
8	Kawasan Sempadan Sungai Kecil	0,0154	0,4
9	Kawasan Sempadan Sungai	0,0934	2,5
10	Besar kawasan Tambang	0,0079	0,21
11	Hortikultura	0,1761	12,3
12	Perkebunan	0,1616	4,3
13	Permukiman	0,0641	1,7
14	Pertanian Lahan Basah	0,3684	9,7
15	Pertanian Lahan Kering	0,4450	11,7
Jumlah		3.793,74	100,00

Sumber: RTRW Tapanuli Utara Tahun 2017-2037

2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya Dukung Lingkungan Hidup merupakan kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan dengan cara yang berkelanjutan tanpa menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan. Ini termasuk kemampuan untuk menyediakan sumber daya alam, mendukung ekosistem, dan menyerap limbah atau polusi. Sementara, Daya Tampung Lingkungan Hidup merupakan kapasitas lingkungan untuk menampung atau mengakomodasi dampak dari aktivitas manusia, seperti limbah, polusi, dan perubahan perilaku tanpa mengalami kerusakan yang signifikan.

Daya Dukung Air

Penentuan daya dukung air dilakukan dengan membandingkan ketersediaan air dan kebutuhan air. Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Sementara itu, kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap

kebutuhan hidup layak. Dengan metode ini, dapat diketahui secara umum apakah sumber daya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Nilai ketersediaan air lebih besar dari kebutuhan air, daya dukung air dinyatakan surplus. Sedangkan jika ketersediaan air lebih kecil dari kebutuhan air, daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui. Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan air di suatu wilayah tercukupi, sedangkan keadaan defisit menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan akan air.

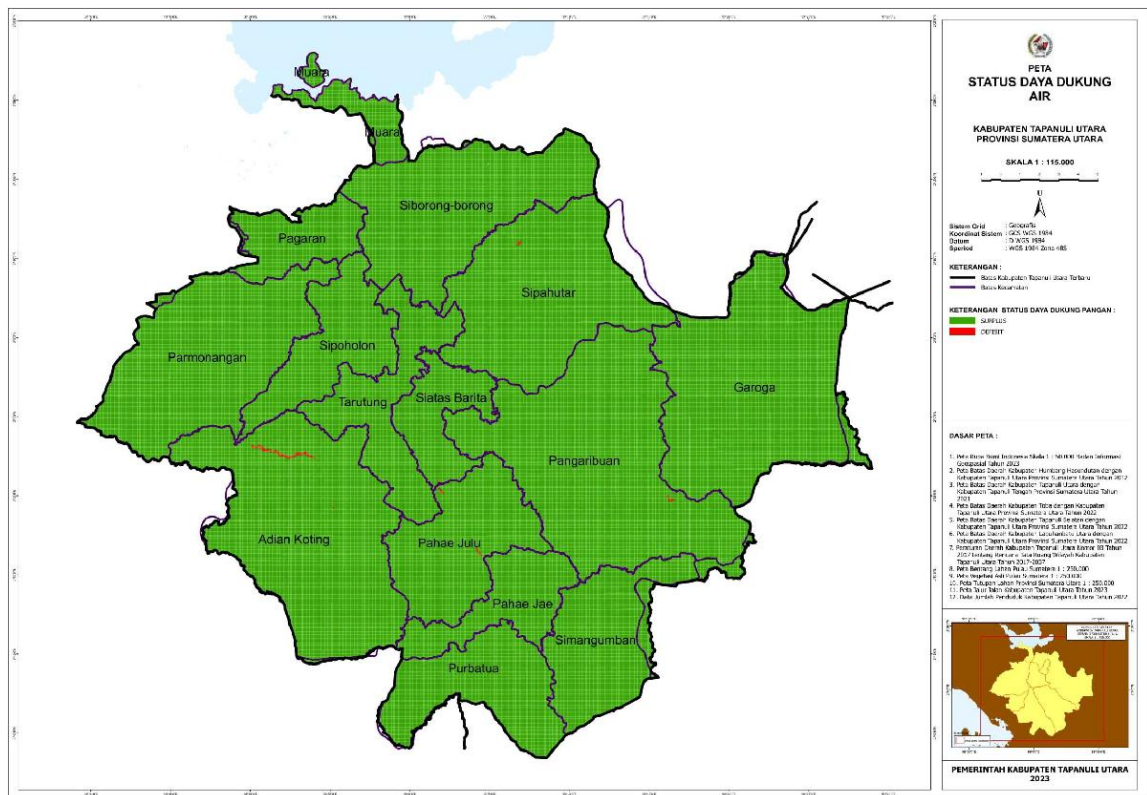
Adapun status daya dukung air di Kabupaten Tapanuli Utara secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6. Status Daya Dukung Air per Kecamatan

Kecamatan	Defisit (Ha)	Surplus (Ha)	Selisih (Ha)
Parmonangan	1,981	35.623,244	35.621,263
Adiankoting	200,255	47.396,029	47.195,774
Sipoholon	-	15.941,748	15.941,748
Tarutung	3.825,000	13.669,985	9.844,985
Siatas Barita	6,750	10.349,843	10.343,093
Pahae Julu	51,750	20.576,160	20.524,410
Pahae Jae	6,750	12.202,845	12.196,095
Purbatua	-	18.617,248	18.617,248
Simangumban	1,335	18.809,874	18.808,539
Pangaribuan	24,320	51.782,273	51.757,953
Garoga	2,413	45.189,297	45.186,884
Sipahutar	13,500	37.736,423	37.722,923
Siborongborong	3,829	32.479,914	32.476,085
Pagaran	44,396	9.801,421	9.757,025
Muara	49,241	5.734,973	5.685,732
Tapanuli Utara	388,003	379.629,997	380.018,000

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029

Ada pun peta status daya dukung Air Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.5. Peta Status Daya Dukung Air di Kabupaten Tapanuli Utara
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029

Status Daya Dukung Pangan

Analisis daya dukung dan ketersediaan pangan dilakukan dengan pendekatan ketersediaan-kebutuhan. Indikator ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan dapat digunakan untuk menunjukkan apakah suatu wilayah dapat swasembada atau tidak. Perhitungan daya dukung dan ketersediaan pangan sama dengan analisa daya dukung lahan pertanian di mana mengacu pada konsep produktivitas lahan pertanian dalam mencukupi atau mendukung kebutuhan fisik minimum setiap penduduk artinya daya dukung baik jika produksi lahan mampu mencukupi kebutuhan khususnya pangan bagi penduduknya.

Perhitungan daya dukung dan ketersediaan pangan dilakukan khususnya untuk komoditas padi/ beras. Parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat daya dukung lahan pertanian terbatas pada empat indikator, yakni: luas lahan panen (ha), jumlah penduduk (jiwa), Kebutuhan Fisik Minimum (kg/kapita/tahun) dan produksi lahan rata-rata per hektar (kg/ha). Perhitungan dan penentuan daya dukung pangan di Kabupaten Tapanuli Utara, dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh hasil produksi pangan yang berasal dari hasil produktivitas pertanian, perikanan, dan peternakan.

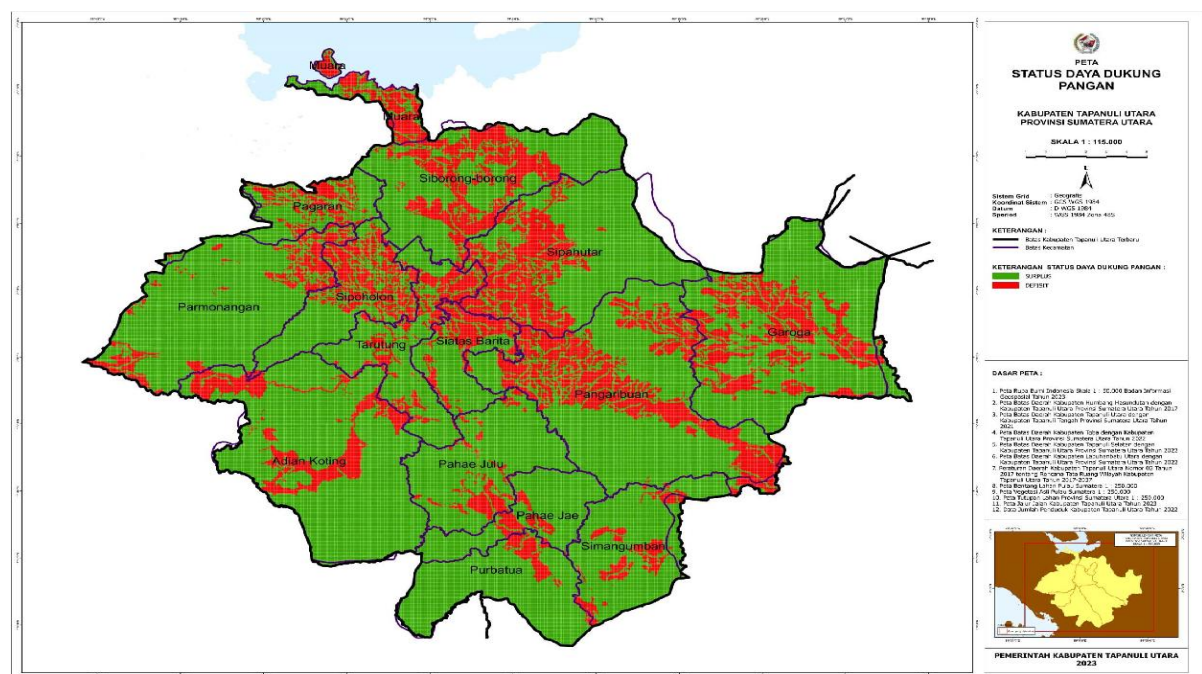
Status daya dukung pangan di Kabupaten Tapanuli Utara yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7. Status Daya Dukung Pangan Per Kecamatan

Kecamatan/Kabupaten	Defisit (Ha)	Surplus (Ha)	Selisih (Ha)
Parmonangan	5.187,552	30.437,673	25.250,121
Adiankotoring	8.054,247	39.542,037	31.487,790
Sipoholon	10.010,250	5.931,498	-4.078,752
Tarutung	10.125,000	7.369,985	-2.755,015
Siatas Barita	4.173,750	6.182,843	2.009,093
Pahae Julu	3.674,250	16.953,660	13.279,410
Pahae Jae	2.736,000	9.473,595	6.737,595
Purbatua	3.438,00	15.179,248	11.741,248
Simangumban	3.303,577	15.507,632	12.204,055
Pangaribuan	17.024,138	34.782,455	17.758,317
Garoga	12.691,858	32.499,852	19.807,994
Sipahutar	11.731,500	26.018,423	14.286,923
Siborongborong	15.127,991	17.355,752	2.227,761
Pagaran	7.917,916	1.927,901	-5.990,015
Muara	3.625,587	2.158,627	-1.466,960
Tapanuli Utara	92.180,747	287.837,254	195.656,507

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029

Adapun peta status daya dukung pangan pada Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.6. Peta Status Daya Dukung Pangan di Kabupaten Tapanuli Utara

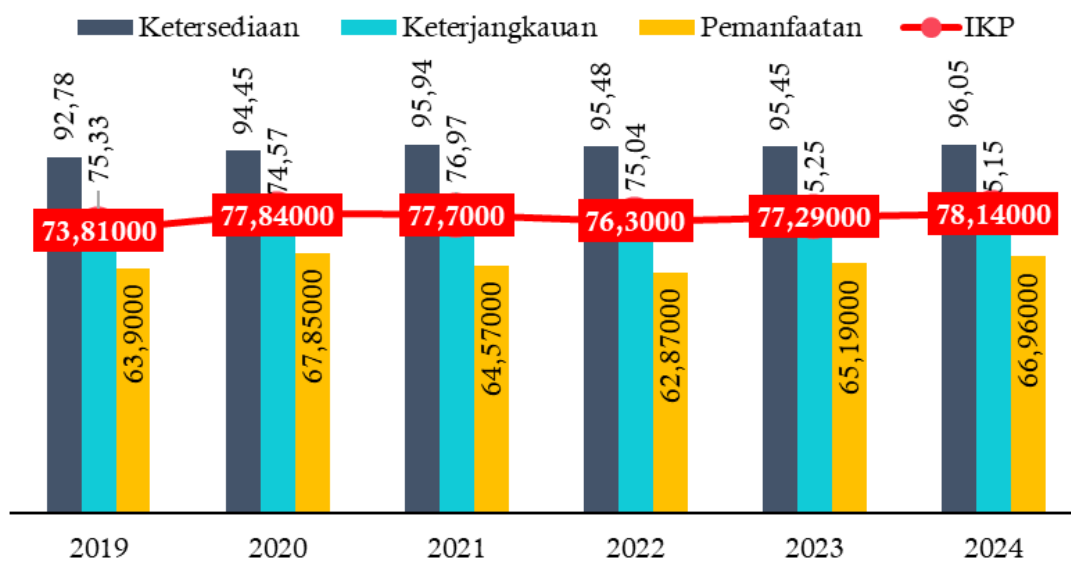
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029

2.1.4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan adalah program prioritas terintegrasi yang menjamin tersedianya tiga kebutuhan dasar pembangunan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Program ini mengadopsi pendekatan Nexus (energi-air-pangan) yang memandang ketiga sektor sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling bergantung dan mempengaruhi, bukan sebagai sektor yang terpisah. Implementasinya mencakup pengembangan infrastruktur multifungsi, pengelolaan terpadu sumber daya, dan pemanfaatan teknologi adaptif yang mendukung efisiensi serta ketahanan menghadapi perubahan iklim dan tekanan populasi.

Indeks Ketahanan Pangan

Pangan adalah kebutuhan utama manusia untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Ketahanan pangan adalah jaminan ketersediaan pangan untuk diakses oleh masyarakat. Dalam upaya menjaga ketahanan pangan, maka produktivitas pangan masyarakat harus bisa memenuhi kebutuhan, kemudian keterjangkauan terhadap pangan harus bisa diakses oleh seluruh masyarakat sehingga pemanfaatannya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Indeks ketahanan pangan merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur ketahanan pangan di suatu wilayah. Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut:



Gambar 2.7. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara

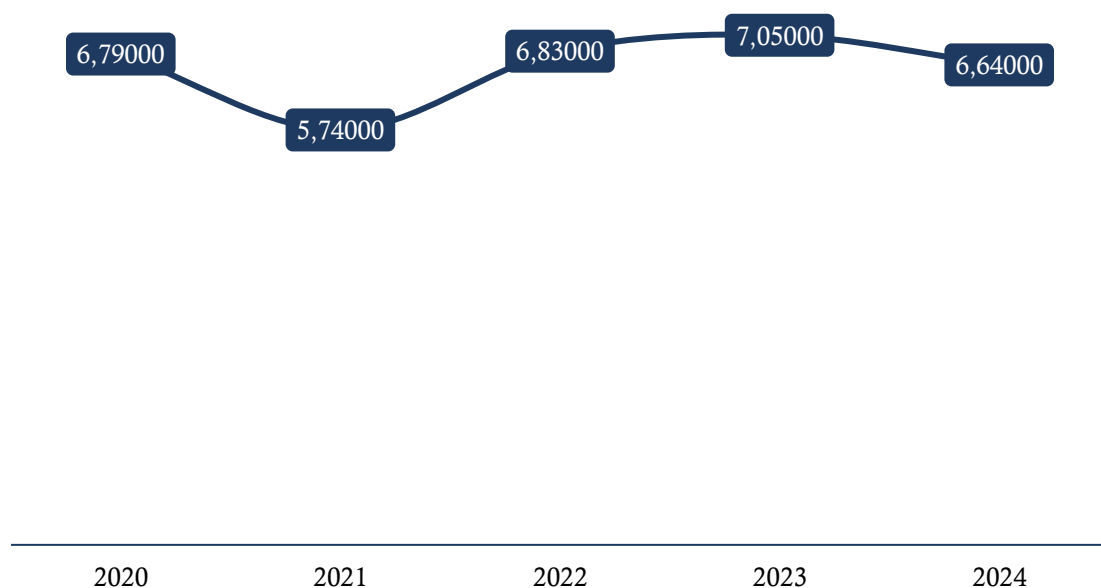
Sumber: Badan Pangan Nasional

Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Tapanuli Utara cenderung meningkat dari 77,84 poin pada tahun 2020 menjadi 77,29 poin pada tahun 2023. Namun, jika dilihat dari komponen penyusun indeks tersebut, komponen keterjangkauan dan pemanfaatan pangan cenderung menurun. Nilai Keterjangkauan menurun dari 74,57 poin pada tahun 2020 menjadi 75,25 poin pada tahun 2023, sementara komponen pemanfaatan menurun dari 67,85 poin

pada tahun 2020 menjadi 65,19 poin pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa akses masyarakat terhadap pangan semakin menurun dan pemanfaatan pangan semakin berkurang.

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) adalah indikator strategis yang mengukur proporsi penduduk yang mengalami ketidacukupan asupan kalori untuk menjalankan kehidupan aktif dan sehat. Indikator ini menjadi cerminan langsung keberhasilan upaya ketahanan pangan dan menjadi salah satu target utama SDGs (*Sustainable Development Goals*) nomor 2, yaitu *Zero Hunger*.

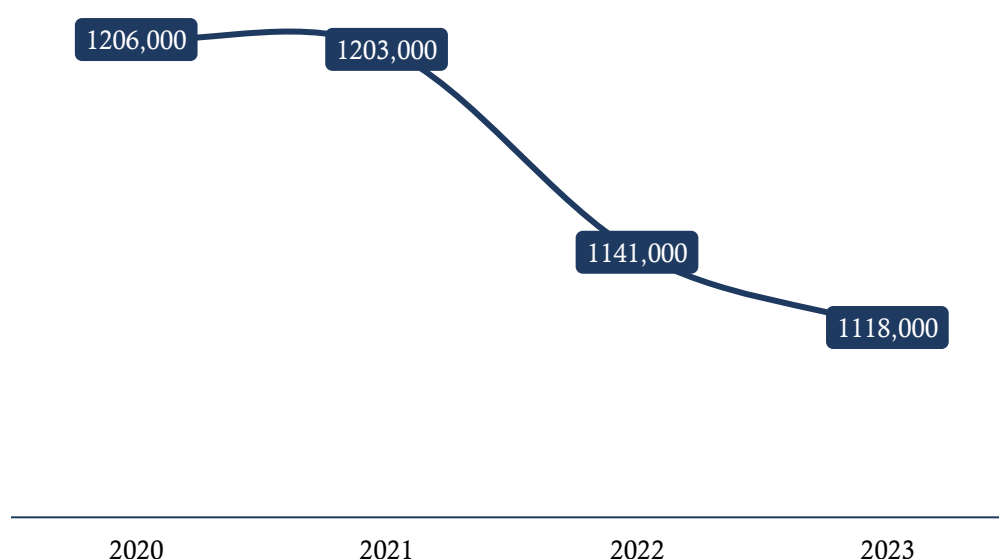


Gambar 2.8. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)

Sumber: Badan pusat Statistik

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan cenderung meningkat dari 6,79 persen pada tahun 2020 menjadi 6,64 persen pada tahun 2024. Secara nominal, pada tahun 2024 terdapat sebanyak 21.712 orang penduduk yang kebutuhan pangannya belum terpenuhi. Tingginya angka prevalensi mencerminkan adanya masalah fundamental dalam sistem pangan daerah mulai dari produksi yang tidak mencukupi, distribusi yang tidak merata, hingga ketidakmampuan ekonomi masyarakat mengakses pangan berkualitas. Faktor-faktor struktural yang mempengaruhi indikator ini mencakup kemiskinan, ketimpangan, infrastruktur distribusi yang lemah, kerentanan terhadap guncangan iklim, dan ketergantungan impor pangan.

Konsumsi listrik per kapita merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Secara teknis, indikator ini dihitung dengan membagi total konsumsi energi listrik suatu daerah dengan jumlah penduduknya.



Gambar 2.9. Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh/Kapita)
Sumber: PLN Tarutung

Konsumsi listrik per kapita (kWh) di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami fluktuasi namun cenderung relatif stabil dari tahun 2020 sebesar 1.206,00 kWh menjadi sebesar 1.118 kWh pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat Pemakaian tenaga listrik berdasarkan jumlah kWh energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung.

Proporsi EBT dalam Bauran Energi

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang signifikan, antara lain panas bumi, tenaga air skala kecil (mikrohidro), tenaga surya, serta biomassa. Pemanfaatan potensi tersebut menjadi strategi utama dalam mendukung peningkatan proporsi EBT dalam bauran energi daerah.

Sejalan dengan kebijakan nasional yang menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, Kabupaten Tapanuli Utara terus mengoptimalkan sumber daya energi yang ramah lingkungan. Saat ini, beberapa pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan panas bumi (PLTP) yang beroperasi di kawasan sekitar Danau Toba telah memberikan kontribusi nyata terhadap pasokan energi bersih.

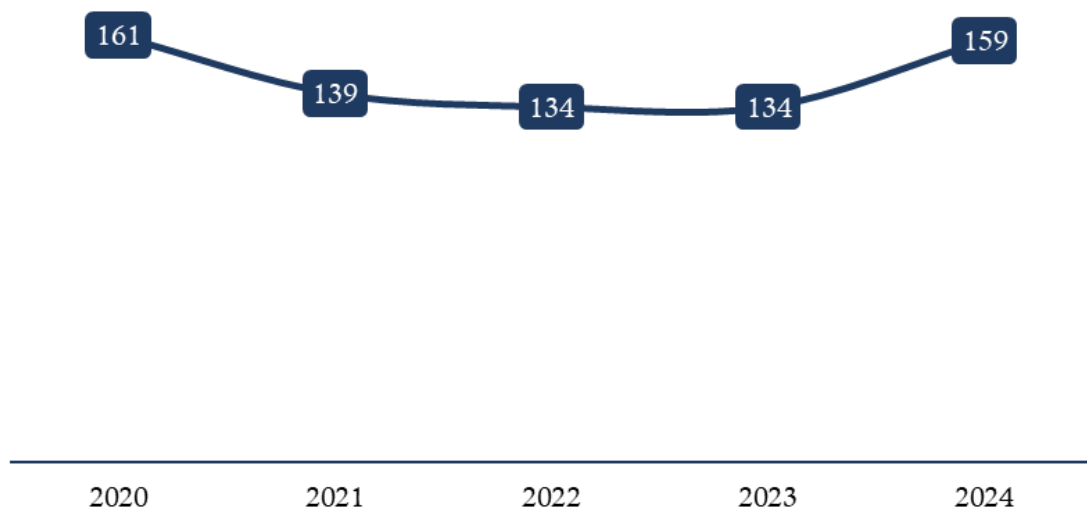
Peningkatan proporsi EBT di Tapanuli Utara tidak hanya berdampak pada ketersediaan energi yang berkelanjutan, tetapi juga berkontribusi langsung pada pembangunan ekonomi hijau. Dampak tersebut antara lain:

- Mengurangi emisi karbon dan kerusakan lingkungan,
- Memberikan akses energi yang lebih merata bagi masyarakat,
- Menciptakan lapangan kerja baru pada sektor energi hijau,
- Meningkatkan ketahanan energi daerah.

Dengan demikian, peran EBT dalam bauran energi di Tapanuli Utara merupakan bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan, serta mendukung visi nasional menuju Net Zero Emission 2060.

Kapasitas Air Baku

Kapasitas air baku mengacu pada volume air bersih yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sebelum melalui proses pengolahan lebih lanjut. Parameter ini menjadi penting dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan karena menjadi penentu utama dalam penyediaan air minum, kebutuhan industri, dan irigasi pertanian. Sumber air baku utama biasanya berasal dari 1) Air permukaan (sungai, danau, waduk); 2) Air tanah (akuifer, sumur bor); dan 3) Air hujan yang ditampung. Kapasitas air baku yang memadai harus mempertimbangkan beberapa aspek penting 1) Keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan; 2) Dampak perubahan iklim terhadap siklus hidrologi; dan 3) Kualitas air yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia.



Gambar 2.10. Kapasitas Air Baku (m³/detik)

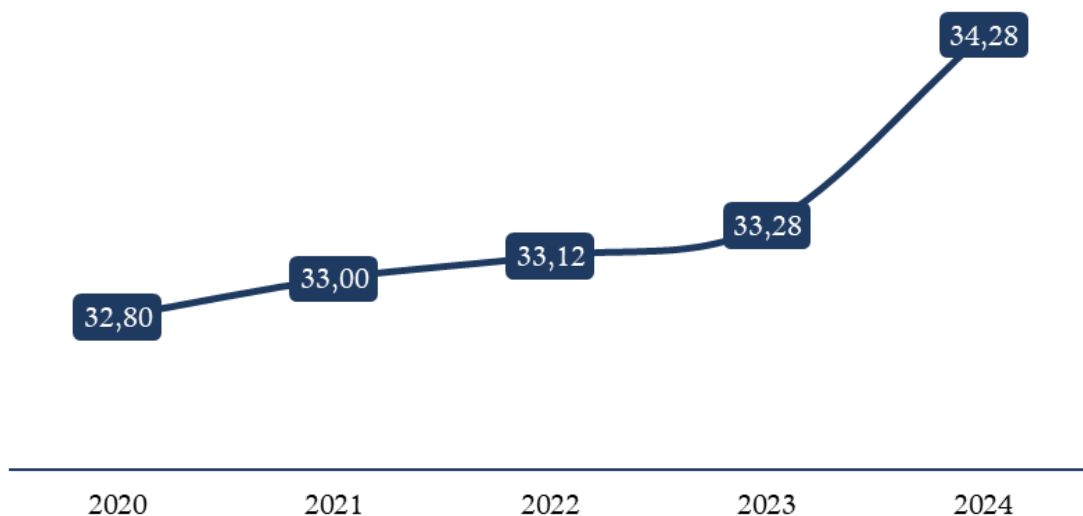
Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PDAM Mual Natio

Debit kapasitas Air Baku di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami fluktuasi dari tahun 2020 sebesar 161 m³/detik menurun di tahun 2023 menjadi 134 m³/detik.

Hal ini menunjukan bahwa terjadi penurunan ketersediaan air baku yang dapat diolah dan dimanfaatkan untuk keperluan domestik dan non domestik. Pengelolaan kapasitas air baku yang efektif memerlukan pendekatan terintegrasi yang mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial masyarakat.

Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman

Akses air minum aman merupakan hak dasar bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti minum, masak, dan kebersihan pribadi. Rumah tangga dengan akses air minum aman berarti mereka memiliki sumber air yang bersih, terlindung dari pencemaran, dan tersedia secara konsisten. Akses ini sangat penting untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh air yang terkontaminasi, seperti diare, kolera, dan penyakit menular lainnya.



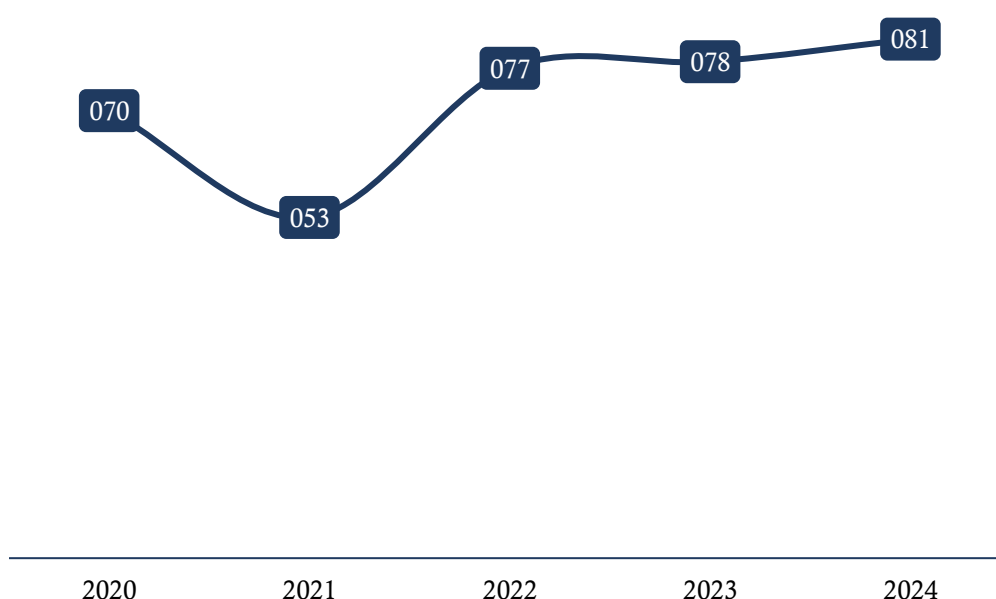
Gambar 2.11. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (%)

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Akses Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman mengalami peningkatan dari 32,80 persen pada tahun 2020 menjadi 34,28 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan layanan penyediaan air minum bagi masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara sehingga mendukung peningkatan pemerataan kesejahteraan Rumah Tangga. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara perlu meningkatkan distribusi air minum aman melalui pembangunan jaringan perpipaan baru, rehabilitasi instalasi pengolahan air, dan pengeboran sumur dalam di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan fondasi penting bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Lingkungan yang sehat, bersih, dan lestari memberikan manfaat langsung berupa udara yang segar, air yang layak konsumsi, serta tanah yang subur untuk menunjang kehidupan. Dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, lingkungan hidup berperan penting karena berkaitan dengan kenyamanan masyarakat untuk bertempat tinggal. Lingkungan yang bersih dan sehat akan menurunkan risiko masyarakat terkena penyakit, seperti diare, tipus, dan sebagainya. Capaian lingkungan hidup yang berkualitas salah satunya dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mengukur kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan dari 70,14 poin tahun 2020 mencapai 81,35 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tapanuli Utara dalam kategori Baik. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus berupaya untuk mempertahankan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan menerapkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses sanitasi aman adalah ketersediaan fasilitas yang memungkinkan rumah tangga untuk mengelola limbah manusia (tinja dan urine) secara sehat dan higienis.

Sanitasi yang baik meliputi toilet yang tertutup, sistem pembuangan limbah yang memadai, dan perilaku hidup bersih yang diterapkan masyarakat.



Gambar 2.13. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Secara Akses Rumah tangga dengan Akses Sanitasi layak Kabupaten Tapanuli Utara sudah pada kisaran 80-90 persen akan tetapi secara Akses Aman mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat dari 10,00 persen pada tahun 2023 menjadi 11 persen pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin baiknya sanitasi yang tersedia pada rumah masyarakat. Peningkatan ini juga menunjukkan hasil dari upaya pemerintah dalam meningkatkan rumah layak huni bagi masyarakat. Namun, capaian ini masih sangat rendah sehingga pemerintah perlu mendorong peningkatan akses sanitasi aman bagi masyarakat.

Pengelolaan Sampah

Pengelolaan persampahan adalah proses sistematis untuk mengelola limbah dari masyarakat, baik limbah padat maupun cair dengan tujuan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan limbah yang dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi.

Tabel 2.8. Indikator Pengelolaan Sampah

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	0,1	0,1	0,1	0,5	0,5

Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	22	22	22	22	22
--	----	----	----	----	----

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah masih sama sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 sebesar 22 persen dan Timbulan Sampah yang terkelola di fasilitas Pengolahan Sampah dari tahun 2020 sebesar 0,1 persen dari 22 persen pengumpulan sampah dan ditahun 2024 sampah terkelola di fasilitas 0,5 persen dari 22 persen sampah yang dikumpulkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Tapanuli Utara. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pelayanan persampahan dengan memperluas area pengumpulan dan menambah fasilitas pengangkutan sampah agar seluruh wilayah dapat terjangkau.

2.1.6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah indeks yang digunakan untuk menilai kemungkinan dampak yang diperkirakan akan terjadi apabila suatu ancaman menjadi bencana di suatu wilayah. Berdasarkan rilis BNPB, Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Tapanuli Utara dari tahun 2020 - 2024 termasuk kelas risiko sedang. Hasil penilaian indeks risiko bencana tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.14. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tapanuli Utara

Sumber: BNPB

terdapat 3 (tiga) komponen dalam Indeks Risiko Bencana yaitu: Bahaya, Kerentanan dan Kapasitas. Dari hasil Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tapanuli Utara 2024 – 2028 yang disusun oleh BPBD Kabupaten Tapanuli Utara ke 3 (tiga) komponen tersebut dijelaskan sebagai berikut:

A. Bahaya

Terdapat 8 (delapan) jenis bahaya di Kabupaten Tapanuli Utara yaitu: banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, likuefaksi dan tanah longsor. Adapun tingkat resiko masing-masing jenis bahaya berdasarkan hasil Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tapanuli Utara 2024 – 2028

adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9. Rekapitulasi Bahaya di Kabupaten Tapanuli Utara

NO	JENIS BENCANA	BAHAYA				
		LUAS (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	TOTAL	
1	BANJIR	4.393,26	4.826,06	2.595,50	11.814,82	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	367,2	2.219,40	15.900,30	18.486,90	TINGGI
3	CUACA EKSTRIM	0	48.341,34	103.314,94	151.656,28	TINGGI
4	GEMPABUMI	27.771,42	49.599,73	312.189,28	389.560,43	TINGGI
5	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	153.987,40	16.793,28	4.399,00	175.179,79	TINGGI
6	KEKERINGAN	9.253,55	380.306,88	0	389.560,43	SEDANG
7	LIKUEFAKSI	0	6.615,38	0	6.615,38	SEDANG
8	TANAH LONGSOR	116.208,72	59.023,67	25.723,08	200.955,47	TINGGI

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

B. Kerentanan

merupakan suatu kondisi dari masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. Adapun tingkat kerentanan berdasarkan hasil Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tapanuli Utara 2024 – 2028 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10. Kelas Kerentanan Bencana di Kabupaten Tapanuli Utara

No.	Jenis Bencana	Kelas Penduduk Terpapar	Kelas Kerugian	Kelas Kerusakan Lingkungan	Kelas Kerentanan
1	BANJIR	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	TINGGI	SEDANG	TINGGI	TINGGI
3	CUACA EKSTREM	TINGGI	TINGGI	-	TINGGI
4	GEMPABUMI	TINGGI	TINGGI	-	TINGGI
5	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	SEDANG	TINGGI	TINGGI
6	KEKERINGAN	TINGGI	SEDANG	TINGGI	TINGGI
7	LIKUEFAKSI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI
8	TANAH LONGSOR	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

C. Kapasitas

merupakan penguasaan sumberdaya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan untuk mempersiapkan diri, mencegah,



menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana. Adapun tingkat Kapasitas hasil Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tapanuli Utara 2024 – 2028 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11. Kelas Kapasitas Bencana di Kabupaten Tapanuli Utara

No.	Jenis Bahaya	Kelas Ketahanan Daerah	Kelas Kesiapsiagaan	Kelas Kapasitas
1	BANJIR	RENDAH	SEDANG	SEDANG
2	BANJIR BANDANG	RENDAH	RENDAH	RENDAH
3	CUACA EKSTRIM	RENDAH	RENDAH	RENDAH
4	GEMPABUMI	RENDAH	SEDANG	SEDANG
5	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	RENDAH	RENDAH	RENDAH
6	KEKERINGAN	RENDAH	RENDAH	RENDAH
7	LIKUEFAKSI	RENDAH	RENDAH	RENDAH
8	TANAH LONGSOR	RENDAH	SEDANG	SEDANG

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dari penjelasan di atas, untuk meningkatkan resiliensi terhadap bencana maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara perlu meningkatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana

Kebencanaan juga dapatkan dikaitkan dengan Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi komitmen penting dalam upaya membangun resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Peningkatan emisi GRK berdampak pada pemanasan global yang memicu frekuensi serta intensitas bencana hidrometeorologi, seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor.

Kabupaten Tapanuli Utara perlu menerapkan strategi mitigasi yang terintegrasi, antara lain melalui transisi energi rendah karbon, peningkatan efisiensi energi, pengelolaan limbah ramah lingkungan, serta perlindungan dan rehabilitasi hutan. Langkah ini tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga memperkuat daya dukung lingkungan dalam menghadapi risiko iklim.

Selain itu, upaya adaptasi dilakukan dengan memperkuat tata ruang berbasis ekosistem, membangun infrastruktur yang tahan bencana, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Dengan demikian, penurunan

intensitas emisi GRK menjadi bagian integral dari pembangunan berkelanjutan yang mendukung terciptanya masyarakat tangguh dan lingkungan hidup yang lestari.

2.1.7. Demografi

Salah satu masalah dalam pembangunan yang perlu ditangani adalah masalah kependudukan yang mencakup jumlah, pertumbuhan penduduk, komposisi dan penyebaran penduduk. Penduduk merupakan objek sekaligus subjek dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan bila kualitasnya baik, sebaliknya akan menjadi beban pembangunan bila kualitasnya rendah. Untuk itu, peningkatan kualitas penduduk perlu menjadi perhatian dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut.

Tabel 2.12. Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara menurut Jenis Kelamin

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Laki-laki	156.176	157.457	159.102	-	163.845
Jumlah Perempuan	156.582	157.765	159.322	-	163.148
Total	312.758	315.222	318.424	323.102	326.993

Sumber: Badan Pusat Statistik

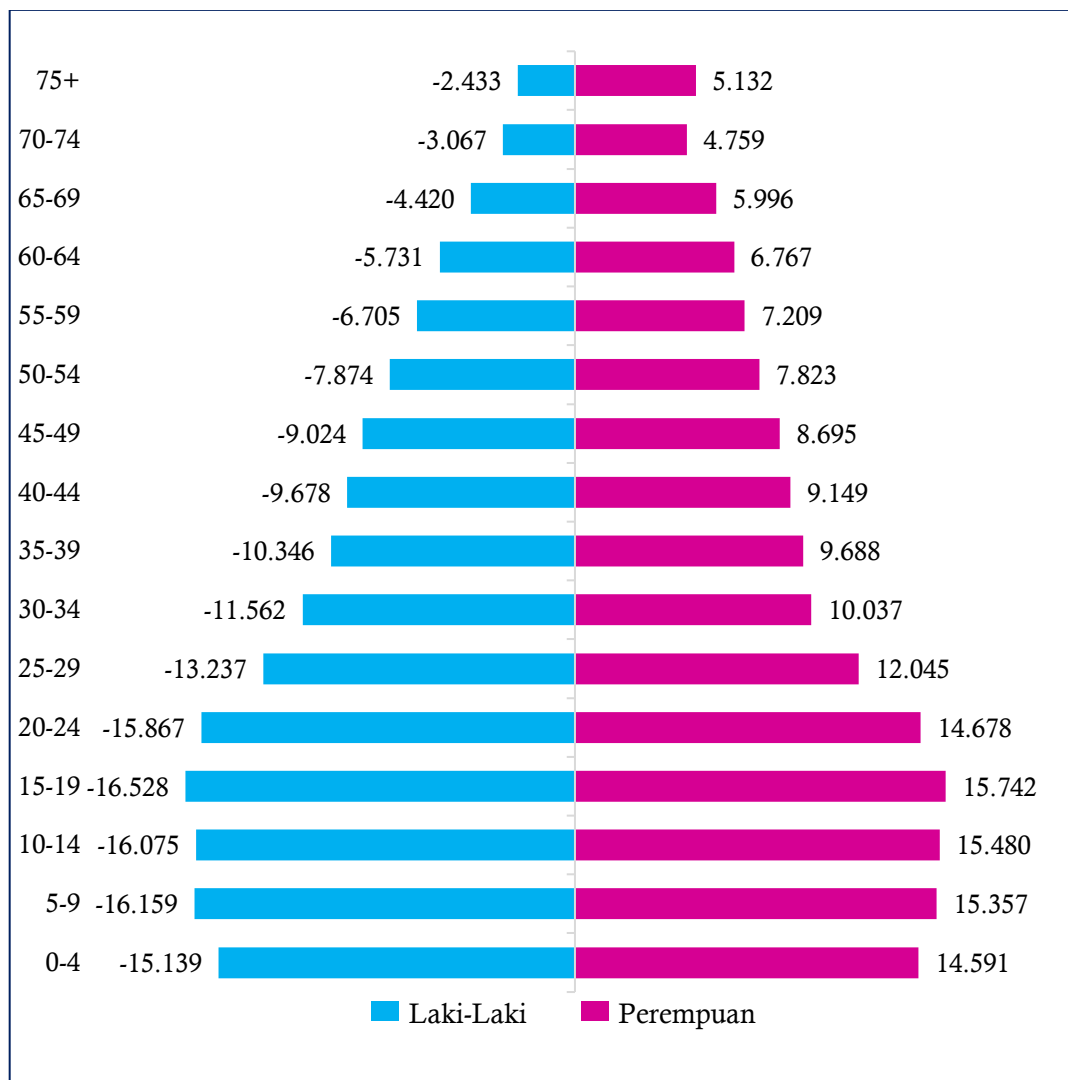
Tabel 2.13. Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara menurut Kecamatan

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Parmonangan	14.578	14.641	14.737	-	15.026
Adiankoting	15.109	15.165	15.255	-	15.535
Sipoholon	24.156	24.359	24.618	-	25.306
Tarutung	42.831	43.212	43.694	-	44.958
Siatas Barita	14.197	14.275	14.386	-	14.703
Pahae Julu	13.494	13.615	13.768	-	14.168
Pahae Jae	12.092	12.195	12.326	-	12.673
Purbatua	8.168	8.215	8.282	-	8.469
Simangumban	8.369	8.416	8.482	-	8.671
Pangaribuan	29.765	29.979	30.263	-	31.034
Garoga	18.214	18.350	18.530	-	19.013
Sipahutar	27.828	28.041	28.319	-	29.067
Siborongborong	50.641	51.226	51.936	-	53.726
Pagaran	18.795	18.942	19.134	-	19.647
Muara	14.521	14.591	14.694	-	14.997
Total	312.758	315.222	318.424	323.102	326.993

Sumber: Badan Pusat Statistik

Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 sebanyak 326.993 jiwa, di mana Kecamatan Siborongborong merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak, yaitu sebanyak 53.726 jiwa, kemudian Kecamatan Tarutung sebanyak 44.958 jiwa, dan Kecamatan Pangaribuan sebanyak 31.034 jiwa. Dengan memperhatikan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara harus bisa memastikan pelayanan publik terjangkau dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di setiap wilayah. Distribusi Penduduk

menurut Kelompok Usia di Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut.



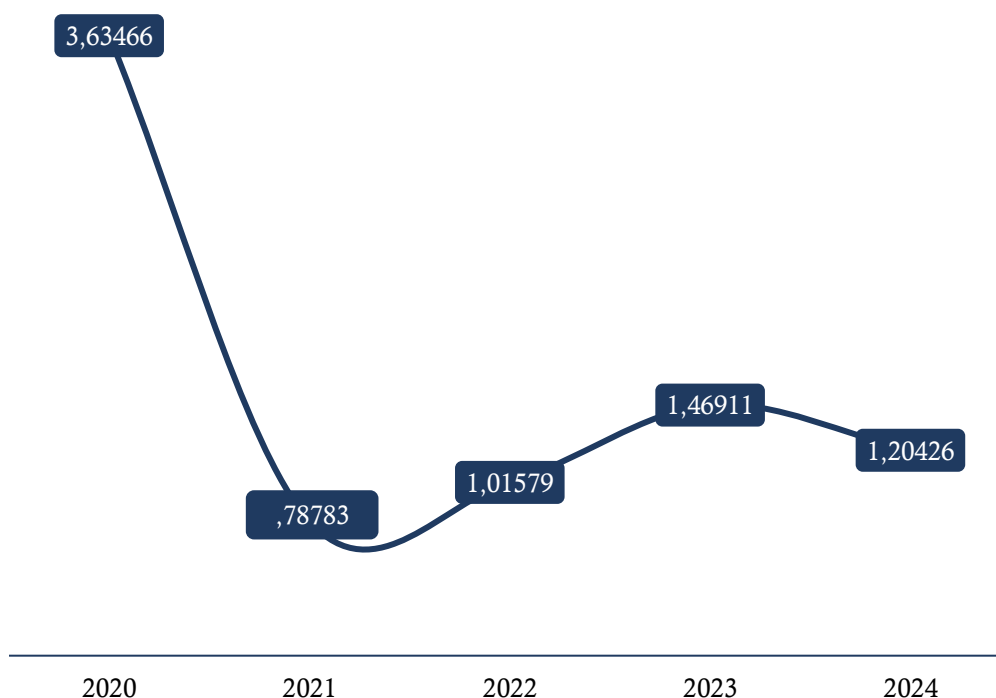
Gambar 2.15. Distribusi Penduduk menurut Kelompok Usia

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Kelompok usia 0-4 tahun memiliki populasi terbesar, dengan 15.139 laki-laki dan 14.591 perempuan. Populasi menurun seiring bertambahnya usia, dengan penurunan paling signifikan pada kelompok usia 5-9 (16.159 laki-laki dan 15.357 perempuan) hingga 75+ (2.433 laki-laki dan 5.132 perempuan). Perbedaan gender cukup konsisten, dengan perempuan cenderung lebih banyak di kelompok usia yang lebih tua, terutama di atas 65 tahun. Penurunan populasi laki-laki lebih tajam dibandingkan perempuan di kelompok usia tua.

Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Perkembangan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut:



Gambar 2.16. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara

Pada tabel berikut menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 0,30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk yang positif di Kabupaten Tapanuli Utara. Untuk tingkat pertumbuhan tertinggi terdapat di Kecamatan Purbatua sebesar 1,70 persen dan untuk tingkat pertumbuhan paling rendah terdapat di Kecamatan Sipahutar sebesar 0,07. Namun demikian di beberapa Kecamatan masih tidak terjadi pertumbuhan penduduk seperti Kecamatan Adiankoting, Kecamatan Pahae Jae, Kecamatan Pahae Julu dan Kecamatan Parmonangan.

Proyeksi Penduduk menurut Kelompok Usia

Proyeksi penduduk Kabupaten Tapanuli Utara dilakukan dengan mempertimbangkan data historis jumlah penduduk, Total Fertility Rate, Age Specific Fertility Rate dan usia harapan hidup. Hasil proyeksi penduduk Kabupaten Tapanuli Utara menurut kelompok usia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14. Proyeksi Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara menurut Jenis Kelamin (Jiwa)

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Laki-laki	161.782				
Jumlah Perempuan	161.320				
Total	330.856	334.580	338.347	342.155	346.007

Sumber: BPS (diolah, 2024)

Tabel 2.15. Proyeksi Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara menurut Kelompok Usia (Jiwa)

Kelompok Usia	2025	2026	2027	2028	2029
0–4	32.564	33.345	34.143	34.919	35.667
5–9	29.815	29.663	29.775	30.202	30.963
10–14	32.155	31.873	31.440	30.873	30.192
15–19	31.506	31.629	31.757	31.850	31.846
20–24	30.417	30.649	30.789	30.863	30.927
25–29	27.418	28.138	28.735	29.219	29.602
30–34	22.471	23.253	24.171	25.155	26.101
35–39	20.243	20.438	20.677	20.995	21.432
40–44	19.229	19.350	19.435	19.510	19.606
45–49	17.565	17.809	18.050	18.271	18.469
50–54	15.694	15.907	16.130	16.355	16.576
55–59	13.955	14.059	14.195	14.360	14.541
60–64	12.538	12.620	12.651	12.650	12.666
65–69	10.069	10.218	10.411	10.620	10.800
70–74	7.984	8.074	8.103	8.108	8.128
75+	7.233	7.555	7.885	8.205	8.491
Total	330.856	334.580	338.347	342.155	346.007

Sumber: BPS (diolah, 2024)

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara diproyeksikan meningkat dari 330.856 jiwa pada tahun 2025 menjadi 346.007 pada tahun 2029.

Proyeksi Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan

Kepadatan penduduk diproyeksi berdasarkan hasil proyeksi penduduk dan luas wilayah masing-masing kecamatan. Hasil proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.16. Proyeksi Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan (Jiwa/km2)

Kecamatan	2025	2026	2027	2028	2029
Parmonangan	60,19	60,87	61,56	62,25	62,95
Adiankoting	31,87	32,23	32,59	32,96	33,33
Sipoholon	136,70	138,23	139,79	141,36	142,96
Tarutung	426,62	431,42	436,27	441,19	446,16
Siatas Barita	162,75	164,58	166,43	168,32	170,21
Pahae Julu	87,12	88,11	89,10	90,10	91,12
Pahae Jae	63,72	64,44	65,16	65,90	66,64
Purbatua	45,35	45,87	46,38	46,90	47,43
Simangumban	59,33	60,00	60,67	61,36	62,05
Pangaribuan	69,21	69,99	70,78	71,58	72,38
Garoga	34,31	34,69	35,08	35,48	35,88
Sipahutar	72,86	73,68	74,51	75,35	76,20
Siborongborong	195,08	197,27	199,49	201,73	204,01
Pagaran	145,66	147,30	148,96	150,63	152,34
Muara	193,40	195,59	197,78	200,01	202,27
Total	88,19	89,19	90,19	91,21	92,23

Sumber: BPS (Diolah, 2024)



Kepadatan penduduk diproyeksikan meningkat dari 88,19 jiwa/km² menjadi 92,23 jiwa/km². Pada tahun 2029 penduduk terpadat berada pada Kecamatan Tarutung sebanyak 446,16 jiwa/km², kemudian Kecamatan Siborongborong sebanyak 204,01 jiwa/km² serta Kecamatan Muara sebanyak 202,27 jiwa/km². Sementara itu, Kecamatan dengan kepadatan terkecil pada Kecamatan Adiankoting sebanyak 33,33 jiwa/km², kemudian Kecamatan Garoga sebanyak 35,88 jiwa/km² serta Kecamatan Purbatua sebanyak 47,43 jiwa/km².

Tabel 2.17. Proyeksi Sex Ratio dan Dependency Ratio

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
Laki-Laki	165.913	167.908	169.922	171.953	174.004
Perempuan	164.943	166.672	168.425	170.202	172.003
Sex Ratio	100,59	100,74	100,89	101,03	101,16
0-14	94.533	94.881	95.358	95.994	96.822
15-64	211.037	213.852	216.590	219.228	221.766
65+	25.286	25.847	26.399	26.933	27.419
Dependency Ratio	56,78	56,45	56,22	56,07	56,02

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara (Diolah, 2025)

Pada tahun 2025, sex ratio sebesar 100,59 yang berarti sedikit lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Rasio ini meningkat tipis setiap tahun mencapai 101,16 pada tahun 2029, menandakan proporsi laki-laki yang sedikit lebih besar dibandingkan perempuan seiring waktu.

Berdasarkan kelompok usia, penduduk usia 0-14 tahun meningkat dari 94.533 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 96.822 ribu jiwa pada tahun 2029. Kelompok usia produktif (15-64 tahun) juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dari 211.037 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 221.766 ribu jiwa pada tahun 2029, menandakan potensi tenaga kerja yang semakin besar.

Sementara itu, penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) meningkat dari 25.286 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 27.419 ribu jiwa pada tahun 2029, mencerminkan adanya penuaan populasi. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*), yang mengukur jumlah penduduk non-produktif (usia 0-14 dan 65 tahun ke atas) per 100 penduduk usia produktif, menunjukkan tren penurunan.

Pada tahun 2025, rasio ketergantungan adalah 56,78 dan terus menurun hingga mencapai 56,02 pada tahun 2029. Penurunan ini mengindikasikan beban ketergantungan yang sedikit berkurang terhadap kelompok usia produktif, yang dapat menjadi peluang untuk memanfaatkan bonus demografi.

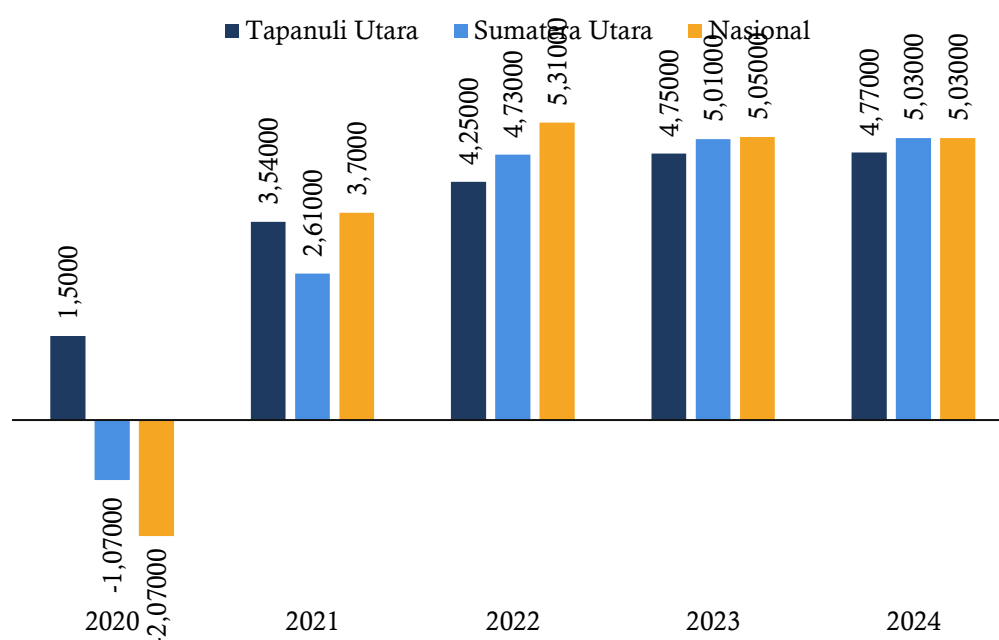
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat adalah sejumlah faktor yang bersama-sama menciptakan kondisi kehidupan yang baik dan berkualitas bagi semua anggota masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tercapai ketika faktor-faktor ini dikelola dengan baik dan terintegrasi dalam upaya menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan kualitas hidup yang baik bagi semua anggota masyarakat.

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan pendapatan masyarakat yang disebabkan oleh kenaikan barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat menunjukkan bahwa semakin tingginya perekonomian masyarakat dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.17. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara cenderung mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 1,50 persen hingga tahun 2024 menjadi sebesar 4,77 persen. Pada tahun 20

20 rendahnya pertumbuhan ekonomi disebabkan Pandemi Covid-19 yang berdampak secara global. Namun, Kabupaten Tapanuli Utara mampu mempertahankan pertumbuhan positif pada tahun tersebut, bahkan lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan nasional. Pada tahun berikutnya Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara kembali meningkat hingga tahun

2024 mencapai 4,77 persen. Secara spesifik, pertumbuhan ekonomi berdasarkan 17 Sektor Perekonomian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Menurut Sektor Perekonomian (%)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,30	4,59	4,80	3,99	2,95
Pertambangan dan Penggalian	5,96	5,98	4,56	4,50	4,90
Industri Pengolahan	0,10	3,31	3,96	5,41	4,43
Pengadaan Listrik dan Gas	9,84	5,79	2,31	3,38	0,86
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,37	5,43	4,52	4,91	1,32
Konstruksi	-0,81	3,22	4,00	4,64	3,85
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,79	3,94	4,50	6,50	7,76
Transportasi dan Pergudangan	-3,85	2,77	7,53	7,15	7,29
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,29	2,40	7,14	7,04	9,66
Informasi dan Komunikasi	8,51	4,82	4,83	3,67	6,83
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,39	2,52	3,17	3,94	4,92
Real Estate	1,01	0,39	4,85	3,72	3,20
Jasa Perusahaan	5,02	2,73	6,55	4,40	7,07
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,83	0,29	-0,88	4,54	7,89
Jasa Pendidikan	5,11	2,87	4,52	4,99	5,23
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,97	0,38	5,57	4,96	5,11
Jasa lainnya	-0,86	2,75	7,18	4,93	7,06
Laju Pertumbuhan	1,50	3,54	4,25	4,75	4,70

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan tabel tersebut, Sektor yang mengalami pertumbuhan terbesar pada tahun 2024 adalah Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 9,66 persen, kemudian Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,89 persen, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,76 persen, dan Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,29 persen.

Sementara itu, Sektor Perekonomian dengan pertumbuhan terendah pada tahun 2024 adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,86 persen, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,32 persen, dan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,95 persen.

Untuk melihat peran masing-masing sektor perekonomian terhadap perekonomian, maka dilakukan pengukuran distribusi PDRB. Distribusi PDRB adalah kontribusi dari masing-masing sektor perekonomian terhadap total agregat PDRB. Distribusi PDRB digunakan untuk melihat Sektor mana yang paling berperan

dalam perekonomian suatu wilayah. Adapun distribusi PDRB berdasarkan jenis sektor perekonomian dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 2.19. Kontribusi PDRB Menurut Sektor Perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara (%)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	43,31	43,91	44,91	45,16	44,85
Pertambangan dan Penggalian	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Industri Pengolahan	2,27	2,31	2,25	2,20	2,18
Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09
Konstruksi	14,14	14,19	14,24	14,14	13,89
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,68	15,84	15,79	15,91	16,29
Transportasi dan Pergudangan	4,86	4,80	4,87	5,13	5,23
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,45	2,36	2,34	2,35	2,46
Informasi dan Komunikasi	0,81	0,82	0,78	0,74	0,74
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,61	1,59	1,57	1,53	1,49
Real Estate	2,39	2,32	2,25	2,20	2,15
Jasa Perusahaan	0,31	0,31	0,30	0,29	0,30
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,43	8,88	8,12	7,83	7,91
Jasa Pendidikan	1,61	1,56	1,50	1,47	1,46
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,73	0,70	0,68	0,68	0,68
Jasa lainnya	0,13	0,13	0,13	0,12	0,13
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan gambar tersebut, Struktur perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara didominasi oleh Sektor Primer, kemudian Sektor Tersier, dan Sektor Sekunder. Kontribusi Sektor Primer cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 43,31 persen pada tahun 2020 menjadi 44,85 persen pada tahun 2024. Sektor Primer memiliki peran yang besar bagi perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara. Sebagian besar aktivitas perekonomian di Tapanuli Utara bergerak pada Sektor Primer. Sementara itu, Sektor Tersier cenderung mengalami penurunan dari 40,01 persen pada tahun 2020 menjadi 38,84 persen pada tahun 2024. Terakhir, Sektor Sekunder cenderung mengalami peningkatan dari 16,61 persen pada tahun 2020 menjadi 16,24 persen pada tahun 2024.

Kontribusi Sektor Primer didorong oleh Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi lebih dari 40 persen. Pada tahun 2020, kontribusi sektor ini sebesar 43,31 persen dan cenderung meningkat hingga tahun 2024 mencapai 44,85 persen. Sementara itu, dari Sektor Sekunder didorong oleh Sektor Konstruksi sekaligus sebagai penyumbang PDRB terbesar ketiga dari seluruh sektor. Pada tahun 2020, sektor ini berkontribusi sebesar 14,14 persen dan cenderung menurun hingga tahun 2024 mencapai 13,89 persen. Selanjutnya, dari Sektor Tersier didominasi oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki sekaligus sebagai penyumbang PDRB terbesar kedua dari seluruh sektor perekonomian. Pada tahun 2020 sektor tersebut menyumbang sebesar 15,68 persen dan cenderung

mengalami peningkatan hingga tahun 2024 mencapai 16,29 persen PDRB Kabupaten Tapanuli Utara.

PDRB menurut pengeluaran di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20. Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Pengeluaran (Rp Miliar)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5.261,94	5.581,69	6.143,38	6.654,54	7.092,06
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	399,93	404,43	455,71	533,06	598,64
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.302,94	1.337,60	1.357,71	1.488,10	1.576,56
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.585,99	3.793,84	4.036,10	4.367,41	4.496,28
Perubahan Inventori	210,70	240,17	274,91	289,71	221,60
Net Ekspor Barang dan Jasa	-2.487,07	-2.557,66	-2.622,17	-2.843,12	-2.705,98
PDRB	8.274,43	8.800,08	9.645,64	10.489,70	11.279,15

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data pada tabel menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Tapanuli Utara, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

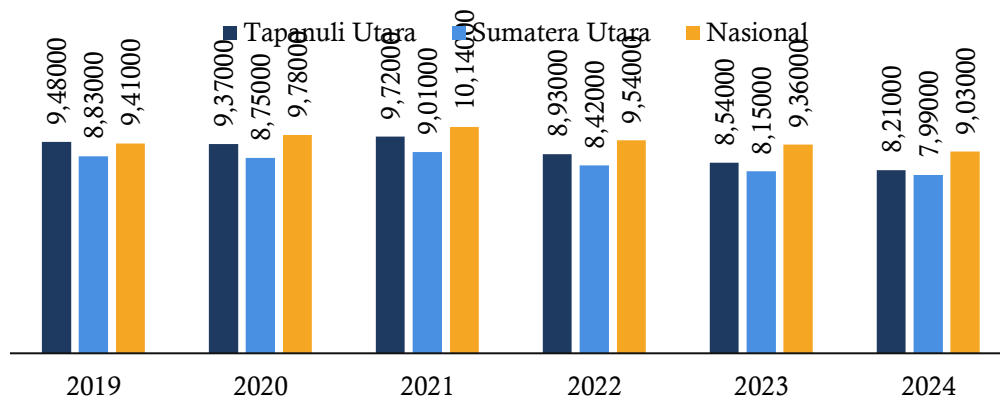
Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (final consumer) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selama periode tahun 2020-2024 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal (ADHB) maupun secara riil (ADHK).

Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga digunakan sebagian besar untuk makanan, minuman dan rokok.

Tingkat Kemiskinan



Kemiskinan merupakan keadaan dimana masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan yang dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada gambar berikut:



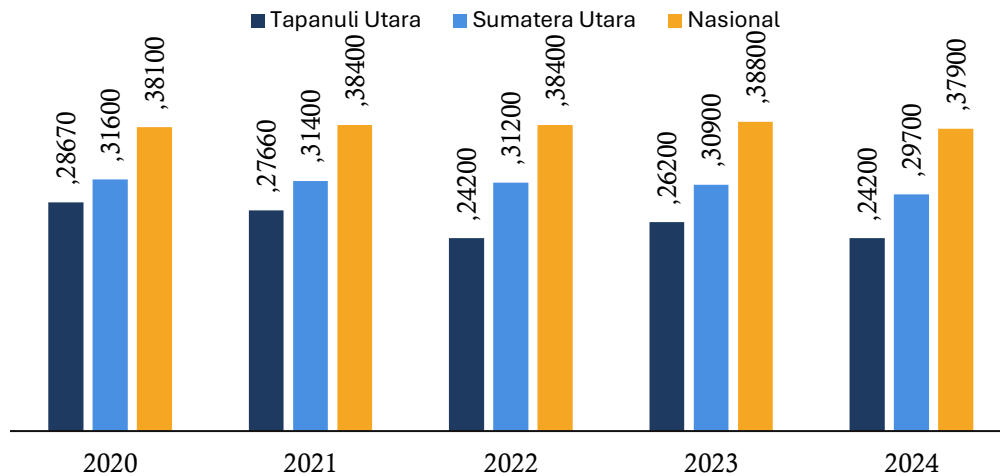
Gambar 2.18. Persentase Kemiskinan Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Maret) (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Persentase penduduk miskin Kabupaten Tapanuli Utara mengalami penurunan sebesar 0,33 poin yaitu dari 8,54 persen pada tahun 2023 menjadi 8,21 persen pada tahun 2024, angka ini lebih baik dibandingkan dengan Nasional 8,57 persen pada Tahun 2023, namun masih berada dibawah capaian Provinsi Sumatera Utara sebesar 7,19 persen pada tahun 2024. Optimalisasi dalam sinkronisasi dan kolaborasi program penanggulangan kemiskinan merupakan hal yang sangat diperlukan dalam penurunan tingkat kemiskinan.

Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau Gini Ratio. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah, $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi. Ketimpangan pendapatan (*Gini Ratio*). *Gini Ratio* Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada gambar berikut:

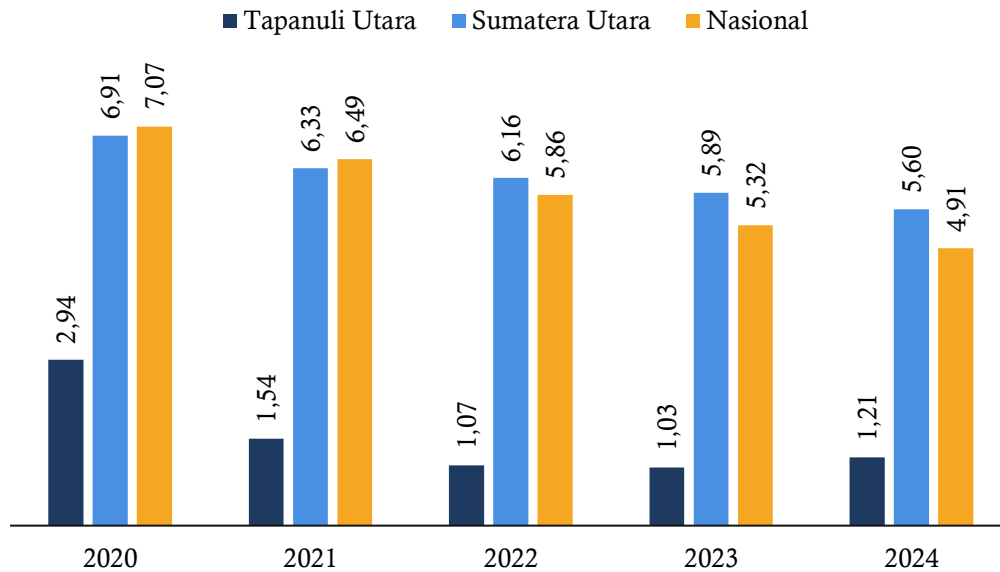


Gambar 2.19. Gini Ratio Kabupaten Tapanuli Utara , Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Maret)
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gini Ratio Kabupaten Tapanuli Utara cenderung mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 0,287 poin hingga pada tahun 2024 mencapai 0,242 poin. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia, Gini Rasio Kabupaten Tapanuli Utara selalu lebih rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara merata dan lebih unggul dibandingkan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Namun, hal ini perlu dicermati bahwa gini ratio yang rendah belum tentu menandakan hal yang baik, di mana hal ini dapat menunjukkan bahwa pendapatan setiap penduduk hampir sama rendahnya. Maka dari itu, perlu dilakukan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas SDM agar memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan, lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran, diperoleh dari hasil pembagian jumlah pengangguran per jumlah tenaga kerja. Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.20. TPT Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Agustus) (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik

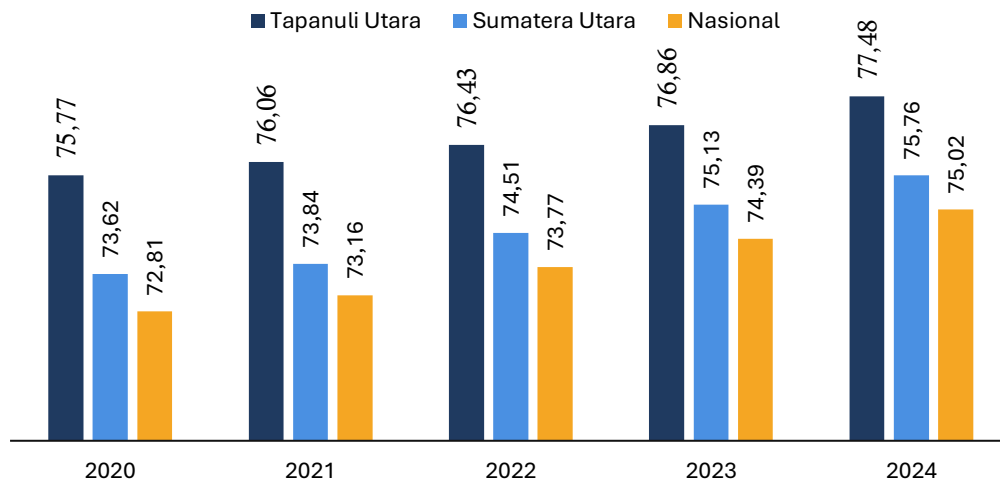
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapanuli Utara cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 2,94 persen kemudian cenderung menurun hingga tahun 2023 mencapai 1,21 persen.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan nasional, Kabupaten Tapanuli Utara jauh lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa banyak penduduk yang bekerja dibandingkan menganggur pada Kabupaten Tapanuli Utara. Meskipun TPT Kabupaten Tapanuli Utara sangat rendah, namun masyarakat banyak yang bekerja sebagai pekerja **keluarga/tidak dibayar**. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah mengingat banyaknya pekerja tidak dibayar, maka tidak memberikan peningkatan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah perlu meningkatkan lapangan pekerjaan melalui investasi dan meningkatkan kualitas tenaga kerja agar memenuhi kebutuhan industri sehingga masyarakat dapat mengalami peningkatan ekonomi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia adalah sebuah indikator yang digunakan oleh PBB untuk mengukur perkembangan kesejahteraan dan kemajuan sosial ekonomi suatu negara. IPM menggabungkan beberapa dimensi penting dalam pembangunan, termasuk harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita. IPM memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perkembangan manusia daripada hanya menggunakan ukuran ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. IPM dapat memberikan pandangan lebih menyeluruh tentang tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. IPM Kabupaten

Tapanuli Utara dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.21. IPM Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional
Sumber: Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapanuli Utara selama tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 75,77 poin mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2024 mencapai 77,48 poin. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan nasional, IPM Kabupaten Tapanuli Utara selalu lebih tinggi sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Hal ini secara umum menunjukkan bahwa akses pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara semakin dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata.

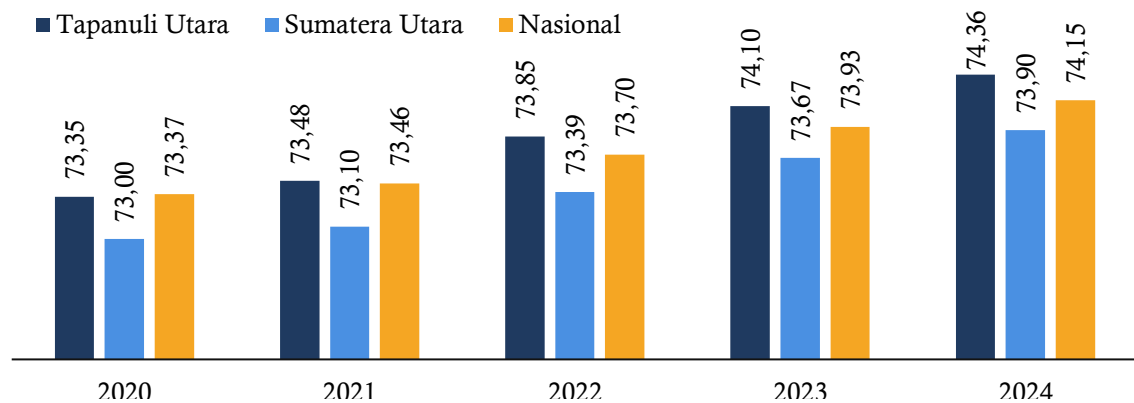
2.2.2. Kesehatan untuk Semua

Kesehatan untuk Semua bertujuan memastikan setiap individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berupaya untuk mewujudkan akses layanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Prioritas utama mencakup penguatan fasilitas kesehatan dasar, peningkatan kualitas tenaga medis, serta program promotif dan preventif untuk mengurangi penyakit. Dengan pendekatan berbasis teknologi kesehatan, pemerintah berupaya untuk menjangkau daerah terpencil serta kelompok rentan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin.

Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan. Angka harapan hidup juga dijadikan salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia selain pendidikan dan ekonomi. Angka

harapan hidup dapat diketahui dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Usia Harapan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.



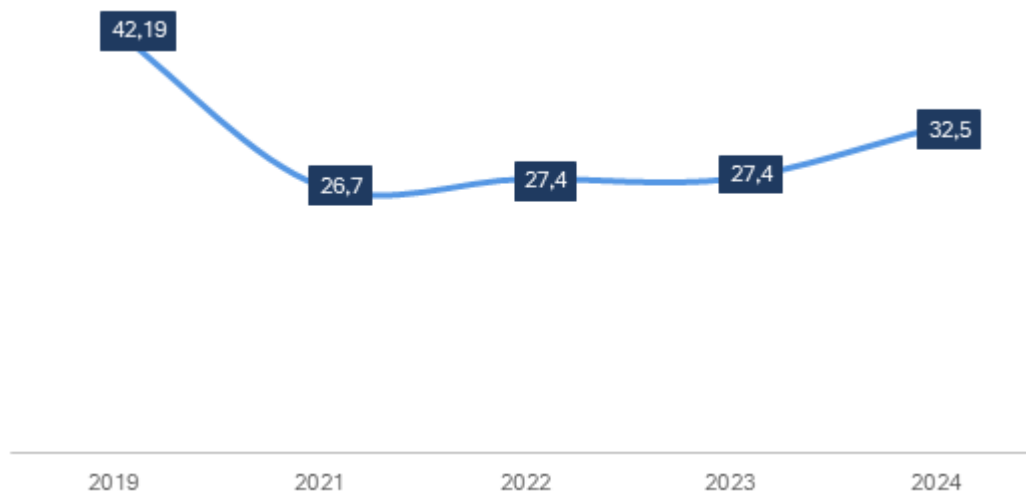
Gambar 2.22. Usia Harapan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Usia Harapan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan dari 73,35 tahun pada tahun 2020 menjadi 74,36 tahun pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan nasional, Usia Harapan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara selalu lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan oleh pemerintah daerah semakin dirasakan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam upaya meningkatkan Usia Harapan Hidup, maka pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan, melalui pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, pembangunan infrastruktur jalan sehingga meningkatkan konektivitas masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, serta pemerataan dokter dan tenaga kesehatan ke seluruh wilayah.

Prevalensi Stunting

Gizi buruk, terutama pertumbuhan yang terhambat, merupakan sebuah masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Kekurangan gizi buruk dapat menyebabkan terjadinya stunting. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensional. Intervensi stunting sangat memerlukan konvergensi program/intervensi.



Gambar 2.23. Prevalensi Stunting Kabupaten Tapanuli Utara (%)

Sumber: Dinas Kesehatan Tapanuli Utara

Berdasarkan tabel tersebut, Prevalensi Stunting di Kabupaten Tapanuli Utara menurun dari 38,60 persen pada tahun 2020 menjadi 26,70 persen pada tahun 2021. Namun, meningkat pada tahun 2022 mencapai 27,40 persen dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 32,5. Stunting disebabkan oleh berbagai factor mulai dari kehamilan, usia kehamilan, status gizi ibu, berat badan lahir rendah, Panjang lahir pendek. Resiko ini semakin tinggi bila terjadi infeksi berulang setelah lahir terutama diare dan infeksi saluran pernafasan atas (ISPA). Di tingkat keluarga, faktor sosial ekonomi dan pendidikan orangtua turut berperan penting. Tingkat pendidikan orangtua yang rendah, pendapatan keluarga yang tidak mencukupi, dan kondisi sanitasi yang buruk berhubungan secara positif dengan kejadian stunting. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara perlu meningkatkan kualitas layanan terhadap ibu dan anak, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap gizi. Pemerintah juga perlu memastikan pangan bergizi dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali sehingga kebutuhan gizi masyarakat dapat terpenuhi. Selain itu, penetapan sasaran yang tepat dalam pencegahan dan penanganan stunting. Penurunan stunting adalah tantangan bersama yang membutuhkan waktu, komitmen serta kerja keras dari seluruh elemen masyarakat. Dalam upaya mendukung target untuk menurunkan prevalensi stunting diperlukan pendekatan konvergensi yang mencakup kolaborasi multisector serta berbasis data dan bukti menjadi kunci utama dalam memastikan efektivitas intervensi.

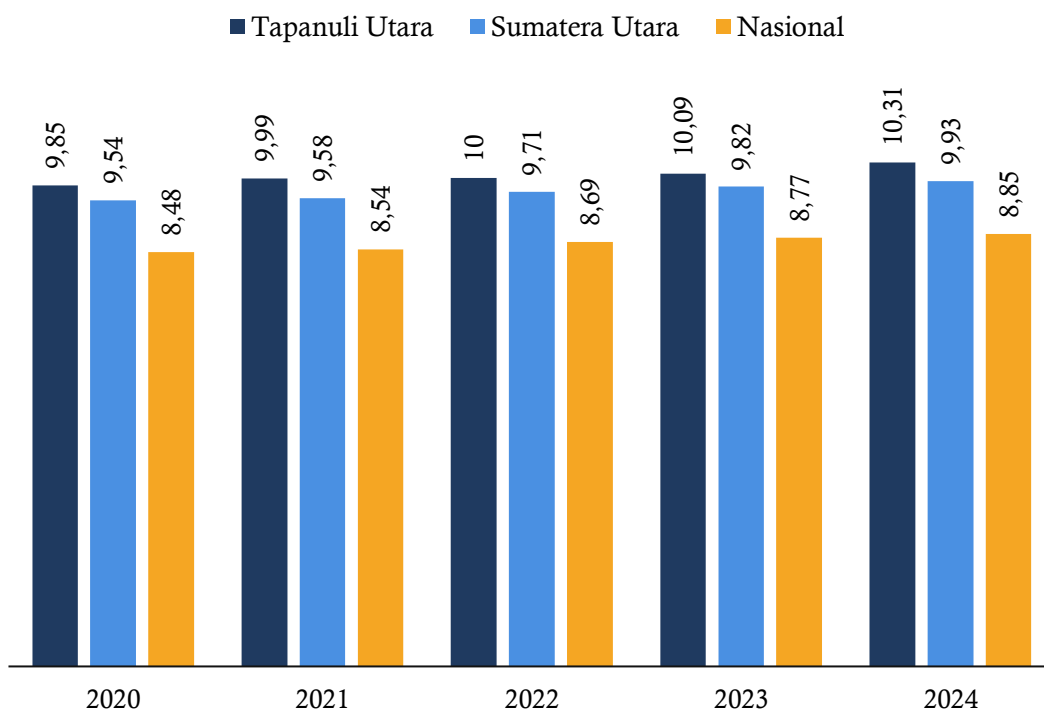
2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berfokus pada peningkatan kemampuan guru, pengembangan kurikulum yang relevan, serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai di semua daerah, termasuk daerah terpencil. Dengan memanfaatkan teknologi, pemerintah berupaya untuk menghilangkan kesenjangan akses belajar antara wilayah perkotaan dan pedalaman,

serta antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Pembangunan pendidikan juga memperhatikan anak-anak dengan disabilitas dan anak-anak yang terlantar. Melalui pendekatan berbasis kompetensi dan karakter, diharapkan pendidikan dapat membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan global dan memperkuat sumber daya manusia untuk masa depan.

Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya penduduk bersekolah mulai sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Namun jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali dan masuk sekolah dasar di usia yang lebih muda atau lebih tua. Menghitung angka rata-rata lama sekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.24. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Tahun)

Sumber: Badan Pusat Statistik

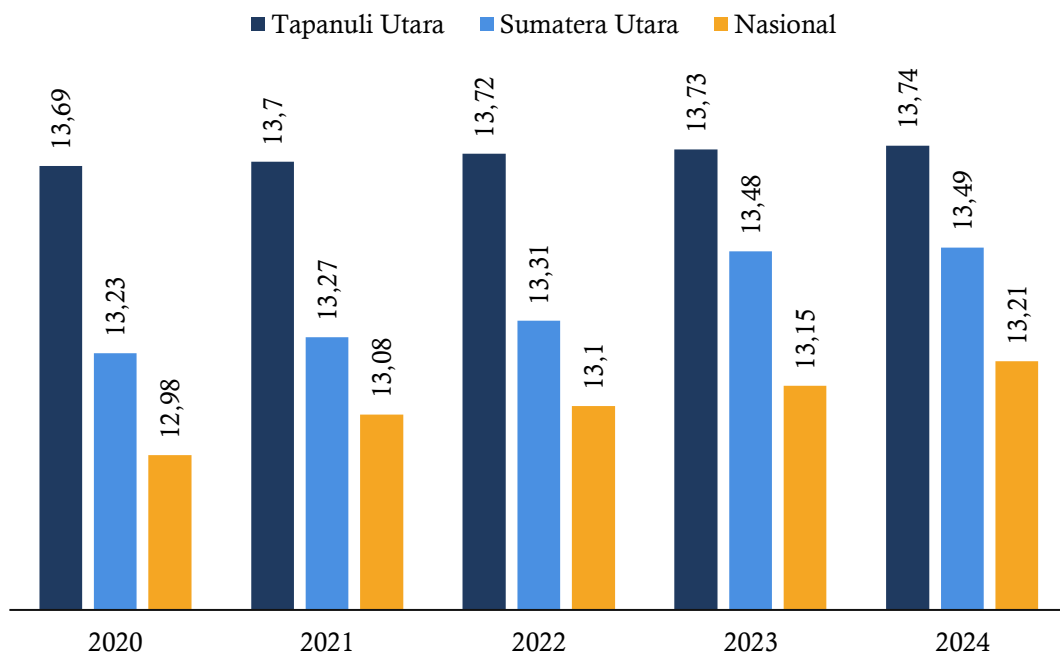
Berdasarkan gambar tersebut, Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 9,85 tahun pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mencapai 10,31 tahun. Artinya, pada tahun 2023, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara sampai pada jenjang SMA kelas 1. Apabila dibandingkan dengan kondisi Provinsi Sumatera Utara dan nasional, rata-rata lama sekolah Kabupaten Tapanuli Utara selalu lebih tinggi setiap tahun. Hal ini

karena rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi keluarga, akses terhadap fasilitas pendidikan, atau pun kesadaran yang kurang dari masyarakat. Maka dari itu, pemerintah perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah merupakan salah satu output yang dapat digunakan untuk memotret pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia karena harapan lama sekolah mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk dimulai pada usia tujuh tahun. Secara sederhana, harapan lama sekolah dapat didefinisikan sebagai angka partisipasi sekolah menurut umur tunggal. Harapan lama sekolah merupakan indikator yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.

Harapan lama sekolah Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.25. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Tahun)

Sumber: Badan Pusat Statistik

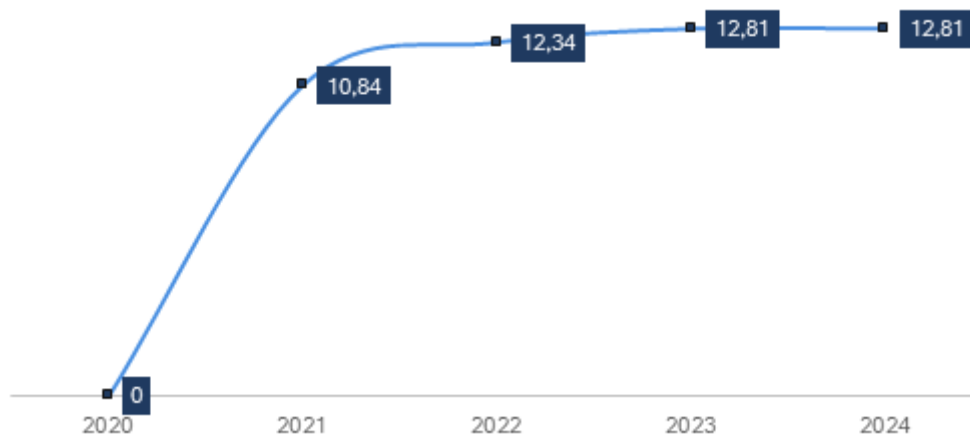
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa untuk Kabupaten Tapanuli Utara, anak-anak yang berusia 7 tahun pada tahun 2024 memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,74 tahun. Artinya, secara umum penduduk Kabupaten Tapanuli Utara memiliki harapan untuk bersekolah sampai jenjang

pendidikan Perguruan Tinggi (Diploma I).

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, harapan lama sekolah masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara lebih tinggi. Harapan lama sekolah yang tinggi menggambarkan kesempatan masyarakat untuk menempuh pendidikan yang tinggi. Kabupaten Tapanuli Utara perlu meningkatkan pembangunan pendidikan agar harapan lama sekolah dapat meningkat di Kabupaten Tapanuli Utara.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Dalam meningkatkan kualitas masyarakat, upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui peningkatan wawasan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Maka dari itu, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana untuk peningkatan literasi masyarakat melalui pembangunan perpustakaan. Untuk mengukur capaian pembangunan literasi masyarakat digunakan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut.

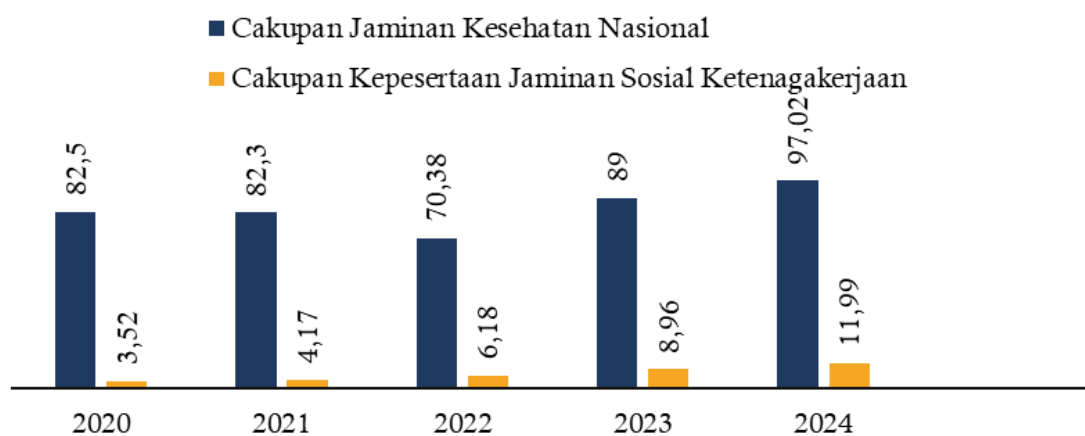


Gambar 2.26. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara
Sumber: Dinas Perpustakaan Kab. Tapanuli Utara

Berdasarkan hasil evaluasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya yang memang masih sangat rendah. Tetapi pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat semakin meningkat. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya jumlah perpustakaan di desa yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Diharapkan semakin banyaknya perpustakaan yang dekat dengan masyarakat terutama di desa dapat menjadi wadah untuk meningkatkan literasi masyarakat.

2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Pemerintah berupaya membangun sistem perlindungan sosial yang adaptif dan responsif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara inklusif. Pemerintah berfokus pada penanggulangan kemiskinan, penguatan ketahanan masyarakat rentan, serta penyediaan jaring pengaman sosial yang terintegrasi. Dengan memperluas cakupan bantuan sosial, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mengembangkan program layanan khusus untuk penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marginal, diharapkan masyarakat dapat lepas dari kemiskinan. Perlindungan sosial yang adaptif diimplementasikan melalui pendekatan berbasis teknologi untuk memastikan penerapan yang lebih transparan, efisien, dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan keadilan sosial dan kesejahteraan yang lebih merata. Upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan sosial yang adaptif dapat digambarkan dari indikator kepesertaan masyarakat terhadap jaminan kesehatan nasional dan kepesertaan perlindungan sosial ketenagakerjaan.



Gambar 2.27. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)

Sumber: BPJS & Dinas Kesehatan

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional meningkat dari 82,50 persen pada tahun 2020 menjadi 89,00 persen pada tahun 2023. Capaian ini masih mengindikasikan bahwa masih adanya sebesar 11,00 persen masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional. Kepesertaan masyarakat perlu ditingkatkan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk ikut serta dalam program jaminan kesehatan sehingga masyarakat dapat memperoleh akses kesehatan yang sama. Sementara itu, kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih rendah, di mana pada tahun 2023 hanya mencapai sebesar 8,96 persen. Hal ini menandakan bahwa masih banyak tenaga kerja yang belum terlindungi oleh program jaminan sosial tenaga kerja yang diberikan pemerintah. Hal ini juga dapat disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang bekerja pada sektor informal sehingga tidak diikutsertakan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah perlu mengidentifikasi dan mendorong kesadaran berbagai perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya untuk berpartisipasi dalam program

jaminan sosial ketenagakerjaan.

2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang beragama dan harmonis, serta mengembangkan kebudayaan yang maju. Dalam mewujudkan masyarakat yang beragama maslahat, pemerintah berfokus pada penguatan toleransi antar umat beragama, peningkatan pendidikan keagamaan, serta pencegahan konflik yang bersumber dari perbedaan agama. Di samping itu, budaya dikembangkan melalui pelestarian warisan budaya lokal, pengembangan karya seni dan tradisi, serta penanaman nilai-nilai luhur budaya Tapanuli Utara. Dengan mengintegrasikan kegiatan budaya dan keagamaan, diharapkan tercipta masyarakat yang berakhlak mulia, berkebudayaan maju, dan mampu menjadi teladan dalam keharmonisan antar umat beragama. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan alat ukur komprehensif yang menilai tingkat harmonisasi hubungan antar pemeluk agama dalam suatu wilayah. Indeks ini dikembangkan sebagai respons terhadap kebutuhan objektifikasi kondisi kerukunan beragama yang selama ini sering hanya dinilai secara kualitatif.

Tabel 2.21. Capaian Indeks Kerukunan Beragama

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kerukunan Umat Beragama	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan suatu alat ukur komprehensif yang menilai sejauh mana pembangunan kebudayaan suatu wilayah atau negara mampu memajukan, melestarikan, dan memberdayakan unsur-unsur kebudayaan sebagai modal sosial dan ekonomi. Indeks ini mengintegrasikan berbagai aspek, termasuk pelestarian warisan budaya, pengembangan kreativitas seni, partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan, serta kontribusi sektor kebudayaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Indeks ini berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung penguatan identitas budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

Tabel 2.22. Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Kebudayaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



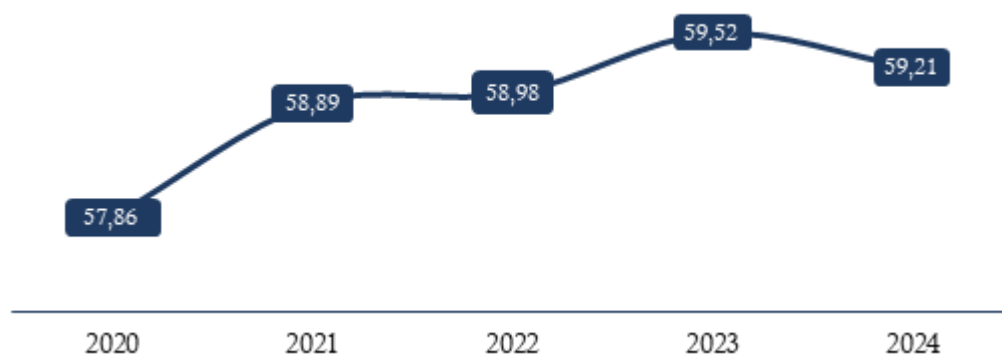
2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Pemerintah bertekad membangun masyarakat yang kuat dan harmonis dengan memperkuat peran keluarga sebagai unit dasar pembangunan. Hal ini ditingkatkan melalui pendidikan keluarga, peningkatan kesejahteraan anggota keluarga, serta penguatan nilai-nilai keharmonisan dan tanggung jawab bersama. Dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemerintah juga memastikan akses yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Upaya ini mencakup pemberdayaan ekonomi perempuan, penghapusan praktik diskriminatif, serta kampanye peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan.

Masyarakat inklusif adalah tujuan akhir yang diharapkan, di mana setiap individu tanpa diskriminasi dapat menikmati kesempatan yang sama. Program ini akan memprioritaskan layanan untuk kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, anak-anak terpinggirkan, dan lansia, dengan penyediaan fasilitas yang terjangkau dan akses layanan yang adil. Dengan mengintegrasikan teknologi dan pendekatan holistik, diharapkan keluarga, perempuan, dan seluruh masyarakat dapat bertumbuh secara adil dan merata. Masyarakat yang inklusif dan kesetaraan gender akan menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak merupakan indikator yang digunakan untuk melihat pemenuhan hak-hak anak dan memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung. Dengan menggunakan indeks ini, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi kekurangan dan mengambil langkah strategis untuk memperbaiki kualitas hidup anak-anak.



Gambar 2.28. Indeks Perlindungan Anak (Poin)

Sumber: Siperindu

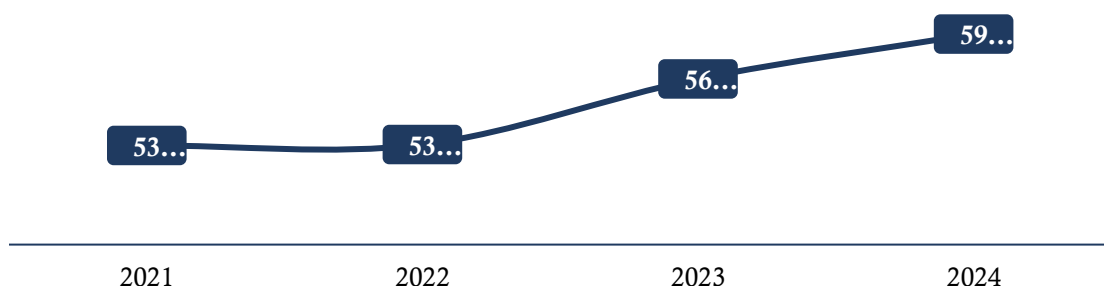
Indeks Perlindungan Anak meningkat dari 57,86 poin pada tahun 2020 menjadi 59,52 poin pada tahun 2023. Dan mengalami penurunan menjadi 59,21 pada tahun 2024. Pada tahun 2024, telah di bentuk UPT. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara untuk lebih intens dalam penanganan dan perlindungan perempuan dan anak. engan begitu, semakin terbuka luas pengaduan dan penanganan kasus perempuan dan anak yang terlapor dan ditangani. Hal ini salah satu penyebab terjadinya penurunan Indeks Perlindungan Anak. Jumlah kasus yang terlapor dan yang ditangani semakin meningkat. Pemerintah terus berupaya meningkatkan perlindungan melalui pengembangan sistem perlindungan anak yang inklusif dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah hal-hal yang menyebabkan daerah menjadi tidak ramah anak.

Indeks Peningkatan Kualitas Keluarga

Indeks Peningkatan Kualitas Keluarga (IPKK) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan keluarga di Indonesia, mencakup aspek-aspek seperti legalitas dan struktur keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya.

Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas kesejahteraan dan kemajuan dalam pembangunan keluarga. Indeks ini bertujuan untuk mengukur seberapa baik suatu keluarga atau masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Indeks pembangunan keluarga menjadi indikator penting untuk melihat kemajuan dan memastikan bahwa setiap keluarga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Indeks ini berperan dalam mendorong tercapainya tujuan pembangunan yang merata.



Gambar 2.29. Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)

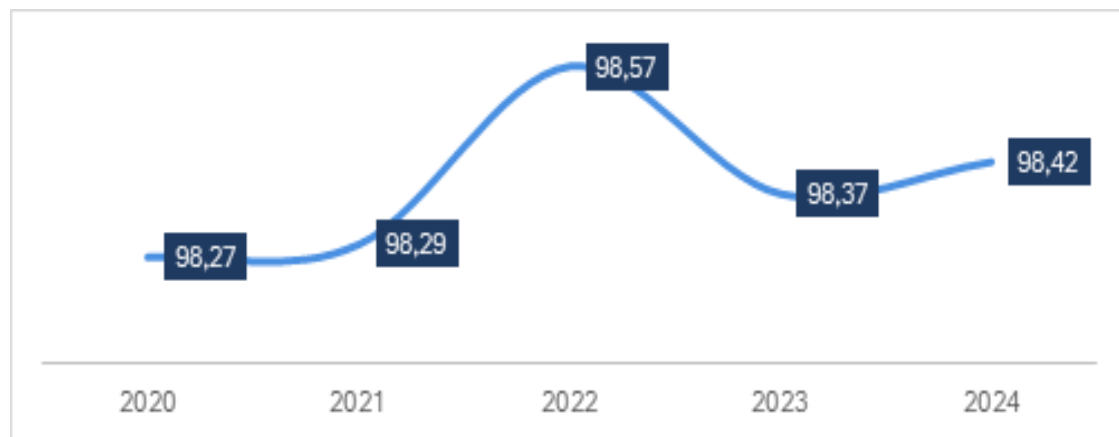
Sumber: Siperindu

Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Tapanuli Utara meningkat dari

53,26 poin pada tahun 2021 menjadi 59,17 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pembangunan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Peningkatan indikator ini juga mengindikasikan bahwa semakin baiknya kualitas hidup manusia. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas keluarga melalui sosialisasi, peningkatan kapasitas keluarga, kualitas hidup, pemberdayaan ekonomi, pembangunan masyarakat, dan penguatan kelembagaan sehingga mewujudkan keluarga yang tentram, mandiri, dan bahagia.

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender mengukur kesetaraan akses pembangunan daerah yang dirasakan oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Indikator ini menjelaskan ketidakadilan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Semakin besar nilai IPG, maka semakin besar pula kesetaraan capaian antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan IPG Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020-2023 sebagai berikut.



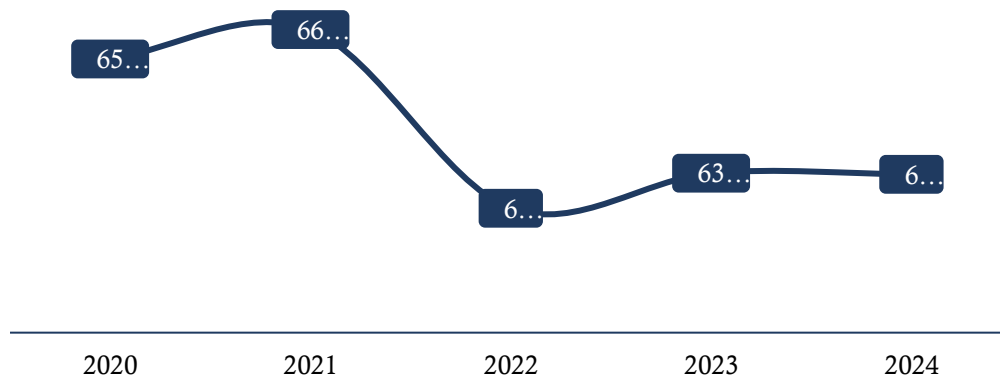
Gambar 2.30. Indeks Pembangunan Gender (Poin)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tapanuli Utara cenderung meningkat dari 98,27 poin pada tahun 2020 mencapai 98,42 poin pada tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa masih belum tercapainya kesetaraan antara pria dengan wanita yang diukur dari aspek pendidikan, kesehatan, dan perekonomian meskipun belum mencapai 100 poin. Pemerintah perlu memastikan agar penduduk wanita juga memperoleh akses pendidikan dan kesehatan yang sama di Kabupaten Tapanuli Utara

Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender mengukur keterlibatan perempuan dalam pembangunan daerah. Indeks Pemberdayaan Gender diukur berdasarkan aspek keterlibatan perempuan dalam parlemen, pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender selama dapat dilihat pada gambar berikut:



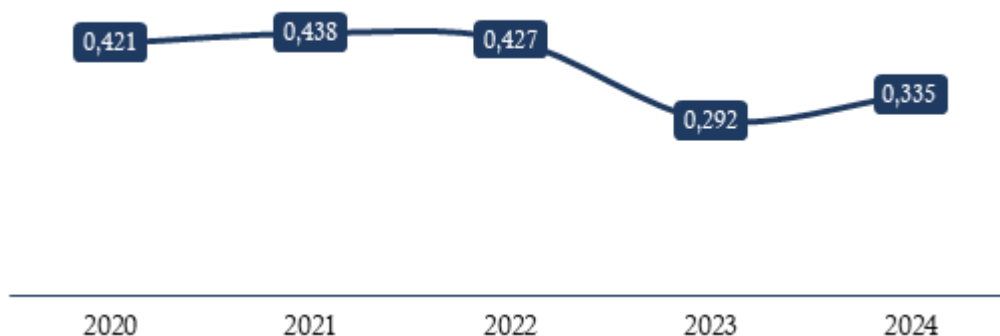
Gambar 2.31. Indeks Pemberdayaan Gender (Poin)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tapanuli Utara cenderung menurun dari 65,81 poin pada tahun 2020 menjadi 63,80 poin pada tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa semakin menurunnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan daerah. Penurunan tersebut disebabkan oleh kurangnya partisipasi perempuan dalam parlemen dan akses pendidikan penduduk perempuan. Kabupaten Tapanuli Utara harus memastikan bahwa setiap orang tanpa memandang gender mendapatkan peran yang sama sehingga tidak ada diskriminasi antar gender. Penduduk perempuan juga harus dilibatkan dalam pembangunan daerah agar tercipta kesetaraan gender.

Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender adalah ukuran statistik yang menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu populasi tertentu. Indeks Ketimpangan Gender diukur dari 3 aspek, yakni 1) Kesehatan Reproduksi; 2) Pemberdayaan; dan 3) Pasar Tenaga Kerja. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tapanuli Utara digambarkan pada gambar berikut.



Gambar 2.32. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tapanuli Utara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan gambar tersebut, Indeks Ketimpangan Gender cenderung

menurun dari 0,421 poin pada tahun 2020 menjadi 0,335 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya ketidaksetaraan gender di Kabupaten Tapanuli Utara, di mana hal ini menunjukkan bahwa baik dari segi akses pembangunan pendidikan dan kesehatan, serta peran penduduk perempuan dalam perekonomian semakin berkurang. Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus dirasakan oleh setiap penduduk tanpa memandang gender.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan suatu daerah untuk bersaing secara ekonomi, sosial, dan politik dalam skala nasional dan internasional.

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sumber daya manusia yang tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumber daya yang ada, memanfaatkan potensi dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Pembangunan SDM di Kabupaten Tapanuli Utara diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan daerah. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk pada suatu wilayah.

SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi yang masuk di suatu daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas, karena mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Selain itu, kualitas tenaga kerja juga ditentukan oleh kondisi internal tenaga kerja itu sendiri seperti: motivasi kerja, keahlian/keterampilan, pengalaman kerja, serta sikap dan perilaku.

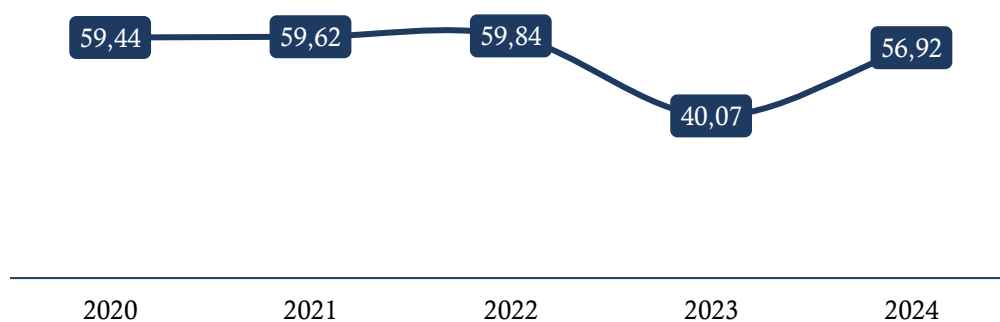
Angka Ketergantungan

Tingginya jumlah angkatan kerja juga akan berpengaruh pada besarnya kapasitas penduduk usia kerja untuk menopang penduduk usia tidak produktif sehingga nilai rasio ketergantungan akan cenderung menurun. Indikator yang menggambarkan ketergantungan penduduk non produktif terhadap kelompok usia produktif adalah rasio ketergantungan. Kondisi yang timpang dengan kecenderungan besarnya kelompok usia non produktif akan menyebabkan tekanan di bidang ekonomi dan sosial.

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas



(keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara atau daerah apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. *Dependency Ratio* Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat dalam gambar berikut.

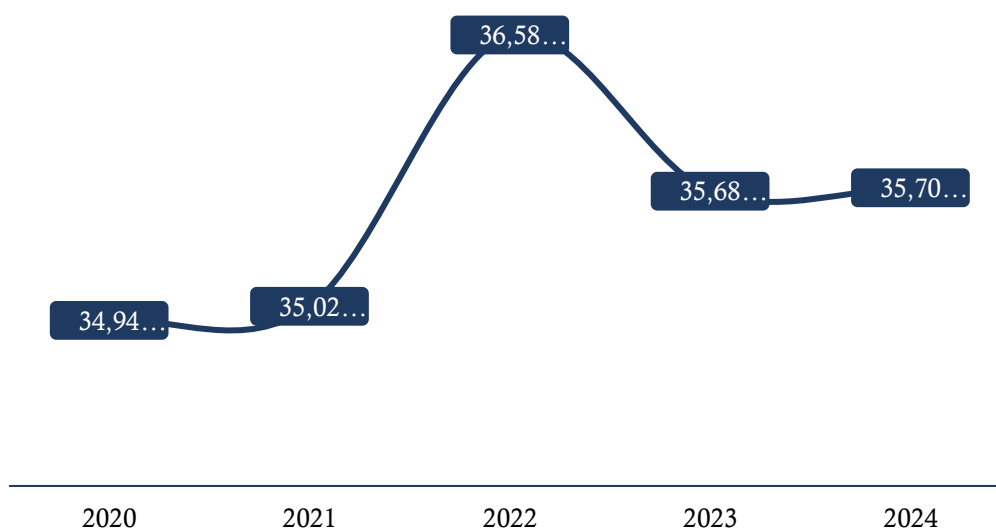


Gambar 2.33. Rasio Ketergantungan Penduduk (Per 100 Penduduk)
Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Gambar tersebut menunjukkan bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Tapanuli Utara semakin menurun dari tahun 2020 sebanyak 59,44 per 100 penduduk menjadi 56,92 per 100 penduduk pada tahun 2024. Rasio ketergantungan sebesar 56,92 per 100 orang menunjukkan bahwa sebanyak kurang lebih 57 orang penduduk usia non-produktif ditanggung oleh 100 penduduk usia produktif. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah melihat penduduk usia tidak produktif yang meningkat dibandingkan tahun 2023 yang menunjukkan bahwa semakin banyaknya tanggungan yang harus ditanggung oleh penduduk produktif.

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja adalah ukuran seberapa efisien dan efektif seorang pekerja dalam menghasilkan barang atau jasa dalam periode waktu tertentu. Perkembangan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja sebagai berikut:



Gambar 2.34. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp Juta/Kapita)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara (diolah, 2025)

Tingkat produktivitas tenaga kerja meningkat dari Rp 34,95 juta/kapita pada tahun 2020 menjadi Rp 36,58 juta per kapita pada tahun 2022, namun menurun pada tahun 2024 menjadi Rp 35,71 juta per kapita dari. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya keterampilan tenaga kerja, inefisiensi alokasi sumber daya, atau melemahnya permintaan pasar yang memengaruhi output ekonomi. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara perlu meningkatkan investasi pada teknologi dan infrastruktur, pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja, reformasi kebijakan untuk mendukung efisiensi sektor ekonomi, serta stimulus untuk mendorong permintaan pasar sehingga tingkat produktivitas tenaga kerja dapat meningkat melalui kontribusi output yang lebih besar.

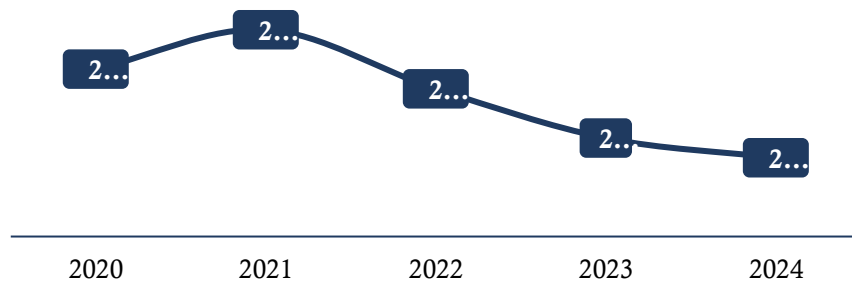
2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) merupakan fondasi penting untuk mendorong inovasi dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Dengan kemajuan Iptek, masyarakat dapat mengembangkan solusi-solusi baru yang tidak hanya memperbaiki kualitas hidup tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor. Inovasi sebagai hasil dari kemajuan Iptek menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dan menciptakan peluang baru dalam perekonomian. Produktivitas ekonomi dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi. Dengan adanya investasi dalam penelitian dan pengembangan, pendidikan sains dan teknologi, serta kebijakan yang mendukung inovasi, diharapkan produktivitas ekonomi dapat meningkat.

Rasio PDRB Industri Pengolahan

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah mengencarkan hilirisasi sumber daya yang tersedia di daerah. Pemerintah berupaya untuk

memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah produk daerah agar mampu berdaya saing di pasar domestik dan internasional. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki produk pertanian yang melimpah, namun belum dimanfaatkan secara optimal sehingga memberikan nilai tambah.



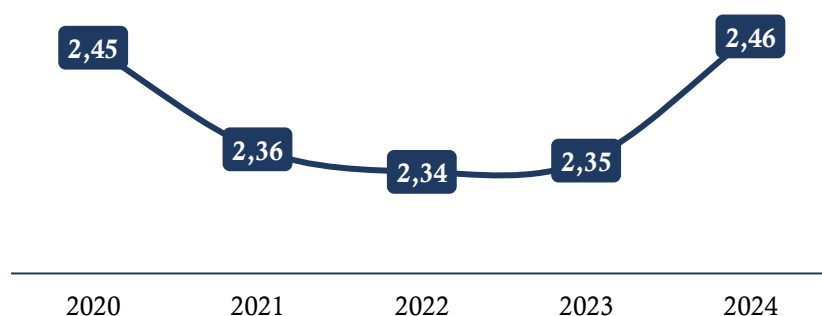
Gambar 2.35. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa terjadi penurunan Rasio PDRB Industri pengolahan sejak tahun 2021 sebesar 2,31 persen menjadi 2,18 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya peran industri bagi perekonomian daerah. Penurunan ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya hilirisasi produk daerah untuk meningkatkan nilai tambah produk. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara perlu mendorong peningkatan ini melalui pemberdayaan masyarakat dalam menghasilkan produk yang bernilai tambah dan menarik investasi baik dari dalam negeri, maupun luar negeri untuk Sektor Industri Pengolahan.

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi ukuran bagi kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian. Hal ini karena dengan adanya peningkatan kunjungan wisatawan berdampak bagi perekonomian setempat, terutama Sektor Akomodasi, seperti perhotelan atau penginapan, dan Makan Minum, seperti restoran, rumah makan, atau cafe.



Gambar 2.36. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)

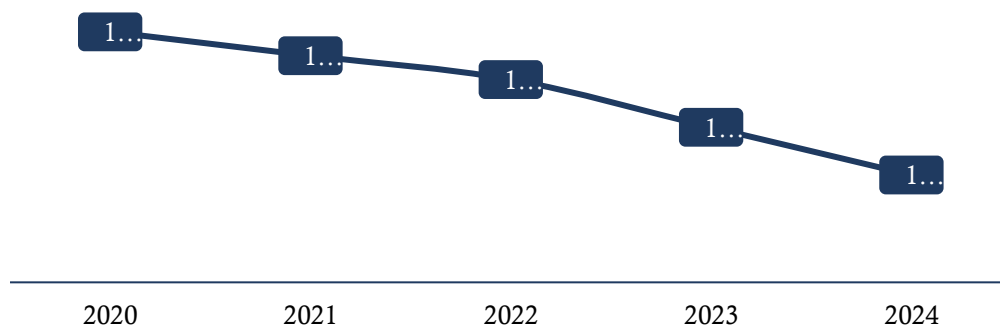
Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum menurun dari 2,45 persen pada

tahun 2020 menjadi 2,34 persen pada tahun 2022, lalu kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 2,46 persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang berdampak bagi perekonomian secara global karena pembatasan aktivitas masyarakat. Namun, setelah pandemi berakhir, pemerintah terus melakukan upaya pemulihan ekonomi hingga berhasil meningkatkan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencapai 2,46 persen. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara perlu meningkatkan daya tarik pariwisata daerah dan mendorong promosi destinasi wisata agar menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Tapanuli Utara.

Rasio Sektor Jasa Keuangan terhadap PDRB

Rasio Sektor Jasa Keuangan digunakan untuk melihat bagaimana kontribusi sektor keuangan (bank dan lembaga keuangan lainnya) terhadap perekonomian daerah. Perkembangan rasio jasa keuangan terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.37. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)

Sumber: BPS

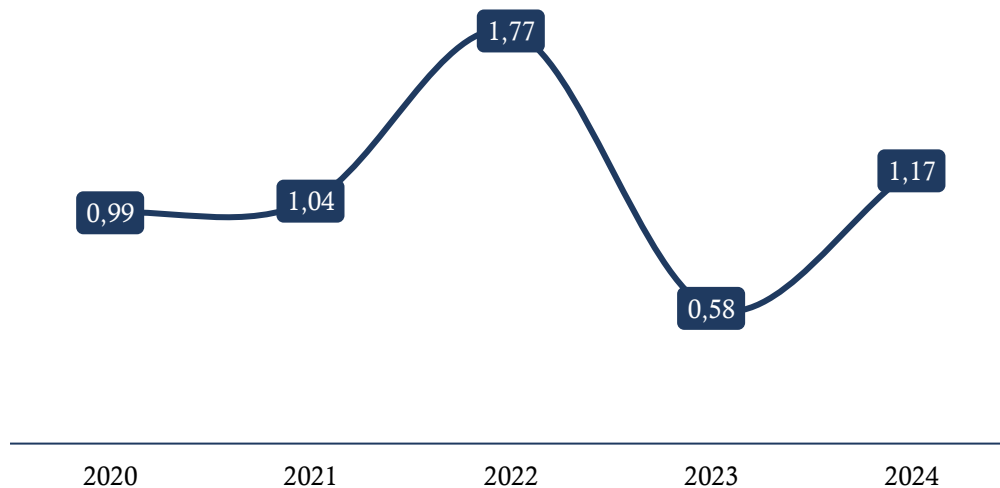
Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan menurun dari 1,66 persen menjadi 1,49 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor keuangan di Kabupaten Tapanuli Utara semakin rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh semakin kurangnya kuantitas lembaga keuangan ataupun rendahnya pendapatan sektor jasa keuangan pada Kabupaten Tapanuli Utara.

Rasio Kewirausahaan

Wirausaha merupakan orang yang memiliki usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Adanya wirausaha penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Untuk melihat perkembangan kewirausahaan di suatu wilayah, maka dapat digunakan indikator rasio kewirausahaan. Rasio kewirausahaan mengukur proporsi penduduk yang berusaha dibantu paling tidak satu orang buruh/karyawan tetap dengan seluruh angkatan kerja. Apabila rasio ini meningkat, maka semakin banyak wirausaha yang

terdapat di wilayah tersebut.

Selain itu, peningkatan rasio kewirausahaan dapat menunjukkan semakin terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Perkembangan rasio kewirausahaan pada Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut:



Gambar 2.38. Rasio Kewirausahaan (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa rasio kewirausahaan meningkat dari 0,99 persen pada tahun 2020 menjadi 1,77 persen pada tahun 2022. Tetapi, pada tahun 2023 menurun cukup jauh menjadi 0,58 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berkurangnya wirausaha yang berada di Kabupaten Tapanuli Utara. Penurunan ini juga dapat disebabkan oleh semakin banyaknya masyarakat yang bekerja pada sektor informal dibandingkan bekerja pada sektor formal ataupun berwirausaha. Pada tahun 2024, Rasio Kewirausahaan kembali meningkat menjadi sebesar 1,17 persen. Masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara perlu didorong untuk menumbuhkan jiwa wirausaha agar mampu secara mandiri menghasilkan pendapatan, serta berkontribusi bagi perluasan lapangan pekerjaan daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat yang inovatif, serta dukungan berupa bantuan permodalan untuk UKM daerah.

Perbankan dan Pasar Modal

Perbankan adalah sistem lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit serta berbagai layanan keuangan lainnya. Dalam pembangunan daerah, perbankan berperan strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan sektor produktif, penyediaan alat pembayaran yang efisien, dan pengelolaan risiko keuangan di tingkat lokal. Penetrasi perbankan yang merata menjadi prasyarat terciptanya inklusi keuangan dan

pemerataan akses modal di seluruh wilayah sehingga mendukung aktivasi potensi ekonomi daerah.

Pasar Modal adalah infrastruktur yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang memiliki surplus dana melalui perdagangan efek (saham, obligasi, dan instrumen derivatif). Dalam perspektif pembangunan daerah, pasar modal berfungsi sebagai alternatif pendanaan proyek-proyek infrastruktur dan ekspansi usaha berskala besar yang tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh kredit perbankan. Pengembangan pasar modal daerah memungkinkan mobilisasi dana masyarakat secara optimal, menarik investasi dari luar daerah, dan mendiversifikasi sumber pembiayaan pembangunan. Penerbitan obligasi daerah (municipal bonds) merupakan instrumen inovatif yang memungkinkan pemerintah daerah mengatasi keterbatasan APBD untuk akselerasi pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak pada peningkatan daya saing dan kualitas hidup masyarakat daerah.

Tabel 2.23. Indikator Perbankan dan Pasar Modal

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (ADHB)	0,28	0,29	0,27	0,25	0,24
Total Kredit/PDRB ADHB (%)	0,32	0,29	0,33	0,34	0,35
Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan (Rp miliar)	-	42,25	20,04	33,08	47,12

Sumber: BI & OJK (Diolah, 2025)

Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB ADHB relatif stabil dari 0,22 persen menjadi 0,25 persen. Rasio ini digunakan untuk melihat apakah dana masyarakat yang ditabung di bank mampu mendorong perekonomian daerah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Utara masih rendah. Total Kredit terhadap PDRB ADHB sedikit meningkat dari 0,25 persen menjadi 0,35 persen selama tahun 2020-2024. Rasio ini digunakan untuk melihat pengaruh dari penyaluran dana kepada masyarakat terhadap kondisi perekonomian daerah.

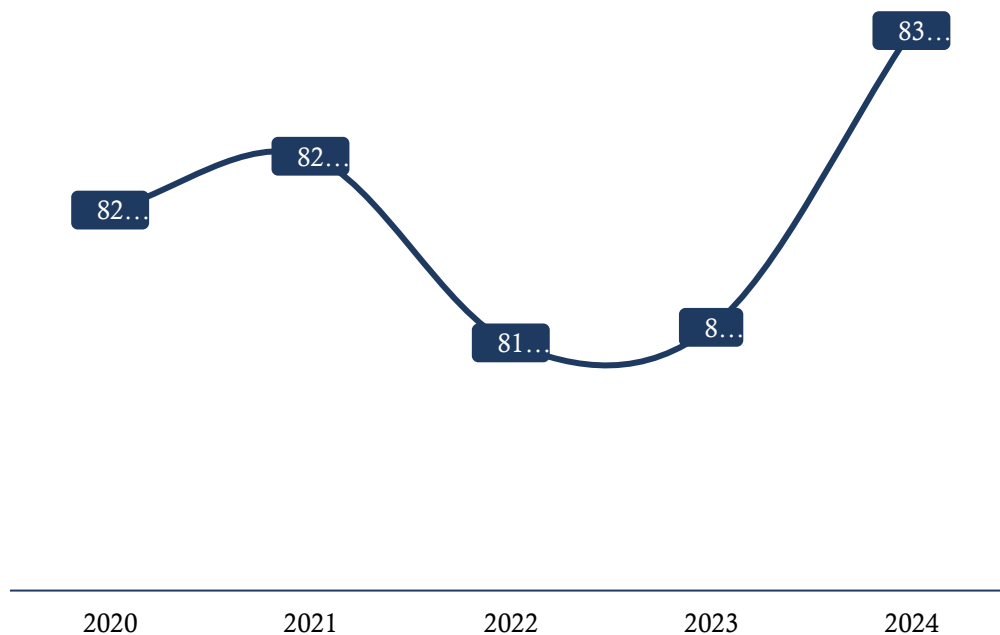
Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran dana kepada masyarakat sangat sedikit berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Utara. Nilai transaksi saham berupa nilai rata-rata tahunan mengalami fluktuasi namun cenderung menurun dari tahun 2021 sebesar Rp 42,25 miliar menjadi Rp 33,08 miliar pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya aktivitas masyarakat di dalam pasar modal.

Angkatan Kerja

Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Angkatan kerja yang berkualitas memiliki

daya saing lebih dalam mengisi kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan ukuran untuk melihat ketersediaan penduduk angkatan kerja pada suatu wilayah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja penduduk berusia 15 tahun ke atas yang siap bekerja dibandingkan dengan total penduduk yang berada di suatu wilayah. TPAK merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah. TPAK Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.39. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data tersebut, TPAK Kabupaten Tapanuli Utara cenderung mengalami penurunan dari 82,18 persen pada tahun 2020 menjadi 83,68 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berkurangnya penduduk usia produktif yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan/pengangguran. Untuk mengukur kualitas tenaga kerja pada suatu daerah, maka dapat dilihat melalui pendidikan angkatan kerja. Angkatan kerja menurut tingkat pendidikan pada Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut:

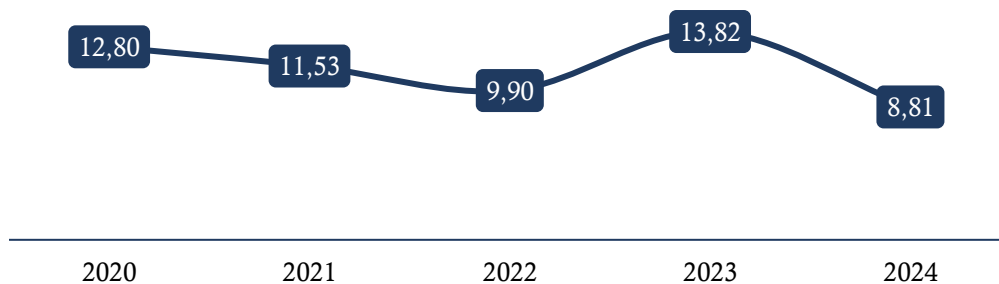
Tabel 2.24. Angkatan Kerja menurut Jenjang Pendidikan

Angkatan Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
<= SD	38.309	38.520	31.708	29.577	32.178
SMP	42.305	40.679	40.633	40.320	46.755
SMA	47.602	50.183	62.599	59.617	72.478
SMK	22.196	26.030	22.289	31.919	27.764

Angkatan Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
D-I/II/III	5.279	5.211	3.749	5.731	3.248
D-IV/S-1	16.802	15.038	13.528	20.147	14.069
Total	172.493	175.661	174.506	187.311	196.492

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa angkatan kerja di Kabupaten Tapanuli Utara didominasi penduduk dengan lulusan SMA pada tahun 2024 sebanyak 72.478 jiwa. Hal ini perlu diantisipasi oleh Pemerintah Daerah melalui pembukaan lapangan pekerjaan atau membina para generasi muda untuk menjadi wirausaha muda. Cakupan proporsi angkatan kerja berpendidikan perguruan tinggi tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



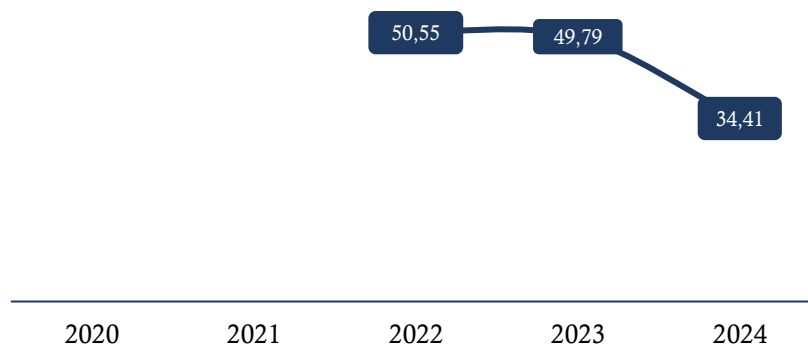
Gambar 2.40. Proporsi Angkatan Kerja Perguruan Tinggi (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan gambar tersebut, proporsi angkatan kerja dengan gelar tertinggi Diploma ke atas cenderung meningkat pada tahun 2020 sebesar 12,80 persen meningkat pada tahun 2023 menjadi sebesar 13,82 persen, lalu menurun pada tahun 2024 menjadi 8,81 persen. Hal ini menunjukkan bahwa menurunnya kualifikasi angkatan kerja perguruan tinggi pada Kabupaten Tapanuli Utara. Pemerintah daerah perlu mendorong masyarakat menempuh pendidikan yang lebih tinggi agar kualitas SDM di Kabupaten Tapanuli Utara semakin meningkat sehingga memiliki daya saing. Hal ini dapat didorong oleh pemerintah daerah melalui bantuan seperti program beasiswa untuk siswa berprestasi.

Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah indikator pengukuran dari penerapan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. IID bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta mendorong terciptanya inovasi yang berkelanjutan dan berdampak bagi masyarakat.



Gambar 2.41. Indeks Inovasi Daerah

Sumber: Kemendagri

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tapanuli Utara terus mengalami penurunan dari 50,55 poin pada tahun 2022 menjadi 34,41 poin pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin rendahnya kapasitas pemerintah daerah dalam menghasilkan terobosan baru dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Pemerintah perlu mendorong perangkat-perangkat daerah agar terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang optimal dan mendorong pertumbuhan daerah untuk kemajuan Kabupaten Tapanuli Utara.

2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru melibatkan integrasi praktik-praktik berkelanjutan dalam kegiatan ekonomi baik di darat maupun di laut. Ekonomi Hijau fokus pada pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dengan mengurangi dampak lingkungan dan menggunakan sumber daya alam secara efisien. Ekonomi hijau adalah sebuah model pembangunan ekonomi yang berfokus kepada investasi, modal, infrastruktur, pekerjaan, dan keterampilan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan lingkungan berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau di Tapanuli Utara antara lain :

1. Pertanian Berkelanjutan

Tapanuli Utara memiliki basis pertanian yang besar (kopi, hortikultura, padi, jagung). Penerapan teknologi ramah lingkungan (biopestisida, pupuk organik, irigasi hemat air, pertanian presisi) dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kualitas tanah dan air.

2. Energi Terbarukan

Daerah ini punya potensi energi air (PLTA) dan energi panas bumi (geothermal di Sarulla, Sipoholon, Tarutung).

3. Pengelolaan Hutan & Karbon

4. Pengelolaan Sampah & Limbah

Sementara itu, Ekonomi Biru berorientasi pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk kesejahteraan ekonomi dan lingkungan. Penerapan

Ekonomi Biru di Tapanuli Utara antara lain :

1. Perikanan Darat dan Budidaya

Tapanuli Utara memiliki akses ke Danau Toba dan beberapa sungai besar. Potensi pengembangan ikan air tawar (nila, mas, lele, bawal) melalui budidaya keramba jaring apung (KJA) yang ramah lingkungan.

2. Wisata Air dan Ekowisata

Danau Toba di wilayah utara Taput menjadi aset utama. Pengembangan wisata bahari darat (water tourism) berbasis budaya Batak, olahraga air, wisata kuliner berbasis hasil danau, serta festival budaya berbasis air.

3. Energi Air (Hydropower)

Potensi aliran sungai dapat dioptimalkan untuk mikrohidro berbasis desa. Ini mendukung elektrifikasi pedesaan sekaligus sejalan dengan agenda ekonomi biru-hijau.

4. Konservasi Perairan

Menjaga kualitas air Danau Toba sangat penting. Program pemantauan pencemaran (limbah domestik, pakan ikan berlebih, limbah pertanian) harus diperkuat

Inovasi teknologi juga memiliki peran penting dalam mendukung transisi ke arah ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi gas rumah kaca adalah pelepasan gas ke atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca, yaitu memerangkap panas matahari dan meningkatkan suhu bumi. Gas-gas ini meliputi karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dinitrogen oksida (N₂O), dan fluorokarbon (seperti CFC). Emisi ini berasal dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, pertanian, dan industri, serta beberapa proses alami yang berdampak pada perubahan iklim, peningkatan suhu global, dan gangguan ekosistem.

2.3.4. Transformasi Digital

Transformasi Digital adalah suatu proses perubahan dan evolusi yang mencakup pengadopsian dan pemanfaatan teknologi digital untuk mengubah cara kerja, layanan, atau bisnis dalam berbagai sektor. Proses ini melibatkan penggunaan teknologi seperti komputer, internet, dan perangkat lunak untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat proses, dan meningkatkan kualitas layanan. Transformasi digital adalah pendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, memberikan keunggulan kompetitif bagi negara yang mengadopsinya. Namun, perlu juga

mempertimbangkan aspek etika, seperti privasi data, dampak pada tenaga kerja karena otomatisasi, dan pentingnya inklusi digital untuk memastikan semua pihak dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi. Selain itu, transformasi digital dapat mendukung praktik-praktik yang lebih berkelanjutan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi kebutuhan akan bahan fisik. Transformasi Digital merupakan perubahan menyeluruh yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, inovasi, dan efisiensi sambil mengatasi tantangan dan mempertimbangkan implikasi etis serta dampak lingkungan.

Indeks Masyarakat Digital

Pesatnya pengembangan teknologi memaksa manusia untuk beradaptasi dengannya. Teknologi digital memiliki manfaat bagi hidup masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan instansi lainnya. Adopsi teknologi akan membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Selain memiliki manfaat, teknologi digital juga menjadi tantangan bagi masyarakat. Permintaan tenaga kerja yang memahami teknologi digital pun semakin banyak. Untuk itu, maka masyarakat harus berliterasi digital agar mampu bersaing. Indeks Masyarakat Digital merupakan ukuran yang mengukur tingkat adopsi digital masyarakat yang diukur dari infrastruktur, keterampilan digital, pemberdayaan, dan pekerjaan. Hasil penilaian Indeks Masyarakat Digital di Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut.

Tabel 2.25. Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Tapanuli Utara

Pilar	2022	2023	2024	Sub Pilar	2022	2023	2024
Infrastruktur dan Ekosistem	38,70	56,58	50,24	Akses dan Adopsi Teknologi	37,47	55,78	63,53
				Ekosistem Pembelajaran	39,93	50,10	34,81
				Digitalisasi Pemerintah	-	70,30	59,78
Keterampilan Digital	60,06	56,78	59,27	Komplementaritas	53,35	54,76	56,15
				Pengenalan	67,86	61,34	60,32
				Keamanan TIK	58,90	54,26	61,25
Pemberdayaan	11,40	29,22	23,81	Konsumen/ Pengguna	14,60	35,72	29,21
				Penjual/ Penyedia	8,20	22,72	18,41
Pekerjaan	29,82	34,86	35,19	Permintaan	47,31	53,65	56,66
				Penawaran	12,33	16,06	13,71
Indeks Masyarakat Digital					34,71	44,50	41,97

Sumber: Indeks Masyarakat Digital Indonesia



Berdasarkan hasil evaluasi, Indeks Masyarakat Digital mengalami peningkatan dari 34,71 poin pada tahun 2022 menjadi 44,50 poin pada tahun 2023, lalu menurun pada tahun 2024 menjadi 41,97 poin.

Pilar Infrastruktur dan Ekosistem meningkat dari 38,70 poin pada tahun 2022 menjadi 56,58 poin pada tahun 2023, namun menurun menjadi 50,24 poin pada tahun 2024. Infrastruktur dan ekosistem menggambarkan bagaimana kondisi infrastruktur digital pada suatu daerah yang dilihat dari akses terhadap TIK dan adopsi terhadap teknologi pada sektor swasta/bisnis, penerapan teknologi digital pada sekolah, serta sistem pemerintahan berbasis elektronik pada pemerintah daerah.

Pada tahun 2024, Sub-Pilar Akses dan Adopsi Teknologi semakin membaik, namun Ekosistem Pembelajaran dan Digitalisasi Pemerintah mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penerapan sistem pembelajaran berbasis teknologi digital pada setiap sekolah, serta sistem pemerintahan berbasis elektronik masih belum diimplementasikan secara baik.

Pilar Keterampilan Digital mengalami penurunan dari 60,06 poin pada tahun 2022 menjadi 56,78 poin pada tahun 2023, lalu meningkat pada tahun 2024 menjadi 59,27 poin. Keterampilan digital mencerminkan persepsi masyarakat terhadap pengenalan, akses, pemahaman terhadap informasi digital, dan penggunaan terhadap perangkat digital. Dilihat dari sub pilar pendukungnya, Sub-Pilar Pengenalan mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir. Sub-Pilar ini berkaitan dengan identifikasi dan pemahaman, serta mengartikulasi kebutuhan informasi melalui TIK. Hal ini menandakan menurunnya kemampuan masyarakat dalam memahami penggunaan berbagai peralatan digital.

Pilar pemberdayaan meningkat dari 11,40 poin pada tahun 2022 menjadi 29,22 poin pada tahun 2023, namun menurun menjadi 23,81 poin pada tahun 2024. Pilar Pemberdayaan menunjukkan kemampuan digital masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka atau aktivitas digital masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya.

Pilar ini juga menilai penerapan digital pada UMKM dan peranan sharing economy dalam digitalisasi. Pilar ini memiliki 2 sub pilar, yaitu konsumen dan penjual dengan nilai yang meningkat tinggi pada tahun 2023, namun keduanya sedikit menurun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan digital skill yang dilihat dari tingkat intensitas penggunaan teknologi digital.

Pilar Pekerjaan juga meningkat dari 29,82 poin pada tahun 2022 menjadi 34,86 poin pada tahun 2023, lalu meningkat lagi pada tahun 2024 menjadi 35,19 poin. Pilar Pekerjaan mencerminkan kondisi permintaan pekerjaan yang membutuhkan teknologi digital dan ketersediaan tenaga kerja dengan keahlian digital. Kedua sisi ini mengalami peningkatan poin pada tahun 2023.

Namun, pada tahun 2024 penawaran justru mengalami penurunan, sementara permintaan meningkat. Ketersediaan tenaga kerja dengan keahlian digital lebih rendah dibandingkan permintaan. Hal ini menandakan bahwa masih kurangnya

pasokan tenaga kerja dengan keahlian digital untuk memenuhi permintaan.

2.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global merupakan suatu proses penting yang menghubungkan perekonomian suatu negara dengan sistem ekonomi internasional. Melalui peningkatan perdagangan internasional, suatu wilayah dapat membuka akses pasar untuk produk domestik, sekaligus mengimpor barang dan jasa yang tidak diproduksi secara efisien. Implementasi perjanjian perdagangan bebas dan investasi asing langsung juga menjadi katalis utama dalam memperkuat infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja, serta memungkinkan transfer teknologi yang penting untuk pengembangan industri lokal. Mobilitas tenaga kerja terampil dan keterhubungan keuangan semakin menambah dinamika, memberikan peluang bagi pekerja untuk berkontribusi di pasar global.

Tabel 2.26. Capaian Indikator Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (%)	33,55	33,47	33,26	33,13	32,18
Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%)	43,34	43,11	41,84	41,64	N/A

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan data dari BPS, kontribusi PMTB terhadap PDRB mengalami penurunan dari 33,55 persen pada tahun 2020 menjadi 32,18 persen pada tahun 2024. Tren penurunan ini mencerminkan adanya penurunan proporsi investasi tetap terhadap total output ekonomi. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti berkurangnya kepercayaan investor, adanya perubahan kebijakan ekonomi, atau kondisi pasar yang tidak menguntungkan.

Ekspor Barang dan Jasa di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami fluktuasi cenderung relatif stabil dari tahun 2020 sebesar 43,34 persen PDRB menjadi 41,64 persen PDRB pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa menurunnya kontribusi ekspor terhadap perekonomian daerah. Rasio ini diharapkan meningkat karena menunjukkan bahwa Kabupaten Tapanuli Utara mampu berdaya saing secara domestik dan global yang dilihat dari tingginya peran aktivitas perdagangan ke luar daerah sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerahnya. Beberapa strategi yang dilakukan pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, inovasi dan kerja sama antara pemerintah dan swasta.

2.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan



untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melaksanakan kegiatan.

Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur adalah indikator untuk mengukur kualitas dan ketersediaan infrastruktur di suatu daerah. Infrastruktur yang diukur dapat meliputi beberapa aspek, seperti:

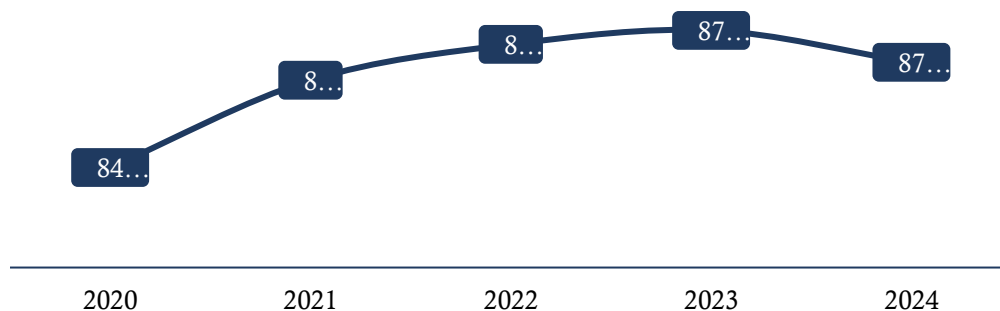
Jaringan Jalan: Kualitas dan kuantitas jalan, termasuk jalan raya, jalan tol, dan jalan lokal.

- Jaringan Transportasi: Ketersediaan dan kualitas transportasi umum, seperti kereta api, bus, dan bandara.
- Infrastruktur Air dan Sanitasi: Ketersediaan dan kualitas infrastruktur air bersih, sanitasi, dan pengelolaan limbah.
- Infrastruktur Energi: Ketersediaan dan kualitas infrastruktur energi, seperti listrik, gas, dan energi terbarukan.
- Infrastruktur Telekomunikasi: Ketersediaan dan kualitas infrastruktur telekomunikasi, seperti jaringan internet, telepon, dan jaringan data.

Kondisi Indeks Infrastruktur Tapanuli Utara sampai tahun 2024 pada taraf sedang dengan angka 50-60, dimana telah hampir dipenuhinya Infrastruktur dasar listrik dan jaringan telekomunikasi di hampir wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Sudah terhubung konektivitas antar daerah ibu kota kecamatan ke ibukota kabupaten walaupun kondisi kemantapan jalan masih harus terus ditingkatkan.

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Rumah tangga dengan akses hunian layak merupakan hal penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hunian layak mencakup ketersediaan rumah yang aman, sehat, dan nyaman dengan fasilitas dasar, seperti akses air bersih, sanitasi, dan infrastruktur yang mendukung kehidupan sehari-hari. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rumah tangga dapat menikmati hunian yang terjangkau dan berkelanjutan.



Gambar 2.42. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau (%)

Sumber: Siperindu

Persentase rumah layak huni meningkat dari 84,51 persen pada tahun 2020 menjadi 87,95 persen pada tahun 2023, namun menurun pada tahun 2024 menjadi 87,15 persen pada tahun 2024. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap masyarakat memperoleh tempat tinggal yang layak sehingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Program-program perumahan rakyat, seperti penyediaan lahan, bantuan pembiayaan, dan pembangunan infrastruktur dasar merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan akses hunian layak kepada masyarakat.

Persentase Desa Mandiri

Persentase Desa Mandiri mengacu pada proporsi desa-desa dalam suatu wilayah yang telah mencapai tingkat kemandirian tertentu. Kemandirian biasanya dinilai berdasarkan kriteria seperti ketahanan pangan, sumber daya lokal, infrastruktur yang memadai, dan kemampuan ekonomi yang stabil. Persentase ini merupakan alat penting untuk memantau perkembangan desa dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Namun, hingga saat ini di Kabupaten Tapanuli Utara masih belum terdapat desa berstatus mandiri sehingga Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam pembangunan jangka menengah ini mendorong pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan status desa di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.

Tabel 2.27. Capaian Persentase Desa Mandiri

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Desa Mandiri	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

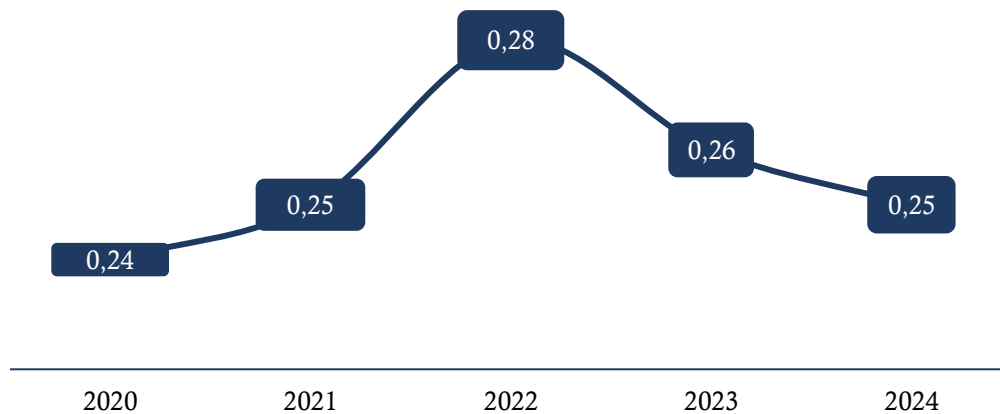
Stabilitas Ekonomi Makro mengacu pada kondisi ekonomi yang ditandai oleh pertumbuhan yang stabil, inflasi yang terkendali, dan tingkat pengangguran yang relatif rendah. Untuk mencapai stabilitas makro, pemerintah mengimplementasikan reformasi struktural untuk meningkatkan efisiensi ekonomi. Namun, stabilitas ekonomi makro juga rentan terhadap guncangan eksternal, seperti krisis global atau gangguan pasokan yang memerlukan kebijakan yang proaktif dan institusi yang kuat untuk memitigasinya. Stabilitas ekonomi makro menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)



merupakan indikator fiskal penting yang mengukur kemampuan suatu daerah dalam menggali potensi penerimaan pajak daerah relatif terhadap besaran perekonomian daerah tersebut. Secara matematis, rasio ini dihitung dengan membandingkan total realisasi penerimaan pajak daerah terhadap nilai PDRB dalam periode yang sama.



Gambar 2.43. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)

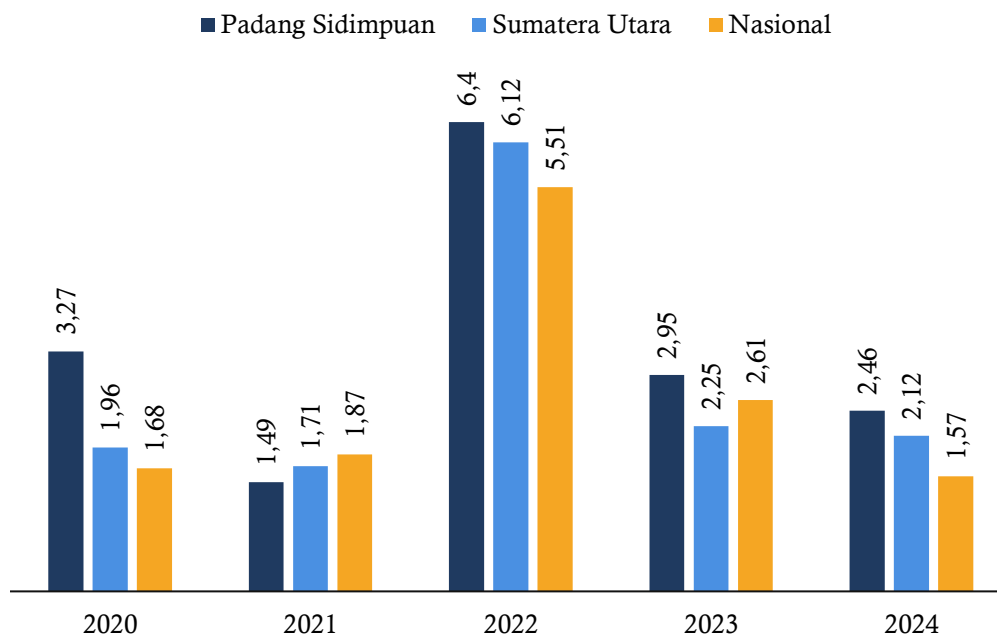
Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Diolah, 2025)

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Tapanuli Utara relatif stabil dari tahun 2020 sebesar 0,24 persen menjadi 0,28 persen pada tahun 2022, lalu menurun pada tahun 2024 menjadi 0,25 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap perekonomian daerah sehingga perlu ditingkatkan penerimaan dari pajak daerah.

Laju Inflasi

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini terkait erat dengan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah dan mampu memengaruhi kemampuan daya beli masyarakat.

Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi. Inflasi Kabupaten Tapanuli Utara sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Padang Sidempuan. Kondisi Inflasi di Kota Padang Sidempuan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.44. Inflasi Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional
Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan gambar tersebut, inflasi tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2020 inflasi sebesar 3,27 persen meningkat pesat di tahun 2022 menjadi 6,40 persen. Kemudian, pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 2,46 persen. Laju Inflasi Kota Padang Sidempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional pada tahun 2020, 2022, 2023, dan 2024. Inflasi Kota Padang Sidempuan berdasarkan pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28. Inflasi Menurut Jenis Pengeluaran Kota Padang Sidempuan Tahun 2020-2024

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Makanan, Minuman, dan Tembakau	5,70	2,91	6,06	4,57	3,65
Pakaian dan Alas Kaki	4,02	3,12	2,38	2,73	1,93
Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,14	-0,29	3,48	1,79	-0,13
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	3,01	2,17	7,55	0,75	1,45
Kesehatan	1,03	-0,09	7,11	6,31	0,98
Transportasi	-0,55	0,00	17,5	0,54	0,14
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-1,76	0,88	-1,58	-0,92	0,83
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	3,97	3,89	11,64	1,74	4,15
Pendidikan	-0,30	0,00	1,16	1,10	2,23

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran	0,00	0,86	7,27	1,33	1,40
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	14,31	0,48	8,68	5,67	10,49
Inflasi	3,27	1,49	6,40	4,57	3,65

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2024 penyumbang inflasi terbesar adalah Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 10,49 persen, kemudian Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 4,15 persen, dan Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 3,65 persen. Pemerintah harus memastikan ketersediaan barang-barang komoditas dan kebutuhan masyarakat, serta akses masyarakat untuk memperoleh barang terkait agar inflasi dapat terjaga.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif adalah suatu sistem yang menggabungkan aturan yang jelas dengan kemampuan untuk menyesuaikan terhadap perubahan. Sistem ini didasarkan pada prinsip integritas, meliputi kejujuran, transparansi, dan keadilan, serta kemampuan adaptif yang menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi. Dalam praktiknya, regulasi harus dirancang dengan *clear guidelines* yang konsisten dan ditegakkan dengan adil. Namun, sistem ini juga harus memiliki mekanisme untuk meninjau dan memperbarui aturan-aturan tersebut guna mengakomodasi perubahan internal maupun eksternal. Keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi tetap relevan dan efektif tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasar. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus berupaya mereformasi tata kelola pemerintahannya untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan menyeluruh.

Tabel 2.29. Indikator Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	NA	C (47,52)	CC (52,32)	B (60,67)	B (58,88)
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Poin)	N/A	2,12	2,39	2,69	2,85
Indeks Pelayanan Publik (Poin)	N/A	2,97	3,49	3,43	3,87



Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	N/A	N/A	85,71	84,15	83,98
Indeks Integritas (Poin)	N/A	72,88	72,28	73,90	68,64
Indeks Reformasi Hukum (Poin)	NA	NA	NA	43,82	87,17

Sumber: KemenPAN-RB

Indeks Reformasi Birokrasi meningkat dari C (47,52 poin) pada tahun 2021 menjadi B (58,88 poin) pada tahun 2024. Indeks SPBE meningkat dari 2,12 poin pada tahun 2021 menjadi 2,69 poin pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Tapanuli Utara. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus berupaya untuk mengembangkan situs dan aplikasi berbasis digital untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Indeks Pelayanan Publik mengalami peningkatan dari 2,97 tahun 2021 mencapai 3,43 poin pada tahun 2023 dan Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin) meningkat dari 85,71 poin pada tahun 2022 menjadi 83,98 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dengan serius memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan profesionalitas ASN, serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Indeks Integritas Nasional mengalami penurunan dari 72,88 poin pada tahun 2021 menjadi 68,64 poin pada tahun 2024. Pemerintah perlu melakukan pemberdayaan kepada ASN untuk lebih menanamkan jiwa nasionalisme dan profesionalisme agar mewujudkan SDM ASN yang berintegritas.

Profesionalisme ASN dengan manajemen ASN diukur menggunakan Indeks Sistem Merit yang merupakan indikator keberhasilan Evaluasi Reformasi Birokrasi. Indeks Sistem Merit di Kabupaten Tapanuli Utara hanya dapat menampilkan angka pada tahun 2024 yaitu sebesar 147 poin. Hal ini disebabkan belum pernah melakukan penilaian terhadap penerapan Sistem Merit pada tahun-tahun sebelumnya.

2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Dalam mencapai Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial diperlukan pendekatan yang seimbang dan terintegrasi. Hukum yang adil dan transparan merupakan fondasi bagi keadilan sosial dan kepercayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui lembaga peradilan yang independen, bebas dari korupsi, dan menegakkan prinsip kesetaraan. Keamanan nasional yang tangguh diperoleh melalui kekuatan militer yang handal, inteligensi yang efisien, dan ketahanan siber, namun juga harus dipadukan dengan pendekatan diplomatik dan kemanusiaan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik. Demokrasi substantif, di sisi lain, menuntut partisipasi warga negara yang aktif, pemilu yang bebas dan adil, serta akuntabilitas pemerintahan yang tinggi.

Tabel 2.30. Indikator Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Perda (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	-	-	-	-	-
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Poin)	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja

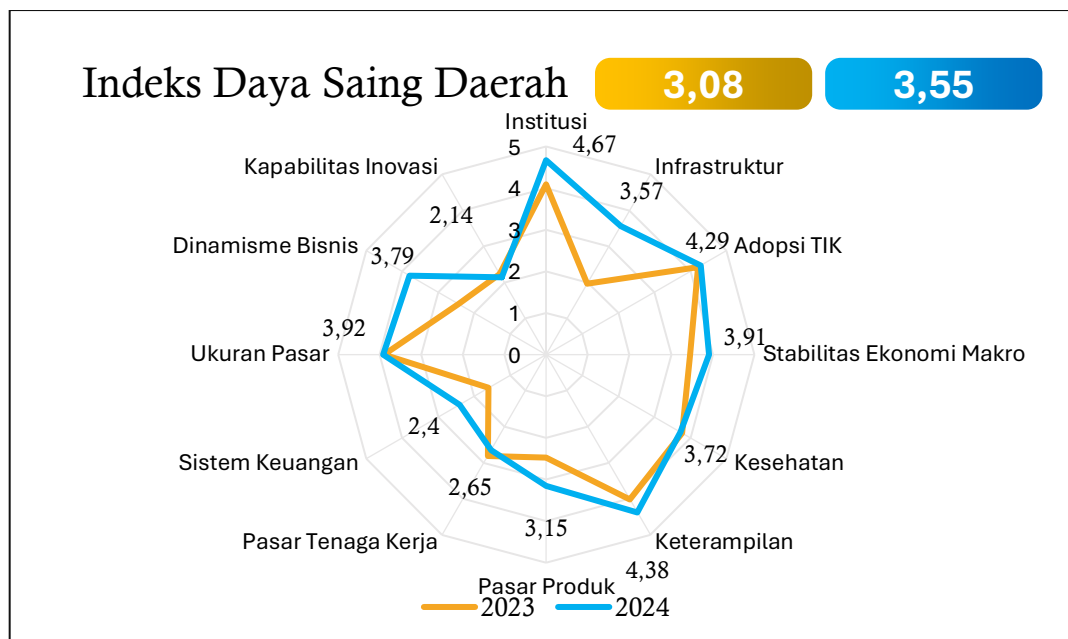
2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan mengacu pada kekuatan dan ketangguhan suatu kawasan dalam mempertahankan keamanan dan stabilitasnya melalui diplomasi yang efektif dan pertahanan yang kuat. Hal ini menekankan pada keseimbangan antara diplomasi yang mampu mencegah konflik dan pertahanan yang mampu menghadapi ancaman sehingga kawasan tersebut dapat menjadi kawasan yang tangguh dan berdaya gentar.

Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan parameter daya saing daerah yang dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diukur dari lingkungan, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Hasil evaluasi Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2023 adalah 3,08 poin meningkat pada tahun 2024 menjadi 3,55 poin.

Secara detail, hasil evaluasi IDSD Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut:



Gambar 2.45. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 dan 2024
Sumber: BRIN

Secara detail, komponen yang memiliki penilaian tertinggi adalah Institusi dengan nilai 4,09 poin. Institusi berperan sebagai pendukung bagi lingkungan yang mendukung iklim bisnis yang kondusif. Kemudian, Keterampilan dengan nilai sebesar 4,02 poin. Keterampilan mencerminkan tingkat keterampilan tenaga kerja di suatu wilayah. Nilai tersebut mencerminkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan dan kualitas tenaga kerja di Kabupaten Tapanuli Utara sudah baik, Lalu, Adopsi TIK sebesar 4,21 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Tapanuli Utara mampu memaksimalkan penggunaan TIK pada aktivitas masyarakat melalui penyediaan infrastruktur jaringan, telepon seluler, dan internet. Selanjutnya Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sangat mendukung penciptaan lingkungan yang aman untuk pelaku ekonomi.

Di samping itu, masih terdapat beberapa komponen yang tergolong rendah. Pertama adalah Kapabilitas Inovasi, yaitu kualitas dan kuantitas inovasi yang dihasilkan dari Kabupaten Tapanuli Utara. Inovasi dan kapabilitas masyarakat harus ditingkatkan agar menghasilkan terobosan-terobosan baru untuk mengatasi permasalahan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua adalah Sistem Keuangan yang mencerminkan ketersediaan lembaga keuangan sebagai penyedia dana bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan Lembaga Keuangan di Kabupaten Tapanuli Utara masih dinilai kurang baik dalam mendukung perekonomian daerah.

2.4.4. Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar

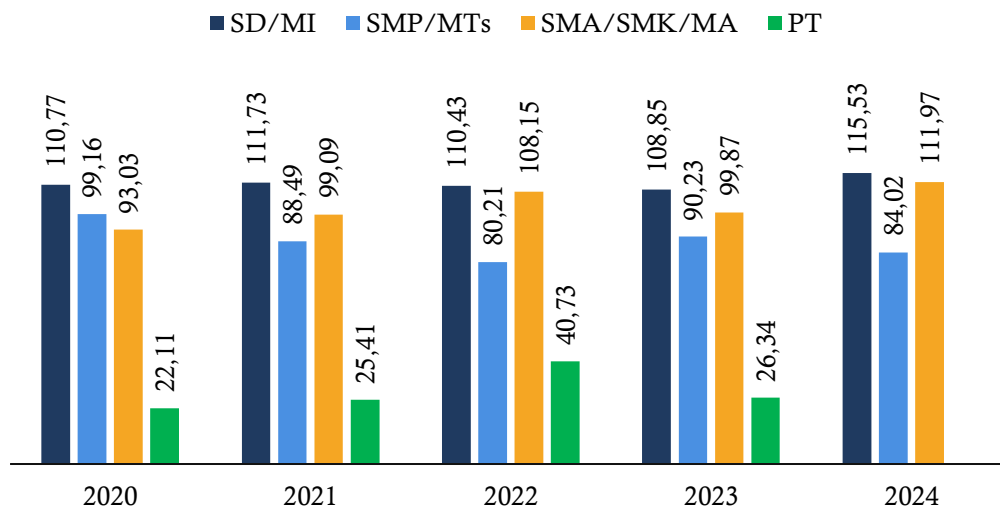
Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, satuan pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. Pembangunan bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing output pendidikan serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra pendidikan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan pendidikan dengan mengelola potensi yang ada pada urusan pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan, pendidikan non formal dan informal.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional, bahwa untuk melaksanakan kebijakan pendidikan nasional yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi khusus daerah, perlu melakukan identifikasi, pemetaan, dan penetapan daerah khusus. Yang dimaksud dengan daerah khusus adalah daerah yang

terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. Penetapan Daerah Khusus ini bertujuan untuk memastikan intervensi kebijakan pendidikan yang bersifat afirmasi sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah sebagai acuan pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan nasional di daerah.

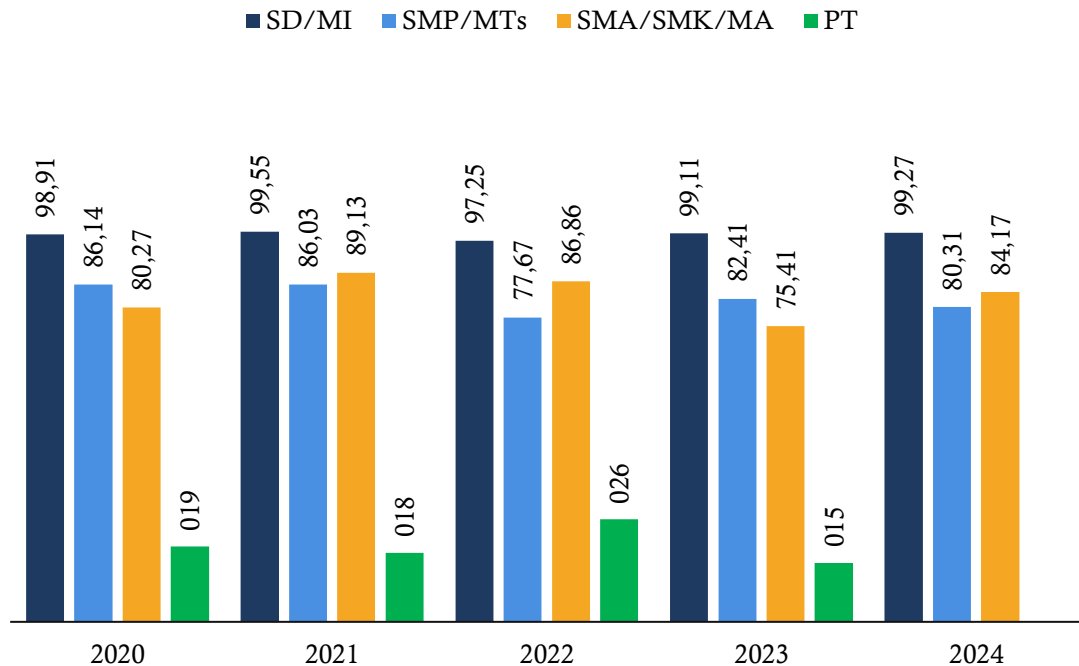
Angka Partisipasi Kasar merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Cakupan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.46. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tapanuli Utara
Sumber: BPS

Pada jenjang SD/MI cenderung terjadi peningkatan APK dari tahun 2020 sebesar 110,77 persen menjadi 115,53 persen pada tahun 2024, Selanjutnya pada jenjang pendidikan SMP/MTs juga terjadi fluktuasi dari tahun 2020 sebesar 99,16 persen menurun menjadi sebesar 84,02 pada tahun 2024. Pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA cenderung terjadi peningkatan dari tahun 2020 sebesar 93,03 persen menjadi sebesar 111,97 persen pada tahun 2024. Pada jenjang pendidikan PT terjadi fluktuasi dan cenderung sedikit meningkat dari tahun 2020 sebesar 22,11 persen menjadi sebesar 40,73 persen pada tahun 2022 dan menurun di tahun 2023 menjadi sebesar 26,34 persen.

Angka Partisipasi Murni adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya (bersekolah tepat waktu). APM juga didefinisikan sebagai perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Cakupan angka partisipasi murni di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.47. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Tapanuli Utara
Sumber: BPS

APM pada jenjang pendidikan SD/MI menurun dari 99,91 persen pada tahun 2020 menjadi 99,27 persen pada tahun 2024. Kemudian APM pada jenjang SMP/MTs menurun dari 86,14 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 80,31 persen pada tahun 2024. serta APM pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA terjadi penurunan dari 80,27 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 84,17 persen pada tahun 2024. APM jenjang pendidikan PT mengalami penurunan dari 19,19 persen pada tahun 2020 menjadi 15,00 persen pada tahun 2024

Capaian indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31. Capaian Kinerja Pendidikan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kemampuan Literasi SD	0	44,52	48,72	54,81	58,39
Kemampuan Literasi SMP	0	56,58	61,11	65,68	68,59
Kemampuan Numerasi SD	0	32,18	37,64	45,52	54,18
Kemampuan Numerasi SMP	0	56,58	61,11	59,74	61,67
Angka Partisipasi Sekolah (5-6 Tahun)	0	60,33	63,06	76,92	79,17
Angka Partisipasi Sekolah (7-15 Tahun)	0	98,83	90,21	99,21	99,43
Angka Partisipasi Sekolah (7-18 Tahun) Kesetaraan	0	1,32	2,57	5,6	17,14
Proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B	54,64	61,54	59,28	63,04	59,29
Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/DIV	38,24	31,91	19,31	31,97	19,87
Iklim Inklusivitas SD	51,63	55,14	54,66	61,34	58,59

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Iklm Inklusivitas SMP	51,63	55,05	57,24	61,25	57,63
Iklm Keamanan SD	63,87	66,73	71,97	73,81	74,10
Iklm Keamanan SMP	63,87	66,16	69,87	72,84	70,60
Iklm Kebhinekaan SD	57,23	67,64	73,17	72,62	71,14
Iklm Kebhinekaan SMP	57,23	67,33	73,78	71,75	71,89

Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikdas

Literasi dan numerasi di Kabupaten Tapanuli utara mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Untuk literasi SD dari tahun 2022 sebesar 45,72 menjadi sebesar 58,39 pada tahun 2024. Untuk literasi SMP dari tahun 2022 sebesar 49,94 menjadi sebesar 68,59 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan mengakses, memahami dan menggunakan sesuatu dalam hal membaca, melihat, menyimak, menulis dan berbicara mengalami peningkatan untuk tingkat sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Untuk numerasi SD dari tahun 2022 sebesar 23,59 menjadi sebesar 54,18 pada tahun 2024, untuk numerasi SMP dari tahun 2022 sebesar 37,59 menjadi sebesar 61,67 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya kemampuan memahami dan menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol matematika dasar dan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk untuk tingkat sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Tapanuli Utara mengalami fluktuasi cenderung menurun dari tahun 2020 sebesar 12,80 persen menjadi 8,81 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya proporsi penduduk yang memiliki kualifikasi perguruan tinggi dibandingkan dengan seluruh usia angkatan kerja. serta rasio ini menunjukkan bahwa semakin tinggi minat masyarakat untuk meraih pendidikan tinggi namun masih perlu menjadi perhatian karena capaian ini masih kategori kecil. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi merupakan indikator untuk melihat apakah penduduk yang bekerja sudah sesuai dengan kompetensinya.

Kesehatan

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah



dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Upaya pembangunan dari sisi kesehatan salah satunya dilakukan melalui Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan: 1) pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis resiko kesehatan; 3) sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran serta kendali mutu dan kendali biaya.

Untuk mendapatkan keadaan di mana masyarakat bisa sehat dan berkeadilan, maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengaplikasikan kebijakan bidang kesehatan di antaranya adalah meningkatkan kuantitas jaringan dan kualitas pusat kesehatan masyarakat serta meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan (medis dan non medis). Pendekatan lain yang diupayakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara adalah dengan meningkatkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat terutama terhadap golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah (miskin) dan yang tinggal di pedesaan. Upaya lain yang dilakukan termasuk tindakan pencegahan dan penyembuhan penyakit. Dengan demikian pembangunan yang sedang digiatkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara diharapkan dapat berakselerasi positif dan bersinergi terhadap kegiatan pembangunan di bidang lainnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat di antaranya adalah ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan dan konsumsi makanan bergizi masyarakat. Tetapi faktor yang terpenting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan tersebut terletak pada manusianya sebagai subyek dan sekaligus obyek dari upaya tersebut.

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Kesehatan berimplikasi pada produktivitas perorangan dan kelompok, sehingga pembangunan dan berbagai upaya di bidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada waktu sebelumnya.



Pada dasarnya pembangunan dibidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah dan merata. Melalui peningkatan pelayanan kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lebih dini lagi adalah untuk menurunkan angka kematian bayi/balita. Salah satu program pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan bagi seluruh penduduk adalah peningkatan pelayanan kesehatan yang didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan yang memadai di setiap wilayah.

Selain itu, hal pokok yang juga harus diperhatikan adalah perluasan akses kesehatan, khususnya kepada masyarakat kurang mampu dan perempuan di wilayah perbatasan/terluar/terpencil. Cakupan fasilitas kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara dari dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara

Fasilitas Kesehatan	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Sakit	2	2	2	2	2
Puskesmas	21	20	20	20	21
Puskesmas Pembantu	60	62	60	62	60
Total	83	84	83	84	83

Sumber: BPS

Berdasarkan dari data BPS, pada tahun 2020 hingga tahun 2024 hanya terdapat 2 rumah sakit yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Utara. Kemudian, untuk Puskesmas terdapat sebanyak 20 unit dan Puskesmas Pembantu relatif sama sebanyak 60 unit pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus berupaya untuk membangun fasilitas kesehatan di seluruh wilayah agar memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan masyarakat.

Data perkembangan tenaga kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.33. Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara

Tenaga Kesehatan	2020	2021	2022	2023	2024
Dokter	34	44	40	43	46
Dokter Gigi	13	12	13	16	21
Perawat	117	254	223	309	333
Bidan	426	855	803	1.000	977
Farmasi	14	26	20	37	33
Ahli Gizi	16	34	15	39	38
Rasio Dokter	1 : 9.199	1 : 7.164	1 : 7.961	1 : 7.514	1 : 7.109

Sumber: BPS (diolah, 2024)



Berdasarkan tabel di atas, Dokter Umum yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami fluktuasi cenderung meningkat dari 34 Dokter pada tahun 2020 menjadi 46 Dokter pada tahun 2024. Kemudian Dokter Gigi mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 13 Dokter Gigi menjadi 21 Dokter Gigi pada tahun 2024. Perawat di Kabupaten Tapanuli Utara meningkat dari tahun 2020 sebanyak 117 orang menjadi 333 perawat pada tahun 2024. Bidan di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami meningkat dari 426 orang pada tahun 2020 menjadi 977 orang pada tahun 2024. Ahli Farmasi mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 14 orang menjadi sebanyak 33 orang pada tahun 2024. Ahli Gizi mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 16 orang menjadi 38 Ahli Gizi pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus berupaya untuk meningkatkan ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan lainnya, serta melakukan pemerataan distribusi di seluruh kecamatan. Capaian kinerja urusan kesehatan di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34. Capaian Kinerja Kesehatan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Ibu (jiwa)	8	5	4	2	1
Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran	11,10	9,79	3,60	5,00	3,70
Angka Kematian Balita (jiwa)	2	4	6	0	1
Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	0	0	0	0	0
Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	59,6	56,2	93,9	94,2	88,5
Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional	82,5	82,3	70,38	89,22	97,77
Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	48,3	80	5,1	11,2	16,6
Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis	100	46,5	52,5	86,1	146,8
Insidensi TBC	193	126	203	274	274
Angka Kesakitan	32,95	30,48	29,19	19,60	20,30
Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	0	0	0	0	0
Cakupan Penemuan Kasus TB	25,65	59,23	100	88,2	90,3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara

Secara nasional target AKI adalah 306 per 100.000 penduduk. berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan bahwa jumlah ibu melahirkan setiap tahunnya tidak mencapai angka 100.000 sehingga angka kematian ibu merupakan jumlah ibu meninggal per kelahiran bayi. Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, jumlah kematian ibu semakin menurun dari 8 ibu meninggal pada tahun 2020 menjadi 1 orang pada tahun 2024. Adapun penyebab kematian ibu tersebut akibat kelainan jantung dan pembuluh darah.

Berdasarkan data diatas, Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tapanuli Utara cukup rendah dan hal ini kiranya dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Faktor penyebab rendahnya AKB dimaksud diantaranya adalah pemerataan pelayanan kesehatan utamanya di daerah terpencil dan sangat terpencil, dan tenaga kesehatan utamanya bidan di desa. Pada tahun 2024, Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tapanuli Utara ada sebanyak 14 bayi per 3.791 dengan angka konversi yakni 3,70. Adapun penyebab kematian bayi adalah BBLR, Prematuritas, Asfiksia, Infeksi dan lain-lain.

Morbiditas atau angka kesakitan dapat menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi pada kurun waktu tertentu. angka ini juga dapat berperan untuk menggambarkan keadaan kesehatan secara umum, mengetahui keberhasilan program pemberantasan penyakit, dan sanitasi lingkungan serta memperoleh gambaran pengetahuan penduduk terhadap pelayanan kesehatan. Angka Kesakitan di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami penurunan setiap tahunnya dari 32,96 pada tahun 2020 menjadi 19,41 pada tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis menyatakan bahwa Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium Tuberculosis yang dapat menyerang paru dan organ lainnya. penyebaran Tuberkulosis terjadi melalui batuk atau bersin dari orang yang menghirup droplet yang dikeluarkan oleh penderita. Meskipun TB menyebar dengan cara yang sama dengan flu tetapi penularannya tidak mudah. Infeksi TB biasanya menyebar antar anggota keluarga yang tinggal serumah.

Tabel 2.35. Capaian indikator kinerja urusan kesehatan pada RSUD Tarutung

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bed Occupancy Rate (BOR) (%)	48,11	49,29	56,50	59,46	69,76
2	Average Length of Stay (ALOS) (hari)	5,34	5,58	5,00	5,13	5,25
3	Gross Death Rate (GDR)	55,73	61,58	48,00	49,37	51,17
4	Net Death Rate (NDR)	24,17	38,36	28,00	29,58	32,08
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan RSUD Tarutung	85,27	86,41	88,17	89,00	89,51

Bed Occupancy Rate (BOR) merupakan persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit dengan kondisi ideal adalah antara 60-85 persen. Kondisi BOR untuk RSUD Tarutung tahun 2024 adalah 69,76 persen. Average Length of Stay (ALOS) adalah rata-rata lama rawat seseorang pasien. indikator ini menggambarkan tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan lebih lanjut. secara umum nilai ALOS yang ideal antara 6-9 hari. kondisi ALOS untuk RSUD Tarutung tahun 2024 adalah 5,25 hari. Gross Death rate (GDR) adalah angka kematian umum untuk setiap 1.000 penderita keluar. idealnya

adalah <45 persen. Kondisi GDR untuk RSUD Tarutung tahun 2024 adalah 51,17 persen. Net Death rate (NDR) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar. Idealnya angka NDR adalah <25 persen. Kondisi NDR untuk RSUD Tarutung tahun 2024 adalah 32,08.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tugas penting dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Pekerjaan umum mencakup berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan infrastruktur publik, sementara tata ruang adalah proses perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan. Capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Jalan dalam Kondisi Baik (%)	46,46	46,45	48,25	47,32	30,00
Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	69,00	69,49	71,78	73,29	51,12
Persentase Kesesuaian Penataan dan Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW (%)	25,00	60,00	70,00	60,00	70,00
Persentase Kecamatan yang Memiliki RDTR (%)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Aman (%)	32,80	33,00	33,12	33,28	34,28
Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi Aman (%)	10,00	10,00	10,00	10,00	11,00

Sumber: Dinas PUPR & Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan data pada tabel tersebut, selama tahun 2020 hingga tahun 2024 persentase jalan dalam kondisi baik cenderung menurun dari 46,46 persen menjadi 30,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam memperbaiki kondisi jalan belum optimal. Persentase irigasi dalam kondisi baik merupakan angka perbandingan antar luas jaringan irigasi dalam kondisi baik, terhadap keseluruhan sehingga diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian dan penggunaan air irigasi beserta pembuangannya. Persentase irigasi dalam kondisi baik meningkat dari 69,00 persen pada tahun 2020 menjadi 73,29 persen pada tahun 2023. Persentase drainase dalam kondisi baik merupakan persentase jumlah drainase di Kabupaten Tapanuli Utara dalam keadaan kondisi baik sehingga drainase dapat mengalirkan aliran dengan lancar. Berdasarkan data di atas terlihat persentase kesesuaian penataan dan pemanfaatan ruang terhadap RTRW meningkat dari tahun 2020 - 2022 namun mengalami penurunan pada tahun 2023. Hal ini dapat disebabkan oleh terjadinya alih fungsi lahan akibat masih minimnya kecamatan yang memiliki RDTR. untuk Persentase Penduduk yang mendapatkan Akses Air minum aman ditahun 2020

berada pada persentase 32,80 dan di tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 34,28 persen, dikarenakan kategori aman merupakan Akses Air bersih yang memperoleh peolahan sedangkan persentase Rumah tangga yang mendapatkan Akses Aman di tahun 2020 dengan persentasi 10 persen dan di tahun 2024 mengalami kenaikan sebanyak 1 persen menjadi 11 persen, hal ini mengacu pada Sanitasi yang memiliki tangki septiktank.

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Termasuk sebagai fasilitas penunjang antara lain berupa bangunan pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, pemakaman serta pertamanan. Pembangunan perumahan dilakukan untuk mewujudkan perumahan yang layak, sehat, aman, serasi, juga teratur. Indikasi rumah yang layak huni adalah memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Hal ini dapat dilihat dari kelengkapan sarana perumahannya maupun kelengkapan fasilitas lingkungannya, seperti: lantai rumah, penggunaan air bersih, sanitasi dan sumber penerangan. Peningkatan jumlah rumah tinggal layak huni ini didukung dengan peningkatan persentase rumah tangga yang memenuhi persyaratan rumah layak huni, di antaranya rumah tinggal yang berakses sanitasi, rumah tinggal yang menggunakan air bersih, rumah tinggal yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan dan rumah tinggal yang menggunakan lantai (semen dan papan). Guna mendukung peningkatan akses air bersih Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan berbagai upaya dalam membantu masyarakat memberikan ketersediaan fasilitas air bersih dan sehat untuk kehidupan masyarakat.

Tabel 2.37. Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Layak Huni (%)	64,21	62,90	71,39	69,24	88,47
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh (%)	6,16	7,38	7,02	6,74	6,49

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Persentase Rumah Layak Huni mengalami peningkatan dari 64,21 persen pada tahun 2020 menjadi 71,39 persen pada tahun 2022, lalu menurun pada tahun 2023 menjadi 69,24 persen. Lingkungan permukiman kumuh pada tahun 2023 masih tersisa sebanyak 6,74 persen atau seluas 723 ha. Hal ini menunjukkan bahwa adanya

penurunan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Tapanuli Utara.

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu bagian penting dari tugas pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, melindungi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Capaian Kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.38. Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	86	85	85	100	100
Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	60	60	60	54	71,11
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	N/A	100	100	100	100
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100	100	97,64	22,42	95,60
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100	100	50,65	22,37	92,46
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten menggambarkan berapa persen jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran terhadap luas wilayah kabupaten. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten pada tahun 2023 sudah mencapai 100 persen, artinya seluruh wilayah sudah tercakup pelayanan bencana kebakaran. Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi menurun dari 60 persen pada tahun 2020 menjadi 54 persen pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa masih banyak aparaturnya pemadam kebakaran yang belum memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) menggambarkan berapa persen tingkat respon penanganan kebakaran dengan maksimal waktu 15 menit dari seluruh kasus kebakaran.

Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan



berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Sasaran pelayanan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS yaitu perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan istilah yang dipakai untuk orang yang memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk hidup layak. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan dalam rangka mencegah dan mengurangi timbulnya permasalahan sosial, dimana keadaan di daerah ini menunjukkan masih banyak penduduk yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak. Pembangunan PMKS ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Capaian indikator Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39. Capaian Kinerja Urusan Sosial

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase PMKS yang Tertangani (%)	N/A	2,98	61,96	58,17	59,05

Sumber: Dinas Sosial

Persentase PMKS yang tertangani adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang merupakan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapat layanan sosial berupa bantuan barang atau jasa, rehabilitasi, pemberdayaan maupun rujukan karena suatu hambatan, kesulitan ataupun gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Persentase PMKS yang tertangani mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 sebesar 2,98 persen menjadi sebesar 61,96 persen pada tahun 2022. Hal ini terjadi karena adanya sumber dana yang diperuntukkan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 berupa bantuan sosial.

2.4.5. Urusan Pemerintahan Non Layanan Dasar

Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Ketenagakerjaan berhubungan dengan tingkat angkatan kerja pada suatu wilayah tertentu. Jumlah angkatan kerja terdiri dari jumlah penduduk yang bekerja dengan perbandingan penduduk yang belum mendapatkan kesempatan bekerja. Penduduk yang termasuk kategori angkatan kerja adalah penduduk yang secara ekonomis berpotensi menghasilkan output atau pendapatan, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. TPAK merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Semakin tinggi TPAK, berarti semakin besar pula keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas ke dalam pasar kerja.

Tabel 2.40. Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	0,015	0,034	0,085	0,09	0,07

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan

Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi menurun dari 0,09 persen pada tahun 2023 menjadi 0,07 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak tenaga kerja yang belum memperoleh pelatihan kompetensi sehingga perlu bagi pemerintah untuk menjangkau masyarakat yang belum terlibat agar berpartisipasi pada program terkait sehingga menjadi tenaga kerja yang berdaya saing.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan pembangunan nasional menuntut adanya kesetaraan gender. Upaya perbaikan pemberdayaan perempuan dikenal dengan nama pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*), yaitu upaya untuk memperhatikan gender dalam berbagai sektor kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap penurunan kesenjangan partisipasi perempuan dan laki-laki. Upaya perbaikan tersebut memerlukan dukungan kebijakan, program sampai dengan kegiatan yang terintegrasi dengan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Proses perbaikan ini dapat dilakukan dalam tatanan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun evaluasi. Upaya perbaikan kondisi atau pencapaian kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan tersebut dilandasi berbagai kesepakatan baik di tingkat global/dunia, maupun kesepakatan nasional, di antaranya penetapan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan nasional diharapkan dapat



meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak di daerah ini. Keterlibatan perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Dalam aspek pemberdayaan terutama keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik, perempuan juga relatif tertinggal dibandingkan laki-laki. Ketertinggalan ini sangat berpengaruh terhadap hasil keputusan apapun yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Peran perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon I-IV maupun di lembaga legislatif.

Capaian indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

<i>Indikator</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
TPAK Perempuan (%) (Bab II RPJPD)	78,26	78,65	79,54	76,83	81,48
Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	0	0	0	0	0
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	0	55,10	61,08	62,61	*
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	0	41,74	51,59	55,47	*
Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100	100	100	100	100
Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100	100	100	100	100

* angka tahun 2024 belum publish

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & BPS (diolah, 2024)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan cenderung meningkat dari 78,26 persen pada tahun 2020 menjadi 81,48 persen pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa semakin tingginya jumlah perempuan yang termasuk angkatan kerja dari seluruh perempuan usia 15 tahun ke atas yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Utara. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) merupakan perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. IPKA meningkat dari 41,74 poin pada tahun 2021 menjadi 55,47 poin pada tahun 2023.

Untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan inklusif, penting adanya anggaran responsif gender karena mengintegrasikan kebutuhan dan aspirasi perempuan dan laki-laki ke dalam proses penganggaran. Implementasi anggaran responsif gender memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien, mengurangi kesenjangan gender, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati secara setara oleh semua kelompok. Anggaran responsif gender sudah dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Utara dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Gender setiap tahun. Tetapi hal tersebut belum diintegrasikan ke dalam dokumen sehingga tidak dapat menjelaskan secara detail pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dengan isu gender. Untuk itu, pada tahun 2025-2030 anggaran responsif gender akan dilakukan proses penggunaan instrumen yang melibatkan analisis data terpilah sehingga ke depan akan dapat menampilkan isu gender yang lebih detail.

Pangan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pemerintah bersama-sama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan melalui suatu kebijakan yang mampu mengatur, membina, mengendalikan dan mengawasi ketersediaan bahan pangan yang cukup dalam jumlah, mutu, keamanan, gizi, pemerataan dan keterjangkauan oleh daya beli masyarakat. Pokok-pokok kebijaksanaan yang harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan meliputi aspek ketersediaan, distribusi, penganeekaragaman konsumsi dan kewaspadaan/keamanan pangan dan gizi terhadap komoditas strategis baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan di daerah ini, berbagai upaya telah ditempuh melalui berbagai kebijakan, di antaranya: 1) kebijakan peningkatan ketersediaan pangan yang dilakukan melalui pemberdayaan kelompok tani, pemantapan penyediaan dan penyaluran sarana produksi dan peningkatan mutu teknologi terapan; 2) kebijakan dalam kewaspadaan dan keamanan pangan yang dilakukan melalui peningkatan kemampuan fungsi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), peningkatan keberdayaan masyarakat pangan, dan peningkatan

keamanan mutu dan gizi pangan.

Capaian kinerja urusan pangan di Kabupaten Tapanuli Utara tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42. Capaian Kinerja Urusan Pangan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Poin)	85,00	87,00	88,90	89,10	89,80
Ketersediaan Beras (ton)	123.534,15	123.687,62	120.152,90	94.928,40	102.907,89
Kebutuhan Beras Per Kapita (kg/kapita)	116,2	99,7	94,8	90,03	105,85
Total Kebutuhan Konsumsi Beras (ton)	36.321,56	31.427,63	30.479,53	29.138,38	34.612,21
Produksi Daging (ton)	339,76	491,10	748,70	730,83	889,75
Konsumsi Daging Per Kapita (kg/kapita)	14,2	7,4	6,89	6,89	8,5
Total Kebutuhan Konsumsi Daging (ton)	4.438,61	2.332,64	2.215,23	2.229,96	2.779,44
Produksi Susu (L)	295.020	365.280	365.160	369.000	381.480
Kebutuhan Konsumsi Susu Per Kapita (L/Kapita)	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
Total Kebutuhan Konsumsi Susu (L)	406.351	441.311	450.120	453.113	457.790
Produksi Telur (kg)	505.298	583.059	611.245	643.652	672.739
Kebutuhan Konsumsi Telur Per Kapita (kg/kapita)	10,7	11,3	11,7	11,7	12,41
Total Kebutuhan Konsumsi Telur (kg)	3.344.585	3.562.009	3.761.714	3.786.728	4.057.983

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan

Skor pola pangan harapan di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 85,00 poin menjadi 89,80 poin pada tahun 2024. hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya keanekaragaman pangan yang dapat dikonsumsi masyarakat memenuhi kebutuhan kalornya. Secara umum, ada 9 kelompok pangan dalam PPH yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, minyak dan lemak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta selain 8 kelompok tersebut dimasukkan ke lain-lain. Pencapaian swasembada pangan beras di Kabupaten Tapanuli Utara tidak diikuti dengan pencapaian swasembada pangan protein hewani yang berasal dari daging, susu, dan telur.

Dengan semakin berkembangnya perekonomian global maka pertumbuhan usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan pelaku usaha sudah barang tentu akan berdampak pada peningkatan pencemaran lingkungan meliputi pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan lahan dan/atau tanah serta meningkatnya pengaduan masyarakat terkait dugaan adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, maka diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal dan menyentuh masyarakat agar masyarakat menyadari betapa pentingnya hidup dengan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Masalah lingkungan yang dihadapi dewasa ini pada dasarnya adalah masalah ekologi manusia. Masalah itu timbul karena perubahan lingkungan yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang sesuai untuk mendukung kehidupan manusia yang jika tidak diatasi pada akhirnya akan berdampak pada terganggunya lingkungan, khususnya terkait dengan masalah persampahan dan kualitas air.

Dalam mencapai tujuan meningkatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan demi mewujudkan daerah yang nyaman dan ramah lingkungan, masih terdapat beberapa permasalahan yang harus segera memperoleh penanganan seperti masih terjadinya pencemaran air maupun tanah, belum optimalnya pengelolaan persampahan, belum optimalnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungannya, serta masih terbatasnya ruang terbuka hijau dan ruang publik yang berfungsi untuk interaksi sosial masyarakat. Berdasarkan pengaturan pada Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa urusan bidang Lingkungan Hidup telah mengalami perubahan, dimana urusan tersebut telah ditetapkan sebagai urusan wajib akan tetapi tidak memiliki pelayanan dasar. Capaian indikator Lingkungan Hidup di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43. Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	70,14	74,45	74,45	75,85	76,89
Indeks Kualitas Udara	93,42	91,60	90,52	92,31	94,75
Indeks Kualitas Air	80,00	89,00	63,33	63,33	70,00
IKLHD (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah)	84,01	72,26	76,78	79,81	81,53

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas tutupan lahan di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 70,14 poin menjadi sebesar 76,89 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya indeks kualitas tutupan lahan

yang digunakan untuk menunjang peningkatan perekonomian. Indeks kualitas udara di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat dari tahun 2021 sebesar 91,60 menjadi sebesar 94,75 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya kualitas udara yang merata di Kabupaten Tapanuli Utara. Namun masih dibutuhkan pengembangan dari indeks kualitas air, IKLHD (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah) ditahun 2021 memiliki nilai 72,26 dan mengalami kenaikan ditahun 2024 menjadi 81, 53 . dalam hal ini perlu perbaikan yang berkelanjutan agar indeks kualitas udara, indeks kualitas tutupan lahan, indek Kualitas Air agar semakin meningkat yang bertujuan supaya masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara mendapatkan kesejahteraan secara merata.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penduduk merupakan bagian penting dari modal pembangunan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi sumber daya (input) produksi sekaligus menciptakan demand barang dan jasa hasil produksi. Namun demikian, jumlah penduduk juga harus dikendalikan agar tidak menimbulkan masalah kependudukan seperti pengangguran dan kemiskinan.

Tabel 2.44. Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase cakupan kepemilikan KTP-el (%)	99,21	98,76	100,49	95,46	99,35
Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun (%)	75,64	93,18	98,00	98,06	98,01
Persentase cakupan pasangan menikah yang memiliki akte nikah (%)	67,99	82,92	45,09	62,70	64,74

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Capaian kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kabupaten Tapanuli Utara sudah mencapai 99 persen pada tahun 2024 sehingga dapat diasumsikan bahwa layanan publik pada bidang pendaftaran penduduk sudah sangat baik. Demikian juga layanan dalam pencatatan sipil diantaranya kepemilikan akta kelahiran dan akta nikah yang sudah dikategorikan baik. Namun, pada tahun 2022 ada peralihan aplikasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dari terdistribusi ke SIAK terpusat, sehingga capaian yang sudah tinggi di tahun 2022 menjadi menurun pada tahun 2023. Walaupun demikian, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara masih tetap perlu meningkatkan kualitas tata kelola serta sistem pelayanan kepada publik agar memberikan layanan yang semakin baik lagi kepada masyarakat.

Pemerintah berupaya mengembangkan desa-desa yang berada di ruang lingkungannya sebagai sumber daya yang berpotensi untuk mendorong perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui dinas terkait menggali potensi desa dan memberdayakan masyarakat desa untuk membantu mendorong perekonomian daerah. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat dan desa diharapkan akan membantu meningkatkan status desa menjadi desa mandiri yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Capaian indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45. Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Desa Membangun (Poin) (RPJMD)	0,5818	0,5904	0,6135	0,6315	0,6535
Jumlah desa sangat tertinggal	9	8	5	3	2
Jumlah desa tertinggal	138	116	73	58	33
Jumlah desa berkembang	94	117	160	171	179
Jumlah desa maju	-	-	3	9	27

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks Desa Membangun Kabupaten Tapanuli Utara meningkat dari 0,5818 poin pada tahun 2020 dengan kategori Tertinggal menjadi 0,6535 poin pada tahun 2024 dengan kategori Berkembang. Berdasarkan data yang diperoleh hingga saat ini belum terdapat desa mandiri di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 berhasil meningkatkan sebanyak 18 desa menjadi desa maju, namun masih terdapat 2 desa yang berstatus sangat tertinggal, yaitu Desa Hutajulu Parbalik dan Gonting Salak. Pemerintah perlu memperhatikan desa terkait dan mengoptimalkan pemanfaatan dana desa agar kedua desa tersebut dapat meningkatkan status desanya.

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB) adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas hidup keluarga. Capaian kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut.

Tabel 2.46. Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Total Fertility Rate (TFR)	2,87	3,81	2,87	2,87	2,83
Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun	N/A	N/A	7,8	3,7	5
Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	N/A	N/A	N/A	N/A	64,5
Indeks Lansia Berdaya	35,5	40,5	42,8	45,2	50,8
Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	40,2	45,8	50,5	55,7	59,2
Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	7,94	7,94	15,87	59,52	64,68
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	N/A	N/A	N/A	N/A	60,5
Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan	N/A	N/A	N/A	21,37	16,45

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode satu tahun per 1.000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Perkembangan rasio akseptor KB di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020-2023 menunjukkan angka yang fluktuatif. Secara umum angka ini masih harus ditingkatkan, mengingat pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun selalu meningkat.

Salah satu bentuk upaya sejak dini untuk mendorong peningkatan jumlah akseptor ini adalah melalui pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan Genre (Generasi Berencana) yang diharapkan mampu mengubah pandangan generasi tentang pentingnya KB. Program Keluarga Berencana (KB) adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengatur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Semakin tingginya jumlah peserta KB berarti bahwa sosialisasi KB kepada penduduk khususnya pasangan usia subur mengenai manfaat program KB berhasil dilakukan. Hal ini perlu terus ditingkatkan guna menyukseskan program KB di Kabupaten Tapanuli Utara. Total Fertility Rate relatif menurun dari 2,87 pada tahun 2020 menjadi 2,83 pada tahun 2024.

Perhubungan

Salah satu faktor penting dalam memperlancar aktivitas kehidupan masyarakat adalah operasional sistem transportasi. Pengembangan sistem transportasi mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pengembangan wilayah.



Transportasi mempunyai fungsi penghubung fungsional dan spasial antar kegiatan sosial, ekonomi, maupun budaya. Penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien diarahkan untuk penyediaan alternatif pilihan pelayanan sesuai kepentingan pengguna jasa transportasi dan akomodasi kepentingan penyedia jasa untuk peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu stakeholder untuk menyediakan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Untuk itu penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien terwujud dalam pelayanan transportasi antar moda yang mampu memberikan pelayanan yang berkesinambungan, tepat waktu dan dapat memberikan pelayanan antar sarana dan fasilitas yang ada di perkotaan dan di perdesaan serta kesetaraan tingkat pelayanan sesuai dengan standar yang dibakukan. Jaringan transportasi di wilayah daerah ini terdiri dari transportasi darat, transportasi danau dan transportasi udara.

Tabel 2.47. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Capaian Kinerja Pelayanan Perhubungan (%)	51,50	24,56	15,13	18,26	19,53
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%)	55,00	33,00	45,78	30,00	32,15
Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpasang (%)	31,00	32,11	8,45	11,00	-11,00

Sumber: Dinas Perhubungan

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja pelayanan perhubungan cenderung menurun dari 51,50 persen pada tahun 2020 menjadi 18,26 persen pada tahun 2023. Persentase uji kir angkutan umum masih sedikit, di mana pada tahun 2023 hanya mencapai sebesar 30 persen dari seluruh angkutan umum. Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang juga menurun dari 31,00 persen pada tahun 2020 menjadi 11,00 persen pada tahun 2023. Pemasangan fasilitas perlengkapan jalan perlu ditingkatkan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan.

Fasilitas transportasi, seperti terminal bis, pelabuhan danau dan bandara tersedia di Kabupaten Tapanuli Utara, di mana jumlah terminal adalah 3 unit, yaitu 1 unit dikelola oleh Kementerian Perhubungan yang berada di Kecamatan Tarutung dan 2 unit dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang berada di Kecamatan Tarutung dan Kecamatan Siborongborong. Transportasi danau di Kabupaten Tapanuli Utara memiliki peran penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, khususnya di Kecamatan Muara yang terletak di Kawasan Danau Toba. Aksesibilitas transportasi danau didukung sarana dermaga danau sebanyak tiga unit. Transportasi udara di Kabupaten Tapanuli Utara didukung dengan keberadaan bandara Silangit di Kecamatan Siborongborong.

Dunia komunikasi dan informasi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat di era global saat ini dan memberikan banyak manfaat dalam kemajuan diberbagai aspek. Perkembangan itu bukan hanya dalam hitungan tahun, bulan, atau hari, melainkan jam, bahkan menit atau detik terutama berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjang dengan teknologi elektronika. Penggunaan teknologi oleh manusia dalam membantu menyelesaikan pekerjaan merupakan hal yang menjadi keharusan dalam kehidupan. Perkembangan teknologi ini juga harus diikuti dengan perkembangan pada Sumber Daya Manusia (SDM).

Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi sudah menyentuh berbagai aspek kehidupan, bahkan kini cenderung menjadi kebutuhan primer manusia. Dalam konteks pembangunan daerah, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi juga telah berkembang dengan pesat.

Semakin majunya teknologi berdampak pada kemudahan penduduk memperoleh informasi. Kebijakan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah telah dituangkan di dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, yaitu tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government serta Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem, Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Melalui pengembangan *e-government*, pemerintah berharap dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, untuk memudahkan penduduknya mengakses informasi, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memiliki website resmi dengan alamat www.taputkab.go.id. Diharapkan ke depan website ini semakin interaktif dan informatif dalam menyampaikan informasi mengenai Kabupaten Tapanuli Utara. Hingga tahun 2022 berbagai aplikasi berbasis teknologi informasi telah dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Capaian indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut.

Tabel 2.48. Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapanuli Utara	NA	2,12	2,29	2,69	2,85

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Sehingga bisa diasumsikan bahwa Kabupaten Tapanuli Utara telah

berhasil meningkatkan kualitas, kematangan, dan efektivitas penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Hal ini mencerminkan perbaikan dalam berbagai aspek, mulai dari domain kebijakan, tata kelola, manajemen, hingga kualitas layanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih transparan bagi masyarakat.

Pertanahan

Urusan pertanahan adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tanah, seperti hak atas tanah, pendaftaran tanah, reforma agraria, hingga penyelesaian sengketa pertanahan.

Tabel 2.49. Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Lahan untuk Kepentingan Umum (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	86,35
Persentase Mediasi Sengketa/konflik Tanah (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi berperan penting sebagai sumber daya finansial kepada UMK untuk mendukung pengembangannya. Maka dari itu, dengan adanya dukungan terhadap UMK diharapkan akan membantu pertumbuhan ekonomi wilayah. Pemberdayaan koperasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat karena koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Peran koperasi dalam memperkuat kehidupan perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha koperasi. Capaian indikator Kinerja Koperasi di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50. Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%)	5,63	0,79	2,22	5,20	N/A
Persentase Koperasi aktif (%)	27	22	23	25	25
Persentase Koperasi Berkualitas (%)	7,63	11,21	13,11	14,29	14,29

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan



Rasio volume koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat dari tahun 2020 sebesar 5,63 persen menjadi sebesar 5,20 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kontribusi koperasi dalam mendukung perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara. Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara nilai penjualan barang dan jasa ditambah aset koperasi terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Utara. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Tapanuli Utara cenderung mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 27 persen menjadi sebesar 25 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya koperasi yang tidak aktif sehingga dengan demikian banyak masyarakat tidak bisa memperoleh layanan koperasi secara merata.

Penanaman Modal

Penanaman modal adalah pemberian sejumlah dana pada suatu daerah oleh investor dengan harapan memperoleh pengembalian yang lebih besar dari sejumlah uang yang ditanamkan. Penanaman modal penting karena dapat membantu pengembangan daerah. Adanya investasi akan meningkatkan sumber dana daerah serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek pengganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor. Penanaman modal merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan perekonomian dan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Dalam mewujudkan pengembangan investasi di daerah ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara membuat sistem pelayanan investasi, yaitu penataan kelembagaan perangkat daerah yang mengacu kepada potensi daerah, melakukan peninjauan daftar prioritas dan daftar investasi negatif secara berkala, penguatan kelembagaan daerah di dalam Sistem Pelayanan Investasi yang efisien, meningkatkan promosi investasi, melaksanakan pemberian pelayanan perizinan secara terpadu dan mengoptimalkan peran dan fungsi perusahaan daerah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan akan memberikan banyak dampak pengganda (*multiplier effects*) dan manfaat bagi banyak pihak termasuk dunia usaha, masyarakat dan pemerintah. Capaian indikator Kinerja Penanaman Modal di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51. Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN) (Perusahaan)	20	28	24	31	38
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA) (Perusahaan)	2	2	3	11	13
PMDN (Rp Miliar)	370,00	140,80	185,30	151,10	21,98
PMA (Rp Miliar)	710,00	1,10	145,90	1.600,00	332,00

Sumber: BKPM

Investor PMDN cenderung meningkat dari 20 perusahaan pada tahun 2020 menjadi 31 perusahaan pada tahun 2023. Begitu juga dengan investor PMA meningkat dari 2 perusahaan pada tahun 2020 menjadi 11 perusahaan pada tahun 2023. Realisasi investasi PMDN meningkat dari Rp 48,16 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 147,01 miliar pada tahun 2023 dan PMA meningkat dari US\$ 4,05 juta pada tahun 2021 menjadi US\$ 109,52 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tapanuli Utara. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus membenahi daerahnya melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM, serta penyederhanaan regulasi untuk mendukung kegiatan penanaman modal daerah.

Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan citacita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, pemuda dapat mengubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Persentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. hal ini perlu terus ditingkatkan agar pemuda dapat berpikir positif untuk berkreasi yang akan melahirkan karya-karya nyata dan membawa pengaruh serta perubahan besar dalam pembangunan bangsa dan negaranya. disamping itu pemuda juga diharapkan dapat menguasai pengetahuan dan teknologi untuk bersaing dengan bangsa lain dalam tataran global.

Kebutuhan akan pentingnya olahraga, disamping untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh tetapi juga merupakan salah satu hiburan bagi para peminat olahraga sekaligus mempererat hubungan sosialisasi antar pemuda. pembinaan olahragawan yang berbakat merupakan salah satu cara untuk mengasah bakat dari atlet agar bisa meningkatkan prestasinya di kancah nasional maupun internasional.

Tabel 2.52. Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0	0,12	0,27	0,27	0,63
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	0	0,19	0	3,96	3,84
Indeks Pembangunan Olahraga	0	0	0	0	0
Rasio wirausaha pemuda	0	0,19	0	0	3,8
Penignkatan prestasi olahraga	0	0	18	26	5

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga

Pada capaian indikator urusan kepemudaan, dapat dilihat bahwa masih banyak yang harus dibenahi. Capaian kepemudaan memang mengalami peningkatan tetapi tidak signifikan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan akses pemuda untuk mendapatkan pembinaan, masih kurangnya kegiatan dan organisasi kepemudaan untuk tempat pemuda dapat mengekspresikan diri mereka. Sarana prasarana olahraga sangat mendukung dalam hal peningkatan prestasi mengingat terbatasnya lapangan olahraga dan gedung olahraga di Kabupaten Tapanuli Utara.

Statistik

Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis. Data statistik merupakan komponen sekaligus instrumen strategis dalam sebuah pemerintahan, bahkan disebut pula statistik menentukan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentuan kebijakan pemerintah. Selain itu, statistik juga berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan yaitu berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan perlu indikator kualitatif dan kuantitatif. Pembangunan di bidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan informasi statistik yang akurat sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan serta meningkatnya mutu pelayanan statistik daerah.

Tabel 2.53. Capaian Kinerja Urusan Statistik

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Statistik (Poin)	N/A	N/A	1,86	1,74	2,62
Buku Kabupaten dalam Angka (Ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku PDRB Kabupaten (Ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral. Nilai Indeks Pembangunan Statistik merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral secara keseluruhan. Ketersediaan data statistik daerah sangat penting untuk melihat gambaran umum daerah. Hal ini juga sejalan dengan amanah yang terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kabupaten Tapanuli Utara perlu meningkatkan sistem data yang terintegrasi agar tidak terjadi mismatch data daerah.

Kebudayaan

Kabupaten Tapanuli Utara dalam proses pembangunan juga memandang bahwa faktor-faktor budaya dapat dijadikan sebagai modal dalam proses pembangunan. Keberagaman budaya di Kabupaten Tapanuli Utara, baik yang bergerak maupun tidak bergerak merupakan modal dasar pembangunan dan jati diri bangsa. Selanjutnya potensi tersebut diharapkan mampu menjadi pendukung pada pengembangan di bidang kebudayaan dan sekaligus mampu sebagai pendongkrak (daya ungkit) dan ikon wisata di daerah ini. Kesenian merupakan salah satu peninggalan kebudayaan yang ada di daerah ini. Kesenian yang berkembang di Kabupaten Tapanuli Utara banyak dipengaruhi oleh beberapa unsur budaya daerah, seperti pengaruh Batak Toba. Beberapa hal yang telah dicapai dalam bidang kebudayaan antara lain adalah pelestarian benda-benda cagar budaya, festival kesenian rakyat di tingkat kabupaten serta penyelenggaraan Pekan Seni Pelajar di tingkat SD, SMP dan SMA/SMK maupun penanaman nilai-nilai budaya daerah di tingkat pelajar.

Keanekaragaman budaya menjadi semakin penting di era globalisasi yang semakin pesat. tradisi, adat istiadat, seni budaya serta bahasa merupakan pilar utama yang mampu menyatukan masyarakat sekaligus mencerminkan identitas diri. Hal ini dapat dilihat dengan indikator Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke atas yang menggunakan Bahasa Daerah di Rumah atau dalam Pergaulan sehari-hari, Persentase



rumah tangga yang menggunakan produk tradisional, Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas mengunjungi peninggalan sejarah, dan Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat. Kabupaten Tapanuli Utara belum pernah melakukan penghitungan terhadap indikator diatas. diharapkan untuk tahun 2025-2030, indikator tersebut dapatn ditampilkan realisasinya sehingga dapat menggambarkan keadaan kebudayaan di Kabupaten Tapanuli Utara.

Tabel 2.54. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	NA	NA	NA	NA	NA
Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	NA	NA	NA	NA	NA
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	NA	NA	NA	NA	NA
Persentase cagar dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan tingkat Kabupaten[MOU1]	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Perpustakaan

Tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, yang menghendaki perubahan dan evaluasi serta penyempurnaan ke arah terwujudnya administrasi publik yang semakin transparan dan akuntabel, serta tuntutan untuk dapat dilayani berbagai macam jasa layanan perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang sesuai dengan tuntutan zaman, menjadikan perpustakaan sebagai sumber belajar yang efektif. Penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan dilaksanakan mulai dari penciptaan sampai dengan penyusutan dan pelestarian, sehingga peningkatan kualitas sumber daya aparatur, peningkatan sarana prasarana kerja dan peningkatan manajemen kearsipan menjadi suatu hal yang penting.

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah.

Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur bidang kearsipan sangat penting dilakukan bagi pengelolaan arsip di OPD setiap tahunnya.

Tabel 2.55. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	10,63	10,39	12,69	13,16	68,96
Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase jumlah pengunjung perpustakaan	2,74	2,66	4,37	4,84	5,58
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	25,38	26,33	26,87	27,64	27,92

Sumber: Dinas Perpustakaan

Perpustakaan merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam menunjang kualitas pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara. Oleh karena itu, urusan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan umum masyarakat di bidang perpustakaan dan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya perpustakaan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan cinta buku. Peningkatan manajemen perpustakaan dan kearsipan dilakukan melalui pembinaan dan pemantauan kearsipan melalui manajemen perpustakaan dan kearsipan.

Kearsipan

Hilangnya beberapa arsip milik negara, polemik asset negara karena tidak didukung kepemilikan arsip, sulitnya menemukan kembali arsip dengan cepat dan tepat di sebuah organisasi, penumpukan arsip di sembarangan tempat, pengelolaan arsip yang tidak sesuai kaidah-kaidah kearsipan merupakan permasalahan kearsipan yang sangat kompleks. Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik ditentukan dengan tata kelola pengarsipan yang baik pula. Oleh karenanya negara wajib hadir untuk mewujudkan tata kelola kearsipan modern.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 6 ayat 1 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kearsipan nasional merupakan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara kearsipan nasional. Penyelenggaraan kearsipan nasional meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guna mewujudkan budaya tertib arsip dan penyelenggaraan kearsipan nasional berjalan secara optimal dibutuhkan pengawasan kearsipan untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan kearsipan di negara ini.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 16 Ayat (2) dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan kearsipan, ANRI dibantu oleh lembaga dan/atau unit kearsipan bekerja sama dengan lembaga atau unit yang menyelenggarakan fungsi pengawasan sesuai dengan wilayah kewenangannya. Kemudian Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012

menyatakan bahwa pengawasan di lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan secara terkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini beriringan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 373 yang mengamanatkan bahwa: 1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; 2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; 3) Pembinaan dan pengawasan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

Adapun jenis pengawasan kearsipan terdiri atas pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Pengawasan kearsipan eksternal dilaksanakan oleh ANRI terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan Pemerintah Provinsi. Sementara pengawasan kearsipan eksternal Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur melalui LKD Provinsi terhadap pencipta arsip tingkat Provinsi dan LKD Kabupaten/Kota. Sedangkan, pengawasan kearsipan internal dilaksanakan oleh LKD Kabupaten terhadap OPD Kabupaten; Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi (LKPT) terhadap satuan kerja pada rektorat, fakultas, civitas akademika, dan unit dengan sebutan lain di lingkungan perguruan tinggi; dan unit kearsipan pada lembaga negara, BUMN, BUMD, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik terhadap unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya sesuai wilayah kewenangannya.

Dengan adanya audit dan pengawasan kearsipan, diharapkan dapat terwujud pengelolaan kearsipan yang lebih baik. Terciptanya budaya tertib arsip yang berkesinambungan dan mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian dapat terwujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga memori kolektif bangsa. Capaian Indikator Urusan Kearsipan di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.56. Capaian Indikator Urusan Kearsipan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (%)	48,89	51,11	51,11	53,33	55,56
Indeks Pengawasan Kearsipan	22,34	N/A	20,83	10,65	14,01
Tingkat Digitalisasi Arsip	N/A	N/A	N/A	4,57	10,71
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	75	75	26,24	35,28	64,3

Sumber: Dinas Perpustakaan

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku merupakan perangkat daerah yang berfokus dalam pengelolaan arsip baik dalam mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip

secara Baku meningkat dari 48,89 persen pada tahun 2020 menjadi 53,33 persen pada tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus berupaya untuk meningkatkan tata kelola kearsipan setiap perangkat daerahnya dan menerapkan digitalisasi dalam pengarsipan dokumen daerah.

2.4.6. Urusan Pilihan

Urusan pilihan adalah bidang atau sektor pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk dipilih dan dikelola sesuai kebutuhan, potensi, dan prioritas pembangunan daerah tersebut. Urusan ini bersifat fleksibel dan dapat berbeda antar daerah, memberikan ruang bagi otonomi daerah untuk mengoptimalkan sumber daya serta menjawab aspirasi masyarakat secara spesifik.

Kelautan dan Perikanan

Sesuai kondisi alamnya, wilayah Kabupaten Tapanuli Utara merupakan wilayah yang kaya sumber daya air dan sumber lahan, di mana selain memiliki Danau Toba juga terdapat kolam, rawa dan beberapa sungai yang cukup panjang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perikanan. Usaha perikanan pada umumnya adalah usaha rumah tangga dalam skala kecil yang sifat usahanya ada yang sudah dikelola secara budidaya dan melalui penangkapan di perairan umum. Rumah tangga budidaya ikan lokasi usahanya ada di kolam dan sawah sedangkan penangkapan ikan dilakukan di sungai, rawa dan danau. Dalam mendukung pengembangan perikanan di daerah ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan berbagai upaya, di antaranya melalui pengembangan budidaya perikanan dan pengembangan perikanan tangkap dan kolam. Saat ini terdapat 2 unit Balai Benih Ikan (BBI) di Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu Balai Benih Ikan Silangkitang di Kecamatan Sipoholon dan Balai Benih Ikan Purbatua di Kecamatan Purbatua.

Tabel 2.57. Perkembangan Produksi Ikan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Sub-Sektor Perikanan (Rp Miliar)	N/A	N/A	N/A	N/A	43,99
Produksi ikan tangkap (ton)	397,25	420,33	77,12	86,73	101,18
Produksi ikan budidaya (ton)	2.591,50	2.440,35	2.824,28	2.871,67	2.865,46
Persentase ketersediaan ikan sesuai kebutuhan	23,49	21,87	20,75	20,54	19,94
Tingkat konsumsi ikan per kapita (Kg/kapita)	40,70	41,50	43,50	44,50	45,50
Total kebutuhan ikan konsumsi (Ton)	12.721,92	13.081,71	13.985,86	14.402,51	14.878,18

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Produksi ikan budidaya di Kabupaten Tapanuli Utara cenderung meningkat sejak tahun 2020 dengan budidaya terbesar pada jenis ikan nila. Upaya ini perlu terus

ditingkatkan guna pemenuhan kebutuhan protein hewani yang berasal dari ikan yang belum bisa mencapai swasembada, dimana tingkat produksi ikan lokal di daerah belum dapat mencukupi kebutuhan protein yang berasal dari ikan yang hanya mencapai 20,54 persen.

Pariwisata

Pariwisata merupakan aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan untuk berekreasi pada suatu tempat. Sektor ini berperan penting bagi perekonomian daerah karena dapat meningkatkan pendapatan daerah serta membantu perekonomian masyarakat sekitar. Capaian indikator Kinerja Pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Wisatawan (Orang)	141.350	142.356	167.502	180.235	191.061
Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	28,50	35,60	33,53	66,66	40,25
Persentase Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%)	24	26	30	33	33
PAD Sektor Pariwisata (Rp Ribu)	225.367	316.000	318.181	214.111	343.030
Jumlah Promosi dan Publikasi Pariwisata	7	4	4	5	2
Destinasi Wisata yang Dikelola	1	3	3	3	3

Sumber: BPS & Dinas Pariwisata

Jumlah wisatawan mancanegara di Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 235 orang pada tahun 2023. Sementara, untuk wisatawan domestik meningkat dari 141.350 orang pada tahun 2020 menjadi 180.235 orang pada tahun 2023. Tidak adanya kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2020-2022 disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan wisatawan asing untuk berkunjung ke daerah. Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata meningkat dari 28,50 persen pada tahun 2020 menjadi 66,66 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin banyaknya destinasi wisata yang ditingkatkan sehingga menjadi daya tarik bagi turis domestik dan asing. Peningkatan SDM Pariwisata diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan ke Kabupaten Tapanuli Utara dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, adanya pelaku-pelaku usaha ekonomi kreatif bidang pariwisata dapat menonjolkan hasil karya daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Pertanian



Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor yang mendorong perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara hingga saat ini. Mayoritas masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara bergerak pada sektor tersebut. PDRB sub sektor pertanian mempunyai proporsi yang besar dalam pembentukan PDRB Pertanian (termasuk kehutanan dan perikanan) di Kabupaten Tapanuli Utara. Capaian indikator Kinerja Pertanian di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.59. Capaian Kinerja Pertanian

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Sub-Sektor Pertanian (Rp Miliar)	3.171,5 2	3.444,2 7	3.873,8 2	4.247,87	4.549,97

Sumber: BPS (diolah, 2024)

Capaian kinerja pertanian untuk indikator PDRB sub-sektor pertanian pada tahun 2020 sebesar 3.171,52 dan terus meningkat pada tahun 2024 sebesar 4.549,97 miliar rupiah.

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki potensi pada sektor tanaman pangan dan palawija. Data terkait produksi dan produktivitasnya sebagai berikut.

Tabel 2.60. Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi dan Palawija

Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023	2024
Padi Sawah					
Produksi (Ton)	118.205,75	118.258,98	118.426,70	118.911,44	120.853,72
Luas Panen (Ha)	23.827,00	22.764	22.493,20	22.572,40	22.932,40
Produktivitas (Kw/Ha)	49,61	51,95	52,65	52,68	52,70
Padi Ladang					
Produksi (Ton)	75.787,23	75.974,09	70.255,45	66.507,42	67.624,88
Luas Panen (Ha)	25.552	25.615	23.663,00	22.378,00	22.754,00
Produktivitas (Kw/Ha)	29,66	29,66	29,69	29,72	29,72
Jagung					
Produksi (Ton)	126.372,10	107.488,84	127.694,74	136.500,99	141.545,78
Luas Panen (Ha)	23.993	18.352,20	22.469,60	24.392,60	25.294,10
Produktivitas (Kw/Ha)	52,67	58,57	56,83	55,96	55,96
Kacang Tanah					
Produksi (Ton)	2.453,02	2.466,18	2.495,34	2.978,76	2.501,67
Luas Panen (Ha)	1.598,00	1.603,5 0	1.619,30	1.928,00	1.611,90
Produktivitas (Kw/Ha)	15,35	15,38	15,41	15,45	15,52
Ubi Kayu					

Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi (Ton)	15.811,30	17.003,94	18.417,66	21.885,30	27.589,16
Luas Panen (Ha)	437	467	509,00	604,7	762,30
Produktivitas (Kw/Ha)	361,81	364,11	361,84	361,92	361,92
Ubi Jalar					
Produksi (Ton)	6.187,43	6.268,51	7.245,18	8.365,88	10.006,89
Luas Panen (Ha)	367	368	428,00	494	590,90
Produktivitas (Kw/Ha)	168,59	170,34	169,28	169,35	169,35

Sumber: Dinas Pertanian

Kabupaten Tapanuli Utara juga memiliki potensi pada sektor perkebunan. Data terkait produksi dan produktivitas perkebunan sebagai berikut.

Tabel 2.61. Produksi dan Produktivitas Perkebunan

Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023	2024
Kopi Arabika					
Produksi (Ton)	14.663,94	15.644,50	15.712,12	15.790,94	15.998,96
Luas Panen (Ha)	13.225,40	13.328,10	13.564,67	13.624,14	13.624,14
Produktivitas (Ton/Ha)	1.100,45	1.173,80	1.158,31	1,16	1,17
Kopi Robusta					
Produksi (Ton)	567,50	564,25	563,84	564,02	564,03
Luas Panen (Ha)	1.003,47	913,27	904,35	905,60	905,61
Produktivitas (Ton/Ha)	565,54	617,83	623,48	622,81	622,82
Kakao					
Produksi (Ton)	1.778,89	1.918,99	1.930,92	1.952,92	1.976,79
Luas Panen (Ha)	2.704,50	2.718,58	2.721,23	2.728,84	2.728,84
Produktivitas (Ton/Ha)	657,75	705,88	709,58	716,66	716,66
Tembakau					
Produksi (Ton)	495,63	831,30	839,18	850,68	850,69
Luas Panen (Ha)	410,75	489,00	660,25	670,00	670,01
Produktivitas (Ton/Ha)	1.206,65	1.700,00	1.271,00	1.273,00	1.273,01
Kemenyan					
Produksi (Ton)	3.846,56	3.876,47	3.873,93	3.877,06	3.857,15
Luas Panen (Ha)	14.059,70	14.058,28	14.052,95	14.057,35	14.057,35



Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023	2024
Produktivitas (Ton/Ha)	273,59	275,74	275,67	0,28	0,27

Sumber: Dinas Pertanian

Produksi dan produktivitas tanaman hortikultura sebagai berikut.

Tabel 2.62. Produksi dan Produktivitas Hortikultura

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Cabe Merah					
Produksi (Ton)	6.222,40	7.769,08	7.925,06	7.979,96	8.500,23
Luas Panen (Ha)	1.364,00	1.378,22	1.424,09	1.428,56	1.528,25
Produktivitas (Kw/Ha)	45,62	56,37	55,65	5,51	5,56
Cabe Rawit					
Produksi (Ton)	1.529,70	2.570,28	2.665	3.274,10	3.456,70
Luas Panen (Ha)	316,00	339,09	340,38	526,00	552,35
Produktivitas (Kw/Ha)	48,41	58,70	58,73	6,22	6,26
Bawang Merah					
Produksi (Ton)	476,01	1.448,44	1.626,74	1.663,13	2.503,02
Luas Panen (Ha)	52,00	103,95	129,61	132,79	198,39
Produktivitas (Kw/Ha)	91,54	139,34	125,51	12,52	12,62
Durian					
Produksi (Ton)	9.176,30	16.290,70	18.170,60	18.200,57	18.200,83
Luas Panen (Ha)	763,90	764,60	768,95	769,46	767,89
Produktivitas (Kw/Ha)	120,12	213,06	236,30	23,65	23,70
Alpukat					
Produksi (Ton)	11.957,10	8.585,80	8.665,02	9.166,48	9.364,28
Luas Panen (Ha)	188,90	233,06	234,12	248,56	261,91
Produktivitas (Kw/Ha)	632,99	368,39	370,11	36,87	35,75
Nenas					
Produksi (Ton)	155.139,20	159.902,00	160.356,43	166.361,12	170.371,28
Luas Panen (Ha)	978,41	1.007,63	1.012,16	1.036,83	1.040,00
Produktivitas (Kw/Ha)	1.585,63	1.586,91	1.584,30	160,45	163,82
Mangga					
Produksi (Ton)	1.775,70	5.263,77	5.458,00	5.645,80	6.473,70
Luas Panen (Ha)	115,10	125,80	127,70	132,05	133,30
Produktivitas (Kw/Ha)	154,27	418,42	427,41	42,74	48,56

Sumber: Dinas Pertanian



Ditinjau dari segi iklim dan ketersediaan lahan Kabupaten Tapanuli Utara sangat cocok dan sesuai untuk pengembangan tanaman perkebunan. Pada umumnya perkebunan di daerah ini merupakan usaha perkebunan rakyat dan belum terdapat usaha perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan. Walaupun demikian di masa mendatang diharapkan perkebunan rakyat ini semakin berkembang.

Jenis komoditi unggulan yang dibudidayakan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara adalah tanaman kopi arabika. Hal ini terlihat dari besarnya luas tanaman kopi arabika dengan luas tanam terbesar ada di Kecamatan Siborongborong. Kemudian diikuti oleh tanaman kemenyan dengan luas tanam terbesar terdapat di Kecamatan Pangaribuan.

Tabel 2.63. Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kelapa Sawit					
Produksi (Ton)	38,00	37,92	38,80	38,80	138,30
Luas Panen (Ha)	27,90	27,75	42,10	24,95	138,30
Produktivitas (Ton/Ha)	1,36	1,37	0,92	1,56	1,00
Kelapa					
Produksi (Ton)	269,72	269,83	271,62	273,18	272,53
Luas Panen (Ha)	352,98	354,05	371,17	284,43	272,53
Produktivitas (Ton/Ha)	0,76	0,76	0,73	0,96	1,00
Karet					
Produksi (Ton)	5.561,73	5.647,06	5.547,14	5.344,56	7.920,13
Luas Panen (Ha)	9.077,30	9.070,77	9.068,05	8.169,13	7.920,13
Produktivitas (Ton/Ha)	0,61	0,62	0,61	0,65	1,00
Kopi					
Produksi (Ton)	15.793,35	15.644,50	15.712,12	15.790,94	13.664,40
Luas Panen (Ha)	17.586,72	16.276,77	1.184,30	13.624,14	13.664,40
Produktivitas (Ton/Ha)	0,90	0,96	13,27	1,16	1,00
Kakao					
Produksi (Ton)	1.778,89	1.918,99	1.930,92	1.952,92	1.980,57
Luas Panen (Ha)	3.177,00	3.191,08	3.245,52	2.728,84	2.744,39
Produktivitas (Ton/Ha)	0,56	0,60	0,59	0,72	0,72
Tembakau					
Produksi (Ton)	495,63	831,30	839,18	850,68	875,00
Luas Panen (Ha)	600,00	739,25	945,00	670,00	650,00
Produktivitas (Ton/Ha)	0,83	1,12	0,89	1,27	1,35

Sumber: Dinas Pertanian

Dalam mendukung pengembangan usaha peternakan di daerah ini terdapat potensi lahan padang penggembalaan yang tersebar di seluruh kecamatan. Jenis ternak yang dikembangkan di Kabupaten Tapanuli Utara adalah ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas.

Melalui berbagai program bidang peternakan di Kabupaten Tapanuli Utara telah didapat capaian hasil kegiatan pembangunan pada bidang peternakan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.64. Populasi dan Produksi Peternakan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Sapi					
Populasi (Ekor)	535	654	814	895	787
Produksi (Kg)	6.420	7.848	9.768	10.024	9.444
Produksi Susu (Ton)	62,74	62,74	77,69	78,49	82,84
Kerbau					
Populasi (Ekor)	9.768	10.028	10.043	10.054	9.872
Produksi (Kg)	117.216	120.336	120.516	120.648	118.464
Kuda					
Populasi (Ekor)	123	126	230	118	105
Produksi (Kg)		554	558	-	-
Kambing					
Populasi (Ekor)	2.296	2.393	2.185	2.105	2.105
Produksi (Kg)	1.091	1.137	1.038	842	1.010
Domba					
Populasi (Ekor)	20	23	23	15	42
Produksi (Kg)	8	90	104	-	-
Babi					
Populasi (Ekor)	2.955	9.438	21.483	20.013	20.132
Produksi (Kg)	56.736	181.210	412.474	384.250	386.534
Ayam					
Populasi (Ekor)	445.730	480.039	511.843	543.733	524.353
Produksi (Kg)	9.360	10.080	10.748	11.418	10.729
Itik					
Populasi (Ekor)	45.473	60.044	62.512	64.617	63.940
Produksi (Kg)	6.912	9.127	9.502	10.662	13.427

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Secara umum populasi ternak bertambah setiap tahun dan produksi ternak



terbanyak adalah kerbau, babi dan ayam yang merupakan konsumsi daging utama masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan untuk protein hewani, populasi dan produksi ternak tersebut harus ditambah agar tercapai swasembada pangan.

Perdagangan

Perdagangan merupakan aktivitas mendistribusikan barang dan jasa dari suatu tempat ke tempat lain untuk meningkatkan perekonomian daerah. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan sektor perdagangan agar mampu berdaya saing secara domestik dan global. Capaian indikator Kinerja Perdagangan di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65. Capaian Kinerja Perdagangan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	15,68	15,84	15,79	15,91	16,29
Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	72,75	73,77	74,67	75,52	76,65

Sumber: BPS & Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok merupakan indikator untuk mengukur stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok terhadap kebutuhan masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok meningkat dari tahun 2022 sebesar 72,75 persen menjadi 76,65 persen pada tahun 2024.

Perindustrian

Perindustrian merupakan aktivitas pengolahan barang mentah menjadi barang jadi yang bernilai tambah. Sektor perindustrian berperan penting sebagai pendorong perekonomian wilayah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mendorong tumbuhnya industri agar meningkatkan daya saing daerah. Capaian indikator Kinerja Perindustrian di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66. Capaian Kinerja Perindustrian

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan IKM (%)	0,14	0,04	0,04	3,09	2,09

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan

Aktivitas perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara hingga saat ini masih didorong oleh Sektor Pertanian. Pemerintah harus berupaya untuk melakukan



hilirisasi komoditas daerah melalui industri pengolahan sehingga produk yang dihasilkan akan memiliki nilai tambah. Pertumbuhan IKM Tapanuli Utara pada tahun 2020 sebesar 0,14 persen dan meningkat sampai dengan tahun 2024 sebesar 2,09 persen. Pertumbuhan IKM di Tapanuli Utara cenderung lambat, hilirisasi komoditi pertanian masih sangat sedikit. Masyarakat lebih cenderung bergerak di sektor pertanian dibandingkan sektor industri. Pertumbuhan IKM disini adalah industri yang mengalami peningkatan volume produksi, bahan baku dan tenaga kerja. Data Pertumbuhan IKM ini diambil dari Data SIINAS (Sistem informasi Industri Nasional).

Transmigrasi

Urusan transmigrasi adalah urusan pemerintahan mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta pembinaan dan pengembangan masyarakat transmigran.

Tabel 2.67. Capaian Kinerja Transmigrasi

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase transmigran swakarsa (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase transmigran yang diberdayakan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	20,00

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan

2.4.7. Penunjang Urusan

Perencanaan Pembangunan

Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan di daerah dan dalam era globalisasi maka dituntut sebuah perencanaan yang akuntabel, efisien, efektif dan transparan. Mendasar pada permasalahan dan kondisi yang ada maka untuk mencapai target yang ditetapkan disusun strategi peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan pengembangan. Adapun langkah kebijakan yang ditempuh dengan meningkatkan kinerja perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dan meningkatkan kinerja fungsi penelitian dan pengembangan di Daerah. Kinerja perencanaan di daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Capaian Indikator Kinerja Daerah	80,53	81,25	84,45	84,26	85,38
Dokumen RPJPD yang Ditetapkan dengan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Perda					
Dokumen RPJMD yang Ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Dokumen RKPD yang Ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Dokumen RTRW yang Ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappelitbangda

Capaian Indikator Kinerja Daerah merupakan ukuran terukur tentang seberapa jauh sebuah daerah telah mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan dalam visi dan misi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan, pemerataan, produktivitas, layanan publik, serta daya saing. Ini menunjukkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui akumulasi pencapaian indikator program dan sasaran pembangunan dalam periode waktu tertentu. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa seluruh dokumen perencanaan Kabupaten Tapanuli Utara telah tersedia.

Keuangan

Keuangan daerah merupakan kondisi sumber daya finansial daerah yang dimanfaatkan untuk pengembangan daerah. Pajak dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah. Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak terhadap negara, sementara retribusi adalah pungutan yang dibayarkan kepada negara atas jasa ataupun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kehadiran lembaga keuangan juga mendukung pengembangan daerah. Melalui lembaga keuangan, seperti perbankan akan membantu pembiayaan masyarakat. Capaian indikator Kinerja Keuangan Daerah dan Perbankan di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69. Capaian Kinerja Urusan Keuangan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK (Level)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Pendapatan Daerah

Hasil penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Tapanuli Utara sejak tahun 2020-2024 berhasil mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah sesuai dengan prinsip pelaporan yang berlaku.

Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan



Kompetensi merupakan salah satu unsur penentu upaya peningkatan kinerja organisasi dan penyediaan tenaga kerja yang memberikan perspektif yang lebih tajam dan spesifik terhadap pekerja dan pekerjaannya, karena kompetensi merujuk kepada karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (*superior performer*). Capaian kinerja urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.70. Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	18	20	13	97	100
Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	36,43	37,29	60,30	77,60	81,00
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	131,00	131,00	70,00	71,09	68,83
Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	61,20	187,00	77,53	14,39	11,35
Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	99,00	68,29	23,00	37,75	6,35

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal merupakan ASN yang bekerja di pemerintahan mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Tapanuli Utara.

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal meningkat dari 18 persen pada tahun 2020 menjadi 97 persen pada tahun 2023. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural merupakan pejabat ataupun pemilik jabatan sebagai ASN yang bekerja di pemerintahan mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Tapanuli Utara. Indeks Profesionalitas ASN meningkat dari 36,43 poin pada tahun 2020 menjadi 60,30 poin pada tahun 2022.

Pengawasan

Unsur pengawasan urusan pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Peran pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara sangat penting, karena fungsi ini sangat diperlukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kaidah yang ada. Fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui pemeriksaan, evaluasi dan reviu. Permasalahan yang dihadapi pada konteks fungsi penunjang pengawasan ini adalah bahwa tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan

belum dapat diselesaikan seluruhnya oleh obyek pemeriksaan dan masih adanya kesenjangan jumlah aparat pengawasan/auditor dibandingkan dengan beban kerja obyek pemeriksaan. Capaian pelaksanaan fungsi pengawasan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.71. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengawasan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Persepsi Korupsi (RPJMD)	37,00	38,00	34,00	34,00	N/A
Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal B (%)	N/A	60,32	66,67	N/A	N/A
Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	91,67	92,96	90,72	91,57	N/A
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Level)	III	III	III	III	III
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Level)	II	II	II	III	III

Sumber: Inspektorat

Indeks persepsi korupsi di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami cenderung menurun dari tahun 2020 sebesar 37,00 poin menjadi sebesar 34,00 poin pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pandangan negatif dari persepsi para ahli dan pelaku bisnis terhadap tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan data pada tabel tersebut, jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP minimal B sebanyak 66,67 persen pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat beberapa OPD yang memiliki nilai SAKIP di bawah B.

Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 relatif berada pada angka 90-an persen. Pada tahun 2023, temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti sebesar 91,57 persen. Level Maturitas SPIP meningkat dari Level III dengan kategori Berkembang pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Hal ini berarti praktik pengendalian telah terdokumentasi oleh instansi pemerintah. Kapabilitas APIP Pemerintah meningkat dari Level II pada tahun 2020 menjadi level III pada tahun 2023.

Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.



Berdasarkan peraturan tersebut diketahui Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Selain itu pemerintah daerah juga melaksanakan urusan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat.

Penyelenggaraan urusan kewenangan setiap tahun dilaporkan kepada pemerintah provinsi dan pusat serta masyarakat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Akhir Masa Jabatan (LKPJ dan AMJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Program penataan peraturan perundangan di daerah ini dilaksanakan melalui penetapan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup). Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan menjamin kepastian hukum telah diterbitkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Tabel 2.72. Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (Poin) (Bab V RPJPD)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nilai Evaluasi SAKIP (RPJMD)	CC	CC	B	B	B (63,14)

Sumber: KemenPAN-RB

Evaluasi SAKIP meningkat dari CC pada tahun 2020 menjadi B pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah menanggapi dengan serius dan berkomitmen untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya.

2.5. Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan bagian dari faktor strategis yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas yang diberikan kepada mereka. Program-program yang dipersiapkan pemerintah daerah perlu didukung dengan pendanaan yang memadai sehingga apa yang direncanakan dapat terwujud dengan baik. Keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban yang dimiliki dan ditanggung oleh daerah, termasuk segala kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan pemerintah daerah harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan keadilan, kepatutan, dan keuntungan bagi masyarakat. Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeriksaan, dan berakhir dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, analisis kinerja pelaksanaan APBD pada periode sebelumnya diperlukan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah. Tujuan dari evaluasi kinerja keuangan daerah masa lalu adalah untuk mengetahui kemampuan daerah dalam memberikan pendanaan kegiatan pemerintah daerah ke depannya.

Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tapanuli Utara perlu mengutamakan pencapaian tujuan kinerja dan prinsip efektif dan efisien pengelolaan anggaran. Proses penyusunan berbagai kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah harus segera direalisasikan dan dievaluasi secara berkala. Sangat penting untuk mengoptimalkan kebijakan ekonomi daerah untuk menarik lebih banyak investasi ke daerah dan mengakselerasi pertumbuhan serta pembangunan daerah. Kebijakan anggaran pendapatan dan belanja juga harus diawasi dengan cermat sehingga dapat meningkatkan pengelolaan APBD yang bertanggung jawab melalui manajemen keuangan daerah yang efektif, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber potensial penerimaan daerah.

Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah melalui dua kali perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang mengatur perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintah antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten / Kota, maka pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel. Keuangan daerah yang akan dievaluasi mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah meliputi semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman yang menjadi sumber penerimaan daerah
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga yang menjadi sumber pengeluaran / belanja daerah
3. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain
4. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan/atau kepentingan umum.

Dalam upaya memahami kemampuan keuangan daerah, perlu untuk mengevaluasi keadaan keuangan umum daerah. Hal ini termasuk kinerja keuangan masa lalunya dan kebijakan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan. Berdasarkan kondisi kinerja keuangan masa lalu, potensi pendapatan, anggaran belanja, dan neraca

keuangan daerah dapat diprediksi untuk mendukung kerangka keuangan dan pendanaan di masa depan.

Pengelolaan keuangan daerah menyangkut pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja daerah serta sumber-sumber pembiayaan daerah. Daerah yang mampu meminimalkan sumber pendapatan daerah melalui dana transfer, maka daerah tersebut akan menjadi semakin maju dan mandiri. Kemandirian daerah digunakan sepenuhnya untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada bab ini selanjutnya akan dievaluasi gambaran keuangan daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan berfungsi selama periode waktu tertentu. Rata-rata pertumbuhan yang dihasilkan dari analisis kinerja keuangan masa lalu dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat proyeksi keuangan ke depan. Kinerja keuangan masa lalu adalah hasil dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mencakup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, target dan realisasi pendapatan, dan belanja daerah.

Keuangan daerah sebagai komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyatu dalam kerangka APBD memiliki penjabaran khusus untuk mendukung pelaksanaan program organisasi perangkat daerah yang terstruktur. Dalam hal ini, APBD Kabupaten Tapanuli Utara menjadi instrumen untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat setempat melalui otonomi daerah.

Peningkatan dan percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Tapanuli Utara perlu didukung dengan perencanaan APBD yang semakin baik. Proses penyusunan APBD didasarkan kepada rencana kerja Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2026. Analisis berikut menjadi gambaran umum terkait dengan kinerja pelaksanaan APBD masa lalu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang menjadi landasan dalam penyusunan proyeksi dan target pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah yang akan tertuang dalam RPD Kabupaten Tapanuli Utara periode perencanaan 2025-2026.

2.5.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pada dasarnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) disusun pemerintah daerah bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan yang tersedia sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui program-program yang telah dipersiapkan. Salah satu cara untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan melihat kinerja realisasi anggaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Realisasi pendapatan daerah menjadi hal yang sangat penting karena pendapatan daerah yang akan membiayai belanja daerah selama satu tahun. Jika tidak terealisasi, pemerintah daerah tidak akan dapat membiayai belanja daerah yang telah direncanakan dan dapat mengakibatkan tidak tercapainya target-target pembangunan daerah yang telah ditentukan.

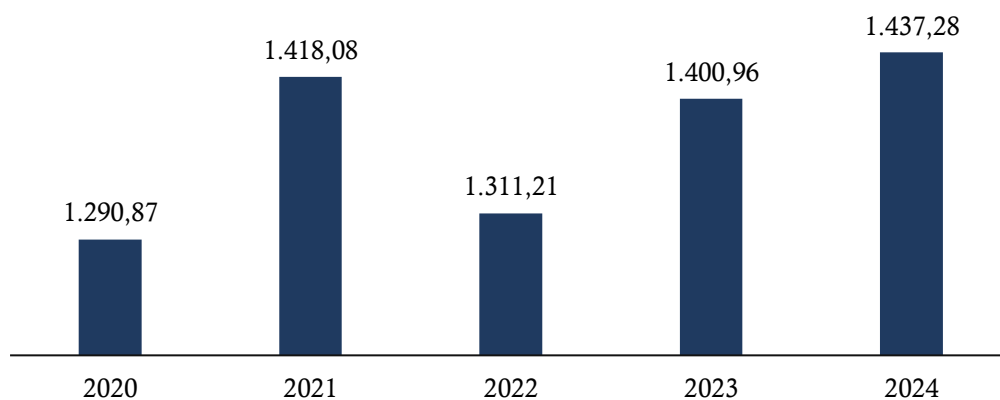
Pada bidang belanja, serapan anggaran menunjukkan seberapa banyak

manfaat yang diterima oleh masyarakat selama satu tahun anggaran, yang juga akan meningkatkan efek pengganda terhadap pertumbuhan ekonomi. Realisasi pembiayaan menunjukkan seberapa besar kemungkinan defisit anggaran dapat ditutupi dalam satu tahun anggaran. Evaluasi pelaksanaan APBD di masa lalu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 hingga 2024 dirangkum dalam analisis selanjutnya pada bab ini.

2.5.2. Analisis Pendapatan Daerah

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah memiliki tempat, fungsi, dan peran strategis untuk mendukung pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memerhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan, khususnya pendapatan asli daerah tanpa memberikan beban bagi masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menggambarkan pendapatan daerah sebagai semua uang yang diterima melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan semua uang lainnya yang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Komponen dari pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lainnya yang Sah merupakan bagian dari pendapatan daerah. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020 sampai dengan 2024 secara keseluruhan dirangkum sebagai berikut.

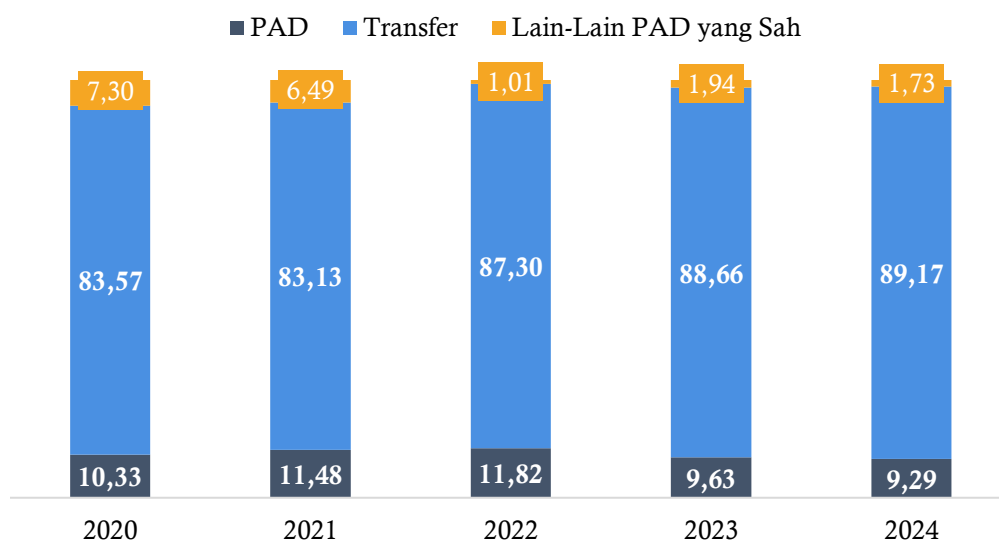


Gambar 2.48. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 (Rp Miliar)
Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Utara

Hasil evaluasi pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa secara umum telah terjadi peningkatan. Dari tahun 2020 hingga 2024, realisasi pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara memiliki trend yang meningkat. Pada tahun 2020, tercatat pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Utara berada pada tingkat Rp 1.290,87 Miliar. Pendapatan tersebut meningkat menjadi Rp 1.437,28 Miliar pada tahun 2024. Selama periode 2020–2024, realisasi pendapatan mengalami fluktuasi cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,94% per tahun. Sayangnya realisasi pendapatan daerah

mengalami penurunan sebesar 7,54% dari tahun 2021 ke tahun 2022. Pada tahun berikutnya kembali terjadi peningkatan hingga pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp 1.437,28. Dengan adanya penurunan tersebut, pertumbuhan rata-rata dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menjadi 2,94% per tahun. Pendapatan tertinggi dari Kabupaten Tapanuli Utara terjadi pada tahun 2024 dengan nilai pendapatan sebesar Rp 1.437,28 Miliar.

Dalam upaya memperoleh gambaran pendapatan daerah yang lebih terperinci, maka evaluasi terhadap pendapatan daerah juga dilakukan berdasarkan struktur pendapatan daerah yang terdiri dari (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Pendapatan Transfer, dan (3) Lain-lain Pendapatan yang Sah. Gambaran struktur pendapatan daerah Tapanuli Utara tahun 2020-2024 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.49. Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 (%)

Selama periode 2020 sampai dengan 2024, struktur pendapatan daerah di Tapanuli Utara mengalami pergerakan yang dinamis. Secara struktur utama pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 diisi oleh pendapatan transfer yang cenderung meningkat dari tahun 2020 sebesar 83,57% meningkat menjadi 89,17% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur utama pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara masih bergantung kepada pendapatan transfer dari daerah maupun nasional. struktur kedua diisi oleh pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi cenderung menurun dari tahun 2020 sebesar 10,33% meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 11,82% dan kemudian kembali menurun hingga tahun terakhir menjadi 9,29% pada tahun 2024. Struktur ketiga diisi oleh lain-lain pendapatan yang sah dengan tingkat persentase dari tahun 2020 sebesar 6,10% menjadi sebesar 1,55% pada tahun 2024. Pendapatan lain-lain Kabupaten Tapanuli Utara diperoleh melalui pendapatan hibah.

Hasil evaluasi struktur pendapatan pada periode 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan bahwa pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara didominasi oleh pendapatan transfer. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara masih sangat bergantung kepada aktivitas pendapatan transfer, khususnya

pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan pendanaan ini membuat Kabupaten Tapanuli Utara dalam menjalankan program-programnya masih sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dana dari pusat ataupun daerah lain.

Dalam hal memperoleh gambaran keuangan daerah yang lebih jelas terkait keuangan daerah, perlu dilakukan analisis derajat kemandirian dan rasio ketergantungan daerah untuk menilai kemampuan otonomi suatu daerah untuk menjalankan program-program pemerintahan. Tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain diukur melalui rasio ketergantungan daerah. Derajat kemandirian daerah ditunjukkan oleh proporsi PAD daerah terhadap pemerintah pusat.

Rasio ketergantungan daerah dan derajat kemandirian daerah menjelaskan dua hal yang saling melengkapi. Rasio ketergantungan daerah dihitung berdasarkan nilai pendapatan transfer dan pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan yang mampu dihasilkan Kabupaten Tapanuli Utara selama satu tahun. Sebaliknya, derajat kemandirian daerah dihitung berdasarkan kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD dari keseluruhan pendapatan daerah, dalam hal ini Kabupaten Tapanuli Utara dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar rasio PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, semakin kecil ketergantungan daerah terhadap bantuan dari luar. Sebaliknya, semakin besar rasio PAD terhadap pendapatan transfer dan pendapatan yang sah lainnya, semakin besar ketergantungan daerah terhadap bantuan dari luar. Jadi, daerah dengan tingkat ketergantungan yang rendah akan menggambarkan PAD yang semakin tinggi dan proporsi pendapatan transfer dan pendapatan daerah lain yang sah semakin rendah.

Tabel 2.73. Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Rp Miliar)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Total Pendapatan Daerah	1.290,87	1.418,08	1.311,21	1.400,96	1.437,28
Pendapatan Asli Daerah	133,38	162,79	154,97	134,85	133,48
Derajat Otonomi Fiskal Daerah	10,33	11,48	11,82	9,63	9,29
Kategori	Belum Mandiri	Belum Mandiri	Belum Mandiri	Belum Mandiri	Belum Mandiri
Rasio Ketergantungan Daerah	83,57	83,13	87,30	88,66	89,17

Pada tahun 2020 hingga 2024, tingkat derajat kemandirian Kabupaten Tapanuli Utara berada pada rentang 9,29 persen sampai dengan 11,82 persen yang masih termasuk dalam kategori daerah dengan keuangan yang belum mandiri. Derajat kemandirian daerah di Tapanuli Utara setiap tahunnya mengalami peningkatan, seiring dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Kondisi ini mencerminkan kemampuan yang baik bagi Kabupaten Tapanuli Utara, namun masih memerlukan akselerasi untuk menghasilkan pendapatan asli daerah yang akan digunakan untuk pembangunan. Tingkat derajat kemandirian 11,82% pada

tahun 2022 menunjukkan perjuangan Kabupaten Tapanuli Utara untuk mengupayakan pencapaian kemandirian daerah. Pada periode 2020 sampai dengan 2022, derajat otonomi fiskal tumbuh sebesar 6,95 persen per tahun, namun terjadi penurunan sampai dengan 11,35% pada tahun 2024 menjadi 9,29%.

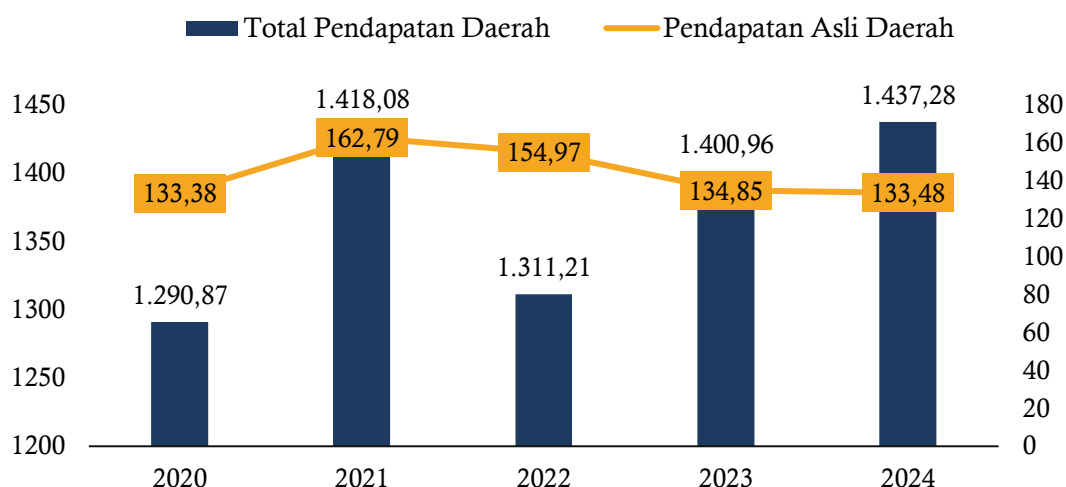
Faktor utama penurunan kemandirian daerah ini adalah peningkatan pendapatan transfer yang diterima Kabupaten Tapanuli Utara yang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2020. Sebagai hasil dari evaluasi yang dilakukan dari 2020 hingga 2024, derajat kemandirian Kabupaten Tapanuli Utara dalam pembangunan terus meningkat dengan penurunan pada tahun 2024.

Sampai dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2024, Kabupaten Tapanuli Utara masih memiliki kemandirian daerah kurang dari 25% yang masih tergolong sebagai daerah yang belum mandiri berdasarkan kinerja keuangan daerah, bahkan mengalami penurunan signifikan yang perlu menjadi perhatian pada tahun 2024.

Selain itu, tabel tersebut menunjukkan besarnya rasio ketergantungan Kabupaten Tapanuli Utara. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, rasio ini saling melengkapi angka pada kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tapanuli Utara. Selama periode 2020-2024, tingkat ketergantungan Kabupaten Tapanuli Utara sudah semakin menurun, dengan rentang nilai rasio ketergantungan antara 83,13 persen sampai dengan 89,17 persen dengan rata-rata rasio ketergantungan sebesar 86,36 persen. Rasio ketergantungan Kabupaten Tapanuli Utara mencapai titik tertingginya pada tahun 2024, yaitu 89,17 persen. Meskipun demikian. Hasil evaluasi kondisi keuangan tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Tapanuli Utara memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi, dengan catatan rasio ketergantungan daerah masih di atas 75,00%. Pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara masih bergantung kepada transfer nasional dan transfer daerah untuk memenuhi belanja dalam melaksanakan program-programnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi pendorong utama bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik di era otonomi daerah. Pendapatan asli daerah adalah sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan dan terdiri dari pajak daerah, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan sumber pendapatan lain yang sah. Tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat berkorelasi negatif dengan PAD. Semakin tinggi PAD yang bisa dihasilkan suatu daerah dalam membiayai daerahnya, semakin besar kemandirian daerah tersebut. Gambar berikut menunjukkan gambaran capaian PAD Kabupaten Tapanuli Utara selama kurun waktu 2020–2024.



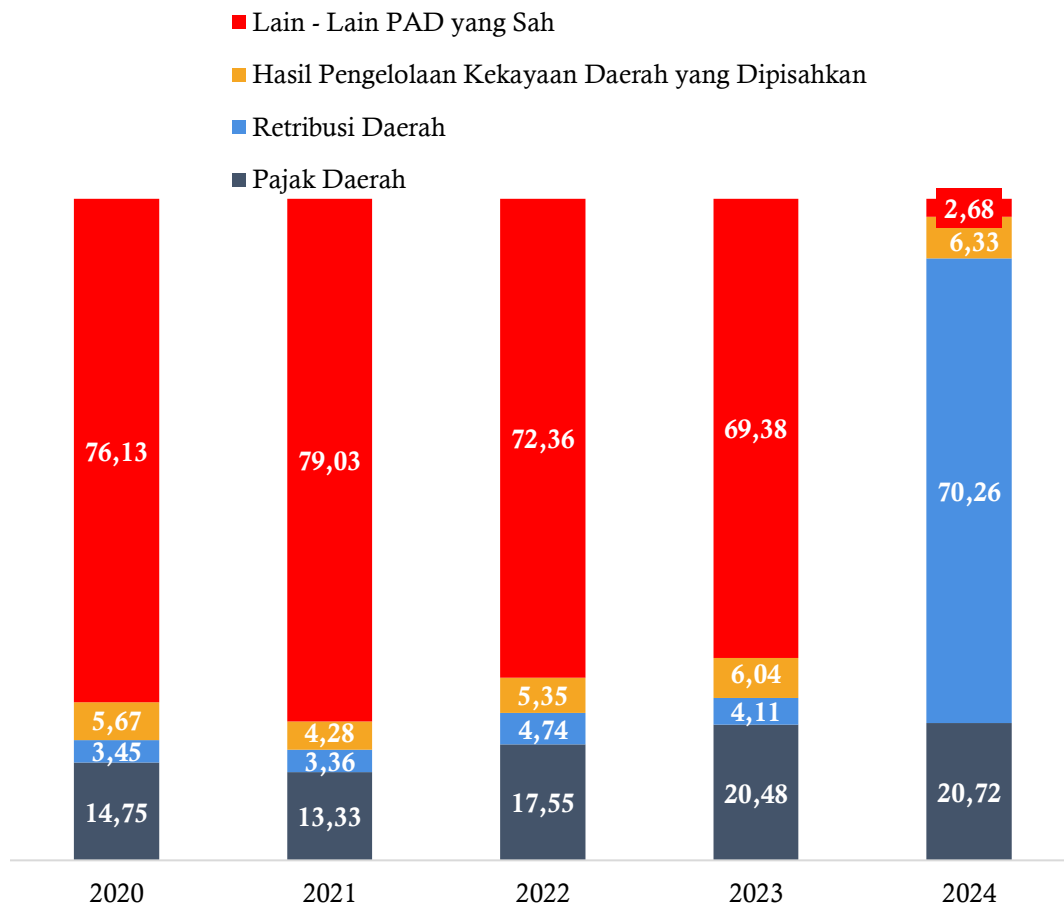
Gambar 2.50. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 (Rp Miliar)

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Utara

Gambar di atas menunjukkan pergerakan realisasi PAD Kabupaten Tapanuli Utara dari tahun 2020 hingga 2024. Selama periode lima tahun terakhir, Kabupaten Tapanuli Utara hanya berhasil meningkatkan pertumbuhan PAD pada tahun 2021 namun di tahun berikutnya belum terjadi pertumbuhan PAD. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan PAD dari sebesar Rp 133,38 Miliar menjadi Rp 162,79 Miliar pada tahun 2021. Pada tahun berikutnya mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terjadi penurunan dari Rp 154,97 Miliar pada menjadi Rp 133,48 Miliar. Secara rata-rata, selama periode 2020 sampai dengan 2024, Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara meningkat sebesar 0,02 persen dengan capaian kinerja sebesar 102,09% setiap tahunnya. Pertumbuhan pesat PAD Kabupaten Tapanuli Utara terjadi pada tahun 2020 yang mencapai puncak PAD dengan nilai realisasi sebesar Rp 162,79 Miliar.

Perbandingan antara pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Tapanuli Utara tumbuh dengan tingkat rata-rata 0,02 persen, lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah yang sebesar 2,72 persen. Hal ini menunjukkan bahwa potensi PAD belum signifikan dalam struktur pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Laju pertumbuhan PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah menunjukkan bahwa peran potensi PAD dalam pembentukan struktur pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Utara belum digali oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara oleh karena itu, diharapkan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara di tahun-tahun mendatang agar berupaya untuk meningkatkan potensi PAD sebagai bentuk kemandirian daerah. Pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar Rp 1.311,21 Miliar hingga mencapai Rp 1.437,28 Miliar pada tahun 2024, namun PAD yang didapatkan mengalami penurunan dari Rp 154,97 Miliar menjadi Rp 133,48 Miliar pada tahun 2024. Dalam kaitannya dengan pencapaian pendapatan asli daerah (PAD), berikut adalah sumber-sumber pendapatan asli daerah Kabupaten

Tapanuli Utara selama kurun waktu 2020–2024: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (d) Pendapatan Asli Daerah Lainnya. Struktur PAD Kabupaten Tapanuli Utara didasarkan pada persentase kontribusi masing-masing komponen PAD selama kurun waktu tersebut.

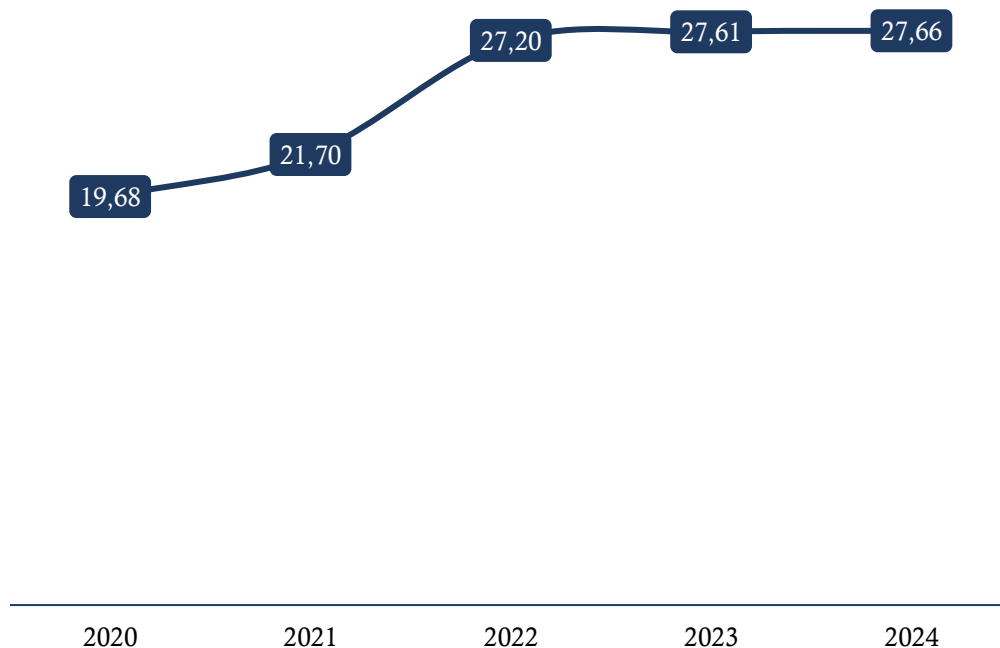


Gambar 2.51. Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024
Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Utara

Gambar di atas menunjukkan bahwa komposisi atau struktur dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Utara memiliki dua sumber utama, yaitu Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan pendapatan pajak daerah pada tahun 2020 sampai dengan 2023, namun demikian di tahun 2024 terjadi pergeseran pendapatan sumber utama, yaitu retribusi daerah dan pajak daerah.

Komposisi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di Kabupaten Tapanuli Utara selama periode 2020 sampai dengan 2024 berfluktuasi, namun cenderung terjadi penurunan signifikan di tahun terakhir mulai dari tahun 2020 sebesar 76,13 persen sampai dengan 79,03 persen pada tahun 2021 kemudian terjadi penurunan hingga pada tahun 2023 menjadi sebesar 69,38% dengan nominal sebesar Rp 93,56 Miliar namun terjadi penurunan yang cukup signifikan di tahun 2024 menjadi 2,68% atau sebesar Rp 3,58 Miliar dengan rata-rata lain-lain PAD yang sah dalam kurun waktu

2020 sampai dengan 2025 sebesar 71,05 persen. Kontribusi pendapatan utama selanjutnya adalah Pendapatan Pajak Daerah yang berada pada tingkat 14,75 persen pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan menjadi 13,33 persen pada tahun 2021 namun demikian di tahun berikutnya mengalami peningkatan menjadi sebesar sampai dengan 20,72 persen pada tahun 2024. Meskipun demikian pada tahun 2024 terjadi pergeseran sumber utama PAD yaitu, retribusi daerah pada tahun 2020 sampai dengan 2023 berkisar antara 3,36 persen sampai dengan 4,74 persen atau sebesar 7,35 Miliar, namun di tahun 2024 retribusi daerah mengalami perubahan menjadi 70,26 persen atau sebesar 93,78 Miliar. Rata-rata distribusi pendapatan pajak daerah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berada pada tingkat 17,37 persen. Struktur pendapatan melalui hasil retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berada pada tingkat kurang dari 10 persen selama periode tersebut.



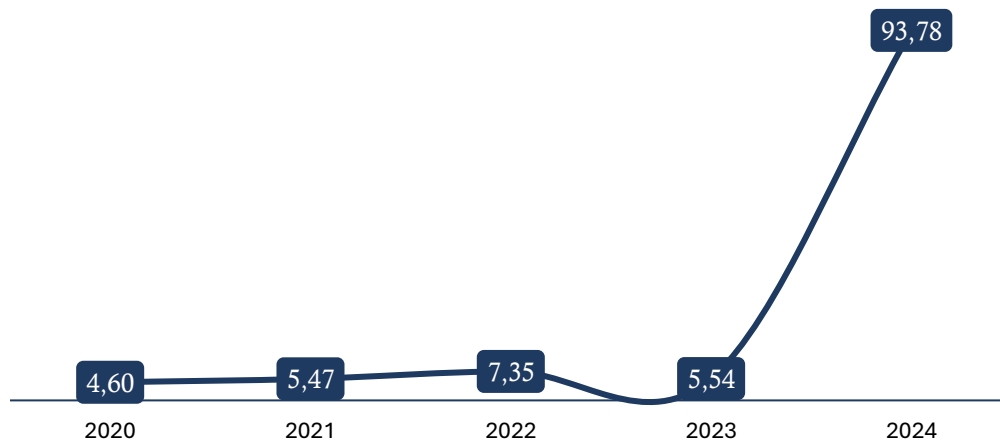
Gambar 2.52. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 (Rp Miliar)

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Utara

Gambar di atas menunjukkan realisasi pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah. Realisasi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 8,89 persen setiap tahun. Meskipun demikian pendapatan yang bersumber dari pajak daerah mengalami penurunan pada tahun 2021 dari sebelumnya 14,75% menjadi 13,33% pada tahun 2021 dan meningkat di tahun berikutnya menjadi 20,72% pada tahun 2024. Realisasi pajak daerah bergerak dari Rp 19,68 Miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 27,66 Miliar pada tahun 2024.

Selain pajak daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tapanuli Utara yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara bersumber dari retribusi daerah dengan tingkat rata-rata kontribusi

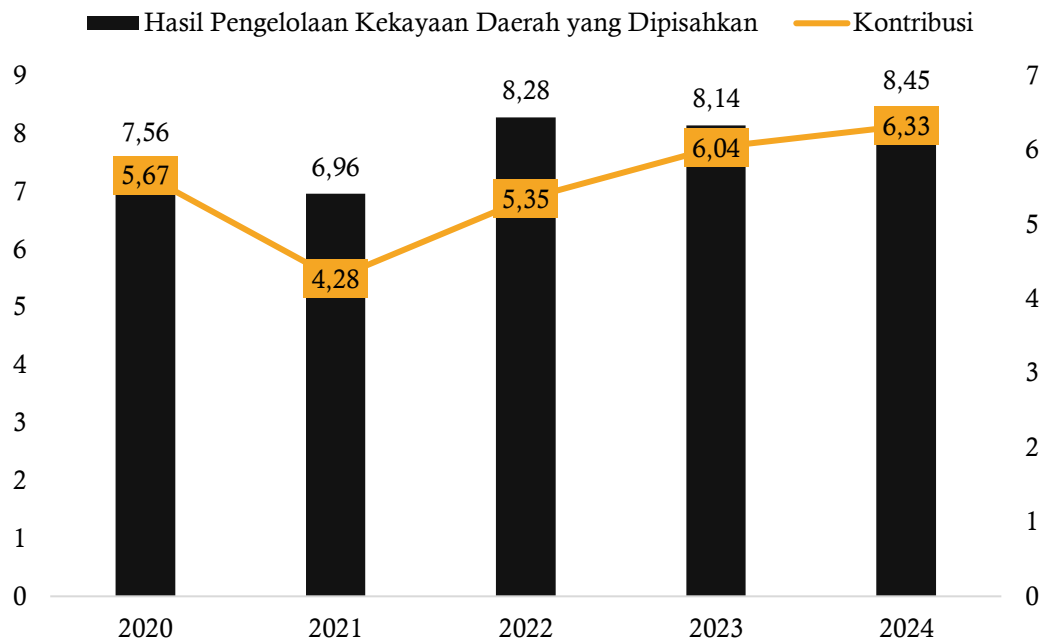
sebesar 112,47 persen dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Berikut ini adalah perkembangan realisasi retribusi daerah Kabupaten Tapanuli Utara selama kurun waktu tahun 2020-2024.



Gambar 2.53. Realisasi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024
Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Utara

Gambar di atas menunjukkan realisasi pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi daerah. Realisasi pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 8,89 persen setiap tahun. Pada tahun 2020 retribusi daerah memberikan kontribusi PAD senilai Rp 4,60 Miliar dan tumbuh menjadi Rp 5,54 Miliar pada tahun 2023 kemudian di tahun berikutnya terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi sebesar 93,78 Miliar. Secara umum berdasarkan kontribusi pada Pendapatan asli daerah terjadi lonjakan yang sangat signifikan dari sebelumnya pada tahun 2020 sampai dengan 2023 berkisar antara 3,36% sampai dengan 4,74% namun di tahun 2024 mencapai sebesar 70,26%. Hal ini disebabkan oleh pergeseran pencatatan penerimaan BLUD dari Lain-lain PAD yang Sah menjadi Retribusi Daerah. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan optimasi dan standarisasi pada perolehan retribusi daerah sehingga diharapkan setelah dilakukan standarisasi ini pemerintah dapat kembali mengembangkan potensi-potensi PAD dari sektor retribusi daerah sehingga menjadikan Kabupaten Tapanuli Utara yang lebih mandiri ke depannya.

Sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang akan dibahas selanjutnya berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah dengan rata-rata kontribusi sebesar 5,53 persen. Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah ini terhadap PAD berkisar antara 4,74 persen sampai dengan 6,33 persen. Berikut adalah realisasi PAD yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah selama periode 2020-2024.



Gambar 2.54. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Utara

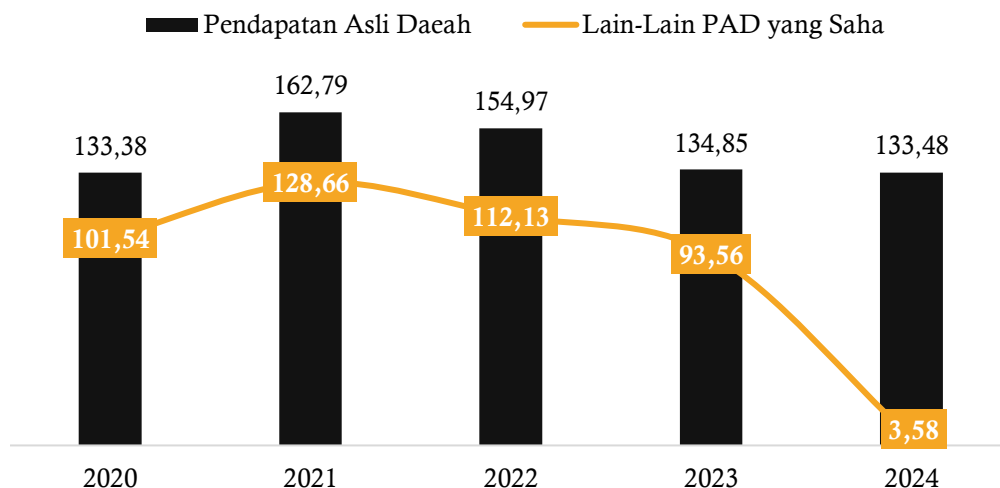
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu sumber PAD yang berasal dari bagian laba hasil penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Laba perusahaan bersifat terbatas dan sangat bergantung kepada kinerja perusahaan daerah. Pendapatan daerah ini tidak se-dinamis pajak dan retribusi daerah, sehingga sumber pendapatan daerah ini lebih sulit dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Selama lima tahun terakhir terdapat kecenderungan hasil pengelolaan kekayaan daerah memberikan kontribusi yang meningkat.

Pada tahun 2020 realisasi pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berada pada Rp 7,56 Miliar dengan kontribusi sebesar 5,67% dari pendapatan asli daerah. Kemudian di tahun berikutnya pada tahun 2021 terjadi penurunan realisasi mencapai sebesar 4,28 persen atau sebesar Rp 6,96 Miliar. Meskipun demikian secara realisasi, pendapatan ini meningkat sampai dengan Rp 6,33 persen dengan tingkat realisasi sebesar Rp 8,45 Miliar pada tahun 2024. Secara umum kontribusi pendapatan ini terhadap PAD relatif stabil namun cenderung meningkat dari sebelumnya Rp 7,56 Miliar pada tahun 2020 menjadi 8,45 Miliar pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,84 persen per tahun.

Namun secara kontribusi terhadap PAD berkisar dari 4,28 % sampai dengan 6,33% dengan rata-rata kontribusi sebesar 5,53 %. Meskipun demikian, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki potensi yang harus dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk menjadikan daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang lebih mandiri.

Sumber PAD terakhir yang secara umum memiliki peranan terbesar dalam

menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara yang ditunjukkan melalui struktur PAD adalah penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah. Namun demikian terjadi penurunan yang drastis dan sangat signifikan pada tahun terakhir. Rincian realisasi PAD dan Lain-lain PAD yang sah tersebut selama kurun waktu 2020-2024 dirangkum dalam gambar berikut.



Gambar 2.55. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 (Rp Miliar)

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Utara

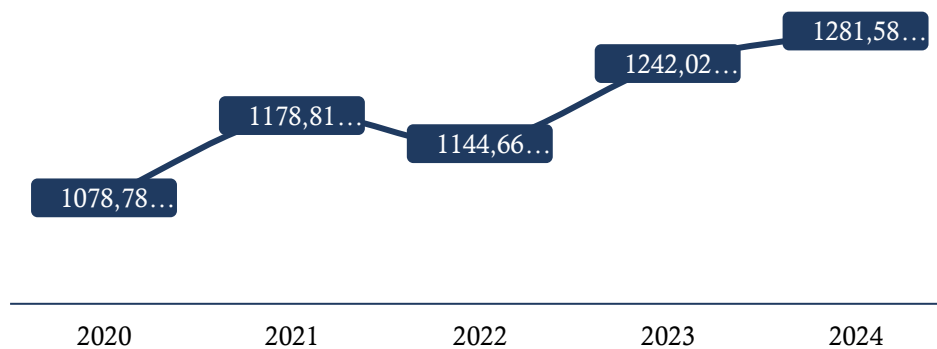
Pergerakan lain-lain pendapatan yang sah menunjukkan fluktuasi namun cenderung sedikit menurun dari kisaran 69,38% sampai dengan 79,03%, namun di tahun 2024 menjadi sebesar 2,68%. pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp 101,54 Miliar kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp 128,65 Miliar namun di tahun berikutnya sampai dengan tahun 2023 menurun mencapai Rp 93,56 Miliar dan di tahun terakhir pada tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan mencapai Rp 3,58 Miliar.

Penurunan ini disebabkan oleh pergeseran pencatatan penerimaan BLUD dari Lain-lain PAD yang Sah menjadi Retribusi Daerah. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan optimasi dan standarisasi pada perolehan lain-lain PAD yang sah retribusi daerah sehingga diharapkan setelah dilakukan standarisasi ini pemerintah dapat kembali mengembangkan potensi-potensi PAD dari sektor ini sehingga menjadikan Kabupaten Tapanuli Utara yang lebih mandiri ke depannya.

Pendapatan Transfer

Pembiayaan untuk pendapatan transfer berasal dari transfer antar daerah dan Pemerintah Pusat. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan (dana transfer umum dan khusus), dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Transfer antar daerah terdiri dari hasil dan bantuan keuangan. Gambar berikut menunjukkan perkembangan realisasi pendapatan transfer

Kabupaten Tapanuli Utara dari tahun 2020 hingga 2024.

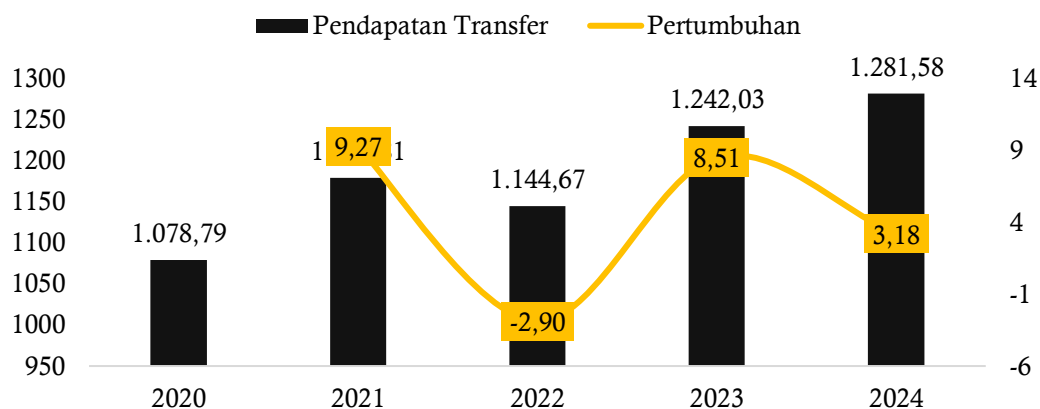


Gambar 2.56. Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 (Rp Miliar)
Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Utara

Gambar di atas menunjukkan bahwa secara umum pendapatan transfer terbesar bersumber dari transfer pemerintah pusat. Komponen utama dari transfer pemerintah pusat adalah Dana Perimbangan dan Dana Desa. Pendapatan transfer antar daerah juga secara umum mendukung pembentukan pendapatan transfer di Kabupaten Tapanuli Utara. Pendapatan transfer antar daerah paling utama berasal dari pendapatan dana alokasi umum. Pergerakan pendapatan transfer menunjukkan pertumbuhan yang positif dari sebelumnya Rp 1.078,79 Miliar pada tahun 2020, tumbuh menjadi Rp 1.281,58 Miliar atau tumbuh dengan laju 4,40% per tahun.

Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Daerah, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara berbentuk dana perimbangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terbagi atas dua komponen utama yang meliputi Dana Transfer Umum, dan Dana Transfer Khusus. Untuk Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Dari sisi pertumbuhan pendapatan transfer ditunjukkan dalam tabel berikut.

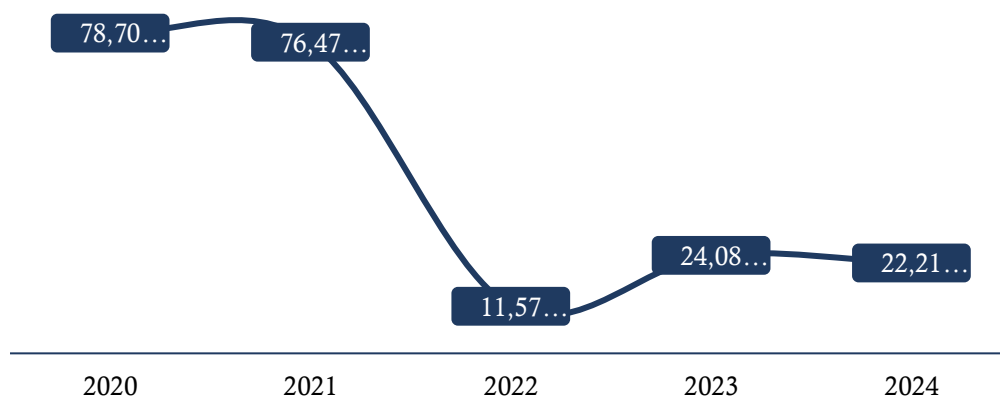


Gambar 2.57. Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Transfer Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024
Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Utara

Pada tahun 2020 pendapatan transfer mencapai sebesar Rp 1.078,79 Miliar kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp 1.178,81 Miliar dan mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi sebesar Rp 1.144,67 Miliar. Namun demikian di tahun berikutnya mengalami pergeseran peningkatan menjadi sebesar Rp 1.281,58 Miliar pada tahun 2024. Pendapatan transfer tahun 2022 mengalami penurunan hingga 2,90 persen dan meningkat sebesar 8,51 persen pada tahun 2023 dan di tahun terakhir pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 3,18 persen dari tahun sebelumnya.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai perundang-undangan. Perkembangan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020 - 2024 dijelaskan dalam tabel berikut.



Gambar 2.58. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 (Rp Miliar)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2022 tingkat pendapatan lain-lain menurun hingga Rp 11,57 Miliar dari sebelumnya Rp 78,70 Miliar pada tahun 2020. Namun demikian pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi sebesar Rp 24,08 Miliar dan kembali menurun di tahun terakhir pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp 22,21 miliar. Sumber penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan hibah dan pendapatan lain yang diatur dalam peraturan perundangan. Hibah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5.3. Analisis Belanja Daerah

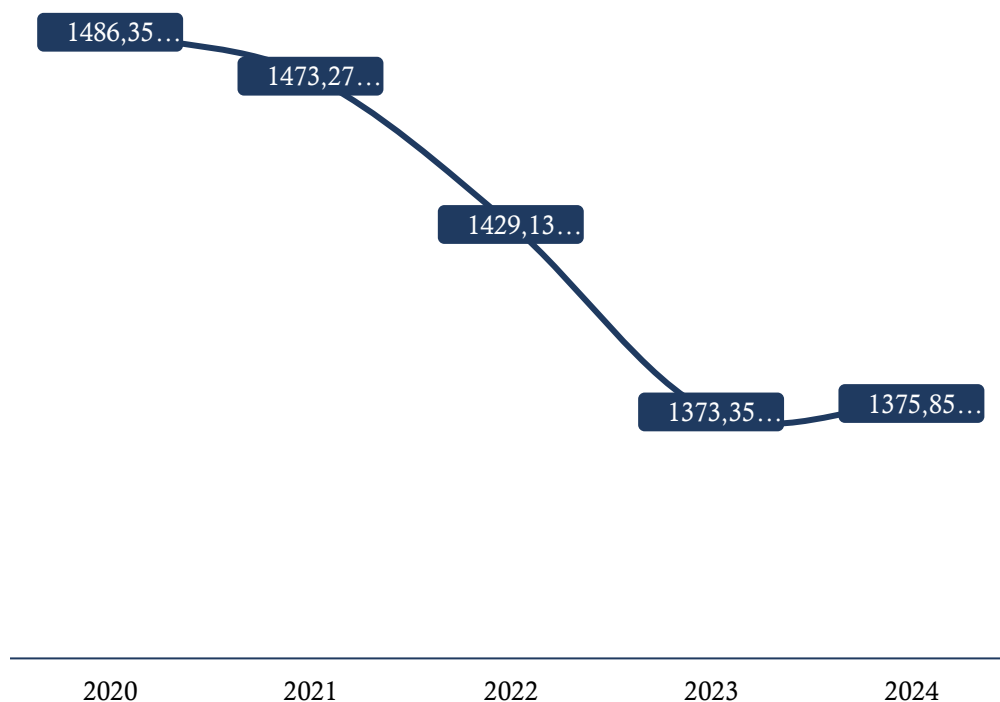
Belanja daerah merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan program-program pembangunan kabupaten yang telah direncanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara. Pengelolaan pelaksanaan belanja daerah menjadi keharusan untuk memastikan pengelolaan pemerintah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah mulai didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi serta efektivitas penggunaan anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisinya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 serta keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan belanja daerah di Kabupaten Tapanuli Utara.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 membagi komponen belanja daerah sebagai belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Sedangkan belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Selanjutnya belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Analisis belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan selama kurun waktu 2020-2024 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Proyeksi belanja daerah didasarkan kepada pelaksanaan realisasi belanja lima tahun sebelumnya. Berikut ini adalah perkembangan realisasi untuk belanja daerah Kabupaten Tapanuli Utara selama kurun waktu 2020-2024.



Gambar 2.59. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024
Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Utara

Realisasi belanja daerah di Kabupaten Tapanuli Utara mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2023 dan sedikit meningkat di tahun 2024. Pada tahun 2020, pengeluaran Kabupaten Tapanuli Utara berada pada tingkat Rp 1.486,35 Miliar yang digunakan untuk pendanaan program-program dan belanja pemerintah lainnya yang kemudian menurun sampai dengan tahun 2023 menjadi sebesar Rp 1.373,35 Miliar.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah mengalami normalisasi dan telah melakukan penghematan pada anggaran belanja. Meskipun demikian, terjadi peningkatan pada tahun terakhir pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp 1.375,85 Miliar peningkatan belanja ini termasuk kondisi khusus, dikarenakan pada tahun sebelumnya telah stabil mengalami penurunan.

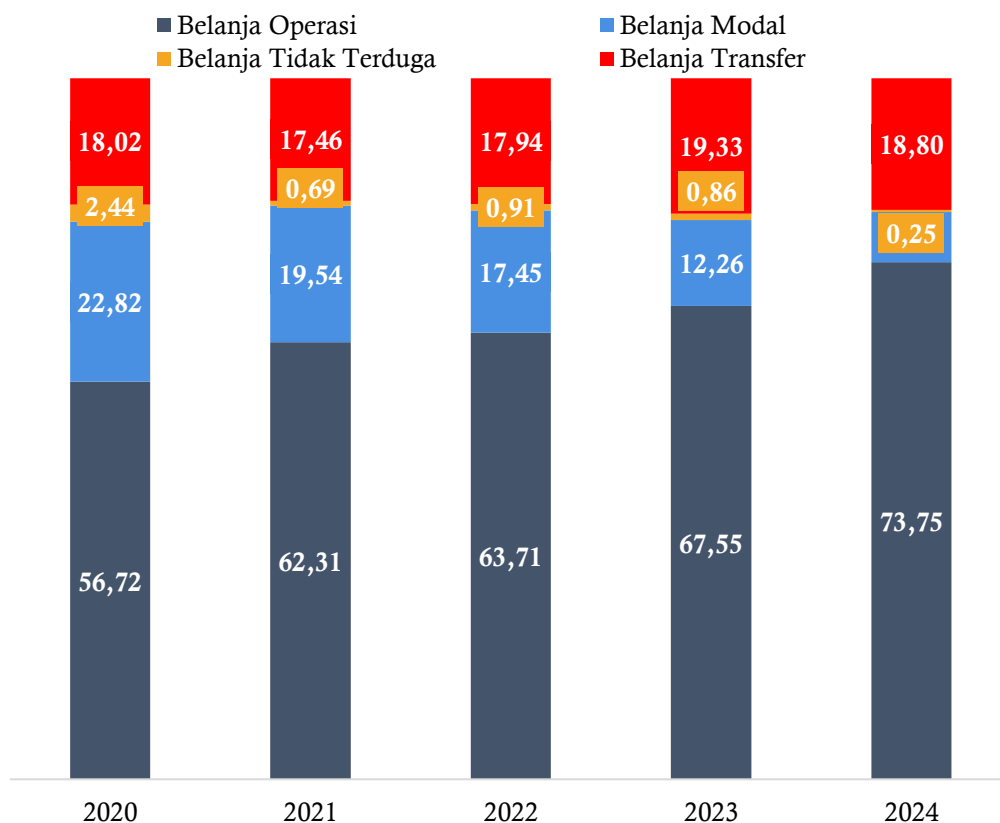
Dalam upaya memperoleh pergerakan realisasi belanja pemerintah yang lebih nyata disertai dengan indikasi pergerakan belanja yang lebih jelas, pengeluaran belanja pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga dievaluasi berdasarkan nilai realisasi belanja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.74. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024 (Rp)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata (%)
2	Belanja	1.486.351.970.646,22	1.473.274.599.069,95	1.429.139.214.177,15	1.373.350.393.253,00	1.375.858.189.855,41	-1,91
2.1	Belanja Operasi	843.090.065.102,86	918.034.972.259,75	910.494.986.690,52	927.720.435.846,00	1.014.674.115.403,47	4,74
2.1	Belanja Pegawai	491.483.123.408,00	521.578.901.088,90	511.725.220.276,00	550.561.006.379,00	621.410.779.418,00	6,04
2.1.1	Belanja Barang dan Jasa	341.115.892.680,86	326.238.489.421,85	371.597.822.512,89	351.696.826.695,00	318.291.641.973,47	-1,72
2.1.2	Belanja Bunga	604.339.500,00		4.387.554.738,63	3.096.653.900,00	2.207.835.420,00	38,25
2.1.3	Belanja Hibah	9.202.176.914,00	68.565.971.013,00	16.935.055.043,00	19.553.218.872,00	71.990.363.892,00	67,24
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	684.532.600,00	1.651.610.736,00	5.849.334.120,00	2.812.730.000,00	773.494.700,00	60,17
2.2	Belanja Modal	339.159.979.339,36	287.918.257.694,20	249.371.360.042,63	168.342.205.859,00	99.079.324.655,94	-26,48
2.2.1	Belanja Tanah	1.691.144.000,00	5.032.098.143,00	216.405.558,00		164.000.000,00	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	51.036.494.674,60	41.376.791.335,91	45.730.931.689,63	44.530.761.080,00	26.958.423.144,00	-14,75
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	57.823.060.309,86	102.883.849.131,30	35.287.481.926,18	31.062.611.625,00	14.949.241.861,74	-28,69
2.2.4	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	226.099.706.572,90	138.088.293.593,99	160.284.346.599,82	92.684.156.254,00	56.854.991.209,34	-29,19
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.509.573.782,00	537.225.490,00	7.852.194.269,00	64.676.900,00	111.469.430,00	-54,09
2.2.6	Belanja Aset Lainnya					41.199.010,86	
2.3	Belanja Tidak Terduga	36.198.159.704,00	10.126.560.516,00	12.942.417.200,00	11.814.457.310,00	3.454.947.220,00	-44,42
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	36.198.159.704,00	10.126.560.516,00	12.942.417.200,00	11.814.457.310,00	3.454.947.220,00	-44,42
2.4	Belanja Transfer	267.903.766.500,00	257.194.808.600,00	256.330.450.244,00	265.473.294.238,00	258.649.802.576,00	-0,87
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil			3.299.290.744,00			
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	267.903.766.500,00	257.194.808.600,00	253.031.159.500,00	265.473.294.238,00	258.649.802.576,00	-0,87

Realisasi belanja Kabupaten Tapanuli Utara secara umum menurun -1,91% per tahun. Struktur pertama dari belanja daerah adalah belanja operasi terhadap belanja daerah yang dimana cenderung terjadi peningkatan dari tahun 2020 sebesar 56,72 persen meningkat setiap tahunnya sampai dengan tahun 2024 sebesar 73,75 persen. Dengan rata-rata kontribusi belanja operasi berdasarkan belanja daerah sebesar 64,81 persen per tahunnya.

Komponen belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Secara umum perlu dievaluasi komposisi proporsi dari struktur belanja daerah sehingga dapat menjadi acuan dalam melihat aktivitas belanja terbesar di Kabupaten Tapanuli Utara. Proporsi jenis belanja daerah di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020-2024 dirangkum sebagai berikut.



Gambar 2.60. Struktur Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 (%)

Struktur belanja Kabupaten Tapanuli Utara selama periode analisis menunjukkan bahwa komponen utama belanja bersumber dari belanja operasi yang berada pada rentang 56,72% sampai dengan 73,75% dengan rata-rata proporsi sebesar 64,81%. Selanjutnya, komposisi struktur belanja digunakan untuk belanja modal dengan rentang antara 7,20% sampai dengan 22,82% yang memiliki rata-rata proporsi sebesar 15,85%. Rata-rata belanja transfer berada pada tingkat 18,31% dengan proporsi terkecil sebesar 17,46% dan terbesar 19,33%. Kabupaten Tapanuli Utara juga memiliki realisasi belanja tidak terduga yang berada pada rentang 0,25% sampai dengan 2,44% dengan rata-rata sebesar 1,03%.

Tabel 2.75. Keseluruhan Struktur Biaya Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 - 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
BELANJA DAERAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Belanja Operasi	56,72	62,31	63,71	67,55	73,75
Belanja Pegawai	33,07	35,40	35,81	40,09	45,17
Belanja Barang dan Jasa	22,95	22,14	26,00	25,61	23,13
Belanja Bunga	0,04	0,00	0,31	0,23	0,16
Belanja Hibah	0,62	4,65	1,18	1,42	5,23
Belanja Bantuan Sosial	0,05	0,11	0,41	0,20	0,06
Belanja Modal	22,82	19,54	17,45	12,26	7,20
Belanja Modal Tanah	0,11	0,34	0,02	0,00	0,01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,43	2,81	3,20	3,24	1,96
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,89	6,98	2,47	2,26	1,09
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	15,21	9,37	11,22	6,75	4,13
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,17	0,04	0,55	0,00	0,01
Belanja Tidak Terduga	2,44	0,69	0,91	0,86	0,25
Belanja Tidak Terduga	2,44	0,69	0,91	0,86	0,25
Belanja Transfer	18,02	17,46	17,94	19,33	18,80
Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	18,02	17,46	17,71	19,33	18,80

Dalam analisis secara menyeluruh terkait dengan struktur belanja Kabupaten Tapanuli Utara, terlihat bahwa komponen belanja yang paling utama adalah Belanja Operasi yaitu Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa. Sebagai catatan pada Tahun 2020 belanja pegawai cenderung mengalami peningkatan dimulai sebesar Rp 491,48 Miliar dengan kontribusi sebesar 58,30 persen kemudian meningkat pada tahun terakhir tahun 2024 menjadi sebesar Rp 621,41 Miliar atau sama dengan kontribusi sebesar 61,24 persen dengan rata-rata kontribusi selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 sebesar 58,38 persen. Kemudian komponen belanja barang dan jasa cenderung mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar Rp 341,12 Miliar dengan persentase kontribusi sebesar 40,46 persen. Kemudian menurun hingga pada tahun 2024 sebesar Rp 318,29 Miliar atau sama dengan persentase kontribusi 31,37 persen dengan rata-rata selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 sebesar 37,22 persen.

Struktur belanja daerah di Kabupaten Tapanuli Utara diarahkan untuk pemenuhan belanja aparatur, khususnya untuk kebutuhan gaji dan tunjangan PNS yang merupakan bagian dari belanja pegawai serta belanja barang dan jasa sebagai bagian dari Belanja Operasi. Di sisi lain, belanja modal yang memiliki multiplier effect dalam menggerakkan roda perekonomian daerah hanya memiliki proporsi rata-rata sebesar 15,85%.

Besarnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah menjadi indikasi positif terhadap upaya perbaikan kualitas struktur belanja daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penggunaan belanja modal secara umum dilakukan untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan. Secara umum struktur belanja di Kabupaten Tapanuli Utara sudah cukup seimbang dengan menjaga pengeluaran untuk belanja operasi pada tingkat 64,81% diimbangi dengan belanja modal yang seimbang mendekati 15,85% dan sisanya menjadi belanja transfer (18,31%) dan belanja tidak terduga (1,03%).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 55 mendefinisikan belanja operasi sebagai pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci dalam enam kategori meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Struktur belanja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana dinyatakan sebelumnya masih didominasi melalui belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Struktur belanja operasi Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2020 sampai dengan 2024 diisi oleh Belanja Pegawai dengan proporsi rata-rata 61,24% dari seluruh belanja operasi dan 31,37 % belanja barang dan jasa terhadap seluruh belanja operasi.

Proporsi ini juga merupakan belanja yang paling besar dari keseluruhan biaya dengan rata-rata 58,38% belanja pegawai dan 37,22% belanja barang dan jasa terhadap total belanja di Kabupaten Tapanuli utara. Tren pergerakan belanja pegawai tumbuh secara umum terlihat relatif stabil dengan pertumbuhan sebesar 6,04% per tahun sejak 2020 sampai dengan 2024. Dari sisi belanja barang dan jasa terdapat pertumbuhan yang lebih besar daripada belanja pegawai dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,24% selama periode evaluasi tersebut. Secara persentase pertumbuhan tercatat pertumbuhan belanja bantuan sosial tumbuh signifikan mencapai 60,17% per tahunnya. Secara keseluruhan belanja operasi tumbuh sebesar 4,74% per tahunnya.

Komponen belanja daerah Kabupaten Tapanuli Utara lainnya adalah belanja modal. Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Komponen belanja modal meliputi (1) belanja tanah, (2) belanja peralatan dan mesin, (3) belanja bangunan dan gedung, (4) belanja jalan, irigasi, dan jaringan, dan (5) belanja modal aset tetap lainnya.

Belanja Modal di Kabupaten Tapanuli Utara selama periode 2020 sampai dengan 2024 mengalami penurunan pertumbuhan setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -26,48%. Realisasi belanja modal dari tahun 2020 tercatat sebanyak Rp 339,16 Miliar menurun setiap tahunnya menjadi Rp 99,08 Miliar pada Tahun 2024.

Evaluasi dari sisi komponen belanja menunjukkan bahwa fokus penggunaan belanja modal berada pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang rata-rata belanja berada pada tingkat 58,27% setiap tahunnya. Belanja jalan irigasi dan jaringan merupakan sumber belanja utama di belanja modal namun tren telah melakukan penurunan dengan realisasi pada tahun 2020 sebesar Rp 226,10 Miliar kemudian menurun di tahun berikutnya menjadi Rp 138,09 Miliar namun kembali meningkat di tahun 2022 menjadi sebesar Rp 160,28 Miliar dan di tahun berikutnya hingga sampai dengan tahun terakhir kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi sebesar Rp 56,85 Miliar pada tahun 2024. Secara persentase, realisasi ini berkisar antara 47,96 persen sampai dengan 66,66 persen dengan rata-rata dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mencapai sebesar 58,27 persen.

Struktur Belanja Tidak Terduga cenderung mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Pada tahun 2020 belanja tidak terduga memiliki kontribusi sebesar 2,44 persen atau sama dengan 36,19 Miliar terhadap belanja daerah. Kemudian mengalami tren menurun hingga pada tahun terakhir pada tahun 2024 penurunan menjadi sebesar 0,25 persen atau sama dengan Rp 3,45 Miliar. Pada tahun 2020 sampai dengan 2024 terjadi penurunan pertumbuhan mencapai sebesar -44,42 persen per tahun.

Struktur belanja yang terakhir adalah Belanja Transfer. Belanja Transfer terdiri dari komponen belanja bagi hasil dan komponen belanja bantuan keuangan. Secara umum komponen belanja transfer adalah belanja bantuan keuangan. Selama periode 2020 sampai dengan 2024, tercatat hanya pada tahun 2022 terjadi belanja bagi hasil sebesar Rp 3,30 Miliar, sementara realisasi pada tahun-tahun lainnya tidak terjadi. Pergerakan belanja transfer terjadi akibat pergerakan belanja bantuan keuangan. Secara umum pergerakan belanja transfer relatif stabil dengan penurunan pertumbuhan -0,87% per tahun. Pada tahun 2020 belanja transfer di Kabupaten Tapanuli Utara mencapai Rp 267,09 Miliar dan cenderung mengalami penurunan perlahan menjadi Rp 258,65 Miliar pada tahun 2024.

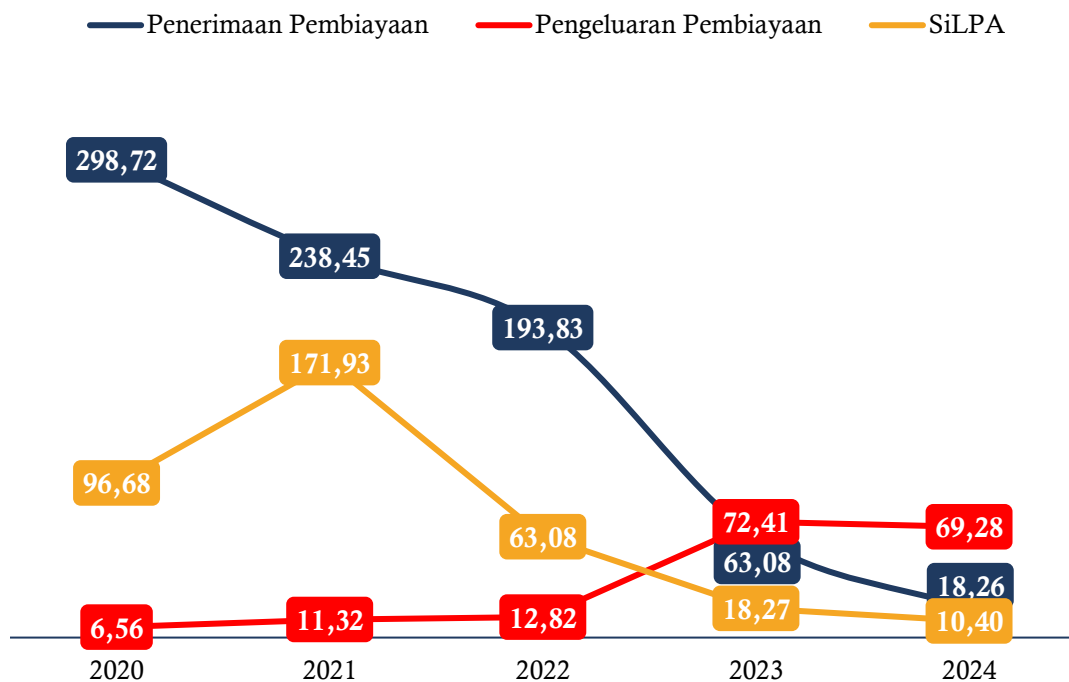
Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisis pembiayaan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mencukupi pembiayaan yang disebabkan oleh perbedaan pendapatan dan alokasi belanja. Pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Selisih Lebih Perhitungan (SiLPA) Anggaran Tahun Sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya.
2. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pembentukan Dana

Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya.

Dalam upaya mengevaluasi kinerja keuangan dari aspek pembiayaan, langkah awal yang dilakukan adalah mengevaluasi komponen penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020-2024 yang bersumber dari berbagai penerimaan pembiayaan serta pengeluaran atas pembiayaan. Evaluasi yang dilakukan membandingkan antara realisasi penerimaan pembiayaan Kabupaten Tapanuli Utara. Hasil kinerja penerimaan pembiayaan tersebut dirangkum sebagai berikut.



Gambar 2.61. Pergerakan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 (Rp Miliar)

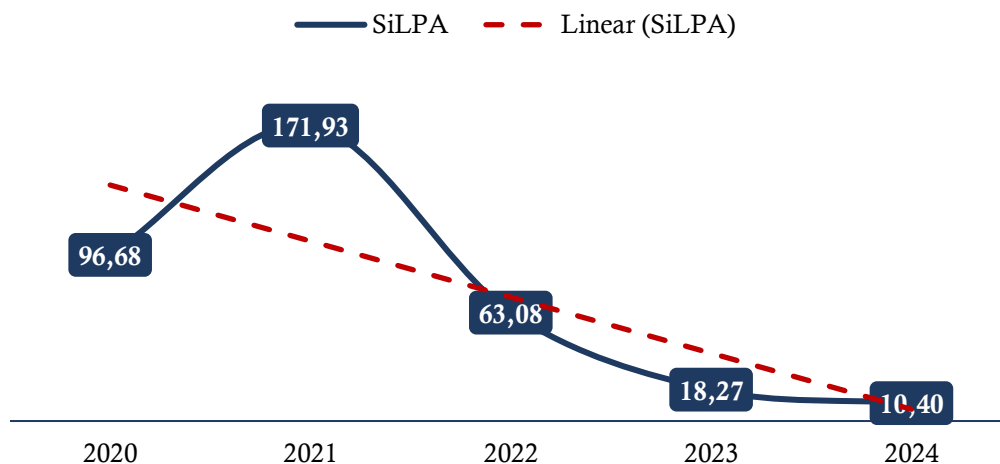
Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Utara

Penerimaan pembiayaan Kabupaten Tapanuli Utara bersumber dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya serta penerimaan pinjaman daerah. Realisasi penerimaan pembiayaan nilainya mencapai puncak tertinggi sampai dengan Rp 299,58 Miliar pada tahun 2020. Pada tahun 2023 dan 2024 realisasi penerimaan pembiayaan bersumber dari SiLPA yang mencapai Rp 63,08 Miliar dan Rp 18,26 miliar. Pengeluaran untuk pembiayaan dalam hal pembayaran pinjaman dan penyertaan modal daerah berada pada tingkat yang relatif kecil antara Rp 6,56 Miliar yang terjadi pada tahun 2020 dan tumbuh secara perlahan mencapai Rp 12,82 Miliar pada Tahun 2022.

Pada tahun 2023 Kabupaten Tapanuli Utara lebih agresif dalam pengelolaan pembiayaan daerah dengan realisasi pengeluaran mencapai Rp 72,41 Miliar yang meningkat signifikan dari periode 2020 - 2022. Selain itu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengambil penerimaan pinjaman daerah yang signifikan pada Tahun 2020 dan 2021 yang mengakibatkan penerimaan pembiayaan pada tahun tersebut

meningkat. Sayangnya kondisi ini mengakibatkan SiLPA yang semakin tinggi setiap tahunnya.

Pertumbuhan nilai realisasi SiLPA yang semakin besar mengindikasikan kurang cermatnya perhitungan perencanaan pendapatan dan belanja daerah. Diharapkan pada masa yang akan datang, SiLPA akan semakin rasional dan tidak terlalu besar dengan semakin membaiknya perencanaan pendapatan dan belanja daerah.



Gambar 2.62. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 (Rp Miliar)

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Utara

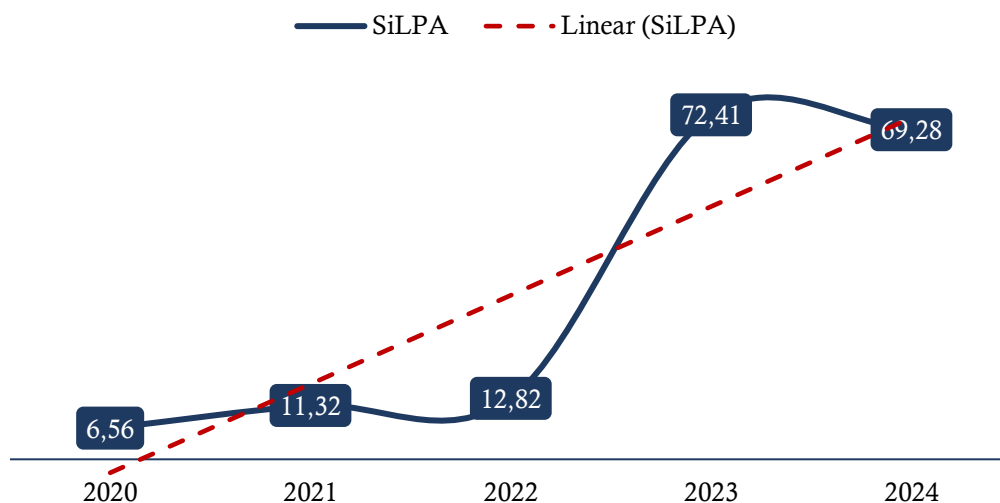
Garis pergerakan SiLPA Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan pertumbuhan yang positif sampai dengan tahun 2021. Pergerakan positif ini menunjukkan kecenderungan terjadinya peningkatan SiLPA dengan indikasi pengelolaan keuangan daerah yang kurang baik, dengan banyaknya sisa anggaran tidak dapat terserap untuk Pembangunan tahun berjalan. Peningkatan SiLPA terbesar terjadi pada tahun 2021 yang meningkat sampai dengan 75,50 persen dari SiLPA tahun 2020. Meskipun demikian, pada tahun 2022 tercatat SiLPA Kabupaten Tapanuli Utara berhasil turun hingga mencapai Rp 63,08 Miliar dari sebelumnya mencapai posisi Rp 171,93 Miliar. Dalam hal ini penyerapan anggaran dan belanja serta pembiayaan untuk mendukung belanja tersebut semakin optimal terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara. Kondisi ini diharapkan terus meningkat sehingga penganggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara dapat berjalan semakin efisien ke depannya.

Pada tahap kedua pengelolaan pembiayaan daerah, tercatat penurunan signifikan dari SiLPA Kabupaten Tapanuli Utara. Pada tahun 2022 terjadi penurunan hingga mencapai Rp 63,08 Miliar dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi Rp 10,40 Miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dengan sisa lebih pembiayaan anggaran menuju nol. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, realisasi terhadap pendapatan dan belanja daerah dapat fluktuatif karena kondisi yang dihadapi pada

saat penyelenggaraan pemerintahan. Akibatnya, Kabupaten Tapanuli juga memperoleh sisa lebih perhitungan anggaran yang digambarkan dalam defisit atau surplus SiLPA.

Defisit atau surplus tersebut dipenuhi dengan SiLPA tahun sebelumnya sehingga kebutuhan keuangan daerah terpenuhi. Penyelenggaraan APBD yang baik cenderung menyisakan SiLPA yang mendekati nol.

Faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam pembiayaan daerah adalah elemen pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran ini mengacu kepada pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembentukan dana cadangan; pemberian pinjaman daerah; dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Tapanuli Utara selama kurun waktu 2020-2024.



Gambar 2.63. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 (Rp Miliar)

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Utara

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki kecenderungan peningkatan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan daerah ataupun perbankan daerah serta pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo di setiap tahunnya. Oleh karena kebijakan penerimaan pinjaman daerah di tahun sebelumnya dilakukan untuk memenuhi pembiayaan tidak terduga yang terjadi di dalam pengelolaan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara, terdapat kecenderungan peningkatan pengeluaran pembiayaan ke depannya. Pada evaluasi yang dilakukan atas kinerja pengeluaran pembiayaan tahun 2020 sampai dengan 2024, terdapat peningkatan sebesar 80,28% per tahun, dengan pertumbuhan yang relatif stabil pada tahun 2020 sampai dengan 2022, namun terjadi peningkatan signifikan

pada tahun 2023. Pada tahun 2022 realisasi pengeluaran pembiayaan adalah Rp 12,82 Miliar yang kemudian tumbuh menjadi Rp 72,41 Miliar pada tahun 2023, lalu menurun pada tahun 2024 menjadi Rp 69,28 miliar.

Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Jika APBD mengalami defisit, ada pembiayaan yang dialokasikan untuk mengurangi defisit tersebut. Pembiayaan ini dapat berasal dari sisa perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pinjaman atau piutang. Evaluasi APBD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020-2024 dirangkum sebagai berikut.

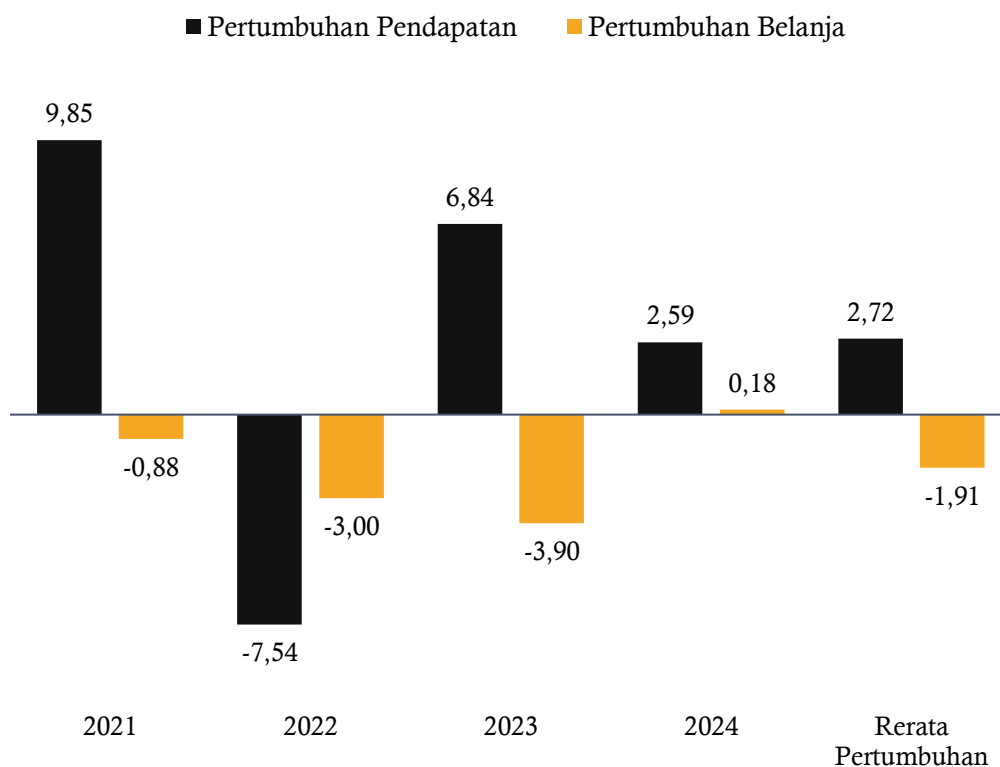
Tabel 2.76. Surplus (Defisit) Riil Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 (Rp Miliar)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan dan Belanja					
Realisasi Pendapatan Daerah	1.290,87	1.418,08	1.311,21	1.400,96	1.437,28
Realisasi Belanja Daerah	1.486,35	1.473,27	1.429,14	1.373,35	1.375,86
Surplus (Defisit) SiLPA	-195,48	-55,20	-117,93	27,61	61,42
Pembiayaan					
Pendapatan Pembiayaan	298,72	238,45	193,83	63,08	18,26
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6,56	11,32	12,82	72,41	69,28
Surplus (Defisit) SILPA	96,68	171,93	63,08	18,27	10,40

Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2020 defisit APBD sebesar Rp 195,48 Miliar. Dengan memperhitungkan pendapatan pembiayaan yang berasal dari SILPA tahun sebelumnya serta pengeluaran pembiayaan yang ada maka pada tahun 2020 Kabupaten Tapanuli Utara memperoleh surplus anggaran sebesar Rp 96,68 Miliar. Pada tahun 2021 realisasi APBD mencapai defisit Rp 55,20 Miliar namun dapat dipenuhi oleh pembiayaan daerah sehingga pada tahun 2021 Kabupaten Tapanuli Utara memiliki surplus riil sebesar Rp 171,93 Miliar. Pada tahun 2022 APBD defisit Rp 117,93 Miliar yang dipenuhi melalui pembiayaan daerah. Pada akhir periode pengelolaan keuangan daerah memiliki surplus sebesar Rp 63,08 Miliar. Tahun 2023 terjadi surplus realisasi pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp 27,61 Miliar. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan sehingga terjadi defisit pembiayaan daerah. Secara keseluruhan SILPA dari pengelolaan APBD mencapai surplus riil sebesar Rp 18,27 Miliar. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan surplus realisasi pendapatan dan

belanja daerah sebesar Rp 61,42 miliar, namun terjadi peningkatan pengeluaran pembiayaan daerah sehingga kembali terjadi defisit pembiayaan daerah. Secara keseluruhan SiLPA dari pengelolaan APBD mencapai surplus riil sebesar Rp 10,40 miliar.

Kabupaten Tapanuli Utara sejak tahun 2020 mengalami defisit pengeluaran penyelenggaraan pemerintah dan dipenuhi melalui pembiayaan daerah. Dalam praktiknya, Kabupaten Tapanuli Utara dapat melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih agresif dengan ketersediaan SILPA dan pendapatan pembiayaan yang memadai. Pada tahun 2024 terjadi surplus APBD di Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam hal ini perlu dievaluasi pergerakan pertumbuhan dari pendapatan dan belanja Kabupaten Tapanuli Utara. Hasil evaluasi tersebut dirangkum sebagai berikut.



Gambar 2.64. Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 (%)

Pertumbuhan pendapatan dan belanja di Kabupaten Tapanuli Utara selama periode 2020 sampai dengan tahun 2024 lebih cenderung fluktuatif, namun secara rata-rata selama lima tahun tumbuh pada tingkat yang sama. Pertumbuhan pendapatan dan belanja mencapai rata-rata 2,72% per tahunnya. Meskipun demikian, terjadi pergerakan yang cukup dinamis antara pendapatan dan belanja. Realisasi pertumbuhan belanja tersebut cenderung mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, lalu meningkat pada tahun 2024. Dari sisi pertumbuhan pendapatan daerah, Kabupaten Tapanuli Utara cenderung tumbuh secara perlahan, meskipun terjadi penurunan sampai dengan 7,54% pada tahun 2022. Secara umum pertumbuhan belanja juga selalu lebih rendah daripada pendapatan daerah. Kondisi

ini memberikan kecenderungan ke depannya pendapatan akan cenderung lebih tinggi daripada belanja dan mengakibatkan surplus APBD di Kabupaten Tapanuli Utara.

2.5.4. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Tapanuli Utara

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tecermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan sebagaimana sebelumnya telah dijabarkan sebelumnya. Pengelolaan Keuangan daerah yang dilaksanakan dengan baik akan mendorong keseimbangan antara pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus APBD yang pelaksanaannya yang diawali dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Dasar Pelaksanaan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan paradigma pengelolaan Otonomi Daerah tidak terpisahkan terhadap perubahan pengelolaan keuangan daerah. Perubahan ini menjadikan pengelolaan keuangan daerah dapat dijalankan secara tertib, transparan, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, efisien dan efektif. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD memiliki 6 fungsi:

1. Fungsi otorisasi yang berarti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan yang berarti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan yang berarti anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi yang berarti anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi yang berarti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. Fungsi stabilisasi yang berarti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Selanjutnya, pada bagian ini akan dijelaskan gambaran



kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait dengan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

2.5.5. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah yang merupakan kewajiban masyarakat, perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD. Dalam hal pencapaian pendapatan daerah sampai saat ini masih banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi terutama dalam peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun permasalahannya antara lain:

1. Regulasi yang berlaku saat ini sudah jauh tertinggal dibanding dengan peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Semisal beberapa peraturan daerah yang mengatur masalah tarif atau besarnya pajak/retribusi daerah terlalu kecil dibanding dengan keadaan perekonomian saat ini.
2. Tingkat kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih rendah untuk membayar kewajibannya yang mengakibatkan ada daya upaya dari wajib pajak daerah dan retribusi daerah untuk menghindari dari kewajibannya.
3. Belum tersusunnya dengan baik database obyek pajak daerah dan retribusi daerah untuk mengetahui potensi dan penggalian sumber-sumber PAD sebagai dasar penyusunan target Pendapatan Daerah.
4. Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung pemungutan PAD baik dari segi peralatan dan perlengkapan kantor dan mobil operasional kantor.
5. Masih minimnya kapasitas SDM dan jumlah petugas di lapangan untuk melaksanakan pemungutan PAD.
6. Belum optimalnya kinerja BUMD.

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2020-2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Selama periode tahun anggaran 2020-2024, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah; dan (3) peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain:

1. Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
2. Melaksanakan revisi peraturan daerah dan peraturan bupati yang berkaitan



dengan pendapatan daerah;

3. Melaksanakan pendataan dan penggalian potensi-potensi PAD sebagai dasar penetapan dan peningkatan target pendapatan daerah;
4. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Petugas Pemungut PAD melalui Bimtek peningkatan kapasitas aparatur serta studi tiru ke daerah yang pengelolaan PAD nya sudah maju;
5. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pada obyek pajak daerah dan retribusi daerah dengan melaksanakan uji petik ke lokasi usaha wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMD;
7. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
8. Mengikat kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum dalam hal mediasi dan penagihan tunggakan/ piutang pajak dan retribusi daerah;
9. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pembayaran kewajiban perpajakan daerah;
10. Meningkatkan pelayanan sistem pembayaran pajak daerah secara online untuk PBB dan BPHTB;
11. Melakukan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan DPR RI.

2.5.6. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan sebagai upaya untuk menjalankan pemerintahan dan mewujudkan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara. Pengeluaran daerah yang dialokasikan sebagai belanja daerah perlu dilakukan secara efektif, efisien, adil dan merata sehingga dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam penyediaan pelayanan umum. Oleh karena itu, belanja daerah difokuskan pada upaya peningkatan pelayanan dasar seperti pelayanan kependudukan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan sarana (infrastruktur), termasuk infrastruktur lingkungan pasar-pasar tradisional dan fasilitas sosial/fasilitas umum lainnya guna mempercepat proses pembangunan kabupaten.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan belanja yang dilakukan sebagai komitmen pembangunan dituntut menjadi lebih transparan, efisien, efektif dan akuntabel serta berorientasi money follow program dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas

utama pembangunan serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan efisiensi belanja sesuai dengan skala prioritas.

Adapun kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2020-2024 dilakukan melalui pengaturan pembelanjaan sebagai berikut:

1. Percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di kawasan strategis
2. Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
3. 3. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi daerah melalui kebijakan ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan;
4. Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan.
5. Anggaran belanja akan diarahkan sektor pemberdayaan KUKM, perdagangan dan perindustrian yang menopang laju pertumbuhan ekonomi dengan didukung pembangunan infrastruktur;
6. Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD;
7. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
 - c. mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - d. mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya; dan
 - e. mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2.5.7. Kebijakan Pembangunan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara selama periode 2020-2024 adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektivitas dan profitabilitas sumber-sumber pembiayaan. Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan kas daerah dalam bentuk penyertaan modal atau pemberian pinjaman daerah yang dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan penerimaan piutang daerah untuk menutupi defisit penyelenggaraan pemerintahan.

2.5.8. Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Dengan memerhatikan realisasi kinerja APBD Kabupaten Tapanuli Utara terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah terlihat bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terhadap pendapatan transfer ke depan masih cukup tinggi dengan rata-rata sumber pendapatan daerah melalui pendapatan transfer sebesar 86,36 persen dengan realisasi struktur pada tahun 2023 mencapai 89,17 persen. Tingginya ketergantungan ini disebabkan oleh adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan gaji Pegawai Negeri Sipil dan kebijakan pembangunan di Daerah.

Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah sumber utama penerimaannya berasal dari bagi hasil pajak provinsi dan penerimaan lainnya berdasarkan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Utara. Selain itu kemampuan Kabupaten Tapanuli Utara untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dirasakan masih belum optimal selama lima tahun terakhir.

Pada perencanaan tahun-tahun berikutnya khususnya dalam perencanaan sampai dengan tahun 2026, diperlukan upaya dari pemerintah untuk meningkatnya fungsi Kabupaten Tapanuli Utara sehingga dapat berpengaruh pada peningkatan belanja, baik belanja operasi maupun belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Jumlah belanja daerah ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli. Pemerintah perlu memprioritaskan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sekaligus memacu pertumbuhan dan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara.

Penggunaan belanja operasi tersebut tecermin dalam APBD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang diarahkan kepada prioritas untuk membiayai berbagai urusan Pemerintah Daerah baik urusan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang untuk menstimulus kegiatan ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Fokus belanja daerah sampai dengan tahun 2026 perlu diarahkan kepada program kebutuhan infrastruktur dasar, sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sekaligus memerhatikan pertumbuhan daerah.

Mengikuti perubahan klasifikasi belanja sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai kelanjutan terhadap pengelolaan keuangan tahun 2020-2024 akan selalu melakukan penyesuaian dan mengacu kepada ketentuan tersebut, dimana belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja barang jasa, belanja transfer dan belanja hibah.

Adapun arah pengelolaan belanja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terletak difokuskan untuk mengefisienkan belanja operasi. Kondisi ini memerhatikan peningkatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial untuk beberapa tahun ke depan. Untuk menekan pertumbuhan belanja pegawai tersebut perlu dilakukan melalui rasionalisasi jumlah pegawai dan efisiensi organisasi yang disesuaikan dengan kebijakan formasi dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Diharapkan jumlah pegawai yang diterima tiap tahunnya akan lebih kecil dari jumlah pegawai yang pensiun. Sedangkan operasi lainnya akan diupayakan pemanfaatannya dalam menstimulus aktivitas masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya dan dalam pengalokasiannya disesuaikan dengan kondisi yang ada dan diupayakan seefisien mungkin disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Belanja modal mulai diarahkan untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih serta berbagai urusan Pemerintah Daerah. Dalam implementasinya akan selalu diupayakan efisiensi dan efektivitas anggaran dalam kerangka melaksanakan pemerintahan yang baik dan amanah. Untuk itu belanja barang dan jasa mulai tahun anggaran 2023 diperkirakan akan semakin meningkat.

Peningkatan pendapatan daerah diarahkan untuk dapat mendukung peningkatan belanja operasi dan belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer untuk mendukung pembangunan daerah serta target pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan menekan peningkatan belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, belanja modal diperkirakan dapat meningkat sejak sesuai dengan kebutuhan daerah. Peningkatan ini disebabkan adanya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang perlu disediakan bagi masyarakat.

2.5.9. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data realisasi pendapatan daerah sebelumnya dan mengaitkan dengan data indikator makro sebagai informasi yang dapat memengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah. Adapun asumsi-asumsi yang digunakan untuk memproyeksi pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun, antara lain:

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu.

Laju pertumbuhan pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara selama periode 2020 sampai dengan periode 2024 secara rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 2,72 persen setiap tahunnya. Pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020 berada pada tingkat Rp 1.290,87 Miliar dan tumbuh menjadi Rp 1.437,28 Miliar pada tahun 2024. Peningkatan PAD ini didukung dengan pengoptimalan pendapatan melalui pajak dan retribusi daerah. Retribusi daerah berkontribusi besar bagi PAD, di mana hal ini disebabkan oleh pergeseran BLUD dari Lain-Lain PAD yang Sah ke Retribusi Daerah. Pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Utara bersumber dari Pendapatan Transfer yang tumbuh secara rata-rata 4,40%. Kondisi ini menjadi sebuah tantangan dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah di Kabupaten Tapanuli Utara dimana saat ini pertumbuhan pendapatan bersumber utama dari Pendapatan Transfer.

2. Asumsi indikator makro ekonomi, seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi serta penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tapanuli Utara

Kabupaten Tapanuli Utara selama lima tahun terakhir mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 3,75% per tahun dengan rentang pertumbuhan ekonomi antara 1,50% pada tahun 2020 sampai dengan 4,75% yang terjadi pada tahun 2023. Tren pertumbuhan ini mendukung optimisasi perekonomian di Kabupaten Tapanuli Utara. Kondisi ini akan mendukung peningkatan PAD dalam bentuk pajak dan retribusi atas berbagai aktivitas dan pelayanan yang diberikan Kabupaten Tapanuli Utara. Kondisi inflasi yang relatif terkendali dengan target inflasi yang kecil membuat daya tarik pertumbuhan ekonomi semakin memungkinkan peningkatan pendapatan daerah nantinya. Selain itu penyerapan tenaga kerja dengan tren penurunan pada tingkat pengangguran terbuka memberikan potensi peningkatan aktivitas perekonomian yang turut akan memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi.

Laju inflasi di Kabupaten Tapanuli Utara mengacu kepada data inflasi di Kabupaten Padang Sidempuan. Selama periode 2020 sampai dengan 2024 laju inflasi relatif terkendali antara 3,27% sampai dengan 2,46%. Namun, perlu diperhatikan bahwa secara umum terjadi inflasi tinggi yang mencapai 6,40% pada tahun 2022. Pada tahun 2023 Kabupaten Tapanuli Utara memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) 83,68% yang mengindikasikan penyerapan tenaga kerja yang baik serta memberikan potensi pertumbuhan pendapatan khususnya dari pendapatan asli daerah yang semakin tinggi.



3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah

Kabupaten Tapanuli Utara berupaya untuk melakukan ekstensifikasi pendapatan daerah melalui peningkatan jumlah wajib pajak dan sumber-sumber penerimaan pajak serta retribusi daerah. Salah satu kebijakan yang diambil adalah dengan mengoptimalkan memberikan kemudahan pelayanan pajak kepada masyarakat. Ekstensifikasi juga dioptimalkan dengan melakukan pendataan serta pengoptimalan pendataan wajib pajak yang selama ini belum terdata di Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam hal intensifikasi pendapatan daerah, Kabupaten Tapanuli Utara berupaya mengkaji kembali potensi retribusi dan pajak daerah sehingga dapat memperoleh gambaran nilai optimal fungsi-fungsi penerimaan pendapatan retribusi daerah.

4. Kebijakan di bidang keuangan negara dan daerah.

Pertimbangan ini didasarkan pada kebijakan keuangan pendapatan transfer baik dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran berdasarkan kebijakan keuangan negara maupun daerah.

5. Peralihan status Badan Layanan Umum Daerah menjadi layanan berbasis retribusi daerah dengan pertimbangan pengelolaan keuangan badan yang lebih optimal serta lebih fleksibel dalam kerangka APBD. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berupaya menyederhanakan jenis pendapatan asli daerah serta memperkuat akuntabilitas fiskal melalui retribusi daerah yang langsung menuju kas daerah.

Berikut ini adalah proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk tahun anggaran 2026-2030 seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.77. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2026-2030 (Rp)

No	Uraian	Baseline	Proyeksi 2026-2030				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
4	PENDAPATAN	1.493.599.771.268	1.389.008.553.881	1.403.371.304.206	1.418.278.379.184	1.433.699.340.040	1.450.069.120.324
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	141.556.738.834	150.030.100.000	156.403.900.000	163.192.377.000	170.359.958.839	178.336.195.762
4.1.1	Pajak Daerah	30.050.000.000	39.778.800.000	41.317.740.000	43.048.627.000	44.776.058.350	46.704.861.268
4.1.2	Retribusi Daerah	86.317.290.000	95.951.300.000	102.086.160.000	107.343.750.000	112.883.900.489	118.831.334.494
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.211.867.299	9.600.000.000	9.800.000.000	10.000.000.000	10.200.000.000	10.700.000.000
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.977.581.535	4.700.000.000	3.200.000.000	2.800.000.000	2.500.000.000	2.100.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.324.579.290.597	1.210.680.141.185	1.217.942.898.719	1.225.302.437.883	1.232.762.265.975	1.240.326.059.003
4.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.235.542.689.000	1.183.805.545.000	1.189.724.572.725	1.195.673.195.589	1.201.651.561.567	1.207.659.819.374
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.028.851.584.000	975.900.541.000	980.780.043.705	985.683.943.924	990.612.363.643	995.565.425.461
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	741.671.812.000	746.014.925.000	749.744.999.625	753.493.724.623	757.261.193.246	761.047.499.212
4.2.1.1.2	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	64.448.095.000	70.313.675.000	70.665.243.375	71.018.569.592	71.373.662.440	71.730.530.752
4.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	677.223.717.000	675.701.250.000	679.079.756.250	682.475.155.031	685.887.530.806	689.316.968.460
4.2.1.2	Dana Transfer Khusus	287.179.772.000	229.885.616.000	231.035.044.080	232.190.219.300	233.351.170.397	234.517.926.249
4.2.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	96.683.043.000	4.805.395.000	4.829.421.975	4.853.569.085	4.877.836.930	4.902.226.115
4.2.1.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	190.496.729.000	225.080.221.000	226.205.622.105	227.336.650.216	228.473.333.467	229.615.700.134
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah / Insentif Fiskal	6.867.270.000	14.881.571.000	14.955.978.855	15.030.758.749	15.105.912.543	15.181.442.106
4.2.1.5	Dana Desa	199.823.835.000	193.023.433.000	193.988.550.165	194.958.492.916	195.933.285.380	196.912.951.807
4.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	89.036.601.597	26.874.596.185	28.218.325.994	29.629.242.294	31.110.704.409	32.666.239.629
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	87.036.601.597	26.874.596.185	28.218.325.994	29.629.242.294	31.110.704.409	32.666.239.629



4.2.2.2	Bantuan Keuangan	2.000.000.000	-	-	-	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.463.741.837	28.298.312.696	29.024.505.486	29.783.564.302	30.577.115.225	31.406.865.559
4.3.1	Pendapatan Hibah (Bonus Produksi)	13.463.233.459	12.100.000.000	12.705.000.000	13.340.250.000	14.007.262.500	14.707.625.625
4.3.2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP / Non Kapitasi	14.000.508.378	16.198.312.696	16.319.505.486	16.443.314.302	16.569.852.725	16.699.239.934



Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara bersumber dari tiga struktur pendapatan utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah. Kabupaten Tapanuli Utara dalam proyeksi ini memiliki PAD yang bersumber dari empat komponen, yaitu Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Perhitungan proyeksi pendapatan daerah dilakukan berdasarkan baseline capaian realisasi pada tahun 2024 dengan mempertimbangkan rata-rata pertumbuhan masing-masing struktur pendapatan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara serta perkembangan terkini perekonomian dan kondisi makro Kabupaten Tapanuli Utara.

Pendapatan Asli Daerah sebagai *baseline* pencapaian pada realisasi pendapatan daerah Tahun 2024 mencapai Rp 141.556.738.834 dengan rerata pertumbuhan selama periode 2020-2024 mencapai 0,02%. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui proyeksi atas komponen-komponen penyusunnya, meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan menggunakan baseline realisasi tahun 2024 serta rerata pertumbuhan masing-masing selama lima tahun pengelolaan APBD Kabupaten Tapanuli Utara. Secara umum komponen-komponen PAD diproyeksikan mengalami peningkatan sebagai optimisasi pengelolaan PAD di Kabupaten Tapanuli Utara, kecuali Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang diproyeksikan mengalami penurunan ke depannya.

Proyeksi PAD menunjukkan akan terjadi peningkatan PAD dari sebelumnya Rp 141.556.738.834 pada Tahun 2024 menjadi Rp 178.336.195.762 sampai dengan tahun 2030. Pada tahun 2026 diproyeksikan terjadi peningkatan PAD yang bersumber utamanya dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Proyeksi pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah diproyeksikan stagnan dan mengalami penurunan pada tahun 2026 dan 2030 dengan adanya penyesuaian kekayaan daerah yang dipisahkan yang utamanya digunakan untuk pengembangan BUMD serta penyertaan modal kekayaan daerah. Hasilnya perlahan akan mendorong potensi pendapatan asli daerah ke depannya.

Dari sisi Pendapatan Transfer, Kabupaten Tapanuli Utara berupaya untuk menurunkan ketergantungannya dari pemerintah pusat ataupun melalui transfer daerah. Pendapatan transfer pada awalnya diproyeksikan mengalami peningkatan pada tahun 2026 untuk mendukung pemerataan pembangunan dan akan digunakan oleh Kabupaten Tapanuli Utara untuk merintis sumber-sumber PAD baru yang akan berpotensi efektif ke depannya. Secara perlahan, kontribusi Pendapatan Transfer dari pusat maupun daerah lain mengalami penurunan di Kabupaten Tapanuli Utara serta meningkat secara perlahan demi mendorong kemandirian daerah.

Komponen penyusun PAD lainnya mengacu kepada lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan ini diproyeksikan semakin menurun, termasuk potensi dana hibah yang masuk serta pendapatan lain-lain. Hal ini menjadi komitmen Kabupaten Tapanuli Utara untuk bangkit menuju kemandirian daerah dan Pembangunan daerah. Lain-lain pendapatan yang sah mengandung unsur ketidakpastian yang tinggi dimana intervensi daerah dalam memperoleh pendapatan tersebut relatif rendah. Kabupaten Tapanuli Utara berupaya untuk menurunkan ketergantungan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan hibah tersebut.

Proyeksi pendapatan daerah juga mempertimbangkan upaya Kabupaten Tapanuli Utara untuk meningkatkan kemandirian daerah. Ditinjau dari Struktur PAD terhadap Pendapatan Daerah keseluruhan, pada *baseline* tahun 2024 kontribusi PAD Kabupaten Tapanuli Utara berada pada tingkat 9,29%. Proyeksi pendapatan daerah berupaya untuk meningkatkan kemandirian daerah dengan meningkatkan kontribusi PAD terhadap seluruh pendapatan daerah. Pada tahun 2030 Kabupaten Tapanuli Utara berupaya untuk meningkatkan kontribusi PAD sampai dengan 15,00%.

Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer bersumber dari dua struktur utama, yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Selama periode 2020 sampai dengan 2024, pendapatan transfer menjadi bagian utama dari pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Proporsi struktur pendapatan dari pendapatan transfer secara rata-rata mencapai 86,36 persen pada periode tersebut dengan nilai proporsi struktur maksimal mencapai 89,17% pada tahun 2024. Permasalahan pada pendapatan transfer menunjukkan kurangnya kemandirian daerah dalam membiayai belanja daerahnya. Meskipun demikian, terdapat pula kecenderungan bahwa proporsi pendapatan transfer cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini memberikan adanya ketergantungan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah di Kabupaten Tapanuli Utara, pemerintah mempercepat pembangunan sekaligus pemberian peningkatan pelayanan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Meskipun demikian, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dan potensi pendapatan daerah di masa yang akan datang, Kabupaten Tapanuli Utara masih mempergunakan pendapatan yang bersumber dari transfer daerah, khususnya dana dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan daerah. Dalam perencanaannya pendapatan transfer diproyeksikan akan menurun pada tahun 2026 hingga tahun 2030 dalam upaya mendorong kemandirian daerah. Dana perimbangan dari pemerintah pusat diperkirakan akan meningkat, namun proporsinya akan semakin menurun seiring dengan peningkatan kemandirian daerah. Dana Perimbangan diproyeksikan meningkat dari sebesar Rp 1.027.536.609.223 pada tahun 2026 menjadi sebesar Rp 1.043.968.453.434 pada tahun 2030.



Pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pendapatan lain-lain yang sah bersumber dari pendapatan hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Struktur pendapatan ini diproyeksikan semakin menurun, terutama yang bersumber dari pendapatan hibah. Pada Tahun 2024 sebagai baseline, Lain-lain Pendapatan yang Sah mencapai Rp 28.883.688.823 dan diproyeksikan mengalami penurunan sampai dengan Rp 16.886.135.699.

Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam upaya mendorong pendapatan daerah, perlu dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari seluruh sumber pendapatan yang ada. Saat ini sumber pendapatan dari yang bersumber langsung dari daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong kecil sehingga kategori kemandirian daerah masih termasuk dalam kategori belum mandiri. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan penerimaan daerah lainnya yang sah.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pendapatan asli daerah (PAD) selama periode 2023-2026 mendatang meliputi:

1. Peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan layanan setelah penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dan peningkatan pengendalian dan pengawasan PAD.
2. peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah melalui sosialisasi undang-undang pajak dan retribusi daerah kepada publik.
3. Peningkatan pendapatan daerah melalui peningkatan dan ekspansi sumber pendapatan sambil mempertahankan prinsip akuntabilitas dan transparansi sambil mempertimbangkan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah, dan kemampuan masyarakat.
4. Peninjauan ulang beberapa ketentuan perda tentang pajak dan retribusi daerah, tarif dapat ditingkatkan atau disesuaikan, dan subjek dan obyek pajak yang dapat diperluas dan dioptimalkan.
5. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk meningkatkan pendapatan melalui kerja sama dengan pihak ketiga dan pengawasan organisasi dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
6. Pemberian insentif, bonus, dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target; sebaliknya, SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara efektif dalam satu tahun anggaran akan dikenakan sanksi.
7. penerapan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya, serta penghargaan kepada wajib pajak dan retribusi



yang telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan.

8. peningkatan kerja sama sinergis dengan pemerintah pusat, provinsi, dan SKPD yang menghasilkan di bidang pendapatan daerah.
9. Pengoptimalan BUMD melalui revitalisasi dan reorganisasi untuk meningkatkan kontribusi pendapatan daerah.
10. Pengoptimalan fungsi PDAM dan penyertaan modal untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air bersih kepada masyarakat
11. Pengoptimalan fungsi layanan pemerintah dan meningkatkan penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Selain itu, dalam upaya peningkatan kapasitas keuangan fiskal daerah, Kabupaten Tapanuli Utara mengambil arah kebijakan pengelolaan pendapatan transfer sembari mengoptimalkan dana transfer untuk pembangunan daerah di Tapanuli Utara sebagai berikut:

1. Pengoptimalan penerimaan pajak pusat yang dapat di sharing dengan daerah guna meningkatkan bagian dari bagi hasil pajak.
2. Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah.
4. Peningkatan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN dan APBD Provinsi.
5. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan pendapatan transfer.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa daerah juga dapat memperoleh pendapatan lain-lain yang sah meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai perundang-undangan. Selain itu untuk mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah dari sumber tersebut, kebijakan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah diminta untuk berkolaborasi lebih baik dengan Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari dana hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai perundang-undangan.

2.5.10. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berfokus pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, sesuai dengan prinsip penganggaran dan mengarah kepada *money follow* program. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memastikan penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan berjalan dengan baik dan efisien. Dalam memproyeksikan belanja daerah, penting untuk mempertimbangkan asumsi indikator makro ekonomi, tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat, dan prioritas utama kebijakan belanja dan pembiayaan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Belanja daerah Kabupaten Tapanuli Utara juga mempertimbangkan kondisi ekonomi seperti inflasi daerah dan kenaikan gaji serta prioritas pembangunan daerah dalam menyusun



proyeksi belanja daerah. Analisis proyeksi belanja daerah Kabupaten Tapanuli Utara disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 2.78. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2026-2030(Rp)

No	Uraian	Baseline	Proyeksi 2026-2030				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
5	BELANJA	1.442.561.794.484	1.313.851.386.672	1.339.666.409.847	1.359.105.351.923	1.430.699.340.040	1.447.069.120.324
5.1	BELANJA OPERASI	1.062.938.481.200	986.023.140.149	1.007.013.770.110	1.021.941.589.256	1.088.866.446.882	1.100.369.931.822
5.1.01	Belanja Pegawai	669.005.440.000	666.160.982.094	682.815.006.646	690.059.507.326	697.213.659.923	701.021.665.090
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.934.829.606	308.757.595.670	313.603.314.347	321.234.180.094	380.952.432.405	388.595.459.460
5.1.03	Belanja Bunga	3.096.653.900	1.305.522.106	0	0	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	72.093.912.994	8.788.809.080	9.070.115.605	9.115.017.167	9.159.918.730	9.204.820.292
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	807.644.700	1.010.231.200	1.525.333.512	1.532.884.668	1.540.435.824	1.547.986.980
5.1.7	Belanja Subsidi						
5.2	BELANJA MODAL	102.975.845.013	50.899.237.723	53.444.199.609	56.116.409.590	58.922.230.069	61.868.341.573
5.2.01	Belanja Tanah	164.000.060	0	167.280.061	0	0	170.625.662
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.531.157.371	5.000.000.000	5.250.000.000	5.512.500.000	5.788.125.000	6.077.531.250
5.4	BELANJA TRANSFER	273.116.310.900	2,71929E+11	2,73958E+11	2,75535E+11	2,77123E+11	2,78753E+11
5.4.01	Belanja Bagi Hasil bagi Pemerintah Desa	0	4.793.010.000	4.995.390.000	5.226.987.700	5.463.133.384	5.735.613.951
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	273.116.310.900	267.135.998.800	268.963.050.128	270.307.865.378	271.659.404.705	273.017.701.729

Penganggaran belanja Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2025 sampai dengan 2030 difokuskan untuk memenuhi aktivitas belanja-belanja prioritas pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan arah pembangunan daerah dengan tetap menyesuaikan pada kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan anggaran. Belanja Operasi difokuskan kepada pemenuhan elemen Belanja Pegawai yang sangat dipengaruhi oleh Jumlah Pegawai Pensiun, Tunjangan Profesi Guru (DAK Non Fisik), Tunjangan Khusus Guru (DAK Non Fisik), dan Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil).

Dalam hal ini perlu dilakukan efisiensi belanja agar dapat mengoptimalkan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara. Terkait dengan peningkatan Jenis Belanja Hibah ini diakibatkan oleh Penganggaran Dana Pemilihan Kepala Daerah kepada KPU, Bawaslu, dan Pengamanan Pilkada, sedangkan peningkatan belanja modal ini diharapkan bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik, DAU Pekerjaan Umum, serta Dana Bagi Hasil). Belanja yang terdiri dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan menjadi salah satu fokus pembangunan untuk mengoptimalkan pembangunan dan kemandirian daerah di masa yang akan datang.

Kebijakan Belanja Daerah

Dalam upaya mengoptimalkan anggaran belanja daerah agar tetap berjalan secara efektif dan efisien, maka arah kebijakan belanja daerah ke depan diarahkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja. Pengeluaran daerah didasarkan kepada prioritas pembangunan yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Penyesuaian belanja daerah disesuaikan terhadap prioritas program-program pembangunan daerah (*money follow programs*)
3. Penyusunan prioritas ulang anggaran belanja daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
4. Penyusunan ulang prioritas belanja daerah terhadap program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan, pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta pendampingan program-program pemerintah pusat.
5. Penetapan program-program prioritas belanja daerah yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya

pengentasan kemiskinan serta mendorong indeks pembangunan manusia.

6. Pengevaluasian kembali struktur kepegawaian yang menjadi kontribusi utama dari belanja daerah dengan proporsi mencapai 34,93% dari total belanja daerah. Arah kebijakan diarahkan untuk melakukan perampingan struktur organisasi untuk menurunkan belanja pegawai dalam upaya mewujudkan efisiensi belanja ke depannya.
7. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif.
8. Penguatan belanja-belanja modal untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam upaya mempercepat akselerasi pemerataan infrastruktur, pembangunan modal dasar di Kabupaten Tapanuli Utara, percepatan juga dilakukan dengan penguatan infrastruktur dasar dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan modal dasar pembangunan, khususnya pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.

2.5.11. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan upaya daerah untuk memenuhi selisih yang terjadi antara pendapatan dan belanja daerah. Apabila belanja daerah diproyeksikan lebih besar daripada pendapatan daerah, maka pembiayaan daerah akan memenuhi kekurangan atau defisit anggaran yang terjadi. Apabila masih terdapat surplus anggaran maka akan diperhitungkan sebagai sisa lebih riil perhitungan anggaran (SiLPA) yang akan dimanfaatkan pada tahun selanjutnya.

Pembiayaan daerah digunakan untuk membiayai proyeksi dengan memenuhi defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Berikut ini adalah besarnya proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Tapanuli Utara selama kurun waktu tahun 2025-2030.

Tabel 2.79. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2026-2030 (Rp)

No	Uraian	Baseline	Proyeksi 2026-2030				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pendapatan Daerah	1.493.599.771.268	1.389.008.553.881	1.403.371.304.206	1.418.278.379.184	1.433.699.340.040	1.450.069.120.324
	Dikurangi dengan						
	Belanja Daerah	1.442.561.794.484	1.313.851.386.672	1.339.666.409.847	1.359.105.351.923	1.430.699.340.040	1.447.069.120.324
	Surplus (Defisit) Riil	51.037.976.784	75.157.167.209	63.704.894.359	59.173.027.261	3.000.000.000	3.000.000.000
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	18.272.950.857	0	0	0	0	0
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	69.310.927.641	75.157.167.209	63.704.894.359	59.173.027.261	3.000.000.000	3.000.000.000
	Pembiayaan Netto	-51.037.976.784	-75.157.167.209	-63.704.894.359	-59.173.027.261	-3.000.000.000	-3.000.000.000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5.12. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah untuk mengalokasikan surplus dan defisit anggaran diarahkan pada:

1. Dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
2. Pada tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan APBD sehingga tidak ada sisa lebih anggaran ke depannya.
1. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential management), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. Kabupaten Tapanuli Utara berupaya untuk mengefisienkan belanja daerah untuk pelunasan pinjaman daerah ke depannya.
2. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup antara lain: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan ke depan diarahkan pada:
 - a. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD.
 - b. Pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi

pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD dan Dana Bergulir (Kredit Program).

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan dan Isu Strategis merupakan bagian krusial dalam RPJMD yang mengidentifikasi tantangan fundamental yang dihadapi daerah berdasarkan hasil analisis data empiris dan kajian komprehensif. Sub-bab ini menjembatani antara gambaran umum kondisi daerah dengan perumusan strategi pembangunan, dengan mengidentifikasi gap antara kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan. Isu strategis bukan sekadar daftar masalah, melainkan hasil kristalisasi berbagai permasalahan yang memiliki dampak signifikan dan multidimensi terhadap pembangunan daerah.

2.6.1. Permasalahan

Permasalahan merupakan suatu keadaan di mana ekspektasi yang diharapkan terjadi tidak sesuai dengan realisasinya. Permasalahan diperoleh dari hasil analisis kondisi daerah. Permasalahan menjadi hal yang harus diperhatikan dan diatasi agar pembangunan daerah berjalan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Permasalahan pembangunan pada Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut.

Tabel 2.80. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurangnya SDM yang berkualitas	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan	Sarana dan prasarana pendidikan masih belum memadai
			Masih kurangnya literasi membaca masyarakat
			Masih belum meratanya sebaran pendidik dan tenaga kependidikan
			Masih rendahnya akses pendidikan masyarakat
		Masih belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Kurangnya pemerataan dokter dan tenaga kesehatan
			Belum optimalnya sarana dan prasarana kesehatan
			Masih tingginya prevalensi stunting pada Balita
			Belum optimalnya penanganan penyakit TBC
			Masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dalam program jaminan kesehatan nasional

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Tingginya angka kemiskinan	Belum optimalnya penanganan PMKS	Kurang optimalnya pengelolaan database PMKS
			Penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran
		Kurangnya keterampilan tenaga kerja	Masih kurangnya tenaga kerja dengan kualifikasi lulusan perguruan tinggi
			Masih banyaknya SDM yang belum memenuhi kebutuhan industri
			Banyaknya tenaga kerja yang bekerja tidak dibayar (pekerja pertanian)
3	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur	Belum optimalnya kualitas infrastruktur	Tingginya Rasio Ketergantungan penduduk
		Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana	Belum optimalnya penanganan jalan rusak
		Rendahnya kualitas SDM	Kurangnya akses rumah layak huni
		Tingginya risiko bencana	Belum optimalnya cakupan pelayanan air minum
			Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas publik yang tersedia
4	Menurunnya ketahanan pangan masyarakat	Menurunnya indeks ketahanan pangan	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur yang tangguh untuk prevensi bencana
		Menurunnya produktivitas pangan	Belum tercapainya stabilitas dan kecukupan pangan
			Kurangnya pemanfaatan dan diversifikasi pangan
5	Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kurang optimalnya pengelolaan lingkungan	Alih fungsi lahan oleh pemerintah
		Kurangnya kualitas SDM	Belum optimalnya penerapan 6R dalam pengolahan sampah
6	Rendahnya Tingkat Kemandirian Daerah	Rendahnya kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan
			Rendahnya pertumbuhan dari penerimaan PAD
7	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Pelayanan publik yang belum optimal	Belum tergalinya potensi sumber PAD
			Kurang optimalnya pengelolaan sistem pemerintahan
		Kurangnya kualitas ASN	Kurangnya inovasi daerah
			Menurunnya integritas pemerintahan
			Rendahnya persepsi masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih



Uraian terkait permasalahan pembangunan sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM yang berkualitas

Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara mengalami tren meningkat. Pada tahun 2024 rata-rata lama sekolah mencapai 10,31 tahun atau setara dengan kelas 1 SMA. Sementara itu, penduduk dengan kualifikasi perguruan tinggi di Tapanuli Utara hanya sebesar 8,81 persen. Hal ini menandakan bahwa masih kurangnya kualifikasi SDM yang tersedia di Kabupaten Tapanuli Utara.

2. Tingginya angka kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kabupaten Tapanuli Utara masih berada di atas angka 8 persen meskipun telah mengalami tren menurun selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023 tercatat bahwa sebesar 8,21 persen dan angka tersebut masih lebih tinggi dari pada rata-rata kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

3. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur

Kualitas infrastruktur Kabupaten Tapanuli Utara masih memiliki berbagai permasalahan hingga saat ini. Jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan hingga tahun 2024 mencapai 30,00 persen, namun hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebesar 70,00 persen jalan yang berada dalam kondisi tidak baik.

4. Menurunnya akses dan pemanfaatan pangan masyarakat

Indeks ketahanan pangan cenderung menurun dari 77,84 poin pada tahun 2020 menjadi 77,29 poin pada tahun 2023. Ketersediaan pangan cenderung meningkat selama periode terkait, namun akses dan pemanfaatan pangan cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan pada distribusi pangan kepada masyarakat. Di samping itu, terdapat juga permasalahan pada pola konsumsi masyarakat dan kualitas pangan yang dikonsumsi.

5. Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan hidup

Peningkatan kualitas lingkungan hidup penting dalam memberikan lingkungan yang layak bagi masyarakat untuk beraktivitas. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami peningkatan dari 70,14 poin menjadi 77,81 poin. Meskipun secara pengukuran indeks mengalami peningkatan, namun masih terdapat permasalahan yang mengganggu ketahanan ekologis, yaitu masalah persampahan. Cakupan rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah hingga tahun 2023 hanya mencapai 22 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak tempat tinggal yang belum dilayani terkait pengumpulan



sampah. Sampah yang tidak terkelola dapat menyebabkan kerusakan bagi lingkungan, seperti pencemaran air dan tanah hingga berdampak pada munculnya berbagai jenis penyakit.

6. Rendahnya Tingkat Kemandirian Daerah

Kabupaten Tapanuli Utara masih belum mampu membiayai pembangunan daerahnya menggunakan biaya sendiri. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah menurun dari 10,33 persen pada tahun 2020 menjadi 9,29 persen pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah. Hingga saat ini pembiayaan pembangunan masih bergantung pada transfer dari pusat. Hal ini dikarenakan masih belum optimalnya pengelolaan sumber PAD dan belum tergalinya potensi PAD Kabupaten Tapanuli Utara

7. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan

Pembangunan yang baik harus didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik juga. Data indeks integritas nasional menunjukkan bahwa terjadi penurunan nilai dari 72,88 poin pada tahun 2021 menjadi 68,64 poin pada tahun 2024 dengan kategori rentan. Hal ini menandakan bahwa persepsi masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan semakin buruk dikarenakan masih adanya tindakan dari oknum yang merugikan beberapa penerima layanan pemerintah. Di samping itu, sistem pemerintahan masih belum optimal. Layanan pemerintah berbasis digital kurang dikelola secara baik, di mana masih banyak situs atau aplikasi yang tidak dapat diakses sehingga menyebabkan rendahnya jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat.

Permasalahan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2.81. Permasalahan Pembangunan berdasarkan Urusan Pemerintahan

Urusan	Masalah
LAYANAN DASAR	
Pendidikan	1 Sarana dan prasarana pendidikan masih belum memadai
	2 Masih kurangnya literasi membaca masyarakat
	3 Masih belum meratanya sebaran pendidik dan tenaga kependidikan
	4 Masih rendahnya akses pendidikan masyarakat
Kesehatan	1 Kurangnya pemerataan dokter dan tenaga kesehatan
	2 Belum optimalnya sarana dan prasarana kesehatan



Urusan	Masalah	
	3	Masih tingginya prevalensi stunting pada Balita
	4	Belum optimalnya penanganan penyakit TBC
	5	Masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dalam program jaminan kesehatan nasional
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Belum optimalnya penanganan jalan rusak
	2	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur yang tangguh untuk prevensi bencana
	3	Belum meratanya akses antar wilayah
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Masih kurangnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni
	2	Belum optimalnya cakupan pelayanan air minum
	3	Belum optimalnya cakupan
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sosial	1	Tingginya tingkat risiko bencana
	1	Belum optimalnya penanganan PMKS
	2	Kurang optimalnya pengelolaan database PMKS
	3	Penyaluran bantuan sosial belum tepat sasaran
Layanan Non Dasar		
Tenaga Kerja	1	Masih kurangnya tenaga kerja dengan kualifikasi lulusan perguruan tinggi
	2	Masih banyaknya SDM yang belum memenuhi kebutuhan industri
	3	Banyaknya tenaga kerja yang bekerja tidak dibayar (pekerja pertanian)
	4	Tingginya Rasio Ketergantungan penduduk
	5	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Meningkatnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
	2	Menurunnya peran perempuan dalam pembangunan ekonomi
Pangan	1	Belum tercapainya stabilitas dan pemanfaatan pangan
	2	Kurangnya pemanfaatan dan diversifikasi pangan
	3	Kurangnya kontrol terhadap kualitas pangan
Lingkungan Hidup	1	Belum optimalnya penerapan 6R dalam pengolahan sampah
	2	Masih sedikitnya pembinaan terkait konsep 6R
	3	Masih rendahnya pelayanan pengelolaan sampah
	4	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Masih adanya masyarakat yang belum mengurus administrasi kependudukan



Urusan	Masalah	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Belum meratanya pembangunan infrastruktur di pedesaan
	2	Belum tergalinya potensi desa
	3	Masih adanya desa dengan status tertinggal
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	Masih tingginya pasangan usia subur yang belum ber-KB
	2	Kurangnya kepedulian PUS dan remaja terhadap kesehatan reproduksi
	3	Masih rendahnya kesadaran kaum pria untuk berperan serta secara
Perhubungan	1	Masih banyaknya area yang belum dipasang rambu-rambu lalu lintas
	2	Masih banyaknya kendaraan angkutan umum yang tidak mengikuti uji KIR
Komunikasi dan Informatika	1	Masih kurang optimalnya pengelolaan SPBE
	2	Belum optimalnya pengelolaan aplikasi dan situs pemerintah
	3	Belum meratanya infrastruktur digital ke seluruh wilayah
	4	Masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki akses jaringan telekomunikasi
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	1	Masih rendahnya pertumbuhan wirausaha
	2	Menurunnya jumlah koperasi aktif dan koperasi berkualitas
	3	Kurangnya minat berwirausaha masyarakat
Penanaman Modal	1	Masih rendahnya realisasi investasi
	2	Menurunnya kontribusi PMTB terhadap perekonomian daerah
Kepemudaan dan Olahraga	1	Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi, cabang olahraga unggulan dan kegiatan kepemudaan
	2	Sarana dan prasarana olahraga yang masih minim dan belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Utara sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk pemenuhannya
	3	Terbatasnya pemuda yang mendapat akses pembinaan
	4	Rendahnya even/kegiatan yang melibatkan pemuda
	5	Tidak adanya database kelompok kepemudaan yang valid
Statistik	1	Belum optimalnya pengelolaan satu data pembangunan yang terintegrasi satu sama lain.
	2	Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan pemerintah untuk



Urusan	Masalah	
Kebudayaan		penyelenggaraan pembangunan
	3	Publikasi data statistik melalui media komunikasi/ <i>multimedia</i> belum optimal
	1	Menurunnya literasi budaya masyarakat
	2	Semakin berkurangnya penanaman pengetahuan budaya sejak dini
Perpustakaan	3	Masih adanya objek budaya yang belum dilestarikan
	1	Rendahnya tingkat literasi membaca masyarakat
	2	Berkurangnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan
Kearsipan	3	Kurangnya SDM pengelola perpustakaan yang berkualitas
	1	Belum diterapkannya pengelolaan arsip secara baku pada beberapa OPD
	2	Masih rendahnya kualitas SDM pengelola arsip
URUSAN PILIHAN		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1	Menurunnya produksi beberapa komoditas pertanian
	2	Menurunnya produksi beberapa komoditas perkebunan
	3	Menurunnya produksi daging beberapa beberapa hewan ternak
Pariwisata	1	Rendahnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah
	2	Kurangnya daya saing destinasi wisata
	3	Menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara
Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Menurunnya kapasitas air baku
Perdagangan	1	Masih rendahnya pemasaran produk daerah
Perindustrian	1	Rendahnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah
	2	Masih rendahnya pertumbuhan IKM
Urusan Penunjang		
Keuangan	1	Rendahnya kontribusi pajak daerah terhadap perekonomian
	2	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah
	3	Belum tergalinya potensi PAD
Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan	1	Kurangnya daya saing dan kualitas ASN
	2	Masih rendahnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
Pengawasan	1	Menurunnya integritas pemerintahan
	2	Menurunnya indeks persepsi korupsi



Urusan	Masalah
Sekretariat Daerah	3 Masih banyaknya OPD yang memiliki evaluasi SAKIP di bawah nilai B
	4 Masih rendahnya kapabilitas APIP
	5 Belum optimalnya maturitas SPIP
	1 Belum optimalnya reformasi birokrasi pemerintahan
	2 Masih belum optimalnya kualitas pelayanan publik
	3 Menurunnya inovasi daerah

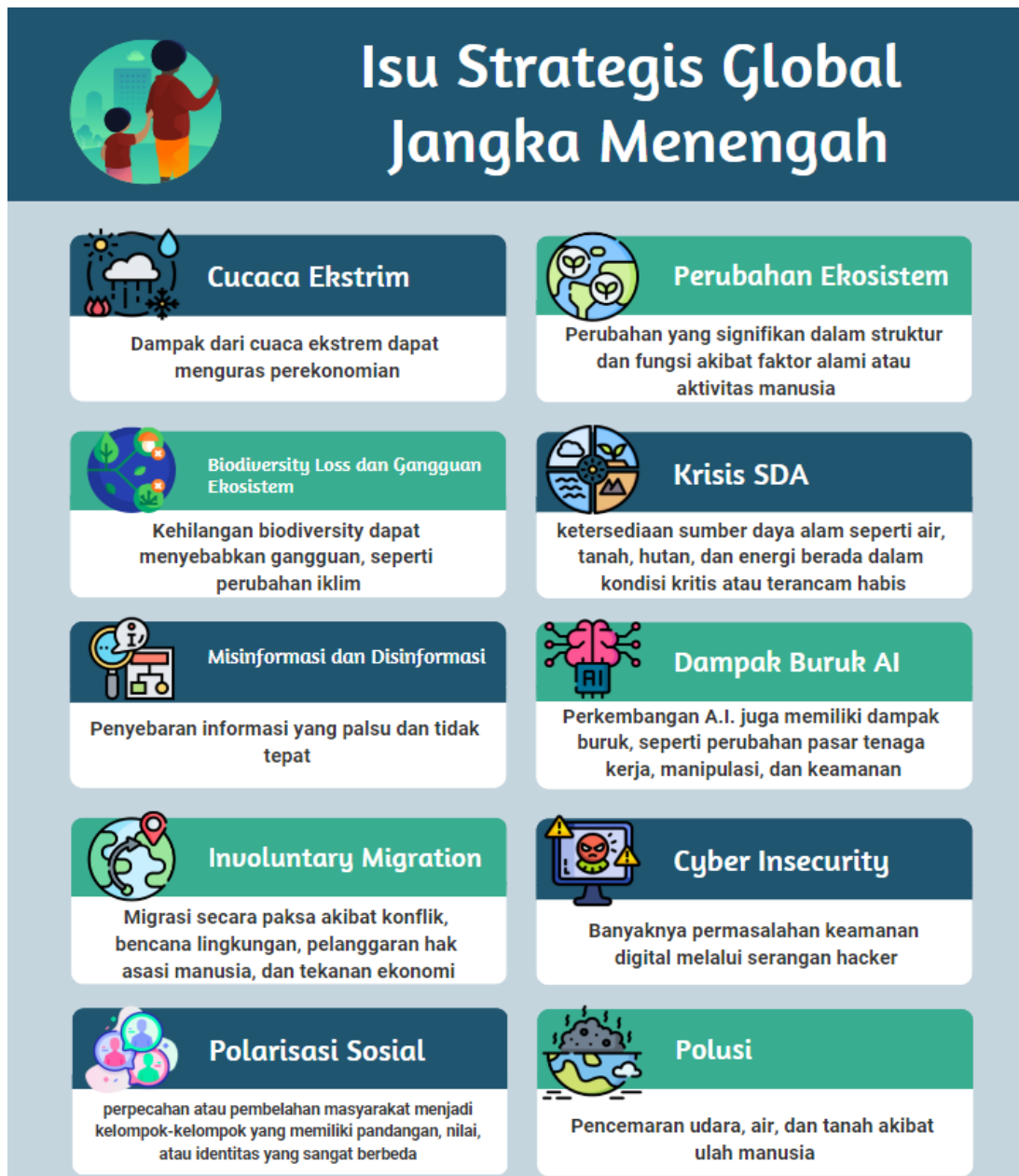
2.6.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan topik yang harus direspon karena berdampak pada kemajuan daerah dalam jangka panjang. Isu strategis dapat berupa permasalahan yang belum tuntas dan tantangan yang mungkin akan dihadapi pada masa mendatang. Perumusan isu strategis dilakukan dari permasalahan yang masih dihadapi dan isu strategis dari tingkat global hingga ke tingkat daerah.

Isu Strategis Global

Isu strategis global dijelaskan pada gambar berikut:





Gambar 2.65. Isu Strategis Global Jangka Menengah
Sumber: World Economic Forum, Risk Global Report 2024

1. Cuaca ekstrim

Cuaca ekstrim yang terjadi berdampak bagi stabilitas pangan di dunia. Kejadian cuaca ekstrim menyebabkan kerusakan lingkungan di berbagai wilayah di mana akan berdampak bagi ketersediaan pangan, kelestarian lingkungan, serta keseimbangan ekosistem dunia.

2. Perubahan ekosistem

Perubahan ekosistem dunia akibat aktivitas manusia, seperti deforestasi, RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029



urbanisasi, pertanian, dan penangkapan ikan yang berlebihan merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Eksploitasi terhadap sumber daya alam, seperti Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, seperti penebangan hutan menyebabkan degradasi ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati.

3. Biodiversity loss dan gangguan ekosistem

Peningkatan aktivitas manusia yang semakin intens berdampak pada kerusakan lingkungan di mana akan menyebabkan perubahan ekosistem dunia. Penebangan hutan secara paksa dan pembakaran hutan menyebabkan fauna yang terdapat di wilayah tersebut terancam punah dan kehilangan habitatnya, serta bermigrasi ke tempat lain. Pencemaran air akibat limbah pabrik akan merusak ekosistem perairan karena menyebabkan spesies yang hidup di dalam air keracunan. Ekosistem yang rusak juga berdampak bagi kualitas hidup manusia, seperti kurangnya kualitas udara, sumber air bersih, atau sumber daya pangan.

4. Krisis Sumber Daya Alam

Ketersediaan sumber daya alam semakin berkurang seiring dengan pertumbuhan penduduk yang menyebabkan peningkatan permintaan terhadap sumber daya alam. Permintaan yang semakin meningkat ini tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan

5. Misinformasi dan disinformasi

Penyebaran informasi di berbagai media, terutama pada media online akan memunculkan berbagai pandangan. Namun, dengan kebebasan tersebut, informasi yang diberikan dapat berupa informasi yang tidak akurat atau informasi yang menipu.

6. Dampak buruk *Artificial Intelligence* (A.I.)

Kehadiran A.I. tidak hanya mempermudah aktivitas manusia atau proses bisnis, namun juga berdampak buruk bagi manusia. Otomasi pekerjaan dan kesenjangan keterampilan muncul akibat perkembangan A.I. yang sangat cepat ini. Permintaan terhadap tenaga kerja berubah akibat kebutuhan terhadap keterampilan digital. Perkembangan A.I. juga berpotensi memberikan informasi palsu, seperti teknologi deepfake yang dapat digunakan untuk membuat konten yang menyesatkan atau menggiring opini.

7. *Involuntary migration*

Konflik yang terjadi seperti perang Ukraina-Rusia, Palestina-Israel, Invasi Iraq atau kemiskinan ekstrim di suatu negara memaksa orang untuk meninggalkan tempat tinggalnya untuk menghindari konflik yang terjadi pada negaranya dan



mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain.

8. *Cyber insecurity*

Cyber insecurity adalah kondisi di mana sistem komputer, jaringan, atau data rentan terhadap ancaman atau serangan. Fenomena ini dapat mengakibatkan kerugian yang fatal baik bagi masyarakat secara luas. Masyarakat menjadi merasa terancam akibat pencurian data pribadi mereka.

9. Polarisasi sosial

Polarisasi sosial merupakan perpecahan atau pemisahan masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang memiliki pandangan, nilai, atau identitas yang sangat berbeda secara politik, sosial, atau budaya. Fenomena ini dapat terjadi di banyak negara dan dapat mempengaruhi stabilitas sosial serta proses demokrasi. Meningkatnya ketegangan antar kelompok sosial dapat memicu konflik atau kekerasan. Hal ini juga dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk mencapai konsensus politik dan mengakibatkan pemerintahan yang kurang stabil.

10. Polusi

Polusi bisa berasal dari berbagai sumber dan memiliki dampak yang luas terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Emisi yang dihasilkan transportasi, industri, dan pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan penurunan kualitas udara, meningkatnya penyakit pernapasan, dan kontribusi terhadap perubahan iklim. Pembuangan limbah industri, pertanian ke perairan menyebabkan kerusakan bagi ekosistem laut dan pencemaran air minum. Pembuangan limbah ke tanah juga menyebabkan keracunan tanah, pencemaran air tanah, dan degradasi kualitas tanah untuk petani

Isu Strategis Nasional

Perumusan isu strategis nasional berdasarkan RPJMN sebagai berikut:





Gambar 2.66. Isu Strategis Nasional
Sumber: RPJMN Teknokratik

Uraian isu strategis nasional dijelaskan sebagai berikut:

1. Dampak Hilirisasi

Hilirisasi produk di Indonesia memberikan nilai tambah ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hilirisasi perlu didorong secara merata ke seluruh wilayah untuk meningkatkan perekonomiannya. Pemerintah nasional mendorong investasi berbasis industri manufaktur untuk meningkatkan perekonomian di berbagai wilayah.

2. Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral

Kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah perlu disinkronkan oleh seluruh wilayah agar pembangunan berjalan tepat sasaran dan mencapai visi yang diharapkan. Kondisi daerah tidak homogen sehingga perlu perencanaan yang matang dan sinergi antar daerah agar pembangunan yang dijalankan berjalan sebagaimana mestinya.

3. Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global

Dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka perlu meningkatkan standar produk-produk yang dihasilkan. Persaingan di pasar global menuntut Indonesia untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkannya agar dapat bersaing dengan negara-negara lain. Hal ini diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing di mata dunia internasional. Hal ini harus dipersiapkan agar Indonesia berhasil meningkatkan statusnya menjadi negara maju



4. Transisi Energi untuk Mendorong Pemerataan

Bentuk dukungan terhadap ekonomi hijau adalah dengan beradaptasi menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT). Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan dalam akses energi, memajukan ekonomi, dan meningkatkan lingkungan yang berkelanjutan.

5. Negara Maju

Beberapa negara, seperti Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan negara-negara maju pada umumnya sedang mengalami perlambatan pertumbuhan penduduk. Hal ini berdampak pada berkurangnya populasi penduduk usia produktif di negara tersebut sehingga penduduk usia produktif semakin banyak menanggung penduduk usia lansia. Hal ini dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas sektor kesehatan untuk menjadi pariwisata kesehatan bagi penduduk usia lansia.



Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dihadapkan pada pembangunan dan Pembentukan modal manusia. Modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi dari berbagai risiko siklus hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan Transformasi Sosial yang menitikberatkan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Transformasi Sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.

Pembangunan kesehatan dihadapkan pada peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penguatan dan pemerataan kapasitas ketahanan kesehatan, serta responsiveness/ketanggapan sistem kesehatan di seluruh wilayah.

Pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang sedangkan

Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

Selanjutnya sistem demokrasi masih prosedural ditandai dengan kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; informasi dan komunikasi publik belum merata; permasalahan politik elektoral seperti politik uang, politisasi isu SARA; nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi serta sistem kaderisasi partai politik belum maksimal.

Selain hal di atas nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan menjadi dimensi dasar dalam proses pembangunan kualitas sumber daya manusia. Agama dan kebudayaan harus menjadi landasan spiritual, etika, dan moral dalam penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dalam hal ini, sumber daya manusia berperan sebagai katalisator transformasi pembangunan dengan dukungan keluarga sebagai institusi internalisasi nilai positif dan pembangunan integritas karakter individu.



Selain itu, perlu dipastikan terselenggaranya kebijakan pemerintah yang ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

2. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas ke destinasi wisata unggulan seperti Danau Toba, Nias, dan Bukit Lawang. Untuk meningkatkan daya tarik wisata, diperlukan pembangunan dan perbaikan jalan, bandara, serta transportasi publik yang lebih terintegrasi. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, dan pusat informasi wisata yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan dan memperpanjang durasi kunjungan mereka.

Selain infrastruktur, penguatan ekonomi kreatif juga menjadi kunci dalam mendukung sektor pariwisata. Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kerajinan tangan, kuliner khas, serta seni pertunjukan perlu mendapatkan pembinaan dan akses permodalan yang lebih baik. Digitalisasi usaha ekonomi kreatif, seperti pemasaran berbasis *e-commerce* dan promosi melalui platform media sosial, juga harus diperkuat agar produk-produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, ekonomi kreatif tidak hanya mendukung industri pariwisata tetapi juga memberikan peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

Keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya harus menjadi fokus dalam pengembangan sektor ini. Pariwisata berbasis alam dan budaya perlu dikembangkan dengan tetap menjaga ekosistem dan kearifan lokal agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku wisata mengenai pentingnya ekowisata serta pengelolaan sampah di kawasan wisata harus ditingkatkan.

3. Pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan

Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi persoalan pembangunan yang perlu direspons ke depan. Luasan permukiman kumuh, rumah tangga dengan akses air minum layak, rumah tangga dengan akses sanitasi layak infrastruktur SDA dalam kondisi baik, penanganan banjir merupakan isu-isu penyediaan infrastruktur yang perlu direspons dalam jangka panjang ke depan.

Cakupan rumah tangga yang menempati hunian layak yang terpadu dengan akses air minum, sanitasi dan penanganan persampahan juga masih cukup rendah. Selain itu, kondisi kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera Utara menghadapi perkotaan arah perkembangan yang tidak terstruktur (*urban sprawl*). Kelayakan dan keandalan perumahan yang dibangun secara swadaya juga perlu menjadi perhatian mengingat tingginya risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara.



Layanan ketenagalistrikan Provinsi Sumatera Utara masih kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatra masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas. Fleksibilitas operasi masih belum optimum terutama saat kondisi di luar waktu beban puncak sebagai akibat dari minimum operasi PLTG. Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari Sistem Interkoneksi Sumatra dan sistem-sistem yang terisolasi. Sistem transmisi ekstra tinggi belum tersambung untuk mengevakuasi daya energi yang tersebar di seluruh wilayah. Konsumen tenaga listrik masih didominasi oleh rumah tangga. Jangkauan jaringan seluler di Provinsi Sumatera Utara belum diimbangi dengan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan produktif (masih terbatas untuk penggunaan telekomunikasi). Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup merata dan hampir menjangkau seluruh area wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan.

Provinsi Sumatera Utara juga memiliki tantangan dalam penyediaan pelayanan dasar, yaitu belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana dasar di seluruh daerah, khususnya di daerah afirmasi 3T. Permasalahan yang dihadapi di antaranya penyediaan air bersih, irigasi, banjir, dan abrasi. Jumlah kejadian bencana banjir masih tinggi terutama di Metropolitan Medan, pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara juga terdampak risiko abrasi akibat perubahan iklim tersebut.

Permasalahan dari pelayanan dasar mencakup tiga aspek, yakni aspek perumahan dan permukiman, aspek kesehatan dan aspek ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Aspek perumahan dan permukiman mencakup akses terhadap layanan sumber air minum, sanitasi dan pengolahan air limbah dan lumpur tinja. Aspek kesehatan mencakup Jaminan Kesehatan Sosial, ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas dan distribusi tenaga kesehatan. Sedangkan aspek kasus kejahatan, rasa aman dan penyalahgunaan narkoba.

Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri belum memenuhi target, hal ini mempengaruhi akses terhadap layanan air minum dan sanitasi. Pada sisi lain ketersediaan air di Provinsi Sumatera Utara secara total masih surplus, termasuk pada daerah kabupaten/kota. Namun pada lokasi-lokasi tertentu terjadi defisit air seperti pada sebagian wilayah Kota Tanjungbalai, Kota Medan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Batubara, Serdang Bedagai dst. Kondisi defisit dipengaruhi oleh ketersediaan dan tingkat konsumsi.

Ketersediaan air cenderung menurun dari waktu ke waktu, selain karena dampak perubahan iklim juga karena makin terdegradasinya daerah hulu baik karena deforestasi, maupun karena alih fungsi hutan dan lahan. Luasan hutan pada



wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana kota-kota utama di Sumatera Utara berada, pada umumnya sudah berada di bawah 30%. Hal ini akan menambah ancaman keberlanjutan ketersediaan air pada masa yang akan datang. Kekurangtersediaan air akan menyebabkan ketidaktercapaian target sanitasi dan akan mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Peningkatan kualitas lingkungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh sampah yang belum tertangani, juga disebabkan oleh sanitasi, air peningkatan kualitas lingkungan juga belum memadai, yang tercermin dari belum tercapainya jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan yang baik (sertifikasi SNI ISO 14001) serta masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai.

Penurunan kualitas air permukaan cenderung meningkat seiring waktu, mengingat pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat. Timbulan sampah akan meningkat, juga limbah cair dan lumpur tinja serta limbah B3. Peningkatan beban lingkungan ini harus dibarengi dengan peningkatan pengelolaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

4. Pembangunan antar daerah serta desa-kota

Keterkaitan antar daerah serta desa-kota di Provinsi Sumatera Utara belum mencerminkan keterkaitan tidak bisa mengabaikan rantai pasok, sehingga wilayah kota dan kawasan-kawasan perlu memiliki rantai nilai dengan wilayah-wilayah lain untuk mendorong perekonomian yang merata.

Pembangunan wilayah Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo) masih menghadapi permukiman kumuh seperti air bersih dan sanitasi, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan infrastruktur transportasi massal yang belum mendukung mobilitas penduduk. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berpusat di inti bisnis dan perdagangan. wilayah pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi pull factor manusia bermigrasi ke wilayah dengan ekonomi yang relatif baik.

5. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan

Dalam upaya pengelolaan SDA berkelanjutan menjadi perhatian terhadap pengelolaan investasi berbasis lahan yang belum seluruhnya mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik terutama kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Pengoptimalan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan juga berkaitan dengan: adaptasi perubahan iklim; pengawasan terhadap deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar; akses dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal; dukungan dalam mewujudkan kelestarian



dan kesejahteraan yang rendah; belum maksimalnya akses seluruh masyarakat terhadap energi, dan peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan yang berkaitan erat dengan keberadaan pangan. Defisit air pada beberapa wilayah dapat menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan. Secara umum ketersediaan air di Sumatera Utara melebihi kebutuhan (surplus) namun ketersebarannya tidak selalu bersesuaian dengan ketersebaran kebutuhan, hal inilah yang menyebabkan defisit air pada beberapa wilayah, dan status defisit ini akan mempengaruhi ketahanan pangan. Dari aspek ketersediaan pangan, Sumatera Utara juga masih surplus, hal ini turut ditopang oleh keanekaragaman hayati yang tinggi di Sumatera Utara. Kondisi kekurangan pangan di beberapa wilayah di Sumatera Utara dapat dipengaruhi oleh jasa lingkungan penyediaan pangan yang memiliki kategori rendah dan sangat rendah yang terdapat pada wilayah barat Sumatera Utara. Kerentanan wilayah yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim juga dapat mempengaruhi produksi pangan.

Perubahan iklim dan pencegahan serta penanggulangan bencana juga merupakan permasalahan di Provinsi Sumatera Utara. Aspek perubahan iklim menyangkut jumlah emisi gas rumah kaca yang masih tinggi, intensitas energi primer yang masih tinggi serta upaya penyerapan emisi gas rumah kaca terutama pada wilayah perkotaan yang masih minim yang terlihat dari belum terpenuhinya penerapan green waste dan ruang terbuka hijau.

Perubahan iklim ini akan menimbulkan dampak yang semakin parah mengingat 73% wilayah Sumatera Utara cukup rentan terhadap perubahan iklim terlebih pada 2% wilayah yang sangat rentan perubahan iklim. Pada sisi lain jasa lingkungan pengatur iklim juga dominan bernilai rendah hingga sangat rendah pada wilayah Pesisir Timur Sumatera. Aspek pencegahan serta penanggulangan bencana mencakup jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana, jumlah kerugian ekonomi langsung karena bencana, jumlah daerah bencana alam yang diperlengkapi secara khusus, dan penurunan indeks risiko bencana yang belum mencapai target. Aspek-aspek ini belum mencapai target juga dipengaruhi oleh wilayah Sumatera Utara yang memiliki potensi bencana tinggi pada beberapa wilayah seperti potensi banjir tinggi pada pantai utara Kabupaten Langkat hingga Kabupaten Labuhanbatu Selatan, potensi kekeringan kelas tinggi pada beberapa kabupaten.

Keberadaan potensi bencana yang tinggi ini belum dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana. Pada sisi lain jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam juga sangat rendah terutama pada sisi timur Sumatera Utara dan kepulauan Nias. Mengingat dominan bencana alam di Sumatera Utara adalah bencana hidrometeorologi, bencana yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim serta ketidakmampuan



alam menampung dampak perubahan iklim, maka upaya penurunan faktor penyebab perubahan iklim mutlak dilakukan disertai dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana alam.

6. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur

Infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas dan sistem logistik berpotensi menekan aktivitas ekonomi berupa mahalanya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran. Hal tersebut perlu diupayakan dengan upaya meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan.

7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Akuntabel, Transparan dan Kolaboratif

Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi dua persoalan utama, yaitu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang fokus pada kapabilitas dan integritas dan memperbaiki kualitas pelayanan publik yang belum optimal kepada masyarakat. Kapabilitas tata pemerintahan berfokus pada penguatan transisi reformasi birokrasi menuju reformasi Birokrasi tematik, memperbaiki proses bisnis adaptif dengan dukungan teknologi informasi, meningkatkan profesionalisme ASN melalui meritokrasi dan penguatan core value.

Isu-isu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan lainnya ialah pemanfaatan kehadiran teknologi informasi dalam area deregulasi kebijakan, penataan kelembagaan, penguatan profesionalisme ASN, penguatan kualitas pengawasan, penguatan akuntabilitas dan pelayanan publik. Ketersediaan dan keterjangkauan teknologi pada masyarakat sipil diharapkan mampu mentransformasi posisi masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan.

Isu Strategis Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, serta penyelarasan dengan isu strategis dari tingkat global hingga regional, maka rumusan isu strategis Kabupaten Tapanuli Utara pada pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 sebagai berikut.





Gambar 2.67. Isu Strategis Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029
Sumber: Perumusan Isu Strategis

Uraian isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai berikut:

1. Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial

Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Rata-rata penduduk Kabupaten Tapanuli Utara hingga saat ini masih mencapai jenjang pendidikan SMA kelas 1. Selain itu, partisipasi siswa dalam menempuh pendidikan semakin menurun setiap kenaikan jenjangnya. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan yang tinggi. Kendala yang dialami oleh



masyarakat salah satunya adalah akses pendidikan. Pemerintah harus melaksanakan pembangunan infrastruktur yang akan menghubungkan dan mempermudah akses masyarakat terhadap sekolah.

Aspek kesehatan juga berperan penting dalam meningkatkan produktivitas SDM. SDM yang sehat akan mampu untuk bekerja secara produktif. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan penting karena menjadi daya dukung bagi penciptaan SDM yang unggul. Pemerintah harus membangun infrastruktur yang mengintegrasikan masyarakat, terkhusus pada daerah terpencil agar dapat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia.

Selain itu, partisipasi masyarakat terhadap jaminan sosial kesehatan nasional harus ditingkatkan. Data capaian kepesertaan masyarakat terhadap program perlindungan sosial mengalami penurunan hingga tahun 2022 menjadi 46,82 persen. Maka dari itu, pemerintah perlu memperhatikan hal ini agar seluruh masyarakat, terkhusus yang kurang mampu terlibat

2. Pengentasan kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi permasalahan bagi Kabupaten Tapanuli Utara. Meskipun, tingkat pengangguran cukup rendah, namun jika dilihat secara cermat, status penduduk bekerja yang paling banyak adalah pekerja tak dibayar/pekerja keluarga sehingga menyebabkan kurangnya produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Tapanuli Utara. Selain itu, bantuan-bantuan sosial yang diberikan masih belum mampu menangani permasalahan kemiskinan akibat belum maksimalnya pemetaan penduduk miskin dan layak diberikan bantuan sosial. Maka dari itu, pemerintah akan berupaya untuk melakukan pemetaan penduduk miskin dan memberikan bantuan sosial yang sesuai dengan sarannya.

3. Peningkatan daya saing SDM dan perluasan lapangan pekerjaan

Mayoritas status penduduk bekerja pada Kabupaten Tapanuli Utara adalah pekerja tak dibayar. Hal ini dikarenakan mayoritas aktivitas ekonomi masih bergerak pada bidang pertanian, selain itu secara umum kualitas SDM yang tersedia masih kurang dan lapangan pekerjaan yang sedikit. Apabila kondisi ini berkelanjutan, maka perkembangan daerah menjadi terhambat. Oleh karena itu, perlu peningkatan kualitas tenaga kerja dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing daerah dari segi ketenagakerjaan sehingga menjadi nilai lebih bagi daerah untuk meningkatkan investasi pada daerahnya. Dengan semakin banyaknya investasi, diharapkan akan berdampak bagi perluasan lapangan kerja sehingga semakin banyak penduduk yang bekerja pada sektor yang produktif.

4. Peningkatan perekonomian daerah



Aktivitas perekonomian Kabupaten Tapanuli Utara hingga saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Kabupaten Tapanuli Utara harus beralih ke sektor industri pengolahan berbasis agroindustri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hilirisasi produk-produk pertanian dilakukan agar produk yang diperdagangkan bernilai tambah sehingga mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Pemanfaatan sektor pariwisata juga perlu didorong karena dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kehadiran pariwisata juga berdampak bagi usaha-usaha yang berada di sekitar destinasi. Dengan adanya wisata yang berdaya saing diharapkan akan meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan baik domestik maupun internasional sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi daerah.

5. Kedaulatan dan stabilitas pangan

Alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pemerintah akan berdampak pada pengurangan lahan masyarakat untuk menghasilkan pangan. Hal ini perlu ditanggapi agar ketersediaan pangan masyarakat dapat terjaga. Keterjangkauan dan pemanfaatan pangan juga penting untuk diperhatikan karena mengalami tren penurunan semenjak 5 tahun terakhir. Distribusi dan alokasi pangan harus disebarkan secara merata kepada masyarakat sehingga akses masyarakat terhadap pangan semakin baik. Selain itu mutu dan kualitas pangan yang disediakan harus dipastikan baik untuk dikonsumsi sehingga pemanfaatan pangan dapat berdampak bagi kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang.

6. Pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang tangguh dan berwawasan lingkungan

Pembangunan ekonomi hijau menjadi fokus utama untuk menjaga keberlangsungan hidup. Pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini telah memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, pembangunan pada Kabupaten Tapanuli Utara harus memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungannya sehingga meminimalisir dampak pada sumber daya alam yang dimilikinya. Transisi energi baru terbarukan harus direncanakan dan dipersiapkan dengan matang sehingga dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA). Pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara merata ke seluruh wilayah, terkhusus daerah terpencil. Pembangunan jalan, jembatan, dan penyediaan sarana transportasi penting untuk meningkatkan akses masyarakat pada hasil pembangunan pemerintah.

7. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah harus mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggali potensi yang dapat menjadi sumber PAD lainnya. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara hingga saat ini masih bergantung pada transfer dari



pemerintah pusat untuk melaksanakan pembangunannya. Ketergantungan yang berkelanjutan dapat menjadi hambatan bagi pembangunan daerah karena keterbatasan pendanaan yang dapat disalurkan oleh pemerintah pusat bagi daerah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara harus berupaya untuk meningkatkan investasi pada daerahnya. Peningkatan investasi tidak hanya berdampak bagi perluasan tenaga kerja, namun juga bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai sumber PAD Kabupaten Tapanuli Utara. Selain itu, Pemerintah dapat memanfaatkan sektor pariwisata sebagai sumber PAD-nya. Maka dari itu, pemerintah perlu memperhatikan sektor terkait sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Peningkatan daya saing sektor pariwisata penting agar sumber pendapatan tidak berasal dari pengunjung domestik saja, namun juga berasal dari pengunjung mancanegara.

8. Tata kelola pemerintahan yang adaptif dan bersih

Peran pemerintah sangat penting untuk pembangunan daerah. Adanya tata kelola pemerintahan yang baik akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara harus melakukan reformasi tata kelola pemerintahannya. Adopsi TIK dalam sistem pemerintahan akan membantu masyarakat dari segi akses dan kemudahan pengurusan administrasinya. Selain itu, pemerintah harus berupaya untuk terus mengembangkan inovasi dan merawat sistem yang telah dibangun. Integrasi lintas OPD perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif. Peningkatan daya saing Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dilaksanakan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan bersih dan kepercayaan masyarakat semakin meningkat terhadap pemerintah.

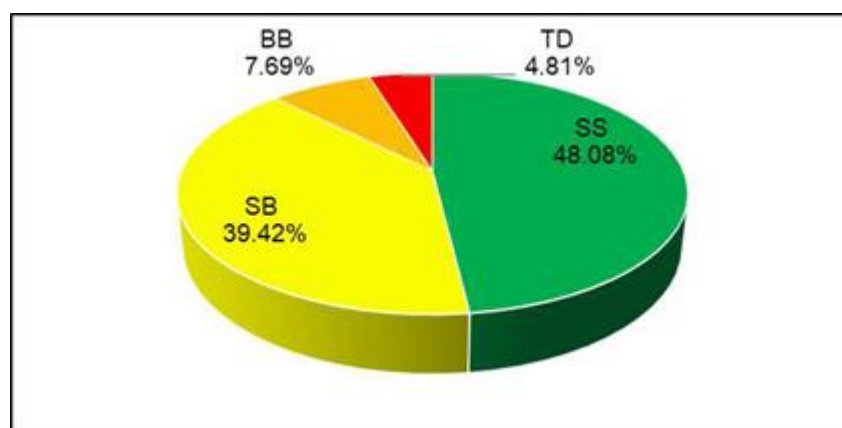
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (KLHS RPJMD) adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.



Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jumlah indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara berjumlah 208 indikator sedangkan jumlah indikator yang non kewenangan berjumlah 14 indikator.
2. Dari total 208 indikator, indikator yang Sudah Tercapai sebanyak 100 indikator dan yang Belum Tercapai sebanyak 107 indikator (terdiri dari 82 indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB), 16 indikator belum pernah dilakukan (BB) dan sebanyak 10 indikator belum memiliki data (TD). Indikator TPB yang Belum Tercapai menjadi salah satu prioritas utama dalam menentukan skenario dalam pencapaian target nasional dalam kurun waktu perencanaan RPJMD lima.



Gambar 2.68. Persentase status ketercapaian TPB Kabupaten Tapanuli Utara

3. Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu TPB 1 (Tanpa Kemiskinan), TPB 2 (Tanpa Kelaparan), TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), TPB 4 (Pendidikan Berkualitas), dan TPB 5 (Kesetaraan Gender). Total jumlah indikator untuk pilar sosial adalah sebanyak 96 indikator, dimana terdapat 45 indikator (46,88%) yang telah mencapai target nasional, sebanyak 47 indikator belum mencapai target, 1 indikator belum pernah dilakukan, dan 3 indikator tidak ada data.
4. Pilar ekonomi mencakup empat tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu TPB 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), TPB 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan), dan TPB 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Total jumlah indikator untuk pilar ekonomi adalah sebanyak 54 indikator terdapat 29 indikator (53,70%) yang telah mencapai target nasional, sebanyak 19 indikator (35,19%) belum mencapai target nasional, dan sebanyak 4 indikator (7,41%)



indikator yang belum pernah dilakukan dan 2 indikator (3,70%) indikator tidak memiliki data.

5. Pilar lingkungan mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu yaitu TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), TPB, 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), TPB 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim), dan TPB 15 (Ekosistem Daratan). Total jumlah indikator untuk pilar lingkungan adalah sebanyak 37 indikator dimana terdapat 14 indikator (37,84%) yang telah mencapai target nasional, sebanyak 9 indikator (24,32%) belum mencapai target nasional, 11 indikator (29,73%) yang belum pernah dilakukan dan dan sebanyak 3 indikator (8,11%) indikator yang tidak memiliki data.
6. Pilar hukum dan tata kelola mencakup satu tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 16 yaitu Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Total jumlah indikator untuk pilar hukum dan tata kelola adalah sebanyak 21 indikator dimana terdapat 12 indikator (57,14%) yang telah mencapai target nasional, sebanyak 7 indikator (33,33%) belum mencapai target nasional, dan sebanyak 2 indikator (9,52%) indikator yang tidak memiliki data.

Tabel 2.82. Capaian TPB Kabupaten Tapanuli Utara

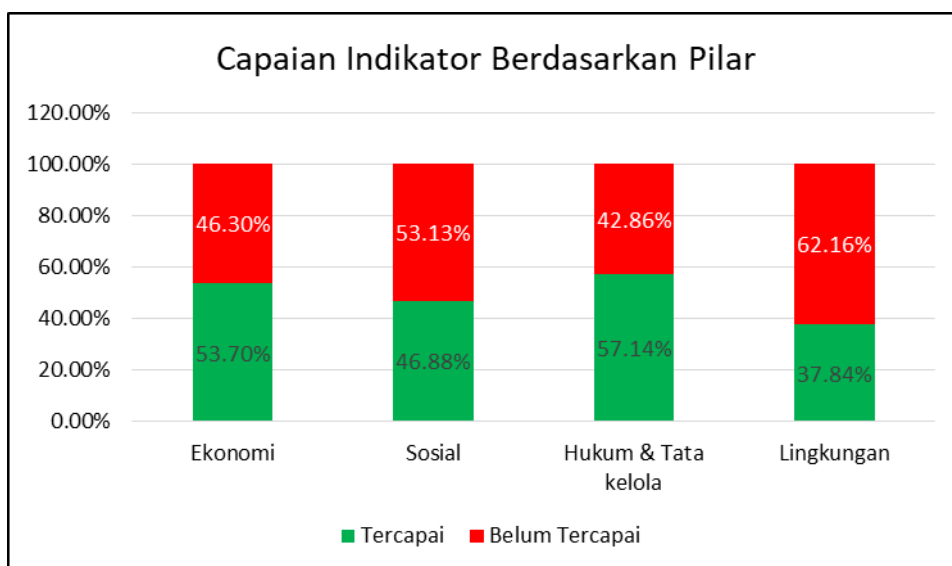
No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Telah Mencapai Target (SS)	Belum Mencapai Target (SB)	Belum Pernah Dilakukan (BB)	Tidak Ada Data (TD)	Jumlah Indikator
1.	Tanpa Kemiskinan	7	16	1	0	24
2.	Tanpa Kelaparan	5	5	0	1	11
3.	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	18	14	0	2	34
4.	Pendidikan Berkualitas	8	5	0	0	13
5.	Kesetaraan Gender	7	7	0	0	14
6.	Air Bersih dan Sanitasi Layak	7	5	5	1	18
7.	Akses Energi yang Terjangkau	0	0	1	1	2
8.	Pekerjaan Layak Pertumbuhan Ekonomi	7	12	0	0	19
9.	Industri, inovasi dan Infrastruktur	7	3	0	0	10
10.	Berkurangnya kesenjangan	4	2	1	1	8
11.	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	4	2	2	0	8
12.	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab	2	0	1	2	5
13.	Penanganan Perubahan	1	0	1	0	2



No.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Telah Mencapai Target (SS)	Belum Mencapai Target (SB)	Belum Pernah Dilakukan (BB)	Tidak Ada Data (TD)	Jumlah Indikator
	Iklim					
15.	Ekosistem Daratan	0	2	2	0	4
16.	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	12	7	0	2	21
17.	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	11	2	2	0	15
	Jumlah	100	82	16	10	208
	PILAR TPB	SS	SB	BB	TD	
	Pilar sosial	45	47	1	3	96
	Pilar ekonomi	29	19	4	2	54
	Pilar lingkungan	14	9	11	3	37
	Pilar hukum dan tata kelola	12	7	0	2	21
	Jumlah	100	82	16	10	208

Sumber: Hasil Analisis, 2023

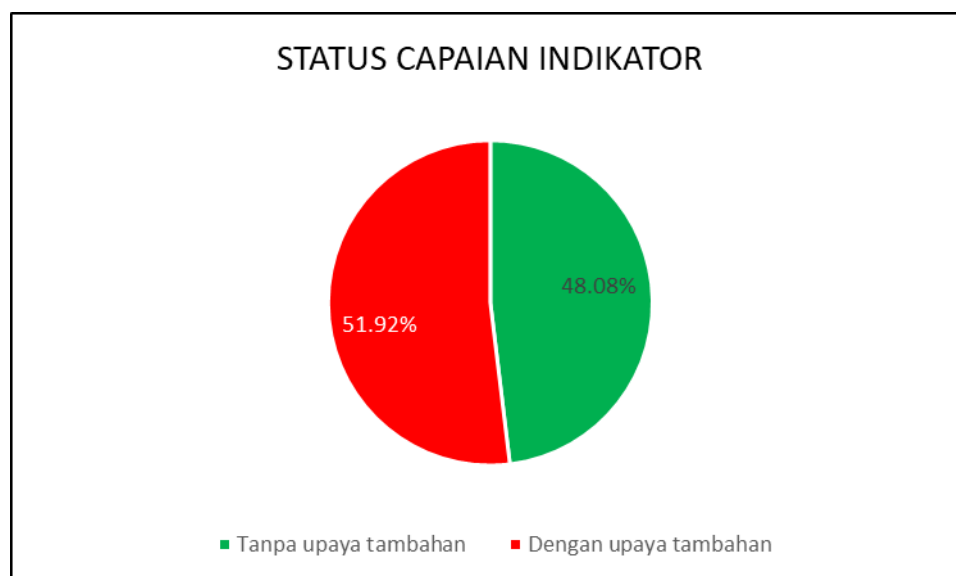
7. Pilar Hukum & Tata Kelola merupakan pilar yang tingkat capaian targetnya paling tinggi yaitu 57,14% (tercapai 12 indikator dari 21 indikator), kemudian Pilar Ekonomi yaitu 53,70% (tercapai 29 indikator dari 54 indikator). Sedangkan ketidaktercapaian yang paling tinggi adalah pada Pilar Lingkungan yaitu 62,16% (23 indikator dari 37 indikator) dan Pilar Sosial sebanyak 53,13% (51 indikator dari 96 indikator). Hal ini mengindikasikan aspek lingkungan dan sosial merupakan isu pembangunan berkelanjutan yang penting di Kabupaten Tapanuli Utara.



Gambar 2.69. Capaian TPB Kabupaten Tapanuli Utara Berdasarkan Pilar



Berdasarkan status capaian pada tahun 2022 diperoleh sebanyak 100 indikator tanpa upaya tambahan (48,08%) dan 108 indikator dengan upaya tambahan (51,92%).



Gambar 2.70. Status Capaian Indikator di Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan hasil proyeksi capaian TPB hingga akhir tahun perencanaan dengan pendekatan business as usual, dari 100 indikator yang sudah tercapai pada tahun 2022 ada 1 indikator yang menjadi tidak tercapai mulai tahun 2026 hingga 2029. Kemudian ada beberapa indikator yang tidak tercapai pada tahun 2022 kemudian setelah dilakukan proyeksi business as usual menjadi tercapai di tahun 2025 hingga 2029. Sehingga jumlah indikator yang memerlukan upaya tambahan agar dapat mencapai target hingga akhir tahun perencanaan adalah menjadi 101 indikator. Dengan melakukan upaya tambahan maka target akan tercapai pada tahun 2025 sebanyak 39 indikator, tahun 2026 dan 2027 akan tercapai 46 indikator, tahun 2028 ada 51 indikator dan terakhir tahun 2029 seluruh indikator mencapai target nasional.

Tabel 2.83. Proyeksi Target Capaian TPB

CAPAIAN		PROYEKSI DENGAN UPAYA TAMBAHAN				
		2025	2026	2027	2028	2029
Tanpa Upaya Tambahan	SS	107	107	107	107	107
Dengan Upaya Tambahan	SS	39	46	46	51	101
	SB	62	55	55	50	0
Jumlah	SS	146	153	153	158	208

Sumber : Hasil Analisis, 2023



A. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara

1. Produksi pangan (Sp) tahun 2023 adalah 670.408.618.219 Kkal/tahun sedangkan kebutuhan pangan (Dp) adalah 244.071.996.000 Kkal/tahun. Dengan menggunakan rata-rata pertumbuhan penduduk 1,02% maka dapat diproyeksi kebutuhan pangan tahun 2029 adalah 262.041.055.500 Kkal/tahun (DP) sedangkan proyeksi produksi pangan (SP) adalah 949.876.960.071 Kkal/tahun sehingga daya dukung pangan di Kabupaten Tapanuli Utara baik pada tahun 2023 maupun tahun 2029 adalah Belum Terlampaui/Surplus. Jasa lingkungan penyediaan pangan kategori tinggi hingga sangat tinggi (23,55%), kategori sangat rendah (40,28%).
2. Ketersediaan air (SA) pada tahun 2023 adalah 703.150.079,531 m³/tahun sedangkan kebutuhan air (DA) adalah 509.478.400 m³/tahun, sedangkan di proyeksi kebutuhan air tahun 2029 adalah 552.566.400 m³/tahun sehingga status daya dukung air di Kabupaten Tapanuli Utara baik pada saat penyusunan dokumen ini maupun untuk proyeksi tahun 2029 adalah Belum Terlampaui/Surplus. Jasa lingkungan penyediaan air bersih kategori tinggi hingga sangat tinggi (38,37%) dan kategori sangat rendah (4,05%).
3. Secara keseluruhan, luas wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dengan indikasi jasa ekosistem pengaturan perlindungan dan bencana alam kategori tinggi hingga sangat tinggi luasnya mencapai 236.523,288 Ha (62,08%). Sedangkan wilayah Kabupaten Tapanuli Utara yang jasa ekosistem pengaturan perlindungan dan bencana alam dengan kategori sangat rendah luasnya sebesar 27.610,244 Ha (7,25%). Potensi bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara adalah bencana cuaca ekstrim, kekeringan, gempa bumi, dan tanah longsor.
4. Potensi timbulan sampah di Kabupaten Tapanuli Utara bila dianalisis berdasarkan timbulan sampah yang dihasilkan oleh rata-rata setiap orang (2,25 liter/orang/hari), adalah 670,066 m³/hari dan yang terangkut adalah sekitar 151 m³/hari (sekitar 22,5%). Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun akan mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah timbulan sampah, diperkirakan akan mengalami peningkatan pada tahun 2029 menjadi 170.934 kg/hari. Sedangkan proyeksi timbulan limbah cair domestik tahun 2029 diperkirakan 8.984.265 m³/tahun dan lumpur tinja 31.195 m³/tahun.
5. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam terdiri dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luas 65.154,420 Ha, Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PPHKm) seluas 3.400,03 Ha.
6. Kabupaten Tapanuli Utara merupakan kabupaten dengan tingkat kerentanan perubahan iklim rendah hingga sangat rendah. Berdasarkan data PIPPIB tahun 2023, terdapat dua jenis PIPPIB di kabupaten Tapanuli Utara yaitu PIPPIB kawasan seluas 124.524,170 ha dan PIPPIB primer dengan luas 1.071,812 ha.



7. Rencana kehutanan tingkat Nasional (RKTN), rencana kawasan hutan yang berada di Kabupaten Tapanuli Utara terdapat seluas 219.824,628 ha yang terdiri dari hutan produksi tetap seluas 44.944,069 ha, hutan lindung dengan luas 122.400 hektar, Hutan produksi terbatas seluas 46.403,017 ha dan hutan produksi konversi seluas 4.017,687 ha, Cagar alam seluas 1.864,985 ha, dan taman wisata alam seluas 194,871 ha.

B. Analisis Capaian TPB pada OPD di Kabupaten Tapanuli Utara

1. Capaian TPB Kabupaten Tapanuli Utara diperoleh dari data capaian indikator TPB dari tahun 2016-2022 yang dihimpun dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten serta instansi vertikal yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Instansi yang menjadi sumber data terdiri dari 29 OPD dan 4 instansi vertikal
2. Dinas Kesehatan menjadi instansi dengan sumber data terbanyak yaitu sebanyak 39 indikator dan yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target (SS) pada OPD ini yaitu 21 indikator, kemudian diikuti oleh Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan dengan jumlah indikator sebanyak 21 indikator.
3. Beberapa OPD hanya memiliki kewenangan 1 indikator antara lain Dinas Perhubungan, Bagian PBJ, Bagian Perekonomian, Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Pertanian, BKPSDM, Inspektorat, Perbankan, dan PLN.

Berdasarkan isu utama capaian indikator TPB dan hasil konsultasi publik, isu strategis dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya (RPJPN, KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Utara), isu berdasarkan muatan KLHS (base line) serta analisis isu utama capaian indikator TPB dengan muatan KLHS, maka dapat dirumuskan isu strategis TPB di Kabupaten Tapanuli Utara adalah sama dengan isu strategis berdasarkan capaian TPB. Adapun isu strategis TPB tersebut adalah:

1. Pengentasan Kemiskinan
2. Peningkatan Ketahanan Pangan
3. Peningkatan infrastruktur dasar
4. Peningkatan kualitas Pendidikan
5. Peningkatan kualitas Kesehatan
6. Percepatan pertumbuhan ekonomi
7. Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana
9. Peningkatan tata kelola pemerintahan
10. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)



Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan

Dalam tujuan 1 TPB yaitu tanpa kemiskinan, terdapat 3 (Tiga) indikator yang telah tercapai yaitu Persentase Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur, Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar, Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan: (1) Proporsi rumah tangga dengan rumah milik. Sementara indikator Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang cenderung meningkat walaupun tidak mencapai target. Sebaiknya

Tujuan 2: Tanpa Kelaparan

Pada tujuan 2 yaitu Tanpa Kelaparan, ketiga indikator yang sudah mencapai target, yaitu indikator Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita, Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita, Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.

Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Untuk tujuan 3 terdapat 8 indikator dan hanya 6 indikator yang sudah mencapai target nasional. Indikator-indikator yang sudah mencapai target meliputi Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, Kejadian Malaria per 1000 orang, Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta., Angka kematian dari percobaan bunuh diri. Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun. Ada satu indikator yang sudah meningkat tetapi tidak mencapai terget, yaitu Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dan untuk indikator Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas tidak diperoleh datanya dari Polres Kabupaten Tapanuli Utara.

Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas

Pada tujuan 4 yaitu Pendidikan Berkualitas, terdapat 2 (dua) indikator telah mencapai target yaitu Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun dan ada 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target bahkan menurun dari capaian tahun lalu, yaitu indikator Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/ MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.



Tujuan 5: Kesenjangan Gender

Untuk tujuan 5, Indikator Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam tidak dapat diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-6 yaitu Air Bersih dan Sanitasi Layak, terdapat 1 (satu) indikator yang meningkat tetapi tidak mencapai target yaitu indikator Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.

Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau

Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-7 yaitu Energi Bersih dan Terjangkau, terdapat 1 (satu) indikator dan mencapai target, yaitu indikator Rasio penggunaan gas rumah tangga.

Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-8 yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, terdapat 2 (dua) indikator. Untuk indikator Laju pertumbuhan PDB per kapita meningkat tetapi tidak mencapai target. Sementara indikator PDB per kapita atau yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi, menurun dari tahun lalu.

Tujuan 9: Industri Inovasi dan Infrastruktur

Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-9 yaitu Industri Inovasi dan Infrastruktur, terdapat 3 (tiga) indikator, untuk indikator Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita tercapai. Tetapi, untuk indikator Indikator Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur tidak mencapai target walau terdapat peningkatan. Sementara indikator Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband tidak dapat dihitung oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Tujuan 10: Berkurang Kesenjangan

Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-10 yaitu Berkurang Kesenjangan, terdapat 1 (satu) indikator dan telah tercapai yaitu Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur..

Tujuan 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-11 yaitu Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan terdapat 3 (tiga) indikator dan ketiganya mencapai target, yaitu indikator Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per



100.000 orang, dan indikator Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).

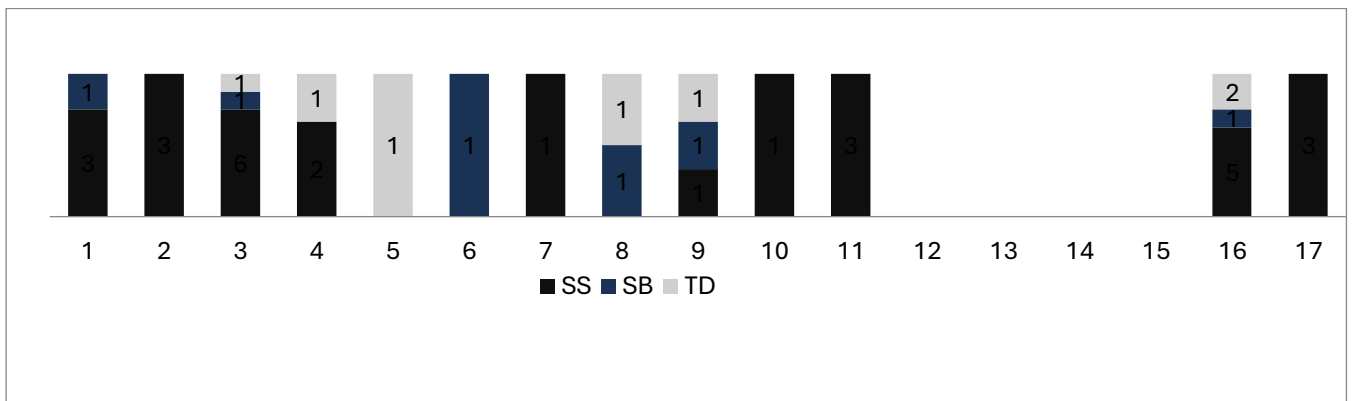
Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Untuk

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-16 yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, terdapat 8 (delapan) indikator. Dari indikator tersebut, terdapat 5 (lima) indikator telah mencapai target yaitu Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui, Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota), Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota), Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) $\geq B$, Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur; terdapat 1 (satu) indikator yang meningkat, tetapi tidak mencapai target, yaitu Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Sementara itu, terdapat 1 (satu) indikator yang justru menurun yaitu Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. dan 1 (satu) indikator yang tidak bias diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dikarenakan pengambilan data yang sangat kompleks, yaitu indikator Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.

Tujuan 17: Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

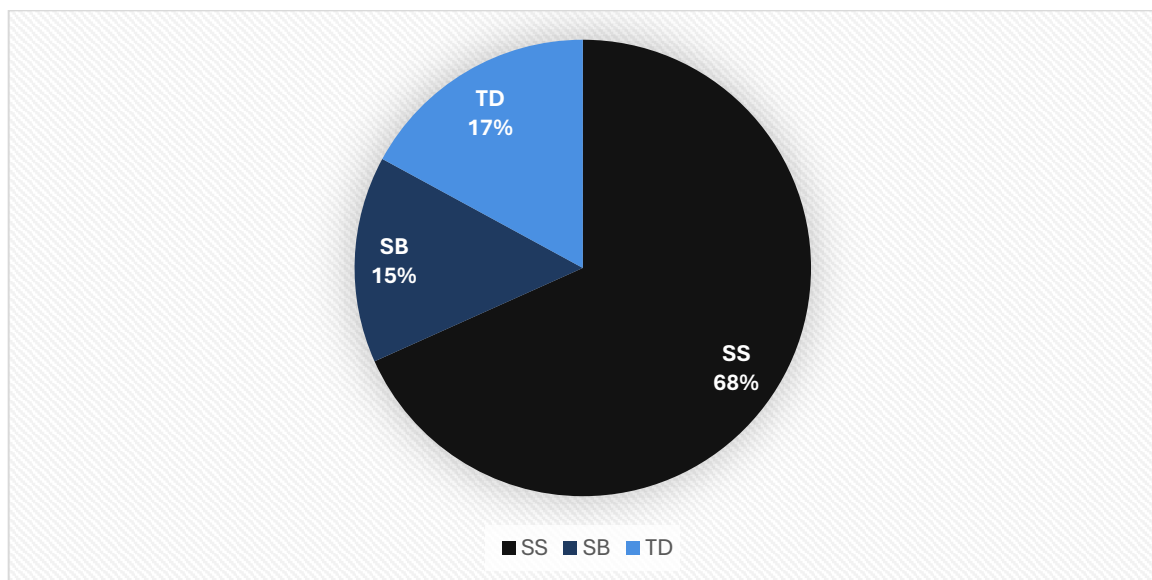
Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-17 yaitu Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan, terdapat 3 (tiga) indikator dan untuk ketiga indikatornya telah mencapai target, yaitu (1) Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya (2) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB (3) Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.





Gambar 2.71. Capaian TPB Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data yang digambarkan pada grafik berikut menunjukkan bahwa indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) sebanyak 68 persen dan sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) sebanyak 15 persen, sementara 17 persen sisanya belum dapat diisi karena tidak tersedianya data



Gambar 2.72. Persentase Status Ketercapaian TPB Kabupaten Tapanuli Utara terhadap target

Indikator TPB tersebut dibagi kedalam empat pilar, antara lain sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Setiap indikator dalam tujuan TPB memiliki capaian yang berbeda-beda. Setiap capaian per TPB ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.84. Capaian TPB Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Telah Mencapai Target (SS)	Belum Mencapai Target (SB)	Tidak ada data/Meurun (TD)	Jumlah Indikator Wajib Kabupaten
1	2	3	4	5	8
1	Tanpa Kemiskinan	3	3	1	7
2	Tanpa Kelaparan	3			3
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	6	1	1	8
4	Pendidikan Berkualitas	2		1	3
5	Kesetaraan Gender			1	1
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak		1		1
7	Akses Energi yang Terjangkau	1			1
8	Pekerjaan Layak Pertumbuhan Ekonomi		1	1	2
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	1	1	1	3
10	Berkurangnya Kesenjangan	1			1
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	3			3
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab				0
13	Penanganan Perubahan Iklim				0
14	Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan				0
15	Ekosistem Daratan				0
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	5	1	2	8
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	3			3
		28	8	8	44

Tabel 2.85. Permasalahan dan Isu Strategis Global-Nasional-Regional-Kabupaten Tapanuli Utara

Potensi Daerah	Permasalahan		Isu Strategis KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Kabupaten Tapanuli Utara
	Kabupaten	Provinsi		Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
Memiliki penduduk yang berpendidikan tinggi	Kurangnya SDM yang berkualitas	1. Permasalahan Kondisi Demografi 2. Permasalahan Kesejahteraan Sosial dan Budaya	1. Peningkatan kualitas pendidikan 2. Peningkatan kualitas kesehatan 3. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	1. Dampak buruk <i>Artificial Intelligence</i> (A.I.) 2. Misinformasi dan disinformasi 3. Polarisasi sosial	Bonus Demografi	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	1. Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial Peningkatan daya saing SDM dan perluasan lapangan pekerjaan
Memiliki posisi strategis dengan sumber daya alam yang melimpah	Tingginya angka kemiskinan	Permasalahan Kesejahteraan Ekonomi	Pengentasan Kemiskinan	Perubahan ekosistem	Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pembangunan antar daerah serta desa-kota 2. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur	Pengentasan kemiskinan



Potensi Daerah	Permasalahan		Isu Strategis KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Kabupaten Tapanuli Utara
	Kabupaten	Provinsi		Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
-	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur	1. Permasalahan Kondisi Geografi 2. Permasalahan Infrastruktur dan Lingkungan	1. Peningkatan infrastruktur dasar 2. Pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana	Cuaca ekstrim	1. Pembangunan IKN 2. Kapasitas Ilmu Pengetahuan, teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)	1. Pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan 2. Pembangunan antar daerah serta desa-kota 3. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur	Pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang tangguh dan berwawasan lingkungan
Merupakan salah satu kabupaten yang mayoritas wilayahnya adalah area pertanian	Menurunnya ketahanan pangan masyarakat	Permasalahan Kondisi Geografi	Peningkatan Ketahanan Pangan	Biodiversity loss dan gangguan ekosistem	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah	Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan	Kedaulatan dan stabilitas pangan
Potensi sumber energi baru terbarukan karena berada pada wilayah ring of fire	Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Permasalahan Infrastruktur dan Lingkungan	Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Krisis Sumber Daya Alam	Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung	Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan	Pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang tangguh dan berwawasan lingkungan



Potensi Daerah	Permasalahan		Isu Strategis KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Kabupaten Tapanuli Utara
	Kabupaten	Provinsi		Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
Kabupaten Tapanuli Utara memiliki sumber daya yang belum termanfaatkan secara optimal sehingga memiliki peluang investasi	Rendahnya Tingkat Kemandirian Daerah	Permasalahan Kesejahteraan Ekonomi	Percepatan pertumbuhan ekonomi	<i>Involuntary migration</i>	1. Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah 3. Optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi laut	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Peningkatan perekonomian daerah 2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
-	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan	<i>Cyber insecurity</i>	Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Akuntabel, Transparan dan Kolaboratif	Tata kelola pemerintahan yang adaptif dan bersih



BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi RPJMD merupakan pernyataan cita-cita jangka menengah daerah yang menggambarkan kondisi ideal yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Rumusan visi mencerminkan nilai-nilai fundamental dan aspirasi masyarakat yang dipadukan dengan analisis potensi dan tantangan daerah secara komprehensif. Visi ini menjadi gambaran masa depan yang inspiratif, namun tetap realistis dan terukur, serta memberikan arah dan fokus bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Proses penetapan visi dilakukan melalui serangkaian tahapan deliberatif yang melibatkan partisipasi publik secara luas melalui dialog publik, konsultasi dengan akademisi, praktisi, dan kelompok masyarakat. Visi yang terumuskan kemudian menjadi landasan filosofis dan operasional seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah selama periode RPJMD.

Misi RPJMD adalah rumusan umum upaya-upaya strategis untuk mewujudkan visi daerah yang telah ditetapkan. Misi berfungsi menjabarkan visi ke dalam beberapa area prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus intervensi pemerintah daerah. Setiap misi merepresentasikan dimensi kunci pembangunan—seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola—yang diartikulasikan dalam pernyataan yang jelas, spesifik, dan terkait langsung dengan penyelesaian masalah strategis daerah.

Perumusan misi dilakukan melalui analisis mendalam terhadap isu-isu strategis hasil kajian teknokratik dan politis, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar sektor dan kewenangan daerah. Misi yang baik memiliki koherensi internal, saling memperkuat satu sama lain, dan secara kolektif membentuk strategi komprehensif pencapaian visi. Misi juga harus didesain dengan mempertimbangkan kontinuitas kebijakan dari RPJMD sebelumnya, adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis, dan antisipasi terhadap tantangan masa depan.

Setiap misi dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan. Implementasi misi dipantau secara berkala melalui sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi untuk memastikan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Visi Renacana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 adalah:



Bersama Mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara Yang Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan

Misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 beserta penjelasannya diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029

No	Misi	Penjelasan Misi
1	Memajukan Ekonomi Masyarakat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	1. Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Tapanuli Utara dimaksudkan untuk menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Utara secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Ekonomi ini terdiri dari sektor pertanian dalam arti luas (Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan), perdagangan, perindustrian, perhubungan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam Ekonomi Inklusif dilakukan secara Kolaboratif dimana untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah, Pelaku Ekonomi, Dunia Usaha dan Investor) untuk secara bersama-sama membangun ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara. 2. Berdaya saing adalah kemampuan daerah dalam menghasilkan produk-produk unggulan yang unggul dibanding daerah lain.
2	Memajukan Ekonomi Melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi	Bagaimana memanfaatkan teknologi dalam pertanian seperti pemakaian Bibit Unggul, pemakaian mekanisasi pertanian, Pupuk dan Pemasaran hasil pertanian untuk peningkatan produksi dan produktivitas Pertanian untuk memajukan ekonomi masyarakat yang sebagian besar hidup dari sektor pertanian.
3	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan	1. Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Untuk mewujudkan masyarakat unggul dan sehat dapat dicapai dengan peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan dimana yang dimaksud dengan pelayanan pendidikan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara memenuhi 8 Standar Pendidikan Nasional. Demikian juga peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas, berkeadilan dan terjangkau, termasuk di dalamnya pencegahan dan penanganan stunting. 2. Pencegahan Stunting Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak yang dapat dicegah dengan berbagai upaya, di antaranya: Pada masa kehamilan Ibu hamil mengonsumsi Tablet



No	Misi	Penjelasan Misi
		Tambah Darah (TTD) setiap hari, minimal 90 tablet. TTD yang dikonsumsi harus mengandung sedikitnya 60 mg zat besi dan 400 microgram asam folat. Ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, minimal 6 kali selama kehamilan. Pada masa bayi Bayi diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Bayi diberikan imunisasi dasar lengkap. Bayi dipantau tumbuh kembangnya secara rutin, minimal 1 bulan sekali di posyandu atau puskesmas. Pada masa balita Balita diberikan makanan tambahan (PMT). Balita diberikan stimulasi dini perkembangannya. Balita mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal. Pada masa remaja Remaja diedukasi untuk tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Pada anak-anak Anak-anak menerapkan pola hidup sehat seperti menghindari konsumsi rokok dan NAPZA. Anak-anak menerapkan gizi seimbang. Anak-anak diberikan ilmu tentang kesehatan reproduksi. Mencegah Stunting pada Anak Memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala. Mengonsumsi secara rutin Tablet Tambah Darah (TTD). Memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu Memberikan Pelayanan Kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu dengan berobat membawa KTP ke Rumah Sakit Umum Daerah dan dipastikan pelayanan kesehatan sama dengan masyarakat yang terdaftar BPJS.
	3.	Peran Generasi Muda dalam Pembangunan Generasi Muda yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara Baik dari Organisasi Kepemudaan, Pemuda Pelopor dan Wirausaha Pemuda Pemula bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Daerah. Merupakan generasi yang penuh dengan semangat, dan generasi yang sangat identik dengan agen perubahan. Pemuda dapat menjadi agen perubahan dengan perubahan-perubahan yang positif di berbagai bidang pembangunan. Generasi Muda yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara Harus Bebas Dari Bahaya Narkoba.
	4.	Peran Perempuan dalam Pembangunan Peran perempuan saat ini sangat beragam termasuk dalam keluarga, masyarakat dan pembangunan. Peran perempuan diperlukan dan ditingkatkan di dalam pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan politik. Dalam meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan, pemerintah telah melakukan beberapa upaya di



No	Misi	Penjelasan Misi
		antaranya yaitu meningkatkan jumlah perempuan dalam kegiatan ekonomi atau bidang ketenagakerjaan, meningkatkan jumlah perempuan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan, menargetkan keterwakilan 30 persen perempuan dalam pemilu legislatif, menerapkan wajib belajar 12 tahun.
4	Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kelestarian Lingkungan dan Tanggap Risiko Bencana	1. Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Infrastruktur Dasar yang dimaksud yakni Pemenuhan akan Infrastruktur Konektivitas Jalan, Transportasi, Pemenuhan Air Bersih/Air Minum, Pemenuhan Pengelolaan Sanitasi (Limbah dan Persampahan), Penyediaan Air Baku (sumber-sumber air dan Irigasi Pertanian). 2. Infrastruktur yang Ramah Lingkungan Peningkatan Kualitas Infrastruktur berorientasi pada konsep ramah lingkungan sehingga menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam. 3. Infrastruktur yang Tangguh Bencana Infrastruktur tangguh bencana adalah infrastruktur yang dirancang dan dibangun untuk meminimalkan dan menahan dampak bencana alam. Disesuaikan dengan Topografi Kabupaten Tapanuli Utara dan kondisi Geografis yang berada di daerah Kawasan Rawan Gempa Bumi.
5	Penerapan Kajian Budaya dan Kearifan Lokal Mulai dari Pendidikan Dasar untuk Memperkuat Karakter Terbaik Masyarakat sehingga Mampu Meminimalisir Efek Negatif Arus Cepat Informasi dan Media Sosial	Kabupaten Tapanuli Utara memiliki beberapa budaya dan kearifan lokal di antaranya dalihan natolu, nasionalisme, gotong royong, toleransi antar umat beragama. Seiring kemajuan globalisasi dan modernisasi seringkali budaya dan kearifan lokal terabaikan. Oleh karena itu satuan pendidikan formal dan informal sangat penting untuk memainkan peran aktif dalam mengajarkan budaya dan kearifan lokal kepada siswa dan masyarakat sehingga mampu meminimalisir efek negatif arus cepat informasi dan media sosial. 1. Efek Negatif Arus Cepat Informasi dan Media Sosial a. Adanya pengaruh Budaya Asing yang mengubah karakter b. Meningkatnya angka Kriminalitas 2. Pendidikan Karakter 3. Model Budaya dan Kearifan Lokal yang Diterapkan untuk Mengurangi Efek Negatif Informasi dan Media Sosial
6	Pengembangan Kebudayaan Berdasarkan Kekayaan Budaya dan Kearifan Lokal	1. Kekayaan Budaya (tenun ulos, Tortor, Moncak/silat, situs, cagar budaya, kuliner dan oleh-oleh khas daerah. Aksara batak, gorga). 2. Model Pengembangan (WBTB). 3. Regulasi Pemakaian dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya Falsafah hidup dan Nilai-nilai budaya batak yang diwariskan



No	Misi	Penjelasan Misi
		para leluhur akan menjadi filosofi dalam pembangunan kabupaten Tapanuli Utara, filsafat hidup orang batak sejak dahulu telah mengedepankan sikap dan karakter yang kuat dalam pembangunan semua aspek kehidupan.
7	Memperkuat Reformasi Birokrasi untuk Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan	1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. 2. Penerapan Teknologi Informasi dalam Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Akan Membangun Sistem Informasi Teknologi untuk Pelayanan Publik di setiap Kecamatan untuk mempermudah pengurusan Akte Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Pembayaran Pajak Bumi Bangunan. Pemerintah Daerah akan membuat Sistem untuk penilaian Kinerja ASN untuk Mendapatkan Reward Tambahan Penghasilan Kinerja ASN yang Kinerja baik dan Disiplin yang Berhak Menerima Reward TPP. 3. Area Reformasi Birokrasi: a. Manajemen perubahan b. Penataan Peraturan Perundang-Undangan c. Penataan dan Penguatan Organisasi d. Penataan Tata Laksana e. Penataan Sumber Daya Manusia f. Penguatan Akuntabilitas Kinerja g. Penguatan Pengawasan h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
8	Menjadikan Desa Mandiri yang Mampu Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Tersedia	1. Memanfaatkan semaksimal mungkin Potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Potensi desa dapat dikembangkan dengan memperhatikan beberapa faktor, seperti: a. Keadaan lingkungan geografis b. Jumlah penduduk desa c. Luas tanah yang dapat digunakan d. Jenis dan tingkat kesuburan tanah e. Kondisi masyarakat, seperti apakah masyarakatnya plural atau tidak, dan apakah memiliki sifat gotong royong yang kuat atau tidak



No	Misi	Penjelasan Misi
		f. Kreativitas aparatur desa
	2. Mengacu pada Standar Indeks Desa Membangun (Kriteria Desa: Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal)	Desa Mandiri adalah gambaran dari kesuksesan pembangunan desa. Desa ini memiliki kemampuan luar biasa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Desa Mandiri mampu mempertahankan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan. Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi besar dalam hal sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi. Meskipun belum mencapai level Desa Mandiri, mereka mampu mengelola potensi ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa Berkembang adalah desa dengan potensi yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Meskipun memiliki sumber daya yang cukup, desa ini masih dalam perjalanan menuju kemajuan. Desa Tertinggal menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi mereka. Mereka memiliki potensi tetapi kesulitan dalam mengelolanya, sehingga kesejahteraan masyarakatnya terbatas. Mewujudkan Desa Sejahtera: Menuju Masa Depan yang Cerah bagi Masyarakat Pedesaan dengan melakukan beberapa hal antara lain: a. Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal. Meningkatkan akses modal dan pendampingan usaha bagi UMKM desa b. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan c. Memperkuat Pemerintahan Desa dan Partisipasi Masyarakat d. Melestarikan Lingkungan Hidup.
9	Meningkatkan Pelestarian Lingkungan serta Peningkatan Upaya Penanggulangan Mitigasi dan Bencana	Melakukan pelestarian lingkungan hidup manusia memanfaatkan lingkungan secara bijak agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Tapanuli Utara merupakan daerah rawan bencana. Jenis bencana yang memiliki risiko bencana tinggi terdiri dari Gempa Bumi, Kebakaran (Hutan dan Lahan serta Pemukiman), Tanah Longsor, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Banjir dan atau Banjir Bandang dan Angin Puting Beliung. Untuk itu perlu melakukan respon cepat dan mitigasi yang dimulai dengan pencegahan sebelum suatu bencana terjadi sampai dengan penanganan usai suatu bencana terjadi. IKLHD (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLHD merupakan gabungan dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). IKD (Indeks Ketahanan Daerah)

No	Misi	Penjelasan Misi
		Pemerintah Daerah dalam hal Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah instrumen untuk mengukur kapasitas/kemampuan suatu daerah dalam menanggulangi bencana serta IKD dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan kebencanaan yang lebih strategis dan terukur.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator, serta Target Pembangunan diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029

N o	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Bersama Mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara yang Maju. Berbudaya. dan Berkelanjutan											
1	Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat										
	1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat		PDRB Per Kapita (Rp. Juta Per Tahun)	34,49	33,31-35,31	34,89-36,98	36,55-38,73	38,28-40,57	40,10-42,49	42,00-44,50
		1.1.1	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi di kabupaten/kota (%)	-79,79	8	9	10	12	13	15
		1.1.2	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	10	10	10,5	10,75	11	11,5	12
		1.1.3	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	16,29	16,44	16,60	16,76	16,92	17,09	17,25
		1.1.4	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja perkapita (Rp. Juta/Tahun)	35,71	36,01	36,32	36,53	36,72	36,93	37,24
		1.1.5	Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	2,18	2,31-2,35	2,32-2,43	2,33-2,63	2,33-2,78	2,34-2,94	2,35-3,11
2	Memajukan Ekonomi Melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi										
	2.1	Meningkatnya produktivitas pertanian		PDRB ADHB Sektor Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan (Rp Miliar)	5.058,48	5.465,00	5.872,00	6.279,00	6.686,00	7.093,00	7.500,00
		2.1.1	Meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor Pertanian	PDRB Sub sektor Pertanian (Rp Miliar)	4.549,97	4.916,10	5.282,21	5.648,33	6.014,45	6.380,57	6.746,69
		2.1.2	Meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor Perikanan	PDRB Sub sektor Perikanan (Rp Miliar)	43,99	45,41	49,52	53,98	58,8	64,01	70,05



No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		2.1.3	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	78,14	78,64	79,14	79,69	80,29	80,89	81,53
3	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata. Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan										
	3.1	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	77,48	78,64-80,85	78,55-81,04	78,47-81,23	78,38-81,42	78,30-81,62	78,21-81,81
		3.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,31	10,39-10,74	10,46-10,84	10,53-10,94	10,60-11,04	10,67-11,15	10,74-11,25
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,74	13,83-14,03	13,87-14,11	13,91-14,19	13,95-14,27	13,99-14,35	14,03-14,43
		3.1.2	Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (Tahun)	74,36	74.36-74.43	74.43-74.56	74.56-75.01	75.01-75.31	75.31-75.98	75.98-76.10
				Prevalensi Stunting %	32,5	30,4	26,3	22,2	18,1	14,2	14
		3.1.3	Meningkatnya kualitas pembangunan kepemudaan	Cakupan Pembinaan Pemuda (%)	-	60	61,88	63,82	65,81	67,87	70
		3.1.4	Meningkatnya Kesenjangan Gender	Indeks Pembangunan Gender (Indeks)	97,69	97,75	97,81	97,87	97,93	97,99	98,05
4	Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kelestarian Lingkungan dan Tanggap Risiko Bencana										
	4.1	Meningkatnya layanan infrastruktur dasar yang berkelanjutan		Indeks Infrastruktur (Angka)	60,82	61,60	62,10	62,60	63,10	63,60	64,10
		4.1.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indek Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (indeks)	N/A	51	51,02	51,04	51,06	51,08	51,10



No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		4.1.2	Meningkatnya Pemenuhan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	87,15	87,65	88,15	88,65	89,15	89,65	90,15
5	Penerapan Kajian Budaya dan Kearifan Lokal Mulai dari Pendidikan Dasar untuk Memperkuat Karakter Terbaik Masyarakat sehingga Mampu Meminimalisir Efek Negatif Arus Cepat Informasi dan Media Sosial										
	5.1	Meningkatnya Pendidikan Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal		Cakupan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Yang Diterapkan (%)	N/A	100	100	100	100	100	100
		5.1.1	Meningkatnya karakter siswa berbasis budaya dan kearifan lokal	Persentase Satuan Pendidikan Yang Menyelenggarakan Pendidikan Karakter Yang Berbasis Budaya (%)	N/A	60	65,07	70,56	76,53	82,99	90
	5.2	Terwujudnya Keluarga Berkualitas		Indeks Peningkatan Kualitas Keluarga (Indeks)	59,17	60,6	61,9	63,2	64,4	65,5	66,6
		5.2.1	Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	59,17	60,00-65,00	61,88-66,89	63,82-68,83	65,81-70,83	67,87-72,88	70,00-75,00
		5.2.2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Indeks)	N/A	80	81,91	83,86	85,86	87,90	90
6	Pengembangan Kebudayaan Berdasarkan Kekayaan Budaya dan Kearifan Lokal										
	6.1	Terjaganya kelestarian budaya dan kearifan lokal serta Pengembangan Pariwisata		Indeks Pembangunan Kebudayaan (indeks)	N/A	45.00-55.00	46.84-55.97	48.76-56.95	50.76-57.95	52.84-58.96	55,00-60,00
				Rasio PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum (%)	2,46	2,48	2,5	2,52	2,53	2,55	2,67
		6.1.1	Terpeliharanya ekosistem kebudayaan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	11.50	12.39	13.27	14.16	15.04	15.93	16.81



No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		6.1.2	Meningkatnya nilai tambah pariwisata melalui pengembangan industri kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang holistik	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	10	10	15	20	25	30	35
7	Memperkuat Reformasi Birokrasi. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan										
	7.1	Terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	B (58,88)	B (60,00)	B (63,55)	B (67,32)	BB (71,30)	BB (75,53)	BB (80,00)
		7.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	63,14	65	66,89	68,83	70,83	72,88	75
				Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Indeks Integritas Nasional (%)	68,64	71,19	72,95	74,75	76,6	78,5	80,44
				Indeks Persepsi Korupsi (nilai)	37	36	36,77	37,55	38,35	39,17	40
				Indeks Reformasi Hukum (poin)	87,18	88,05	88,92	89,75	90,66	91,53	92,41
				Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	4,50	4,53	4,55	4,56	4,58	4,59	4,60
		7.1.2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Daerah (Persen)	85,38	100	100	100	100	100	100
		7.1.3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (%)	9,29	10,95	10,98	11,14	11,51	11,88	12,3



No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		7.1.4	Meningkatnya kualitas ASN yang profesional dan berintegritas	Indeks Sistem Merit (Poin)	N/A	200	250	270	290	300	324
		7.1.5	Meningkatnya kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Daerah	Indeks Pelayanan Publik (Poin)	3,47	3,55	3,62	3,69	3,76	3,83	3,9
		7.1.6	Meningkatnya pembangunan teknologi informasi	Indeks Masyarakat Digital (Poin)	41,97	45	46,84	48,76	50,76	52,84	55
8	Menjadikan Desa Mandiri yang Mampu Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Tersedia										
	8.1	Meningkatnya kemandirian desa dengan memanfaatkan potensi lokal		Persentase Desa Mandiri (%)	0	0,415	0,83	1,24	1,66	2,07	2,49
		8.1.1	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Indeks Desa (%)	0,6535	64	65	66	67	68	69
9	Meningkatkan Pelestarian Lingkungan serta Peningkatan Upaya Penanggulangan Mitigasi dan Bencana										
	9,1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana		Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (Ton Co2/eQ)	NA	213.096	243.496	279.925	322.189	364.025	411.746
				Indeks Risiko Bencana (Indeks)	115,33	114,41	113,49	112,57	111,65	110,73	109,81
		9.1.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Poin)	81,35	79,51	79,68	79,85	80,02	80,20	80,25
				Energi Baru Terbarukan (EBT) (Nilai/MW)	32,2	42,2	52,2	72,2	82,2	92,2	92,2



No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator	Kondisi Awal	Tahun					Target Transisi (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		9.1.2	Meningkatnya Kapasitas Daerah untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan kerentanan daerah akibat bencana	Indeks Ketahanan Daerah (Poin)	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,4	0,41



Tabel 3.3. Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD

RPJMD 2025-2029			RPJPD 2025-2045	
Visi: Bersama Mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara Yang Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan			Visi: Tapanuli Utara Maju, Berbudaya dan Berkelanjutan	
Misi	Tujuan	Sasaran	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
1. Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	1. Meningkatnya pendapatan masyarakat	1. Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	4. Masyarakat Tapanuli Utara yang produktif dengan pemanfaatan IPTEK dan inovasi serta menerapkan ekonomi berkelanjutan	IE.4 Ekonomi yang Produktif dan Inovatif dengan Pemanfaatan IPTEK
			7. Tapanuli Utara yang demokratis dan aman dengan stabilitas ekonomi makro yang unggul serta berdaya saing kawasan	IE.11 Terjaganya Stabilitas Ekonomi Makro
		2. Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	4. Masyarakat Tapanuli Utara yang produktif dengan pemanfaatan IPTEK dan inovasi serta menerapkan ekonomi berkelanjutan	IE.4 Ekonomi yang Produktif dan Inovatif dengan Pemanfaatan IPTEK
			7. Tapanuli Utara yang demokratis dan aman dengan stabilitas ekonomi makro yang unggul serta berdaya saing kawasan	IE.11 Terjaganya Stabilitas Ekonomi Makro

RPJMD 2025-2029			RPJPD 2025-2045	
Visi: Bersama Mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara Yang Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan			Visi: Tapanuli Utara Maju, Berbudaya dan Berkelanjutan	
Misi	Tujuan	Sasaran	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
		3. Meningkatnya nilai tambah perdagangan	4. Masyarakat Tapanuli Utara yang produktif dengan pemanfaatan IPTEK dan inovasi serta menerapkan ekonomi berkelanjutan	IE.7 Ekonomi yang Terintegrasi secara Domestik dan Global
			7. Tapanuli Utara yang demokratis dan aman dengan stabilitas ekonomi makro yang unggul serta berdaya saing kawasan	IE.11 Terjaganya Stabilitas Ekonomi Makro
		4. Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	4. Masyarakat Tapanuli Utara yang produktif dengan pemanfaatan IPTEK dan inovasi serta menerapkan ekonomi berkelanjutan	IE.4 Ekonomi yang Produktif dan Inovatif dengan Pemanfaatan IPTEK
			7. Tapanuli Utara yang demokratis dan aman dengan stabilitas ekonomi makro yang unggul serta berdaya saing kawasan	IE.11 Terjaganya Stabilitas Ekonomi Makro



RPJMD 2025-2029			RPJPD 2025-2045	
Visi: Bersama Mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara Yang Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan			Visi: Tapanuli Utara Maju, Berbudaya dan Berkelanjutan	
Misi	Tujuan	Sasaran	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
		5. Meningkatnya daya saing industri	4. Masyarakat Tapanuli Utara yang produktif dengan pemanfaatan IPTEK dan inovasi serta menerapkan ekonomi berkelanjutan	IE.4 Ekonomi yang Produktif dan Inovatif dengan Pemanfaatan IPTEK
			7. Tapanuli Utara yang demokratis dan aman dengan stabilitas ekonomi makro yang unggul serta berdaya saing kawasan	IE.11 Terjaganya Stabilitas Ekonomi Makro
2. Memajukan Ekonomi Melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi	1. Meningkatnya produktivitas pertanian	1. Meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor Pertanian	4. Masyarakat Tapanuli Utara yang produktif dengan pemanfaatan IPTEK dan inovasi serta menerapkan ekonomi berkelanjutan	IE.5 Penerapan Ekonomi Hijau yang Berkelanjutan
			7. Tapanuli Utara yang demokratis dan aman dengan stabilitas ekonomi makro yang unggul serta berdaya saing kawasan	IE.11 Terjaganya Stabilitas Ekonomi Makro



RPJMD 2025-2029			RPJPD 2025-2045	
Visi: Bersama Mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara Yang Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan			Visi: Tapanuli Utara Maju, Berbudaya dan Berkelanjutan	
Misi	Tujuan	Sasaran	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
		2. Meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor Perikanan	4. Masyarakat Tapanuli Utara yang produktif dengan pemanfaatan IPTEK dan inovasi serta menerapkan ekonomi berkelanjutan	IE.5 Penerapan Ekonomi Hijau yang Berkelanjutan
			7. Tapanuli Utara yang demokratis dan aman dengan stabilitas ekonomi makro yang unggul serta berdaya saing kawasan	IE.11 Terjaganya Stabilitas Ekonomi Makro
		3. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	9. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan, berketahanan energi, air dan kemandirian pangan serta resilien terhadap bencana	IE.16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
3. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata. Pencegahan Stunting serta	1. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan	2. Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	IE.2 Pendidikan Berkualitas yang Merata
		2. Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat	1. Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi	IE.1 Kesehatan untuk Semua



RPJMD 2025-2029			RPJPD 2025-2045	
Visi: Bersama Mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara Yang Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan			Visi: Tapanuli Utara Maju, Berbudaya dan Berkelanjutan	
Misi	Tujuan	Sasaran	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan		3. Meningkatnya Partisipasi Aktif Pemuda dalam Pembangunan Kepemudaan		
		4. Meningkatnya Kesetaraan Gender	8. Masyarakat Tapanuli Utara yang religius, berketahanan Sosial dan berkebudayaan maju	IE.14 Kehidupan Keluarga yang Berkualitas dan Kesetaraan Gender
4. Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kelestarian Lingkungan dan Tanggap Risiko Bencana	1. Meningkatnya layanan infrastruktur dasar yang berkelanjutan	1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	5. Mewujudkan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	IE.8 Desa sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
		2. Meningkatnya Pemenuhan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		
5. Penerapan Kajian Budaya dan Kearifan Lokal Mulai dari Pendidikan Dasar untuk Memperkuat Karakter Terbaik	1. Meningkatnya Pendidikan Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal	1. Meningkatnya karakter siswa berbasis budaya dan kearifan lokal	8. Masyarakat Tapanuli Utara yang religius, berketahanan Sosial dan berkebudayaan maju	IE.13 Masyarakat yang Harmonis, Religius, dan Berkebudayaan Maju
	2. Terwujudnya Keluarga Berkualitas	1. Meningkatnya Pembangunan Keluarga		IE.14 Kehidupan Keluarga yang Berkualitas dan Kesetaraan Gender



RPJMD 2025-2029			RPJPD 2025-2045	
Visi: Bersama Mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara Yang Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan			Visi: Tapanuli Utara Maju, Berbudaya dan Berkelanjutan	
Misi	Tujuan	Sasaran	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
Masyarakat sehingga Mampu Meminimalisir Efek Negatif Arus Cepat Informasi dan Media Sosial		2. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	7. Tapanuli Utara yang demokratis dan aman dengan stabilitas ekonomi makro yang unggul serta berdaya saing kawasan	IE.10 Masyarakat yang Demokratis dengan Menjunjung Supremasi Hukum
6. Pengembangan Kebudayaan Berdasarkan Kekayaan Budaya dan Kearifan Lokal	1. Terjaganya kelestarian budaya dan kearifan lokal serta Pengembangan Pariwisata	1. Terpeliharanya ekosistem kebudayaan	8. Masyarakat Tapanuli Utara yang religius, berketahanan Sosial dan berkebudayaan maju	IE.13 Masyarakat yang Harmonis, Religius, dan Berkebudayaan Maju
		2. Meningkatnya nilai tambah pariwisata melalui pengembangan industri kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang holistik	4. Masyarakat Tapanuli Utara yang produktif dengan pemanfaatan IPTEK dan inovasi serta menerapkan ekonomi berkelanjutan	IE.4 Ekonomi yang Produktif dan Inovatif dengan Pemanfaatan IPTEK
7. Memperkuat Reformasi Birokrasi. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan	1. Terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	6. Terwujudnya Pemerintahan yang berkinerja unggul, profesional, bersih dan kolaboratif	IE.9 Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas
		2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		



RPJMD 2025-2029			RPJPD 2025-2045	
Visi: Bersama Mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara Yang Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan			Visi: Tapanuli Utara Maju, Berbudaya dan Berkelanjutan	
Misi	Tujuan	Sasaran	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
		3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
		4. Meningkatnya kualitas ASN yang profesional dan berintegritas		
		5. Meningkatnya kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Daerah		
			3. Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif	IE. 3 Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif
		6. Meningkatkan pembangunan teknologi informasi	4. Masyarakat Tapanuli Utara yang produktif dengan pemanfaatan IPTEK dan inovasi serta menerapkan ekonomi berkelanjutan	IE.6 Transformasi Digital yang Inklusif
8. Menjadikan Desa Mandiri yang Mampu Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Tersedia	1. Meningkatnya kemandirian desa dengan memanfaatkan potensi lokal	1. Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	5. Mewujudkan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	IE.8 Desa sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi



RPJMD 2025-2029			RPJPD 2025-2045	
Visi: Bersama Mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara Yang Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan			Visi: Tapanuli Utara Maju, Berbudaya dan Berkelanjutan	
Misi	Tujuan	Sasaran	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
9. Meningkatkan Pelestarian Lingkungan serta Peningkatan Upaya Penanggulangan Mitigasi dan Bencana	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	9. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan, berketahanan energi, air dan kemandirian pangan serta resilien terhadap bencana	IE.15 Lingkungan Hidup Berkualitas
		2. Meningkatnya Kapasitas Daerah untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan kerentanan daerah akibat bencana		IE.17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

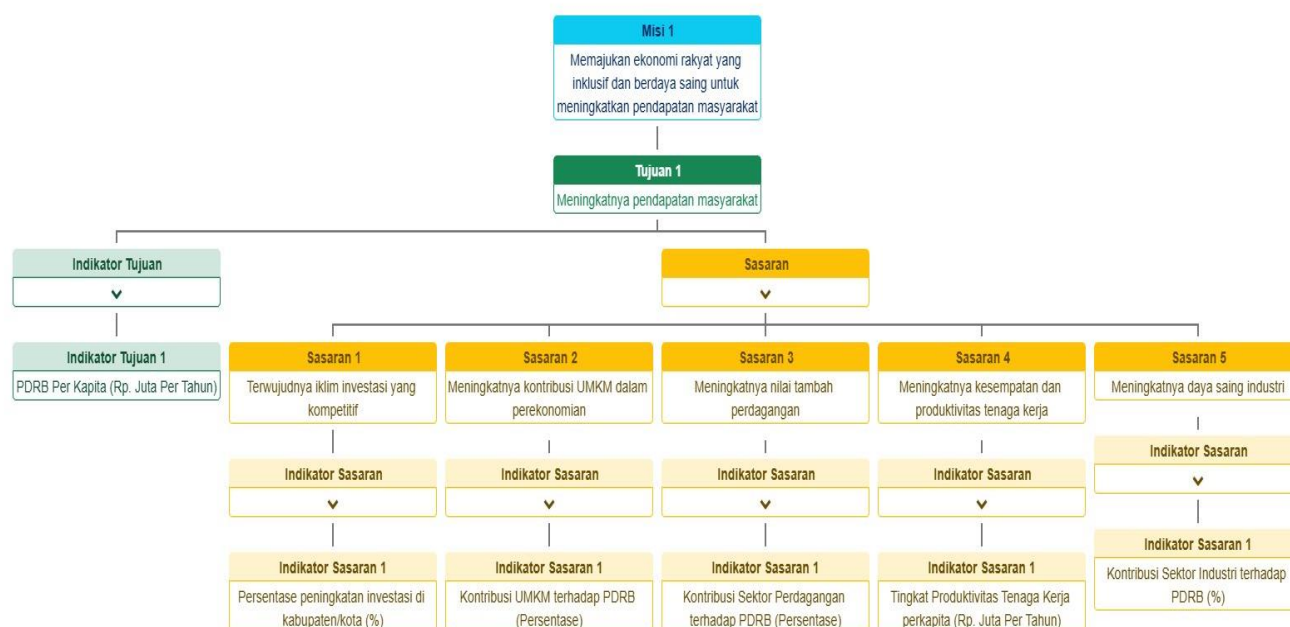


Pohon kinerja Pembangunan daerah adalah sebuah *kerangka logis* yang menggambarkan hubungan sebab-akibat antara tujuan dan sasaran pembangunan, indikator kinerja, dan program/kegiatan di daerah, sehingga terlihat alur bagaimana input dan output pembangunan berkontribusi pada pencapaian visi dan misi daerah. Struktur umum pohon kinerja pembangunan daerah adalah ;

1. Tujuan Pembangunan Daerah
Menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai dalam jangka menengah/panjang.
2. Sasaran Pembangunan
Penjabaran tujuan menjadi capaian yang lebih spesifik dan terukur
3. Indikator Kinerja
Ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan tujuan dan sasaran
4. Program Pembangunan
Kelompok kegiatan yang diarahkan untuk mencapai indikator sasaran

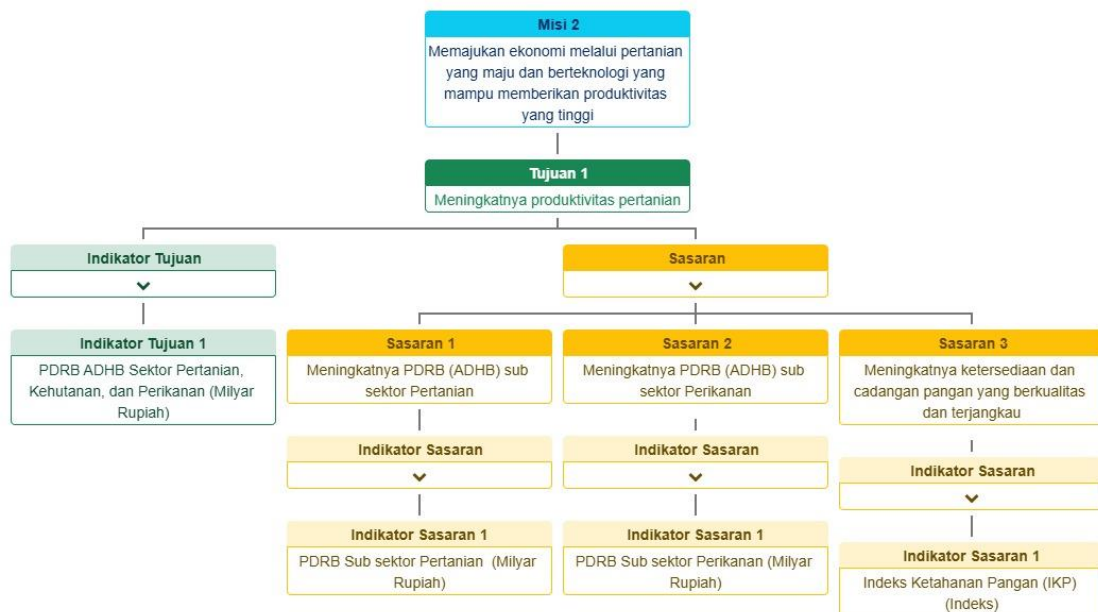
Pohon Kinerja RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Tapanuli Utara digambarkan sebagai berikut :

MISI 1 : Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat



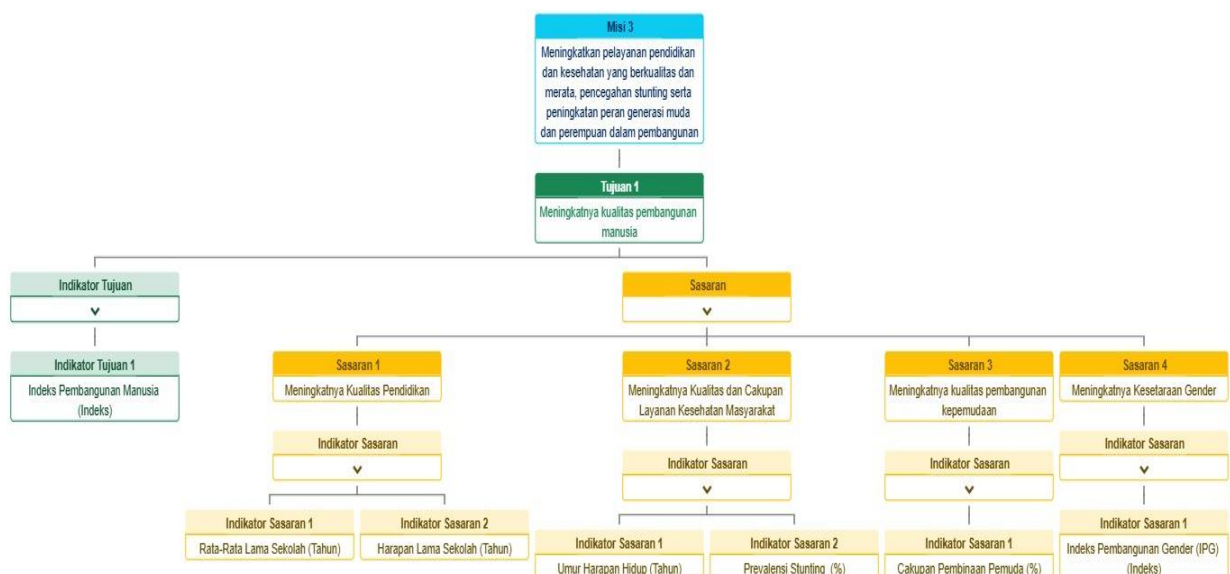
Gambar 3.1. Pohon Kinerja Misi 1 Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

MISI 2 : Memajukan Ekonomi Melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi



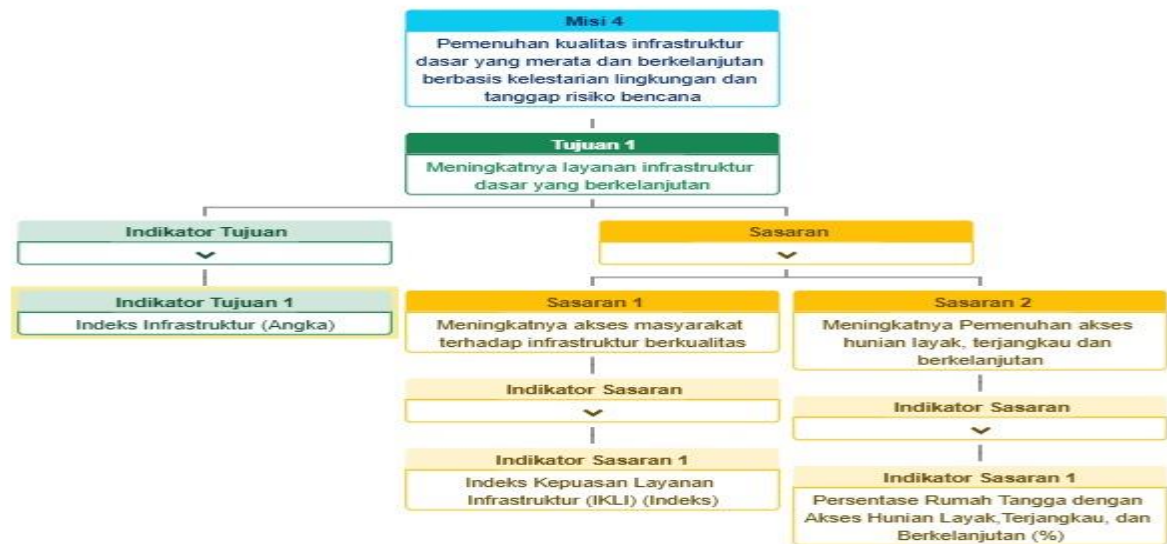
Gambar 3.2. Pohon Kinerja Misi 2 Memajukan Ekonomi Melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi

MISI 3 : Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata. Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan



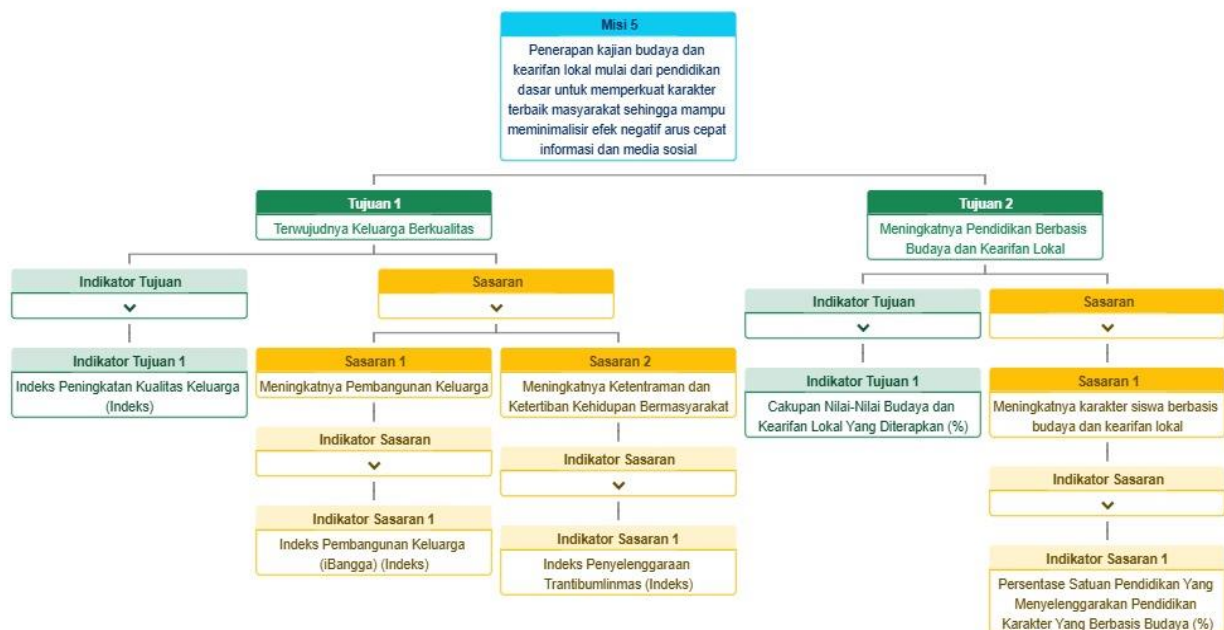
Gambar 3.3. Pohon Kinerja Misi 3 Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata. Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan

MISI 4 : Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kelestarian Lingkungan dan Tanggap Risiko Bencana



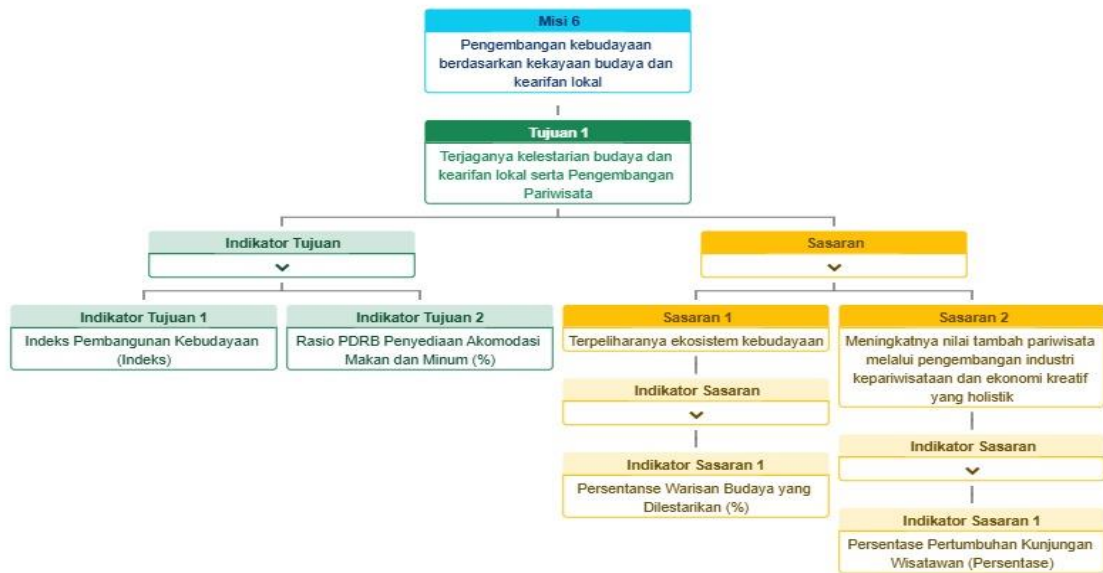
Gambar 3.4. Pohon Kinerja Misi 4 Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kelestarian Lingkungan dan Tanggap Risiko Bencana

MISI 5 : Penerapan Kajian Budaya dan Kearifan Lokal Mulai dari Pendidikan Dasar untuk Memperkuat Karakter Terbaik Masyarakat sehingga Mampu Meminimalisir Efek Negatif Arus Cepat Informasi dan Media Sosial



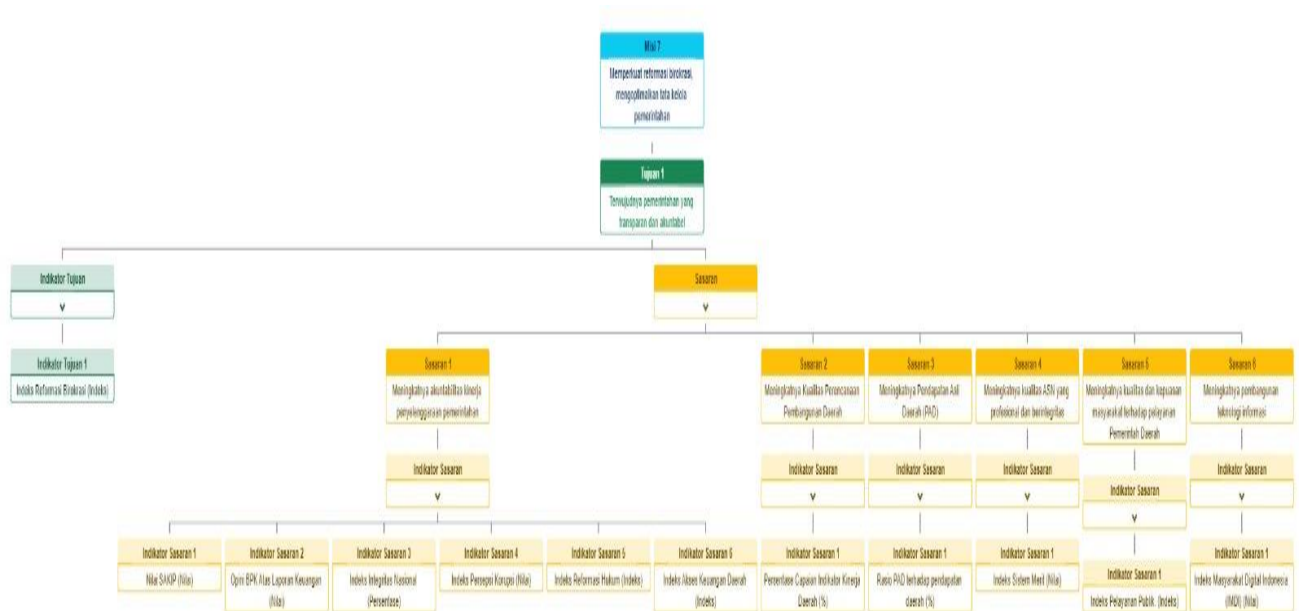
Gambar 3.5. Pohon Kinerja Misi 5 Penerapan Kajian Budaya dan Kearifan Lokal Mulai dari Pendidikan Dasar untuk Memperkuat Karakter Terbaik Masyarakat sehingga Mampu Meminimalisir Efek Negatif Arus Cepat Informasi dan Media Sosial

MISI 6 : Pengembangan Kebudayaan Berdasarkan Kekayaan Budaya dan Kearifan Lokal



Gambar 3.6. Pohon Kinerja Misi 6 Pengembangan Kebudayaan Berdasarkan Kekayaan Budaya dan Kearifan Lokal

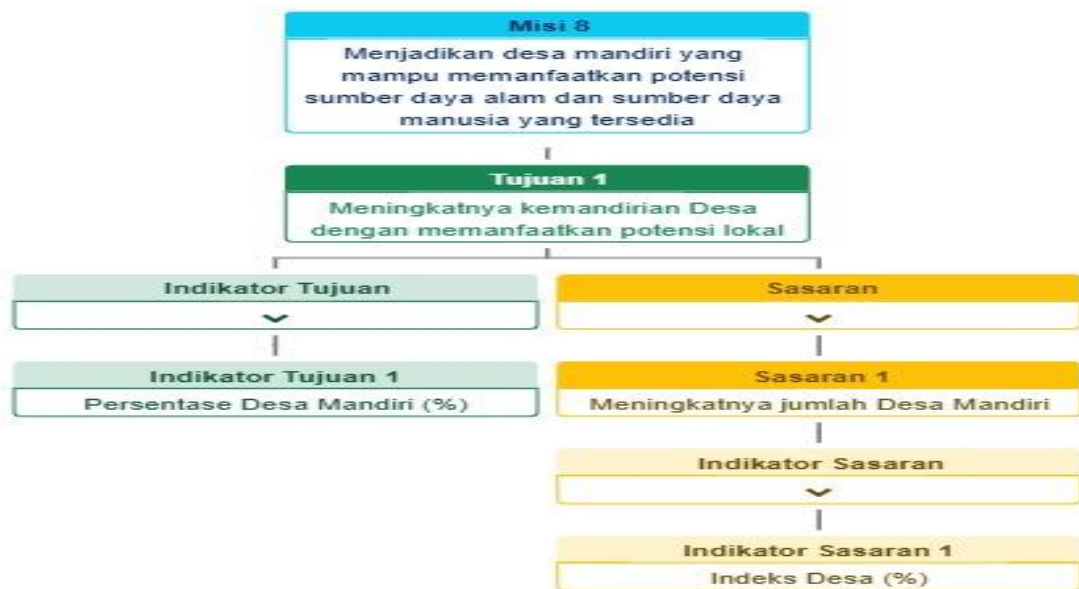
MISI 7 : Memperkuat Reformasi Birokrasi. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan



Gambar 3.7. Pohon Kinerja Misi 7 Memperkuat Reformasi Birokrasi. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan

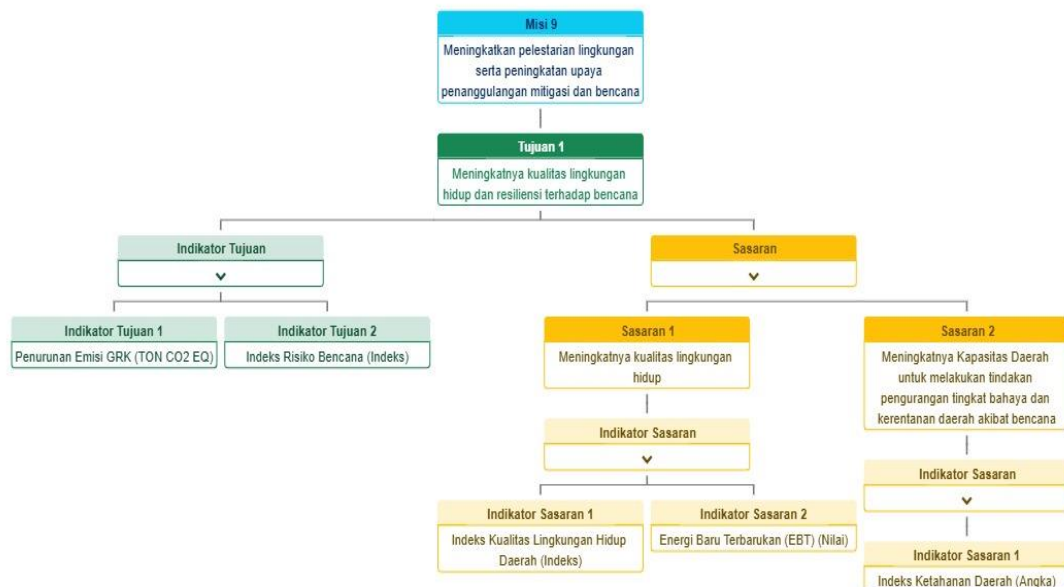


MISI 8 : Menjadikan Desa Mandiri yang Mampu Memanfaatkan Potensi SumberDaya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Tersedia



Gambar 3.8. Menjadikan Desa Mandiri yang Mampu Memanfaatkan Potensi SumberDaya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Tersedia

MISI 9 : Meningkatkan Pelestarian Lingkungan serta Peningkatan Upaya Penanggulangan Mitigasi dan Bencana



Gambar 3.9. Meningkatkan Pelestarian Lingkungan serta Peningkatan Upaya Penanggulangan Mitigasi dan Bencana

Penyelarasan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Dengan RPJMN Dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

Penyelarasan sasaran utama pembangunan **RPJMD** (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan **RPJMN** (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) pada dasarnya bertujuan agar arah kebijakan daerah selaras dengan prioritas nasional, sehingga program pembangunan berjalan sinkron dari pusat hingga daerah. Tujuan penyelarasan ini adalah Menghindari *overlap* atau tumpang tindih program, Memastikan tujuan pembangunan daerah mendukung pencapaian target pembangunan nasional, Memperkuat sinergi pendanaan, kebijakan, dan pelaksanaan. Hasil Penyelarasan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.4. Penyelarasan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Dengan RPJMN Dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

RPJMD TAPANULI UTARA	RPJMD SUMUT	RPJMN
Misi 1. Memajukan Ekonomi Masyarakat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Misi 2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	Asta Cita 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
Misi 2, Memajukan Ekonomi Melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi		Asta Cita 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Asta Cita 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan
Misi 3. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata, Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan	Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Asta Cita 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Genegarsi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas
Misi 4, Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kelestarian Lingkungan dan Tanggap Risiko Bencana	Misi 4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan	Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
Misi 5, Penerapan Kajian Budaya dan Kearifan Lokal Mulai dari Pendidikan Dasar untuk Memperkuat Karakter Terbaik Masyarakat sehingga Mampu	Misi 5. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh	Asta Cita 1. Memperkokoh Idiologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)



RPJMD TAPANULI UTARA	RPJMD SUMUT	RPJMN
Meminimalisir Efek Negatif Arus Cepat Informasi dan Media Sosial		
Misi 6. Pengembangan Kebudayaan Berdasarkan Kekayaan Budaya dan Kearifan Lokal		Asta Cita 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
Misi 7. Memperkuat Reformasi Birokrasi untuk Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan	Misi 3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Asta Cita 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
Misi 8. Menjadikan Desa Mandiri yang Mampu Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Tersedia		Asta Cita 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan
Misi 9. Meningkatkan Pelestarian Lingkungan serta Peningkatan Upaya Penanggulangan Mitigasi dan Bencana	Misi 4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan	Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas,

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2029 disusun dengan memedomani amanat pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2045, khususnya arah kebijakan dalam pelaksanaan RPJPD Tahap Pertama. Kabupaten Tapanuli Utara mempersiapkan arah kebijakan periode lima tahun pertama dalam RPJPD sebagai penguatan fondasi transformasi yang akan menjadi modal dasar pembangunan dalam jangka panjang.

Fokus pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berpusat kepada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial serta membangun kembali pondasi nilai-nilai kebudayaan di Kabupaten Tapanuli Utara. Tema pembangunan RPJPD Kabupaten Tapanuli Utara tahap I dilaksanakan dengan tema “penguatan modal dasar transformasi dan nilai budaya Kabupaten Tapanuli Utara”.

Dalam upaya mewujudkan tema pembangunan “Penguatan Modal Dasar Transformasi dan Nilai Budaya Kabupaten Tapanuli Utara”, pemerintah telah memberikan pedoman fokus arah kebijakan yang menjadi landasan dalam perumusan arah kebijakan dalam pelaksanaan RPJPD tahap pertama. Amanat RPJPD Tahap Pertama memberikan delapan fokus arah kebijakan, meliputi:

1. Penguatan Modal Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial
2. Penguatan industrialisasi berbasis agroindustri yang berwawasan lingkungan



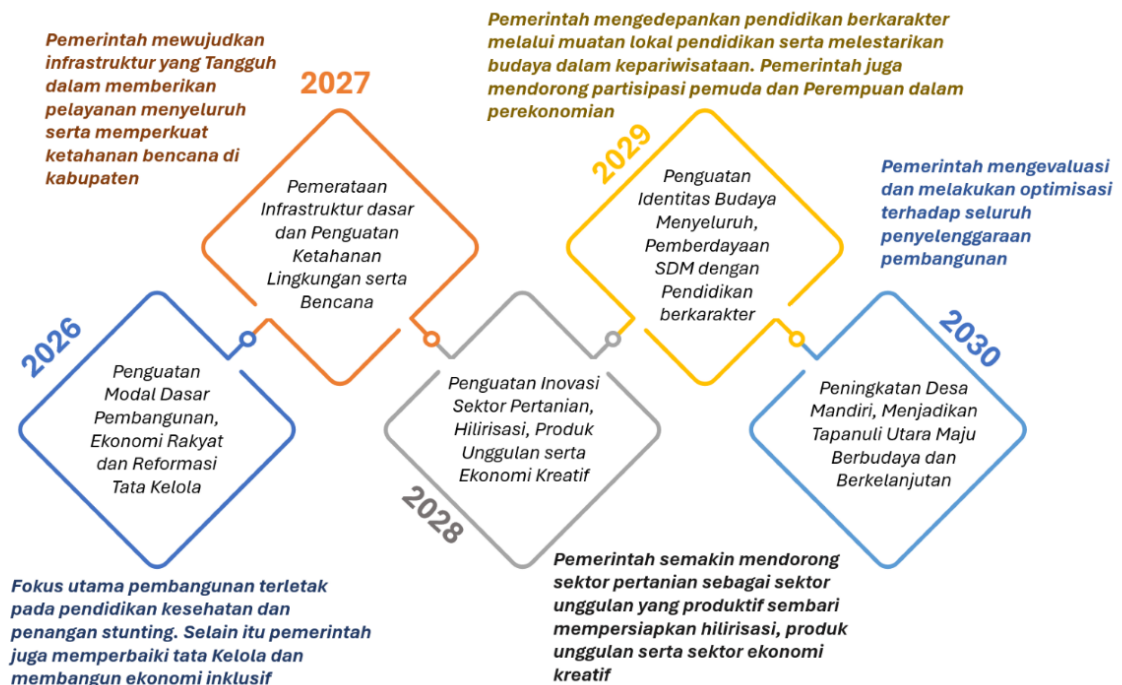
3. Penguatan transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan digitalisasi pelayanan publik
4. Peningkatan keamanan dan ketertiban melalui penguatan Aparatur Penegak Hukum, serta keadilan bagi masyarakat
5. Penguatan nilai-nilai budaya dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, dan lingkungan yang hijau
6. Penguatan Transformasi Pemenuhan pelayanan dasar infrastruktur pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk mengurangi ketimpangan antar kelompok
7. Perkuatan Pondasi Transformasi
8. Pemantapan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan.

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menetapkan visi pembangunan daerah untuk yang hendak dicapai selama periode penyelenggaraan pemerintahan RPJPD Tahap I atau RPJMD 2025-2029. Pemerintah mempersiapkan perencanaan pembangunan untuk mencapai visi “Bersama Mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara yang Maju, Berbudaya dan Berkelanjutan”. Demi mencapai visi besar tersebut, pemerintah telah mempersiapkan sembilan misi daerah yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara. Pada ulasan sebelumnya pemerintah telah menguraikan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai demi mewujudkan visi dan misi daerah. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah perlu menetapkan fokus pembangunan yang tertuang dalam tema pembangunan demi memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif di Kabupaten Tapanuli Utara. Pemerintah mempersiapkan tema pembangunan yang menjadi fokus penyelenggaraan pemerintahan di setiap tahunnya sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana dengan lebih terstruktur dan dapat memberikan akselerasi dalam penyelesaian permasalahan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara.

Perumusan tema pembangunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2029 disusun sampai dengan penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2030 sebagai tahun transisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mempersiapkan RPJMD sebagai perencanaan pembangunan yang berkelanjutan sehingga kekosongan pada masa transisi dapat dilaksanakan dengan memedomani arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029. Di sisi lain, tahun 2025 menjadi tahun transisi sehingga fokus pembangunan pada tahun pertama lebih mengarah kepada konsolidasi dan penataan ulang perencanaan daerah sehingga dapat mempercepat penyelarasan pembangunan di tahun berikutnya. Dengan demikian, tema pembangunan yang menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara dipersiapkan dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Tema pembangunan tahunan tersebut dirangkum dalam gambar berikut.





Tema Pembangunan Tahunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026-2030

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mempersiapkan tema pembangunan daerah dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 – 2045. Fokus dari pembangunan daerah dilaksanakan dengan menyelenggarakan pembangunan untuk memperkuat modal dasar transformasi serta penguatan nilai-nilai budaya di Kabupaten Tapanuli Utara.

Tahun 2025: Penguatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sebagai fase awal penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2025 – 2029, pemerintah mempersiapkan penyelenggaraan pemerintahan melalui konsolidasi kelembagaan serta penyesuaian arah kebijakan pembangunan sebagai landasan utama untuk memastikan keberhasilan pembangunan lima tahun ke depan. Pemerintah memedomani visi dan misi kepala daerah dan menjadikan visi dan misi tersebut sebagai visi dan misi pembangunan daerah. Visi dan misi tersebut diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Tahap Pertama. Pemerintah mempersiapkan perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman strategis dalam mempersiapkan program-program serta kegiatan prioritas lintas sektor di Kabupaten Tapanuli Utara.

Pemerintah memperkuat konsolidasi kelembagaan dengan pengoptimalan penataan organisasi perangkat daerah agar menjadi lebih adaptif dan responsif dalam menyikapi tantangan pembangunan daerah kedepannya. Dalam upaya mempersiapkan akselerasi pembangunan untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah, pemerintah mempersiapkan program-program prioritas yang memberikan hasil cepat (quick wins), terutama dalam modal transformasi ekonomi, sosial dan tata kelola. Program prioritas dimaksudkan sebagai langkah awal bagi pemerintah daerah



untuk memberikan hasil kerja yang berdampak langsung bagi masyarakat sehingga dapat mendorong kepercayaan public dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan kedepannya.

Tahun 2026: Penguatan Modal Dasar Pembangunan, Ekonomi Rakyat dan Reformasi Tata Kelola

Tema pembangunan pada tahun 2026 menitikberatkan kepada modal dasar transformasi di Kabupaten Tapanuli Utara. Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan pembangunan dengan fokus penanganan permasalahan sosial, ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang belum optimal diselesaikan pada penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya. Dalam upaya memperkuat modal dasar pembangunan, pemerintah berupaya untuk mewujudkan pembangunan melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan dan permasalahan stunting. Pemerintah juga berupaya untuk mengoptimalkan pembangunan dengan memperkuat landasan perekonomian masyarakat melalui ekonomi rakyat. Pemerintah juga berupaya untuk membenahi tata kelola pemerintahan secara optimal sehingga dapat memperkuat dan mempercepat pembangunan di tahapan pembangunan berikutnya.

Pemerintah daerah melihat permasalahan sosial dan ekonomi bersifat struktural dan berulang secara sistemik, seperti permasalahan ketimpangan, pengangguran serta tata kelola pemerintahan yang belum optimal. Dengan memerhatikan permasalahan tersebut, pemerintah merencanakan pembangunan yang berfokus kepada peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan yang akan menjadi dasar dalam produktivitas daerah untuk jangka panjang.

Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengupayakan pendidikan berkualitas kepada masyarakat. Pemerintah berupaya agar setiap keluarga di Kabupaten Tapanuli Utara setidaknya memiliki seorang sarjana. Pemerintah berupaya mengintervensi permasalahan gizi, sanitasi, pendidikan keluarga dan perlindungan sosial untuk memperkuat pembangunan daerah.

Pemerintah mengambil langkah penguatan ekonomi rakyat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki potensi unggulan yang belum optimal dikelola seperti pertanian, UMKM, serta pariwisata dan budaya yang dapat menjadi landasan pembangunan ekonomi produktif berbasis potensi lokal. Pemerintah berupaya mewujudkan pembangunan yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat yang menjadikan masyarakatnya lebih sejahtera.

Pemerintah juga melihat permasalahan dalam tata kelola pemerintahan yang belum efektif. Perubahan sudut pandang birokrasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang akuntabel dan berbasis kinerja akan terus dioptimalkan. Kapasitas aparatur dalam menanggapi kebutuhan masyarakat secara adaptif dan melayani akan lebih dioptimalkan. Hal ini dimaksudkan sebagai dasar pembangunan berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya sehingga akselerasi pembangunan dapat diwujudkan.



Tahun 2027: Pemerataan Infrastruktur dasar dan Penguatan Ketahanan Lingkungan serta Bencana

Demi mewujudkan pembangunan yang inklusif, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berupaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Demi memastikan bahwa hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh pusat-pusat pertumbuhan daerah saja, maka aksesibilitas dan pelayanan infrastruktur dasar perlu dioptimalkan. Pembangunan infrastruktur dasar yang tangguh menjadi prioritas utama, mencakup peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur transportasi, air bersih, sanitasi, energi, serta konektivitas jaringan internet.

Perwujudan pemerataan layanan infrastruktur dasar tidak hanya dilakukan dengan pengoptimalan sarana fisik, melainkan juga sebagai instrumen pemerataan pelayanan publik dan penggerak pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan keterpaduan antarwilayah, khususnya antar kecamatan dan desa, melalui pembangunan jalan penghubung, jembatan strategis, serta jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga memandang perlu untuk mengoptimalkan ketahanan lingkungan dan bencana. Pemerintah berupaya untuk mempersiapkan langkah strategis dengan pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana kepada seluruh sektor pembangunan. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan daya tahan masyarakat dan wilayah Kabupaten Tapanuli Utara atas risiko bencana alam. Demi mewujudkan hal tersebut pemerintah juga mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam siap siaga bencana.

Tahun 2028: Penguatan Inovasi Sektor Pertanian, Hilirisasi, Produk Unggulan serta Ekonomi Kreatif

Dengan mempertimbangkan peningkatan modal dasar pembangunan serta infrastruktur dan aksesibilitas yang lebih baik di Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2028 menjadi waktu yang tepat bagi pemerintah untuk memfokuskan pembangunan pada sektor yang memberikan nilai tambah tinggi, khususnya pada sektor unggulan daerah, yaitu pertanian dan hilirisasi produk pertanian. Pemerintah memperkuat modal dasar pembangunan transformasi ekonomi daerah dengan memberikan nilai tambah, inovasi serta pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah mempertimbangkan arahan agroindustri di Kabupaten Tapanuli Utara. Pemerintah tetap memperhatikan produktivitas sektor pertanian sebagai landasan perekonomian daerah namun mempersiapkan pertumbuhan industrialisasi melalui pemberian nilai tambah hasil pertanian. Pemerintah mempersiapkan pengolahan pasca panen berbasis koperasi dan BUMDes untuk mendukung hilirisasi sektor pertanian menjadi industri pengolahan. Langkah ini menjadi dasar penguatan perekonomian dengan memberikan nilai tambah kepada petani dan pelaku usaha di Kabupaten Tapanuli Utara.

Penguatan perekonomian juga dilakukan dengan mengoptimalkan produk-



produk unggulan daerah serta ekonomi kreatif di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Pemerintah mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru berbasis ekonomi kreatif khususnya dengan memperhatikan sektor pariwisata dan pelestarian budaya daerah. Pemerintah mengoptimalkan fokus pengembangan produk unggulan sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi menuju pasar yang lebih besar.

Tahun 2029: Penguatan Identitas Budaya Menyeluruh, Pemberdayaan SDM dengan Pendidikan berkarakter

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memfokuskan tema pembangunan kepada dua bagian utama dalam rencana pembangunan jangka menengah. Salah satu fokus pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara adalah pembangunan budaya. Pemerintah melihat bahwa permasalahan budaya yang mulai memudar menjadi permasalahan yang terjadi akibat dinamika global sehingga perlu adanya upaya untuk memperkuat jati diri dan identitas budaya lokal dalam dinamika perubahan yang cepat.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli menilai bahwa ilmu tanpa adab akan menjadi modal dasar pembangunan yang kurang optimal. Oleh karena itu pembangunan kebudayaan dan pendidikan berkarakter menjadi prioritas pembangunan. Pendidikan tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, tetapi juga individu yang berintegritas, berbudaya, peduli dan cinta Tapanuli Utara. Pengembangan kurikulum pendidikan melalui muatan lokal berkarakter dan berbudaya menjadi salah satu prioritas pada tahun 2029. Selain itu, Tahun 2029 menjadi tahun untuk mengoptimalkan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan misi daerah. Pemerintah memperkuat identitas budaya melalui pelestarian seni, adat istiadat dan warisan budaya lokal. Pemerintah mengoptimalkan pembangunan sektor pariwisata dan budaya menuju pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan yang inklusif, pemerintah juga mengoptimalkan pembangunan melalui pemuda dan perempuan khususnya dalam menggerakkan ekonomi lokal. Penguatan komunitas pemuda dan perempuan menjadi tempat inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif.

Tahun 2030: Peningkatan Desa Mandiri, Menjadikan Tapanuli Utara Maju Berbudaya dan Berkelanjutan

Tahun 2030 menjadi periode transisi dan menjadi momen dalam mengevaluasi capaian pembangunan pada penyelenggaraan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara 2025 – 2029 sebagai bagian pelaksanaan tahap pertama RPJPD Kabupaten Tapanuli Utara 2025 – 2045. Penyelenggaraan pembangunan difokuskan dalam mengembangkan desa-desa mandiri di Kabupaten Tapanuli Utara serta memastikan bahwa pembangunan di daerah mengedepankan prinsip maju, berbudaya dan berkelanjutan.



Pemerintah menjalankan amanat pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan sehingga pemerintah mempersiapkan masa transisi untuk menjaga kesinambungan pembangunan, khususnya transisi dari RPJPD Tahap I, penguatan modal dasar pembangunan menuju Tahap II, akselerasi pembangunan. Dalam hal ini pemerintah mengevaluasi capaian pembangunan tahap I berbasis output dan outcome dari pembangunan yang telah dilaksanakan. Pemerintah menjalankan pembangunan dengan merancang ulang kebijakan dan menerapkan kebijakan optimalisasi program yang akan memberikan dampak luas bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga menyusun tahapan pembangunan yang sejalan dengan tema pembangunan Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Penahapan Pembangunan Tersebut dirangkum sebagai berikut.



Tabel 3.5. Tabel Penahapan Pembangunan RPJMD Tapanuli Utara 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemerintah berupaya mengoptimalkan modal dasar pembangunan, ekonomi dan reformasi tata kelola. Pada tahun ini pembangunan difokuskan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan dan peningkatan kesehatan. Pemerintah akan memperbaiki infrastruktur sekolah, kurikulum serta kompetensi guru yang merata di seluruh kecamatan. Selain itu di bidang kesehatan pemerintah berupaya meningkatkan rumah sakit di Kecamatan xx sehingga akses layanan kesehatan meningkat di daerah. Pemerintah juga membangun sentra produk unggulan dan pusat pengembangan budaya di Kecamatan xx. Pemerintah melakukan reformasi melalui peningkatan kualitas aparatur.	Pemerintah melanjutkan pembangunan sekolah unggulan dan rumah sakit sekaligus melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Kecamatan. Pemerintah melakukan pembenahan terhadap layanan infrastruktur pelayanan dasar seperti infrastruktur transportasi, air bersih, sanitasi, energi, serta konektivitas jaringan internet. Pembangunan dilakukan secara merata di seluruh kecamatan. Pemerintah melakukan pembangunan jalan penghubung antar provinsi di Kecamatan xx, pembangunan jembatan strategis di Kecamatan xx, serta jaringan irigasi di kecamatan xx. Pemerintah juga memperkuat ketahanan bencana dengan peringatan dini serta pelatihan siap tanggap bencana kepada warga.	Pemerintah berupaya mengoptimalkan keunggulan daerah dari sektor pertanian dengan hilirisasi, produk unggulan dan ekonomi kreatif. Pemerintah mempersiapkan lahan dan melakukan pembangunan agroindustri yang terintegrasi di Kecamatan xx. Pemerintah juga mempersiapkan koperasi serta BUMDes untuk pengolahan pasca panen yang difokuskan di Kecamatan xx. Pusat pertumbuhan pariwisata dan pelestarian budaya di Kecamatan xx juga dikembangkan sebagai pusat ekonomi kreatif untuk mendorong kemajuan perekonomian daerah.	Pemerintah mempertahankan pembangunan dari tahun-tahun sebelumnya dengan meningkatkan fokus pada pembangunan budaya. Pembangunan budaya disertakan dalam kurikulum pendidikan untuk membangun SDM berkarakter. Selain itu pemerintah juga memperkuat sentra pembangunan dan pelestarian budaya di Kecamatan xx. Pemerintah juga membangun integrasi kebudayaan dalam pariwisata berkelanjutan melalui media promosi dan penguatan kawasan pariwisata unggulan di Kecamatan xx.	Pemerintah berupaya memastikan pembangunan berkelanjutan pada masa transisi pemerintahan. Pemerintah memastikan pembangunan modal dasar yang optimal sebelum beranjak ke tahapan akselerasi pembangunan periode II RPJPD. Pembangunan yang telah terlaksana selama periode 2025-2029 senantiasa dievaluasi dan dioptimalkan selama tahun 2030. Lokasi pembangunan pada tahapan ini meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara.
Lokus: Kecamatan xx	Lokus: Kecamatan xx	Lokus: Kecamatan xx	Lokus: Kecamatan xx	Lokus: Kecamatan xx



Dengan berpedoman kepada perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025 – 2029, serta mempertimbangkan tema pembangunan sampai dengan tahun 2030, maka pemerintah mempersiapkan arah kebijakan yang dipersiapkan untuk mencapai sasaran dari pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Penetapan arah kebijakan tersebut menjadi prioritas pemerintah sebagai perwujudan strategi penyelenggaraan pembangunan. Kabupaten Tapanuli Utara mempersiapkan arah kebijakan tahunan yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan.



3.2.2. Program Prioritas Daerah

Program prioritas adalah serangkaian kegiatan strategis yang ditetapkan sebagai fokus utama dalam pembangunan daerah berdasarkan pertimbangan urgensi, dampak, dan relevansinya terhadap pencapaian visi-misi kepala daerah dan penyelesaian isu-isu strategis. Program ini mendapatkan alokasi sumber daya yang lebih besar dan perhatian khusus dalam implementasinya, menjadi pengungkit utama transformasi daerah dalam periode RPJMD. Dalam konteks pembangunan daerah, program prioritas berfungsi sebagai instrumen untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas, memfokuskan intervensi pemerintah pada area yang memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) terbesar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Program ini dirumuskan melalui serangkaian analisis teknokratik yang komprehensif dan proses deliberasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan aktual dan aspirasi masyarakat daerah.

Implementasi program prioritas dikawal melalui sistem monitoring dan evaluasi yang ketat, dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Keberhasilan program prioritas menjadi barometer utama pencapaian pembangunan daerah, mencerminkan efektivitas kepemimpinan kepala daerah dalam mengelola agenda pembangunan. Program prioritas yang dirancang dengan baik akan menciptakan sinergi antar sektor, mengatasi fragmentasi kebijakan, dan memastikan keberlanjutan pembangunan jangka panjang meskipun terjadi pergantian kepemimpinan daerah.

Program prioritas beserta kegiatan strategis daerah diuraikan pada tabel berikut.



Tabel 3.6. Program Prioritas RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029

No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
Bersama Mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara yang Maju. Berbudaya. dan Berkelanjutan						
1	Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat					
	1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat				
		1.1.1	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif			
				Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
				Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal
		1.1.2	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian			
				Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Perkembangan Usaha Mikro	Persentase Usaha Kecil yang Terstandarisasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM)
				Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah yang sudah memiliki legalitas usaha	Pertumbuhan Wirausaha	

No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
				Meningkatnya Koperasi yang aktif	Persentase Koperasi Aktif	Program Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Koperasi
		1.1.3	Meningkatnya nilai tambah perdagangan			
				Meningkatnya informasi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		1.1.4	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja			
				Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya (%)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		1.1.5	Meningkatnya daya saing industri			
				Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
2	Memajukan Ekonomi Melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi					
	2.1	Meningkatnya produktivitas pertanian				
		2.1.1	Meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor Pertanian			
				Meningkatnya Distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian



No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
				Tersedianya dan berkembangnya Prasarana Pertanian (Pternakan)	Prasarana Pertanian yang Tersedia/ Dikembangkan	
				Meningkatnya Distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	
					Peningkatan Produksi Hortikultura	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian
					Peningkatan Produksi Perkebunan	
				Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian (peternakan)	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	
		2.1.2	Meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor Perikanan			
				Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Pengelolaan Perikanan Budidaya
		2.1.3	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau			
				Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan masyarakat
				Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Penanganan kerawanan pangan

No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
				Meningkatnya Kapasitas SDM bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Penyuluhan pertanian
3	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata. Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan					
	3.1	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia				
		3.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan			
				Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Program Pengelolaan pendidikan
					tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam SD	
					tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam SMP	
					tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	
				Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks pemerataan guru (IPG) jenjang PAUD	Program Pendidik dan Tenaga pendidikan



No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
					Indeks pemerataan guru (IPG) jenjang SD	
					Indeks pemerataan guru (IPG) jenjang SMP	
					Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidikan Jenjang PAUD	
					Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidikan Jenjang SD	
					Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidikan Jenjang SMP	
				Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Program Pembinaan Perpustakaan
		3.1.2	Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat			
				Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	Progam pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
				Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	
					Laporan kinerja administrasi dan keuangan BLUD	

No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
				Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 (sembilan) jenis Tenaga Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
				Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
		3.1.3	Meningkatnya partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan			
				Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
		3.1.4	Meningkatnya Kesenjangan Gender			
				Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK)	
				Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
4	Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kelestarian Lingkungan dan Tanggap Risiko Bencana					
	4.1	Meningkatnya layanan infrastruktur dasar yang berkelanjutan				



No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
		4.1.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas			
				Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Jalan yang Ditangani	Program Penyelenggaraan jalan
					Persentase Jembatan yang Ditangani	
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
				Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
					Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	
					Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan yang Terpasang	
					Koordinasi Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan	
		4.1.2	Meningkatnya Pemenuhan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan			
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Aman	Program Pengolahan dan Pengembangan SPAM

No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi Aman	Program Pengolahan dan Pengembangan SPAL
				Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Rumah Layak Huni bagi Warga Negara Korban Bencana	Program Pengembangan Perumahan
				Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	Program Kawasan Pemukiman
				berkurangnya kawasan kumuh daerah	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	Program Kawasan Permukiman dan Kawasan Permukiman Kumuh
5	Penerapan Kajian Budaya dan Kearifan Lokal Mulai dari Pendidikan Dasar untuk Memperkuat Karakter Terbaik Masyarakat sehingga Mampu Meminimalisir Efek Negatif Arus Cepat Informasi dan Media Sosial					
	5.1	Meningkatnya Pendidikan Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal				
		5.1.1	Meningkatnya karakter siswa berbasis budaya dan kearifan lokal			
				Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Program Pengembangan Kurikulum
				Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Buku Teks Utama Bahasa dan Sastra daerah sesuai kurikulum Muatan Lokal	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
	5.2	Terwujudnya Keluarga Berkualitas				



No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
		5.2.1	Meningkatnya Pembangunan Keluarga			
				Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	Program pengendalian penduduk
					Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	
				Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
				Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	Program pembinaan keluarga berencana
					Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	
		5.2.2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat			
				Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
				Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penanganan Gangguan Tibumtranmas	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
				Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	
				Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	
6	Pengembangan Kebudayaan Berdasarkan Kekayaan Budaya dan Kearifan Lokal					
	6.1	Terjaganya kelestarian budaya dan kearifan lokal serta Pengembangan Pariwisata				
		6.1.1	Terpeliharanya ekosistem kebudayaan			
				Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
		6.1.2	Meningkatnya nilai tambah pariwisata melalui pengembangan industri kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang holistik			
				Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata	Program Peningkatan Daya tarik destinasi wisata
				Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata



No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
				Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Program Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif
7	Memperkuat Reformasi Birokrasi. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan					
	7.1	Terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel				
		7.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan			
				Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Program pengelolaan keuangan daerah
					Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	
				Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
					Persentase Penurunan SILPA	
				Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	



No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
				Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Program pengelolaan barang milik daerah
				Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program penyelenggaraan pengawasan
				Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi
					Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	
		7.1.2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah			
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	

No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	
				Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah berbasis kelitbangan yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	Program penelitian dan pengembangan daerah
		7.1.3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
				Meningkatnya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan	Persentase capaian realisasi pajak daerah	Program pengelolaan pendapatan daerah



No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
				Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan Pajak Daerah	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	
				Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	
		7.1.4	Meningkatnya kualitas ASN yang profesional dan berintegritas			
				Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Program kepegawaian daerah
				Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	
				Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	
				Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP bernilai baik	
				Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar. Manajerial dan Fungsional	Program pengembangan sumber daya manusia
				Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan,	Persentase Pelatihan dan Pendidikan yang Dilaksanakan	

No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
				perancangan, pengembangan dan evaluasi		
				Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	
				Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	
		7.1.5	Meningkatnya kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Daerah			
				Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Cakupan perlindungan dan jaminan sosial yang dilaksanakan	Program perlindungan jaminan sosial
				Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase PMKS di Luar Panti Sosial yang ditangani	Program rehabilitasi sosial
				Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	Program pendaftaran penduduk
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	
				Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak umur 0-18 tahun	Program pencatatan sipil
				Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat	Program pengelolaan arsip



No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
					bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	
		7.1.6	Meningkatnya pembangunan teknologi informasi			
				Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase jumlah PD yang melaksanakan diseminasi dan layanan informasi publik melalui website PPID	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase layanan Pengelolaan Aplikasi Informatika (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang sudah terintegrasi	Program pengelolaan aplikasi informatika
				Meningkatnya kelengkapan data statistik sektoral yg memenuhi prinsip standar SDI	Persentase Kelengkapan Data Statistik Sektoral yang memenuhi prinsip standar SDI	Program penyelenggaraan statistik sektoral
8	Menjadikan Desa Mandiri yang Mampu Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Tersedia					
	8.1	Meningkatnya kemandirian desa dengan memanfaatkan potensi lokal				
		8.1.1	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri			
				Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Program penataan desa
				Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Program peningkatan kerjasama desa



No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
				Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Program administrasi pemerintahan desa
					Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	
9	Meningkatkan Pelestarian Lingkungan serta Peningkatan Upaya Penanggulangan Mitigasi dan Bencana					
	9.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana				
		9.1.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			
				Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan
				Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Program Pengendalian, Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup
					Indeks Kualitas Udara	
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	
		9.1.2	Meningkatnya Kapasitas Daerah untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan kerentanan daerah akibat bencana			



No	Visi & Misi/Tujuan/Sasaran			Outcome	Indikator	Pogram Prioritas
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
				Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
				Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana dan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	

Dalam menentukan program prioritas, terdapat beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk capaian SDGs (Sustainable Development Goals). Menentukan **program prioritas daerah** yang selaras dengan **SDGs (Sustainable Development Goals)** berarti memastikan bahwa arah pembangunan daerah tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target pembangunan berkelanjutan global yang telah disepakati Indonesia di tingkat nasional. Keterkaitan ini ditunjukkan pada Tabel Berikut :



Tabel 3.7. Keterkaitan TPB/SDGs dengan Program Prioritas Daerah

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Indikator					Instansi Pelaksana
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(17)
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 1.2.1. Persentase Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.												
Kode dan Nama Program: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL												
Kode Kegiatan : 1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0001	Sub. Kegiatan : Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	15	15	15	15	15	Dinas Sosial
		Kode Sub Kegiatan: 1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	14	10	10	14	15	16	
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 1.4.1. Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.												
Kode dan Nama Program: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat												
Kode Kegiatan : 1.02.02.2.02	Nama Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 1.02.02.2.02.17	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	12	12	12	12	12	12	Dinas Kesehatan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 1.4.1. Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.												
Kode dan Nama Program: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL												
Kode Kegiatan : 1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0001	Sub. Kegiatan : Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	15	15	15	15	15	Dinas Sosial
		Kode Sub Kegiatan: 1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan	Orang	14	10	10	14	15	16	



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2024	Target Indikator					Instansi Pelaksana
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(17)
				Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota								
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 1.4.1. Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.												
Kode dan Nama Program: 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												
Kode Kegiatan: 1.03.03.2.01	Nama Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 1.03.03.2.01.28	Nama Sub Kegiatan: Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah RT yang mendapatkan akses pembangunan baru SPAM	Unit	100	0	200	250	300	350	Dinas Perkim
		Kode Sub Kegiatan: 1.03.03.2.01.32	Nama Sub Kegiatan: Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah RT yang mendapatkan akses Perluasan dan Rehabilitasi SPAM	RT	100	150	200	250	300	350	Dinas Perkim
Kode Kegiatan: 1.03.05.2.01	Nama Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 1.03.05.2.01.39	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah pengelolaan air limbah yang dibangun	Unit	800	60	800	900	1000	1000	Dinas Perkim
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 1.4.2. Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan: (1) Proporsi rumah tangga dengan rumah milik												
Kode dan Nama Program:												
Kode Kegiatan: QAA.U03	Nama Kegiatan: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan:	Jumlah Sertipikat yang terbit	Dokumen	2860	650	650	650	650	650	BPN
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 1.5.1. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang												
Kode dan Nama Program:												
Kode Kegiatan 1.05.03.2.03	Nama Kegiatan: Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kode Sub Kegiatan: 1.05.03.2.03.0003	Nama Sub Kegiatan: Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	Orang	29Orang	10 Orang	10 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	BPBD
		Kode Sub Kegiatan: 1.05.03.2.03.0002	Nama Sub Kegiatan: Respon Cepat darurat bencana kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan Paling Lama 1 x24 Jam Berdasarkan hasil	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2024	Target Indikator					Instansi Pelaksana
(1)				(2)	(3)	(4)	2025	2026	2027	2028	2029	(17)
				Dokumen laporan Kaji Cepat								
Kode dan Nama Program: 1.6.6. Penanganan Bencana												
Kode Kegiatan 1.6.6.2.01	Nama Kegiatan: Perlindungan Sosial, Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 1.6.6.2.01.0001	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota)	Orang	145	76	75	75	75	75	BPBD
		Kode Sub Kegiatan: 1.6.6.2.01.0002	Nama Sub Kegiatan: Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota)	Dokumen	NA	500	500	500	500	500	

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2024	Target Indikator					Instansi Pelaksana
(1)				(2)	(3)	(4)	2025	2026	2027	2028	2029	(17)
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 2.2.1 Prevalensi Ketidacukupan konsumsi Pangan (Pravelencem of Undernourishment).												
Kode dan Nama Program:												
Kode Kegiatan : 1.02.02.2.02	Nama Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	2	3	3	4	5	5	Dinas Kesehatan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 2.2.2. Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita												
Kode dan Nama Program:												
Kode Kegiatan : 1.02.02.2.02	Nama Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	Dokumen	2	3	3	4	5	5	Dinas Kesehatan



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Indikator					Instansi Pelaksana	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kesehatan Gizi Masyarakat									
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 2.a.1. Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah													
Kode dan Nama Program: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	7	5	5	5	5	5	Dinas Pertanian	
		3.27.02.2.01.0003	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	0	17.975	17.975	17.975	17.975	17.975		
		3.27.02.2.01.0008	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang	0	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000		
		3.27.02.2.01.0009	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Batang	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
		3.27.02.2.01.0015	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	Ton	0	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45		
Kode dan Nama Program: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN													
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung yang Dibangun	Unit	0	0	0	5	5	5		
		3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	19	46	30	30	30	30		
		3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi	Unit	2	3	3	3	3	3		



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Indikator					Instansi Pelaksana
(1)				(2)	(3)	(4)	2025	2026	2027	2028	2029	(17)
			Pemeliharaan DAM Parit	dan Dipelihara								
		3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	3	1	1	1	1	
		3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi	Unit	18	16	10	10	10	10	

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Indikator					Instansi Pelaksana
(1)				(2)	(3)	(4)	2025	2026	2027	2028	2029	(17)
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 3.1.2. roporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih												
Kode dan Nama Program: 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat												
Kode Kegiatan : 1.02.02.2.02	Nama Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 1.02.02.2.02.02	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapat Pelayanan Sesuai Standart	Orang	3775	3850	3927	4005	4085	4276	
		3.27.02.2.01.0008	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah Bibit Kopi Yang Dibagikan	Batang	100.000	100.000	110.000	100.000	110.000	110.000	
		3.27.02.2.01.0009	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah Bibit Cabai Merah Yang Dibagikan	Ha	15	15	20	15	20	20	
		3.27.02.2.01.0015	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah Bibit Bawang Merah Yang Dibagikan	Ha	2,3	2,3	3	2,3	3	3	
				Penangkar Bawang Merah Yang Dikembangkan	Ha	1,5	1,5	2	1,5	2	2	



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline) 2024	Target Indikator					Instansi Pelaksana
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(17)
				Jumlah Bibit Bawang Merah Yang Dibagikan	Ha	2,3	2,3	3	2,3	3	3	
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 3.3.3. Kejadian Malaria per 1000 orang												
Kode dan Nama Program: 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat												
Kode Kegiatan : 1.02.02.2.02	Nama Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 1.02.02.2.02.42	Nama Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria	Orang	963	963	997	1032	1068	1105	Dinas Kesehatan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 3.3.5. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.												
Kode dan Nama Program: 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat												
Kode Kegiatan : 1.02.02.2.02	Nama Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 1.02.02.2.02.25	Nama Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	12	12	12	12	12	12	Dinas Kesehatan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 3.4.2. Angka kematian dari percobaan bunuh diri.												
Kode dan Nama Program: 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat												
Kode Kegiatan : 1.02.02.2.02	Nama Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 1.02.02.2.02.18	Nama Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	5	5	5	5	5	5	Dinas Kesehatan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 3.6.1. Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas												
Kode dan Nama Program:												
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan		Jiwa	37	0	0	0	0	0	Polres
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 3.8.2.a. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).												
Kode dan Nama Program: 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat												
Kode Kegiatan : 1.02.02.2.02	Nama Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 1.02.02.2.02.26	Nama Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	12	12	12	12	12	12	Dinas Kesehatan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 3.a.1. Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.												
Kode dan Nama Program: 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat												
		Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan		Orang	10712	11247	11747	12747			



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Indikator					Instansi Pelaksana
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(17)
Kode Kegiatan : 1.02.02.2.02	Nama Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						12747	13247	Dinas Kesehatan
Kode Kegiatan : 1.02.02.2.02	Nama Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 1.02.02.2.02.18	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	5	5	5	5	5	5	Dinas Kesehatan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 3.c.1. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.												
Kode dan Nama Program: Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan												
Kode Kegiatan : 1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 1.02.03.2.02.0001	Nama Sub Kegiatan: Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
Kode Kegiatan : 1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 1.02.03.2.02.0002	Nama Sub Kegiatan: Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Dokumen	1817	1817	1842	1862	1892	1915	Dinas Kesehatan

TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Indikator					Instansi Pelaksana
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(17)
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 4.4.1.a Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)												
Kode dan Nama Program: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												
Kode Kegiatan 1.01.02.2.02	Nama Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar	Kode Sub Kegiatan: 1.01.02.2.02.06	Nama Sub Kegiatan Pembangunan laboratorium	Jumlah Pembangunan ruang laboratorium komputer	Ruang	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Indikator					Instansi Pelaksana
(1)				(2)	(3)	(4)	2025	2026	2027	2028	2029	(17)
												dan Kebudayaan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 4.5.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/ MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.												
Kode dan Nama Program: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												
Kode Kegiatan 1.01.02.2.01	Nama Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar	Kode Sub Kegiatan:1.01.02.2.01.29	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	386	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kode Kegiatan 1.01.02.2.02	Nama Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kode Sub Kegiatan:1.01.02.2.02.58	Nama Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	80	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 4.6.1. Persentase remaja/ dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.												
Kode dan Nama Program:												
Kode Kegiatan 1.01.02.2.01	Nama Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar	Kode Sub Kegiatan:1.01.02.2.01.29	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	386	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kode Kegiatan 1.01.02.2.02	Nama Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar	Kode Sub Kegiatan:1.01.02.2.02.58	Nama Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	80	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 4.6.1.a. Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.												
Kode dan Nama Program:												
Kode Kegiatan 1.01.02.2.02	Nama Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar	Kode Sub Kegiatan:1.01.02.2.02.58	Nama Sub Kegiatan: Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMP	Jumlah bantuan Operasional Sekolah Tingkat SMP	paket	100	100	100	100	100	100	

TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Indikator					Instansi Pelaksana
(1)				(2)	(3)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(17)
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 5.b.1 Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.												



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Indikator					Instansi Pelaksana
(1)						(2)	(3)	2024	2025	2026	2027	
Kode dan Nama Program:												
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan :		Persen							Belum diakomodir

TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Indikator					Instak si Pelaks ana
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(17)
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 6.2.1. Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun												
Kode dan Nama Program: 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												
Kode Kegiatan:1.03.03.2.01	Nama Kegiatan:Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 1.03.03.2.01.28	Nama Sub Kegiatan: Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah SPAM yang dibangun	RT	100	150	200	250	300	350	Dinas Perki m
		Kode Sub Kegiatan:1.03.03.2.01.32	Nama Sub Kegiatan: Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah SPAM yang dibangun	Unit	100	150	200	250	300	350	
Kode Kegiatan: 1.03.05.2.01	Nama Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 1.03.05.2.01.39	Nama Sub Kegiatan:Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah pengelolaan air limbah yang dibangun	RT	800	60	800	900	1000	1000	
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 6.2.1. Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun												
Kode dan Nama Program: 2.11.03 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												
Kode Kegiatan: : 1.02.02.2.02	Nama Kegiatan: : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 1.02.02.2.02.17	Nama Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokume n	12	12	12	12	12	12	Dinas Keseh atan



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Indikator					Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(17)

TUJUAN 7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Indikator					Instansi Pelaksana
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(17)
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 7.1.2.b Rasio penggunaan gas rumah tangga												
Kode dan Nama Program:												
Kode Kegiatan: 4.01.03.2.1	Nama Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kode Sub Kegiatan: 4.01.03.2.01.0002	Nama Sub Kegiatan: Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	40	40	40	40	40	40	Bagian Ekonomi

TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Indikator					Instansi Pelaksana
(1)				(2)	(3)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(17)
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 8.1.1. Laju pertumbuhan PDB per kapita.												
Kode dan Nama Program : 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN												
Kode Kegiatan : 1 04 03 2.03	Nama Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kode Sub Kegiatan : 1 04 03 2.03 03	Nama Sub Kegiatan : Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Persen	438	15	20	30	40	50	Dinas Perki m
Kode Kegiatan: 1.03.05.2.01	Nama Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 1.03.05.2.01.39	Nama Sub Kegiatan:Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah pengelolaan air limbah yang dibangun	Dokume n	800	60	800	900	1000	1000	
Kode dan Nama Program : 2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa												



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Indikator					Instansi Pelaksana
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(17)
Kode Kegiatan : 2.13.04.2.01	Nama Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kode Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0008	Nama Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa	Dokumen	50	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi
Kode dan Nama Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA												
Kode Kegiatan : 1 04 03 2.03	Nama Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kode Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0003	Nama Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	2	2	2	2	2	Dinas Ketahanan Pangan
		Kode Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	55	55	60	65	70	75	
		Kode Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi	Ha	1	1	1	1	1	1	
Kode dan Nama Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN												
Kode Kegiatan: 3.27.02.2.06	Nama Kegiatan : Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kode Sub Kegiatan : 3.27.02.2.06.0003	Nama Sub Kegiatan : Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ekor	500	500	5300	5500	5700	5900	Dinas Ketahanan Pangan
Kode dan Nama Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN												
Kode Kegiatan: 3.27.03.2.02	Nama Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian	Kode Sub Kegiatan: 3.27.03.2.02.0009	Nama Sub Kegiatan: Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4	-	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan
Kode dan Nama Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA												



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Indikator					Instansi Pelaksana
(1)				(2)	(3)	2024 (4)	2025 (5)	2026 (6)	2027 (7)	2028 (8)	2029 (9)	ana (17)
Kode Kegiatan: 3.27.03.2.02	Nama Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 3.26.02.2.02.0004	Nama Sub Kegiatan: Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			7	8	9	10	11	12	Dinas Pariwisata
Kode Kegiatan: 3.27.03.2.02	Nama Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 3.26.02.2.03.0002	Nama Sub Kegiatan: Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			2	3	3	3	3	3	
Nama Kegiatan : 8.1.1.a PDRB Per Kapita												
Kode dan Nama Program : 1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air												
Kode Kegiatan: 1.03.02.2.02	Nama Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0014	Nama Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	m'	6157	2836	8246	2856	2866	2876	Dinas PUTR
Kode dan Nama Program : 1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan												
Kode Kegiatan: 1.03.05.2.01	Nama Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 1.03.10.2.01.0032	Nama Sub Kegiatan: Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	m'	1292	852	862	872	882	892	Dinas PUTR
		Kode Sub Kegiatan: 1.03.10.2.01.0033	Nama Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan Rekonstruksi Jalan	m'	20088	7954	7964	7974	7984	7994	
		Kode Sub Kegiatan: 1.03.10.2.01.0039	Nama Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jembatan	Jumlah unit jembatan yang direhabilitasi	unit	1	0	0	0	0	0	
			Nama Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan	Jumlah unit jembatan yang dibangun	unit	0	2	2	2	2	2	
		Kode Sub Kegiatan: 1.03.10.2.01.0044	Nama Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	m'	9384	1339	1349	1359	1369	1379	

TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI DAN TERSTRUKTUR



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Indikator					Instansi Pelaksana
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(17)
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Indikator					Instansi Pelaksana
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(17)
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
Nama Kegiatan : 9.2.1 Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.												
Kode Kegiatan :	Nama Kegiatan :	Kode Sub Kegiatan :	Nama Sub Kegiatan :									Belum diakhiri
Nama Kegiatan : 9.2.1 Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.												
Kode dan Nama Program :												
Kode Kegiatan :	Nama Kegiatan :	Kode Sub Kegiatan :	Nama Sub Kegiatan :									Belum diakhiri
Nama Kegiatan : 9.c.1 Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband												
Kode dan Nama Program :												
Kode Kegiatan :	Nama Kegiatan :	Kode Sub Kegiatan :	Nama Sub Kegiatan :									Belum diakhiri

TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Indikator					Instansi Pelaksana
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(17)
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 10.1.1.a. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.												
Kode Kegiatan : 1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kode Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0001	Sub. Kegiatan : Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	15	15	15	15	15	Dinas Sosial



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Indikator					Instansi Pelaksana
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(17)
		1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	14	10	10	14	15	16	

TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Indikator					Instansi Pelaksana
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(17)
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 11.1.1.a. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.												
Kode dan Nama Program: 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN												
Kode Kegiatan 1.04.03.2.03	Nama Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kode Sub Kegiatan: 1.04.03.2.03.03	Nama Sub Kegiatan: Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah peningkatan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Layak Huni	RT	438	20	30	40	50	60	Dinas Perkim
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 11.5.1. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.												
Kode dan Nama Program:												
Kode Kegiatan 1.05.03.2.03	Nama Kegiatan: Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kode Sub Kegiatan: 1.05.03.2.03.0003	Nama Sub Kegiatan: Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	Orang	a. Korban meninggal dan hilang=0,0007; b. korban terluka=0,000018; c. korban mengungsi=0,001293	a. Korban meninggal dan hilang=0,00006; b. korban terluka=0,000017; c. korban mengungsi=0,00283	a. Korban meninggal dan hilang=0,00005; b. korban terluka=0,00005; c. korban mengungsi=0,00283	a. Korban meninggal dan hilang=0,00005; b. korban terluka=0,00005; c. korban mengungsi=0,00283	a. Korban meninggal dan hilang=0,00005; b. korban terluka=0,00005; c. korban mengungsi=0,00283	a. Korban meninggal dan hilang=0,00005; b. korban terluka=0,00005; c. korban mengungsi=0,00283	BPBD
		Kode Sub Kegiatan: 1.05.03.2.03.0002	Nama Sub Kegiatan: Respon Cepat darurat Bencana kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan Paling Lama 1 x24 Jam Berdasarkan hasil Dokumen laporan Kaji Cepat	Dokumen							BPBD



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Indikator					Instansi Pelaksana
							2024	2025	2026	2027	2028	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(17)
								ngsi=0,00005	ngsi=0,00005	ka=0,00005; c. korban meninggal=0,00005	ka=0,00005; c. korban meninggal=0,00005	
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 11.7.2 Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).												
Kode dan Nama Program:												
Kode Kegiatan: 2.08.07.2.02	Nama Kegiatan: Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kode Sub Kegiatan: 2.08.07.2.02.0013	Nama Sub Kegiatan: Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	50	60	70	80	Dinas P2KB P3A

TUJUAN 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Indikator					Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(17)
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH									

TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Indikator					Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(17)



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Indikator					Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(17)
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH									

TUJUAN 14 MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Indikator					Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(17)
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH									

TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Indikator					Instansi Pelaksana
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(17)
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH									

TUJUAN 16 PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Indikator					Instansi Pelaksana
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(17)
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.6.1. Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.												
Kode dan Nama Program: PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH												
Kode Kegiatan: 5.02.02.2.01	Nama Kegiatan:Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kode Sub Kegiatan: 5.02.02.2.01.0011	Nama Sub Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	BKAD
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.6.1.a. Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).												
Kode dan Nama Program:												



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Indikator					Instansi Pelaksana
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(17)
Kode Kegiatan: 5.02.02.2.03	Nama Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah	Kode Sub Kegiatan: 5.02.02.2.03.0004	Nama Sub Kegiatan: Konsolidasi laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Persen	3	3	3	3	3	3	BKAD
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.6.1.b. Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).												
Kode dan Nama Program: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA												
Kode Kegiatan: 4.01.01.2.13	Nama Kegiatan: Penataan Organisasi	Kode Sub Kegiatan: 4.01.01.2.13.03	Nama Sub Kegiatan: Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Bagian Organisasi
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.6.1.c. Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B												
Kode dan Nama Program: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA												
Kode Kegiatan: 4.01.01.2.13	Nama Kegiatan: Penataan Organisasi	Kode Sub Kegiatan: 4.01.01.2.13.03	Nama Sub Kegiatan: Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Bagian Organisasi
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.6.2.a Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).												
Kode dan Nama Program: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA												
Kode Kegiatan: 4.01.01.2.13	Nama Kegiatan: Penataan Organisasi	Kode Sub Kegiatan: 4.01.01.2.13.02	Nama Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	2	2	2	2	2	2	Bagian Organisasi
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.9.1. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.												
Kode dan Nama Program: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL												
Kode Kegiatan	Nama Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil	Kode Sub Kegiatan: 2.12.03.2.01.0001	Nama Sub Kegiatan: Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atasPelaporan Peristiwa penting	Terlaksananya pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen	98,01	98,05	98,7	99	99	99	DukC apil
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.9.1.a. Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.												
Kode dan Nama Program: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL												
Kode Kegiatan: 2.12.03.2.01	Nama Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil	Kode Sub Kegiatan: 2.12.03.2.01.0001	Nama Sub Kegiatan: Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atasPelaporan Peristiwa penting	Terlaksananya pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen	98,01	98,05	98,7	99	99	99	DukC apil



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Indikator					Instansi Pelaksana
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(17)
		Kode Sub Kegiatan: 2.12.03.2.01.0002	Nama Sub Kegiatan: Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Terselenggaranya Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan	4	4	4	4	4	4	
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 16.9.1.b. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.												
Kode dan Nama Program: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL												
Kode Kegiatan: 2.12.03.2.01	Nama Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil	Kode Sub Kegiatan: 2.12.03.2.01.0001	Nama Sub Kegiatan: Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atasPelaporan Peristiwa penting	Terlaksananya pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen	98,01	98,05	98,7	99	99	99	DukC apil
Kode Kegiatan: 2.12.03.2.02	Nama Kegiatan: Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kode Sub Kegiatan: 2.12.03.2.02.0004	Nama Sub Kegiatan: Pelayanan Secara aktif Pendaftaran Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Terselenggaranya Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan	4	4	4	4	4	4	
		Kode Sub Kegiatan: 2.12.03.2.02.0006	Nama Sub Kegiatan: Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Terselenggaranya Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan	4	4	4	4	4	4	

TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Indikator					Instansi Pelaksana
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(17)
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 17.1.1. Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.												
Kode dan Nama Program: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH												
Kode Kegiatan: 5.02.04.2.01	Nama Kegiatan: Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kode Sub Kegiatan: 5.02.04.2.01.0001	Nama Sub Kegiatan: Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2	3	2	2	2	3	Bapenda



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Target Indikator					Instansi Pelaksana (17)
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		Kode Sub Kegiatan:5.02.04.2.01.0002	Nama Sub Kegiatan:Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	3	3	3	3	3	3	
		Kode Sub Kegiatan:5.02.04.2.01.0003	Nama Sub Kegiatan:Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1	1	1	1	1	1	
Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 17.1.1.a. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.												
Kode dan Nama Program: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH												
Kode Kegiatan: 5.02.04.2.01	Nama Kegiatan: Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kode Sub Kegiatan:5.02.04.2.01.0010	Nama Sub Kegiatan: Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	3	3	3	3	3	3	Bapenda
Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.Kode dan Nama Indikator TPB/SDGs: 17.1.2.												
Kode dan Nama Program: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH												
Kode Kegiatan: 5.02.04.2.01	Nama Kegiatan: Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kode Sub Kegiatan:5.02.04.2.01.0010	Nama Sub Kegiatan: Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	3	3	3	3	3	3	Bapenda



Tabel 3.8. Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Bersama Mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara yang Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan				
1	Memajukan Ekonomi Rakyat yang Inklusif dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat			
	1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat		
	1.1.1	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	1 Meningkatkan kemudahan berusaha dan daya tarik investasi di Kabupaten Tapanuli Utara	1 Pengembangan kawasan investasi potensial serta daya tarik investasi daerah
				2 Pemberian insentif pada sektor prioritas pembangunan daerah
	1.1.2	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	1 Memberdayakan UMKM berbasis potensi lokal melalui kelembagaan dan jaringan usaha	1 Peningkatan kemudahan akses pembiayaan bagi usaha yang mengedepankan potensi lokal
				2 Pemberian dukungan terhadap kewirausahaan dan digitalisasi bisnis
	1.1.3	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	1 Mendorong hilirisasi produk unggulan Kabupaten Tapanuli Utara	1 Pengembangan sentra produk unggulan berorientasi pasar menuju ekspor
	1.1.4	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	1 Meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar sehingga memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik	1 Pengembangan kompetensi dan keterampilan kerja melalui Balai Latihan Kerja
				2 Penguatan kolaborasi dengan dunia usaha, industri dan perguruan tinggi untuk ekosistem ketenagakerjaan
	1.1.5	Meningkatnya daya saing industri	1 Memperkuat ekosistem daerah dalam mendukung IKM	1 Pengembangan sentra IKM terintegrasi dengan keunggulan daerah



No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				2 Penguatan keterhubungan aksesibilitas industri lokal menuju pasar luas.
2	Memajukan Ekonomi Melalui Pertanian yang Maju dan Berteknologi yang Mampu Memberikan Produktivitas yang Tinggi			
	2.1	Meningkatnya produktivitas pertanian		
	2.1.1	Meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor Pertanian	1 Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Produksi	1 Mengadopsi teknologi pertanian modern
				2 Penyediaan benih unggul dan input pertanian berkualitas
	2.1.2	Meningkatnya PDRB (ADHB) sub sektor Perikanan	1 Pengembangan Rantai Nilai Perikanan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	1 Membangun ekosistem perikanan yang terintegrasi
	2.1.3	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	1 Meningkatkan produksi pangan lokal berkelanjutan dan penguatan pola pangan harapan	1 Penguatan peran koperasi tani dalam mengembangkan lumbung pangan desa di Tapanuli Utara
				2 Perbaiki pola pangan bergizi menuju pola pangan harapan
				3 Penguatan infrastruktur distribusi pangan ke seluruh daerah
3	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata. Pencegahan Stunting serta Peningkatan Peran Generasi Muda dan Perempuan dalam Pembangunan			
	3.1	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang responsif gender		
	3.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1 Memperkuat literasi dasar masyarakat	1 Pelaksanaan gerakan literasi sekolah dan masyarakat melalui akses baca gratis dan terjangkau
				2 Penguatan kolaborasi untuk memperkuat pembelajaran literasi bersama orang tua dari lingkungan keluarga
			2 Memperkuat akses pendidikan setara dan murah bagi seluruh masyarakat	1 Perwujudan sekolah gratis dan berkualitas di seluruh wilayah administrasi
				2 Pemberian beasiswa daerah untuk mendukung pendidikan masyarakat
	3.1.2	Meningkatnya Kualitas dan Cakupan	1 Meningkatkan pelayanan kesehatan dan	1 Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat di



No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Layanan Kesehatan Masyarakat	perilaku preventif hidup sehat	masyarakat
				2 Penguatan peran Puskesmas untuk pelayanan kesehatan primer dan tindakan awal kesehatan
	3.1.3	Meningkatnya kualitas pembangunan kepemudaan	1 Mengembangkan bakat masyarakat melalui pendidikan non formal dan keolahragaan	1 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat
				2 Pemberian fasilitas temu pemuda dalam ruang kreatif bersama
	3.1.4	Meningkatnya Kesetaraan Gender	1 Meningkatkan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi, sosial dan politik	1 Peningkatan bantuan usaha perempuan melalui akses permodalan
				2 Peningkatan kapasitas dan daya saing perempuan
4	Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Berbasis Kelestarian Lingkungan dan Tanggap Risiko Bencana			
	4.1	Meningkatnya layanan infrastruktur dasar yang berkelanjutan		
	4.1.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	1 Meningkatkan pemerataan pembangunan layanan infrastruktur dasar	1 Peningkatan cakupan layanan air minum aman dengan sanitasi baik ke seluruh masyarakat
				2 Peningkatan kualitas akses internet dan seluler hingga tidak ada lagi blank spot daerah
				3 Penyediaan akses listrik ke seluruh penjuru desa
	4.1.2	Meningkatnya Pemenuhan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	1 Meningkatkan kualitas hunian masyarakat menuju rumah layak huni	1 Pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni
				2 Pengembangan kawasan rumah layak huni dan tangguh bencana bersubsidi
5	Penerapan Kajian Budaya dan Kearifan Lokal Mulai dari Pendidikan Dasar untuk Memperkuat Karakter Terbaik Masyarakat sehingga Mampu Meminimalisir Efek Negatif Arus Cepat Informasi dan Media Sosial			
	5.1	Meningkatnya Pendidikan Berbasis Budaya dan		



No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Kearifan Lokal		
	5.1.1	Meningkatnya karakter siswa berbasis budaya dan kearifan lokal	1 Menanamkan nilai-nilai budaya dalam pendidikan anak	1 Pengembangan kurikulum pendidikan berbasis budaya dan kearifan lokal
	5.2	Terwujudnya Keluarga Berkualitas		
	5.2.1	Meningkatnya Pembangunan Keluarga.	1 Memperkuat keharmonisan keluarga melalui edukasi peran dan pendampingan keluarga.	1 Penguatan pelaksanaan bina keluarga sejak tingkat balita. 2 Pemberian fasilitas konseling keluarga dan layanan psikososial di setiap kecamatan
	5.2.2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat.	1 Memperkuat pertahanan masyarakat atas konflik sosial dan kriminal berbasis budaya damai dan tentram.	1 Pengoptimalan peran lintas sektor antara pemerintah dan forum kemasyarakatan untuk membina kehidupan bermasyarakat 2 Penguatan desa tangguh dengan Poskamling aktif untuk perlindungan dasar.
6	Pengembangan Kebudayaan Berdasarkan Kekayaan Budaya dan Kearifan Lokal			
	6.1	Terjaganya kelestarian budaya dan kearifan lokal serta Pengembangan Pariwisata		
	6.1.1	Terpeliharanya ekosistem kebudayaan.	1 Memperkuat pendidikan karakter dan budaya sejak dini.	1 Pengintegrasian muatan lokal budaya daerah dalam kurikulum daerah. 2 Pendirian museum budaya etnis lokal serta sanggar seni budaya Tapanuli Utara.
	6.1.2	Meningkatnya nilai tambah pariwisata melalui pengembangan industri kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang holistic.	1 Memperkuat ekosistem ekonomi kreatif bercirikan keunggulan daerah yang berbudaya.	1 Pengembangan destinasi wisata prioritas daerah bersama sektor ekonomi kreatif.
7	Memperkuat Reformasi Birokrasi. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan			
	7.1	Terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel		
	7.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.	1 Memperkuat sistem pemerintahan berbasis digital dengan layanan publik yang transparan dan melayani sepenuh	1 Penguatan integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di seluruh organisasi perangkat daerah.



No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			hati.	
				2 Penguatan dan pengendalian reformasi birokrasi secara berkala dan terukur.
	7.1.2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.	1 Memperkuat kualitas data yang akan dimanfaatkan dalam proses perencanaan daerah.	1 Pengoptimalan penggunaan SIPD dalam penyusunan dokumen perencanaan.
				2 Pengembangan basis data perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis spasial kewilayahan dan sektoral.
	7.1.3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Optimalisasi potensi ekonomi dan penguatan sistem pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 Inisiasi Sistem Pendapatan Daerah berbasis digital
	7.1.4	Meningkatnya kualitas ASN yang profesional dan berintegritas.	1 Mengembangkan kapasitas, kompetensi dan integritas ASN.	1 Pemberdayaan ASN berbasis meritokrasi dan kinerja.
				2 Peningkatan kompetensi ASN dalam pelaksanaan tugas-tugas daerah.
	7.1.5	Meningkatnya kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Daerah.	1 Reformasi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	1 Menetapkan dan menginternalisasikan budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat (<i>service excellence</i>).
				2 Mewajibkan pelatihan reguler terkait <i>soft skills</i> (komunikasi, empati, solusi masalah) dan <i>hard skills</i> (kompetensi teknis sesuai bidang layanan)
				3 Mengimplementasikan sistem manajemen kinerja yang transparan
			2 Penyederhanaan dan Standarisasi Tata Kelola Layanan	1 Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk setiap jenis layanan, mencakup persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, dan rincian biaya dan dipublikasikan secara luas.



No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				2 Melakukan evaluasi dan pemangkasan alur prosedur yang tidak perlu.
				3 Mengarahkan pada model pelayanan satu pintu atau terintegrasi untuk meminimalisir urusan di banyak dinas.
		3 Digitalisasi dan Inovasi Teknologi	1 Mendorong transformasi semua layanan yang memungkinkan ke format digital, dari permohonan hingga penerbitan dokumen	
			2 Membangun <i>database</i> terpusat yang terintegrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghindari pengulangan input data oleh masyarakat.	
			3 Menerapkan prinsip <i>Open Government</i> dengan menyediakan data publik yang mudah diakses untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.	
7.1.6	Meningkatnya pembangunan teknologi informasi.	1 Infrastruktur Digital yang Merata dan Andal.	1 Memastikan seluruh wilayah, termasuk area pedesaan dan terpencil (blank spot), terjangkau oleh jaringan internet berkualitas.	
			2 Meningkatkan kecepatan dan stabilitas koneksi internet di pusat-pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan.	
			3 Mendirikan titik-titik akses internet gratis dan pusat digital komunitas di lokasi strategis.	
		2 Tata Kelola Pemerintahan Digital (<i>Digital Governance</i>)	1 Mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi antar dinas untuk efisiensi dan pengambilan keputusan	



No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				berbasis data
				2 Mengubah layanan publik konvensional menjadi layanan online yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.
				3 Membangun sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pemerintah dan masyarakat dari ancaman siber.
		3 Pembangunan Masyarakat Digital (<i>Digital Society</i>)	1 Mengedukasi masyarakat tentang cara menggunakan teknologi secara bijak, aman, dan produktif, termasuk cara menghindari hoax dan penipuan online.	
			2 Mengintegrasikan teknologi digital ke dalam kurikulum dan metode pengajaran di sekolah-sekolah.	
8	Menjadikan Desa Mandiri yang Mampu Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Tersedia			
	8.1	Meningkatnya kemandirian desa dengan memanfaatkan potensi lokal.		
	8.1.1	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri.	1 Memperkuat pemberdayaan kelembagaan serta SDM Desa.	1 Penguatan BUMDes berbasis potensi keunggulan daerah khususnya pertanian, pariwisata dan budaya
				2 Penguatan kemitraan desa dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga lainnya untuk bersama membangun desa.
9	Meningkatkan Pelestarian Lingkungan serta Peningkatan Upaya Penanggulangan Mitigasi dan Bencana			
	9.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana.		
	9.1.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	1 Menyelenggarakan pembangunan dan	1 Pemberian insentif kepada praktik pembangunan



No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.	ramah lingkungan.
				2 Pembentukan regulasi pembangunan berbasis lingkungan yang ketat untuk menjaga kualitas udara, air dan permukaan tanah.
	9.1.2	Meningkatnya Kapasitas Daerah untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan keretakan daerah akibat bencana.	1 Memperkuat sistem peringatan dini dan pemetaan risiko bencana daerah.	1 Penguatan ketahanan bencana melalui peta rawan bencana serta rencana penanggulangan bencana.



3.3. Program Unggulan Kabupaten Tapanuli Utara

Program Unggulan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025–2029 dirancang sebagai instrumen utama pembangunan daerah yang selaras dengan visi jangka panjang Kabupaten Tapanuli Utara 2025–2045, serta mendukung agenda pembangunan nasional dan provinsi. Penyusunan program ini memperhatikan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara. Selain itu, program-program unggulan ini juga mengintegrasikan respons terhadap dinamika global, tantangan nasional, serta isu strategis daerah, sehingga mampu memperkuat daya saing, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan.

Untuk mempercepat terwujudnya dampak pembangunan yang nyata di Kabupaten Tapanuli Utara, Pemerintah Daerah merumuskan Program Unggulan Kabupaten yang berfungsi sebagai quick wins pembangunan. Program unggulan ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat secara cepat, efektif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi representasi implementasi dari sembilan misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Setiap program unggulan dirancang dengan prinsip konkret, strategis, dan berdampak langsung, baik dalam jangka pendek maupun menengah. Artinya, masyarakat dapat segera merasakan manfaat dari program tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas layanan, ketersediaan infrastruktur, peningkatan produktivitas ekonomi, maupun penguatan akses terhadap layanan dasar. Namun demikian, program unggulan tidak berhenti pada hasil sesaat, melainkan diposisikan sebagai fondasi bagi transformasi jangka panjang. Dengan begitu, pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara tidak hanya bersifat reaktif terhadap kebutuhan saat ini, tetapi juga proaktif dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan.

Dengan demikian, Program Unggulan Kabupaten Tapanuli Utara bukan sekadar kumpulan kegiatan prioritas, melainkan strategi percepatan pembangunan yang memadukan dampak jangka pendek dengan visi transformatif jangka panjang. Program ini akan menjadi katalisator perubahan, menghubungkan antara kondisi aktual masyarakat dengan cita-cita pembangunan daerah yang berkeadilan, sejahtera, dan berkelanjutan.

Melalui implementasi program unggulan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen untuk mempercepat pencapaian target pembangunan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendekatkan daerah pada kondisi ideal sebagaimana dicita-citakan dalam visi dan misi RPJMD.

Berikut adalah Program Unggulan Kabupaten beserta tujuan, dampak yang diharapkan dan ruang lingkup yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025–2029:



Peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Tapanuli Utara merupakan kunci utama dalam mendukung tercapainya ketahanan pangan daerah maupun nasional. Kabupaten Tapanuli Utara pertanian merupakan sektor strategis yang tidak hanya berperan dalam menyediakan kebutuhan pangan sehari-hari masyarakat, tetapi juga menjadi tulang punggung perekonomian lokal serta sumber penghidupan utama bagi sebagian besar penduduk. Dengan produksi pertanian yang kuat, Kabupaten Tapanuli Utara dapat memastikan ketersediaan pangan yang cukup, mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar atau impor, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus mendorong tumbuhnya ekonomi daerah.

Ketahanan pangan yang terjamin akan menimbulkan dampak positif yang luas. Pertama, masyarakat memperoleh jaminan ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memadai, sehingga tercapai kesejahteraan dan kesehatan yang lebih baik. Kedua, petani sebagai pelaku utama di sektor pertanian mendapatkan nilai tambah yang lebih besar, baik melalui peningkatan produktivitas maupun harga jual yang lebih stabil. Ketiga, peningkatan produksi pertanian mendorong perputaran ekonomi lokal melalui kegiatan distribusi, perdagangan, hingga pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah. Dengan demikian, penguatan sektor pertanian sekaligus menjadi penggerak ekonomi rakyat yang inklusif dan berkelanjutan.

Upaya peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dicapai melalui berbagai strategi terpadu, antara lain:

1. **Penggunaan teknologi dan bibit unggul**

Pemanfaatan teknologi pertanian modern, seperti mekanisasi lahan, irigasi tetes, sensor tanah, hingga penerapan *smart farming*, akan meningkatkan efisiensi dan hasil panen. Selain itu, penyediaan bibit unggul yang berkualitas dan tahan terhadap hama, penyakit, serta perubahan iklim sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan stabilitas hasil pertanian.

2. **Praktik pertanian berkelanjutan**

Peningkatan produksi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, praktik pertanian ramah lingkungan, seperti pengendalian hama terpadu, pemupukan berimbang, konservasi tanah dan air, serta pengelolaan limbah organik, perlu diterapkan secara luas. Pendekatan ini tidak hanya menjaga produktivitas lahan dalam jangka panjang, tetapi juga melindungi ekosistem yang menopang kehidupan masyarakat.

3. **Diversifikasi tanaman**

Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan komoditas pokok seperti padi atau jagung, melainkan juga ketersediaan berbagai jenis tanaman lain yang dapat menjadi sumber pangan alternatif. Diversifikasi tanaman, termasuk hortikultura, palawija, umbi-umbian, dan tanaman lokal khas Tapanuli Utara, akan memperkaya pilihan pangan masyarakat, memperbaiki gizi, sekaligus mengurangi risiko gagal panen akibat ketergantungan pada satu jenis komoditas.



4. Pengembangan infrastruktur penyimpanan dan pengolahan pangan

Salah satu persoalan utama yang dihadapi sektor pertanian adalah tingginya kehilangan hasil panen akibat keterbatasan teknologi penyimpanan dan pengolahan. Oleh karena itu, pembangunan lumbung pangan modern, gudang penyimpanan berpendingin (*cold storage*), fasilitas pengeringan, serta pengolahan hasil pertanian menjadi produk olahan menjadi langkah penting. Infrastruktur ini tidak hanya mengurangi kerugian pascapanen, tetapi juga mampu meningkatkan nilai tambah produk pertanian, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing komoditas lokal.

Dengan kombinasi strategi tersebut, peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Tapanuli Utara akan memberikan dampak yang signifikan. Ketersediaan pangan yang terjamin akan memperkuat ketahanan pangan daerah, kesejahteraan petani akan meningkat melalui pendapatan yang lebih stabil, dan ekonomi lokal akan terdorong melalui rantai nilai pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan. Lebih jauh, keberhasilan dalam meningkatkan produksi pertanian juga akan menempatkan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai salah satu pusat pangan di kawasan Tapanuli Raya, sekaligus mendukung agenda ketahanan pangan nasional.

1 SARJANA DI SETIAP KELUARGA

Dalam upaya meningkatkan akses dan kesempatan masyarakat terhadap pendidikan tinggi, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara meluncurkan program strategis bertajuk “Satu Sarjana di Setiap Keluarga”. Program ini hadir sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan memastikan bahwa setiap keluarga memiliki setidaknya satu anak yang berhasil menempuh pendidikan hingga tingkat sarjana.

Program ini dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak dari berbagai latar belakang, khususnya dari keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi, agar tetap memiliki peluang meraih pendidikan tinggi. Pemerintah menyadari bahwa salah satu hambatan terbesar masyarakat dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi adalah masalah biaya. Oleh karena itu, melalui program ini, dukungan akan difokuskan pada keluarga-keluarga kurang mampu agar anak-anak mereka tidak terhenti hanya sampai jenjang sekolah menengah, tetapi dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Lebih dari sekadar bantuan finansial, program ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat belajar, meningkatkan motivasi generasi muda, serta mengubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan tinggi sebagai investasi masa depan. Dengan hadirnya seorang sarjana di setiap keluarga, terbuka peluang yang lebih besar bagi peningkatan taraf hidup, perbaikan ekonomi keluarga, serta lahirnya agen-agen perubahan yang akan membawa Tapanuli Utara menuju kemajuan.

Untuk mewujudkan program ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menyadari perlunya kerja sama dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.



Kolaborasi akan dilakukan melalui dukungan dari Pemerintah Pusat, keterlibatan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), serta partisipasi berbagai pihak melalui donasi dan beasiswa. Dengan demikian, program ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah semata, tetapi juga gerakan bersama seluruh elemen masyarakat dalam mencetak generasi emas Tapanuli Utara.

Secara keseluruhan, “Satu Sarjana di Setiap Keluarga” merupakan langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan, memperluas akses pendidikan, serta memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dengan pendidikan tinggi sebagai fondasi, diharapkan generasi muda Tapanuli Utara dapat tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun bangsa.

INTERNET MASUK DESA (IMADA)

Program Internet Masuk Desa (IMADA) merupakan salah satu Program Unggulan Kabupaten Tapanuli Utara yang dirancang untuk mempercepat pemerataan pembangunan berbasis digital di wilayah pedesaan. Program ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan nyata masyarakat desa dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin terhubung secara global. Kehadiran internet di desa bukan hanya menghadirkan akses informasi, tetapi juga membuka peluang baru di berbagai sektor kehidupan, mulai dari peningkatan ekonomi, pariwisata, pelayanan publik, hingga pendidikan. Dengan demikian, IMADA tidak hanya menjadi program infrastruktur digital, tetapi juga instrumen strategis untuk mendorong transformasi sosial-ekonomi masyarakat pedesaan.

Di bidang ekonomi, IMADA memberikan dampak signifikan melalui pengembangan perdagangan daring (e-commerce) dan pemanfaatan platform digital untuk memasarkan produk-produk lokal. Petani, pengrajin, pelaku UMKM, serta kelompok usaha masyarakat dapat menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas tanpa terikat batas geografis. Produk khas Tapanuli Utara seperti kopi, tenun ulos, hasil pertanian, maupun kuliner tradisional dapat dipromosikan secara lebih efektif melalui internet. Dengan terbukanya akses pasar digital, daya saing produk lokal meningkat, pendapatan masyarakat desa bertambah, dan kesejahteraan petani serta pelaku usaha kecil semakin terangkat.

Pada sektor pelayanan publik dan administrasi pemerintahan desa, IMADA mendorong digitalisasi layanan sehingga tata kelola desa menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Sistem informasi desa yang berbasis digital memungkinkan pengelolaan data kependudukan, keuangan, serta pelayanan administrasi berjalan lebih tertib dan akuntabel. Masyarakat dapat mengakses layanan administratif dengan mudah, tanpa harus menghadapi birokrasi berbelit atau perjalanan jauh ke pusat pemerintahan. Digitalisasi ini sekaligus memperkuat prinsip *good governance* di tingkat desa serta mendekatkan layanan publik kepada masyarakat.

Sementara itu, di sektor pariwisata, program IMADA membuka peluang promosi destinasi wisata alam, budaya, dan sejarah Tapanuli Utara secara lebih luas.



Keindahan Danau Toba, keunikan situs budaya, serta pesona desa wisata dapat dipublikasikan melalui media sosial, website, dan berbagai platform digital. Promosi pariwisata yang lebih masif dan terstruktur akan menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke desa-desa di Tapanuli Utara. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata, tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal yang menjadi daya tarik utama daerah.

Di sektor pendidikan dan literasi masyarakat, IMADA menghadirkan akses yang lebih luas terhadap sumber pengetahuan dan pembelajaran daring. Pelajar di desa dapat mengikuti kursus digital, mengakses materi pembelajaran online, dan memperluas wawasan mereka tanpa harus selalu bergantung pada fasilitas pendidikan di perkotaan. Internet juga membuka ruang kreativitas baru bagi generasi muda desa untuk mengembangkan keterampilan digital, seperti desain grafis, pemasaran digital, hingga pemrograman. Hal ini diharapkan dapat menyiapkan sumber daya manusia desa yang lebih kompetitif di era ekonomi berbasis pengetahuan.

Meskipun membawa banyak manfaat, program IMADA masih menghadapi beberapa tantangan utama, seperti keterbatasan literasi digital masyarakat, ketersediaan perangkat pendukung, serta pemerataan akses internet di seluruh wilayah desa. Tidak semua lapisan masyarakat mampu memanfaatkan internet untuk kegiatan produktif, sehingga diperlukan program pendampingan berupa pelatihan literasi digital, penguatan kapasitas SDM, serta dukungan sarana prasarana yang memadai. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan lainnya perlu memastikan bahwa manfaat internet benar-benar inklusif dan dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat desa.

Dengan desain dan implementasi yang tepat, IMADA akan menjadi pengungkit pembangunan desa yang mampu menghadirkan perubahan nyata. Program ini tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses informasi, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem digital yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, Internet Masuk Desa (IMADA) akan mempercepat terwujudnya visi Kabupaten Tapanuli Utara sebagai daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera, sekaligus siap menghadapi tantangan era digital.

DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK

Digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu langkah transformasi penting dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Perubahan ini ditujukan untuk beralih dari sistem layanan konvensional yang manual, lambat, dan seringkali berbelit-belit, menuju sistem yang memanfaatkan teknologi digital dan jaringan internet dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Dengan adanya digitalisasi, pelayanan publik diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, sekaligus lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang tinggal di pusat kabupaten maupun di wilayah pedesaan.

Tujuan utama dari digitalisasi pelayanan publik adalah menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan. Proses yang dulunya memerlukan waktu



lama, banyak dokumen fisik, dan tatap muka yang berulang, kini dapat dipangkas melalui sistem berbasis aplikasi atau portal layanan daring. Masyarakat cukup mengakses layanan melalui perangkat digital untuk mengurus dokumen administrasi, perizinan, atau kebutuhan lain tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke kantor pemerintahan. Efisiensi ini bukan hanya menghemat waktu dan biaya masyarakat, tetapi juga mengurangi beban administrasi pada aparatur pemerintah daerah.

Selain itu, digitalisasi akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di Tapanuli Utara. Sistem berbasis digital memastikan bahwa setiap permohonan layanan dapat ditelusuri secara jelas, mulai dari proses pengajuan hingga penyelesaian. Masyarakat dapat mengetahui status layanannya secara real time, sehingga meminimalisir potensi praktik pungutan liar atau diskriminasi layanan. Bagi pemerintah daerah, sistem ini menjadi instrumen evaluasi kinerja aparatur, karena data pelayanan terekam dengan baik dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan maupun peningkatan mutu layanan di masa mendatang.

Lebih jauh, digitalisasi pelayanan publik juga menghadirkan kemudahan akses bagi masyarakat. Dengan adanya layanan yang terintegrasi, masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan administratif, seperti layanan kependudukan, perizinan usaha, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan sosial, dalam satu sistem terpadu. Hal ini sejalan dengan prinsip one stop service yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasi tanpa harus berpindah dari satu instansi ke instansi lainnya.

Bagi Kabupaten Tapanuli Utara, implementasi digitalisasi pelayanan publik memiliki dampak strategis. Pertama, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, karena layanan yang diberikan lebih cepat, adil, dan transparan. Kedua, memperbaiki iklim investasi dan dunia usaha, karena perizinan yang lebih sederhana dan transparan akan menarik minat investor. Ketiga, mendukung pengembangan desa dan wilayah terpencil, karena dengan dukungan internet, masyarakat desa dapat mengakses layanan yang sama dengan masyarakat kota, sehingga mengurangi kesenjangan layanan antarwilayah.

Meski demikian, digitalisasi pelayanan publik tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Masih terdapat desa yang memiliki keterbatasan akses internet, rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat, serta kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur dalam mengoperasikan sistem berbasis teknologi. Oleh karena itu, keberhasilan program ini harus didukung dengan pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang merata, program pelatihan literasi digital, serta penguatan komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dengan upaya yang konsisten, digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Tapanuli Utara akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju pemerintahan yang modern, bersih, dan berorientasi pada pelayanan. Transformasi ini bukan hanya sekadar inovasi teknologi, melainkan bagian dari strategi besar untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat.



RUMAH KREASI ANAK MUDA DAN FASILITASI RUANG TERBUKA DI TIAP KECAMATAN

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus berupaya menciptakan ruang-ruang yang dapat mendorong pengembangan potensi masyarakat, khususnya generasi muda, sekaligus menyediakan fasilitas publik yang sehat dan ramah lingkungan. Dua program penting yang menjadi bagian dari strategi pembangunan sosial dan budaya daerah adalah pendirian Rumah Kreasi Anak Muda dan penyediaan Fasilitas Ruang Terbuka di tiap kecamatan.

Rumah Kreasi Anak Muda di Kabupaten Tapanuli Utara dirancang sebagai pusat aktivitas generasi muda yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi mereka untuk menyalurkan bakat, minat, serta kreativitas di berbagai bidang. Tempat ini menjadi wadah pengembangan diri melalui seni, musik, budaya, teknologi, literasi digital, hingga kewirausahaan. Melalui Rumah Kreasi, para anak muda didorong untuk mengekspresikan diri, mengasah keterampilan, dan menumbuhkan ide-ide inovatif yang dapat menjadi solusi bagi tantangan masa depan. Selain itu, Rumah Kreasi juga menjadi sarana interaksi dan kolaborasi antar pemuda, sehingga melahirkan jaringan sosial yang lebih kuat dan produktif. Dengan adanya wadah ini, diharapkan muncul generasi muda Tapanuli Utara yang berdaya saing, kreatif, serta mampu berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan daerah maupun nasional.

Sementara itu, Fasilitas Ruang Terbuka di tiap kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam menghadirkan ruang publik yang sehat, nyaman, dan inklusif. Fasilitas ini berupa taman, lapangan olahraga, alun-alun, serta area hijau yang dapat diakses masyarakat secara bebas untuk berbagai keperluan, mulai dari rekreasi keluarga, kegiatan olahraga, hingga sarana berkumpul dan berinteraksi sosial. Ruang terbuka tidak hanya berfungsi sebagai tempat aktivitas fisik dan hiburan, tetapi juga sebagai elemen penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Kehadiran taman dan area hijau, misalnya, dapat meningkatkan kualitas udara, memperindah wajah kota dan desa, serta mendukung pelestarian ekosistem lokal.

Kedua program ini memiliki dampak sosial yang sangat strategis. Rumah Kreasi Anak Muda berperan dalam menumbuhkan kreativitas dan produktivitas generasi muda, sedangkan fasilitas ruang terbuka publik memberikan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas masyarakat secara lebih luas. Sinergi keduanya mampu membentuk masyarakat yang sehat, produktif, kreatif, sekaligus memiliki ikatan sosial yang lebih erat. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga menyentuh aspek manusia dan sosial budaya secara menyeluruh.

Melalui implementasi program Rumah Kreasi Anak Muda dan Fasilitas Ruang Terbuka di setiap kecamatan, Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan visinya untuk menjadi daerah yang ramah anak muda, berwawasan lingkungan, serta menempatkan kesejahteraan sosial masyarakat sebagai prioritas utama pembangunan.



Program penanaman jutaan pohon durian di Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu upaya strategis untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan yang menyatukan aspek ekonomi, lingkungan, serta sosial-budaya. Durian sebagai komoditas unggulan tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi juga memberikan manfaat ekologis dan sosial yang luas jika dikelola secara terintegrasi.

Dari sisi ekonomi, pohon durian menghasilkan buah dengan nilai jual tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional. Kabupaten Tapanuli Utara berpotensi menjadi salah satu sentra durian yang mampu meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkuat posisi daerah dalam rantai pasok komoditas pertanian nasional. Selain itu, kayu durian yang berkualitas juga memiliki nilai guna dalam industri mebel dan kerajinan. Dengan adanya jutaan pohon durian, terbuka peluang pengembangan industri hilir berbasis durian, seperti produk olahan makanan (dodol, kue, es krim, minuman fermentasi), hingga inovasi produk farmasi dan kosmetik berbasis ekstrak durian. Hal ini dapat menjadi penggerak industri rumah tangga serta meningkatkan daya saing ekonomi lokal.

Dari perspektif lingkungan, penanaman jutaan pohon durian akan membantu memperbaiki kualitas ekosistem. Pohon durian berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida (CO₂) dan penghasil oksigen yang sangat penting untuk mitigasi perubahan iklim. Kehadiran hutan durian juga berkontribusi pada konservasi tanah dan air, mencegah erosi, serta menjaga kelembapan tanah. Lebih jauh, kebun durian yang luas mampu meningkatkan keanekaragaman hayati dengan menyediakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Hal ini sejalan dengan misi menjaga keseimbangan lingkungan dan mendorong sistem pertanian yang lebih berkelanjutan.

Sementara itu, dari sisi sosial-budaya, durian memiliki nilai kultural yang kuat. Kehadiran kebun durian dalam skala besar dapat memperkaya tradisi lokal melalui festival buah, wisata panen, maupun kegiatan kebersamaan berbasis budaya gotong royong. Program ini juga membuka peluang besar untuk menciptakan kawasan agroekowisata, di mana masyarakat dan wisatawan dapat menikmati pengalaman langsung mulai dari menanam, merawat, hingga memanen durian. Aktivitas tersebut akan memperkuat identitas daerah sebagai salah satu sentra durian, sekaligus memperluas lapangan kerja di sektor pariwisata dan jasa.

Manfaat lain yang tidak kalah penting adalah terbukanya jalan bagi pengembangan inovasi produk berbasis durian. Dengan dukungan riset dan teknologi, durian dapat diolah menjadi berbagai produk turunan bernilai tambah tinggi, baik untuk kebutuhan pangan maupun non-pangan. Hal ini akan memperkuat posisi masyarakat lokal dalam rantai produksi dan distribusi, sekaligus meningkatkan pendapatan rumah tangga petani secara signifikan.

Secara keseluruhan, penanaman jutaan pohon durian di Kabupaten Tapanuli Utara bukan hanya sebuah program pertanian, tetapi merupakan strategi besar yang menyatukan dimensi ekonomi, ekologi, dan budaya. Program ini diharapkan menjadi



salah satu motor penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus memperkuat identitas budaya lokal sebagai daerah agraris yang kreatif dan berdaya saing.

UMKM NAIK KELAS

Program UMKM Naik Kelas di Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah tulang punggung perekonomian daerah karena melibatkan banyak pelaku usaha rakyat dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun, sebagian besar UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan modal, akses pasar yang terbatas, manajemen usaha yang sederhana, hingga rendahnya pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, program UMKM Naik Kelas hadir untuk mendorong UMKM keluar dari jebakan usaha berskala kecil menuju usaha yang lebih produktif, inovatif, dan berdaya saing.

Kenaikan kelas UMKM bukan hanya berarti bertambahnya omzet, melainkan juga transformasi menyeluruh dalam berbagai aspek bisnis. Pertama, dari sisi produksi, UMKM didorong untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produknya melalui penggunaan peralatan modern, penerapan standar mutu, serta pemanfaatan bahan baku lokal yang berkelanjutan. Kedua, dari sisi pemasaran, UMKM diarahkan untuk memperluas jangkauan pasarnya, baik melalui strategi pemasaran konvensional maupun digital marketing, dengan memanfaatkan platform daring untuk menjangkau konsumen regional, nasional, bahkan internasional.

Ketiga, dalam hal pembiayaan, UMKM akan difasilitasi untuk memperoleh akses permodalan yang lebih luas dan terjangkau, baik melalui perbankan, lembaga keuangan mikro, maupun skema pembiayaan pemerintah seperti kredit usaha rakyat. Keempat, aspek manajemen sumber daya manusia juga menjadi perhatian, dengan memberikan pelatihan manajerial, peningkatan keterampilan kerja, serta penguatan literasi keuangan. Kelima, dari sisi legalitas usaha, UMKM akan diarahkan untuk memiliki perizinan yang lengkap dan sah, seperti NIB, sertifikasi halal, serta izin edar produk, sehingga lebih mudah memasuki pasar modern dan mengikuti program pemerintah.

Selain itu, penggunaan teknologi digital menjadi kunci utama dalam mendorong UMKM naik kelas. Pemanfaatan aplikasi e-commerce, media sosial, sistem pembayaran digital, serta platform logistik akan mempercepat integrasi UMKM ke dalam ekosistem ekonomi digital yang sedang berkembang pesat.

Dengan naik kelasnya UMKM, akan terjadi peningkatan kinerja usaha secara objektif yang dapat diukur dari bertambahnya omzet, meningkatnya jumlah tenaga kerja yang diserap, terciptanya produk-produk inovatif, serta semakin luasnya pasar yang diraih. Dampak lebih jauh adalah meningkatnya pendapatan pelaku UMKM, terbukanya lapangan kerja baru, dan bertambahnya kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tapanuli Utara.



Lebih dari itu, program UMKM Naik Kelas juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Dengan berkembangnya UMKM, kesejahteraan masyarakat meningkat, daya beli naik, serta tumbuh kemandirian ekonomi lokal. UMKM juga akan lebih mampu berkolaborasi dengan sektor lain, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, sehingga terbentuk ekosistem ekonomi daerah yang lebih tangguh, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

Dengan demikian, UMKM Naik Kelas bukan hanya sekadar program pengembangan usaha, tetapi juga sebuah gerakan transformasi ekonomi masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara menuju era yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

JAMINAN KESEHATAN LANSIA

Jaminan Kesehatan Lansia di Kabupaten Tapanuli Utara merupakan bagian integral dari program nasional Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh pemerintah. Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan yang menyeluruh kepada kelompok lanjut usia, sebuah kelompok masyarakat yang rentan terhadap berbagai masalah kesehatan akibat proses penuaan. Lansia memiliki kebutuhan khusus dalam pemeliharaan kesehatan, baik berupa layanan kuratif, preventif, maupun rehabilitatif. Oleh karena itu, penyediaan jaminan kesehatan menjadi sangat penting agar mereka tetap dapat menikmati hidup yang sehat, bermartabat, serta produktif meskipun usia telah menua.

Melalui program ini, lansia di Kabupaten Tapanuli Utara dijamin memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang memadai tanpa harus terbebani oleh risiko sosial dan ekonomi akibat biaya pengobatan yang tinggi. Mereka dapat memanfaatkan layanan kesehatan dasar hingga layanan rujukan di rumah sakit, termasuk pemeriksaan rutin, pengobatan penyakit kronis, rehabilitasi, hingga perawatan khusus sesuai kebutuhan usia lanjut. Dengan adanya jaminan ini, para lansia lebih terlindungi dari kemungkinan jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan yang besar.

Selain memberikan perlindungan finansial, program ini juga mendorong pemeliharaan kesehatan lansia secara preventif. Melalui pemeriksaan kesehatan berkala, penyuluhan gizi, dan kegiatan promotif seperti senam lansia atau posyandu lansia, mereka didorong untuk tetap aktif secara fisik maupun sosial. Upaya ini tidak hanya memperpanjang harapan hidup, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup sehingga para lansia dapat tetap berperan dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Jaminan kesehatan bagi lansia juga memiliki dimensi sosial yang penting. Dengan adanya kepastian akses layanan kesehatan, rasa aman dan ketenangan batin para lansia meningkat, sehingga mereka dapat menjalani masa tua dengan lebih sejahtera. Di sisi lain, keluarga sebagai pihak terdekat juga merasakan manfaat karena beban pembiayaan kesehatan berkurang, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam memberikan dukungan emosional dan sosial.



Lebih jauh, keberadaan program ini juga selaras dengan semangat pembangunan daerah yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Lansia adalah aset sosial dan sumber kebijaksanaan yang perlu dijaga dan dihormati. Dengan menjamin kesehatan mereka, Kabupaten Tapanuli Utara tidak hanya memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, tetapi juga memperkuat fondasi sosial melalui penghormatan kepada generasi pendahulu.

Secara keseluruhan, Jaminan Kesehatan Lansia di Kabupaten Tapanuli Utara bukan sekadar program pelayanan kesehatan, tetapi juga wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, sehat, dan berkeadilan. Melalui program ini, lansia diharapkan dapat tetap hidup sehat, mandiri, produktif, serta merasakan kesejahteraan di masa tua mereka.

INSENTIF TERHADAP GURU SEKOLAH MINGGU DAN GURU NGAJI

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menempatkan pembangunan bidang keagamaan sebagai salah satu pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang berkarakter, harmonis, dan berdaya saing. Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah pemberian insentif kepada Guru Sekolah Minggu dan Guru Ngaji, yaitu para pengajar keagamaan non-formal yang memiliki peran strategis dalam membentuk moral, spiritual, serta nilai-nilai kebajikan di tengah masyarakat.

Guru Sekolah Minggu dan Guru Ngaji selama ini dikenal sebagai sosok yang berjuang dengan penuh dedikasi dalam mendidik anak-anak dan remaja agar memiliki pondasi iman yang kokoh, akhlak yang mulia, serta kedisiplinan dalam menjalankan nilai-nilai agama. Mereka umumnya menjalankan tugas secara sukarela dengan imbalan yang sangat terbatas, bahkan tidak jarang tanpa bayaran sama sekali. Oleh karena itu, pemerintah daerah memandang perlu untuk menghadirkan bentuk apresiasi nyata melalui pemberian insentif dalam bentuk bantuan keuangan tunai yang bersifat rutin.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pengajar keagamaan, sekaligus menghargai pengabdian mereka yang tulus dalam membina generasi muda. Insentif ini juga diharapkan dapat memotivasi para Guru Sekolah Minggu dan Guru Ngaji agar semakin bersemangat dalam menjalankan tugas, memperkaya metode pembelajaran, serta meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan yang mereka berikan. Dengan demikian, anak-anak dan remaja di Kabupaten Tapanuli Utara dapat memperoleh pendidikan spiritual yang lebih baik, selaras dengan pendidikan formal yang mereka terima di sekolah.

Lebih dari sekadar penghargaan, program insentif ini juga memiliki makna sosial yang penting. Kehadiran dukungan pemerintah daerah menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi spiritual dan moral masyarakat. Dengan memberikan perhatian pada pengajar keagamaan, pemerintah memperkuat pondasi sosial budaya yang berlandaskan nilai-nilai religius, toleransi, dan kebersamaan.



Program ini diharapkan dapat menciptakan dampak berantai yang positif. Selain meningkatkan kesejahteraan Guru Sekolah Minggu dan Guru Ngaji, juga akan tercipta ekosistem pendidikan keagamaan yang lebih berkualitas, harmonisasi kehidupan antar umat beragama yang semakin kuat, serta tumbuhnya generasi muda yang religius, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Dengan demikian, insentif ini bukan hanya bentuk bantuan finansial, tetapi juga investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia yang utuh, baik secara intelektual maupun spiritual.

Pemberian insentif bagi Guru Sekolah Minggu dan Guru Ngaji di Kabupaten Tapanuli Utara memiliki manfaat yang sangat penting, tidak hanya bagi para guru itu sendiri, tetapi juga bagi perkembangan pendidikan keagamaan dan pembentukan karakter generasi muda di daerah tersebut. Insentif ini berfungsi sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi pemerintah maupun masyarakat terhadap jasa dan dedikasi para guru yang telah dengan tulus mengabdikan diri dalam mendidik anak-anak. Dengan adanya dukungan finansial, para guru dapat merasakan peningkatan kesejahteraan yang secara langsung berpengaruh pada semangat dan motivasi mereka untuk terus melaksanakan tugas mulia.

Lebih jauh lagi, insentif ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan keagamaan. Dengan adanya pendanaan tambahan, guru dapat mengakses pelatihan, meningkatkan kompetensi, serta menyelenggarakan kegiatan belajar yang lebih kreatif dan menarik bagi anak-anak. Hal ini tentunya akan mendorong tumbuhnya generasi muda yang berkarakter kuat, berakhlak mulia, serta memiliki dasar spiritual yang kokoh sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan.

Selain itu, pemberian insentif juga membantu meringankan beban ekonomi sehari-hari yang dihadapi para guru. Sebagaimana diketahui, banyak Guru Sekolah Minggu dan Guru Ngaji yang mengabdikan diri tanpa mengharapkan imbalan besar, sehingga insentif ini menjadi bentuk dukungan nyata yang memberi dampak signifikan terhadap kehidupan mereka. Dengan kondisi ekonomi yang lebih stabil, para guru dapat lebih fokus, ikhlas, dan bersemangat dalam memberikan pengajaran.

Secara keseluruhan, pemberian insentif bagi Guru Sekolah Minggu dan Guru Ngaji di Kabupaten Tapanuli Utara adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam memuliakan peran pengajar keagamaan, memperkuat pendidikan non-formal berbasis nilai agama, dan memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan seimbang antara kemajuan fisik, kesejahteraan ekonomi, serta ketangguhan moral-spiritual masyarakat.

KETERSEDIAAN FASILITASI AIR BERSIH PDAM

Ketersediaan fasilitas air bersih di Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu aspek vital dalam menunjang kualitas hidup masyarakat. Air bersih tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti minum, memasak, mandi, dan mencuci, tetapi juga menjadi penentu utama dalam menjaga kesehatan,



produktivitas, serta keberlanjutan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, peran PDAM MUAL NATIO sebagai penyedia utama layanan air bersih memiliki arti strategis dalam memastikan akses masyarakat terhadap air yang aman, sehat, dan layak konsumsi.

PDAM MUAL NATIO bertanggung jawab untuk menyalurkan air bersih melalui jaringan infrastruktur yang dikelolanya. Layanan ini mencakup distribusi air dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas sesuai standar kesehatan, serta ketersediaan yang berkesinambungan sepanjang waktu. Dengan adanya sistem yang terkelola baik, masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara dapat menikmati akses langsung ke air bersih tanpa harus mengandalkan sumber air alternatif yang belum tentu aman atau higienis. Hal ini menjadi landasan penting bagi terciptanya lingkungan hidup yang sehat serta penguatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Ketersediaan air bersih juga memberikan dampak positif pada berbagai sektor. Dari sisi kesehatan, terpenuhinya kebutuhan air bersih membantu mencegah penyakit berbasis lingkungan seperti diare, tifus, dan penyakit kulit yang sering kali muncul akibat penggunaan air yang tidak layak. Dari sisi ekonomi, distribusi air bersih yang stabil mendukung berbagai aktivitas produktif, termasuk usaha rumah tangga, perdagangan, industri kecil, hingga sektor pariwisata yang berkembang di Kabupaten Tapanuli Utara. Sementara itu, dari aspek sosial, layanan air bersih berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup, menjaga keharmonisan masyarakat, serta memperkuat rasa keadilan dengan menyediakan akses yang merata.

Namun, tantangan tetap ada dalam menjamin ketersediaan air bersih yang berkesinambungan adalah pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan kebutuhan rumah tangga, perubahan iklim, hingga keterbatasan infrastruktur di daerah pedesaan menjadi faktor yang perlu dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, PDAM MUAL NATIO bersama pemerintah daerah terus melakukan inovasi, mulai dari peningkatan kapasitas produksi, perbaikan jaringan distribusi, hingga penerapan teknologi baru untuk pengolahan air. Upaya ini dipadukan dengan strategi konservasi sumber daya air agar keberlanjutan pasokan dapat terjamin bagi generasi sekarang maupun mendatang.

Secara keseluruhan, ketersediaan fasilitas air bersih di Kabupaten Tapanuli Utara bukan hanya soal layanan dasar, tetapi juga merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Dengan dukungan PDAM MUAL NATIO, masyarakat diharapkan dapat menikmati akses air bersih yang aman, merata, dan berkesinambungan, sehingga tercipta kehidupan yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera di seluruh wilayah kabupaten.

3.4. Program Prioritas dan Pengembangan Kewilayahan

Program pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 1 Tahun 2025 – 2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara, RPJPD Kabupaten serta dengan mempertimbangkan isu-isu



internasional, isu-isu nasional dan isu-isu daerah.

Pendekatan perencanaan yang digunakan dalam menyusun RPJMD Tahun 2025 - 2029 Kabupaten Tapanuli Utara adalah pendekatan perencanaan pembangunan Tematik, Holistik, Integratif, dan spasial (THIS). Pendekatan THIS pada dasarnya adalah pendekatan yang memberi penekanan pada keterpaduan, bukan pendekatan yang berangkat dari sektor atau tugas dan fungsi semata tetapi tugas dan fungsi mendukung keterpaduan. Karena penekanannya pada keterpaduan, perencanaan ini, berangkat dari tema pembangunan yang menjadi dasar atau starting pointnya dalam lingkup daerah, tema bisa bersumber dari isu-isu strategis dan/atau prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh kepala daerah. Inilah titik pusat (core) dari perencanaan berbasis pendekatan THIS. Dalam hal ini perangkat daerah yang terlibat tersebut kita namakan integratif. Kemudian program program dan kegiatan yang ada pada setiap Perangkat Daerah yang terlibat untuk membangun suatu tema kecil itu dinamakan Holistik. Kemudian spasial digunakan untuk mendukung pembangunan tematik besarnya yang akan menjadi tema kecil yang diintervensi oleh banyak Perangkat Daerah yang juga dinamakan integratif dan masing-masing perangkat daerah mengintervensi dengan program dan kegiatan yang dinamakan juga holistik.

Untuk mempercepat dampak pembangunan, dirumuskan Program Unggulan Kabupaten sebagai quick wins Pembangunan yang merupakan program-program strategis yang secara langsung menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan sekaligus merepresentasikan implementasi dari sembilan misi pembangunan. Setiap program unggulan didesain untuk memberikan dampak jangka pendek dan menengah yang terukur, sebagai fondasi menuju transformasi jangka panjang. Dengan kata lain, Program Unggulan Kabupaten menjadi pengungkit awal yang mendekatkan Tapanuli Utara pada kondisi ideal sebagaimana dicita-citakan dalam visi dan misi RPJMD.

Berikut adalah Program Unggulan Kabupaten beserta tujuan, dampak yang diharapkan dan ruang lingkup yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025–2029:

Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu di Kabupaten Tapanuli Utara

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki potensi sumber daya alam yang besar di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Keanekaragaman komoditas unggulan seperti padi, jagung, kopi, nenas, eruk, kakao, dan kemenyan, ditambah dengan karakteristik geografis yang mendukung, menjadikan daerah ini sebagai salah satu tulang punggung ketahanan pangan dan penghasil produk agribisnis berkualitas di Sumatera Utara. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dikelola secara terintegrasi. Masih banyak lahan kurang produktif, limbah pertanian belum dimanfaatkan secara maksimal, serta kurangnya integrasi antara sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil menyebabkan efisiensi produksi dan nilai tambah ekonomi belum optimal. Untuk menjawab tantangan ini, dibutuhkan pendekatan baru berbasis sistem. Salah satu strategi inovatif yang ditawarkan adalah pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (KPT) sebagai model pembangunan pertanian yang berkelanjutan, efisien, inklusif, dan berdaya saing tinggi.



KPT dirancang sebagai satu ekosistem agribisnis berkelanjutan yang mengintegrasikan tanaman pangan dan hortikultura (kentang, ubi jalar, jagung, cabai, jeruk, dan nanas), perkebunan rakyat (kopi, kakao, kemenyan, kayu manis), peternakan terpadu (sapi, kambing, ayam dengan sistem biogas dan pemanfaatan limbah), perikanan dan aquaponik (kolam ikan terintegrasi dengan budidaya sayur), serta agrowisata dan edukasi (zona pembelajaran, pelatihan petani muda, dan wisata alam). Setiap sektor saling terhubung secara fungsional dan ekologis—limbah dari peternakan menjadi pupuk untuk tanaman, air dari perikanan dimanfaatkan untuk irigasi, dan hasil pertanian diolah menjadi produk bernilai tambah.

Kawasan Pertanian Terpadu bukan sekadar proyek pertanian, tetapi sebuah pendekatan transformasional untuk membangun masa depan Tapanuli Utara yang mandiri, hijau, dan berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan sumber daya lokal, memperkuat sinergi antar sektor, dan melibatkan generasi muda, KPT menjadi pijakan baru menuju pertanian masa depan yang tidak hanya menghidupi, tapi juga menginspirasi.

Tujuan Program

- meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian melalui integrasi multi-komoditas, mendorong pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan berbasis agroekologi dan ekonomi sirkular,
- meningkatkan pendapatan petani dan membuka lapangan kerja bagi generasi muda di pedesaan, menjadi pusat edukasi, pelatihan, dan wisata pertanian modern, serta
- mendukung pencapaian ketahanan pangan dan kedaulatan ekonomi lokal.

Dampak yang Diharapkan

- terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian modern di pedesaan
- terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja bagi petani milenial dan perempuan,
- terciptanya lingkungan pertanian yang ramah lingkungan dan efisien.
- peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan teknis dan kelembagaan ekonomi, serta
- serta meningkatnya kapasitas produksi dan daya saing komoditas lokal di pasar nasional dan ekspor.
- Terbangunya kemitraan multipihak dengan dinas, perseroda, BUMN, perguruan tinggi dan sektor swasta, serta inovasi pembiayaan melalui dana desa, CSR kredit usaha tani, dan dukungan program nasional.

Keterkaitan dengan RPJMN 2025-2029 dan 17 (tujuh belas) Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029

Arah Kebijakan pada RPJMN Tapanuli Utara ditetapkan sebagai Kawasan Swasembada Pangan, air dan energi, dan Pada pada RPJMD Provinsi yakni pada Program Prioritas Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal, Program Unggulan Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal, dengan pendekatan budaya, sosial, dan teknologi modern. Fokus utamanya adalah



diversifikasi komoditas, pelestarian kearifan lokal, dan peningkatan kapasitas produksi masyarakat.

Petani Millenial

Memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian. Lahan yang subur, iklim yang mendukung, dan keragaman komoditas unggulan seperti kopi, hortikultura, dan tanaman pangan menjadi modal penting untuk menggerakkan perekonomian daerah. Namun, pertanian di wilayah ini masih menghadapi tantangan klasik: produktivitas yang rendah akibat metode budidaya tradisional, keterbatasan akses pasar, serta rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor ini. Dalam konteks tersebut, Program *Petani Milenial* dihadirkan sebagai upaya strategis untuk mengubah wajah pertanian menjadi lebih modern, menguntungkan, dan berkelanjutan.

Roadmap implementasi dirancang untuk jangka lima tahun. Tahun pertama difokuskan pada proyek percontohan dengan melibatkan sekitar 200 peserta, pelatihan intensif, dan pendirian empat lahan percontohan. Tahun kedua hingga ketiga menjadi fase konsolidasi dan perluasan skala, dengan target mencapai lebih banyak lagi petani milenial aktif. Tahun keempat adalah tahap integrasi rantai nilai, termasuk pengolahan hasil, *branding*, dan pemasaran digital. Tahun kelima difokuskan pada keberlanjutan, dengan pengelolaan program sepenuhnya diambil alih oleh koperasi atau inkubator lokal yang mandiri.

Tujuan Program

- menarik generasi muda berusia maksimal 35 tahun agar terlibat aktif dalam sektor pertanian melalui pendekatan teknologi, kewirausahaan, dan konektivitas pasar melalui rekrutmen calon petani milenial melalui seleksi terbuka, melaksanakan pelatihan terpadu yang menggabungkan teori dan praktik lapangan, pendirian lahan percontohan (*model farm*), serta penyediaan paket teknologi pertanian hemat biaya. Selain itu, program memfasilitasi pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama sebagai wadah produksi, pengolahan, dan pemasaran. Kemitraan dengan pemerintah daerah, perseroda, sektor swasta, perguruan tinggi, dan platform *agritech* menjadi kunci keberhasilan implementasi.,
- menjadikan Tapanuli Utara sebagai pusat pertanian modern berbasis generasi milenial yang produktif, kreatif, dan ramah lingkungan. Melalui peningkatan keterampilan teknis dan bisnis, penguatan akses pembiayaan, penerapan teknologi pertanian terkini, serta pembentukan rantai nilai yang efisien.
- Meningkatkan kemampuan dan keunggulan Generasi dalam literasi digital, keterbukaan terhadap inovasi, dan kemampuan adaptasi yang tinggi melalui pelatihan dan pendampingan, para petani muda diharapkan mampu mengelola usaha tani secara profesional, memanfaatkan teknologi tepat guna, serta mengembangkan produk bernilai tambah yang memiliki daya saing di pasar regional maupun nasional. serta
- mendukung pencapaian ketahanan pangan dan kedaulatan ekonomi lokal.



Dampak yang Diharapkan

- mencakup peningkatan pendapatan petani muda, terciptanya lapangan kerja baru di sektor agribisnis,
- berkembangnya usaha pengolahan dan pemasaran produk lokal
- peningkatan produktivitas komoditas unggulan,
- berubahnya persepsi generasi muda terhadap pertanian, dari sektor yang dianggap tradisional menjadi industri modern yang menjanjikan.

Strategi Pembiayaan

- APBD Kabupaten sebagai sumber utama.
- Dana DAK (APBN). APBN dan dukungan APBD Provinsi untuk peningkatan Kapasitas Generasi Muda, memfasilitasi akses lahan percontohan, memberikan insentif pajak bagi usaha agribisnis baru, dan memperkuat konektivitas pasar melalui infrastruktur fisik maupun digital.
- Kemitraan dengan sektor swasta dan industri untuk mendukung pelatihan, penguatan kompetensi, pengembangan destinasi

Pengembangan Destinasi Wisata Rohani SALIB KASIH

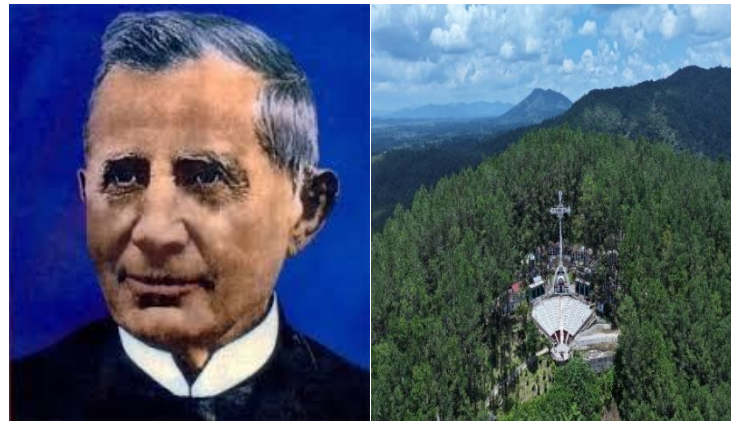
Salib Kasih merupakan salah satu objek wisata rohani yang paling terkenal di Sumatera Utara, khususnya di daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Terletak di atas bukit Siatas Barita, lokasi ini menyuguhkan pemandangan alam yang menakjubkan sekaligus sarat nilai sejarah. Tempat ini dibangun untuk mengenang jasa Dr. Ingwer Ludwig Nommensen, Misionaris Jerman yang membawa kekristenan ke Tanah Batak dan tempat ini kini menjadi pusat ziarah, perenungan/meditasi dan kunjungan wisata.

Seiring berkembangnya minat wisata religi dan budaya, kawasan Salib Kasih memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi unggulan. Namun, saat ini pengelolaan dan fasilitas di kawasan tersebut masih kurang optimal, baik dari sisi infrastruktur, promosi, maupun pemberdayaan masyarakat lokal serta fasilitas umum dan fasilitas pendukung masih belum optimal, serta minimnya pusat informasi wisata. Tanpa intervensi dan dukungan pembangunan dari pemerintah pusat, kawasan ini tidak akan optimal dalam menjawab potensi besar yang dimilikinya baik dari sisi pariwisata, ekonomi, sosial, dan spiritual.

Menjadikan Salib Kasih sebagai destinasi wisata religi nasional merupakan upaya strategis untuk mengangkat nilai sejarah, spiritualitas, dan budaya yang terkandung di dalamnya. Sebagai tempat bersejarah yang mengenang perjuangan misionaris Dr. Ingwer Ludwig Nommensen, Salib Kasih memiliki daya tarik religi yang kuat, khususnya bagi umat Kristen di Indonesia. Untuk mencapai status nasional, diperlukan penguatan identitas kawasan ini melalui penataan yang representatif, pembangunan fasilitas pendukung berskala nasional, serta promosi intensif di berbagai media. Selain itu, penyelenggaraan event-event keagamaan dan budaya secara rutin dapat memperkuat daya tariknya sebagai pusat ziarah dan refleksi rohani. Dengan pengelolaan yang profesional dan dukungan berbagai pihak, Salib Kasih berpotensi besar menjadi salah satu ikon wisata religi terkemuka di Indonesia. Pengembangan



kawasan wisata Salib Kasih secara terpadu dan berkelanjutan, diharapkan kawasan ini tidak hanya menjadi pusat wisata rohani, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya dan warisan peninggal sejarah rohani.



Gambar 3.10. Misionaris Dr. Ingwer Ludwig Nommensen dan Destinasi Wisata Salib Kasih

Pembangunan Rumah Sakit

Rumah Sakit Daerah Swadana (RSUD) Tarutung merupakan salah satu Rumah Sakit Tipe B Akreditasi Paripurna dan satu satunya Tipe B di Sekitar Tapanuli Raya yang dibangun Tahun 1918 oleh Zending Jerman, sehingga Status kepemilikan lahan rumah sakit yang belum jelas. Untuk meningkatkan pelayanan, rumah sakit mengalami kendala karena Lahan RSUD sudah terpakai semua, sehingga untuk menambah gedung/ruangan sudah tidak memungkinkan, sedangkan tingkat kunjungan terus mengalami peningkatan.

Tabel 3.9. Indikator Kinerja Urusan Kesehatan pada RSUD Tarutung Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Ideal
BOR (Bed Occupation Rate)	48,20	49,29	56,23	59,46	69,76	60,00 – 85,00
AVLOS (Average Length of Stay)	5,32	5,58	5,27	5,13	5,25	6,00 – 9,00
TOI (Turn Over Interval)	5,72	5,74	4,10	3,50	2,28	1,00 – 3,00
BTO (Bed Turn Over)	33,04	32,27	38,97	42,30	48,49	40,00 – 50,00
GDR (Gross Death Ratio)	57,55	61,58	48,76	49,37	51,70	< 45,00
NDR (Net Death Ratio)	35,24	38,86	28,23	29,58	31,80	< 25,00

Dari tabel di atas terlihat peningkatan BOR (Bed Occupation Rate) RSUD Tarutung sebagai indikator utama pelayanan Rumah Sakit yang semakin meningkat tiap tahunnya, sehingga membutuhkan kelengkapan sarana dan prasarana yang lebih baik lagi. Sedangkan pada saat ini rumah sakit telah melayani berepa spesialisas, antara lain:

1. Poliklinik Anak
2. Poliklinik Bedah
3. Poliklinik Jiwa
4. Poliklinik Penyakit Dalam



5. Poliklinik BKIA
6. Poliklinik Gigi dan Mulut
7. Poliklinik Neurologi (Saraf)
8. Poliklinik Mata
9. Poliklinik Paru
10. Poliklinik THT-KL
11. Poliklinik Tulit Kelamin
12. Poliklinik Jantung dan Pembuluh Darah
13. Poliklinik Fisiotherapy
14. Poliklinik VCT

Tabel 3.10. Tabel Indikator Kunjungan Pasien

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rawat Jalan	47.731	50.279	65.372	70.916	82.903
Rawat Inap	8.428	8.184	8.573	9.094	10.426

Tabel di atas menunjukkan jumlah kunjungan pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap. Pada tahun 2024 kunjungan Rawat Jalan di Poliklinik RSUD Tarutung berjumlah 82.903 kunjungan dan Rawat Inap berjumlah 10.426 pasien. Keberadaan RSUD Tarutung sangat vital dalam Pelayanan Kesehatan di wilayah Tapanuli Raya dan sekitarnya.

RSUD Tarutung berupaya terus menerus untuk dapat menjadi rumah sakit tujuan atau rujukan dari 7 kab/kota di Tapanuli Raya, dengan mengembangkan layanan unggulan berbasis kompetensi. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07-MENKES-1277-2024 yang menghunjuk RSUD Tarutung Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan KJSU-KIA (Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefro dan Kesehatan Ibu Anak) sejak Juli 2024.

Untuk mempercepat realisasi pelayanan unggulan maka RSUD Tarutung sudah melakukan langkah persiapan baik secara SDM, sarana prasarana dan alat kesehatan yang diperlukan dan direncanakan Cathlab (pelayanan jantung) akan dapat beroperasi pada tahun 2026. Masih ada 3 (tiga) layanan unggulan yang akan dipersiapkan yang tentunya membutuhkan kesiapan yang matang baik untuk SDM, sarana prasarana, alat kesehatan.

Tujuan Program

- Melayani kebutuhan kesehatan masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan untuk diagnosis, pengobatan, dan perawatan pasien.
- Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan cara memberikan layanan kesehatan yang berkualitas tinggi, aman, dan efektif.
- Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan melalui meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan.
- Mendukung pencegahan dan pengobatan penyakit dengan melakukan pencegahan, pengobatan, dan pengelolaan berbagai jenis penyakit.
- Meningkatkan kesehatan masyarakat dengan melakukan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.



Dampak yang Diharapkan

- Peningkatan Akses Layanan Kesehatan: Pembangunan rumah sakit di kabupaten dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih dekat.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan: Dengan adanya rumah sakit, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di kabupaten dapat meningkat, termasuk fasilitas dan tenaga medis yang lebih memadai.
- Dukungan Ekonomi Lokal: Pembangunan rumah sakit juga dapat mendukung perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar rumah sakit.

Strategi Pembiayaan

- APBD Kabupaten sebagai sumber utama terkait penyediaan lahan.
- Dana DAK (APBN). APBN dan dukungan APBD Provinsi untuk Rumah Sakit, Pengadaan Alat-Alat Kesehatan
- Kemitraan dengan sektor swasta dan industri untuk mendukung pelatihan, penguatan kompetensi, pengembangan destinasi

Keterkaitan dengan RPJMN 2025-2029 dan PHTC Nasional

Pembangunan Rumah Sakit di Kabupaten selaras dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang menempatkan sektor kesehatan sebagai pilar penting pembangunan sumber daya manusia (SDM). Fokus utama pemerintah pusat adalah memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan. Secara khusus, Pembangunan Rumah Sakit mendukung dan berkontribusi langsung pada Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Nasional poin ke-2, yaitu: “Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.”

Pendirian Sekolah rakyat

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui keterpaduan dan sinergi program serta kerja sama antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah maka menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional dalam menentukan sasaran program termasuk program sekolah rakyat.

Sekolah Rakyat adalah satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan karakter yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang terintegrasi bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat.

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029



Penanganan Fakir Miskin menyebutkan bahwa Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:

- pengembangan Potensi Diri;
- bantuan pangan dan sandang;
- penyediaan pelayanan perumahan;
- penyediaan pelayanan kesehatan;
- penyediaan pelayanan pendidikan;
- penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- bantuan hukum; dan/atau
- pelayanan sosial

Visi dan misi Presiden yang termuat dalam RPJM Nasional Tahun 2025 – 2029, telah ditetapkan Delapan Asta Cita. Pada asta cita keempat yaitu Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Untuk melaksanakan amanat undang-undang serta visi dan misi tersebut, Presiden menggagas pendirian Sekolah Rakyat. Program Sekolah Rakyat memiliki Visi yaitu Mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas guna memutus transmisi kemiskinan. Sedangkan Misi yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Memberikan pendidikan berkualitas untuk siap menempuh pendidikan lanjutan;
2. Menanamkan pola pikir pantang menyerah dan gigih dalam meraih masa depan;
3. Menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan cinta tanah air;
4. Memperkuat rasa percaya diri, berkarakter dan berbudi pekerti luhur;

Untuk mendukung sekolah rakyat tersebut maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara meminjam pakaikan Balai Latihan Kerja (BLK) Silangkitang yang berada di Kecamatan Sipoholon. BLK dimaksud memiliki lahan seluas ± 2 Ha dan dilengkapi beberapa gedung yang masih layak.

Mall Pelayanan Publik (MPP)

Kabupaten Tapanuli Utara sedang berada pada titik penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat. Seiring bertambahnya tuntutan pelayanan yang cepat, transparan, dan terintegrasi—terutama di sektor kependudukan, perizinan, sosial, kesehatan, dan perizinan usaha—saat ini nampak kebutuhan kuat akan sistem pelayanan satu atap yang mampu memangkas birokrasi, mengurangi beban masyarakat, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Mall Pelayanan Publik (MPP) hadir sebagai solusi strategis untuk menyatukan berbagai layanan pemerintahan dan mitra swasta dalam satu lokasi yang mudah diakses.

Sistem pelayanan yang tersebar di banyak kantor kecamatan dan dinas menyebabkan masyarakat harus mengunjungi beberapa tempat, menghabiskan waktu dan biaya transportasi, serta rentan terhadap ketidakpastian prosedur. Kondisi ini



diperparah oleh keterbatasan SDM terlatih, infrastruktur layanan digital yang belum merata, serta belum optimalnya koordinasi antar-institusi.

Secara fungsi, MPP bukan sekadar gedung fisik melainkan ekosistem pelayanan yang menggabungkan counter layanan instansi pemerintah, layanan perizinan terpadu, pusat informasi dan pengaduan, ruang layanan khusus untuk UMKM dan investor, serta fasilitas pendukung seperti area edukasi publik, ruang tunggu layak, akses internet publik, dan jalur layanan difabel. Kehadiran layanan mitra (bank, notaris, penyedia jasa teknis) di dalam MPP akan mempercepat proses transaksi dan memberikan kemudahan one-stop service bagi warga dan pelaku usaha lokal.

Kebutuhan pokok untuk mewujudkan MPP di Tapanuli Utara meliputi: (1) ruang fisik representatif yang mudah diakses idealnya di pusat kota atau dekat pusat transportasi; (2) infrastruktur TI yang andal (sistem antrian elektronik, portal layanan daring, integrasi database antar-dinas); (3) SDM terlatih untuk front-office dan back-office serta petugas IT dan customer service; (4) SOP dan regulasi daerah yang mengatur koordinasi layanan lintas dinas; (5) anggaran untuk renovasi/penyediaan ruang, pembelian perangkat, pelatihan SDM, dan kampanye publik; serta (6) mekanisme monitoring-evaluasi dan saluran pengaduan/umpan balik masyarakat.

Implementasi direkomendasikan dilakukan bertahap: fase persiapan (survei lokasi, mapping layanan, pembentukan tim MPP), fase pembangunan (fasilitas fisik & infrastruktur TI), fase integrasi layanan (penandatanganan MoU antar-dinas dan mitra), fase pilot operasi (uji layanan terbatas dan perbaikan), dan fase skala penuh disertai sosialisasi luas. Setiap fase perlu indikator kinerja (Waktu Penyelesaian Layanan, Tingkat Kepuasan Pengguna, Jumlah Layanan Terintegrasi) untuk mengukur keberhasilan dan menyesuaikan kebijakan operasional.

Tujuan Program

- meminimalkan hambatan administratif tersebut melalui integrasi proses, standarisasi layanan, dan implementasi antrian serta layanan berbasis digital,
- mempercepat proses transaksi dan memberikan kemudahan one-stop service bagi warga dan pelaku usaha lokal.

Dampak yang Diharapkan

- menjadi investasi strategis yang memperkuat pelayanan publik,
- meningkatkan efisiensi pemerintahan,
- modernisasi layanan publik dan pembangunan inklusif di wilayah

Strategi Pembiayaan

Untuk keberlanjutan, MPP perlu dirancang dengan model biaya yang jelas, kombinasi anggaran APBD, kontribusi mitra layanan (sewa counter atau layanan berbayar), dan potensi pembiayaan proyek melalui program bantuan provinsi/ pusat atau donor.



Pengembangan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kemajuan ekonomi dan teknologi, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia yang unggul sangat dipengaruhi oleh kesehatan fisik dan mental, yang salah satunya dapat dibentuk melalui kegiatan olahraga. Olahraga tidak hanya menyehatkan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai sportivitas, kerja sama, dan disiplin.

Stadion adalah fasilitas olahraga yang dipergunakan untuk melangsungkan sebuah pertandingan sepak bola dan atau atletik serta fasilitas untuk penontonnya. Stadion mini juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan cabangcabang olah raga lainnya serta tempat bagi komunitas masyarakat dapat berolahraga sehingga nantinya diharapkan peningkatan prestasi olah raga.

Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengusulkan kepada Pemerintah Pusat pembangunan Stadion Mini Siborongborong.

Tujuan Program

- Meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap olahraga melalui penyediaan fasilitas olahraga, pelaksanaan perlombaan olahraga,
- Pemenuhan standar Keselamatan olahraga melalui pembangunan sarana prasarana sesuai standar,
- Menciptakan sarana rekreasi dan interaksi sosial yang positif bagi keluarga dan komunitas,
- Tersedianya Ruang Publik

Dampak yang Diharapkan

- Tersedianya pusat pembinaan bakat olahraga bagi generasi muda, khususnya dalam cabang sepak bola dan atletik,
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, sehingga tercipta masyarakat yang lebih sehat dan bugar
- Tersedianya fasilitas olahraga yang layak dan berstandar, sehingga dapat digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga secara optimal

Strategi Pembiayaan

- APBD Kabupaten sebagai sumber utama terkait penyediaan lahan.
- APBN dan dukungan APBD Provinsi
- Kemitraan dengan sektor swasta dan industri untuk mendukung pelatihan, penguatan kompetensi, pengembangan destinasi

Revitalisasi Lapangan Pacuan Kuda

Pacuan kuda Siborong-borong sudah ada sejak zaman Belanda dan pernah menjadi event nasional serta agenda resmi PORDASI (Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia) di era 80-an. Pacuan kuda Siborong-borong adalah warisan budaya masyarakat Batak Toba yang kaya akan tradisi dan sejarah. Acara ini bukan hanya sekadar perlombaan kuda, tapi juga perayaan budaya yang mencerminkan kekayaan



tradisi dan sejarah. Dalam rangka mendukung perkembangan dan peningkatan olahraga di Kabupaten Tapanuli Utara melalui Sumber Daya Manusia yang berkarakter Pemimpin dan bertanggung jawab, diperlukan dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga yang memenuhi standar di Kabupaten Tapanuli Utara. Untuk mendukung hal tersebut, perlu dilaksanakan Revitalisasi Lapangan Pacuan Kuda yang berlokasi di Desa Silait-lait Kecamatan Siborongborong yang memiliki lahan seluas 82.800 M².

Kegiatan lomba pacuan kuda ini dilaksanakan setiap tahunnya yakni pada setiap perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan pada setiap perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tapanuli Utara. Namun saat ini kondisi lapangan pacuan kuda perlu segera direvitalisasi dikarenakan lapangan dan bangunan eksisting sudah mengalami kerusakan yang disebabkan oleh faktor iklim, cuaca, dan faktor usia yang cukup lama turut juga mempengaruhi kondisi lapangan pacuan kuda (lapangan pacuan kuda tersebut peninggalan penjajahan kolonial Belanda zaman dahulu) dan merupakan satu-satunya daerah yang memiliki Pacuan Kuda sirkuit klasik yang masih bertahan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sangat berharap adanya perhatian dan bantuan dari Pemerintah Pusat, agar peninggalan sejarah zaman penjajahan selalu terjaga lestari selamanya dan berharap kiranya tetap menjadi salah satu objek wisata lokal maupun mancanegara.

Tujuan Program

- Meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap olahraga berkuda melalui penyediaan fasilitas olahraga, pelaksanaan perlombaan pacuan kuda,
- Pemenuhan standar Keselamatan melalui pembangunan sarana prasarana sesuai standar,
- Menciptakan sarana rekreasi dan interaksi sosial yang positif bagi keluarga dan komunitas,

Dampak yang Diharapkan

- Tersedianya pusat pembinaan bakat olahraga bagi generasi muda, khususnya dalam cabang berkuda,
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, sehingga tercipta masyarakat yang lebih sehat dan bugar
- Tersedianya fasilitas olahraga berkuda yang layak dan berstandar, sehingga dapat digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga secara optimal
- pacuan kuda Hoda Marsiadu Siborong-borong mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesadaran akan kekayaan budaya dan tradisi

Strategi Pembiayaan

- APBD Kabupaten sebagai sumber utama terkait penyediaan lahan.
- APBN dan dukungan APBD Provinsi.
- Kemitraan dengan sektor swasta dan sponsor untuk mendukung pelatihan, penguatan kompetensi, pengembangan destinasi pariwisata baru.



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah merupakan instrumen operasional yang menjabarkan kebijakan dan strategi pembangunan daerah ke dalam serangkaian kegiatan terstruktur yang dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan fungsinya. Program ini disusun berdasarkan pendekatan money follows program yang mengaitkan secara erat antara prioritas pembangunan, ketersediaan anggaran, dan kapasitas kelembagaan daerah. Setiap program dirancang untuk memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan aspek efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan.

Penyusunan Program Perangkat Daerah berpedoman pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi (RPJPD dan RPJMD) serta mempertimbangkan isu strategis sektoral, potensi dan tantangan khusus di bidang tugasnya. Program ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan menjadi instrumen akuntabilitas kinerja yang terukur. Implementasi Program Perangkat Daerah mensyaratkan adanya sinergi lintas OPD, mengingat sifat pembangunan yang multidimensi dan saling terkait, untuk memastikan pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah.



Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										OPD PENANGGUNG JAWAB				
					2026		2027		2028		2029		2030						
					T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			804.037.978.992		819.836.005.520		831.732.060.020		875.545.451.776		885.563.270.526					
1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			469.227.767.521		478.447.322.956		485.389.730.207		510.958.746.271		516.805.035.688					
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	388.748.867.821	100	396.387.144.976	100	402.138.835.617	100	423.322.420.081	100	428.165.991.901	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	85	85	80.258.899.700	86	81.835.855.341	86	83.023.316.966	86	87.396.760.393	86	88.396.736.926	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
						97	97		97		98		98		98			98	
						95	95		95		95		96		96			96	
			tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam SD																
			tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam SMP																
			tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan																
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan	36	67	50.000.000	82	50.982.418	90	51.722.187	92	54.446.772	100	55.069.741			



KODE			BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											OPD PENANGGUNG JAWAB			
						BASELINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030					
							T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU				
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
						kurikulum muatan lokal												Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks pemerataan guru			120.000.000		122.357.803		124.133.250		130.672.253		132.167.379	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
				TK	0	0			0				0					0		0
				SD	0	0			0				0					0		0
				SMP	0	0			0				0					0		0
				Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidikan	41	46			49				53					57		61
1	1	6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Buku Teks Utama Bahasa dan Sastra daerah sesuai kurikulum Muatan Lokal	27	49	50.000.000	63	50.982.418	78	51.722.187	92	54.446.772	100	55.069.741	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					282.081.745.503		287.624.188.789		291.797.697.884		307.168.810.127		310.683.375.201				
		A	DINAS KESEHATAN					166.919.193.034		170.198.881.194		172.668.515.551		181.764.225.190		183.843.935.683				
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	98.210.505.952	100	100.140.181.190	100	101.593.243.809	100	106.944.900.676	100	108.168.543.182	Dinas Kesehatan			
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	100	100	66.983.831.082	100	68.299.953.415	100	69.291.005.238	100	72.941.067.684	100	73.775.645.026	Dinas Kesehatan			
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 (sembilan) jenis Tenaga Kesehatan	10	14	880.114.000	24	897.406.795	29	910.428.424	38	958.387.327	43	969.353.006	Dinas Kesehatan			
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan	Persentase sarana produksi dan distribusi	85	86	279.958.000	87	285.458.715	88	289.600.803	90	304.856.188	92	308.344.293	Dinas Kesehatan			



KODE			BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										OPD PENANGGUNG JAWAB	
						BASELINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
							T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T		PAGU
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			DAN MAKANAN MINUMAN	farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	kefarmasian serta makanan minuman yang dibina agar memenuhi standar Good Distribution Practise (GDP) dan Good Manufacture Practice (GMP)												
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	100	100	564.784.000	100	575.881.079	100	584.237.277	100	615.013.314	100	622.050.176	Dinas Kesehatan
		B	RSU DAERAH TARUTUNG					115.162.552.469		117.425.307.596		119.129.182.333		125.404.584.937		126.839.439.518	
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	36.162.552.470	100	36.873.087.268	100	37.408.126.292	100	39.378.685.046	100	39.829.248.210	RSUD Tarutung
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Laporan kinerja administrasi dan keuangan BLUD	90 100	92 100	78.999.999.999	93 100	80.552.220.327	94 100	81.721.056.042	95 100	86.025.899.891	100 100	87.010.191.308	RSUD Tarutung
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					19.730.018.986		20.117.681.474		20.409.594.776		21.484.716.939		21.730.540.842	
		A	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG					17.755.018.986		18.103.875.966		18.366.568.374		19.334.069.441		19.555.286.059	
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	9.118.856.329	100	9.298.026.888	100	9.432.943.913	100	9.929.845.844	100	10.043.461.186	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



KODE			BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										OPD PENANGGUNG JAWAB	
						BASELINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
							T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T		PAGU
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi	51	52	2.000.000.000	53	2.039.296.717	55	2.068.887.495	56	2.177.870.883	58	2.202.789.653	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Jalan yang Ditangani	2	3	6.086.162.657	3	6.205.745.763	3	6.295.792.906	4	6.627.438.221	4	6.703.268.065	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Persentase Jembatan yang Ditangani	1	1		1		2		2		3		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Besertifikat Keterampilan/Keahl ian	N/A	1	50.000.000	1	50.982.418	1	51.722.187	1	54.446.772	1	55.069.741	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kabupaten	N/A	70	500.000.000	75	509.824.179	80	517.221.874	85	544.467.721	90	550.697.413	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		B	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					1.975.000.000		2.013.805.508		2.043.026.401		2.150.647.497		2.175.254.783	
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Aman	34	36	1.175.000.000	37	1.198.086.821	38	1.215.471.403	39	1.279.499.144	40	1.294.138.921	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi Aman	11	13	500.000.000	14	509.824.179	15	517.221.874	16	544.467.721	17	550.697.413	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik	77	82	150.000.000	84	152.947.254	86	155.166.562	88	163.340.316	90	165.209.224	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	8	PROGRAM PENATAAN	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Kesesuaian Bangunan Gedung	100	100	150.000.000	100	152.947.254	100	155.166.562	100	163.340.316	100	165.209.224	Dinas Perumahan dan



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											OPD PENANGGUNG JAWAB		
				BASELINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030				
					T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			BANGUNAN GEDUNG												Kawasan Permukiman		
1	4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			11.089.964.268		11.307.863.863		11.471.944.196		12.076.255.138		12.214.429.273			
1	4	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	5.750.514.910	100	5.863.503.089	100	5.948.584.193	100	6.261.939.493	100	6.333.587.373	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Rumah Layak Huni bagi Warga Negara Korban Bencana	100	100	235.000.000	100	239.617.364	100	243.094.281	100	255.899.829	100	258.827.784	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase rumah tidak layak huni	88	89	175.000.000	90	178.438.463	90	181.027.656	91	190.563.702	91	192.744.095	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	berkurangnya kawasan kumuh daerah	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	7	6	150.000.000	5	152.947.254	5	155.166.562	4	163.340.316	4	165.209.224	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	88	89	4.779.449.358	90	4.873.357.693	90	4.944.071.504	91	5.204.511.798	91	5.264.060.797	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			18.829.689.565		19.199.662.058		19.478.254.636		20.504.316.323		20.738.922.675			



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												OPD PENANGGUNG JAWAB	
				BASELINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030				
					T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	A	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					15.140.144.394		15.437.623.380		15.661.627.703		16.486.639.823		16.675.276.711		
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	13.910.144.394	100	14.183.455.899	100	14.389.261.893	100	15.147.249.229	100	15.320.561.074	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100	100	1.000.000.000	100	1.019.648.359	100	1.034.443.747	100	1.088.935.442	100	1.101.394.827	Satuan Polisi Pamong Praja
				Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penanganan Gangguan Tibumtranmas	N/A	100		100		100		100		100		
				Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	N/A	90		90		90		90		100		
				Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	N/A	70		80		90		100		100		
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGA N, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	N/A	100	230.000.000	100	234.519.122	100	237.922.062	100	250.455.152	100	253.320.810	Satuan Polisi Pamong Praja
				Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	N/A	100		100		100		100		100		
	B	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH					3.689.545.171		3.762.038.678		3.816.626.933		4.017.676.500		4.063.645.964		
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	3.389.545.171	100	3.456.144.170	100	3.506.293.809	100	3.690.995.868	100	3.733.227.516	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												OPD PENANGGUNG JAWAB	
				BASELINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030				
					T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGA N BENCANA	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Pelatyanan Informasi Rawan Bencana	95,6	20	300.000.000	22	305.894.508	24	310.333.124	25	326.680.633	26	330.418.448	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	92	4		6		8		10		12		
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	93		94		95		96		97		
				Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana dan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	N/A	55		58		60		62		63		
1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					3.078.793.149		3.139.286.381		3.184.838.322		3.352.606.978		3.390.966.847	
1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	2.704.890.149	100	2.758.036.801	100	2.798.056.702	100	2.945.450.749	100	2.979.152.017	Dinas Sosial
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	100	100	39.997.700	100	40.783.589	100	41.375.371	100	43.554.913	100	44.053.260	Dinas Sosial
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase PMKS di Luar Panti Sosial yang ditangani	5	8	120.000.000	9	122.357.803	10	124.133.250	11	130.672.253	13	132.167.379	Dinas Sosial
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Cakupan perlindungan dan jaminan sosial yang dilaksanakan	8	8	150.000.000	9	152.947.254	10	155.166.562	11	163.340.316	12	165.209.224	Dinas Sosial



KODE			BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										OPD PENANGGUNG JAWAB	
						BASELINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
							T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T		PAGU
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana yang tertangani	97	100	50.000.000	100	50.982.418	100	51.722.187	100	54.446.772	100	55.069.741	Dinas Sosial
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Korban Bencana yang tertangani	1	1	13.905.300	1	14.178.516	1	14.384.251	1	15.141.974	1	15.315.225	Dinas Sosial
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					61.633.363.245		62.844.357.667		63.756.247.238		67.114.753.627		67.882.667.430	
2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					3.285.815.129		3.350.376.003		3.398.990.915		3.578.040.549		3.618.979.785	
2	7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	2.353.044.129	100	2.399.277.584	100	2.434.091.787	100	2.562.313.148	100	2.591.630.631	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tersedianya Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Kabupaten	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Kabupaten (Dokumen)	1	1	70.000.000	1	71.375.385	1	72.411.062	1	76.225.481	1	77.097.638	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya (%)	80	85	300.000.000	87	305.894.508	90	310.333.124	92	326.680.633	95	330.418.448	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (%)	0	1	26.439.300	1	26.958.789	2	27.349.969	2	28.790.691	2	29.120.108	Dinas Ketenagakerjaan
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya Pekerja yang Terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak- Hak Pekerja dan Dialog Sosial (Orang)	169	179	536.331.700	184	546.869.738	189	554.804.974	194	584.030.597	199	590.712.960	Dinas Ketenagakerjaan



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												OPD PENANGGUNG JAWAB	
				BASELINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030				
					T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			500.843.000		510.683.743		518.093.910		545.385.693		551.625.889			
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMA AN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	0	26	200.000.000	31	203.929.672	37	206.888.749	43	217.787.088	49	220.278.965	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK)	55	55			55		55		55		55		
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	100	50.000.000	100	50.982.418	100	51.722.187	100	54.446.772	100	55.069.741	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai Standar	1	1	50.000.000	1	50.982.418	1	51.722.187	1	54.446.772	1	55.069.741	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan. Evaluasi. dan/atau Penyusunan Kebijakan	0	26	50.000.000	31	50.982.418	37	51.722.187	43	54.446.772	49	55.069.741	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



KODE			BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										OPD PENANGGUNG JAWAB	
						BASELINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
							T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T		PAGU
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	64	67	50.000.000	69	50.982.418	70	51.722.187	72	54.446.772	73	55.069.741	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinanan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	100	100.843.000	100	102.824.399	100	104.316.411	100	109.811.517	100	111.067.959	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	58	61	63	64	66	67						
2	9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					7.516.512.077		7.664.199.202		7.775.408.920		8.184.996.398		8.278.647.516	
2	9	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	4.669.073.277	100	4.760.812.903	100	4.829.893.657	100	5.084.319.371	100	5.142.493.153	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	46	52	50.000.000	58	50.982.418	65	51.722.187	73	54.446.772	82	55.069.741	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	90	91	2.517.438.800	91	2.566.902.340	92	2.604.148.826	92	2.741.328.332	93	2.772.694.071	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	8	7	250.000.000	6	254.912.090	5	258.610.937	4	272.233.860	4	275.348.707	Dinas Ketahanan Pangan



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												OPD PENANGGUNG JAWAB	
				BASELINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030				
					T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	17	21	30.000.000	25	30.589.451	29	31.033.312	33	32.668.063	38	33.041.845	Dinas Ketahanan Pangan
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					500.000.000		509.824.179		517.221.874		544.467.721		550.697.413	
2	10	5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Lahan untuk Kepentingan Umum	86	88	100.000.000	89	101.964.836	90	103.444.375	91	108.893.544	92	110.139.483	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Mediasi Sengketa/konflik Tanah	100	100	400.000.000	100	407.859.343	100	413.777.499	100	435.574.177	100	440.557.931	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					4.788.125.423		4.882.204.228		4.953.046.405		5.213.959.472		5.273.616.570	
2	11	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	4.030.669.623	100	4.109.865.665	100	4.169.500.989	100	4.389.139.006	100	4.439.358.671	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang disusun	90	96,5	130.000.000	97	132.554.287	98	134.477.687	98	141.561.607	100	143.181.327	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	70	58	220.000.000	62	224.322.639	67	227.577.624	70	239.565.797	75	242.306.862	Dinas Lingkungan Hidup
					Indeks Kualitas Udara	95	95		95		95		40				
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	77	77		78		78		78		N/A		



KODE			BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										OPD PENANGGUNG JAWAB	
						BASELINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
							T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T		PAGU
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	1	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase Pengeglolaan Keanekaragaman Hayati	N/A	96,5	50.000.000	96, 5	50.982.418	97,0	51.722.187	97,0	54.446.772	97,0	55.069.741	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	98	98	23.694.600	98	24.160.160	98	24.510.731	98	25.801.890	98	26.097.110	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha terhadap Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	95	95	54.885.200	95	55.963.604	95	56.775.652	95	59.766.440	95	60.450.275	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Difasilitasi	N/A	95	30.000.000	96	30.589.451	96	31.033.312	97	32.668.063	97	33.041.845	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	66	66	23.676.800	66	24.142.010	66	24.492.318	66	25.782.507	66	26.077.505	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam	Persentase Partisipasi Masvarakat dalam	100	100	5.000.000	100	5.098.242	100	5.172.219	100	5.444.677	100	5.506.974	Dinas Lingkungan Hidup



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												OPD PENANGGUNG JAWAB	
				BASELINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030				
					T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			HIDUP UNTUK MASYARAKAT	perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Perlindungan Lingkungan												
2	1 1	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	97	97	20.199.200	99	20.596.081	97	20.894.936	97	21.995.625	97	22.247.294	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 1	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	20	55	200.000.000	63	203.929.672	70	206.888.749	78	217.787.088	85	220.278.965	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					3.385.936.918		3.452.465.021		3.502.561.274		3.687.066.713		3.729.253.405	
2	1 2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	2.975.382.618	100	3.033.844.003	100	3.077.865.945	100	3.239.999.585	100	3.277.071.023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1 2	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	99	99	280.513.500	99	286.025.130	99	290.175.436	99	305.461.092	99	308.956.118	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	55	60		60		65		65		70		
2	1 2	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak umur 0-18 tahun	98	100	100.000.000	100	101.964.836	100	103.444.375	100	108.893.544	100	110.139.483	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1 2	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Cakupan Informasi Kependudukan yang dilayani	100	100	20.041.000	100	20.434.773	100	20.731.287	100	21.823.355	100	22.073.054	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1 2	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas profil profil kependudukan	Dokumen Profil Kependudukan yang tersedia	1 dok	1 dok	9.999.800	1 dok	10.196.280	1 dok	10.344.231	1 dok	10.889.137	1 dok	11.013.728	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												OPD PENANGGUNG JAWAB	
				BASELINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030				
					T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	1 3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			3.998.597.773		4.077.163.656		4.136.324.465		4.354.214.832		4.404.034.901			
2	1 3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	3.373.558.873	100	3.439.843.767	100	3.489.756.883	100	3.673.587.821	100	3.715.620.290	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1 3	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	N/A	39	10.000.000	46	10.196.484	50	10.344.437	51	10.889.354	53	11.013.948	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1 3	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	31	50	4.999.200	56	5.097.426	69	5.171.391	81	5.443.806	100	5.506.093	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	1 3	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	27	135.039.700	68	137.693.008	27	139.690.973	32	147.049.515	27	148.732.027	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	100	100		100		100		100		100		
2	1 3	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga	67	73	475.000.000	76	484.332.970	79	491.360.780	82	517.244.335	85	523.162.543	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Persentase Fasilitas Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	N/A	37		41		50		58		66		
2	1 4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			13.450.541.574		13.714.822.638		13.913.828.630		14.646.771.430		14.814.356.906			
2	1 4	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	5.120.149.274	100	5.220.751.803	100	5.296.506.402	100	5.575.512.011	100	5.639.305.922	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana



KODE			BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										OPD PENANGGUNG JAWAB	
						BASELINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
							T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T		PAGU
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			DAERAH KABUPATEN/KOTA														Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	1 4	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	5	4	250.000.000	4	254.912.090	4	258.610.937	4	272.233.860	4	275.348.707	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	61	63		64		65		66		67		
2	1 4	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	65	67	6.701.704.300	69	6.833.381.789	70	6.932.536.110	71	7.297.723.332	72	7.381.222.446	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	17	15		14		13		12		11		
2	1 4	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	59	63	1.378.688.000	65	1.405.776.956	67	1.426.175.181	69	1.501.302.226	71	1.518.479.831	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	1 5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					5.129.218.497		5.229.999.221		5.305.888.003		5.585.387.809		5.649.294.718	
2	1 5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	4.595.052.597	100	4.685.337.838	100	4.753.323.428	100	5.003.715.629	100	5.060.967.159	Dinas Perhubungan
2	1 5	2	PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan	15	17	534.165.900	18	544.661.383	19	552.564.575	20	581.672.180	21	588.327.559	Dinas Perhubungan



KODE			BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										OPD PENANGGUNG JAWAB	
						BASELINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
							T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T		PAGU
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	32	34		35		36		37		38		
					Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan yang Terpasang	11	12		13		13		14		14		
					Kordinasi Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan	1	2		3		3		4		4		
2	1 6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					3.271.473.534		3.335.752.619		3.384.155.342		3.562.423.478		3.603.184.026	
2	1 6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	2.971.473.534	100	3.029.858.112	100	3.073.822.218	100	3.235.742.845	100	3.272.765.578	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	1 6	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase jumlah PD yang melaksanakan diseminasi dan layanan informasi publik melalui website PPID	23	38	150.000.000	51	152.947.254	64	155.166.562	76	163.340.316	100	165.209.224	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	1 6	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase layanan Pengelolaan Aplikasi Informatika (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang sudah terintegrasi	42	42	150.000.000	42	152.947.254	57	155.166.562	57	163.340.316	57	165.209.224	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	1 7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					6.266.544.266		6.389.671.575		6.482.387.534		6.823.862.148		6.901.939.436	
2	1 7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	5.911.544.266	100	6.027.696.408	100	6.115.160.003	100	6.437.290.066	100	6.510.944.272	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											OPD PENANGGUNG JAWAB	
					2026		2027		2028		2029		2030				
					T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			DAERAH KABUPATEN/KOTA														
2	1 7	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya Pertumbuhan Volumen Usaha Koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	–	1	10.000.000	1,5 5	10.196.484	1,8	10.344.437	1,9	10.889.354	2	11.013.948	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	1 7	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya Koperasi yang diperiksa dan diawasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	25	25	70.000.000	25	71.375.385	30	72.411.062	35	76.225.481	40	77.097.638	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	1 7	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya Koperasi yang aktif	Persentase Koperasi Aktif	25	25	60.000.000	25	61.178.902	30	62.066.625	35	65.336.127	40	66.083.690	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	1 7	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya SDM tentang perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Pendidikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	50	25	50.000.000	55	50.982.418	60	51.722.187	60	54.446.772	65	55.069.741	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	1 7	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentasei Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	14	70	50.000.000	70, 10	50.982.418	70,36	51.722.187	70,61	54.446.772	71,24	55.069.741	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	1 7	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Perkembangan Usaha Mikro	Persentase Usaha Kecil yang Terstandarisasi	2,00	2	65.000.000	3	66.277.143 -	3	67.238.844 -	3	70.780.804 -	3	71.590.664 -	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
				Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah yang sudah memiliki legalitas usaha	Pertumbuhan Wirausaha	1	2		3		4		4		5		
2	1 7	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya Usaha Kecil Menengah menjadi Wirausaha	Presentase jumlah UMKM menjadi Wirausaha	4	4	50.000.000	4,2	50.982.418	4,5	51.722.187	4,7	54.446.772	5,5	55.069.741	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	1 8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					2.889.001.920		2.945.766.066		2.988.509.972		3.145.936.582		3.181.931.769	



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											OPD PENANGGUNG JAWAB		
				BASELINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030				
					T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			PENANAMAN MODAL														
2	18	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	2.549.001.920	100	2.599.085.624	100	2.636.799.098	100	2.775.698.532	100	2.807.457.528	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	82	88	70.000.000	90	71.375.385	91	72.411.062	92	76.225.481	93	77.097.638	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	47	16	65.000.000	16	66.277.143	17	67.238.844	17	70.780.804	18	71.590.664	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	25	31	120.000.000	35	122.357.803	39	124.133.250	43	130.672.253	48	132.167.379	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	50	64	65.000.000	70	66.277.143	75	67.238.844	80	70.780.804	88	71.590.664	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	75	82	20.000.000	84	20.392.967	86	20.688.875	88	21.778.709	90	22.027.897	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					2.692.226.439		2.745.124.269		2.784.956.806		2.931.660.786		2.965.204.272	



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												OPD PENANGGUNG JAWAB	
				BASELINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030				
					T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	1 9	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	2.086.243.249	100	2.127.234.504	100	2.158.101.284	100	2.271.784.214	100	2.297.777.522	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	1 9	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	4	5	250.000.000	5	254.912.090	6	258.610.937	6	272.233.860	8	275.348.707	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	1 9	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	88	95	335.983.190	100	342.584.708	105	347.555.710	110	365.864.003	115	370.050.147	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	1 9	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina	69	79	20.000.000	84	20.392.967	89	20.688.875	94	21.778.709	99	22.027.897	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	2 0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					50.000.000		50.982.418		51.722.187		54.446.772		55.069.741	
2	2 0	2	PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya kelengkapan data statistik sektoral yg memenuhi prinsip standar SDI	Persentase Kelengkapan Data Statistik Sektoral yang memenuhi prinsip standar SDI	25	50	50.000.000	50	50.982.418	75	51.722.187	75	54.446.772	100	55.069.741	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	2 1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					10.000.000		10.196.484		10.344.437		10.889.354		11.013.948	
2	2 1	2	PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi di lingkungan pemerintah daerah	Persentase aplikasi layanan publik yang menerapkan keamanan informasi	N/A	28	10.000.000	28	10.196.484	28	10.344.437	28	10.889.354	28	11.013.948	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	2 2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					400.000.000		407.859.343		413.777.499		435.574.177		440.557.931	
2	2 2	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	6	350.000.000	7	356.876.926	8	362.055.312	9	381.127.405	10	385.488.189	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											OPD PENANGGUNG JAWAB		
					2026		2027		2028		2029		2030					
					T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU				
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					pengembangan kebudayaan													
2	2 2	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	13	15	50.000.000	16	50.982.418	17	51.722.187	18	54.446.772	19	55.069.741	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	2 3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						3.321.400.670		3.386.660.741		3.435.802.156		3.616.790.906		3.658.173.515	
2	2 3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	3.130.548.570	100	3.192.058.711	100	3.238.376.394	100	3.408.965.290	100	3.447.970.000	Dinas Perpustakaan
2	2 3	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	69	70	170.852.100	70	174.209.063	71	176.736.887	71	186.046.907	72	188.175.619	Dinas Perpustakaan
2	2 3	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	0	20	20.000.000	40	20.392.967	60	20.688.875	80	21.778.709	100	22.027.897	Dinas Perpustakaan
2	2 4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						177.126.025		180.606.261		183.226.909		192.878.806		195.085.688	
2	2 4	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	64	65	177.126.025	66	180.606.261	67	183.226.909	70	192.878.806	74	195.085.688	Dinas Perpustakaan
		3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						43.915.069.634		44.777.928.670		45.427.669.198		47.820.675.748		48.367.830.509	
3	2 5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						1.401.500.000		1.429.037.175		1.449.772.912		1.526.143.022		1.543.604.850	



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											OPD PENANGGUNG JAWAB	
					2026		2027		2028		2029		2030				
					T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
3	2 5	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	101	103	125.000.000	104	127.456.045	105	129.305.468	106	136.116.930	107	137.674.353	Dinas Ketahanan Pangan
3	2 5	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	2865	289 5	1.200.000.000	291 0	1.223.578.030	2925	1.241.332.497	2940	1.306.722.530	2955	1.321.673.792	Dinas Ketahanan Pangan
3	2 5	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya kelestarian dan keanekaragaman hayati di danau dan sungai	Luasan Kawasan Perikanan yang Diaawasi (Danau dan Sungai)	0	1	16.500.000	1	16.824.198	1	17.068.322	1	17.967.435	1	18.173.015	Dinas Ketahanan Pangan
3	2 5	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita)	46	47	60.000.000	47	61.178.902	48	62.066.625	48	65.336.127	49	66.083.690	Dinas Ketahanan Pangan
3	2 6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					4.688.117.855		4.780.231.676		4.849.594.202		5.105.057.687		5.163.468.752	
3	2 6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	4.138.117.855	100	4.219.425.078	100	4.280.650.141	100	4.506.143.194		4.557.701.598	Dinas Pariwisata
3	2 6	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata	15	16	200.000.000	16	203.929.672	16	206.888.749	16	217.787.088	17	220.278.965	Dinas Pariwisata
3	2 6	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	15	17	100.000.000	20	101.964.836	30	103.444.375	32	108.893.544	33	110.139.483	Dinas Pariwisata
3	2 6	4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	4	4	100.000.000	4	101.964.836	4	103.444.375	4	108.893.544	4	110.139.483	Dinas Pariwisata



KODE			BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									OPD PENANGGUNG JAWAB	
							2026		2027		2028		2029		2030		
							T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T		PAGU
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	2 6	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	38	50	150.000.000	60	152.947.254	65	155.166.562	75	163.340.316	80	165.209.224	Dinas Pariwisata
3	2 7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					36.295.451.879		37.008.597.933		37.545.603.254		39.523.403.923		39.975.622.932	
		A	DINAS PERTANIAN					34.795.451.879		35.479.125.395		35.993.937.633		37.890.000.760		38.323.530.692	
3	2 7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	17.231.831.879	100	17.570.409.091	100	17.825.360.743	100	18.764.352.458	100	18.979.050.486	Dinas Pertanian
3	2 7	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	370.1 22,14 Ton	373. 223, 17 Ton	2.500.000.000	375 .93 5,1 9 Ton	2.549.120.896	379.0 94,03 Ton	2.586.109.368	382.0 58,26 Ton	2.722.338.604	384.2 09,17 Ton	2.753.487.067	Dinas Pertanian
					Peningkatan Produksi Hortikultura	218.8 70,04 Ton	219. 291, 40 Ton		219 .47 2,5 1 Ton		219.5 94,38 Ton		219.6 86,62 Ton		219.8 38,21 Ton		
					Peningkatan Produksi Perkebunan	23.24 7,62 Ton	25.6 86,4 9 Ton		26. 818 ,65 Ton		28.02 9,62 Ton		29.26 5,57 Ton		30.54 3,23 Ton		
3	2 7	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya Distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	20.73 4,78 Ha	20.8 34,7 8 Ha	11.000.000.000	20. 934 ,78 Ton	11.216.131.944	21.03 4,78 Ton	11.378.881.221	21.13 4,78 Ton	11.978.289.858	21.23 4,78 Ton	12.115.343.094	Dinas Pertanian
3	2 7	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGA	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Pencegahan dan	N/A	70	420.000.000	77, 5	428.252.311	85	434.466.374	92,5	457.352.886	100	462.585.827	Dinas Pertanian



KODE			BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										OPD PENANGGUNG JAWAB		
						BASELINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030			
							T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T		PAGU	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			N BENCANA PERTANIAN		Pengendalian Hama Penyakit Tanaman)													
					Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	N/A	50		60		70	80		90				
3	2	7	6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya kualitas dan kemudaan prizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi)	N/A	80	20.000.000	85	20.392.967	90	20.688.875	95	21.778.709	100	22.027.897	Dinas Pertanian
3	2	7	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya Kapasitas SDM bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	73	90	3.623.620.000	92	3.694.818.185	94	3.748.431.052	96	3.945.888.245	98	3.991.036.322	Dinas Pertanian
			B	DINAS KETAHANAN PANGAN					1.500.000.000		1.529.472.538		1.551.665.621		1.633.403.163		1.652.092.240	
3	2	7	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian (peternakan)	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	1944	217 5	650.000.000	219 0	662.771.433	2205	672.388.436	2220	707.808.037	2235	715.906.637	Dinas Ketahanan Pangan
3	2	7	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tersedianya dan berkembangnya Prasarana Pertanian (Peternakan)	Prasarana Pertanian yang Tersedia/ Dikembangkan	4	2	650.000.000	2	662.771.433	2	672.388.436	2	707.808.037	2	715.906.637	Dinas Ketahanan Pangan
3	2	7	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	100	100	200.000.000	100	203.929.672	100	206.888.749	100	217.787.088	100	220.278.965	Dinas Ketahanan Pangan
3	3	0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					729.999.900		744.343.200		755.143.832		794.922.764		804.018.113	
3	3	0	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA	Meningkatnya sarana dan distribusi perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	75	75	199.999.900	80	203.929.570	80	206.888.646	85	217.786.979	85	220.278.855	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											OPD PENANGGUNG JAWAB	
					2026		2027		2028		2029		2030				
					T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			DISTRIBUSI PERDAGANGAN														
3	3 0	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya Pemantauan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	36	36	160.000.000	36	163.143.737	36	165.511.000	36	174.229.671	36	176.223.172	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	3 0	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Peningkatan ekspor produk bernilai tambah tinggi (bukan hanya bahan mentah).	Jumlah dari Diversifikasi produk ekspor (tidak bergantung pada komoditas tertentu).	5	5	70.000.000	6	71.375.385	6	72.411.062	7	76.225.481	7	77.097.638	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	3 0	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya Penanganan Pengaduan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	0	0	85.000.000	10	86.670.110	15	87.927.719	15	92.559.513	17	93.618.560	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	3 0	7	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya informasi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	4	4	215.000.000	5	219.224.397	6	222.405.406	7	234.121.120	8	236.799.888	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	3 1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					750.000.000		764.736.269		775.832.811		816.701.581		826.046.120	
3	3 1	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya Realisasi Invetasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	2	3	670.000.000	3	683.164.400	4	693.077.311	4	729.586.746	5	737.934.534	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	3 1	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Laporan Pengendalian Penerbitan Surat Rekomendasi Ijin Usaha Industri melalui OSS	Persentase Penerbitan Surat Rekomendasi Ijin Usaha Industri melalui OSS	N/A	100	50.000.000	100	50.982.418	100	51.722.187	100	54.446.772	100	55.069.741	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	3 1	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Terdatanya IKM Kabupaten Tapanuli Utara ke Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah data IKM di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	N/A	100	30.000.000	100	30.589.451	100	31.033.312	100	32.668.063	100	33.041.845	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan



KODE			BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										OPD PENANGGUNG JAWAB		
						BASELINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030			
							T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T		PAGU	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	3	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				50.000.000		50.982.418		51.722.187		54.446.772		55.069.741		
3	3	2	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (%)	20	29	50.000.000	29	50.982.418	29	51.722.187	29	54.446.772	29	55.069.741	Dinas Ketenagakerjaan
			4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					60.852.672.383		62.048.327.511		62.948.666.458		66.264.631.678		67.022.818.553	
4	1			SEKRETARIAT DAERAH					29.266.211.213		29.841.244.225		30.274.249.199		31.869.014.633		32.233.653.627	
4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	24.192.869.038	100	24.668.219.204	100	25.026.162.107	100	26.344.472.531	100	26.645.900.801	Sekretariat Daerah
4	1	2		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kerjasama, kesejahteraan rakyat dan peningkatan reformasi hukum daerah	Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian perumusan kebijakan dan penyelenggaraan Administrasi dibidang Tata Pemerintahan, Kerjasama Kesejahteraan Rakyat dan Hukum	N/A	100	4.527.311.900	100	4.616.266.148	100	4.683.249.487	100	4.929.950.383	100	4.986.357.905	Sekretariat Daerah
4	1	3		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya Pembinaan Pengkoordinasian perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi dibidang Perekonomian, SDA, Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatkan Pembinaan Pengkoordinasian perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi dibidang Perekonomian, SDA, Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa	N/A	100	546.030.275	100	556.758.874	100	564.837.604	100	594.591.719	100	601.394.920	Sekretariat Daerah



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											OPD PENANGGUNG JAWAB	
					2026		2027		2028		2029		2030				
					T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
4	2		SEKRETARIAT DPRD			31.586.461.170		32.207.083.286		32.674.417.259		34.395.617.045		34.789.164.926			
4	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	25.747.743.730	100	26.253.644.632	100	26.634.592.511	100	28.037.630.691	28.358.431.743	Sekretariat DPRD	
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan Perundang- undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Baik	Bai k	5.838.717.440	Bai k	5.953.438.654	Baik	6.039.824.748	Baik	6.357.986.354	Baik	6.430.733.183	Sekretariat DPRD
				Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Baik	Bai k	Bai k		Baik		Baik						
				Meningkatnya Kualitas penganggaran dan Pengwasan	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Baik	Bai k		Bai k		Baik		Baik				
		5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			294.954.362.436		300.749.731.516		305.113.695.983		321.186.258.933		324.861.208.897			
5	1		PERENCANAAN			5.738.231.583		5.850.978.415		5.935.877.782		6.248.563.743		6.320.058.580			
5	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	4.497.294.183	100	4.585.658.632	100	4.652.197.848	100	4.897.263.028	100	4.953.296.547	Badan Perencanaan Pembangunan,Pe nelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100	100	690.937.400	100	704.513.186	100	714.735.873	100	752.386.223	100	760.994.878	Badan Perencanaan Pembangunan,Pe nelitian dan Pengembangan Daerah
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100	100		100		100		100		100		
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	550.000.000	100	560.806.597	100	568.944.061	100	598.914.493	100	605.767.155	Badan Perencanaan Pembangunan,Pe nelitian dan Pengembangan Daerah



KODE			BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										OPD PENANGGUNG JAWAB	
						BASELINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
							T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T		PAGU
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100		100		100		100		100		
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100	100		100		100		100		100		
5	2		KEUANGAN					284.500.520.961		290.090.489.215		294.299.785.033		309.802.700.449		313.347.401.978	
		A	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					279.213.611.215		284.699.700.370		288.830.774.303		304.045.597.050		307.524.426.934	
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	5.007.930.763	100	5.106.328.382	100	5.180.422.665	100	5.453.313.297	100	5.515.709.035	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	85	85	274.025.680.452	85	279.409.835.283	85	283.464.151.764	85	298.396.275.373	85	301.810.466.831	Badan Keuangan dan Aset Daerah
					Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	91	95		95		95		95		95		
				Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	95	95		95		95		95		95		
					Persentase Penurunan SILPA	0	1		1		1		1		1		
				Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	100	100		100		100		100		100		
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	0	0	180.000.000	0	183.536.705	0	186.199.875	0	196.008.380	1	198.251.069	Badan Keuangan dan Aset Daerah



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											OPD PENANGGUNG JAWAB	
					2026		2027		2028		2029		2030				
					T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			BARANG MILIK DAERAH														
		B	BADAN PENDAPATAN DAERAH			5.286.909.746		5.390.788.845		5.469.010.730		5.757.103.399		5.822.975.043			
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	4.235.157.746	100	4.318.371.644	100	4.381.032.449	100	4.611.813.371	100	4.664.580.832	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan	Persentase capaian realisasi pajak daerah	92	93	1.051.752.000	93	1.072.417.200	94	1.087.978.280	94	1.145.290.029	95	1.158.394.212	Badan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan Pajak Daerah		Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	100	100	100		100		100		100				
		Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	76	79	83		84		84		84				
5	3		KEPEGAWAIAN			3.964.866.892		4.042.770.018		4.101.431.766		4.317.484.080		4.366.883.883			
5	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	3.005.649.592	100	3.064.705.673	100	3.109.175.427	100	3.272.958.366	100	3.310.406.911	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	100	100	959.217.300	100	978.064.345	100	992.256.338	100	1.044.525.714	100	1.056.476.972	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN		Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	56	70	77		84		91		98				
		Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN		Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	100	100	100		100		100		100				



KODE			BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										OPD PENANGGUNG JAWAB	
						BASELINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
							T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T		PAGU
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	100	100		100		100		100		100		
5	4		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					130.743.000		133.311.885		135.246.279		142.370.686		143.999.664	
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar. Manajerial dan Fungsional	0	3	130.743.000	3	133.311.885	4	135.246.279	0	142.370.686	0	143.999.664	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
				Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Pelatihan dan Pendidikan yang Dilaksanakan	3	100		100		100		100				
				Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	80	82		83		84		85		86		
				Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	1	4		5		6		6		6		
5	5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					620.000.000		632.181.982		641.355.123		675.139.974		682.864.793	
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah berbasis kelitbangan yang dijadikan sebagi landasan dalam implementasi pembangunan	N/A	25	580.000.000	28	591.396.048	31	599.977.373	34	631.582.556	43	638.808.999	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	3	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	N/A	70	40.000.000	75	40.785.934	80	41.377.750	85	43.557.418	90	44.055.793	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											OPD PENANGGUNG JAWAB	
					2026		2027		2028		2029		2030				
					T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
															Pengembangan Daerah		
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				10.466.607.556		10.672.259.214			10.827.116.743		11.397.459.922		11.527.867.415		
6	1	INSPEKTORAT DAERAH				10.466.607.556		10.672.259.214			10.827.116.743		11.397.459.922		11.527.867.415		
6	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	7.416.052.556	100	7.561.765.816	100	7.671.489.197	100	8.075.602.466	100	8.168.001.920	Inspektorat
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindakanjutt Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	92	100	2.301.600.000	100	2.346.822.662	100	2.380.875.729	100	2.506.293.813	100	2.534.970.333	Inspektorat
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	85	748.955.000	85	763.670.736	85	774.751.817	85	815.563.644	100	824.895.162	Inspektorat
					Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,00	90		90		90		90		100		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				33.621.073.214		34.281.672.117			34.779.108.967		36.611.178.210		37.030.076.106		
7	1	KECAMATAN TARUTUNG				8.182.890.156		8.343.670.516			8.464.739.557		8.910.639.106		9.012.592.885		
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	6.712.273.966	100	6.844.159.132	100	6.943.469.835	100	7.309.233.016	100	7.392.863.821	Kantor Kecamatan Tarutung
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Terlaksananya Koordinasi permasalahan	Persentase Koordinasi permasalahan sarana	85	92	9.980.990	94	10.177.100	96	10.324.773	98	10.868.654	98	10.993.011	Kantor Kecamatan Tarutung



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											OPD PENANGGUNG JAWAB	
					2026		2027		2028		2029		2030				
					T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			DAN PELAYANAN PUBLIK	sarana dan prasarana umum	dan prasarana umum												
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Desa yang difasilitasi	N/A	85	1.415.960.400	85	1.443.781.698	90	1.464.731.382	90	1.541.889.464	95	1.559.531.459	Kantor Kecamatan Tarutung
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pengaduan/ masalah yang ditindaklanjuti	90	92	9.090.500	94	9.269.113	96	9.403.611	98	9.898.968	98	10.012.230	Kantor Kecamatan Tarutung
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan koordinasi Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Forum Koordinasi	85	92	28.974.100	94	29.543.394	96	29.972.077	98	31.550.924	98	31.911.924	Kantor Kecamatan Tarutung
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa tertib administrasi keuangan dan asset desa	85	85	6.610.200	90	6.740.080	90	6.837.880	95	7.198.081	95	7.280.440	Kantor Kecamatan Tarutung
7	1		KECAMATAN SIATAS BARITA					1.822.646.026		1.858.458.029		1.885.424.785		1.984.743.855		2.007.452.904	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	1.740.994.196	100	1.775.201.874	100	1.800.960.560	100	1.895.830.284	100	1.917.522.001	Kantor Kecamatan Siatas Barita
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Koordinasi permasalahan sarana dan prasarana umum	Persentase Koordinasi permasalahan sarana dan prasarana umum	80	92	18.455.830	94	18.818.457	96	19.091.518	96	20.097.207	98	20.327.156	Kantor Kecamatan Siatas Barita
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Desa yang difasilitasi	N/A	85	28.092.000	85	28.643.962	90	29.059.594	90	30.590.374	95	30.940.383	Kantor Kecamatan Siatas Barita
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	Meningkatnya kordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pengaduan/ masalah yang ditindaklanjuti	100	92	3.504.000	94	3.572.848	96	3.624.691	98	3.815.630	98	3.859.287	Kantor Kecamatan Siatas Barita



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											OPD PENANGGUNG JAWAB	
					2026		2027		2028		2029		2030				
					T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			DAN KETERTIBAN UMUM														
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan koordinasi Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Forum Koordinasi	100	92	21.600.000	94	22.024.405	96	22.343.985	98	23.521.006	98	23.790.128	Kantor Kecamatan Siatas Barita
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa tertib administrasi keuangan dan asset desa	75	85	10.000.000	90	10.196.484	90	10.344.437	95	10.889.354	95	11.013.948	Kantor Kecamatan Siatas Barita
7	1		KECAMATAN ADIANKOTING					1.279.530.410		1.304.671.082		1.323.602.232		1.393.326.012		1.409.268.174	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	1.194.030.410	100	1.217.491.148	100	1.235.157.292	100	1.300.222.032	100	1.315.098.916	Kantor Kecamatan Adiankoting
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Koordinasi permasalahan sarana dan prasarana umum	Persentase Koordinasi permasalahan sarana dan prasarana umum	95	92	30.900.000	94	31.507.134	96	31.964.312	98	33.648.105	98	34.033.100	Kantor Kecamatan Adiankoting
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan yang di Fasilitas	75	85	17.000.000	85	17.334.022	90	17.585.544	90	18.511.903	95	18.723.712	Kantor Kecamatan Adiankoting
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Pengaduan/masalah yang ditindaklanjuti	N/A	92	6.000.000	94	6.117.890	96	6.206.662	98	6.533.613	98	6.608.369	Kantor Kecamatan Adiankoting
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan koordinasi Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Forum Koordinasi	N/A	92	21.600.000	94	22.024.405	96	22.343.985	98	23.521.006	98	23.790.128	Kantor Kecamatan Adiankoting
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa	95	85	10.000.000	90	10.196.484	90	10.344.437	90	10.889.354	95	11.013.948	Kantor Kecamatan Adiankoting



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											OPD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030			
					T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			PEMERINTAHAN DESA													
7	1		KECAMATAN SIPOHOLON			2.117.740.903		2.159.351.036		2.190.683.836		2.306.083.126		2.332.468.875		
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	1.831.536.903	100	1.867.523.597	100	1.894.621.897	100	1.994.425.446	100	2.017.245.270	Kantor Kecamatan Sipoholon	
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		80	39.100.000	94	39.868.251	96	40.446.751	98	42.577.376	98	43.064.538	Kantor Kecamatan Sipoholon	
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		85	212.000.000	85	216.165.452	90	219.302.074	90	230.854.314	95	233.495.703	Kantor Kecamatan Sipoholon	
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		N/A	3.504.000	94	3.572.848	96	3.624.691	98	3.815.630	98	3.859.287	Kantor Kecamatan Sipoholon	
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		N/A	21.600.000	92	22.024.405	94	22.343.985	96	23.521.006	98	23.790.128	Kantor Kecamatan Sipoholon	
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		N/A	10.000.000	90	10.196.484	90	10.344.437	95	10.889.354	95	11.013.948	Kantor Kecamatan Sipoholon	
7	1		KECAMATAN PAHAE JULU			2.519.996.095		2.569.509.882		2.606.794.204		2.744.113.061		2.775.510.662		
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	2.221.421.695	100	2.265.068.985	100	2.297.935.783	100	2.418.984.815	100	2.446.662.363	Kantor Kecamatan Pahae Julu	



KODE			BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2026		2027		2028		2029		2030			
							T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T		PAGU	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi permasalahan sarana dan prasarana umum	85	92	49.973.700	94	50.955.601	96	51.694.981	98	54.418.133	98	55.040.775	Kantor Kecamatan Pahae Julu	
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan yang diFasilitasi	90	85	212.000.700	85	216.166.166	90	219.302.799	90	230.855.076	95	233.496.474	Kantor Kecamatan Pahae Julu	
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan/masalah yang ditindaklanjuti	85	92	5.000.000	94	5.098.242	96	5.172.219	98	5.444.677	98	5.506.974	Kantor Kecamatan Pahae Julu	
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Forum Koordinasi	70	92	21.600.000	94	22.024.405	96	22.343.985	98	23.521.006	98	23.790.128	Kantor Kecamatan Pahae Julu	
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa	85	85	10.000.000	90	10.196.484	90	10.344.437	95	10.889.354	95	11.013.948	Kantor Kecamatan Pahae Julu	
7	1		KECAMATAN PAHAE JAE					2.241.147.706		2.285.182.580		2.318.341.231		2.440.465.167		2.468.388.489		
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	2.013.903.506	100	2.053.473.404	100	2.083.269.890	100	2.193.010.904	100	2.218.102.903		
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik.	70	92	45.539.200	94	46.433.971	96	47.107.741	98	49.589.249	98	50.156.639	Kantor Kecamatan Pahae Jae	
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan	90	85	144.105.000	85	146.936.427	90	149.068.516	90	156.921.042	95	158.716.502	Kantor Kecamatan Pahae Jae	



KODE			BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										OPD PENANGGUNG JAWAB	
						BASELINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
							T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T		PAGU
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	70	92	6.000.000	94	6.117.890	96	6.206.662	98	6.533.613	98	6.608.369	Kantor Kecamatan Pahae Jae
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	N/A	92	21.600.000	94	22.024.405	96	22.343.985	98	23.521.006	98	23.790.128	Kantor Kecamatan Pahae Jae
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80	85	10.000.000	90	10.196.484	90	10.344.437	90	10.889.354	95	11.013.948	Kantor Kecamatan Pahae Jae
7	1		KECAMATAN PURBATUA					1.221.831.282		1.245.838.261		1.263.915.730		1.330.495.387		1.345.718.653	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	1.122.865.182	100	1.144.927.640	100	1.161.540.867	100	1.222.727.693	100	1.236.717.903	Kantor Kecamatan Purbatua
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik.	85	92	37.966.100	92	38.712.072	96	39.273.795	98	41.342.632	98	41.815.666	Kantor Kecamatan Purbatua
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan	85	85	23.400.000	85	23.859.772	90	24.205.984	90	25.481.089	95	25.772.639	Kantor Kecamatan Purbatua
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	85	92	6.000.000	94	6.117.890	96	6.206.662	98	6.533.613	98	6.608.369	Kantor Kecamatan Purbatua
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	N/A	92	21.600.000	94	22.024.405	96	22.343.985	98	23.521.006	98	23.790.128	Kantor Kecamatan Purbatua



KODE			BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										OPD PENANGGUNG JAWAB	
						BASELINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
							T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T		PAGU
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	85	10.000.000	90	10.196.484	90	10.344.437	95	10.889.354	95	11.013.948	Kantor Kecamatan Purbatua
7	1		KECAMATAN SIMANGUMBAN					1.204.665.353		1.228.335.050		1.246.158.542		1.311.802.798		1.326.812.188	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	1.096.573.753	100	1.118.119.627	100	1.134.343.862	100	1.194.098.024	100	1.207.760.659	Kantor Kecamatan Simangumban
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Koordinasi permasalahan sarana dan prasarana umum	Persentase Koordinasi permasalahan sarana dan prasarana umum	100	92	50.902.100	94	51.902.243	96	52.655.359	98	55.429.101	98	56.063.310	Kantor Kecamatan Simangumban
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Desa yang difasilitasi	83	85	21.809.900	85	22.238.429	90	22.561.115	90	23.749.573	95	24.021.311	Kantor Kecamatan Simangumban
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pengaduan/ masalah yang ditindaklanjuti	100	92	8.579.600	94	8.748.175	96	8.875.114	98	9.342.631	98	9.449.527	Kantor Kecamatan Simangumban
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan koordinasi Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Forum Koordinasi	N/A	92	21.600.000	94	22.024.405	96	22.343.985	98	23.521.006	98	23.790.128	Kantor Kecamatan Simangumban
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa tertib administrasi keuangan dan asset desa	100	85	5.200.000	90	5.302.171	90	5.379.107	95	5.662.464	95	5.727.253	Kantor Kecamatan Simangumban
7	1		KECAMATAN SIPAHUTAR					1.883.443.131		1.920.449.697		1.948.315.971		2.050.947.978		2.074.414.521	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	1.780.425.749	100	1.815.408.193	100	1.841.750.284	100	1.938.768.700	100	1.960.951.710	Kantor Kecamatan Sipahutar



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											OPD PENANGGUNG JAWAB	
					2026		2027		2028		2029		2030				
					T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			DAERAH KABUPATEN/KOTA														
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase koordinasi permasalahan sarana dan prasarana umum	90	92	30.801.082	94	31.406.273	96	31.861.987	98	33.540.390	98	33.924.152	Kantor Kecamatan Sipahutar
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa yang di Fasilitasi	85	85	30.806.500	85	31.411.797	90	31.867.591	90	33.546.290	95	33.930.120	Kantor Kecamatan Sipahutar
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pengaduan/masalah yang ditindaklanjuti	85	92	5.000.000	94	5.098.242	96	5.172.219	98	5.444.677	98	5.506.974	Kantor Kecamatan Sipahutar
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	N/A	92	26.409.800	94	26.928.709	96	27.319.452	98	28.758.567	98	29.087.617	Kantor Kecamatan Sipahutar
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan, cakupan pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan administrasi pemerintah	-	85	10.000.000	90	10.196.484	90	10.344.437	95	10.889.354	95	11.013.948	Kantor Kecamatan Sipahutar
7	1		KECAMATAN PANGARIBUAN					1.400.669.823		1.428.190.686		1.448.914.141		1.525.239.012		1.542.690.497	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	1.270.068.159	100	1.295.022.914	100	1.313.814.066	100	1.383.022.232	100	1.398.846.500	Kantor Kecamatan Pangaribuan
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase koordinasi permasalahan sarana dan prasarana umum	85	92	26.001.664	94	26.512.554	96	26.897.259	98	28.314.133	98	28.638.098	Kantor Kecamatan Pangaribuan



KODE			BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										OPD PENANGGUNG JAWAB		
						BASELINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030			
							T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T		PAGU	
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			DAN PELAYANAN PUBLIK															
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa yang di Fasilitasi	90	85	67.000.000	85	68.316.440	90	69.307.731	90	72.958.675	95	73.793.453	Kantor Kecamatan Pangaribuan	
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pengaduan/masalah yang ditindaklanjuti	N/A	92	6.000.000	94	6.117.890	96	6.206.662	98	6.533.613	98	6.608.369	Kantor Kecamatan Pangaribuan	
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	N/A	92	21.600.000	94	22.024.405	96	22.343.985	98	23.521.006	98	23.790.128	Kantor Kecamatan Pangaribuan	
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan, cakupan pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan administrasi pemerintah	N/A	85	10.000.000	90	10.196.484	90	10.344.437	95	10.889.354	95	11.013.948	Kantor Kecamatan Pangaribuan	
7	1		KECAMATAN GAROGA					1.715.686.297		1.749.396.717		1.774.780.962		1.868.271.616		1.889.648.012		
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	1.632.086.297	100	1.664.154.114	100	1.688.301.465	100	1.777.236.613	100	1.797.571.404	Kantor Kecamatan Garoga	
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase koordinasi permasalahan sarana dan prasarana umum	85	92	22.000.000	94	22.432.264	96	22.757.762	98	23.956.580	98	24.230.686	Kantor Kecamatan Garoga	
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa yang di Fasilitasi	90	85	25.000.000	85	25.491.209	90	25.861.094	90	27.223.386	95	27.534.871	Kantor Kecamatan Garoga	



KODE			BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										OPD PENANGGUNG JAWAB	
						BASELINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
							T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T		PAGU
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pengaduan/masalah yang ditindaklanjuti	85	92	5.000.000	94	5.098.242	96	5.172.219	98	5.444.677	100	5.506.974	Kantor Kecamatan Garoga
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Forum Koordinasi Tingkat Kecamatan	N/A	92	21.600.000	94	22.024.405	96	22.343.985	98	23.521.006	98	23.790.128	Kantor Kecamatan Garoga
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan, cakupan pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan administrasi pemerintah	85	85	10.000.000	90	10.196.484	90	10.344.437	95	10.889.354	95	11.013.948	Kantor Kecamatan Garoga
7	1		KECAMATAN SIBORONGBORON G					3.506.212.790		3.575.104.116		3.626.979.898		3.818.039.373		3.861.724.628	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	3.210.936.591	100	3.274.026.225	100	3.321.533.280	100	3.496.502.655	100	3.536.508.950	Kantor Kecamatan Siborongborong
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase koordinasi permasalahan sarana dan prasarana umum	85	92	20.611.200	94	21.016.176	96	21.321.127	98	22.444.266	100	22.701.069	Kantor Kecamatan Siborongborong
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Desa yang di Fasilitasi	90	92	234.764.999	94	239.377.746	96	242.851.185	98	255.643.928	100	258.568.955	Kantor Kecamatan Siborongborong
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pengaduan/masalah yang ditindaklanjuti	85	92	8.950.000	94	9.125.853	96	9.258.272	98	9.745.972	100	9.857.484	Kantor Kecamatan Siborongborong



KODE			BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										OPD PENANGGUNG JAWAB	
						BASELINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
							T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T		PAGU
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Jumlah laporan Penyelenggaraan Forum Koordinasi	N/A	92	28.800.000	94	29.365.873	96	29.791.980	98	31.361.341	98	31.720.171	Kantor Kecamatan Siborongborong
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa	85	85	2.150.000	90	2.192.244	90	2.224.054	90	2.341.211	95	2.367.999	Kantor Kecamatan Siborongborong
7	1		KECAMATAN PAGARAN					1.470.364.140		1.499.254.382		1.521.008.991		1.601.131.624		1.619.451.457	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	1.370.076.640	100	1.396.996.397	100	1.417.267.214	100	1.491.925.011	100	1.508.995.323	Kantor Kecamatan Pagaran
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase koordinasi permasalahan sarana dan prasarana umum	85	92	23.810.000	94	24.277.827	96	24.630.106	98	25.927.553	98	26.224.211	Kantor Kecamatan Pagaran
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Desa yang di Fasilitasi	90	85	39.877.500	85	40.661.027	90	41.251.031	90	43.424.023	95	43.920.872	Kantor Kecamatan Pagaran
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pengaduan/masalah yang ditindaklanjuti	85	92	5.000.000	94	5.098.242	96	5.172.219	98	5.444.677	98	5.506.974	Kantor Kecamatan Pagaran
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Jumlah laporan Penyelenggaraan Forum Koordinasi	N/A	92	21.600.000	94	22.024.405	96	22.343.985	98	23.521.006	98	23.790.128	Kantor Kecamatan Pagaran
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa	85	85	10.000.000	90	10.196.484	90	10.344.437	95	10.889.354	95	11.013.948	Kantor Kecamatan Pagaran



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											OPD PENANGGUNG JAWAB					
					2026		2027		2028		2029		2030								
					T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU							
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
7	1		KECAMATAN PARMONANGAN					1.213.648.512			1.237.494.713			1.255.451.115			1.321.584.878			1.336.706.193	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	1.086.638.312	100	1.107.988.971	100	1.124.066.208	100	1.183.278.970	100	1.196.817.815	Kantor Kecamatan Parmonangan				
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase koordinasi permasalahan sarana dan prasarana umum	85	92	56.050.000	94	57.151.290	96	57.980.572	98	61.034.832	98	61.733.180	Kantor Kecamatan Parmonangan				
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Desa yang di Fasilitasi	90	85	32.360.200	85	32.996.025	90	33.474.807	90	35.238.169	95	35.641.357	Kantor Kecamatan Parmonangan				
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pengaduan/masalah yang ditindaklanjuti	85	92	7.000.000	94	7.137.539	96	7.241.106	98	7.622.548	98	7.709.764	Kantor Kecamatan Parmonangan				
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Jumlah laporan Penyelenggaraan Forum Koordinasi	N/A	92	21.600.000	94	22.024.405	96	22.343.985	98	23.521.006	98	23.790.128	Kantor Kecamatan Parmonangan				
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa	85	85	10.000.000	90	10.196.484	90	10.344.437	95	10.889.354	95	11.013.948	Kantor Kecamatan Parmonangan				
7	1		KECAMATAN MUARA					1.840.600.590			1.876.765.370			1.903.997.772			2.004.295.216			2.027.227.968	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	1.706.720.390	100	1.740.254.644	100	1.765.506.236	100	1.858.508.322	100	1.879.773.008	Kantor Kecamatan Muara				
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARA AN	Meningkatnya Penyelenggaraan	Persentase Koordinasi Permasalahan	85	92	64.720.000	94	65.991.642	96	66.949.199	98	70.475.902	98	71.282.273	Kantor Kecamatan Muara				



KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF											OPD PENANGGUNG JAWAB	
					2026		2027		2028		2029		2030				
					T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana dan Prasarana Umum												
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa dan Kelurahan yang di fasilitasi	90	85	32.360.200	85	32.996.025	90	33.474.807	90	35.238.169	95	35.641.357	Kantor Kecamatan Muara
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Permasalahan Sarana dan Prasarana Umum	85	92	5.200.000	94	5.302.171	96	5.379.107	98	5.662.464	98	5.727.253	Kantor Kecamatan Muara
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Forum Koordinasi	N/A	92	21.600.000	94	22.024.405	96	22.343.985	98	23.521.006	98	23.790.128	Kantor Kecamatan Muara
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib administrasi Keuangan dan Asset Desa	N/A	85	10.000.000	90	10.196.484	90	10.344.437	95	10.889.354	95	11.013.948	
		8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					4.370.259.212		4.456.127.632		4.520.787.316		4.758.930.145		4.813.380.887	
8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					4.370.259.212		4.456.127.632		4.520.787.316		4.758.930.145		4.813.380.887	
8	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya seluruh kegiatan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100	100	2.631.301.332	100	2.683.002.084	100	2.721.933.210	100	2.865.317.278	100	2.898.101.675	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	100	349.988.800	100	356.865.505	100	362.043.726	100	381.115.209	100	385.475.854	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik dan Pengembangan	100	100	958.969.080	100	977.811.248	100	991.999.569	100	1.044.255.419	100	1.056.203.584	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



KODE			BIDANG URUSAN/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										OPD PENANGGUNG JAWAB	
						BASELINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		
							T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T	PAGU	T A R G E T		PAGU
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Etika serta Budaya Politik												
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100	100	50.000.000	100	50.982.418	100	51.722.187	100	54.446.772	100	55.069.741	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100	100	60.000.000	100	61.178.902	100	62.066.625	100	65.336.127	100	66.083.690	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100	100	320.000.000	100	326.287.475	100	331.021.999	100	348.459.341	100	352.446.345	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029, Pemerintah Daerah berkomitmen menyelaraskan arah kebijakan, program, dan kegiatan daerah dengan prioritas dan kegiatan utama nasional dan provinsi. Bentuk dukungan program daerah Kabupaten Tapanuli Utara terhadap kegiatan utama nasional dan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2. Dukungan Program Daerah terhadap Kegiatan Utama dalam RPJMN 2025 – 2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

PROGRAM UNGGULAN DAERAH	PROGRAM PRIORITAS RPJMD SUMUT	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
Peningkatan Produktivitas Pangan Melalui Kegiatan Utama : -Penyediaan data luas lahan dan potensi wilayah untuk diversifikasi tanaman. oPenyediaan lahan untuk proyek cetak sawah baru -Penyediaan data petani muda yang berpotensi menjadi pelopor pertanian modern. ;-Pembangunan jaringan distribusi hasil pertanian untuk memudahkan pemasaran. -Penyediaan data kebutuhan pupuk dan bibit unggul di setiap daerah -Pembangunan gudang penyimpanan cadangan pangan dan pakan ternak Pembangunan Rumah Sakit Khusus Melalui Kegiatan Utama : Penyediaan lahan dan infrastruktur untuk pengembangan RSUD	Ketahanan Pangan melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal agar Diversifikasi Hasil Pertanian Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	Ketahanan Pangan melalui penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal agar Diversifikasi Hasil Pertanian Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal
Program TAPAIAS melalui : Penyediaan bank sampah Inovasi Pengelolaan Sampah Pembangunan Rumah Kompos	Kesehatan yang terintegrasi di beberapa titik kawasan yang menjadi sentra layanan kesehatan masyarakat terpadu Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Program Prioritas Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota di Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Danau Toba Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui: o Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan o Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR

4.1.1. Dukungan Kabupaten Tapanuli Utara terhadap PHTC serta Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara

Arah pembangunan Sumatera Utara periode 2025–2030 ditopang oleh 6 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi fokus utama percepatan pencapaian target pembangunan daerah. PHTC dirancang sebagai program unggulan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat dalam jangka pendek, sekaligus menjadi landasan bagi transformasi pembangunan jangka menengah dan panjang.

Agar pelaksanaannya terukur dan konsisten, setiap program prioritas dan proyek strategis dilengkapi dengan rencana aksi dan lokus pelaksanaan tahunan untuk periode 2025 hingga 2030. Rencana aksi tersebut menguraikan tahapan kerja, serta wilayah yang menjadi prioritas, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara bertahap, terfokus, dan berkesinambungan.

Dukungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terhadap PHTC dan Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara tersaji pada table berikut ini :



Tabel 4.3. Dukungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Terhadap PHTC Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
1. Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) Kepulauan Nias (2026), Kepulauan Nias dan Pantai Barat (2027), Kepulauan Nias, Pantai Barat dan Dataran Tinggi (2028), Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur (2029) 33 Kabupaten/Kota	2025	Penyusunan kajian akademik tentang bersekolah gratis, Pembentukan Tim Pokja, Validasi data siswa SMA/SMK/SLB Negeri di zona kepulauan Nias, zona Pantai Barat, zona Dataran Tinggi, zona Pantai Timur • 33 Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan	Diskominfo (Publikasi Kegiatan)	Tidak Ada	- Menyediakan basis data siswa SMP/SLTP kelas IX yang akan melanjutkan SLTA - Melakukan edukasi kepada siswa SLTP agar seluruhnya melanjutkan kepada jenjang SLTA
	2026	tidak ada			Tidak Ada	
	2027	tidak ada			Tidak Ada	
	2028	Implementasi Program Bersekolah Gratis • Kepulauan Nias, Pantai Barat, dan Dataran Tinggi			- penyediaan basis data terutama Anak Tidak Sekolah (ATS) terutama di tingkat pendidikan menengah atas	
	2029	Implementasi Program Bersekolah Gratis			- penyediaan basis data terutama Anak Tidak Sekolah (ATS)	



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		•Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran tinggi, dan Pantai Timur			terutama di tingkat pendidikan menengah atas	
	2030	Implementasi Program Bersekolah Gratis •Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran tinggi, dan Pantai Timur			- penyediaan basis data terutama Anak Tidak Sekolah (ATS) terutama di tingkat pendidikan menengah atas	
2. Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program Universal Health Coverage (UHC) (mulai Oktober tahun 2025, UHC+ tahun 2026 - 2030).	2025	Melakukan <i>Launching</i> UHC Penyusunan regulasi (Pergub/SK Gub UHC) MoU 33 Kabupaten/Kota Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara Triwulan IV dimulai Oktober 2025 • 33 Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	1. Dinas Sosial (Pembinaan kepada 2. Dinsos kab/kota untuk melakukan penginputan, pemutakhiran dan verifikasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) pada Pusdatin Kemensos setiap bulannya),		- Dukungan penganggaran APBD Kabupaten/Kota untuk UHC/PBPU yaitu pada Tahun 2025 sebesar 80%, tahun 2026 sebesar 77,5%, tahun 2027 sebesar 75%, tahun 2028 sebesar 72,5%, tahun 2029 dan 2030 sebesar 70%. - Melakukan penginputan, pemutakhiran dan verifikasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) pada Pusdatin Kemensos setiap bulannya
	2026	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk			- pemutakhiran data DTSEN untuk penerima JKN	



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		Sumatera Utara • 33 Kabupaten/Kota		3. Dinas PMD Dukcapil (Penyediaan data kependudukan Provsu)	- ketersediaan anggaran untuk mendukung UHC setiap tahunnya - komitmen kepala daerah untuk mendukung UHC	- Dinas PMD Dukcapil (Penyediaan data Kependudukan Kabupaten/Kota)
	2027	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara • 33 Kabupaten/Kota		4. Diskominfo (Publikasi Kegiatan),	- pemutakhiran data DTSEN untuk penerima JKN - ketersediaan anggaran untuk mendukung UHC setiap tahunnya - komitmen kepala daerah untuk mendukung UHC	
	2028	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara • 33 Kabupaten/Kota			- pemutakhiran data DTSEN untuk penerima JKN - ketersediaan anggaran untuk mendukung UHC setiap tahunnya - komitmen kepala daerah untuk mendukung UHC	
	2029	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara			- pemutakhiran data DTSEN untuk penerima JKN - ketersediaan anggaran untuk mendukung UHC setiap tahunnya	



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		- Peningkatan Pelayanan Kesehatan menjadi UHC Plus • 33 Kabupaten/Kota			- komitmen kepala daerah untuk mendukung UHC	
	2030	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara - Peningkatan Pelayanan Kesehatan menjadi UHC Plus • 33 Kabupaten/Kota			- pemutakhiran data DTSEN untuk penerima JKN - ketersediaan anggaran untuk mendukung UHC setiap tahunnya - komitmen kepala daerah untuk mendukung UHC	
3. Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP)	2025	tidak ada	Dinas TPH	- Disperindag ESDM (Memfasilitasi kemitraan antara petani dan pelaku usaha) - Diskop UMKM (Mendorong koperasi tani dan mengkoordinasikan ke koperasi merah putih)		Disperindag Kabupaten/Kota: Melakukan fasilitasi dan pameran produk cabai kering di tingkat lokal Dinas Pertanian Kabupaten/Kota: Menyiapkan lahan dan kelompok tani (CPCL) serta pendampingan kelompok tani Dinas Koperasi Kabupaten/Kota: Mendorong pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama yang
	2026	tidak ada				
	2027	1. Identifikasi jalur distribusi dan pasar yang rawan fluktuasi harga. 2. Pembangunan infrastruktur distribusi dan pasar percontohan. 3. Regulasi teknis distribusi dan pelatihan petugas pasar.			Melakukan pameran produk UMKM Pembinaan dan pendampingan bagi keluarga dan kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi dalam pengembangan ekonomi Menyiapkan lahan dan kelompok tani (CPCL) serta pendampingan	



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		4. Uji coba pengaturan harga di wilayah percontohan. 5. Pembangunan 20 unit SDD (Kabupaten Deli Serdang 5, Kabupaten Simalungun 5 Unit, Kabupaten Dairi 5 Unit, dan Kabupaten Tapanuli Utara 5 unit). 6. Penyerapan produksi oleh BUMD. 7.Tahapan pengolahan dan distribusi.		- PUPR (Perbaikan akses jalan ke sentra produksi dan koordinasi dengan PUPR kab/kota terkait akses jalan) - BUMD Dirga Surya (Skema pembelian hasil pertanian cabai merah ketika harga turun) - Biro Pemotda (fasilitasi kerja sama antar pemerintah daerah) - Diskominfo (Publikasi Kegiatan)	kelompok tani untuk komoditi pangan	mengelola SDD Total Solar Dry Dome: 70
	2028	tidak ada				
	2029					
	2030					
4. Digitalisasi Pelayanan Publik “Cepat, Responsif, Handal, dan	2025	Identifikasi dan pemetaan pelayanan publik yang akan di digitalisasi 1. Pemetaan layanan publik yang akan didigitalisasi, Audit kesiapan infrastruktur	Dinas Kominfo	DPMPTSP Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Bapenda Disperindag ESDM BPSDM Biro Adpem BUMD: PDAM,	Sistem perizinan berbasis web dan aplikasi mobile, seperti OSS (Online Single Submission) dan aplikasi buatan daerah, untuk pendaftaran, pengajuan dan pelacakan permohonan secara elektronik. Selain itu, juga ada informasi online mengenai	1. Penyiapan kebijakan/regulasi di tingkat Provinsi/Pemda Kabupaten/Kota. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
Solatif” (CERDAS)		dan SDM dan kebijakan pendukung 2. Penyusunan <i>roadmap</i> dan desain awal sistem Layanan digital.		Bank Sumut	prosedur dan persyaratan, e-antrian, serta sistem pengaduan terintegrasi untuk meningkatkan kemudahan,kecepatan, transparansi dan efisiensi pelayanan.	SDM di kabupaten/kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan kab/kota 4. Penentuan lokasi
		Lokasi: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.				
		Identifikasi Penetapan Lokasi 1. Pelaksanaan Survei lapangan untuk identifikasi kebutuhan dan potensi gangguan jaringan. 2. Integrasi Sistem (Layanan). 3. Pemetaan Lokasi Strategis. 4. Koordinasi kepada <i>Stakeholder</i> dan Penyusunan dokumen perencanaan Teknis dan Administratif. Lokasi Kegiatan: - 33 Kabupaten/Kota				1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
	2026	Pembangunan integrasi portal aplikasi 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi . 2. Integrasi Sistem (Layanan). 3. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 4. Sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat. Lokasi Kegiatan: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.			Penyusunan Kajian Urgensi dan DED untuk pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP). Pengajuan permohonan Rekomendasi ke KemenPan-RB untuk pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP).	1. Penyiapan dan penguatan infastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota 4. Penentuan lokasi
		Tidak ada				1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2027	Pengembangan dan penambahan 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. 2. Integrasi Sistem (Layanan).			Mall Pelayanan Publik (MPP).	1. Penyiapan dan penguatan infastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		3. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 4. Sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat. 5. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.				SDM di kabupaten/kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota 4. Penentuan lokasi 1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di
		Pembangunan dan implementasi serta titik pemasangan jaringan internet 1. Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet. 2. Pemasangan Titik akses Wifi. 3. Sosialisasi Penggunaan. 4. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Mointoring. Lokasi Penggunaan: - 25 Kabupaten				Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2028	Perluasan area layanan dan akses jaringan internet				1. Penyiapan dan penguatan infastruktur digital.



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. 2. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 3. Sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat. 4. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi Kegiatan: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.				2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota 4. Penentuan lokasi
	2029	Perluasan area layanan dan akses jaringan internet 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. 2. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 3. Sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat. 4. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi Kegiatan:				1. Penyiapan dan penguatan infrastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan Kabupaten/Kota 4. Penentuan lokasi



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.				
		1. Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet. 2. Pemasangan Titik akses Wifi. 3. Sosialisasi Penggunaan. 4. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Monitoring. Lokasi Perluasan Area Layanan: - 25 Kabupaten				1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2030	Evaluasi dan Monitoring 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. 2. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 3. Sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat. 4. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi kegiatan: 33 Kabupaten/Kota				1. Penyiapan dan penguatan infastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan kab/kota. 4. Penentuan lokasi



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet. 2. Pemasangan Titik akses Wifi. 3. Sosialisasi Penggunaan. 4. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Monitoring. Lokasi Perluasan Area Layanan: - 33 Kabupate/Kota				1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan.
5 a. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI)	2025	Tidak ada	Dinas PUPR	OPD Dinas LHK terkait penyiapan dokumen lingkungan/AMDAL, Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas Perhubungan terkait Fasilitas Keselamatan Jalan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi		1. Dukungan penanganan akses jalan dalam koridor pembangunan jalan provinsi yang mendukung kawasan prioritas. 2. Dukungan penyediaan lahan pada rencana pelebaran yang tidak sesuai dengan Ruang Milik Jalan (RUMIJA).
	2026	1. Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) 2. Penyusunan Leger jalan 3. Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Simalungun, Kab.			1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (Dinas PUTR) 2. Survey Kondisi Jalan/Jembatan (Dinas PUTR) 3. Sosialisasi Rencana penanganan jalan pada ruas jalan kewenangan provinsi di kantor pemerintahan setempat (Kecamatan)	



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		Batu Bara, Kab. Deli Serdang, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kab. Pakpak Bharat, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Karo, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Mandailing Natal, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Selatan, Kab. Nias Barat 4. Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Simalungun, Kab. Samosir Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Asahan Kawasan Swasembada				



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		Pangan, Air dan Energi : Kab. Mandailing Natal Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana: Kab. Langkat target: jalan 202,84 km jembatan 202,90 m.				
	2027	1. Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) 2. Penyusunan Leger jalan 3. Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Simalungun, Kota Pematang Siantar, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Dairi, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Padang Lawas, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, Kab. Dairi,			1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (Dinas PUTR) 2. Survey Kondisi Jalan/Jembatan (Dinas PUTR) 3. Sosialisasi Rencana penanganan jalan pada ruas jalan kewenangan provinsi di kantor pemerintahan setempat (Kecamatan)	



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Afirmasi: Kab. Nias, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat, Kab. Nias Selatan Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana: Kab. Langkat 4. Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Batu Bara, Kab. Deli Serdang Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Serdang Bedagai, Kab. Asahan, Kota Tanjung Balai Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Serdang Bedagai, Kab. Pakpak Barat serta target: jalan 130,99 km & jembatan 708,45 m				
	2028	1. Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) 2. Penyusunan Leger jalan 3. Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Batu Bara, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Humbang			1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (Dinas PUTR) 2. Survey Kondisi Jalan/Jembatan (Dinas PUTR) 3. Sosialisasi Rencana penanganan jalan pada ruas jalan kewenangan	



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		Hasundutan,Kab. Tapanuli Tengah, Kab Toba,Kota Gunungsitoli, Kota Padangsidempuan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Karo, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kota Tanjung Balai, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Padang Lawas Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Mandailing Natal, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Langkat Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana : Kab. Langkat 4.Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Samosir, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Dairi Kawasan Komoditas			provinsi di kantor pemerintahan setempat (Kecamatan)	



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		Unggulan: Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Pakpak Bharat serta target: jalan 135,10 km & jembatan 438,90 m				
	2029	1.Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) 2.Penyusunan Leger jalan 3.Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Komoditas Unggulan: Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Lawas Utara Kawasan Pertumbuhan: Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Toba, Kota Padangsidempuan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Humbang Hasundutan,			1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (Dinas PUTR) 2. Survey Kondisi Jalan/Jembatan (Dinas PUTR) 3. Sosialisasi Rencana penanganan jalan pada ruas jalan kewenangan provinsi di kantor pemerintahan setempat (Kecamatan)	



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara Kawasan Afirmasi: Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana: Kabupaten Langkat 4. Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Kawasan Komoditas Unggulan: Kabupaten Nias Utara Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Toba Kawasan Afirmasi: Kabupaten Nias Barat serta target: jalan 87,60 km & jembatan 147,20 m				
	2030	1. Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) 2. Penyusunan Leger jalan 3. Pel			1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (Dinas PUTR) 2. Survey Kondisi Jalan/Jembatan (Dinas PUTR) 3. Sosialisasi Rencana penanganan jalan pada ruas jalan kewenangan	



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		aksan aan pena ngan an Jalan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Mandailing Natal, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Karo, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Padang Lawas, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Simalungun, Kab. Batu Bara, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Barat Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana: Kab. Langkat 4. Pelaksanaan penanganan Jembatan			provinsi di kantor pemerintahan setempat (Kecamatan)	



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		Kawasan Pertumbuhan: Kab. Deli Serdang Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Labuhanbatu, Kab. Serdang Bedagai Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Serdang Bedagai serta target: jalan 126,20 km & jembatan 51m				
b. Penguatan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Air Pertanian untuk Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan	2025	tidak ada	Dinas PUPR	OPD Dinas LHK terkait penyiapan dokumen lingkungan/AMD AL, Dinas TPH melakukan pemetaan terhadap kawasan swasembada dan dukungan terhadap irigasi tersier dan kuarter, benih, pupuk, alsintan, penyuluh pertanian. Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Dinas Kominfo untuk	1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa (Dinas PUTR) 2. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (Dinas PUTR) 3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (Dinas PUTR)	- Dukungan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier - Sinergi antara pemerintah daerah, kelompok tani, dan BUMDes untuk pemeliharaan jaringan irigasi
	2026	tidak ada			1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa (Dinas PUTR) 2. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (Dinas PUTR) 3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (Dinas PUTR)	- Pembangunan embung, sumur bor, dan pompanisasi untuk sumber air cadangan. - Digitalisasi sistem irigasi (<i>smart irrigation</i>) berbasis sensor dan aplikasi.
	2027	Akselerasi cakupan layanan target 3.175 Ha. Kabupaten Langkat - D.I			1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup	- Pemberdayaan P3A (Perkumpulan Petani



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		Secanggang, Kabupaten Mandailing Natal - DI. Terusan, Kabupaten Padang Lawas - DI. Balakka Sitongkon, Kabupaten Padang Lawas - DI. Sigorbus, Kabupaten Mandailing Natal - DI. Roburan Maga, Kabupaten Simalungun - DI. Raja Maligas, Kabupaten Simalungun - DI. Javaconisasi, Kabupaten Dairi - D.I Buluh Duri, Kabupaten Toba - D.I Hinalang, Kabupaten Tapanuli Utara - D.I Aek Sigeaon, Kabupaten Tapanuli Utara - D.I Hasak I dan II, Kabupaten Tapanuli Tengah - D.I Mombangboru, Kabupaten Samosir - D.I Tele Harian Boho, Kabupaten Humbang Hasundutan - D.I Parmiahan/Hutapaung, Kabupaten Nias - D.I Gido Zebua, Kabupaten Simalungun - D.I Bah Tongguran I, Kabupaten Simalungun - DI Raja		publikasi Media	untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa (Dinas PUTR) 2. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (Dinas PUTR) 3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (Dinas PUTR)	Pemakai Air) untuk pengelolaan irigasi. - Integrasi dengan program ketahanan pangan daerah.



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		Hombang/ Tongah Mangaraja, Kabupaten Padang Lawas Utara - DI.Padang Garugur, Padang Lawas Utara - D.I Napa Tanjung Beringin, Kabupaten Labuhanbatu - D.I.R Cinta Makmur, Kabupaten Asahan - D.I.Serbangan, Kabupaten Batu Bara - D.I.Simodong, Kabupaten Padang Lawas Utara - D.I.Padang Garugur, Kabupaten Labuhanbatu - D.I.R. Sei Serdang/sei Rakyat, Kabupaten Mandailing Natal - D.I. Terusan, Kabupaten Deli Serdang - D.I. Namorambe, Kabupaten Mandailing Natal - D.I. Tapus				
	2028	Penguatan jaringan teknis Kabupaten Batu Bara - (D.I.Simodong, D.I. Purwodadi,DI. Sei Balai,DI. Suka Makmur,DI. Sijambi), Kabupaten Simalungun - DI. Bah Horas Hulu/Tongah, Kabupaten Padang Lawas Utara - DI.Padang Garugur, Kabupaten Padang Lawas -			1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa (Dinas PUTR) 2. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (Dinas PUTR) 3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (Dinas PUTR)	



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		DI.Sigorbus, Kabupaten Labuhanbatu - (D.I.R Cinta Makmur,D.I.R. Sei Serdang/sei Rakyat), Kabupaten Tapanuli Tengah - D.I Mombangboru, Kabupaten Mandailing Natal - DI Roburan Maga, Kabupaten Langkat - D.I.R Gebang, Kabupaten Tapanuli Tengah - D.I Pandurungan/Sitandiang, Kabupaten Karo - DI.Parit Lompaten, Kabupaten Toba - DI.Hinalang, Kabupaten Tapanuli Utara - DI.Sigeaon, Kabupaten Tapanuli Utara - (DI.Simok Mok,D.I Aek Sarulla), Kabupaten Deli Serdang - D.I Medan Krio, Kabupaten Mandailing Natal - D.I. Tapus, Kabupaten Dairi - D.I. Buluh Duri, Kabupaten Mandaling Natal - D.I. Siulang Aling, Kabupaten Tapanuli Tengah - D.I Badiri Lopian				
	2029	Penyempurnaan konektivitas saluran Kab. Batu Bara (DI.Simodong), Kab. Tapanuli Selatan (DI.			1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa (Dinas PUTR)	



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		Sipirok Komplek), Kab. Labuhanbatu (DIR. Cinta Makmur, DIR. Sei Serdang/Sei Rakyat), Kab. Tapanuli Utara (DI.Simok Mok, Kab. Mandailing Natal (DI. Tapus), Kab. Dairi (DI. Buluh Duri), Kab. Mandailing Natal (DI. Siulang- Aling, Kab. Tapanuli Tengah (DI Mombangboru, Kab. Tapanuli Tengah (DI. Pandurungan/ Sitandiang, Kab. Tapanuli Tengah (DI. Badiri Lopian, Kab. Toba (DI. Sijambur , Kab. Simalungun (DI. Naga Sompah, Kab. Karo (DI.Parit Lompaten)			2. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (Dinas PUTR) 3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (Dinas PUTR)	
	2030	tidak ada			1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa (Dinas PUTR) 2. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (Dinas PUTR) 3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (Dinas PUTR)	
c. Peningkatan Kualitas	2025	- Membentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya	Dinas PKP	Dinas PUPR terkait dukungan		Bupati/Wali Kota: 1. Pendataan dan Validasi



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
Permukiman Layak, Terjangkau, dan Inklusif melalui Penyediaan Hunian Murah serta dukungan terhadap pelaksanaan program 3 juta rumah		- Survei Lokasi di setiap Kabupten/Kota - Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerja sama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll) - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah - <i>Launching</i> Pembangunan 15.000 unit rumah bagi MBR dan ASN - Pembangunan Fisik setiap Tahun - Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan •Kab. Simalungun, Kab. Batu Bara, Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Samosir, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Mandailing Natal, Kab. Nias Utara,		terkait Tata Ruang,Jalan, dan Keciaptakaryaan (sanitasi dan air minum), BPBD koordinasi terhadap Rehab rumah akibat bencana Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi Biro Pemotha (memfasilitasi kerja sama antar Pemerintah Daerah) Badan Kepegawaian dan BP Tapera untuk penyediaan data ASN yang belum memiliki rumah Dinas Kominfo untuk publikasi Media		Calon Penerima (BNBA = by name by address) 2. SK Kumuh yang dikeluarkan Bupati atau Wali Kota terkait wewenang Provinsi untuk luasan 10 – 15 Ha 3. SK Pokja Penanganan Kawasan Kumuh pada kabupaten/Kota 4. Melakukan sosialisasi kepada MBR dan ASN Dinas yang Membidangi Perumahan Rakyat (di kab/kota): Pelaksana teknis utama di lapangan. Bertanggung jawab atas pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan langsung dari lokasi perbaikan. Dinas PUPR Kabupaten/Kota: Memberikan bantuan teknis konstruksi, menyusun RAB,



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Pematangsiantar dan Kota Padangsidimpuan				dan memberikan supervisi teknis kepada pelaksana di lapangan. Dinas Sosial Kabupaten/Kota: Membantu dalam pembaruan dan verifikasi data kemiskinan di tingkat lokal. Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan: Ujung tombak identifikasi awal calon penerima, sosialisasi langsung kepada masyarakat, memfasilitasi gotong royong, dan membantu monitoring di lapangan. Badan Kepegawaian dan BP Tapera: Penyediaan data ASN yang belum memiliki rumah
	2026	tidak ada				
	2027	- Membentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya - Survei Lokasi di setiap kab/kota - Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerja sama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll) - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah - Pembangunan Fisik setiap Tahun - Perluasan pemasaran dan kepemilikan rumah bagi MBR dan ASN - Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan				



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		• Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Labuhanbatu, Kab. Simalungun, Kab. Dairi, Kab. Samosir, Kab. Nias dan Kab. Nias Selatan				
	2028	tidak ada				
	2029	tidak ada				
	2030	tidak ada				
6. Bantuan Hukum dan perlindungan rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE).	2025	- Penandatanganan Nota Kesepahaman PemprovSU dengan Poldasu - Penetapan SK Tim Prestice Provinsi - Penyusunan panduan teknis pelaksanaan - Pembentukan kelembagaan Prestice dan Edukasi dan Sosialisasi Prestice di 8 kota (Medan, Tebing Tinggi, Binjai, Pematangsiantar, Sibolga, Tanjungbalai, Gunungsitoli, Padangsidimpuan)	Biro Hukum	Dinas PMD Capil (memberikan data/pemetaan desa prioritas kegiatan PRESTICE yaitu desa dengan karakteristik konflik yang tinggi) Diskominfo (Publikasi),	Pembentukan POS bantuan Hukum	1. Replikasi Kegiatan Prestice pada tingkat Kabupaten/Kota 2. Edukasi dan Sosialisasi Prestice di tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan ke level Kecamatan dan Desa. 3. Pendampingan dari bagian hukum kabupaten/kota dari kasus tidak pidana ringan yang ditangani oleh PRESTICE



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		- Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba				
	2026	- Pembentukan kelembagaan Prestice, Bimbingan Teknis Paralegal Desa dan Edukasi dan Sosialisasi PRESTICE di 25 Kabupaten/Kota (Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Humbahas, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba - Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba			Pembentukan POS bantuan Hukum	



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		- Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan. - Pelatihan mediator tingkat Kabupaten/Kota (2 orang per kab/kota, dilaksanakan di Kota Medan)				
	2027	- Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan - Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba - Pelatihan mediator tingkat kabupaten/kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan)			Pembentukan POS bantuan Hukum	
	2028	- Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan				



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		- Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba - Pelatihan mediator tingkat kabupaten/kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan)				
	2029	- Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan - Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba - Pelatihan mediator tingkat kabupaten/kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan)			Pembentukan POS bantuan Hukum	
	2030	- Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan.			Pembentukan POS bantuan Hukum	



PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		- Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba - Pelatihan mediator tingkat kabupaten/kota (2 orang per Kabupaten/Kota, dilaksanakan di Kota Medan)				



Tabel 4.4. Dukungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terhadap Program Prioritas/Proyek Strategis Daerah (PSD) RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
PP1. PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH UNGGULAN BERBASIS PENINGKATAN SKILL YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI DAN POTENSI WILAYAH DI TINGKAT LOKAL						
1. Pemenuhan 100% Fasilitas Listrik dan Layanan Internet pada Seluruh SMA/SMK/SLB di Sumatera Utara	2025	Instalasi dan aktivasi pada titik lokasi bekerja sama dengan <i>provider</i> (Tahun 2025) Listrik: 35 Sekolah (8 SMA dan 27 SMK)	Dinas Pendidikan	Disperindag ESDM (pendampingan terhadap akses listrik), Dinas Kominfo (pendampingan terhadap akses internet dan publikasi kegiatan).		Pembangunan akses jalan yang baik ke sekolah yang akan dibangun akses listrik dan layanan internet.
		a. LISTRIK GRATIS				
		SMK:SMKN 1 BORONADU Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 1 SUSUA Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 2 SUSUA Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 1 UMBUNASI Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 2 ARAMO Kabupaten NIAS SELATAN,			perbaikan akses jalan menuju sekolah	



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
		SMKN 1 IDANO TAE Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 1 AMANDARAYA Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 1 O'O'U Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 1 LOLOWAU Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 1 HILIMEGAI Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 1 LOLOMATUA Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 1 PULAU PULAU BATU Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 2 PULAU PULAU BATU Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 1 HURUNA Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 2 HURUNA Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 1 GOMO Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 1 MAZO Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 1 HILISALAWAHE Kabupaten NIAS SELATAN, SMKN 1 MOROO Kabupaten NIAS BARAT, SMKN 1 ULU MOROOKabupaten NIAS BARAT, SMKN 2 ULU MOROO Kabupaten NIAS BARAT, SMKN 1 MANDREHE				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
		Kabupaten NIAS BARAT, SMKN 2 MANDREHE Kabupaten NIAS BARAT, SMKN 2 MANDREHE UTARA Kabupaten NIAS BARAT, SMKN 1 MANDREHE BARAT Kabupaten NIAS BARAT, SMKN 1 LAHOMI Kabupaten NIAS BARAT, SMKN 1 SIROMBU Kabupaten NIAS BARAT, SMKN 2 TUGALA OYO Kabupaten NIAS UTARA, SMKN 2 SOMOLO-MOLO Kabupaten NIAS, SMKN 1 MA'U Kabupaten NIAS, SMKN 2 HILISERANGKAI Kabupaten NIAS, SMKN 1 HILIDUHO Kabupaten NIAS, SMKN 1 ULUGAWOK Kabupaten NIAS, SMKN 1 SIPOHOLON Kabupaten Tapanuli Utara SLB:SLB Negeri Gunungsitoli, SLB Negeri Nias Barat, SLB Negeri Salak Kabupaten Pakpak Bharat Pembiayaan tagihan listrik dan Perangkat Internet (Tahun 2025-2030)				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2026	1.Pembiayaan tagihan listrik dan Perangkat Internet 2.Pemeliharaan & <i>maintenance</i>				
	2027	1.Pembiayaan tagihan listrik dan Perangkat Internet 2.Pemeliharaan & <i>maintenance</i>				
	2028	1.Pembiayaan tagihan listrik dan Perangkat Internet 2.Pemeliharaan & <i>maintenance</i>				
	2029	1.Pembiayaan tagihan listrik dan Perangkat Internet 2.Pemeliharaan & <i>maintenance</i>				
	2030	1.Pembiayaan tagihan listrik dan Perangkat Internet 2.Pemeliharaan & <i>maintenance</i>				
2. Pembangunan 4 SMA/SMK/SLB Unggulan (Nias/SMA - 2026, Asahan/SMK - 2027, Samosir/SMK – 2028, Karo/SLB - 2029)	2025	tidak ada	Dinas Pendidikan	PUPR (Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)		- Penyediaan lahan/hibah lahan yang diperlukan - Pembangunan akses jalan yang baik dari dan ke sekolah - Menyediakan basis data siswa SMP/SLTP kelas IX yang berprestasi dan direkomendasikan masuk ke dalam sekolah unggulan
	2026	tidak ada				
	2027	tidak ada				
	2028	tidak ada				
	2029	tidak ada				
	2030	tidak ada				
3. Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK/SLB sebanyak 490 Sekolah	2025	Pendataan valid rehab ruang kelas tahun 2026-2029•Provinsi Sumatera Utara (Dokumen Aprasial)	Dinas Pendidikan	PUPR (Appraisal/Penilaian Kerusakan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi)		Pembangunan infrastruktur akses jalan yang baik dari dan menuju sekolah yang akan dilakukan kegiatan
	2026	tidak ada				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2027	tidak ada		Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)		rehabilitasi ruangan kelas rusak
	2028	Pelaksanaan Fisik Tahap III – 190 Ruang Kelas (2028) di 28 Kabupaten/Kota •Medan, Binjai, Langkat, Karo, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Dairi, Tebing Tinggi, Batu Bara, Asahan, Tanjung Balai, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Simalungun, Pematangsiantar, Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Padangsidimpuan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Padang Lawas			perbaikan akses jalan menuju sekolah	
	2029	Monitoring, Evaluasi & Pemutakhiran Data (2029)				
	2030					
4. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru	2025	Pendataan Kebutuhan Ruang Kelas Baru (mendesak), Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap I sebanyak 57 RKB di 15 Kabupaten/Kota •Deli Serdang, Langkat, Dairi, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Simalungun, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan,	Dinas Pendidikan	PUPR (Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	- perbaikan akses jalan menuju sekolah - penyediaan lahan apabila diperlukan	Penyediaan atau hibah Lahan dari kabupaten/kota untuk lokasi Pembangunan RKB sesuai kebutuhan. Pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan akses jalan yang baik dari dan menuju sekolah.



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
		Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Asahan				
	2026	Pembangunan Ruang Kelas Baru (mendesak) Tahap II (2026) sebanyak 80 Ruang Kelas Baru di 19 Kabupaten/Kota •Langkat, Binjai, Medan, Dairi, Serdang Bedagai, Batu Bara, Asahan, Simalungun, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Padangsidempuan, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 4 Unit Sekolah Baru			- perbaikan akses jalan menuju sekolah - penyediaan lahan apabila diperlukan	
	2027	Pembangunan Ruang Kelas Baru sebanyak 30 Ruang Kelas Baru di 14 Kabupaten/Kota•Medan, Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Tapanuli			- perbaikan akses jalan menuju sekolah	



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
		Utara, Padangsidempuan, Tapanuli Tengah, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Nias, Nias Selatan, Gunungsitoli			- <i>penyediaan lahan apabila diperlukan</i>	
	2028	tidak ada			-	
	2029	-				
05. Optimalisasi Sarana dan Prasarana BLK Provsu menuju BLK Tematik Bioindustri dan Pariwisata	2025	tidak ada	R	DISNAKE Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral: Disperindag ESDM bersifat mendukung dan lintas sektor, bukan pelaksana utama pelatihan. Maka Disperindag ESDM mendukung proyek strategis BLK, sebagai berikut: • Menjadi penghubung antara pelaku industri/perusahaan dengan Disnaker dan BLK. • Memfasilitasi program magang industri dan penempatan lulus BKL ke industri lokal. • Disperindag ESDM dapat menjadi mitra		Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1. Dukungan sarana dan prasarana pendukung sesuai kewenangan kabupaten 2. Memfasilitasi kerja sama antara BLK dan perusahaan lokal untuk program magang, pelatihan kerja, atau penyerapan tenaga kerja berbasis potensi daerah
	2026	tidak ada				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2027	tidak ada		dalam pengembangan program pelatihan vokasi di BLK melalui fasilitasi pelatihan berbasis proyek industri, penyediaan instruktur ahli dari sektor industri dan akses terhadap bantuan alat pelatihan.	1. Pendataan peserta pelatihan 2. Dukungan sarana dan prasarana pendukung sesuai kewenangan kabupaten 3. Memfasilitasi kerja sama antara BLK dan perusahaan lokal untuk program magang, pelatihan kerja, atau penyerapan tenaga kerja berbasis potensi daerah	
	2028	tidak ada		Dinas Pendidikan: Dinas Pendidikan memiliki peran dalam proyek strategis ini dalam hal pelatihan kerja, sebagai berikut: • Mendorong sinkronisasi kurikulum SMK/vokasi dengan skema pelatihan BLK agar lulusan SMK lebih siap kerja. • Memastikan kompetensi lulusan SMK sejalan dengan kebutuhan industri dan program pelatihan BLK. • Mengintegrasikan teaching factory di SMK dengan fasilitas pelatihan BLK untuk menciptakan ekosistem pelatihan dual system.	1. Pendataan peserta pelatihan 2. Dukungan sarana dan prasarana pendukung sesuai kewenangan kabupaten 3. Memfasilitasi kerja sama antara BLK dan perusahaan lokal untuk program magang, pelatihan	



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2029-2030	tidak ada		• Mendorong peserta didik SMK mengikuti sertifikasi kompetensi melalui LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang terhubung dengan BLK. • Bersama Disnaker, mendata dan menyiapkan guru produktif/tenaga pelatih yang memenuhi standar pelatihan. Dinas Koperasi dan UMKM: • Mengintegrasikan hasil pelatihan BLK dengan program inkubasi usaha UMKM • Membina lulusan BLK agar mampu mengembangkan usaha mandiri berbasis keahlian yang telah diperoleh • Menyediakan pendampingan usaha lanjutan bagi peserta pelatihan BLK yang ingin berwirausaha • Menyediakan ruang inkubasi bisnis di sentra-sentra UMKM daerah yang terhubung dengan BLK • Membantu lulusan BLK yang berwirausaha dalam	<i>kerja, atau penyerapan tenaga kerja berbasis potensi daerah</i> 1. Pendataan peserta pelatihan 2. Dukungan sarana dan prasarana pendukung sesuai kewenangan kabupaten 3. Memfasilitasi kerja sama antara BLK dan perusahaan lokal untuk program magang, pelatihan kerja, atau penyerapan tenaga kerja berbasis potensi daerah	



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
				promosi dan digitalisasi produk melalui E-commerce dan platform digital UMKM. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: • Menyediakan ruang promosi bagi hasil karya lulusan BLK di sektor kriya, kuliner, dan fesyen etnik melalui festival budaya, event pariwisata, serta platform pemasaran digital. • Menjalin kolaborasi dengan Disnaker untuk mendukung pengembangan ekosistem pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat dan budaya lokal melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. • Memberikan dukungan fasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi bagi peserta pelatihan BLK untuk meningkatkan daya saing dan kesiapan kerja di		



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
				sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. • Bekerja sama dengan Disnaker dalam menyusun kurikulum pelatihan di BLK yang relevan dengan kebutuhan industri pariwisata dan subsektor ekonomi kreatif. Dinas Sosial: • Menjangkau dan Memberdayakan Kelompok Rentan Sosial. • Integrasi Program Rehabilitasi Sosial dan Pelatihan Kerja. • Bersinergi dengan Disnaker dalam memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan program pelatihan BLK tepat sasaran, terutama bagi warga miskin dan rentan sosial. • Melalui tenaga pekerja sosial, Dinas Sosial dapat melakukan pendampingan bagi peserta pelatihan selama dan setelah masa		



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
				pelatihan, untuk memastikan mereka mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh, baik untuk bekerja maupun memulai usaha secara mandiri. Badan Kepegawaiaan Daerah: • BKD berperan dalam mendukung ketersediaan ASN dengan kompetensi teknis dan manajerial yang relevan, untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BLK, baik sebagai instruktur, tenaga administrasi, maupun pengelola program pelatihan. • Melakukan pemetaan dan perencanaan kebutuhan SDM aparatur di bidang pelatihan vokasional agar sejalan dengan arah pengembangan BLK, termasuk dalam pengadaan, rotasi, dan pengembangan karier ASN yang ditempatkan di unit- unit pelatihan.		



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
				• BKD dapat mengintegrasikan program pelatihan teknis fungsional dan manajerial bagi ASN yang bertugas di lingkungan BLK ke dalam rencana pengembangan kompetensi tahunan, guna meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan pelatihan. • Berperan dalam membangun sistem penilaian kinerja yang berbasis output dan dampak, termasuk mengawasi efektivitas kinerja ASN di BLK dalam menyelenggarakan pelatihan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja. Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan		
PP2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM						



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
BERKARYA DAN BERPRESTASI						
6. Liga Olahraga Pelajar Sumut Piala Gubernur Sumatera Utara Cabang Olahraga Sepak Bola dan Voli tahun 2026 - 2030	2025	1. Inisiasi dan konsolidasi melalui rapat koordinasi tahun 2025 2. Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2025 • Provinsi Sumatera Utara	Dispora	Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan (pembinaan, edukasi dan sosialisasi kepada pelajar untuk dapat menjadi atlet pelajar) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)		- Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan liga olahraga pelajar sumut untuk cabor sepak bola dan voli
	2026	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2026 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2026 • Provinsi Sumatera Utara			1. <i>Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar tingkat Kabupaten Tapanuli Utara</i> 2. <i>Pengiriman atlet pelajar ke Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Provinsi Sumatera Utara</i>	- Melaksanakan <i>side event</i> pada saat pelaksanaan liga olahraga (pameran UMKM) dan sejenisnya
	2027	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2027 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2027 • Provinsi Sumatera Utara				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2028	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2028 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2028• Provinsi Sumatera Utara				
	2029	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2029 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2029 • Provinsi Sumatera Utara				
	2030	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2030 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2030 Penguatan <i>Legacy</i> & Keberlanjutan Tahun 2030 • Provinsi Sumatera Utara				
7. Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Sumatera Utara pada Cabang Olahraga Atletik Tahun 2026 - 2030	2025	Inisiasi konsolidasi melalui pertemuan koordinasi Tahun 2025 • Kota Medan dan Kab. Deli Serdang	Dispora	Dinas pendidikan / Cabang Dinas Pendidikan (Edukasi dan Sosialisasi bagi Pelajar Difabel untuk dapat mendata dan membina atlet sesuai potensi dan minat siswa) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)		NPC Kabupaten/Kota dan Dispora Kabupaten/Kota a memperkuat perekrutan dan pembinaan para atlet disabilitas pelajar di Kabupaten/Kota
	2026	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2026 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2026-2027 •Kota Medan dan Kab. Deli Serdang				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2027	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2027 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2027-2028 •Kota Medan dan Kab. Deli Serdang				
	2028	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2028 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2028-2029 •Kota Medan dan Kab. Deli Serdang				
	2029	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2029 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2029-2030 •Kota Medan dan Kab. Deli Serdang				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2030	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2030 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2030 •Kota Medan dan Kab. Deli Serdang				
PP 3 KESEHATAN YANG TERINTEGRASI DI BEBERAPA TITIK KAWASAN YANG MENJADI SENTRA LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT TERPADU						
8. Digitalisasi sistem kesehatan terintegrasi (<i>Sumut e-Health Integration system</i>)	2025	Penyusunan Kajian dan Bisnis Proses <i>Platform e- Health Integration System</i> Tahun 2025 Pembangunan Aplikasi Tahun 2025 <i>Launching</i> Aplikasi <i>Sumut e-Health Integration System</i> Tahun 2025 •33 Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo (Penyediaan Web,Server dan Publikasi Kegiatan)	- <i>pemutakhiran data DTSEN untuk penerima JKN</i>	-Penyediaan data kepesertaan JKN Kabupaten/Kota -Sosialisasi dan edukasi platform kepada faskes tingkat Kabupaten/Kota



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2026	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2026 Pengembangan Aplikasi <i>Sumut e-Health Integration System</i> Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota			- <i>pemutakhiran data DTSEN untuk penerima JKN</i>	
	2027	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2027 Pengembangan Aplikasi <i>Sumut e-Health Integration System</i> Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota			- <i>pemutakhiran data DTSEN untuk penerima JKN</i>	
	2028	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2028 Pengembangan Aplikasi <i>Sumut e-Health Integration System</i> Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota			- <i>pemutakhiran data DTSEN untuk penerima JKN</i>	
	2029	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2029 Pengembangan Aplikasi <i>Sumut e-Health Integration System</i> Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota			- <i>pemutakhiran data DTSEN untuk penerima JKN</i>	
	2030	-				
9. Beasiswa Ikatan Dinas bagi Dokter Spesialis dan	2025	tidak ada	Dinas Kesehatan	Badan Kepegawaian (Pelaksanaan assesmen)		-Menyediakan data dokter umum yang memenuhi
	2026	tidak ada				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
dokter spesialis residen di Wilayah Kurang Terlayani (2025 – 2030)	2027	- Pemenuhan Dokter Spesialis melalui pemberian beasiswa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yakni USU dan UGM - Distribusi dokter spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer dan Rujukan melalui dokter residen (Layanan Medis Merata) Tahun 2025-2030 •RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi, RSUD Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai, RSUD Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, RSUD Sidikalang Kabupaten Dairi, RSUD Tanjung Pura Kabupaten Langkat, RSUD Kabanjahe Kabupaten Karo, RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara, RSUD H. Abdul M. Simatupang Kabupaten Asahan, Lanjutan 2026 : 8 orang, Lanjutan 2025 : 21 Orang		kompetensi dokter spesialis sesuai kebutuhan, Pembinaan Monitoring kepada Badan Kepegawaian kab/kota agar Dokter Spesialis yang sudah dididik tidak berpindah tempat kerja) Biro Pemotda (Fasilitasi Penyusunan Dokumen kerja sama dengan USU dan UGM) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	- <i>pendataan dokter umum yang memenuhi syarat</i> - <i>pemetaan kebutuhan dokter spesialis di RSUD Tarutung</i> - <i>penyiapan sarana prasarana untuk kebutuhan dokter spesialis</i>	persyaratan untuk dapat memperoleh beasiswa dokter spesialis dan Mengidentifikasi jenis dan jumlah spesialis yang dibutuhkan di RSUD atau faskes daerah - Menyiapkan surat komitmen bersama dengan para Bupati/Wali Kota yang menyatakan bahwa peserta dokter spesialis akan kembali ke daerah asal dan RSUD setempat - Menentukan jenis spesialis yang paling dibutuhkan - Kesiapan Sarana dan Prasarana RSUD - Surat Penugasan & Dukungan Legal Formal - penyediaan Akomodasi dokter residen
	2028	tidak ada				
	2029	tidak ada				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2030	tidak ada				
10. Dukungan Pengembangan Rumah Sakit Unggulan (Pengembangan Rumah Sakit Unggulan dan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan)	2025	-	Dinas Kesehatan	PUPR (Manajemen Konstruksi, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)		- Penyediaan Lahan dan Dokumen Legalitas - Menyediakan tenaga non-medis, mendukung rekrutmen tenaga kesehatan, dan pemeliharaan fasilitas Koordinasi Lintas Pemerintahan
	2026	tidak ada				
	2027	tidak ada				
	2028	tidak ada				
	2029	tidak ada				
	2030	-				
PP4 PEMBERANTASAN KEMISKINAN MELALUI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RENTAN SECARA MENYELURUH DAN TEPAT SASARAN						
	2025	tidak ada	Dinas Sosial	Disperindag dan Dinas Koperasi UMKM		Dukungan penjajakan calon penerima bantuan
	2026	tidak ada				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
11. Bantuan Sosial Produktif melalui Program Masyarakat Produktif (MAPRO).	2027	Penyaluran bantuan modal usaha dan Pelatihan keterampilan/pengembangan usaha Program Masyarakat Produktif Tahun 2026-2029 - Pendampingan dan monitoring serta Evaluasi lapangan Tahun 2026-2029 •Sebanyak 550KK (110 KUBE) di 5 (Lima) Kabupaten/Kota: Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Labuhanbatu Utara, Toba, Simalungun serta 400 KK (UEP) di 5 Kabupaten/Kota: Binjai, Padang Lawas, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Dairi		(Dukungan Pelatihan dan Pendampingan bagi sasaran kegiatan Mapro yaitu KUBE dan UEP, fasilitasi keikutsertaan Kelompok Usaha Bersama/Usaha Ekonomi Produktif Mapro dalam pameran/expo yang dilaksanakan oleh Dinas) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	<i>Pendataan calon penerima bantuan</i>	agar tepat sasaran. Dukungan koordinasi penyiapan kegiatan pelatihan bagi calon penerima bantuan di kab/kota. Replikasi kegiatan serupa di kab/kota masing-masing.
	2028	tidak ada				
	2029	tidak ada				
	2030	-				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
12. Pelaksanaan Program Pasar Murah Bergerak (PMB)	2025	Identifikasi kebutuhan dan lokasi sasaran (IHK, P3KE, desa rentan pangan, dan wilayah 3T); Penentuan komoditas & harga jual; Penyusunan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Pasar Murah Bergerak (PMB); Koordinasi dan Kemitraan dengan TPID, BULOG, CSR, Distributor, Pengusaha daerah/koperasi/bumdes, Pemerintah kab/kota; Penentuan jadwal & titik lokasi; Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB)	DISPERINDAG ESDM	• Dinas TPH : Data pangan strategis dan penyediaan stok • Dinas Perhubungan : Transportasi logistik • Dinas Sosial : Data P3KE <i>by name by address</i> (untuk menentukan titik titik PMB dilakukan) • Dinas Koperasi & UMKM : Pelibatan UMKM dan Koperasi dalam penyediaan stok • Biro Perekonomian : pelibatan TPID untuk menghitung dampak terhadap pengendalian inflasi • Dinas Kominfo : Publikasi Pelaksanaan • Bappelitbang: Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan • Inspektorat : Pengawasan Pelaksanaan	<i>Pendataan kecamatan dan jlh penduduk miskin</i> <i>Pendataan KUKM</i> <i>Pengawasan distribusi dan harga bahan kebutuhan pokok;</i> <i>Penyediaan lokasi untuk pelaksanaan;</i> <i>Monitoring dan evaluasi.</i>	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan (Tahun 2025-2030): 1. Pendataan kecamatan dan jumlah penduduk miskin dan rawan miskin; 2. Pendataan jumlah KUMKM penyedia Bahan Kebutuhan Pokok; 3. Pengawasan distribusi dan harga bahan kebutuhan pokok; 4. kerja sama antar kabupaten dalam penyediaan Bahan Kebutuhan Pokok 5. Penyediaan lokasi untuk pelaksanaan; 6. Monitoring dan evaluasi
		Lokasi: Medan (kontributor inflasi), Pematangsiantar (kota IHK), Padangsidimpuan (akses terbatas), Gunungsitoli (kemiskinan ekstrem), Simalungun (penyangga distribusi), Labuhanbatu Selatan (wilayah miskin), Tapanuli Selatan (wilayah rawan harga), Langkat (rawan lonjakan harga dan distribusi), Tapanuli Utara (akses geografis sulit), Deli Serdang (wilayah IHK), Humbang Hasundutan (terpencil), Binjai (urban miskin), Toba (hinterland), Serdang Bedagai (penyangga				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
		pangan), Asahan(daerah padat penduduk)				
	2026	Konsolidasi kelembagaan, integrasi sistem informasi daerah; Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB)			<i>Pendataan kecamatan dan jlh penduduk miskin</i> <i>Pendataan KUKM</i> <i>Pengawasan distribusi dan harga bahan kebutuhan pokok;</i> <i>Penyediaan lokasi untuk pelaksanaan;</i> <i>Monitoring dan evaluasi</i>	



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
		Lokasi: Mandailing Natal (kemiskinan struktural), Tapanuli Utara (akses terbatas), Nias Barat (isolasi logistik), Humbang Hasundutan (wilayah dataran tinggi), Pakpak Bharat (akses sangat terbatas), Dairi (wilayah perbatasan), Kab. Batu Bara (wilayah pesisir), Toba (<i>hinterland</i>), Samosir (wilayah tertutup), Labuhanbatu Selatan (kemiskinan tinggi), Nias Selatan (akses sulit), Padang Lawas (rawan logistik), Padang Lawas Utara (wilayah sulit distribusi), Tapanuli Tengah (akses dan harga tinggi), Langkat (distribusi padat dan IHK)				
	2027	Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) • 15 Kabupaten/Kota			<i>Pendataan kecamatan dan jlh penduduk miskin</i> <i>Pendataan KUKM</i> <i>Pengawasan distribusi dan harga bahan kebutuhan pokok;</i> <i>Penyediaan lokasi untuk pelaksanaan;</i> <i>Monitoring dan evaluasi</i>	



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2028	Tidak ada				
		Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) • 15Kabupaten/Kota			<i>Pendataan kecamatan dan jlh penduduk miskin Pendataan KUKM Pengawasan distribusi dan harga bahan kebutuhan pokok; Penyediaan lokasi untuk pelaksanaan; Monitoring dan evaluasi</i>	
		Tidak ada				
	2029	Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) • 15Kabupaten/Kota			<i>Pendataan kecamatan dan jlh penduduk miskin Pendataan KUKM Pengawasan distribusi dan harga bahan kebutuhan pokok; Penyediaan lokasi untuk pelaksanaan; Monitoring dan evaluasi</i>	
		tidak ada				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2030	Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) • 15Kabupaten/Kota			<i>Pendataan kecamatan dan jlh penduduk miskin Pendataan KUKM Pengawasan distribusi dan harga bahan kebutuhan pokok; Penyediaan lokasi untuk pelaksanaan; Monitoring dan evaluasi</i>	
		tidak ada				
13. Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja Rentan (Subsidi BPJS Ketenagakerjaan)	2025	1. Pendataan dan verifikasi2. Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan (Pekerja rentan yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja dibawah standar) sebanyak 21.000 (APBD dan DBH Sawit)3. Penguatan peran dan komitmen kabupaten/kota dalam pembiayaan dan regulasi (MoU Pemprovsum dengan Kabupaten dan Kota)-33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem diDesil 1 dan 2)	R DISNAKE	• Dinas Sosial • Dinas Sosial berperan dalam memberikan data dukung DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk memastikan penerima termasuk dalam kategori penerima bantuan. • Pendataan dan Validasi Calon Penerima, Mengelola dan memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penetapan penerima bantuan iuran BPJS.	<i>Pendataan bagi Tenaga Kerja Rentan</i>	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan:1. Mendukung pelaksanaan agar bisa mencapai target <i>Universal Coverage Jamsostek</i> (UCJ) sebesar 60% sesuai RPJMD 2025-20292. Memberikan sosialisasi untuk masyarakat, khususnya untuk tenaga kerja rentan dan



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2026	Perluasan kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.645 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2		• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil • Penyediaan dan Verifikasi Data Identitas • Menyediakan data kependudukan yang valid (NIK, KK, KTP) sebagai prasyarat utama pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan. • Melakukan verifikasi dan sinkronisasi data dengan sistem BPJS, DTKS (Dinas Sosial), dan lembaga lain untuk memastikan data pekerja rentan terverifikasi secara administratif. • Dukungan Pemutakhiran Data DTKS, Bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan data identitas dalam DTKS (Data	<i>Pendataan bagi Tenaga Kerja Rentan</i>	masyarakat yang berada di garis kemiskinan ³ . Pengalokasian DBH sawit dan APBD dengan persentase pembagian 80 persen kab/kota dan 20 persen provinsi utk perlindungan pekerja rentan miskin ekstrem desil 1 dan 2
	2027	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.646 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2			<i>Pendataan bagi Tenaga Kerja Rentan</i>	
	2028	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.647 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2			<i>Pendataan bagi Tenaga Kerja Rentan</i>	



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2029	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.648 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2		Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang digunakan untuk menetapkan penerima bantuan iuran BPJS. • Membantu mempercepat proses registrasi atau koreksi data calon penerima manfaat yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap. • BPJS KetenagakerjaanBPJS Ketenagakerjaan berperan menyelenggarakan perlindungan sosial bagi pekerja melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Perlindungan atas risiko kecelakaan selama bekerja. • Jaminan Kematian (JKm): Santunan kepada ahli waris pekerja yang meninggal. • Jaminan Hari Tua (JHT): Tabungan jangka panjang bagi pekerja saat pensiun. • Jaminan Pensiun (JP): Penghasilan berkala untuk pekerja setelah pensiun.	Pendataan bagi Tenaga Kerja Rentan	
	2030	1. Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.648 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota2. Evaluasi menyeluruh dan pencapaian target cakupan 60% UCJ-33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara			Pendataan bagi Tenaga Kerja Rentan	



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
				• Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Bantuan uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan bagi pekerja yang terkena PHK. • Kominfo: Publikasi Kegiatan		
14. Revitalisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Panti Sosial Provinsi	2025	Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi		PUPR (Dokumen <i>appraisal</i> , pendampingan, monitoring dan evaluasi untuk revitalisasi panti sosial) Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, Disnaker (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan Kerja bagi sasaran Penghuni Panti) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)		- kab/kota mendukung pelaksanaan pelatihan bimbingan mental, dan pendidikan paket A/B/C bagi penerima manfaat yang dirujuk dari panti sosial provinsi khususnya panti anak dan remaja - Kabupaten/Kota Bersama Provinsi melakukan pemantauan, evaluasi atas keberlanjutan penerima manfaat.
	2026	Penyusunan dokumen <i>appraisal</i> /penilaian kerusakan bekerja sama dengan Dinas PUPR Penyusunan dokumen perencanaan (jasa konsultan perencanaan) untuk 13 panti sosial Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2027	Revitalisasi fisik gedung Panti Sosial (4 unit)1.PSAR Anak Tanjung Morawa (Kabupaten Deli Serdang)2.PS Lansia Kisaran (Kabupaten Asahan)3.PS Gepeng Binjai (Kota Binjai)4.PS Lansia TRW Pematangsiantar (Kota Pematangsiantar)Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni pantiPemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni pantisosial yang akan memasuki masa terminasi				
	2028	Revitalisasi fisik gedung Panti Sosial (4 unit) 1.PS Tuna Susila & Tuna Laras Berastagi (Kabupaten Karo) 2.PS Padangsidimpuan (Kota Padangsidimpuan) 3.PS Siborong-borong (Kabupaten Tapanuli Utara) 4.PS Tebing Tinggi (Kota Tebing Tinggi) Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2029	Revitalisasi fisik gedung Panti Sosial (5 unit) 1.PS Anak Sidikalang-Kabanjahe (Kabupaten Dairi & Kabupaten Karo) 2.PS Lausimomo-Hutasalem (Kab.Karo & Kabupaten Toba) 3.PS Anak Gunungsitoli (Kota Gunungsitoli) 4.PS Eks Kusta Belidahan-Sicanang (Kota Medan) 5.PS Pinangsori (Kabupaten Tapanuli Tengah) Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi				
	2030	Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi				
PP 5 PENGUATAN STABILITAS MAKRO EKONOMI DAN KESINAMBUNGAN FISKAL DAERAH						
	2025	tidak ada		• Bappelitbang : Menyelaraskan rencana		2025: Dukungan kab/kota untuk Pengembangan
		tidak ada				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
15. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pertanian dan pariwisata	2026	tidak ada	DISBUDPAREKRAF DAN DINAS KETAPANG TPH	pengajuan KEK Pariwisata dan Pertanian dengan RPJMD, RTRW, RPJPD, dan RIPPARNAS/RIPPARD A , Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan • Dinas Lingkungan Hidup : Kajian AMDAL dan pengelolaan lingkungan • Dinas Ketenagakerjaan: Peningkatan <i>Capacity Building</i> Pariwisata dan Pertanian • Dinas Pendidikan: Penguatan Vokasi SMK Pariwisata dan Pertanian • Dinas PUPR : Percepatan Perda RTRW Perubahan, sinkronisasi lokasi KEK pada RTRW • Dinas Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan • Biro Hukum : Penetapan Regulasi Perda/Pergub • DPMPSTSP : fasilitasi perizinan		KEK Pariwisata
		tidak ada				Koordinasi terkait rencana pengajuan DPSP Danau Toba menjadi KEK
	2027	tidak ada				2026: • Persetujuan Pemerintah
		tidak ada				Kabupaten/Kota di Kawasan Danau Toba dan Penetapan Lokasi
	2028	tidak ada				• Penetapan Pergub RTRW; Kesesuaian Dokumen RTRW dan RDTR
		tidak ada				2027: • Penyediaan Lahan (Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KEK dalam hal terdapat lahan yang belum dibebaskan) • Peningkatan infrastruktur kewenangan kabupaten (jalan, air, sarana persampahan, sanitasi)
	2029	tidak ada				• Kemudahan Perizinan Usaha
		tidak ada				Kewenangan kab/kota
	2030	tidak ada				2028: • Peningkatan SDM Pariwisata dan Pertanian • Penyediaan Lahan • Peningkatan Infrastruktur kewenangan kab/kota • Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan
		tidak ada				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
						kab/kota 2029: '• Peningkatan SDM Pariwisata '• Penyediaan Lahan '• Peningkatan Infrastruktur kewenangan kab/kota •
						Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan kab/kota • Promosi Investasi 2030: '• Peningkatan SDM Pariwisata dan Pertanian '• Penyediaan Lahan '• Peningkatan Infrastruktur kewenangan kab/kota • Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
						kab/kota • Promosi Investasi
16. Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan di Kawasan Industri Sumatera Utara	2025	Penguatan Hilirisasi Produk Unggulan Sumatera Utara Identifikasi rantai pasok dan IKM Komoditas Unggulan Lokasi • Kelapa: Kab. Nias Barat, Kab. Nias Selatan, Kab. Nias Utara, Kab. Asahan, Kab. Batu Bara, dan Kab. Labuhanbatu Utara • Kopi: Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Utara, dan Kab. Simalungun • Aren: Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kab. Mandailing Natal • Cabai: Kab. Karo, Kab. Batu Bara, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Deli Serdang	DISPERINDAG ESDM	• Dinas TPH : Peningkatan Produksi Cabe melalui Sarprodi; Pemberian Bibit Cabai varietas tahan hama & cocok untuk pengeringan, <i>capacity building</i> bagi petani • Dinas Perkebunan dan Peternakan : Peningkatan Produksi Kelapa, Aren dan Kopi melalui Sarprodi; Pemberian Bibit Kelapa genjah, Kopi Unggu, Aren, <i>capacity building</i> bagi petani	<i>Penyediaan data IKM</i>	Dukungan Kabupaten/Kota: • Menyediakan Data IKM sektor Kopi, Kelapa, Aren, Cabe (jenis produk, data produksi, nilai omset produksi)



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2026	1. Hilirisasi komoditas Unggulan Sumatera Utara Peningkatan Kapasitas Produksi IKM dengan Produk Hilirisasi , Riset inovasi produk dan teknologi tepat guna • Kelapa: VCO, Santan Kemasan, Minyak kelapa kopra (<i>cooking oil</i>); Gula Kelapa/gula semut, Kelapa kering, arang aktif dari batok kelapa, Produk berbasis serat sabut (keset, geotekstil, jok mobil) • Cabe: Cabe Kering, Cabe Bubuk, Saos (cabe bawang tomat), saos pasta ; Produk Turunan untuk Industri Non-Pangan (Ekstrak capsaicin → bahan baku industri farmasi, kosmetik (krim pereda nyeri, pelangsing), pestisida organik; Oleoresin cabai → pewarna dan pemberi rasa pedas alami untuk industri makanan & minuman; <i>Spray</i> pengusir hama berbahan capsaicin • Kopi: Minuman kopi kemasan siap minum (RTD Coffee) — botol/ <i>sachet</i> / <i>cup</i> ; Kopi instan (<i>pure instant coffee</i> , <i>3-in-1</i> , <i>cappuccino sachet</i>); <i>Drip bag coffee</i> — kopi bubuk dalam kantong celup; <i>Cold brew</i> • Aren : Gula Aren, Sirup Aren, Tuak,		• Dinas PUPR : Penguatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan • Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan		Peningkatan <i>capacity building</i> pada IKM (kelapa, cabe, kopi, aren); menyusun regulasi pengembangan hilirisasi,



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
		manisan kolang kaling, Sapu ijuk, sikat, keset, anyaman kerajinan dari lidi atau serat kayu/daun aren				
		• Kelapa: Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara dan Asahan • Kopi: Kab. Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Simalungun • Aren: Kab. Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal • Cabe : Kab. Karo dan Kab. Batu Bara			<i>Penyediaan data IKM</i>	
	2027	1. Hilirisasi Produk Unggulan Sumatera Utara Peningkatan Kapasitas Produksi Hilir dan peningkatan kemitraan IKM dengan industri hilir ; Diversifikasi Produk & Inovasi • Kelapa: Kab. Nias Barat, Kab. Nias Selatan, Kab. Nias Utara, Kab. Asahan, Kab. Batu Bara, dan Labuhanbatu Utara • Kopi: Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Utara, dan Kab.			<i>Penyediaan data IKM</i>	Penguatan kemitraan hilirisasi antar kab/kota. Pemasaran, dukungan promosi, <i>capacity building</i> diversifikasi produk hilirisasi , Penyediaan Rumah kemasan oleh kab/kota



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
		Simalungun • Aren: Kab. Tapanuli Selatan dan Kab. Mandailing Natal • Cabe : Kab. Karo, Kab. Batu Bara, Kab. Serdang Bedagai, Kan. Deli Serdang				
	2028	1. Hilirisasi Produk Unggulan Sumatera Utara Peningkatan SDM, Peningkatan Kapasitas Produksi dan peningkatan kemitraan IKM dengan industri hilir; Penguatan Pasar & <i>Branding</i> ; MoU dengan Industri Besar untuk menampung produk hilirisasi dari IKM Binaan • Kelapa: Kab. Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Asahan, Batu Bara, dan Labuhanbatu Utara • Kopi: Kab. Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Simalungun • Aren: Kab. Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal • Cabe: Kab. Karo, Batu Bara, Serdang Bedagai dan Deli Serdang			<i>Penyediaan data IKM</i>	Menentukan IKM yang akan dilakukan <i>capacity building</i> , menyusun regulasi pengembangan hilirisasi, penguatan kemitraan hilirisasi antar kab/kota, peningkatan akses pembiayaan melalui KUR atau Koperasi, fasilitasi <i>capacity building</i> standarisasi ekspor bagi pelaku IKM.
	2029	1. Hilirisasi Produk Unggulan Sumatera Utara Integrasi Ekosistem Industri / (dari hulu ke hilir mulai dari bahan baku,				Dukungan pembiayaan KUR , identifikasi IKM berpotensi untuk



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
		sampai ke pasok industri besar) dan <i>Bisnis Matching</i> dengan Industri Besar				dilakukan <i>business matching</i> .
		dalam dan luar negeri • Kelapa: Kab. Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Asahan, Batu Bara, dan Labuhanbatu Utara • Kopi: Kab. Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Simalungun • Aren: Kab. Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal • Cabe : Kab. Karo, Kab. Batu Bara, Serdang Bedagai dan Deli Serdang			<i>Penyediaan data IKM</i>	
	2030	1. Hilirisasi Produk Unggulan Sumatera Utara Evaluasi, Ekspansi dan Keberlanjutan Produk Hilirisasi Industri di pasar global • Kelapa: Kab. Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Asahan, Batu Bara, dan Labuhanbatu Utara • Kopi: Kab. Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Simalungun • Aren: Kab. Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal • Cabe: Kab. Karo, Batu Bara, Serdang Bedagai dan Deli Serdang			<i>Penyediaan data IKM</i>	<i>Branding Ekspor</i>
	2025	tidak ada	-			-



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
17. BUMD Reform Program (Penguatan Peran BUMD sebagai Motor Ekonomi)	2026	tidak ada		Bappelitbang: Penyusunan konsep dan perencanaan kesehatan BUMD, GCG Biro Hukum : percepatan fasilitasi regulasi Biro Pem otda : Fasilitasi Kerja sama Diskominfo : Publikasi Kegiatan Inspektorat : Audit BUMD		
	2027	tidak ada				
	2028	tidak ada				
	2029	tidak ada				
	2030	tidak ada				
18. Pemanfaatan Aset barang milik daerah melalui kerja sama ekonomi	2025	• Inventarisasi Barang Milik Daerah yang belum optimal, serta potensi pemanfaatan • Penyusunan skema/proses bisnis pemanfaatan aset BMD • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Proses digitalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah	BKAD	Bapenda Provsu : Dukungan dalam proses bisnis pendapatan melalui pemafaatan aset BMD dengan kerja sama ekonomi Bappelitbang Provsu : Dukungan dalam penyusunan konsep dan perencanaan Diskominfo : Dukungan dalam penyediaan web aplikasi dan promosi OPD Pengguna BMD : Dukungan dalam inventarisir dan pengamanan aset serta pemeliharaan BMD		Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota pada pelaksanaan pengamanan BMD dalam penerbitan SKT lahan (Surat Keterangan Kepemilikan Lahan) dari Pemerintah Setempat (Kelurahan atau Kepala Desa)
	2026	• Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Penyusunan Regulasi penggunaan web aplikasi				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
		pemanfaatan Barang Milik Daerah • Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM penilai barang				
	2027	• Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Pengembangan skema pemanfaatan Barang Milik Daerah • Pengembangan sistem informasi atau promosi				
	2028	• Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil inventarisasi • Penguatan kemitraan dalam perluasan pemanfaatan Barang Milik Daerah termasuk kerja sama dengan <i>platform</i> lain				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2029	• Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil inventarisasi • Penguatan kemitraan dalam perluasan pemanfaatan Barang Milik Daerah termasuk kerja sama dengan <i>platform</i> lain (kerja sama dengan 1 <i>Platform</i>) • Evaluasi dan Monitoring secara berkala terhadap Pemanfaatan Barang Milik Daerah produktif berkelanjutan				
	2030	• Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Evaluasi dan Monitoring secara berkala terhadap Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui kerja sama ekonomi berkelanjutan				
PP.6 PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU						



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
19. Pengembangan Kawasan Perkebunan (Kelapa, Kopi, Aren)	2025	tidak ada	DISBUNAK	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara: memberikan pelatihan pengemasan izin edar hasil produk, pelatihan pengemasan produk dan sertifikasi halal serta pemberian alat untuk mengolah hasil produksi dalam rangka hilirisasi hasil Perkebunan kelapa seperti alat untuk menjadikan air kelapa menjadi minyak kelapa/VCO, dan <i>coconut milk</i> , kemudian biji kopi menjadi kopi bubuk dan kopi ekstrak, kemudian aren menjadi gula aren dan bioetanol 2. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara: pembentukan dan pelatihan UMKM bagi kelompok pekebun dan alat pengolah hasil produksi kelapa, kopi dan aren; 3. Dinas PMD Dukung: untuk pembentukan dan pemberdayaan BUMDes	<i>data CPCL di lokasi intervensi</i>	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1. Dukungan data CPCL di lokasi intervensi 2. Melakukan Pembinaan dan pelatihan peningkatan produksi atau peningkatan pasca produksi di lokasi intervensi pengembangan kawasan perkebunan
	2026	tidak ada				
	2027	tidak ada				
	2028	tidak ada				
	2029	tidak ada				
	2030	tidak ada				
	2030	tidak ada				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
				di lokasi intervensi pengembangan kawasan perkebunan 4. Diskominfo: untuk publikasi media		
20. Pengembangan Kawasan Unggulan Perikanan Tangkap dan Budidaya	2025	tidak ada	A	DISKANL • Dinas Perindustrian dan Perdagangan – Pengolahan, pemasaran, dan ekspor produk perikanan. • Dinas Koperasi dan UKM – Penguatan		Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah
	2026	tidak ada				
	2027	tidak ada				Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara
	2028	tidak ada				
	2029	tidak ada				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2030	tidak ada		kelembagaan usaha nelayan/pembudidaya. • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang – Pembangunan infrastruktur pendukung (jalan dan pelabuhan). • Dinas Kominfo: Publikasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat		kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: - Pendataan kelompok nelayan dan pembudidaya kab/kota - Klasterisasi - Sosialisasi dan Edukasi -Replikasi di daerah yang sama
21. Pengawasan Konservasi Laut SEMESTA (Pemberdayaan Nelayan Sebagai Pasukan Penjaga Laut)	2025	tidak ada	A DISKANL	• BAPPELITBANG : Integrasi program SEMESTA dalam perencanaan daerah. • Dinas Lingkungan Hidup Provsu: Kebijakan dan		Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara
	2026	tidak ada				
	2027	tidak ada				
	2028	tidak ada				
	2029	tidak ada				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2030	tidak ada		pemantauan kualitas lingkungan laut. • Dinas Perhubungan Provsu : Dukungan transportasi laut dan keselamatan pelayaran patroli. • Satpol PP Provsu : Penegakanperda terkait konservasi laut. • Dinas Pariwisata Provsu : Sinergi dengan wisata bahari berkelanjutan. • Dinas Kominfo Provsu : Publikasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat. • Dinas Koperasi & UKM Provsu : Penguatan kelembagaan nelayan pengawas. • Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provsu : Kesiapsiagaan dan tanggap darurat di laut. • Inspektorat: Pengawasan dan pendampingan jalannya program		kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan:- Pendataan Nelayan kab/kota- Klasterisasi- Sosialisasi dan Edukasi
22. Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir berbasis Masyarakat	2025	tidak ada	DLHK	1. Dinas Kominfo - Media massa - Publikasi kegiatan 2. Kementerian Kehutanan - Penyediaan Regulasi	<i>tidak ada</i>	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui DLHK dengan dukungan <i>Stakeholder</i> terkait
	2026	tidak ada				
	2027	tidak ada				
	2028	tidak ada				
	2029	tidak ada				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2030	tidak ada		- Koordinasi program-program		diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kementerian Kehutanan, Kelompok Masyarakat Pesisir dan LSM/NGO/pemerhati Lingkungan. Adapun dukungan kabupaten/kota pada kegiatan ini diantaranya: 1. Kolaborasi <i>Multistakeholder</i> dalam kegiatan 2. Pemberdayaan Masyarakat: Program rehabilitasi yang sukses tidak hanya tentang menanam pohon, tapi juga tentang memberdayakan masyarakat. 3. Membantu dalam proses pengadaan lahan dan memastikan status hukum lahan tersebut jelas 4. Pemerintah kabupaten melakukan pemantauan dan pemeliharaan secara berkala untuk memastikan pertumbuhan mangrove berjalan baik dan program mencapai tujuannya.



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
23. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (PLTS Pompa Air Untuk Irigasi Pertanian/PLTA Mikrohidro dan lainnya)	2025	tidak ada	DISPERINDAG ESDM	TPH : Pembinaan Kelompok Petani dalam penggunaan PLTS . • Bappelitbang : Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan • Inspektorat : Pengawasan Pelaksanaan • Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan	<i>.Data Kelompok Tani (CPCL)</i>	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan untuk Tahun 2025-2030:
	2026	tidak ada			<i>Data produksi pertanian</i>	
	2027	tidak ada				
	2028	tidak ada				
	2029	tidak ada				
	2030	tidak ada				
						1. Data Kelompok Tani (CPCL) 2. data penentuan lokasi 3. pengadaan lahan 4. Data produksi pertanian; kondisi air 5. Data <i>readiness criteria</i>
PP 7 KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGUATAN NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL AGAR DIVERSIFIKASI HASIL PERTANIAN MENJADI LEBIH PRODUKTIF DAN BERDAMPAK PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL						



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
24. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Unggulan Padi, Jagung, Cabai Merah, dan bawang merah	2025	1. Kajian pengembangan kawasan unggulan padi, jagung, cabai merah dan bawang merah 2. Pembuatan <i>masterplan</i> 3. Penyusunan tim kerja dan Inventarisir data 4. Pengembangan kawasan unggulan padi, jagung, cabai merah dan bawang merah 5. Pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian Kawasan Padi: Kabupaten Asahan dan Kabupaten Serdang Bedagai Kawasan jagung: Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Karo kawasan cabai Merah: Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Batu Bara, dan Kabupaten Deli Serdang Kawasan Bawang Merah: Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Humbang Hasundutan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan TPH	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki peran krusial dalam pembangunan infrastruktur dasar pendukung pertanian. Ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, jalan usaha tani, serta infrastruktur penunjang lainnya yang memperlancar distribusi hasil panen dan aksesibilitas kawasan pertanian. Penataan ruang juga menjadi fokus penting untuk memastikan kawasan pertanian unggulan tidak terganggu oleh alih fungsi lahan. 2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) turut berperan	<i>Penyediaan bibit unggul dan alat pertanian dasar</i> <i>Pembangunan akses jalan produksi</i>	• Memfasilitasi penyediaan benih unggul, pupuk, dan alat pertanian dasar. • Mendorong sinergi antar pemangku kepentingan lokal (petani, penyuluh, BUMDes). • Memfasilitasi pembangunan/peningkatan akses jalan produksi di kawasan unggulan. • Mendukung pembangunan fasilitas pascapanen: gudang, alat pengering, rumah sortasi. • Mengkoordinasikan petani/UMKM untuk mengikuti pelatihan sertifikasi ekspor dan standar internasional. • Memberikan laporan lengkap atas capaian program, kendala, dan peluang lanjutan.



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2026	1. Pengembangan kawasan unggulan padi, jagung, cabai merah dan bawang merah 2. Pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian Kawasan Padi: Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Serdang Bedagai. Kawasan Jagung: Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Karo Kawasan Cabai Merah: Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Batu Bara, dan Kabupaten Deli Serdang Kawasan Bawang Merah: Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Simalungun		dalam mendorong hilirisasi produk pertanian melalui pengembangan industri pengolahan hasil tani, seperti pengeringan, pengemasan, dan pengolahan lanjutan produk padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Di sisi perdagangan, dinas ini memastikan akses pasar yang lebih luas dan stabil melalui promosi, fasilitasi perdagangan, dan penguatan sistem rantai pasok. Adanya kegiatan Gerakan pangan Murah membuat Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat berkolaborasi dengan Dinas ketahanan Pangan dan TPH dalam	<i>Penyediaan bibit unggul dan alat pertanian dasar</i> <i>Pembangunan akses jalan produksi</i>	Replikasi di daerah yang sama



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2027	1. Pengembangan kawasan unggulan padi, jagung, cabai merah dan bawang merah 2. Pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian 3. Pengembangan bibit olahan dan kemitraan usaha Kawasan Padi: Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Serdang Bedagai. Kawasan Jagung: Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Karo Kawasan Cabai Merah: Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Dairi Kawasan Bawang Merah: Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Simalungun		menjalankan kegiatan ini 3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) memegang peranan sebagai koordinator perencanaan strategis lintas sektor. Bappelitbang merumuskan arah kebijakan, menyusun rencana aksi, serta memastikan sinergi antar-dinas dalam pengembangan kawasan unggulan. 4) Diskominfo (Publikasi)	<i>Penyediaan bibit unggul dan alat pertanian dasar</i> <i>Pembangunan akses jalan produksi</i>	



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2028	1. Pengembangan kawasan unggulan padi, jagung, cabai merah dan bawang merah 2. Pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian 3. Pengembangan bibit olahan dan kemitraan usaha 4. Digitalisasi pemasaran dan sistem logistik hasil pertanian Kawasan Padi (Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Mandailing Natal, Kab. Deli Serdang, Kab. Simalungun, Kab. Asahan dan Kab. Serdang Bedagai.), Kawasan Jagung (Kab. Deli Serdang, Kab. Toba, Kab. Humbahas, Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Utara dan Kab. Karo) Kawasan Cabai Merah (Kab. Deli Serdang, Kab. Langkat, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Simalungun, Kab. Dairi) Kawasan Bawang Merah (Kab. Toba, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Dairi, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Samosir, dan Kab. Simalungun)			<i>Penyediaan bibit unggul dan alat pertanian dasar</i> <i>Pembangunan akses jalan produksi</i>	



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2029	1. Pengembangan kawasan unggulan padi, jagung, cabai merah dan bawang merah 2. Pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian 3. Pengembangan bibit olahan dan kemitraan usaha 4. Digitalisasi pemasaran dan sistem logistik hasil pertanian 5. Membuka akses pasar ekspor dan pasar bermutu Kawasan Padi (Kab. Karo, Kab. Toba, Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Mandailing Natal, Kab. Deli Serdang, Kab. Simalungun, Kab. Asahan dan Kab. Serdang Bedagai) Kawasan Jagung (Kab. Samosir, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Deli Serdang, Kab. Toba, Humbang Hasundutan, Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Utara dan Kab. Karo) Kawasan Cabai (Kab. Mandailing Natal, Kab. Samosir, Kab. Deli Serdang, Kab. Langkat, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Simalungun, Kab. Dairi) Kawasan Bawang Merah (Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Toba, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Dairi, Kab. Tapanuli Utara,			<i>Penyediaan bibit unggul dan alat pertanian dasar</i> <i>Pembangunan akses jalan produksi</i>	



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
		Kab.Humbang Hasundutan, Kab. Samosir, dan Kab.Simalungun)				
	2030	Evaluasi dan monitoring Kegiatan			<i>MOneva</i>	
25. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Peternakan unggulan	2025	tidak ada	K DISBUNA	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara: Memberikan pelatihan pengemasan izin edar	<i>Pengadaan bibit ternak unggul</i>	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan dan
	2026	tidak ada			<i>Pengadaan bibit ternak unggul</i>	
	2027	tidak ada		hasil produk, pelatihan pengemasan produk dan sertifikasi halal serta pemberian alat untuk mengolah hasil produksi	<i>Pengadaan bibit ternak unggul</i>	Peternakan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1. Dukungan data CPCL di lokasi intervensi 2. Melakukan Pembinaan
	2028	tidak ada			<i>Pengadaan bibit ternak unggul</i>	
	2029	tidak ada		2. Dinas Koperasi dan	<i>Pengadaan bibit ternak unggul</i>	



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2030	tidak ada		UMKM Provinsi Sumatera Utara: Koordinasi pembentukan dan pelatihan UMKM bagi kelompok peternak 3. Dinas PMD Dukkapol: Untuk pembentukan dan pemberdayaan BUMDes di lokasi intervensi pengembangan kawasan peternakan 4. Diskominfo: Untuk publikasi media	<i>Pengadaan bibit ternak unggul</i>	dan pelatihan peningkatan produksi atau peningkatan pasca produksi di lokasi intervensi pengembangan kawasan peternakan 3. Pemberian izin usaha untuk koperasi, UMKM, BUMDes yang mengolah hasil produksi berada di kawasan peternakan 4. Replikasi di daerah yang sama
26. Program Pengembangan Bibit Unggul Pertanian	2025	tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH Provinsi berperan sebagai inisiator utama program. Mereka bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, penyediaan alokasi anggaran, serta koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam implementasinya, mereka juga menetapkan lokasi uji	PT. Dirga Surya : memasarkan produksi bibit unggul padi		Dinas Pertanian Kabupaten mempromosikan dan menggunakan bibit unggul padi varietas baru.
	2026	tidak ada				
	2027	tidak ada				
	2028	Peningkatan kapasitas penangkar & perluasan lahan produksi benih - Monitoring dan Evaluasi - Promosi varietas baru (ekspo, lomba hasil panen) - Integrasi pemasaran gabah & beras varietas unggul Pendistribusian benih unggul ke daerah lainnya (Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan, Kabupaten			<i>mempromosikan dan menggunakan bibit unggul padi varietas baru.</i>	



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
		Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Mandailing Natal)	multilokasi dan mendukung pelepasan varietas secara resmi			
	2029	tidak ada				
	2030	Pengembangan produksi benih unggul dan pemasaran di kab/kota sentra provinsi Sumatera Utara dan di Kepulauan Sumatera			<i>mempromosikan dan menggunakan bibit unggul padi varietas baru.</i>	
27. Fasilitasi Akses Permodalan Terhadap Kelompok Tani	2025	Fokus pada persiapan program, pembentukan Tim Pokja FPPS di provinsi dan kabupaten/kota, rekrutmen dan pelatihan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS), pemutakhiran data kelompok tani, koordinasi dengan lembaga keuangan, dan sosialisasi program. • 33 Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH bertindak sebagai penghubung antara kelompok tani dengan lembaga keuangan formal seperti bank, koperasi, serta	a) Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran sentral dalam penguatan kelembagaan kelompok tani melalui pembinaan koperasi tani dan UMKM berbasis pertanian. Dinas ini dapat memfasilitasi akses permodalan bagi	<i>Pedataan Kelompok Tani</i>	Memetakan kelompok tani yang layak dan potensial untuk memperoleh akses permodalan, berdasarkan data luas lahan, komoditas yang diusahakan, serta rekam jejak kelembagaan kelompok



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2026	Mulai pelaksanaan Temu Pembiayaan tahap I dan II, pendampingan realisasi kredit, pelatihan manajemen keuangan bagi kelompok tani penerima pembiayaan, serta monitoring awal terhadap usaha penerima kredit. • 33 Kabupaten/Kota	lembaga penjaminan kredit. Melalui penyediaan data kelompok tani, pelatihan manajemen usaha tani, serta pembentukan kelembagaan petani yang kuat, dinas membantu petani memenuhi persyaratan administratif dan teknis agar layak mengakses program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan pertanian lainnya.	kelompok tani melalui penguatan koperasi simpan pinjam, pelatihan manajemen usaha tani, hingga menjembatani kerja sama antara koperasi dan lembaga keuangan. b) Disperindag ESDM berkontribusi dalam mendorong hilirisasi produk pertanian dan menjaga stabilitas harga hasil tani. Melalui penguatan rantai nilai dan pasar hasil tani, dinas ini dapat membuka peluang tambahan pendapatan bagi petani yang dapat digunakan sebagai modal atau premi asuransi. c) Dinas Kominfo memainkan peran dalam penyebarluasan informasi terkait program bantuan iuran premi asuransi dan akses permodalan. Melalui berbagai saluran komunikasi digital dan non-digital, Kominfo dapat menjamin transparansi program, meningkatkan literasi	Pedataan Kelompok Tani.	
	2027	Memperluas cakupan penerima pembiayaan, memperkuat kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan swasta, serta memberikan pelatihan lanjutan kepada FPPS terkait negosiasi bisnis dan pemasaran. • 33 Kabupaten/Kota			Pedataan Kelompok Tani	
	2028	Mengintegrasikan pemasaran digital dan <i>e-commerce</i> , mengembangkan sistem informasi pembiayaan pertanian berbasis aplikasi, serta melatih FPPS dan kelompok tani dalam penggunaannya • 33 Kabupaten/Kota			Pedataan Kelompok Tani	
	2029	Melakukan diversifikasi sumber pembiayaan melalui koperasi, CSR, dan investor. Mengembangkan usaha hilir di bidang pascapanen dan olahan, memberikan pelatihan manajemen usaha hilir, serta mendorong pemasaran produk			Pedataan Kelompok Tani	



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
		hilir. • 33 Kabupaten/Kota		digital kelompok tani, dan mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pengajuan permodalan dan asuransi pertanian. e) Dinas Pemdesdukcapil memiliki peran strategis dalam verifikasi dan validasi data kependudukan serta kelembagaan desa sebagai basis penyaluran bantuan. Melalui data kependudukan dan basis kelompok tani di desa, Pemdesdukcapil memastikan agar bantuan permodalan maupun iuran premi asuransi diberikan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil kelompok tani.f) Diskominfo (Publikasi)		
	2030	Melaksanakan kajian dampak ekonomi program, menyusun model pendampingan berkelanjutan, dan melatih FPPS menjadi konsultan atau koperasi tani. • 33 Kabupaten/Kota			<i>Pedataan Kelompok Tani</i>	



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
PP 8 PARIWISATA YANG MENGGERAKKAN POTENSI ALAM LOKAL DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA LANGSUNG (KOMUNITAS, PEMERINTAH DAERAH/DESA/KELURAHAN DAN PENGUSAHA LOKAL)						
28. Dukungan terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	2025	Penguatan Tata kelola Kelembagaan melalui Pokja P3TB Provinsi dan Pokja P3TB 8 Kabupaten se- Kawasan Danau Toba: 1. Pelaksanaan evaluasi rencana aksi tahap I RIDPN Danau Toba 2. Penyusunan <i>draft</i> renaksi tahap II RIDPN Danau Toba 3. Integrasi hasil evaluasi tahap I kedalam draft rencana aksi tahap II 2025-2029 4. Penyusunan rencana aksi tahun 2025 5. Rapat koordinasi regular dengan 8 kab/kota • 8 Kabupaten se- Kawasan	DISBUDPAREKRAF	KOMINFO : Publikasi Media DISBUDPAREKRAF : Penguatan Atraksi Budaya dan Pariwisata; Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif; Promosi dan Pemasaran Destinasi; Pengembangan Infrastruktur dan Amenitas Pariwisata; Kolaborasi dan Sinkronisasi Program; Penguatan Tata Kelola Destinasi; PERAN BPODT (Badan Pelaksana Otorita Danau Toba) : Koordinasi		1. Memastikan keselarasan Program/Kegiatan dalam Rencana Aksi Tahap II telah sesuai dengan Dokumen Perencanaan di daerah (RPJMD Kab & RKPD Kab) dan Integrasi RIDPN kedalam renja OPD 2. Menyusun rencana aksi tahunan 3. Memastikan ketersediaan anggaran dalam mendukung Pengembangan DPSP Danau Toba 4. Penyediaan Lahan yang <i>Clean & Clear</i> (jika terdapat



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
		Danau Toba: 1. Simalungun 2. Humbang 3. Toba 4. Dairi 5. Pakpak Bharat		Pengelolaan Kawasan Pariwisata Strategis; Pengembangan		pembangunan fisik) 5. Pembentukan Desa Wisata
		6. Karo 7. Samosir 8. Tapanuli Utara		infrastruktur dan Investasi; Promosi dan Branding Kawasan; Pengembangan SDM dan Ekosistem Wisata		sesuai dengan potensi; 6. Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; 7. Pendampingan Desa Wisata;
	2026	Pemetaan Kegiatan Strategis yang akan dilaksanakan melalui Rencana Aksi Tahap II RIDPN & Konsolidasi dengan Pemerintah Pusat; Pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Tahap II RIDPN: 1. Pelaksanaan pilar Tata kelola dan Kelembagaan antara lain: • 8 Kabupaten se-Kawasan Danau Toba		PERAN BAPPELITBANG (Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah) : Integrasi Perencanaan Pengembangan DPP		8. Pendataan Potensi Unggulan Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata & Ekonomi Kreatif; 9. Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2027	Pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Tahap II RIDPN: 1. Pelaksanaan pilar infrastruktur: peningkatan kualitas jalan dan jembatan, peningkatan konektivitas (transportasi darat dan danau), dan SPAM • 8 Kabupaten se- Kawasan Danau Toba: 1. Karo 2. Simalungun 3. Samosir		Danau Toba; Sinkronisasi Program Daerah dengan Nasional; Litbang & Evaluasi Program Pengembangan Pariwisata; Dukungan Kebijakan Inovatif & Kolaboratif Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/159/KTPS/2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja P3TB Provinsi Sumatera Utara, seluruh Opd Pemprovsu yg termasuk dalam SK Gubsu tersebut berperan dalam mendukung Pengembangan DPSP Danau Toba sesuai dengan Rencan Aksi yang disusun		Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (<i>Homestay/Hotel</i>), Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia Jasa <i>Travel Agent</i>)); 10. Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata 11. Pelaksaaan Event Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Keratif berskala Nasional
	2028	Pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Tahap II RIDPN 1. Pelaksanaan pilar SDM: Pelatihan pelaku pariwisata, Pokdarwis, dan Pengelola desa wisata • 8 Kabupaten se- Kawasan Danau Toba				
	2029	Pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Tahap II RIDPN: 1. Pelaksanaan pilar Investasi: Penyusunan IPRO, dan penyusunan Lake Toba <i>Tourism Destination Investment Book</i> untuk diintegrasikan kedalam <i>North Sumatera Invest</i> • 8 Kabupaten se- Kawasan Danau Toba				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2030	Monitoring dan evaluasi: Perluasan kemitraan ekonomi • 8 Kabupaten se- Kawasan Danau Toba				
29. Pengelolaan dan Penataan Kawasan Toba Caldera UGGp dan Kawasan Geopark lainnya	2025	a. Tata Kelola Reformasi tata kelola BP TCUGGp b. Alokasi Hibah Operasional BP TCUGGp c. Pembangunan Visibilitas di 16 <i>Geosite</i> (<i>Panel dan Letter Plank</i>) • 16 <i>Geosite</i> di Toba Caldera (Kab. Samosir, Kab.	DISBUDPAREKRAF	1. DISBUDPAREKRAF : Penyaluran Belanja Operasional BP TCUGGp; Pembangunan <i>Visibilities</i> di <i>Geosite</i> ; Pelatihan dan Pembinaan Pelaku Pariwisata dan Pengelola Desa		1. Memastikan ketersediaan dukungan anggaran dalam pengelolaan <i>Geosite</i> di masing- masing Kabupaten; 2. Penyusunan muatan Lokal; 3. Bekerja sama dengan BP dalam
		Humbang Hasundutan, Kab. Simalungun, Kab. Karo, Kab. Dairi, Kab. Tapanuli Utara, dan Kab. Toba)		Wisata; Identifikasi dan Penetapan <i>Cultural Heritage</i> di Kawasan		melaksanakan sosialisasi & edukasi kepada Masyarakat, Pelaku Wisata, Pelajar dan ASN



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2026	1. Pembangunan Visibilitas (<i>Gate</i> , Panel Informasi, <i>Letter Plank</i>) di 8 <i>Geosite</i> (Pusuk Buhit; Tele; Hutatinggi-Sidihoni; Ambarita-TukTuk; Batu Hoda,(Sipiso-piso; Silalahi-Sabungan; Muara- Sibandang)2. Tindak lanjut pengusulan 2 geosite baru rekomendasi revalidasi UNESCO:a. Kajianb. Pengusulan3. Penyusunan Bahan Promosi (<i>Leaflet</i> dan Video Promosi) khusus untuk <i>Geosite</i> , Pelatihan dan edukasi terkait Geopark bagi <i>Tour Guide</i> dan pemenuhan Rekomendasi UNESCO• Pusuk Buhit; Tele; Hutatinggi-Sidihoni; Ambarita-TukTuk; Batu Hoda,(Sipiso-piso; Silalahi-Sabungan;Muara-Sibandang		<i>Geopark</i> ; Melaksanakan <i>Event Geofest</i> . 2. DINAS Koperasi &UMK: Melakukan Pelatihan & Pembinaan UMKM terutama di Kawasan <i>Geosite</i> ; 3. Dinas Pendidikan: Melaksanakan kegiatan <i>Geopark to School</i> dan edukasi terkait <i>Geopark</i> kepada pelajar; 4. Dinas PUPR : Peningkatan kualitas jalan/jembatan di ruas jalan Provinsi yang menghubungkan antar <i>geosite</i> ; 5.Bappelbtang: Melaksanakan penelitian terkait <i>Geological Heritage / Natural / Biological Heritage / Cultural Heritage</i> di Kawasan Toba Caldera UGGp maupun di Kawasan Geopark yang baru; 6. BPBD : Mitigasi Bencana & Sosialisasi; 7. Dinas LHK : Pelestarian Hutan dan ekosisten di Kawasan Danau Toba 8. Dinas Kominfo: Publikasi kegiatan;		tentang <i>Geopark</i> ; 4. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM terutama dalam pengembangan Geoproduk; 5. Mengidentifikasi dan menginventarisasi serta melakukan penelitian terkait potensi <i>Geological Heritage, Biological / Natural Heritage</i> dan <i>Cultural Heritage</i> ; 6. Rutin melaksanakan <i>Event GeoFest</i> ; 7. Menyusun kajian awal terkait Kawasan <i>Geopark</i> baru; 8. Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; 9. Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; 10. Pendampingan Desa Wisata; 11. Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (<i>Homestay/Hotel</i>),
	2027	Pembangunan Visibilitas (<i>Gate</i> , Panel Informasi, <i>Letter Plank</i>) di 8 <i>Geosite</i> (Haranggaol; Sibaganding; Hutaginjang; Sipinsur; Bakara-Tipang,Taman Eden, Balige-Meat, Situmurun), Peningkatan jumlah penelitian terkait <i>Geological Heritage / Cultural Heritage / Biological Heritage</i> dengan melalui kerja sama dengan				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
		PTN/PTS, Pemenuhan Rekomendasi UNESCO • Haranggaol; Sibaganding; Hutaginjang; Sipinsur; Bakara-Tipang, Taman Eden, Balige-Meat, Situmurun				Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia Jasa <i>Travel Agent</i>); 12. Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata
	2028	Konsolidasi dan Penyusunan Kajian awal Pengusulan <i>Geopark</i> Nasional baru (Nias & Humbahas) dan Pemenuhan Rekomendasi UNESCO • 16 <i>Geosite</i> di Toba Caldera (Kab. Samosir, Kab. HumbangHas, Kab. Simalungun, Kab. Karo, Kab. Dairi, Kab. Tapanuli Utara, dan Kab. Toba)				
	2029	Persiapan dan Pelaksanaan Revalidasi Toba Caldera UGGp, Evaluasi Kinerja BP TCUGGp Periode 2025- 2030 • 16 <i>Geosite</i> di Toba Caldera (Kab. Samosir, Kab.				
		Humbang Hasundutan, Kab. Simalungun, Kab. Karo, Kab. Dairi, Kab. Tapanuli Utara, dan Kab. Toba)				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2030	Pemilihan BP TCUGGp Periode 2030-2035, Penyusunan Program Kerja dan Pemenuhan Rekomendasi UNESCO• 16 <i>Geosite</i> di Toba Caldera (Kab. Samosir, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Simalungun, Kab. Karo, Kab. Dairi, Kab. Tapanuli Utara, dan Kab. Toba)				
30. Pembentukan & Pengembangan Kawasan Strategis Budaya, Parawisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi yang Terintegrasi (TATABUSE, SIBANDAN,	2025	tidak ada	DISBUDPARE KRAF	1. Dinas Koperasi & UMKM: Pelatihan dan Pembinaan kepada UMKM di Kawasan. 2. Dinas PUPR: Pembangunan Kawasan		Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi
	2026	tidak ada				
	2027	tidak ada				
	2028	tidak ada				
	2029	tidak ada				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
SIPUAN, KARDAPAK dan BAHLIKE)	2030	tidak ada		(jika ada pembangunan fisik); Peningkatan Akses Ruas Jalan Provinsi menuju Kawasan. 3. Dinas PMD : Pelatihan dan Pembinaan pengelola BUMDES Wisata 4. Dinas Kominfo : Penyediaan Fasilitas Digital di Kawasan; Publikasi Kegiatan		Kreatif, sementara kabupaten/kota berperan dalam: 1. Memastikan ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan Proyek Strategis; 2. Penyediaan Lahan yang <i>Clean & Clear</i> (jika terdapat pembangunan fisik); 3. Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; 4. Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; 5. Pendampingan Desa Wisata; 6. Pendataan Potensi Unggulan Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata & Ekonomi Kreatif; 7. Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (Homestay/Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia Jasa Travel Agent));



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
						8. Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata; 9. Pendataan dan inventarisasi pelaku UMKM; 10. Pendampingan kepada pelaku
						UMKM; 11. Pelaksanaan Event Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Keratif berskala Nasional



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
31. Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Situs Cagar Budaya Sumatera Utara	2025	Pemetaan dan verifikasi kondisi situs cagar budaya (fisik & nonfisik)• Nias Selatan, Kawasan Danau Toba, Tapanuli Tengah, Langkat & Padang Lawas Utara	DISBUDPAREKRA F	1. Dinas Koperasi & UMKM: Pelatihan dan Pembinaan kepada UMKM di Kawasan. 2. Dinas PUPR: Peningkatan Akses Ruas Jalan Provinsi menuju Kawasan. 3. Dinas PMD: Pelatihan dan Pembinaan pengelola BUMDes Wisata 4. Dinas Kominfo: Penyediaan Fasilitas Digital di Kawasan; Publikasi Kegiatan 5. Dinas Pendidikan: Edukasi kepada pelajar tentang Situs Cagar Budaya		1. Memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Provinsi; 2. Penyediaan Lahan yang <i>Clean & Clear</i> (jika terdapat pembangunan fisik); 3. Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Tingkat kab/kota; 4. Pembentukan Pengelola Kawasan Situs Cagar Budaya; 5. Melaksanakan Program edukasi kepada masyarakat dan pelajar tentang Kawasan Situs Cagar Budaya; 6. Pendataan, Inventarisasi, Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya di kab/kota 7. Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan
	2026	Penyusunan dokumen perencanaan pelestarian (<i>masterplan, DED, roadmap</i>); Pelaksanaan konservasi/pemugaran bangunan bersejarah; Pelatihan konservasi dasar & manajemen situs budaya; Pelaksanaan Program Edukasi di Sekolah & Masyarakat • Nias Selatan, Kawasan Danau Toba, Tapanuli Tengah, Langkat & Padang Lawas Utara				
	2027	tidak ada				
	2028	tidak ada				
	2029	tidak ada				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2030	tidak ada				potensi;8. Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata;9. Pendampingan Desa Wisata;10. Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (<i>Homestay/Hotel</i>), Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia Jasa <i>Travel Agent</i>));11. Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata; 12. Pendataan dan Pendampingan UMKM;13. Pelaksanaan Event Budaya,
						Pariwisata dan Ekonomi Keratif berskala Nasional
32. Pelaksanaan Event Internasional, pengembangan paket wisata dan digitalisasi promosi pariwisata global	2025	Penyelenggaraan <i>event Trail of The King</i> (Danau Toba), <i>Aquabike</i> , dan <i>event F1H2O</i> , dan evaluasi penyelenggaraan <i>event</i> • Kawasan Pariwisata Prioritas Sumatera Utara (<i>Event Internasional</i>), Luar Negeri (Digitalisasi Promosi)	DISBUDPARE KRA	1. Dinas Perhubungan: Memastikan ketersediaan transportasi dan lalu lintas saat event internasional dilaksanakan 2. Dinas Kesehatan: Dukungan Tenaga Kesehatan dan Ambulans 3. Dinas Koperasi		1. Pelaksanaan <i>Side Event</i> saat pelaksanaan Event Internasional; 2. Pelaksanaan Promosi melalui media digital dan cetak; 3. Sosialisasi & Edukasi kepada Pelaku Usaha Pariwisata (Penyedia Jasa



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2026	Uji coba & promosi paket wisata, Pengembangan website & media sosial destinasi, dan Kampanye digital internasional (video, <i>influencer</i> , konten kreatif); Penyusunan <i>Calender of Event</i> dan Penyelenggaraan <i>Event</i> Internasional• Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga-Pandan, Sipirok-Padangsidimpuan, Bawomatoluo- Hilisimaetano-Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan- Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak (<i>Event</i> Internasional), Luar Negeri (Digitalisasi Promosi)		&UMKM: Pelatihan dan pendampingan UMKM untuk mendukung pelaksanaan <i>event</i> internasional 4. Dinas Kominfo: Memastikan ketersediaan jaringan digital saat pra event-event-pasca event internasional; publikasi kegiatan 5. Satpol PP: Keamanan Pelaksanaan <i>event</i> dan ketertiban penyelenggaraan acara 6. Dinas Pemuda dan Olahraga; Pembinaan Pemuda untuk partisipasi dalam penyelenggaraan <i>event</i> (sport, <i>e- sport</i> , dsb)		Akomodasi (Hotel & Homestay), Penyedia Jasa makan-minum, Penyedia Jasa Transportasi, dan Travel Agent); 4. Pendataan & pendampingan terhadap UMKM; 5. Memastikan kelancaran aksesibilitas terutama saat pelaksanaan <i>event</i> internasional (Pengaturan lalu lintas; Peningkatan kualitas jalan)
	2027	Penyelenggaraan <i>event</i> tematik baru (kuliner, minat khusus, budaya), dan Diversifikasi wisata minat khusus (<i>geo tourism, wellness, heritage, agro, religi</i>); Penyusunan <i>Calender of Event</i> dan Penyelenggaraan <i>Event</i> Internasional • Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga-Pandan, Sipirok-Padangsidimpuan, Bawomatoluo- Hilisimaetano-Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan- Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
		(<i>Event</i> Internasional), Luar Negeri (Digitalisasi Promosi)				
	2028	Penyusunan <i>Calender of Event</i> dan Penyelenggaraan <i>Event</i> Internasional. Melaksanakan kerja sama <i>Sponshorship</i> dalam mendukung pelaksanaan event; Pendataan, Inventarisasi dan penyusunan kajian awal terkait <i>event</i> tematik; Bersama dengan ASITA menyusun Paket-paket wisata; Melaksanakan kerja sama dengan influencer untuk mempromosikan pariwisata SUMUT; Melaksanakan kerja sama dengan <i>platform</i> pariwisata (traveloka, booking.com, tiket.com,dll).				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
		• Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga-Pandan, Sipirok-Padangsampung, Bawomatoluo- Hilisimaetano-Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan- Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak (<i>Event Internasional</i>), Luar Negeri (<i>Digitalisasi Promosi</i>)				
	2029	Penyusunan <i>Calender of Event</i> dan Penyelenggaraan <i>Event Internasional</i> ; Kemitraan dengan diaspora & pelaku pariwisata global, Integrasi penuh dengan <i>platform</i> pariwisata nasional dan global• Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga-Pandan, Sipirok-Padangsampung, Bawomatoluo- Hilisimaetano-Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan- Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak (<i>Event Internasional</i>), Luar Negeri (<i>Digitalisasi Promosi</i>)				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2030	Penyusunan <i>Calender of Event</i> dan Penyelenggaraan <i>Event</i> Internasional; Kemitraan dengan diaspora & pelaku pariwisata global, Integrasi penuh dengan <i>platform</i> pariwisata nasional dan global • Kawasan Pariwisata Provinsi Sibolga-Pandan, Sipirok-Padangsidiimpuan, Bawomatoluo- Hilisimaetano-Sorake, Tanjung Pura-Tangkahan- Bukit Lawang-Sei Bingai, Karo-Dairi-Pakpak (<i>Event</i> Internasional), Luar Negeri (Digitalisasi Promosi)				
PP 9 EKONOMI KREATIF DAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI						
33. Sentra industri kreatif di Kawasan Sport Center Sumatera Utara	2025	tidak ada	DISBUDPARE KRAF	1. Dinas PUPR: Pembangunan Sentra Industri Kreatif 2. Biro Perekonomian : Menyusun Kajian pembentukan BLUD; Pembentukan BLUD pengelola Sentra Industri Kreatif. 3. Dinas PerindagESDM:	<i>Pendataan IKM dan Promosi</i>	1. Pendataan Pelaku Industri Kreatif & Data UMKM Potensial; 2. Kurasi Pelaku Ekonomi Kreatif; 3. Fasiitasi HAKI bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; 4. Pelaksanaan Event Ekonomi Kreatif secara rutin di Sentra Industri Kreatif; 5.
	2026	tidak ada			<i>Pendataan IKM dan Promosi</i>	
	2027	tidak ada			<i>Pendataan IKM dan Promosi</i>	
	2028	tidak ada			<i>Pendataan IKM dan Promosi</i>	
	2029	tidak ada			<i>Pendataan IKM dan Promosi</i>	



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2030	tidak ada		Pendataan, Pelatihan & Pembinaan IKM Kreatif. 4. Dinas Koperasi UMK: Pendataan, Pelatihan & Pembinaan UMKM 5. Dinas Kominfo : Penyediaan Fasilitas Digital (Internet, dll) di Kawasan		Promosi terkait Sentra Industri Kreatif melalui media digital dan cetak;
				Sentra Industri Kreatif; Publikasi Kegiatan		
34. Sumut digital market dan galeri virtual produk UMKM kreatif	2025	Evaluasi <i>Platform e-commerce</i> yang sudah ada (SIMITRA)	DISKOP UMKM	KOMINFO : Publikasi Media	<i>Pendataan UMKM</i>	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan UKM, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: - Pendataan UMKM binaan kab/kota - Kurasi Produk UMKM - Klasterisasi UMKM yang dapat dimasukkan ke dalam Galeri - <i>Capacity Building</i>
	2026	Desain dan pengembangan platform e-commerce; Kurasi awal 100 produk UMKM; Kemitraan dengan <i>platform logistik & payment gateway</i> . Manajemen Operasional <i>platform e-commerce</i> ; Promosi dan sosialisasi <i>platform e-commerce</i> ; • PLUT		DISKOP UKM : Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan Platform; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan	<i>Pendataan UMKM</i>	
	2027	<i>Onboarding</i> UMKM; Pelatihan dan fasilitasi branding, dan manajemen toko online. Manajemen Operasional <i>platform e-commerce</i> ; Promosi dan sosialisasi <i>platform e-commerce</i> ; • PLUT		DISKOP UKM : Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM;	<i>Pendataan UMKM</i>	



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2028	Pengembangan <i>E-commerce</i> menjadi Market Place; Integrasi dengan katalog elektronik, Manajemen Operasional <i>platform e-commerce</i> ; Promosi dan sosialisasi <i>platform e-commerce</i> ; • PLUT		Pembangunan dan Pengelolaan Platform; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan	<i>Pendataan UMKM</i>	
	2029	Galeri Virtual 3D; Kampanye digital nasional & regional, Manajemen Operasional <i>platform e-commerce</i> ; Promosi dan sosialisasi <i>platform e-commerce</i> ; • PLUT			<i>Pendataan UMKM</i>	
	2030	Kurasi produk ekspor; Promosi virtual di <i>event</i> internasional (<i>virtual expo, marketplace ASEAN</i>), Manajemen Operasional <i>platform e-commerce</i> dan Promosi dan sosialisasi <i>platform e-commerce</i> ; • PLUT			<i>Pendataan UMKM</i>	
PP 10 REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN						
35. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	2025	1. Penyusunan SK Tim Forum Pemangku Kepentingan SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030 2. Sosialisasi SK Tim forum dan <i>milestone</i> TPB SDGs 2025-2030	Bappelitbang	Seluruh Perangkat Daerah		1. Penyusunan dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs kab/kota se- Sumut tahun 2025-2030



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
		3. Updating target capaian SDGs tahun 2025				2. Dukungan pelaksanaan skema
		disesuaikan dengan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Penyusunan skema <i>Declaration and Registration System</i>5. Pembangunan fitur aplikasi pendaftaran BRS SDGs6. Replikasi, instalasi dan <i>Capacity Building</i> Aplikasi E-Monev SDGs (Inovasi)7. Menyusun Draf Rancangan Awal RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-20308. <i>Launching</i> dan Pelaksanaan BRS <i>pilot project</i> sekaligus penyerahan sertifikat kepada 15 UMKM9. <i>Workshop</i> Penyusunan <i>Voluntary Local Review</i>(VLR) Kabupaten/Kota10. Modifikasi Aplikasi <i>E-Monev</i> SDGs11. <i>Workshop E-Monev</i> dengan Bappeda/Bapperida/Bappelitbang Kabupaten/Kota12. Menyusun <i>draf Monev</i> capaian SDGs tahun 2025				BRS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs : identifikasi UMKM/IMK serta pelaku usaha3. Dukungan pelaksanaan <i>North Sumatera SDGs Action Awards</i>4. Dukungan proses penginputan E-Monev Kabupaten/Kota5. Peningkatan Kapasitas untuk implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2026	1. Inovasi <i>Business Registration System Policy TPB/SDGs</i> 2. Diseminasi Skema BRS TPB/SDGs (Kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM pada acara FYP, BRS SDGs dijadikan kurikulum) 3. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2025 4. Finalisasi Draf RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030 melalui desk per pilas TPB/SDGs 5. <i>Launching</i> Aplikasi <i>e-Monev</i> 6. Pelaksanaan skema <i>Declaration and Registration System BRS TPB/SDGs</i> 7. Diseminasi RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030 8. Penyusunan Rancang Bangun aplikasi <i>e-Monev</i> SDGs (INOVASI) 9. <i>Workshop</i> Penyusunan <i>Voluntary Local Review (VLR)</i> Kabupaten/Kota 10. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2026 11. Sosialisasi <i>North Sumatra SDGs Action Award</i>				
		2027 (Indikator RAD TPB/SDGs, VLR dan Laporan Monev)				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2027	1. Pembangunan aplikasi e-Monev SDGs (INOVASI)2. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 20263. Forum <i>Business Registration System</i> (BRS)4. <i>North Sumatra SDGs Action Award 2027</i> (Indikator RAD TPB/SDGs, VLR dan Laporan Monev)5. <i>Desk</i> capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 20266. <i>Workshop</i> Penyusunan <i>Voluntary Local Review</i> (VLR) Kabupaten/Kota7. Menyusun <i>draf Monev</i> capaian SDGs tahun 20278. Sosialisasi penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI)				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2028	1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2027 2. Finalisasi aplikasi <i>e-Monev</i> SDGs 3. Penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI) 4. <i>North Sumatra SDGs Action Award 2028</i> 5. <i>Launching</i> aplikasi e-Monev SDGs 6. Diseminasi pemanfaatan aplikasi <i>e-Monev</i> SDGs 7. <i>Desk</i> capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2027 8. <i>Workshop</i> Penyusunan <i>Voluntary Local Review (VLR)</i> Kabupaten/Kota 9. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2028				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2029	1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2028 2. Pelaksanaan Skema BRS 3. Finalisasi integrasi Satu Data SDGs pada aplikasi SADAINA 4. <i>Launching</i> integrasi Satu Data SDGs pada aplikasi SADAINA 5. Diseminasi pemanfaatan aplikasi e-Monev SDGs 6. <i>Desk</i> capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2028 7. Penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI) 8. <i>North Sumatra SDGs Action Award 2029</i>				
		9. Pelaksanaan Skema BRS 10. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2029				
	2030	1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2029 2. <i>Desk</i> capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs tahun 2029 3. <i>North Sumatra SDGs Action Award 2030</i> 4. Menyusun Draf Laporan Monev RAD TPB/SGDs Tahun 2026-2030 5. <i>Workshop</i> Penyusunan <i>Voluntary</i>				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
		<i>Local Review</i> (VLR) Kabupaten/Kota6. Menyusun laporan akhir kegiatan SDGs				
36 kerja sama APIP dan APH dalam Pendampingan Proyek Strategis dan Kegiatan Unggulan Daerah melalui pendampingan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan serah terima kegiatan proyek strategis	2025	- Penyusunan MoU antara APIP dengan APH (Kejaksaaan Tinggi, Kepolisian) - Pendampingan Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah	Inspektorat	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Perangkat Daerah yang memiliki Proyek Strategis		Inspektorat kab/kota : Koordinasi Pengawasan dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara terkait pelaksanaan Proyek Strategis yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota
	2026	- Reviu Perencanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pendampingan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara				
	2027	- Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah - Evaluasi Pelaksanaan				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
		Pendampingan Proyek Strategis Daerah				
	2028	- Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah - Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah				
	2029	- Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah				
		- Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah				
	2030	- Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah				
PP 11. TRANSFORMASI DIGITAL DAN INOVASI TEKNOLOGI PADA PELAYANAN PUBLIK						



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
DANPEREKONOMIAN MASYARAKAT						
37. Pemanfaatan Satu Data SUMUT pusat data dan informasi pembangunan	2025	- Tindak lanjut MoU terkait kerja sama teknis dengan BPS dan Diskominfo dalam pembangunan aplikasi Satu Data (SADAINA Reborn) - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - <i>Launching</i> SADAINA Reborn di Konreg PDRB ISEI (BPS dan Diskominfo) - <i>Updating</i> SK Tim Pelaksana SADAINA - Diseminasi aplikasi dan tupoksi tim SADAINA	Dinas Kominfo	Seluruh OPD menginput data statistik sektoral		Replikasi aplikasi, menyediakan SDM, menyiapkan regulasi terkait
	2026	- Pemanfaatan SADAINA Reborn - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu Data tingkat Daerah - Proses integrasi Satu Data dengan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Provsu - Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data Geospasial - Penyusunan Proses Bisnis				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
		integrasi SADAINA dan Data SDGs				
	2027	- Pemanfaatan SADAINA <i>Reborn</i> - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu Data tingkat Daerah - Pemanfaatan SADAINA dan Data Geospasial - Pemanfaatan SMART SADAINA SDGs - Proses bisnis integrasi SADAINA <i>Reborn</i> dengan kab/kota				
	2028	- Pemanfaatan SADAINA <i>Reborn</i> - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
		- Forum Satu data tingkat Daerah - Pengembangan fitur SADAINA (API) - Peningkatan kapasitas user SADAINA <i>Reborn</i> - Pemanfaatan dan replikasi SADAINA <i>Reborn</i>				
	2029	- Pemanfaatan SADAINA <i>Reborn</i>- Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD- Forum Satu data tingkat Daerah- Menyediakan API (<i>Application Programming Interface</i>)- Peningkatan kapasitas user SADAINA <i>Reborn</i>- Pemanfaatan dan replikasi SADAINA <i>Reborn</i>				
	2030	- Menyediakan API (<i>Application Programming Interface</i>) - Pemanfaatan SADAINA <i>Reborn</i> - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu data tingkat Daerah - Monitoring dan Evaluasi				
PP 12. INFRASTRUKTUR DENGAN PRIORITAS JALAN, JEMBATAN, DAN IRIGASI YANG LANGSUNG						



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
BERDAMPAK PADA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL						
38. Pembangunan Ruas Jalan Baru Penghubung Wilayah Terisolir atau Strategis yang Merupakan kewenangan Provinsi	2025	tidak ada	Dinas PUPR	Dinas Kominfo, untuk publikasi kegiatan, Dinas LHK mendukung proses penyusunan dokumen lingkungan, AMDAL dan izin pinjam pakai Hutan, Dinas Perhubungan untuk penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	1. <i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (Dinas PUTR)</i> 2. <i>Survey Kondisi Jalan / Jembatan (Dinas PUTR)</i>	1. Memberikan dukungan administratif atas pembangunan jalan yang berada di wilayah kewenangannya, mendukung penyediaan lahan pada trase jalan serta perizinan 2. Menyelaraskan program jalan dengan perencanaan pembangunan daerah dan usulan prioritas lokal. 3. Melaksanakan koordinasi teknis lapangan



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2026	Pelaksanaan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2030, dengan prioritas pada ruas-ruas yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat layanan, serta memperkuat jalur distribusi antar Kabupaten/Kota • Penanganan sepanjang total 51,96 km pada 9 ruas jalan provinsi belum tembus yang masih dalam kondisi tanah dan belum layak dilalui. Ruas-ruas tersebut menghubungkan wilayah Kab. Mandailing Natal, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Samosir			1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (Dinas PUTR) 2. Survey Kondisi Jalan / Jembatan (Dinas PUTR)	dan penyedia data kondisi eksisting jalan serta kebutuhan daerah.



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2027	Pelaksanaan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2030, dengan prioritas pada ruas-ruas yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat layanan, serta memperkuat jalur distribusi antar Kabupaten/Kota•Total penanganan sepanjang 56,20 km difokuskan pada 9 ruas jalan provinsi yang saat ini belum tembus dan sebagian besar masih berupa jalan tanah. Ruas-ruas ini tersebar di wilayah Kab. Mandailing Natal, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Nias Utara, Kab. Padang Lawas, Kab. Samosir			1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (Dinas PUTR) 2. Survey Kondisi Jalan / Jembatan (Dinas PUTR)	
	2028	tidak ada			1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan	



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
					<i>Jembatan (Dinas PUTR)</i> <i>2. Survey Kondisi Jalan / Jembatan (Dinas PUTR)</i>	
	2029	Pelaksanaan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2030, dengan prioritas pada ruas-ruas yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat layanan, serta memperkuat jalur distribusi antar Kabupaten/Kota •Pembangunan ruas jalan baru sepanjang 47,17 km akan difokuskan pada 7 ruas jalan provinsi yang belum tembus dan masih berupa tanah. Lokasi berada di kawasan Kab. Mandailing Natal, Kab. Samosir, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Nias Utara, Kab. Langkat			<i>1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (Dinas PUTR)</i> <i>2. Survey Kondisi Jalan / Jembatan (Dinas PUTR)</i>	
	2030	tidak ada			<i>1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan</i>	



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
					<i>Jalan dan Jembatan (Dinas PUTR)</i> <i>2. Survey Kondisi Jalan / Jembatan (Dinas PUTR)</i>	
39. Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar bagi Kawasan Afirmasi, Terluar, dan Terpencil untuk Mewujudkan Keadilan Pembangunan	2025	tidak ada	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan, AMDAL, Dinas Kominfo untuk publikasi kegiatan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	<i>tidak ada</i>	1. Pemerintah Kabupaten/Kota: Menyediakan lahan, mengarahkan program RTLH (Air Minum dan Sanitasi), menetapkan penerima bantuan, dan mengalokasikan anggaran daerah. 2. Dinas Perumahan Rakyat kab/kota: Pelaksana utama di lapangan yang mengurus pendataan, verifikasi, penyaluran
	2026	tidak ada				
	2027	tidak ada				
	2028	tidak ada				
	2029	tidak ada				
	2030					



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
						bantuan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan.3. Dinas PUPR kab/kota: Memberikan dukungan teknis konstruksi, membuat RAB, dan mengawasi pelaksanaan di lapangan.4. Dinas Sosial kab/kota: Membantu memperbarui dan memverifikasi data kemiskinan lokal.5. Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada kab/kota: Melakukan identifikasi penerima bantuan, sosialisasi, memfasilitasi gotong royong, serta membantupemantauan di lapangan.
PP13. PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK DAN TRANSPORTASI YANG MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN DAYA SAING						
40. Dukungan Pengembangan Sistem	2025	tidak ada	Dinas Perhubungan	Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas		Dinas Perhubungan Kab/Kota Pelaksana
	2026	tidak ada				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
Angkutan Umum Massal Perkotaan Melalui Pembangunan BRT dan Peningkatan Kereta <i>Commuter</i>	2027	tidak ada		PUPR terkait penyelenggaraan Jalan Provinsi (jika trayek melalui jalan provinsi) Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, Biro Organisasi membentuk kelembagaan (BLUD) BRT Mebidang, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan		operasional harian, koordinator lapangan. Kota Binjai: Dukungan penetapan lokasi lahan depo BRT Kab. Deli Serdang: Dukungan penetapan lokasi lahan depo BRT
	2028	tidak ada				
	2029	tidak ada				
	2030	tidak ada				
41. Subsidi Transportasi Bus Perintis untuk Daerah-Daerah Terpencil	2025	tidak ada	Dinas Perhubungan	Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas PUPR terkait penyelenggaraan Jalan Provinsi		1. Koordinasi dan Penyediaan Data: Pemerintah kabupaten/kota berperan menyediakan data dan
	2026	tidak ada				
	2027	tidak ada				
	2028	tidak ada		(jika trayek melalui jalan provinsi) Dinas LHK		kebutuhan daerah terkait angkutan perintis serta
	2029	tidak ada				



	2030	tidak ada		untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan		berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi agar subsidi dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi wilayah terpencil yang membutuhkan akses transportasi. 2. Fasilitasi Pelaksanaan Program: Kabupaten/kota membantu pelaksanaan program subsidi dengan memastikan armada bus perintis dapat beroperasi di wilayahnya, menyediakan dukungan administratif, dan memantau pelaksanaan layanan agar berjalan lancar dan memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu penyediaan fasilitas pendukung untuk kelancaran operasional, berupa lahan untuk titik keberangkatan 3. Penentuan Rute dan Kebijakan Lokal: Pemerintah daerah menetapkan rute bus perintis yang strategis sesuai kebutuhan wilayah dan sinkron dengan program nasional, serta mengeluarkan kebijakan
--	------	-----------	--	---	--	--



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
						pendukung agar subsidi bisa dimanfaatkan optimal untuk membuka keterisolasian daerah, yaitu pengusulan dan penetapan trayek dan sosialisasi program kepada masyarakat serta kesiapan infrastruktur jalan di kabupaten dalam kondisi layak dan aman, yang akan dilalui oleh trayek
						4. Pengawasan dan <i>Monitoring</i> : Kabupaten/kota melakukan pemantauan operasional bus perintis di lapangan untuk memastikan layanan tetap berjalan dengan baik, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat di daerah terpencil.
PP 14. PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA						



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
42. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir	2025	tidak ada	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk dokumen lingkungan dan AMDAL, BPBD menyusun kajian resiko bencana, rencana mitigasi, dan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat pada wilayah bencana, Diskominfo untuk publikasi kegiatan	<i>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (BPBD)</i>	1. Penyediaan Data dan Koordinasi: Kabupaten/kota berperan menyediakan data wilayah yang terdampak banjir serta kebutuhan teknis di lapangan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi agar pembangunan bisa tepat sasaran dan efektif (BPBD) 2. Fasilitasi Pelaksanaan dan Administrasi: Kabupaten/kota membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan dengan menyediakan dukungan administratif, perizinan, penyediaan lahan, dan tenaga lokal di wilayahnya (PUPR) 3. Pemeliharaan dan Pengawasan: Setelah pembangunan infrastruktur pengendali banjir dilakukan,
	2026	tidak ada			<i>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (BPBD)</i>	
	2027	tidak ada			<i>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (BPBD)</i>	
	2028	tidak ada			<i>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (BPBD)</i>	



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2029	- Pengerjaan fisik - Penyusunan DED (<i>Detail Engineering Design</i>) dan pemenuhan <i>readiness</i> Kriteria •Kab. Dairi, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Batu Bara pada Sungai Lae Bongkaras, Sungai Aek Siandurian, Sungai Aek Sigaeon, Sungai Gambus sepanjang 489 meter			1. <i>Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa (Dinas PUTR)</i> 2. <i>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (BPBD)</i>	pemerintah kabupaten/kota turut
	2030	tidak ada			<i>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (BPBD)</i>	



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
						bertanggung jawab melakukan pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian agar fasilitas yang dibangun tetap berfungsi sesuai perencanaan dan umur yang diharapkan (PUPR)4. Pemberdayaan Masyarakat dan Kolaborasi: Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah provinsi dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pengendalian banjir melalui manajemen drainase, normalisasi sungai, dan pengelolaan ruang terbuka hijau (LHK, Dinas PKP kab/kota)5. Penyesuaian Kebijakan Lokal: Kabupaten/kota juga menetapkan kebijakan lokal yang mendukung implementasi program pengendalian banjir provinsi, termasuk pengelolaan tata ruang dan penggunaan teknologi



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
						mitigasi banjir (LHK, Dinas PKPkab/kota, BPBD)
	2025	tidak ada				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
43. Pembangunan TPST Regional	2026	tidak ada	Dinas PUPR : pelaksana	PUPR: -Penyiapan dokumen Lingkungan, -Dalam pembuatan FS dan DED, dan pembangunan infrastruktur serta pendukungnya, Dinas LHK : - Dukungan dalam proses penyusunan dokumen		1. Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah 2. Penyediaan dan penentuan lokasi 3. Dukungan pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup kab/kota 4. Dukungan pengangkutan
	2027	tidak ada				
	2028	tidak ada				
	2029	tidak ada				
	2030	tidak ada				
				lingkungan hidup-Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi,- Dinas Kominfo untuk publikasimedia		sampah terpilah ke tempat pengolahan5. Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra pengolahan6. Dukungan SDM
44. Pembangunan PLTSa	2025	tidak ada	DISPERINDAG ESDM	• PUPR : Pembangunan TPST • LHK: Pengelolaan Sampah • Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan		Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan
	2026	tidak ada				
	2027	tidak ada				
	2028	tidak ada				
	2029	tidak ada				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2030	tidak ada				Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: Lahan dan wilayah untuk pembangunan PLTSa, Penerapan Sistem Persampahan Terpilah Perizinan 1. Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah 2. Penyediaan dan penentuan lokasi 3. Dukungan pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup kab/kota 4. Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan 5. Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra pengolahan 6. Dukungan SDM
45 Pengembangan SPAL Regional	2025	tidak ada	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, PDAM dalam	1. <i>Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dinas PUTR)</i>	1. Perencanaan tata ruang (PKP Tata Ruang) 2. Membuat regulasi dan menerbitkan perizinan



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2026	tidak ada		peningkatan layanan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan		(LHK, DPMPTSP) 3. Sosialisasi kepada masyarakat (Dinas Kesehatan)
	2027	tidak ada				
	2028	tidak ada				
	2029	tidak ada				
	2030	tidak ada				
				evaluasi, Dinas kominfo untuk publikasi media		4. Dukungan penyediaan lahan (PKP Tata Ruang)5. Menyediakan alokasi anggaran (BKAD)6. Pembentukan kelembagaan untuk mengelola operasional IPLT(Biro Organisasi)
46. Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati	2025	Rapat koordinasi, pembentukan tim <i>appraisal</i> dan pembentukan pokja rencana Pembangunan Taman Kehati	DLHK	1. Biro Pem Otda - SK Penlok 2. BPN - Sertifikat Lahan 3. Diskominfo - Publikasi Media		1. Dukungan terhadap pengadaan lahan 2. Penetapan Taman Kehati pada RTRW kab/kota
	2026	Penyusunan dokumen DPPT dan pembebasan lahan				
	2027	Penyusunan dokumen FS, DED, dan dokumen administrasi lainnya				
	2028	Pekerjaan fisik di lapangan sesuai dengan Perdirjen KSDAE Nomor P.5 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan <i>Design</i> Dasar (<i>Design</i> Vegetasi dan <i>Design</i> Infrastruktur Taman Kehati)				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2029	Tahap lanjutan kegiatan penanaman dan pemeliharaan vegetasi serta - Membuat Rencana Kesepakatan Bersama/ kerja sama Pembangunan Taman Kehati sebagai dukungan Pengembangan Kawasan Konservasi Taman Kehati				
	2030	1. Pembukaan dan peresmian Taman Kehati serta tahap lanjutan kegiatan penanaman 2. Pemeliharaan vegetasi serta kegiatan pengembangan 3. Pembentukan UPT Taman Keanekaragaman Hayati				
PP 15. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA						
47. Penguatan Ekonomi Desa untuk Mengurangi Ketergantungan pada Pusat Kota dengan Penguatan Ekonomi Lokal melalui Pembuatan <i>Master Plan</i> Desa Produktif dan Mandiri.	2025	tidak ada		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Dinas Perkebunan (Pemberian bantuan/pelatihan pengembangan komoditas gula aren, kopi, dan kelapa kepada kelompok yang terdapat pada		-Menyediakan data potensi desa yang akurat termasuk peta sebaran komoditi unggulan. -Memperbaiki jalan produksi, pasar desa, gudang, sentra dan pengolahan -Memfasilitasi kerja sama antar desa atau antar BUMDes untuk
	2026	tidak ada				
	2027	tidak ada				
	2028	tidak ada				
	2029	tidak ada				
	2030	tidak ada				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
				desa yang menjadi sasaran intervensi kegiatan ini)		memperkuat rantai pasok.- Memfasilitasi sertifikasi produk (halal, organik, SNI) untuk meningkatkan daya saing.-Pembinaan Penggunaan dana desa untuk ekonomi desa padaLokus yang di intervensi
48. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan bagi Pengelola BUMDES	2025	Pendataan BUMDES/BUMDesma yang akan menerima pemanfaatan kegiatan •27 Kabupaten/Kota yang memiliki desa		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan bagi pengelola BUMDES/Masyarakat Desa).		- Menugaskan tenaga pendamping desa atau penyuluh ekonomi untuk mendampingi operasional BUMDES. - Memfasilitasi akses internet dan teknologi informasi untuk mendukung pemasaran digital. - Memfasilitasi sertifikasi kompetensi pengelola BUMDES melalui lembaga pelatihan resmi.
	2026	- Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDesma - Monitoring dan Evaluasi kegiatan •Tapteng, Tapanuli Utara, Nias, Simalungun, Asahan, Dairi, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labura, Gunungsitoli, Padangsidempuan, Karo, Toba, Labusel, Tapanuli Selatan, Labuhanbatu (20 Kabupaten/Kota)				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2027	- pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDes/BUMDesma - Monitoring dan Evaluasi kegiatan •*27 Kabupaten/kota yang memiliki desa				
	2028	- pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDesma - Monitoring dan Evaluasi kegiatan •*27 Kabupaten/kota yang memiliki desa				
	2029	- pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDesma - Monitoring dan Evaluasi kegiatan •*27 Kabupaten/kota yang memiliki desa				
	2030					
PP 16. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG MENDUKUNG SUASANA YANG HARMONIS, TOLERAN DAN RUKUN						



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
49. Bantuan Hibah Rumah Ibadah di 33 Kabupaten/Kota	2025	-Penyusunan perubahan Pergub Hibah Rumah Ibadah dengan mekanisme penyaluran hibah yang memuat alokasi terhadap biaya operasional pengelola dan sarpras rumah ibadah Tahun 2025-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030-Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-203033 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	Biro KESRA	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)Inspektorat (pendampingan menyeluruh dan tinjauan terhadap tata kelola pemberian bantuan hibah rumah ibadah)		-
	2026	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2027	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 - <i>Monitoring</i> dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara				
	2028	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 - <i>Monitoring</i> dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun				
		2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2029	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030-Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-203033 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara				
	2030	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara				
50. Festival Seni dan Budaya Daerah	2025	tidak ada	DISBUDPARE KRAF	1. Dinas Perhubungan : Memastikan ketersediaan transportasi dan lalu lintas saat <i>event</i> internasional dilaksanakan 2. Dinas Kesehatan :		1. Memastikan ketersediaan anggaran dalam mendukung Proyek Strategis Provinsi; 2. Pelatihan dan pembinaan Sanggar Kesenian Daerah;
	2026	tidak ada				
	2027	tidak ada				
	2028	tidak ada				
	2029	tidak ada				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
	2030	tidak ada		Dukungan Tenaga Kesehatan dan Ambulans 3. Dinas Koperasi &UMKM : Pelatihan dan pendampingan UMKM untuk mendukung pelaksanaan <i>event</i> internasional 4. Dinas Kominfo : Memastikan ketersediaan jaringan digital saat pra <i>event-event</i> -pasca <i>event</i> internasional; publikasi kegiatan 5. Satpol PP : Keamanan Pelaksanaan <i>Event</i> dan ketertiban penyelenggaraan acara		3. Pendataan/Inventarisasi potensi Festival Seni Budaya di masing- masing daerah; 4. Memastikan kontinuitas pelaksanaan Festival Seni Budaya di masing-masing daerah 5. Promosi pelaksanaan Festival Seni-Budaya; 6. Penyusunan Kalender Budaya
	2025	tidak ada				
	2026	tidak ada				
51. Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat	2027	-Pendataan Sasaran Ormas dan Kelompok masyarakat pada daerah rawan konflik di Sumatera Utara di Tahun 2027- Pelaksanaan Kegiatan edukasi wawasan kebangsaan dan Solidaritas bagi Ormas Tahun 2027-Monitoring dan Evaluasi Tahun 2027•Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Humbahas,Sibolga, Tapteng, Tapanuli Utara, Samsoir,		Dinas Pendidikan (Koordinasi rekomendasi satuan pendidikan yang membutuhkan pembekalan terhadap edukasi wawasan kebangsaan) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)		Replikasi pelaksanaan kegiatan Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat di Kabupaten/kota



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
		Tapanuli Selatan dan P. Sidempuan				
	2028	tidak ada				
	2029	tidak ada				
	2030	tidak ada				
PP 17. TERCIPTANYA KEHIDUPAN YANG LEBIH AMAN DAN TERTIB						
52. Patroli Gabungan untuk Narkoba di Pintu Masuk Narkoba dan Kawasan-Kawasan Kenakalan Remaja (Genk Motor).	2025	tidak ada	Satpol PP	Kesbangpol (Penyediaan data dan peta daerah rawan narkoba) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)		Melakukan koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota terkait dukungan personel dalam pelaksanaan kegiatan. Kesbangpol (Penyediaan data dan peta daerah rawan narkoba di Kab/Kota)
	2026	tidak ada				
	2027	tidak ada				
	2028	tidak ada				
	2029	tidak ada				
	2030	tidak ada				
53. Pemberantasan Pengguna dan Bandar Narkoba melalui Pemindahan Gembong	2025	tidak ada		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Dinas Perhubungan		Penguatan pencegahan narkoba di pemerintahan daerah
	2026	tidak ada				
	2027	tidak ada				



PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA	
			UTAMA	PENDUKUNG	DUKUNGAN PER PERIODE	KETERANGAN BENTUK DUKUNGAN
Narkoba dari Lapas ke Nusakambangan	2028	tidak ada		(pengaturan lalu lintas untuk pemindahan gembong narkoba) Satpol PP (pendampingan saat pemindahan gembong narkoba)		
	2029	tidak ada				
	2030	tidak ada				



4.2. Indikator Kinerja Utama

4.2.1. Penyelarasan Indikator Makro Sasaran Utama Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029

Dalam rangka mengimplementasikan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berupaya untuk mendukung pencapaian Indikator Makro Sasaran Utama Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Seluruh indikator tersebut menjadi acuan penting bagi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, sekaligus memastikan adanya sinkronisasi arah kebijakan antara pusat dan daerah. indikator utama pembangunan yang termuat dalam RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJPD Kabupaten Tapanuli Utara juga dilebur ke dalam IKU, Indikator Kinerja Daerah (IKD), maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai satu kesatuan sistem pengukuran kinerja. Integrasi ini tidak hanya memperkuat keterkaitan perencanaan antar level pemerintahan, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah pembangunan di daerah selaras dengan target nasional dan visi jangka panjang Kabupaten Tapanuli Utara.

Dukungan Kabupaten Tapanuli Utara dalam mencapai Indikator Makro Sasaran Utama Pembangunan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara termuat dalam table berikut ini :



Tabel 4.5. Penyelarasan Indikator Makro Sasaran Utama Pembangunan RPJMN ,RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029

NO	Indikator	Satuan	RPJMN			RPJMD Provinsi Sumatera Utara			RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara			
			Baseline	Target	Target	Baseline	Target	Target	Baseline	Target	Target	Keterangan
			2024	2025	2029	2024	2025	2029	2024	2025	2029	
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,05	5,3	8	5,03	5,20-5,60	7,60-8,00	4,7	4,88-5,04	4,98-6,93	
2	GNI per Kapita	USD / Rp.Juta	4870 (2023)	5.410	8.000	73,57	78,4	115,3	34,49	33,31-35,31	40,10-42,49	
3	Kontribusi PDB Maritim/ Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	7,9 (2022)	8,1	9,1	5,2	5,2	5,3	-	-	-	
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,03	7,0 - 8,0	4,5 - 5,0	7,19	6,69 - 7,17	2,82 - 3,82	8,21	8,21-8,00	7,40-7,20	
5	Rasio Gini	Poin	0,379	0,378 - 0,382	0,372 - 0,375	0,306	0,303 - 0,305	0,287 - 0,291	0,242	0,23	0,189	
6	Indeks Modal Manusia	Poin	0,54 (2020)	0,56	0,59	N/A	0,54	0,57	77,48	78,64-80,85	78,30-81,62	Indeks Pembangunan Manusia
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	34,09-2022	35,53	45,17	N/A	1	16,88	N/A	213,096	364,025	(Ton Co2 Eq)
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	72,54 (2023)	76,49	77,2	73,96	77,2	77,87	81,35	79,51	80,2	
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,91	4,50-5,00	4,00-4,71	5,6	5,27-5,56	4,74-5,20	1,21	1,20-1,15	1,00-0,95	



Penyelarasan indikator utama dan Indikator Kinerja daerah dengan provinsi dan nasional biasanya dilakukan untuk memastikan arah pembangunan selaras dari level nasional hingga daerah. Tujuan penyelarasan adalah untuk mendukung pencapaian sasaran nasional, meningkatkan konsistensi perencanaan, memperkuat sinergi antar level pemerintahan, mempermudah monitoring dan evaluasi serta menjamin keadilan dan pemerataan pembangunan. Penyelarasan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Pembangunan RPJMD Tapanuli Utara Tahun 2025-2029 dengan sasaran pembangunan RPJMN dan RPJMD Prov Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4.6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2030

MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN	RPJMN	BASELINE	TARGET		RPJMD PROVINSI	BASELINE	TARGET 2025-2030						RPJMD KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025- 2045	BASELINE	TARGET 2025-2030					
	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2029	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
MISI 1	TRANSFORMASI SOSIAL				TRANSFORMASI SOSIAL								TRANSFORMASI SOSIAL							
TUJUAN PEMBANGUNAN 1	Kesehatan untuk Semua				Kesehatan untuk Semua								Kesehatan untuk Semua							
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72.13 (2023)	74.43	75.4	Usia Harapan Hidup (tahun)	73.9	74.1	74.18	74.36	74.54	74.72	74.90	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,36	74.36- 74.43	74.43- 74.56	74.56- 75.01	75.01- 75.31	75.31- 75.98	75.98- 76.10
2.a	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	189 (2020)	122	77	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	52.22	65.78	58.90	55.50	52.49	49.21	46.32	Angka Kematian Ibu (kasus)	1,00	5,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00
2.b	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21.50 (2023)	18.8	14.2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	22	20	18.50	17.00	15.50	14	12.50	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	32,5	30,4	26,3	22,2	18,1	14,2	14
3.a	Insidensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk)	387 (2023)	329	190	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberculosis (treatment coverage) (%)	71.8	90	90	90	90	90	90	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberculosis (treatment coverage) (%)	142,1	90	90	90	90	90	90
3.b	-				Angka keberhasilan pengobatan Tuberculosis (treatment success rate) (%)	85	90	90	90	90	90	90	Angka keberhasilan pengobatan Tuberculosis (treatment success rate) (%)	142,1	90	90	90	90	90	90
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	98.42	98.6	99	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	93	98.6	98.60	98.60	98.60	99	99.00	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	97,95	98,61	98,65	98,68	98,71	98,74	98,79
TUJUAN PEMBANGUNAN 2	Pendidikan Berkualitas yang Merata				Pendidikan Berkualitas yang Merata								Pendidikan Berkualitas yang Merata							
5.a.1	Rata-rata Nilai PISA				a) Persentase kabupaten/kot a yang mencapai standar kompetensi								a) Persentase kabupaten/kot a yang mencapai standar kompetensi							



MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN	RPJMN	BASELINE	TARGET		RPJMD PROVINSI	BASELINE	TARGET 2025-2030						RPJMD KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025- 2045	BASELINE	TARGET 2025-2030					
	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2029	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:								minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:							
	a-I Membaca	359 (2022)	396	409	i. Literasi Membaca	N/A	6.06- 12.12	12.01- 16.01	16.94- 20.94	22.36- 25.36	27.27- 30.30	32.21- 35.21	i. Literasi Membaca							
	a-ii Matematika	366 (2022)	404	416	ii. Numerasi	N/A	0.00-3.03	1.5-4.57	3.03-6.06	4.5-7.6	6.06-9.09	7.5-10.68	ii. Numerasi							
	a-iii Sains	383 (2022)	416	426																
5.b	Rata-rata nilai asesmen nasional				b) Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:								b) Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:							
	b-i Literasi Membaca	60.89 (2023)	62.89	66.8 9	i. Literasi Membaca	N/A	35.99- 38.49	37.37- 39.88	38.76- 41.26	40.15- 42.65	41.53- 44.03	42.92- 45.42	Kemampuan Literasi SD	58,39	69,69	70,79	71,89	72,99	74,09	75,19
													Kemampuan Literasi SMP	68,59	60,89	63,39	65,89	68,39	70,89	73,39
	b-ii Numerasi	51.36 (2023)	54.36	59.8 6	ii. Numerasi	N/A	33.70- 36.20	34.70- 39.20	35.70- 38.20	36.70- 39.20	37.70- 40.20	38.70- 41.20	Kemampuan Numerasi SD	54,18	63,17	64,67	66,17	67,67	69,17	70,67
													Kemampuan Numerasi SMP	61,67	57,08	59,98	62,88	65,78	68,68	71,58
5.c	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9.22	9.33	9.82	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,93	10.3 - 10.33	10.43- 10.46	10.56- 10.59	10.69- 10.72	10.83 - 10.84	10.96- 10.97	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,31	10,39- 10,74	10,46- 10,84	10,53- 10,94	10,60- 11,04	10,67- 11,15	10,74- 11,25
5.d	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13.21	13.32	13.5 8	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,49	13.61 - 13.63	13.67- 13.69	13.73- 13.75	13.79- 13.81	13.86 - 13.87	13.92- 13.94	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,74	13,83- 14,03	13,87- 14,11	13,91- 14,19	13,95- 14,27	13,99- 14,35	14,03- 14,43
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	31.45 (2023)	33.94	38.0 4	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang	N/A	11.12	11.12- 11.30	11.12- 11.33	11.12- 11.37	11.12- 11.40	11.16- 11.44	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang	Tidak diturunkan ke Kabupaten						



MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN	RPJMN	BASELINE	TARGET		RPJMD PROVINSI	BASELINE	TARGET 2025-2030						RPJMD KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025-2045	BASELINE	TARGET 2025-2030					
	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2029	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)								Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)							
7	Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66.30 (2023)	66.78	67.66	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	N/A	71.1	72.47	73.85	75.22	76.59	77.69	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	Tidak diturunkan ke Kabupaten						
TUJUAN PEMBANGUNAN 3	Perlindungan Sosial yang Adaptif				Perlindungan Sosial yang Adaptif								Perlindungan Sosial yang Adaptif							
8	Tingkat Kemiskinan (%)	9.03	7.0-8.0	4.5-5.0	Tingkat Kemiskinan (%)	7,19	6.96-7.16	5.93-6.55	4.89-5.64	3.86-4.73	2.82-3.82	2.50-3.50	Tingkat Kemiskinan (%)	8,21	8.21-8.00	8.00-7.80	7.80-7.60	7.60-7.40	7.40-7.20	7.20-7.00
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	29.77 (semester I)	32.15	43.92	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	N/A	29.27	32.11	34.94	37.78	40.61	42.88	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	11,99	18,00-20,50	18.47-21.33	18.96-22.19	19.46-23.09	19.97-24.03	20.50-25,00
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	9.07 (2023)	10	12	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	N/A	27.00	27.20	27.40	27.60	27.80	28.00	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)							
MISI 2	TRANSFORMASI EKONOMI				TRANSFORMASI EKONOMI								TRANSFORMASI EKONOMI							
TUJUAN PEMBANGUNAN 4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi				Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi								Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi							
11.a	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	18.67 (2023)	20.8	21.9	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	18,36	18.66	18.96	19.26	19.56	19.86	20.16	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	2,18	2,31-2,35	2,32-2,43	2,33-2,63	2,33-2,78	2,34-2,94	2,35-3,11
11.b	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	1.30 (2023)	2.2	3.46									Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	5.058,48	5.465,00	5.872,00	6.279,00	6.686,00	7.093,00	7.500,00
12.a	Rasio PDB Pariwisata (%)	3.6 (2022)	4.50-4.60	4.90-5.00	Rasio PDRB Penyediaan	2,21	2.42	2.51	2.60	2.69	2.73	2.82	Rasio PDRB Penyediaan	2,46	2,35-2.48	2,37-2.50	2,39-2.54	2,41-2.59	2,43-2.64	2,45-2.69



MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN	RPJMN	BASELINE	TARGET		RPJMD PROVINSI	BASELINE	TARGET 2025-2030						RPJMD KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025- 2045	BASELINE	TARGET 2025-2030					
	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2029	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					Akomodasi Makan dan Minum (%)								Akomodasi Makan dan Minum (%)							
12.b	Devisa Pariwisata (miliar USD)	14.0 (2023)	19-22.1	32.0- 39.4	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang)	142,71	330	355	380	405	421.14	445	Jumlah Wisatawan (Orang)	191.061	210.0 00	220.0 00	230.0 00	240.0 00	250.0 00	260.0 00
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	6.77 (2023)	7.3-7.9	8.0- 8.4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	N/A	5.45	5.47	5.5	5.5	5.43	5.5	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)							
14.a	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	3.06	3.1	3.3	a.i. Proporsi jumlah UKM non pertanian pada Level Provinsi (%)	N/A	10.66- 10.81	10.67- 10.82	10.68- 10.83	10.69- 10.84	10.70- 10.85	10.71- 10.86	Proporsi jumlah UKM non pertanian (%)	N/A	75	77,79	80,67	83,67	86,78	90
					a.ii. Proporsi jumlah industri kecil menengah pada level provinsi (%)	N/A	5.04	5.15-6.15	5.26-6.26	5.38-6.38	5.50-6.50	5.61-6.61	a.ii. Proporsi jumlah industri kecil menengah pada level provinsi (%)							
14.b	Rasio kewirausahaan (%)	3.08	3.1	3.6	Rasio Kewirausaha an	3,60	3.63	3.68	3.80	4.10	4.25	4.35	Rasio Kewirausaha an	11,7	12	20,69	35,69	61,54	106,1 2	183
14.c	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1.07 (2021)	1.1	1.2	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%)	N/A	0.79	0.79	0.80	0.80	0.81	0.81	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%)	—	6	6,36	6,73	7,13	7,55	8
14.d	Return on Aset (ROA) BUMN (%)	3.14 (2023)	3.21	3.42	ROA BUMD	N/A	1.24	1.42	1.61	1.79	1.97	2.12	ROA BUMD							
15.a	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.91	4.50- 5.00	4.00- 4.71	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,6	5.27-5.56	5.14-5.47	5.01-5.38	4.88-5.29	4.74-5.20	4.62-5.11	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,21	1,20- 1,15	1,15- 1,10	1,10- 1,05	1,05- 1,00	1,00- 0,95	0,95- 0,85
15.b	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	23.96	35	46	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	N/A	43	44.85	46.70	48.55	50.4	51.88	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)							
16	Tingkat Partisipasi	56.42	56.30- 58.80	56.7 0-	Tingkat Partisipasi	58,54	59.29- 61.67	59.33- 62.22	59.38- 62.77	59.43- 63.32	59.48- 63.87	59.53- 64.42	Tingkat Partisipasi	55,42	55,43	55,44	55,45	55,46	55,47	55,48



MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN	RPJMN	BASELINE	TARGET		RPJMD PROVINSI	BASELINE	TARGET 2025-2030						RPJMD KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025- 2045	BASELINE	TARGET 2025-2030					
	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2029	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Angkatan Kerja Perempuan (%)			60.89	Angkatan Kerja Perempuan (%)								Angkatan Kerja Perempuan (%)							
17.a	Pengeluaran IPTEK dan Inovasi (% PDB)	0.28 (2020)	0.3	0.45	-								-							
17.b	Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	54	53	49	Indeks Inovasi Daerah	59,93	57.50-60.01	60.01 - 60.76 (Sangat Inovatif)	60.76- 61.51 (Sangat Inovatif)	61.51- 62.26 (Sangat Inovatif)	62.26- 63.01 (Sangat Inovatif)	63.01- 63.76 (Sangat Inovatif)	Indeks Inovasi Daerah	34,41	56.96- 58.95	56,33- 60,86	55,7- 62,83	55,08- 64,86	54;47- 66;96	56,77- 68,45
TUJUAN PEMBANGUNAN 5	Penerapan Ekonomi Hijau				Penerapan Ekonomi Hijau								Penerapan Ekonomi Hijau							
18.a	Indeks Ekonomi Hijau	60.08 (2023)	68.34	77.2	Indeks Ekonomi Hijau	N/A	51.12	51.14	51.15	51.17	51.18	51.19	Indeks Ekonomi Hijau							
18.b	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	13.2 (2023)	20	23	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	47,73	53.21	60.60	67.99	75.38	82.76	90.15	Energi Baru Terbarukan (EBT) (Nilai/MW)	32,2	42,2	52,2	72,2	82,2	92,2	92,2
TUJUAN PEMBANGUNAN 6	Transformasi Digital				Transformasi Digital								Transformasi Digital							
19	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	45 (2023)	43	40	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	N/A	6	6.23	6.45	6.68	6.9	7.08	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi							
TUJUAN PEMBANGUNAN 7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global				Integrasi Ekonomi Domestik dan Global								Integrasi Ekonomi Domestik dan Global							
20	Biaya Logistik (% PDB)	14.29 (2022)	13.52	12.5	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	N/A	10.1	9.95	9.80	9.65	9.5	9.38	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	N/A	77,78	80	80,5	80,7	82	83
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29.3 (2023)	29.4	29.9	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	28,65	29.70	29.75	29.80	29.85	29.90	29.95	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,18	31-30	30.8- 27.66	30.6- 25.51	30.4- 23.52	30.2- 21.69	30-20
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	21.7 (2023)	21.7	22.6	Ekspor Barang dan	12,56	16.45- 16.54	16.62- 16.76	16.79- 16.98	16.96- 17.20	17.13- 17.41	17.30- 17.62	Ekspor Barang dan	-	42	43,49	45,03	46,63	48,29	50



MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN	RPJMN	BASELINE	TARGET		RPJMD PROVINSI	BASELINE	TARGET 2025-2030						RPJMD KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025- 2045	BASELINE	TARGET 2025-2030					
	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2029	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					Jasa (% PDRB)								Jasa (% PDRB)							
					a) Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	72,75	73.48	78.97	83.86	87.81	90.64	93.75	a) Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap							
TUJUAN PEMBANGUNAN 8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi				Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi								Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi							
23.a	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44.13 (2023)	44.35	45.6	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	N/A	2.26	2.28	2.30	2.31	2.33	2.34	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)							
23.b	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	65.25	67	74	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	73,47	74.36	75.50	78.28	79.54	80.87	81.01	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	87,15	87,65	88,15	88,65	89,15	89,65	90,15
23.c	Persentase Desa Mandiri (%)	22.85	23.29	25.7 9	Persentase Desa Mandiri (%)	3,1	8.44	8.56	8.69	8.81	8.93	9.03	Persentase Desa Mandiri (%)	0	0,41	0,83	1,24	1,66	2,07	2,49
MISI 3	TRANSFORMASI TATA KELOLA				TRANSFORMASI TATA KELOLA								TRANSFORMASI TATA KELOLA							
TUJUAN PEMBANGUNAN 9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif				Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif								Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif							
24	Indeks Materi Hukum	0.60 (2023)	0.51	0.55	Indeks Reformasi Hukum	85,9	87.50	88.00	88.50	89.00	89.50	90.00	Indeks Reformasi Hukum	87,17	88,05	88,92	89,75	90,66	91,53	92,41
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.79 (2023)	3	2.00 (b)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	N/A	3.45	3.52	3.58	3.65	3.71	3.76	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,85	2,86	2,87	2,88	2,89	2,9	2,91
26	Indeks Pelayanan Publik	3.78 (2023)	3.68 (a)	3.8	Indeks Pelayanan Publik	N/A	3.92	3.93	3.94	3.95	3.96	3.97	Indeks Pelayanan Publik	3,47	3,55	3,62	3,69	3,76	3,83	3,9
27.a	Indeks Integritas Nasional	70.97 (2023)	74.52	77.5 7	Indeks Integritas Nasional	N/A	66.78	67.46	68.15	68.83	69.51	70.19	Indeks Integritas Nasional	68,64	71,19	72,95	74,75	76,6	78,5	80,44
27.b	Indeks Persepsi Korupsi	34 (2023)	38	43.7																



MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN	RPJMN	BASELINE	TARGET		RPJMD PROVINSI	BASELINE	TARGET 2025-2030						RPJMD KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025- 2045	BASELINE	TARGET 2025-2030					
	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2029	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
MISI 4	SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA				SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA								SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA							
TUJUAN PEMBANGUNAN 10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, Dan Demokrasi Substansial				Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, Dan Demokrasi Substansial								Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, Dan Demokrasi Substansial							
28	Indeks Pembangunan Hukum	0.68 (2023)	0.69	0.73	a) Persentase Pengakan Hukum Peraturan Daerah	N/A	70	71.43	72.85	74.28	75.7	76.84	a) Persentase Pengakan Hukum Peraturan Daerah	100	100	100	100	100	100	100
					b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	86,2	86.5	86.80	87.10	87.40	87.7	88.00	b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM							
29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	62.8 (2020)	67.5	68.5	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	N/A	58.5	59.38	60.25	61.13	62	62.70	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)							
30	Indeks Demokrasi Indonesia	79.51 (2023)	81.69- 85.23	83.4 2- 86.9 6	Indeks Demokrasi Indonesia	80,34 (2023)	80.5	81.00	81.50	82.00	82.5	83.00	Indeks Demokrasi Indonesia	-	-	-	-	-	-	-
TUJUAN PEMBANGUNAN 11	Stabilitas Ekonomi Makro				Stabilitas Ekonomi Makro								Stabilitas Ekonomi Makro							
31	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10.07	10.24	11.5 2- 15.0 0	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	N/A	2.58	2.62	2.76	2.9	3.04	3.24	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB							
32	Tingkat Inflasi (%)	1.57	2.5 ± 1.0	2.5 ± 1.0	Tingkat Inflasi (%)	2,12	2.5±1	2.5±1	2.5±1	2±1	2±1	2±1	Tingkat Inflasi (%)	2,46	3,00- 1,00	3,00- 1,01	3,00- 1,02	3,00- 1,03	3,00- 1,04	3,00- 1,05
33.a	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)	40.5 (2023)	43	50.9	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	N/A	28.77	30.06	31.35	32.63	33.92	34.95	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	0,24	0,4	0,66	1,1	1,82	3,01	5
33.b	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7.3 (2023)	8	11.2	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	N/A	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	Aset Dana Pensiun/PDB (%)							



MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN	RPJMN	BASELINE	TARGET		RPJMD PROVINSI	BASELINE	TARGET 2025-2030						RPJMD KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025- 2045	BASELINE	TARGET 2025-2030					
	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2029	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
33.c	Aset Asuransi/PDB (%)	9.0 (2023)	9.1	10.5	-								-							
33.d	Nilai Transaksi Saham/PDB (%)	16.0 (2023)	19.8	23.9	Nilai Transaksi Saham Provinsi Berupa Nilai Rata- rata Tahunan	N/A	8.103.06 4.03	8.677.81 6.12	9.252.56 8.21	9.827.32 0.30	10.402.07 2.39	10.861.87 4.06	Nilai Transaksi Saham Provinsi Berupa Nilai Rata- rata Tahunan	47,12	55,06	64,35	75,2	87,87	102,6 9	120
33.e	Total Kredit/PDB (%)	33.9 (2023)	37.8	46.8	Total Kredit/PDRB (%)	N/A	25.7	27.15	28.60	30.04	31.49	32.65	Total Kredit/PDRB (%)	0,35	0,56	0,9	1,45	2,33	3,74	6
34	Inklusi Keuangan (%)	88.7 (2023)	91	93	Inklusi Keuangan (%)	N/A	97.52	97.61	97.70	97.79	97.88	97.95	Inklusi Keuangan (%)							
TUJUAN PEMBANGUNAN 12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan				Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan								Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan							
35	Asia Power Index (Diplomatic Influence)	15.7	16	20	Jumlah Kerja Sama Provinsi Kembar/Bersa udara (Sister Province)	N/A	20	20	21	21	22	22	Jumlah Kerja Sama Provinsi Kembar/Bersa udara (Sister Province)							
36	Asia Power Index (Military Capability)	65.6	65.7	66.1	Indeks Kepemimpina n Kepala Daerah	N/A	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	92.00	Indeks Kepemimpina n Kepala Daerah							
MISI 5	KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI								KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI							
TUJUAN PEMBANGUNAN 13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju				Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju								Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju							
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57.13 (2023)	58.39	60.7	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	N/A	55.44 - 55.48	55.48- 55.50	55.50- 56.50	56.50- 57.56	57.56 - 57.67	57.67- 58.00	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	N/A	45.00- 55.00	46.84- 55.97	48.76- 56.95	50.76- 57.95	52.84- 58.96	55.00- 60,00
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76.47	76.77	78.2 5	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	80,88	81.17	81.20	81.50	81.70	82.62	82.82	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	N/A	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
TUJUAN PEMBANGUNAN 14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan				Keluarga Berkualitas, Kesetaraan								Keluarga Berkualitas, Kesetaraan							



MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN	RPJMN	BASELINE	TARGET		RPJMD PROVINSI	BASELINE	TARGET 2025-2030						RPJMD KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025- 2045	BASELINE	TARGET 2025-2030					
	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2029	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Gender, dan Masyarakat Inklusif				Gender, dan Masyarakat Inklusif								Gender, dan Masyarakat Inklusif							
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69.51 (2023)	72.89	75.55	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga /Ibangga	69,79	71.04	71.96	72.66	73.22	73.67	74.4	Indeks Peningkatan Kualitas Keluarga (Poin)	59,17	60,6	61,9	63,2	64,4	65,5	66,6
40.a	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.447 (2023)	0.43	0.394	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,399	0.41	0.421	0.390	0.380	0.370	0.360	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,335	0,332	0,329	0,326	0,323	0,32	0,317
TUJUAN PEMBANGUNAN 15	Lingkungan Hidup Berkualitas				Lingkungan Hidup Berkualitas								Lingkungan Hidup Berkualitas							
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0.35 (2020)	0.44	0.55	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	N/A	0.562	0.567	0.572	0.576	0.581	0.585	Meningkatnya Pengeglolaan Keanekaragaman Hayati	NA	NA	95,5	100	100	100	100
42.a.i.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	88.67 (2023)c	78.53	79.49	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,96	77.2	77.37	77.54	77.7	77.87	78.04	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	94,75	82,80	83	83,20	83,40	83,60	83,80
42.a.ii.	Indeks Kualitas Air (IKA)	54.59 (2023)	72.02	72.77										70	74,16	74,36	74,56	74,76	74,96	75,112
42.a.iii.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	61.79	77.97	78.19										76,89	82,61	82,68	82,75	82,82	82,89	82,96
42.a.iv.	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	78.84	81.02	81.22										N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
42.b	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	10.21 (2023)	12.5	30	RT dengan Akses Sanitasi Aman	85,73	10	11.25	12.50	13.75	15	15.50	RT dengan Akses Sanitasi Aman	11	12	13	14	15	16	17
42.c.1	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15 (13 terdaur ulang) (2022)	24 (16 terdaur ulang)	38 (20 terdaur ulang)	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	N/A	16	19.00	22.00	25.00	28	30.40	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	N/A	35	37,4	39,96	42,7	45,62	48,75
42.c.2	-				Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan	N/A	33	49.75	66.50	83.25	100	100	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan	N/A	26	26,2	26,4	26,6	26,8	27



MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN	RPJMN	BASELINE	TARGET		RPJMD PROVINSI	BASELINE	TARGET 2025-2030						RPJMD KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025- 2045	BASELINE	TARGET 2025-2030					
	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2029	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					Sampah (% RT)								Sampah (% RT)							
TUJUAN PEMBANGUNAN 16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan				Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan								Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan							
43.i.1	Indeks Ketahanan Energi	6.64	6.77	6.95	Konsumsi listrik per kapita	843,25	914.9	947.86	979.89	1.013.36	1047.16	1.077.96	Konsumsi listrik per kapita	1.411,00	1.666, 91	1.876, 22	2.112, 42	2.377, 47	2.676, 56	3.013, 01
43.i.2	-				Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)	N/A	170.57	163.22	155.87	148.52	141.175	135.30	Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)							
43.ii.	Prevalensi ketidakcukupan pangan (%) / Indeks Ketahanan Pangan	71.2 (a)	73.2	82	Prevalansi ketidacukup an konsumsi pangan (Prevalence of Undermourish ment) (%)	7,54	7.2	6.87	6.56	6.26	5.98	5.71	Prevalansi ketidacukup an konsumsi pangan (Prevalence of Undernourish ment) (%)	6,64	6,59	6,54	6,49	6,44	6,39	6,34
43.iii.1	Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)	59.59	59.31	63.5 4	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	N/A	0.64	0.66	0.68	0.71	0.75	0.80	Kapasitas Air Baku (m3/detik)							
43.iii.2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air	24 (2020)	39.2	51.3 6	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan	N/A	40.95	43.96	46.98	49.99	53	55.41	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Aman	34,28	35,28	36,28	37,28	38,28	39,28	40,28
	Siap Minum Perpipaan (%)																			
					Indeks Kinerja Sistem Irigasi	N/A	57.47	59.47	61.47	64.47	67.47	70.47	Indeks Kinerja Sistem Irigasi							
TUJUAN PEMBANGUNAN 17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim								Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim							
44	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0.140 (2022)	0.137	0.13 5	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	139,84	139.74	139.64	139.54	139.44	139.34	139.24	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	115,33	114,4 1	113,4 9	112,5 7	111,6 5	110,7 3	109,8 1



MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN	RPJMN	BASLINE	TARGET		RPJMD PROVINSI	BASLINE	TARGET 2025-2030						RPJMD KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025- 2045	BASLINE	TARGET 2025-2030					
	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2029	TAHUN 2025- 2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
45.a	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif (%)	17.2 (2023)	18.37	21.1 2	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	N/A	10.06	10.78	11.49	12.21	12.92	13.49	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton Co2 eq)							
45.b	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan (%)	23.48 (2023)	26.67	30.1 1	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	N/A	19.04	20.63	22.21	23.80	25.38	26.65	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	N/A	213,0 96	243,4 96	279,9 25	322,1 89	364,0 25	411,7 46



4.2.2. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Utara

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan capaian atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang diukur melalui seperangkat indikator yang sistematis dan terstandar. Pengukuran kinerja ini terdiri dari dua komponen utama: Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merepresentasikan outcome dan impact dari kebijakan strategis daerah, serta Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang mencerminkan capaian kinerja pada tingkat output dari program dan kegiatan yang dilaksanakan. Kedua sistem pengukuran ini bekerja secara komplementer untuk memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

IKU berfokus pada hasil akhir yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Sementara IKD lebih bersifat teknis-operasional, mengukur keluaran langsung dari program seperti tingkat penyerapan anggaran, ketepatan waktu penyelesaian kegiatan, dan kualitas layanan publik. Sistem pengukuran ini diintegrasikan dalam aplikasi e-performance yang memungkinkan monitoring dan evaluasi secara real-time, mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Hasil pengukuran kinerja menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan, peningkatan efisiensi alokasi sumber daya, dan penentuan kebijakan insentif bagi OPD yang berkinerja baik, serta bahan pertimbangan utama dalam penyusunan RPJMD periode berikutnya. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Utara pada RPJMD Tahun 2025-2029 yang diukur dari Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada table berikut ini:



Tabel 4.7. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2030

No	Indikator	2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PDRB Per Kapita (Rp juta)	34,49	33,31-35,31	34,89-36,98	36,55-38,73	38,28-40,57	40,10-42,49	42,00-44,50
2	PDRB Sektor Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan ADHB (Rp Miliar)	5.058,48	5.465,00	5.872,00	6.279,00	6.686,00	7.093,00	7.500,00
3	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	77,48	78,64-80,85	78,55-81,04	78,47-81,23	78,38-81,42	78,30-81,62	78,21-81,81
4	Indeks Infrastruktur (Poin)	60,82	61,6	62,1	62,6	63,1	63,6	64,1
5	Cakupan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Yang Diterapkan (%)	n/a	100	100	100	100	100	100
6	Indeks Peningkatan Kualitas Keluarga	59,17	60,6	61,9	63,2	64,4	65,5	66,6
7	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)	N/A	45.00-55.00	46.84-55.97	48.76-56.95	50.76-57.95	52.84-58.96	55,00-60,00
8	Pertumbuhan kunjungan wisatawan (%)	10	10	15	20	25	30	35
9	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	B (58,88)	B (60,00)	B (63,55)	B (67,32)	BB (71,30)	BB (75,53)	BB (80,00)
10	Indeks Reformasi Hukum (poin)	87,17	88,05	88,92	89,75	90,66	91,53	92,41
11	Persentase Desa Mandiri (%)	0	0,415	0,83	1,24	1,66	2,07	2,49
12	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton Co2/Eq)	N/A	213.096	243.496	279.925	322.189	364.025	411.746



4.3. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran atau alat yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di suatu daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Indikator Kinerja Daerah terdiri dari :

1. Aspek Geografi dan Demografi ;
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
3. Aspek Daya Saing Daerah;
4. Aspek Pelayanan Umum, dan
5. Indikator Kinerja Kunci dari seluruh urusan pemerintahan.

Indikator Kinerja Kunci Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :



Tabel 4.8. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2030

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Aspek Geografi dan Demografi							
1	Indeks Ketahanan Pangan (Poin)	78,14	78,64	79,14	79,69	80,29	80,89	81,53
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	6,64	6,59	6,54	6,49	6,44	6,39	6,34
3	Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh/Kapita)	1.411,00	1.666,91	1.876,22	2.112,42	2.377,47	2.676,56	3.013,01
4	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (%)	34,28	35,28	36,28	37,28	38,28	39,28	40,28
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	81,35	79,51	79,68	79,85	80,02	80,20	80,25
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	11	12	13	14	15	16	17
7	Indeks Risiko Bencana (Poin)	115,33	114,41	113,49	112,57	111,65	110,73	109,81
8	Indeks Ketahanan Daerah (Poin)	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,4	0,41
9	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	N/A	35	37,4	39,96	42,7	45,62	48,75



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(%)							
10	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	N/A	26	26,2	26,4	26,6	26,8	27
11	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,2	1,18	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
II	Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,7	4,88-5,04	4,90-5,47	4,93-5,92	4,95-6,40	4,98-6,93	5,0-7,5
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	8,21	8.21-8.00	8.00-7.80	7.80-7.60	7.60-7.40	7.40-7.20	7.20-7.00
3	PDRB Per Kapita (Rp juta)	34,49	33,31-35,31	34,89-36,98	36,55-38,73	38,28-40,57	40,10-42,49	42,00-44,50
4	Gini Ratio (Poin)	0,242	0,23	0,219	0,209	0,199	0,189	0,18
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,21	1,20-1,15	1,15-1,10	1,10-1,05	1,05-1,00	1,00-0,95	0,95-0,85
6	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	77,48	78,64-80,85	78,55-81,04	78,47-81,23	78,38-81,42	78,30-81,62	78,21-81,81
7	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,36	74.36-74.43	74.43-74.56	74.56-75.01	75.01-75.31	75.31-75.98	75.98-76.10
8	Prevalensi stunting (%)	32,5	30,4	26,3	22,2	18,1	14,2	14
9	Insidensi Tuberkulosis	274	392	333	284	250	223	203



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,31	10,39-10,74	10,46-10,84	10,53-10,94	10,60-11,04	10,67-11,15	10,74-11,25
11	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,74	13,83-14,03	13,87-14,11	13,91-14,19	13,95-14,27	13,99-14,35	14,03-14,43
12	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Poin)	30,11	35	40	45	50	55	60
13	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	97,02	98,61	98,65	98,68	98,71	98,74	98,79
14	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	11,99	18,00-20,50	18,47-21,33	18,96-22,19	19,46-23,09	19,97-24,03	20,50-25,00
15	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)	N/A	45,00-55,00	46,84-55,97	48,76-56,95	50,76-57,95	52,84-58,96	55,00-60,00
16	Indeks Perlindungan Anak (Poin)	59,21	61,11	63,21	65,31	67,42	69,53	71,65
17	Indeks Peningkatan Kualitas Keluarga (Poin)	59,17	60,6	61,9	63,2	64,4	65,5	66,6
18	Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)	59,17	60-65	61,88-66,89	63,82-68,83	65,81-70,83	67,87-72,88	70-75
19	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	97,69	97,75	97,81	97,87	97,93	97,99	98,05



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Indeks Ketimpangan Gender (Poin)	0,335	0,332	0,329	0,326	0,323	0,32	0,317
III	Aspek Daya Saing Daerah							
1	Angka Ketergantungan (Per 100 Penduduk)	56,92	56,78	56,45	56,22	56,07	56,02	56,07
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp juta/kapita)	35,71	36,01	36,32	36,53	36,72	36,93	37,24
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	2,18	2,31-2,35	2,32-2,43	2,33-2,63	2,33-2,78	2,34-2,94	2,35-3,11
4	Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (%)	2,46	2,35-2,48	2,37-2,50	2,39-2,54	2,41-2,59	2,43-2,64	2,45-2,69
5	Rasio PDRB Sektor Perdagangan (%)	16,29	16,44	16,6	16,76	16,92	17,09	17,25
6	Rasio Kewirausahaan (%)	11,7	12	20,69	35,69	61,54	106,12	183
7	Indeks Akses Keuangan Daerah (Poin)	4,5	4,53	4,55	4,56	4,58	4,59	4,6
8	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (ADHB)	0,24	0,4	0,66	1,1	1,82	3,01	5
9	Total Kredit/PDRB ADHB	0,35	0,56	0,9	1,45	2,33	3,74	6



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(%)							
10	Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan (Rp Miliar)	47,12	55,06	64,35	75,2	87,87	102,69	120
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	83,69	85,84	87,99	90,14	92,29	94,44	96,59
12	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	34,41	56.96-58.95	56,33-60,86	55,7-62,83	55,08-64,86	54;47-66;96	56,77-68,45
13	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton Co2 eq)	N/A	213,096	243,496	279,925	322,189	364,025	411,746
14	Indeks Masyarakat Digital (Poin)	41,97	45	46,84	48,76	50,76	52,84	55
15	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (%)	32,18	31-30	30.8-27.66	30.6-25.51	30.4-23.52	30.2-21.69	30-20
16	Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%)	-	42	43,49	45,03	46,63	48,29	50
17	Indeks Infrastruktur (Poin)	60,82	61,6	62,1	62,6	63,1	63,6	64,1
18	Indek Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	N/A	51	51,02	51,04	51,06	51,08	51,1
19	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian	87,15	87,65	88,15	88,65	89,15	89,65	90,15



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)							
20	Persentase Desa Mandiri (%)	0	0,41	0,83	1,24	1,66	2,07	2,49
21	Rasio Pajak terhadap PDRB (%)	2,45	0,37	0,39	0,4	0,42	0,44	0,46
22	Inflasi (%)	2,46	3,00-1,00	3,00-1,01	3,00-1,02	3,00-1,03	3,00-1,04	3,00-1,05
IV	Aspek Pelayanan Umum							
A	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif							
1	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	B (58,88)	B (60,00)	B (63,55)	B (67,32)	BB (71,30)	BB (75,53)	BB (80,00)
2	Indeks SPBE	2,85	2,86	2,87	2,88	2,89	2,90	2,91
3	Indeks Pelayanan Publik	3,47	3,55	3,62	3,69	3,76	3,83	3,90
4	Indeks Integritas Nasional	68,64	71,19	72,95	74,75	76,6	78,5	80,44
5	Indeks Sistem Merit	147	220	250	280	310	340	370
B	Hukum Berkeadilan Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial							
1	Persentase Penegakan Perda (%)	100	100	100	100	100	100	100
2	Indeks Penyelenggaraan	N/A	80	81,91	83,86	85,86	87,9	90



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Trantibumlinmas (Poin)							
C	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan							
1	Indeks Daya Saing Daerah (Poin)	3,55	3,6	3,64	3,68	3,72	3,76	3,8
	Indikator Kinerja Kunci							
A	Pendidikan							
1	Kemampuan Literasi SD	58,39	69,69	70,79	71,89	72,99	74,09	75,19
2	Kemampuan Literasi SMP	68,59	60,89	63,39	65,89	68,39	70,89	73,39
3	Kemampuan Numerasi SD	54,18	63,17	64,67	66,17	67,67	69,17	70,67
4	Kemampuan Numerasi SMP	61,67	57,08	59,98	62,88	65,78	68,68	71,58
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6	79,17	82,21	85,18	88,15	91,12	93,67	96,22
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	99,43	99,58	99,74	99,9	100	100	100
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	17,14	21,13	25,11	29,09	33,08	37,06	41,04
8	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terekditasi Minimal B	19,87	21,88	24,55	27,57	30,7	33,74	36,3



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	59,29	63,83	64,58	65,33	66,08	66,83	67,58
10	Iklim Inklusivitas SD	58,89	61,39	63,89	66,39	68,89	71,39	73,89
11	Iklim Inklusivitas SMP	57,63	60,03	62,43	64,83	67,23	69,63	72,03
12	Iklim Keamanan SD	74,1	75	75,9	76,8	77,7	78,6	79,5
13	Iklim Keamanan SMP	70,6	72,1	73,6	75,1	76,6	78,1	79,6
14	Iklim Kebinekaan SD	71,14	72,89	73,89	74,89	75,89	76,89	77,89
15	Iklim Kebinekaan SMP	71,89	72,14	73,14	74,14	75,14	76,14	77,14
16	Indeks pemerataan guru							
17	TK	0	0,22	0,2	0,15	0,15	0,1	0
18	SD	0	0,42	0,4	0,35	0,34	0,33	0,31
19	SMP	0	0,29	0,26	0,2	0,16	0,11	0,06
20	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidikan	41,49	41,61	45,54	49,39	53,24	57,08	61,3
21	Persentase Buku Teks Utama Bahasa dan Sastra daerah sesuai kurikulum Muatan Lokal	27,43	34,51	48,89	63,27	77,65	92,03	100
B	Kesehatan							



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angka Kematian Ibu (Kasus)	1	5	4	3	2	1	1
2	AKB	5,7	5,5	5	4,7	4,4	4,2	3,9
3	Angka Kesakitan	19,41	7,13	7,1	7,08	7,05	7,02	7,01
4	Insidensi TBC	274	392	333	284	250	223	203
5	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100	100	100	100	100
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKU)	89,51	90	91	92	93	94	95
7	Laporan kinerja administrasi dan keuangan BLUD	-	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 (sembilan) jenis Tenaga Kesehatan	9,52	9,52	14,29	23,81	28,57	38,09	42,86
9	Persentase minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	100	100	100	100	100	100	100
10	Total Rate (Angka Kelahiran Total)	3798	3866	3943	4021	4101	4183	4266
11	Jumlah Kematian Ibu	1	5	4	3	2	1	1



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Jumlah Kematian Balita	15	22	20	18	15	13	10
13	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	0	40%	60%	70%	80%	90%	90%
14	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	97,7	100	100	100	100	100	100
15	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Kesehatan Sesuai Standar	11,1	100	100	100	100	100	100
16	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90	90	90	90	90	90	90
17	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	142,1	90	90	90	90	90	90
18	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yang cukup	0	65	67,5	70	72,5	75	80
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik (%)	30	35	37,59	40,37	43,35	46,56	50



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik (%)	51,12	75	76,9	78,85	80,85	82,9	85
3	Persentase Kesesuaian Penataan dan Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW (%)	70	80	83,65	87,47	91,46	95,64	100
4	Persentase Kecamatan yang Memiliki RDTR (%)	20	30	33,23	36,8	40,76	45,14	50
5	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Aman (%)	34,28	35,28	36,28	37,28	38,28	39,28	40,28
6	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi Aman (%)	11	12	13	14	15	16	17
7	Persentase Luas Layanan Irigasi	51,12	51,12	52	53,4	54,8	56	57,5
8	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Aman	34,28	35,28	36,28	37,28	38,28	39,28	40,28
9	Persentase Drainase Lingkungan dalam Kondisi	77,2	80	82	84	86	88	90



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Baik							
10	Persentase Kesesuaian Bangunan Gedung Pemerintah dengan NSPK	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Jalan yang Ditangani	2,23	2,23	2,63	3,03	3,43	3,83	4,23
12	Persentase Jembatan yang Ditangani	0,55	0,55	0,95	1,35	1,75	2,15	2,55
13	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat Keterampilan/Keahlian	N/A	N/A	1	1	1	1	1
15	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kabupaten	N/A	65	70	75	80	85	90
D	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
1	Persentase Rumah Layak Huni (%)	88,47	88,97	89,47	89,97	90,47	90,97	91
2	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh (%)	6,94	5,94	5,54	5,14	4,74	4,34	3,94



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Persentase Rumah Layak Huni bagi Warga Negara Korban Bencana	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase rumah tidak layak huni	88,47	88,97	89,47	89,97	90,47	90,97	91
5	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	6,94	5,94	5,54	5,14	4,74	4,34	3,94
6	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	88,04	88,5	89	89,5	90	90,5	91
E	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	N/A	100	100	100	100	100	100
2	Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	N/A	70	75,18	80,73	86,7	93,11	100
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah	N/A	100	100	100	100	100	100



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)							
4	Persentase Penanganan Gangguan Tibumtranmas	1,21	1,20-1,15	1,15-1,10	1,10-1,05	1,05-1,00	1,00-0,95	0,95-0,85
5	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	77,48	78,64-80,85	78,55-81,04	78,47-81,23	78,38-81,42	78,30-81,62	78,21-81,81
6	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	74,36	74.36-74.43	74.43-74.56	74.56-75.01	75.01-75.31	75.31-75.98	75.98-76.10
7	Persentase Pelatihan Informasi Rawan Bencana	95,6	16,47	20	22	24	25	26
8	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	92,46	2,73	4	6	8	10	12
9	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	92,5	93	94	95	96	97
10	Persentase Penanganan Pasca Bencana	N/A	52	55	58	60	62	63
11	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan	30,11	35	40	45	50	55	60



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kebakaran							
12	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	97,95	98,61	98,65	98,68	98,71	98,74	98,79
F	Sosial							
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	NA	100	100	100	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	NA	100	100	100	100	100	100
G	Tenaga Kerja							



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (%)	0,07	0,1	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15
2	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Kabupaten (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1
3	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya (%)	80,13	82,53	84,93	87,33	89,73	92,13	94,53
4	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (%)	0	0,5	1	1,25	1,5	1,75	2
5	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial (Orang)	169	174	179	184	189	194	199
H	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase Anggaran Responsif	0	20	25,71	31,43	37,14	42,86	48,57



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gender (ARG)							
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK)	55,42	55,43	55,44	55,45	55,46	55,47	55,48
3	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai Standar	1	1	1	1	1	1	1
4	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	64,11	65,61	67,11	68,61	70,11	71,61	73,11
I	Pangan							
1	Skor Pola Pangan Harapan (Poin)	89,8	90,3	90,8	91,3	91,8	92,3	92,8
2	Ketersediaan Beras (ton)	102.907,89	95,118	95,213	95,308	95,403	95,498	95,593
3	Kebutuhan Beras Per Kapita (kg/kapita)	105,85	91	91,91	92,83	93,76	94,69	95,64
4	Total Kebutuhan Konsumsi Beras (ton)	34.612,21	30.107,90	30.751,25	31.408,75	32.080,45	32.763,40	33.464,63
5	Produksi Daging (ton)	889,75	894,25	898,75	903,25	907,75	912,25	916,75
6	Konsumsi Daging Per Kapita	8,5	10,5	13,5	15,5	17,5	21	22,5



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(kg/kapita)							
7	Total Kebutuhan Konsumsi Daging (ton)	2.779,44	3.473,99	4.516,83	5.244,38	5.987,71	7.266,15	7.872,80
8	Produksi Susu (L)	381,48	382,624	383,771	384,992	386,146	387,304	388,465
9	Kebutuhan Konsumsi Susu Per Kapita (L/Kapita)	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
10	Total Kebutuhan Konsumsi Susu (L)	457.790,00	463.198,40	468.412,00	473.685,80	479.017,00	484.409,80	489.862,80
11	Produksi Telur (kg)	672.739,00	673,411	674,084	674,578	675,432	676,107	676,783
12	Kebutuhan Konsumsi Telur Per Kapita (kg/kapita)	12,41	12,91	13,41	13,91	14,41	14,91	15,41
13	Total Kebutuhan Konsumsi Telur (kg)	4.057.983,00	4.271.350,96	4.486.717,80	4.706.406,77	4.930.453,55	5.158.964,37	5.391.989,82
14	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	45,85	47,08	52,08	58,08	65,08	73,08	82,08
15	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	8,33	7,54	6,75	5,95	5,16	4,37	3,57
16	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	16,67	16,67	20,83	25	29,17	33,33	37,5



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
J	Lingkungan Hidup							
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Poin)	76,89	82,61	82,68	82,75	82,82	82,89	82,96
2	Indeks Kualitas Udara (Poin)	94,75	82,80	83,00	83,20	83,40	83,60	83,80
3	Indeks Kualitas Air (Poin)	70	74,16	74,36	74,56	74,76	74,96	75,12
4	Energi Baru Terbarukan (EBT) (Nilai/MW)	32,2	42,2	52,2	72,2	82,2	92,2	92,2
5	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	N/A	96	96	96,5	96,8	97	97,2
6	Persentase Usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara limbah b3	98,33	98,34	98,35	98,36	98,37	98,38	98,39
7	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha terhadap Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	94,82	94,83	94,84	94,85	94,86	94,87	94,88



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Persentase MHA yang Difasilitasi	N/A	95	95,5	96	96,5	97	97,5
9	Persentase Peningkatan SDM, Lembaga Masyarakat, dan Lembaga Pendidikan yang mengikuti Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	68,12	68,13	63,14	63,15	63,16	63,17	63,18
10	Persentase Pengaduan KAsus Lingkungan Hidup yang terselesaikan	96,79	96,79	96,80	96,81	96,82	96,83	96,84
11	Persentase Sampah yang diangkut	98,15	98,20	98,21	98,22	98,23	98,24	98,25
12	Meningkatnya Pengegloalaan Keanekaragaman Hayati	NA	95	95,5	100	100	100	100
K	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Persentase Cakupan Kepemilikan KTP-el	99,89	99	99	99	99	99	99
2	Persentase Cakupan	100	100	100	100	100	100	100



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Umur 0-18 Tahun							
L	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Indeks Desa (%)	0,6535	64	65	66	67	68	69
2	Jumlah desa sangat tertinggal	2	1	1	1	1	1	1
3	Jumlah desa tertinggal	33	30	25	20	14	9	4
4	Jumlah desa berkembang	179	174	166	153	142	131	121
5	Jumlah desa maju	27	35	47	64	80	95	109
6	Jumlah desa mandiri	0	1	2	3	4	5	6
7	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	N/A	N/A	39	46	50	51	53
8	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	31	44	50	56	69	81	100
9	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	25	27	68	27	32	27
10	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Fasilitasi	67	70	73	76	79	82	85



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemberdayaan Lembaga							
12	Persentase Fasilitas Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	n/a	33	37	41	50	58	66
M	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Total Fertility Rate (Rata-Rata Anak Per Wanita)	2,83	2,82	2,82	2,82	2,81	2,81	2,81
2	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	60,5	61,7	62,8	63,8	64,8	65,7	66,6
3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	64,5	66	67,4	68,7	69,8	70,8	71,8
4	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	17,2	15,8	14,7	13,7	12,8	12,1	11,4
5	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	59,19	61,19	63,19	65,19	67,19	69,19	71,19
6	Angka Kelahiran remaja umur	5	4,7	4,4	4,2	4	3,8	3,6



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)							
N	Perhubungan							
1	Persentase Kepemilikan Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan (%)	15,45	16	17	18	19	20	21
2	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%)	32,15	33	34	35	36	37	38
3	Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan yang Terpasang (%)	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14
4	Koordinasi Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (Kegiatan)	1	2	2	3	3	4	4
O	Komunikasi dan Informatika							
1	Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) (Nilai)	2,85	2,86	2,87	2,88	2,89	2,9	2,91
P	Pertanahan							



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Lahan untuk Kepentingan Umum	86,35	86,71	87,71	88,71	89,71	90,71	91,71
2	Persentase Mediasi Sengketa/konflik Tanah	100	100	100	100	100	100	100
Q	Koperasi dan UMKM							
1	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	10	10	10,5	10,75	11	11,5	12
2	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%)	–	6	6,36	6,73	7,13	7,55	8
3	Persentase Koperasi aktif (%)	25	25	25	25	30	35	40
4	Meningkatnya koperasi berkualitas	14,28	14,17	69,84	70,1	70,36	70,61	71,24
R	Penanaman Modal							
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN) (Perusahaan)	38	38	41	44	47	50	53
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA) (Perusahaan)	13	13	16	19	22	25	28



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	PMDN (Rp Miliar)	21	40	70	100	0	150	170
4	PMA (Rp Miliar)	332	410	430	450	480	500	530
5	Realisasi Total terhadap Target Investasi	82,34	86	88	90	91	92	93
6	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	47,23	15	15,50	16,00	16,50	17	18
7	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	25,4	28,2	31,4	35,12	39,28	43,4	47,62
8	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	50	57,14	64,29	70	75	80	87,50
9	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	75	80	82	84	86	88	90
S	Kepemudaan dan Olahraga							
1	Rasio Wirausaha Pemuda	3,84	4,36	4,56	5,15	5,69	6,28	8
2	Peningkatan prestasi olahraga	88	90	95	100	105	110	115



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina	69	74	79	84	89	94	99
4	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (IKU)	0,638	0,64	0,642	0,644	0,646	0,648	0,65
5	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (IKU)	3,84	3,85	3,87	3,9	3,94	3,99	4,05
6	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) (IKU)	0,351	0,375	0,399	0,423	0,447	0,471	0,495
T	Statistik							
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,62	2,62	2,65	2,65	2,68	2,68	2,71
U	Persandian							
1	Persentase aplikasi yang bersertifikasi (%)	5	5	5	5	5	5	5



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V	Kebudayaan							
1	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	11,5	12,39	13,27	14,16	15,04	15,93	16,81
2	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	13	14	15	16	17	18	19
3	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	5	6	7	8	9	10
W	Perpustakaan							
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	68,96	69,26	69,66	70,06	70,56	71,06	71,66
2	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	0	0	20	40	60	80	100
X	Kearsipan							
1	tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan	63,5	64,3	65,11	66,1	67,39	70,15	73,83



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pertanggungjawaban nasional							
2	Indeks Pengawasan Kearsipan	13,97	27,55	31,15	38,35	45,55	54,55	63,55
3	Tingkat Digitalisasi Arsip	10,71	17,14	22,29	26,74	33,1	42,01	50
Y	Pariwisata							
1	Jumlah Wisatawan (Orang)	191,061	210,000	220,000	230,000	240,000	250,000	260,000
2	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	15	15,67	15,87	15,9	16	16,37	16,5
3	Persentase Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%)	33	40	50	60	65	75	80
4	PAD Sektor Pariwisata (Rp Ribu)	343.030,00	500	600	700	800	900	1.000.000
5	Jumlah Promosi dan Publikasi Pariwisata	2	3	5	6	7	8	9
6	Destinasi Wisata yang Dikelola	3	3	3	3	3	3	3
7	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	15	15	17	20	30	32	33
8	Persentase Pelaku Ekonomi	4	4	4	4	4	4	4



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual							
9	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	38	50	50	60	65	75	80
Z	Kelautan dan Perikanan							
1	PDRB Sub-sektor Perikanan (Rp Miliar)	43,99	45,41	49,52	53,98	58,8	64,01	70,05
2	Produksi Ikan Tangkap (ton)	101,18	102	103	104	105	106	107
3	Produksi Ikan Budidaya (ton)	2.865,46	2.880,00	2.895,00	2.910,00	2.925,00	2.940,00	2.955,00
4	Persentase ketersediaan ikan sesuai kebutuhan	19,94	19,59	19,27	18,95	18,64	18,34	18,04
5	Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita)	45,5	46	46,5	47	47,5	48	48,5
6	Total kebutuhan ikan konsumsi (Ton)	14.878,19	15.219,38	15.557,97	15.902,31	16.252,36	16.608,34	16.970,25
7	Luasan Kawasan Perikanan yang Diawasi (Danau dan Sungai)	0	0	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AA	Pertanian							
1	PDRB Sub sektor Pertanian (Rp Miliar)	4.549,97	4.916,10	5.282,21	5.648,33	6.014,45	6.380,57	6.746,69
2	Padi Sawah							
	Produksi (Ton)	120.853,75	119.260,00	119.395,78	119.531,56	119.667,34	119.803,12	119.938,90
	Luas Panen (Ha)	22.932,40	22.629,98	22.629,98	22.629,98	22.629,98	22.629,98	22.629,98
	Produktivitas (Ton/Ha)	5,27	5,27	5,28	5,28	5,29	5,29	5,3
3	Padi Ladang							
	Produksi (Ton)	67.624,89	67.845,00	68.193,82	68.537,28	68.881,14	69.285,00	69.629,70
	Luas Panen (Ha)	22.754,00	22.828,00	22.930,00	23.030,00	23.130,00	23.250,00	23.350,00
	Produktivitas (Ton/Ha)	2,97	2,97	2,97	2,98	2,98	2,98	2,98
4	Jagung							
	Produksi (Ton)	141.545,78	141.617,00	142.503,68	143.420,74	144.256,90	145.123,82	146.017,08
	Luas Panen (Ha)	25.294,10	25.288,00	25.438,00	25.588,00	25.728,00	25.878,00	26.028,00
	Produktivitas (Ton/Ha)	5,6	5,6	5,6	5,61	5,61	5,61	5,61
5	Kacang Tanah							
	Produksi (Ton)	2.501,67	2.518,96	2.543,89	2.568,86	2.595,40	2.623,54	2.651,71
	Luas Panen (Ha)	1.611,90	1.622,00	1.637,00	1.652,00	1.668,00	1.685,00	1.702,00
	Produktivitas (Ton/Ha)	1,55	1,55	1,55	1,56	1,56	1,56	1,56



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Ubi Kayu							
	Produksi (Ton)	27.589,16	27.887,00	29.041,00	29.779,65	30.933,90	32.088,15	32.503,68
	Luas Panen (Ha)	762,3	770,51	802,37	822,76	854,62	886,49	897,94
	Produktivitas (Ton/Ha)	36,19	36,19	36,19	36,19	36,2	36,2	36,2
7	Ubi Jalar							
	Produksi (Ton)	10.006,89	10.883,00	11.545,00	12.097,10	12.759,35	13.134,63	13.468,10
	Luas Panen (Ha)	590,9	642,6	681,64	714,2	753,25	775,36	795
	Produktivitas (Ton/Ha)	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
8	Cabe Merah							
	Produksi (Ton)	8.500,23	8.504,84	8.509,46	8.513,52	8.516,46	8.518,85	8.522,36
	Luas Panen (Ha)	1.528,25	1.528,85	1.529,45	1.529,95	1.530,25	1.530,45	1.530,85
	Produktivitas (Ton/Ha)	5,56	5,56	5,56	5,56	5,57	5,57	5,57
9	Cabe Rawit							
	Produksi (Ton)	3.456,70	3.460,97	3.465,25	3.468,90	3.471,30	3.473,07	3.476,10
	Luas Panen (Ha)	552,35	552,95	553,55	554,05	554,35	554,55	554,95
	Produktivitas (Ton/Ha)	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26
10	Bawang Merah							
	Produksi (Ton)	2.503,02	2.510,97	2.518,92	2.525,61	2.529,77	2.532,68	2.538,11
	Luas Panen (Ha)	198,39	198,99	199,59	200,09	200,39	200,59	200,99
	Produktivitas (Ton/Ha)	12,62	12,62	12,62	12,62	12,62	12,63	12,63



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Durian							
	Produksi (Ton)	18.200,83	18.217,78	18.234,74	18.249,33	18.259,19	18.266,67	18.278,90
	Luas Panen (Ha)	767,89	768,49	769,09	769,59	769,89	770,09	770,49
	Produktivitas (Ton/Ha)	23,7	23,71	23,71	23,71	23,72	23,72	23,72
12	Alpukat							
	Produksi (Ton)	9.364,28	9.387,14	9.410,01	9.429,30	9.441,45	9.450,02	9.465,75
	Luas Panen (Ha)	261,91	262,51	263,11	263,61	263,91	264,11	264,51
	Produktivitas (Ton/Ha)	35,75	35,76	35,76	35,77	35,78	35,78	35,79
13	Nenas							
	Produksi (Ton)	170.371,28	170.495,14	170.619,04	170.726,58	170.801,36	170.859,77	170.950,98
	Luas Panen (Ha)	1.040,00	1.040,60	1.041,20	1.041,70	1.042,00	1.042,20	1.042,60
	Produktivitas (Ton/Ha)	163,82	163,84	163,87	163,89	163,92	163,94	163,97
14	Mangga							
	Produksi (Ton)	6.473,70	6.503,84	6.533,98	6.559,27	6.574,85	6.585,56	6.606,01
	Luas Panen (Ha)	133,3	133,8	134,4	134,9	135,2	135,4	135,8
	Produktivitas (Ton/Ha)	48,56	48,61	48,62	48,62	48,63	48,64	48,65
15	Kopi Arabika							
	Produksi (Ton)	15.998,96	16.780,04	17.560,53	18.165,87	18.794,12	19.444,61	20.144,30
	Luas Panen (Ha)	13.624,14	13.754,13	14.048,42	14.303,83	14.569,09	14.843,21	15.146,09
	Produktivitas (Ton/Ha)	1,17	1,22	1,25	1,27	1,29	1,31	1,33



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Kopi Robusta							
	Produksi (Ton)	564,03	624,08	680,96	738,64	804,89	864,69	925,89
	Luas Panen (Ha)	905,61	975,12	1.047,64	1.119,15	1.183,67	1.253,18	1.322,70
	Produktivitas (Ton/Ha)	0,62	0,64	0,65	0,66	0,68	0,69	0,7
17	Kakao							
	Produksi (Ton)	1.976,79	2.111,86	2.452,24	2.802,90	3.200,02	3.606,82	4.002,53
	Luas Panen (Ha)	2.728,84	2.853,86	3.226,63	3.593,46	4.000,03	4.398,56	4.764,92
	Produktivitas (Ton/Ha)	0,72	0,74	0,76	0,78	0,8	0,82	0,84
18	Tembakau							
	Produksi (Ton)	850,69	891,54	908,16	926,17	944,3	961,2	979,55
	Luas Panen (Ha)	670,01	702	704	707	710	712	715
	Produktivitas (Ton/Ha)	1,27	1,27	1,29	1,31	1,33	1,35	1,37
19	Kemenyan							
	Produksi (Ton)	3.857,15	3.984,87	4.084,60	4.185,07	4.286,29	4.388,25	4.490,96
	Luas Panen (Ha)	14.057,35	14.122,24	14.187,13	14.252,02	14.316,91	14.381,80	14.446,69
	Produktivitas (Ton/Ha)	0,27	0,28	0,29	0,29	0,3	0,31	0,31
20	Sapi							
	Populasi (Ekor)	787	811	831	851	871	891	911
	Produksi (Kg)	9.440,00	9.555,00	9.702,00	9.849,00	9.996,00	10.143,00	10.290,00
	Susu (Ton)	82,84	85,37	85,37	89,58	91,69	93,79	104,31



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Kerbau							
	Populasi (Ekor)	9.872,00	9.997,00	10.117,00	10.237,00	10.357,00	10.477,00	10.597,00
	Produksi (Kg)	118.464,00	118.657,00	118.818,00	118.979,00	119.140,00	119.301,00	119.462,00
22	Kuda							
	Populasi (Ekor)	105	107	109	111	113	115	117
	Produksi (Kg)	-	-	-	-	-	-	-
23	Kambing							
	Populasi (Ekor)	2.105,00	2.116,00	2.127,00	2.138,00	2.149,00	2.160,00	2.171,00
	Produksi (Kg)	1.010,00	1.039,00	1.066,00	1.093,00	1.120,00	1.147,00	1.174,00
24	Domba							
	Populasi (Ekor)	42	50	60	72	86	96	107
	Produksi (Kg)	-	-	-	-	-	-	-
25	Babi							
	Populasi (Ekor)	20.132,00	21.732,00	23.332,00	24.932,00	26.532,00	28.132,00	29.732,00
	Produksi (Kg)	386.534,00	387.030,00	387.660,00	388.290,00	388.920,00	389.550,00	390.180,00
26	Ayam							
	Populasi (Ekor)	524.353,00	531.353,00	538.353,00	545.353,00	552.353,00	559.353,00	566.353,00
	Produksi (Ton)	10.729,00	10.864,00	10.899,00	10.986,00	11.071,00	11.156,00	11.242,00
27	Itik							
	Populasi (Ekor)	63.940,00	64.260,00	64.580,00	64.900,00	65.220,00	65.540,00	65.860,00



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Produksi (Kg)	13.427,00	13.443,00	13.464,00	13.485,00	13.506,00	13.534,00	13.555,00
28	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	73,11	82,42	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00
AB	Perdagangan							
1	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)	76,65	77,78	80	80,5	80,7	82	83
AC	Perindustrian							
1	Pertumbuhan IKM (%)	2,09	0,57	0,85	1,14	1,43	1,71	2,002
AD	Transmigrasi							
1	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (%)	20	20	29	29	29	29	29
AE	Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan							
1	Dokumen RPJPD yang Ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Dokumen RPJMD yang	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ditetapkan dengan Perda/Perkada							
3	Dokumen RKPD yang Ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Dokumen RTRW yang Ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
AF	Keuangan							
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Poin)	N/A	80	81,91	83,86	85,86	87,9	90
2	Opini BPK (Level)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Persentase laporan keuangan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	9,29	10,95	10,98	11,14	11,51	11,88	12,3
AG	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan							
1	Indeks Sistem Merit	147	220	250	280	310	340	370
2	Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	81	83	85	87	89	91	92



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	68,83	100	100	100	100	100	100
4	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	11,35	100	100	100	100	100	100
5	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	63,5	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	55,5	62,64	69,78	76,92	84,06	91,2	98,34
8	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Pegawai dengan	100	100	100	100	100	100	100



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SKP Bernilai Baik							
10	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar. Manajerial dan Fungsional	0,02	0,12	3,31	3,42	3,64	3,42	3,19
11	Persentase Pelatihan dan Pendidikan yang Dilaksanakan	2,91	4,29	100	100	100	100	100
12	Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	79,65	81	82	83	84	85	86
13	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	0,52	0,66	3,94	5,25	5,58	5,91	6,23
AH	Pengawasan							
1	Indeks Persepsi Korupsi	37	36	36,77	37,55	38,35	39,17	40
2	Indeks Sistem Merit	N/A	200	250	270	290	300	324
3	Persentase Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai B	79,55	79,55	81,82	81,82	84,09	84,09	86,36
4	Persentase Penyelesaian Hasil	81,58	82,08	82,58	83,08	83,58	84,08	84,58



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemeriksaan BPK-RI dan APIP Lainnya yang ditindaklanjuti							
5	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,06	3,08	3,1	3,15	3,2	3,3	3,3
6	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3,1	3,15	3,2	3,25
AI	Sekretariat Daerah							
1	Nilai Evaluasi SAKIP (Poin)	63,14	65	66,89	68,83	70,83	72,88	75
2	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	N/A	N/A	80	100	100	100	100
3	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	N/A	N/A	80	100	100	100	100



BAB V

PENUTUP

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara disiapkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan di lingkungan wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Utara selama lima tahun ke depan, sejalan dengan amanat periodisasi penyelenggaraan RPJPD Tahap I. Dokumen RPJMD diperlukan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Strategis di setiap Organisasi Perangkat Daerah yang diharapkan memberikan kolaborasi dan kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara. Dokumen ini juga memberikan arahan bagi pemangku kepentingan untuk menjalankan peran dan fungsi masing-masing melalui kaidah pelaksanaan.

Demi memastikan terwujudnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan cita-cita masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, amanat pembangunan jangka panjang serta cita-cita Republik Indonesia, Dokumen RPJMD memberikan kaidah pelaksanaan yang memastikan konsistensi perencanaan dengan pendanaan, kerangka pengendalian serta mekanisme perubahan terhadap perencanaan daerah. Kaidah pelaksanaan ini diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih, fleksibel dan adaptif namun tetap berpegang teguh kepada cita-cita pembangunan daerah.

5.1.1. Konsistensi Perencanaan dengan Pendanaan

Demi menjamin konsistensi perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menyusun RPJMD 2025-2029 dengan berpedoman kepada arahan RPJMN 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029 serta amanat yang tertuang dalam RPJPD Tapanuli Utara 2025–2045. Dokumen RPJMD Tapanuli Utara 2025–2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya serta Rencana Strategis pada Organisasi Perangkat Daerah sehingga tercapai sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Pemerintah daerah telah mempersiapkan prioritas pembangunan agar dapat memberikan hasil cepat yang menjadi sasaran utama pembangunan daerah. Penyesuaian penganggaran untuk kegiatan pemerintahan dilakukan berdasarkan prioritas pembangunan.



5.1.2. Kerangka Pengendalian

Penyelenggaraan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara 2025 – 2029 menyertakan kerangka pengendalian yang akan diselenggarakan dalam jangka pendek. Hasil penyelenggaraan pembangunan daerah setiap tahunnya akan dievaluasi dan disampaikan kepada Kepala Daerah. Kerangka pengendalian di Kabupaten Tapanuli Utara dibagi menjadi dua bagian, yaitu (1) pengendalian perencanaan, dan (2) pengendalian pelaksanaan.

Pengendalian perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan serta menjadi ketercukupan alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan berbasis perencanaan daerah. Pengendalian pelaksanaan bertujuan untuk menjamin pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan sejalan dengan rencana dan memberikan hasil yang sesuai. Pengendalian dilakukan dengan dukungan tatanan regulasi sehingga tercapai sinergi dalam pemantauan, evaluasi, manajemen risiko serta manajemen kinerja pemerintah daerah. Sinergi dilakukan untuk mencapai konsistensi kinerja pemerintah bersama dengan organisasi perangkat daerah. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan pembangunan, maka pemerintah perlu segera mengambil kebijakan adaptif untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap sejalan dengan rencana pembangunan.

Demi memastikan kerangka pengendalian yang berjalan efektif, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mempersiapkan tahapan pengendalian yang dimulai dari audit kesiapan, pengembangan SDM serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan secara berkala. Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selain itu pemerintah juga mempersiapkan capacity building bagi ASN yang relevan dengan tata kelola serta manajemen risiko penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah juga mempersiapkan integrasi melalui data dan pelaporan yang terintegrasi sehingga setiap perangkat daerah memiliki protokol data yang jelas dan terstruktur.

5.1.3. Mekanisme Perubahan

Dokumen RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara dipersiapkan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah yang adaptif dengan memberikan ruang penyesuaian terhadap ketidakpastian yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah menyadari bahwa periode lima tahun penyelenggaraan pemerintahan memiliki risiko ketidakpastian yang besar yang tidak dapat dipastikan oleh pemerintah daerah. Rentang waktu lima tahun pembangunan memberikan potensi perubahan geopolitik, geoekonomi, faktor bencana serta faktor lainnya yang menjadikan pembangunan tidak seefektif sebagaimana direncanakan sehingga tahapan-tahapan yang telah dipersiapkan sebelumnya tidak memungkinkan untuk memberikan hasil pembangunan yang optimal. Dalam hal ini rencana capaian dalam RPJMD dapat dimutakhirkan berdasarkan evaluasi-evaluasi terhadap capaian dan penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya.



5.1.4. Transisi Pemerintahan

Demi memastikan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Tapanuli Utara, Dokumen RPJMD ini juga mengatur arahan pembangunan pada masa transisi kepemimpinan pembangunan daerah menuju penyelenggaraan periode RPJPD 2025-2045 tahap II. Dokumen RPJMD 2025-2029 memberikan pedoman yang menjadi fondasi dasar dalam menyelenggarakan masa transisi sebelum adanya RPJPD 2030 – 2034 di Kabupaten Tapanuli Utara. Penyelenggaraan pemerintahan disesuaikan dengan amanat RPJPD Kabupaten Tapanuli Utara yang selanjutnya akan disesuaikan oleh kepala daerah terpilih. Transisi kepemimpinan juga memerlukan Tindakan cepat untuk penyusunan rancangan awal RPJMD periode berikutnya dengan memberikan visi, misi serta program unggulan pembangunan yang selaras dengan RPJPD tahap II. Sembari menyesuaikan perencanaan daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan memedomani arah kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD ini.

5.2. Mitigasi Risiko Pembangunan

Demi mewujudkan pembangunan daerah yang mampu mencapai visi, misi, tujuan serta sasaran daerah dalam jangka menengah yang diselenggarakan selama lima tahun, pemerintah mempersiapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis manajemen risiko. Manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan berupaya mengidentifikasi potensi ketidakpastian dan melakukan pengelolaan sehingga tujuan dan sasaran pembangunan serta mampu daerah selama periode 2025 – 2029 dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini tahapan manajemen risiko diselenggarakan memedomani empat tahapan utama, meliputi:

1. Penetapan Rencana Pembangunan yang memberikan arah kebijakan serta target-target yang hendak dicapai selama periode pembangunan. Penetapan target-target pembangunan tersebut menjadi dasar dalam menentukan gap analysis berdasarkan kondisi saat ini sehingga diperoleh kesenjangan yang hendak dipenuhi selama periode pembangunan. Hal ini memberikan gambaran tujuan yang jelas yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Penilaian profil risiko Kabupaten Tapanuli Utara. Pemerintah perlu mengidentifikasi kemampuan diri dalam mengelola risiko dan menjadikan profil tersebut sebagai acuan dalam melakukan pengelolaan risiko. Profil risiko juga dilakukan sebagai dasar dalam penilaian risiko terhadap segala bentuk ketidakpastian yang akan mempengaruhi tujuan penyelenggaraan pemerintahan RPJMD 2025-2029. Dengan adanya penilaian peluang (likelihood) serta dampak jika tidak segera ditangani (severity) pemerintah dapat menyusun perencanaan pengelolaan risiko yang lebih baik.
3. Penyusunan rencana mitigasi. Pemerintah dengan profil risikonya menyesuaikan mana risiko yang dapat dikelola dan mana risiko yang harus dimitigasi. Rencana mitigasi dibuat sejalan dengan perencanaan sehingga pemerintah menjadi siap dan sigap dalam menghadapi ketidakpastian yang terjadi selama masa pemerintahan.



4. Tahapan akhir yang dilakukan dalam manajemen risiko adalah pengendalian dan pelaporan kegiatan. Pemerintah berupaya memastikan bahwa implementasi RPJMD sesuai dengan target yang hendak dicapai. Dalam hal ada ketidaksesuaian maka pemerintah dapat mengevaluasi ketidakpastian dan mengelolanya sehingga dapat mencapai target yang diharapkan.

5.3. Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025–2030 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang berfungsi sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, serta sebagai wujud sinkronisasi pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Penyusunan RPJMD ini telah dilakukan secara sistematis dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas dasar pendekatan *top-down dan bottom-up* yang terintegrasi, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor strategis, termasuk capaian pembangunan lima tahun sebelumnya, tantangan pembangunan ke depan, kondisi sosial ekonomi daerah, serta aspirasi masyarakat.

Visi pembangunan daerah yang dirumuskan, yaitu ***“Bersama Mewujudkan Kabupaten Tapanuli Utara yang Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan”***, telah diturunkan ke dalam misi pembangunan, tujuan, sasaran, indikator kinerja utama daerah, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan. Seluruh komponen tersebut difokuskan untuk mengatasi isu-isu strategis daerah, mempercepat pemulihan ekonomi, memperkuat daya saing lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian budaya dan lingkungan.

RPJMD ini juga menjadi dasar bagi penyusunan rencana strategis perangkat daerah (Renstra OPD), dokumen penganggaran (KUA-PPAS dan APBD), serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah lima tahun ke depan. Dengan RPJMD ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak secara sinergis, kolaboratif, dan adaptif dalam mencapai target pembangunan daerah secara berkelanjutan dan inklusif.

Dengan tersusunnya RPJMD ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, demi mewujudkan peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat Tapanuli Utara secara merata.

Tarutung, 19 Agustus 2025,

BUPATI TAPANULI UTARA,



IONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT



DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan *Pembangunan* Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421. (1)
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); Jakarta. (3)
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).
- Kementerian Dalam Negeri. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Dalam Negeri. (2024). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Daerah Tahun 2025*. Jakarta: Kemendagri.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 Tentang *Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029*. Jakarta : Kemendagri.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025- 2045* (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76).Medan.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 *tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037* (Lembar Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 Nomor 03).

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. (2024). *Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara*. Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 Nomor 03. Tarutung.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara. (2024). *Tapanuli Utara dalam Angka 2020-2024*. Tarutung: BPS Kabupaten Tapanuli Utara.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara. (2023). *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2029*.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. (2023). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024*. Tarutung: Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (2023). *Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tapanuli Utara 2024-2028*. Tarutung.